



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang dijabarkan ke dalam perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, diperlukan rencana pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2025-2029 yang menghasilkan sasaran dan arah kebijakan daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi, kebijakan dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

DOKUMEN RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran umum Daerah;
 - c. bab III berisi visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
 - d. bab IV berisi program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - e. bab V berisi penutup.
- (2) Ketentuan mengenai Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra PD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. bencana;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 terjadi perubahan capaian sasaran tahunan, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, dilakukan penyesuaian capaian sasaran tahunan dalam RKPD.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2030-2034 belum tersusun maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan lima tahun kedua yaitu Tahun 2030-2034, serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 20 Agustus 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

TOLKHA AMARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025 NOMOR 6 SERI E NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 6-144/2025



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil pembangunan di tingkat daerah secara adil dan merata, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi Bupati, maka sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjabarkan visi, misi, dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati untuk waktu 5 (lima) tahun. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mencakup kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dokumen RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai dasar perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 6/2025

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025-2029



Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo
Nomor 6 Tahun 2025 tentang
**Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)**
Tahun 2025-2029





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR NAMA PERANGKAT DAERAH xix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... 3

1.3. Hubungan antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Lainnya 5

1.4. Maksud dan Tujuan..... 9

1.5. Sistematika Penulisan 9

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 11

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 11

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 11

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 63

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah..... 110

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum 197

2.1.5. Kerjasama Daerah 241

2.1.6. Rencana Pembangunan Infrastruktur 243

2.1.7. Badan Usaha Milik Daerah 245

2.1.8. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi daerah terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan..... 246

2.2. Gambaran Keuangan Daerah..... 272

2.2.1. Realisasi APBD Tahun 2020-2024 273

2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029..... 308

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis..... 317

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah 317

2.3.2. Isu Strategis 335

**BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
..... 366**

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 366

3.1.1. Visi..... 366

3.1.2. Misi 367

3.1.3. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 371



3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas 374

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan 374

3.2.2. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Purworejo 415

3.2.3. Program-Program Prioritas Daerah 427

**BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 458**

4.1 Program Perangkat Daerah 458

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan
Dasar 496

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar..... 510

4.1.3. Unsur Pemerintah Pilihan..... 530

4.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 536

4.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan..... 538

4.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 544

4.1.7. Unsur Kewilayahan 546

4.1.8. Unsur Pemerintahan Umum 547

4.1.9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota 553

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 554

BAB V PENUTUP 597

5.1. Kesimpulan Penting Substansial..... 597

5.2. Kaidah Pelaksanaan serta Pengendalian dan Evaluasi 597

5.3. Pedoman Transisi 598

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Purworejo... 12

Tabel 2.2 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Purworejo 15

Tabel 2.3 Luasan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041
..... 16

Tabel 2. 4 Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 17

Tabel 2. 5 Dampak Bencana Alam di Kabupaten Purworejo Tahun 2020 - 2024..... 17

Tabel 2.6 Desa/Kelurahan Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Purworejo 18

Tabel 2. 7 Potensi Sumber Daya Batuan di Kabupaten Purworejo 22

Tabel 2. 8 Data DAS di Kabupaten Purworejo 23

Tabel 2. 9 Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung di Kabupaten Purworejo 23

Tabel 2. 10 Data Kawasan Mata Air di Kabupaten Purworejo 24

Tabel 2. 11 Luasan Hutan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Purworejo (Ha) 26

Tabel 2. 12 Status Daya Dukung Air Per Kecamatan di Kabupaten Purworejo.....27

Tabel 2. 13 Status Daya Dukung Pangan Per Kecamatan di Kabupaten Purworejo....29

Tabel 2.14. Indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 38

Tabel 2. 15 Analisis FSVA di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 39

Tabel 2. 16 Penanganan Desa Rawan/Rentan Pangan di Kabupaten Purworejo Tahun
2020-2024.....40

Tabel 2. 17 Perkembangan Skor PPH Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 42

Tabel 2. 18 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Purworejo.....43

Tabel 2. 19 Persentase Akses Air Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024....44

Tabel 2. 20 Persentase Akses Sanitasi Aman Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024
.....47

Tabel 2. 21 Capaian Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola dan Persentase
Timbulan Sampah yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten
Purworejo Tahun 2020-2024 48

Tabel 2. 22 Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2023 48

Tabel 2. 23 Jumlah *Early Warning System* (EWS) Banjir di Kabupaten Purworejo 51

Tabel 2. 24 Jumlah *Early Warning System* (EWS) Longsor di Kabupaten Purworejo...52

Tabel 2. 25 Jumlah *Early Warning System* (EWS) Tsunami di Kabupaten Purworejo .52

Tabel 2.26 Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 Berdasarkan
Sex Ratio 54

Tabel 2.27 Persentase Penduduk Menurut Usia di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-
2024.....55

Tabel 2.28 Distribusi Penduduk Kabupaten Purworejo 56

Tabel 2.29 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo 58

Tabel 2.30 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten
Purworejo 59



Tabel 2.31 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Purworejo.....61

Tabel 2.32 Garis Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2020-2024.....65

Tabel 2.33 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2020-2024.....66

Tabel 2.34 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2020-2024 67

Tabel 2. 35 Kasus Kematian Balita di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....72

Tabel 2. 36 Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....73

Tabel 2. 37 Prevalensi Gizi Buruk dan *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Berdasarkan E-PPGBM Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 74

Tabel 2. 38 Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 74

Tabel 2. 39 Jumlah Penderita Penyakit Menular di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....75

Tabel 2. 40 Kasus Malaria di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 77

Tabel 2. 41 Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....78

Tabel 2. 42 Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Succes Rate*) 78

Tabel 2. 43 Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....79

Tabel 2. 44 Cakupan Kepersertaan dan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 80

Tabel 2. 45 Sarana dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2024 80

Tabel 2. 46 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 83

Tabel 2. 47 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Purworejo Tahun 2020 – 2024 84

Tabel 2. 48 Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2024 85

Tabel 2. 49 Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2020 – 2024.....85

Tabel 2. 50 Kinerja Program Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024 86

Tabel 2. 51 Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024 87



Tabel 2. 52 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....88

Tabel 2. 53 Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....90

Tabel 2. 54 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo 92

Tabel 2. 55 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2020-2024 93

Tabel 2. 56 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani Tahun 2020-2024.....94

Tabel 2. 57 Data Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 96

Tabel 2. 58 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dikembangkan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 97

Tabel 2. 59 Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....98

Tabel 2. 60 Jumlah Kelompok Kesenian yang Ber-SKT dan Kesenian Aktif di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 99

Tabel 2. 61 Jumlah Pengunjung Museum Tosan Aji Tahun 2020-2024 100

Tabel 2.62 Angka iBangga Kabupaten Purworejo beserta Dimensinya Tahun 2022-2024 100

Tabel 2. 63 Indeks Ketimpangan Gender dan Komponen Penyusunnya.....102

Tabel 2. 64 Total *Fertility Rate* Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 106

Tabel 2. 65 *Demand Satisfied* Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 107

Tabel 2. 66 Prevalensi Kehamilan Tidak Direncanakan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....107

Tabel 2. 67 Jumlah Pemuda dan Atlet Berprestasi di Kabupaten Purworejo 109

Tabel 2. 68 Indikator Makro yang Terkait Kinerja Urusan Tenaga Kerja 111

Tabel 2. 69 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....111

Tabel 2.70 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....113

Tabel 2. 71 Laju dan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 114

Tabel 2. 72 Analisis Subsektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Purworejo Tahun 2012-2022 115

Tabel 2. 73 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....118

Tabel 2. 74 Produksi Perikanan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....119

Tabel 2. 75 Data Produksi Garam Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 121

Tabel 2. 76 Laju dan Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 121

Tabel 2. 77 Jumlah Industri dan Tenaga Kerja di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	122
Tabel 2. 78 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	123
Tabel 2. 79 Laju dan Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	124
Tabel 2. 80 Kunjungan Wisata di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	125
Tabel 2. 81 PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	125
Tabel 2. 82 Laju dan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	126
Tabel 2. 83 Disparitas Harga Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	128
Tabel 2. 84 Jumlah Pasar Daerah di Kabupaten Purworejo Tahun 2024	128
Tabel 2. 85 Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	129
Tabel 2. 86 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	130
Tabel 2. 87 Kondisi UMKM Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	131
Tabel 2. 88 Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	131
Tabel 2. 89 Capaian Kinerja Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	134
Tabel 2. 90 Serapan CO2 di Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Purworejo	136
Tabel 2. 91 Potensi Komoditas EBT di Kabupaten Purworejo	137
Tabel 2. 92 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	139
Tabel 2. 93 Data Wilayah <i>Blank Spot</i> di Kabupaten Purworejo.....	139
Tabel 2. 94 Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Purworejo	142
Tabel 2. 95 Capaian Indikator Urusan Statistika Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	145
Tabel 2. 96 Capaian Indikator Urusan Persandian Kabupaten Purworejo	147
Tabel 2. 97 PMTB Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	148
Tabel 2. 98 Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 ..	150
Tabel 2. 99 Nilai Ekspor di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	151
Tabel 2. 100 Kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	153
Tabel 2. 101 Panjang Jalan (Km) Berdasarkan Kewenangan Tahun 2020-2024.....	154
Tabel 2. 102 Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	155
Tabel 2. 103 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo.....	160



Tabel 2. 104 Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....160

Tabel 2. 105 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo.....162

Tabel 2. 106 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....164

Tabel 2.107 Rasio Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan RTBL yang Disusun di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 165

Tabel 2.108 Persentase Bangunan Milik daerah dengan Kondisi Baik di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 166

Tabel 2.109 Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 167

Tabel 2.110 Rasio Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 167

Tabel 2.111 Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi di Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024.....168

Tabel 2.112 Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024 168

Tabel 2.113 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....169

Tabel 2.114 Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Korban Bencana Kabupaten dan Relokasi Program Pemerintah di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....169

Tabel 2.115 Persentase Masyarakat yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 170

Tabel 2.116 Persentase Jumlah Rumah Susun, Rumah Khusus yang Terbina di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 170

Tabel 2.117 Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terbit yang Diajukan Pemohon di Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024 170

Tabel 2.118 Capaian SPM Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024 171

Tabel 2.119 Persentase Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....172

Tabel 2.120 Angka Backlog Rumah Tiap Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2024.....172

Tabel 2.121 Persentase Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 173

Tabel 2.122 Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Purworejo tahun 2024 174

Tabel 2.123 Luasan Kawasan Kumuh Berdasarkan SK No. 60.18/536/2020.....174

Tabel 2.124 Kawasan Kumuh Perkotaan Purworejo dan Kutoarjo.....175



Tabel 2.125 Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 176

Tabel 2.126 Rincian Intervensi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Per Kelurahan di Kabupaten Purworejo Tahun 2024 176

Tabel 2.127 Capaian Indikator Persentase Peningkatan Prasarana dan fasilitas LLAJ yang Tersedia di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024..... 178

Tabel 2.128 Ketersediaan Rambu Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024..... 180

Tabel 2.129 Ketersediaan Alat Pengaman Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024..... 180

Tabel 2.130 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal di Kabupaten Purworejo Tahun 2024 181

Tabel 2.131 Titik Parkir yang Terlayani di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 183

Tabel 2.132 Data Halte yang Layak Fungsi pada Setiap Prasarana Kabupaten yang Telah Dilayani Angkutan Umum di Kabupaten Purworejo 183

Tabel 2.133 Jumlah Angkutan Darat dan Penumpang Angkutan Darat di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 184

Tabel 2.134 Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024..... 185

Tabel 2.135 Daerah Irigasi Permukaan (DIP) Berdasarkan Kewenangan di Kabupaten Purworejo 186

Tabel 2.136 Daerah irigasi rawa (DIR) Kabupaten Purworejo 186

Tabel 2.137 Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024..... 188

Tabel 2.138 Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024..... 190

Tabel 2.139 Persentase Permohonan Izin Membuka Tanah Negara yang Disetujui di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2023 191

Tabel 2.140 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 194

Tabel 2.141 Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 195

Tabel 2.142 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024..... 195

Tabel 2.143 Nilai Perencanaan Kinerja Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024..... 199

Tabel 2.144 Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2020-2024 201

Tabel 2.145 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo 201

Tabel 2.146 Indeks Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2024..... 202

Tabel 2.147 Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Purworejo	204
Tabel 2.148 Ketetapan Waktu Penetapan APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2025.....	208
Tabel 2.149 Opini BPK Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	209
Tabel 2.150 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	211
Tabel 2.151 Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	212
Tabel 2.152 Capaian Kinerja Pengawasan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	213
Tabel 2.153 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 ...	217
Tabel 2.154 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	220
Tabel 2.155 Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	221
Tabel 2.156 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	222
Tabel 2.157 Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	223
Tabel 2.158 Capaian Kinerja Pembinaan Politik Daerah Tahun 2020-2024	230
Tabel 2.159 Perkembangan Jumlah Organisasi Masyarakat Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	230
Tabel 2.160 Capaian Kinerja Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	231
Tabel 2.161 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	231
Tabel 2.162 Indikator Kinerja Kunci pada Bidang Urusan	233
Tabel 2.163 Daftar Kerja Sama Daerah Kabupaten Purworejo	242
Tabel 2.164 Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworejo	245
Tabel 2.165 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Pemerintah Kabupaten Purworejo	247
Tabel 2.166 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purworejo	266
Tabel 2.167 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	275
Tabel 2.168 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	276
Tabel 2.169 Tren Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	278
Tabel 2.170 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	282
Tabel 2.171 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	286



Tabel 2.172 Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024.....289

Tabel 2.173 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 293

Tabel 2.174 Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 295

Tabel 2.175 Proporsi Realisasi Belanja per Kelompok Belanja Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....296

Tabel 2.176 Proporsi Realisasi Jenis Belanja per Jenis Belanja Terhadap Total Realisasi Belanja Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 296

Tabel 2.177. Realisasi Pembiayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....299

Tabel 2.178 Neraca Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 303

Tabel 2.179 Proporsi Neraca Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....304

Tabel 2.180 Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024306

Tabel 2.181 Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....307

Tabel 2.182 Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2030 ...309

Tabel 2.183 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang dan Permasalahan Kabupaten Purworejo 317

Tabel 2.184 Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Purworejo 318

Tabel 2.185 Permasalahan Pengembangan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Purworejo 325

Tabel 2.186 Permasalahan Kewilayahan, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur di Kabupaten Purworejo 327

Tabel 2.187 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Purworejo 331

Tabel 2.188 Tabulasi Silang (*Crosstab*) Isu Strategis Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.....349

Tabel 2.189 Tipologi Wilayah Kecamatan berdasarkan Ketimpangan Wilayah 357

Tabel 3.1 Penjelasan Makna Visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 366

Tabel 3.2 Persandingan Visi Kabupaten Purworejo dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah 367

Tabel 3.3 Keselarasan Antara Misi RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 dengan Misi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 368

Tabel 3.4 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 369

Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Purworejo 373

Tabel 3.6 Strategi dan Arah Kebijakan Sasaran 1 RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.....374

Tabel 3.7 Strategi dan Arah Kebijakan Sasaran 2 RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.....379

Tabel 3.8 Strategi dan Arah Kebijakan Sasaran 3 RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.....381

Tabel 3.9 Strategi dan Arah Kebijakan Sasaran 4 RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 382

Tabel 3.10 Strategi dan Arah Kebijakan Sasaran 5 RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.....386

Tabel 3.11 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.....413

Tabel 3.12 Program Prioritas Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.....428

Tabel 3.13 Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Pinter Bocahe 445

Tabel 3.14 Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Religius Masyarakat 446

Tabel 3.15 Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Sehat Penduduke.....446

Tabel 3.16 Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Sejahtera Wargane.....447

Tabel 3.17 Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Alus Danlane 448

Tabel 3.18 Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Rame Pasare 449

Tabel 3.19 Kegiatan Unggulan Program Ayam Petanine 450

Tabel 3.20 Dukungan 35 Program Delegasi 450

Tabel 3.21 Dukungan Program Strategis Nasional 455

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo 459

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Purworejo 555

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah.....556

Tabel 4.4 Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Purworejo 582

Tabel 4.5 Target Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Purworejo 585

Tabel 4.6 Daftar Keselarasan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional.....591

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Hubungan RPJMD dengan Dokumen Lainnya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran.....8

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Purworejo..... 11

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Purworejo 12

Gambar 2.3 Peta Kelerengan Kabupaten Purworejo 13

Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kabupaten Purworejo 15

Gambar 2.5 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Purworejo 16

Gambar 2.6 Peta Tanah Longsor Kabupaten Purworejo 19

Gambar 2.7 Peta Bencana Banjir Kabupaten Purworejo 19

Gambar 2.8 Peta Gelombang Pasang dan Tsunami Kabupaten Purworejo 20

Gambar 2.9 Peta Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Purworejo..... 21

Gambar 2.10 Peta Geologi Kabupaten Purworejo 22

Gambar 2.11 Peta Zona Cekungan Air Tanah Kebumen-Purworejo 26

Gambar 2.12 Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Purworejo 28

Gambar 2.13 Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Purworejo 29

Gambar 2.14 Persentase Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kab. Purworejo... 30

Gambar 2.15 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Kabupaten Purworejo.. 31

Gambar 2.16 Persentase Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten Purworejo 32

Gambar 2.17 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Kabupaten Purworejo..... 32

Gambar 2.18 Persentase Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Kab. Purworejo 33

Gambar 2.19 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim Kabupaten Purworejo 34

Gambar 2.20 Persentase Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Tata Air Kab. Purworejo.. 34

Gambar 2.21 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Aliran Air Kabupaten Purworejo 35

Gambar 2.22 Kelas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Purworejo 36

Gambar 2.23 Peta Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Bencana Longsor Kab. Purworejo 36

Gambar 2.24 Diagram Kelas JLH Pegatur Mitigasi Bencana Banjir di Kab. Purworejo 37

Gambar 2.25 Peta Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Bencana Banjir Kab. Purworejo. 37

Gambar 2.26 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 38

Gambar 2.27 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Purworejo Tahun 2024..... 39

Gambar 2.28 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024..... 41

Gambar 2.29 Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	41
Gambar 2.30 IKA IKU IKL dan IKLHD Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	46
Gambar 2.31 Potensi Penurunan Emisi GRK Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	49
Gambar 2.32 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	50
Gambar 2.33 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	51
Gambar 2.34 Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	53
Gambar 2.35 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	54
Gambar 2.36 Grafik Proyeksi Penduduk Kabupaten Purworejo	57
Gambar 2.37 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2024 (Persen)	64
Gambar 2.38 Grafik Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	66
Gambar 2.39 Grafik Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Purworejo Tahun 2020 – 2024 (Juta Rupiah)	68
Gambar 2.40 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2020-2024.....	68
Gambar 2.41 Grafik Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024	70
Gambar 2.42 Perkembangan IPM Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia serta Kabupaten Sekitar Tahun 2020-2024.....	70
Gambar 2.43 Grafik Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	71
Gambar 2.44 Grafik Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	81
Gambar 2.45 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2024	82
Gambar 2.46 Grafik Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	83
Gambar 2.47 Grafik Tingkat Gemar Membaca Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024	89
Gambar 2.48 Grafik Nilai Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024.....	91
Gambar 2.49 Grafik Nilai Pilar Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2024.....	91
Gambar 2.50 Grafik indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2024	92

Gambar 2.51 Angka iBangga Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2022-2024	101
Gambar 2.52 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	102
Gambar 2.53 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	103
Gambar 2.54 Grafik Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	104
Gambar 2.55 Jumlah Kasus Kekerasan yang Ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	105
Gambar 2.56 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024.....	108
Gambar 2.57 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 (Jiwa)	110
Gambar 2.58 Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 (juta rupiah/tenaga kerja)	112
Gambar 2.59 Perbandingan Pekerja Informal dan Pekerja Formal di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	113
Gambar 2.60 Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	116
Gambar 2.61 Populasi Ternak di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	117
Gambar 2.62 Produksi Daging, Susu, dan Telur di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	117
Gambar 2.63 Nilai Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 (juta rupiah).....	119
Gambar 2.64 Nilai Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024	120
Gambar 2.65 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	132
Gambar 2.66 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2024	133
Gambar 2.67 Kapabilitas Inovasi Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024	135
Gambar 2.68 Angka Konsumsi Ikan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	138
Gambar 2.69 Indeks Pemerintah Digital Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2024...	141
Gambar 2.70 Jumlah Informasi Publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	143
Gambar 2.71 Persentase Penduduk yang Menguasai atau Memiliki Telepon Seluler (HP) di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2023	144
Gambar 2.72 Indeks Satu Data Indonesia Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024	144
Gambar 2.73 Indeks KAMI Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024	146

Gambar 2.74 Realisasi Penanaman Modal di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah).....	149
Gambar 2.75 Trade Balance Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....	151
Gambar 2.76 Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	152
Gambar 2.77 Peta Jaringan Jalan di Kabupaten Purworejo	154
Gambar 2.78 Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten	155
Gambar 2.79 Akses Air Minum Layak Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	156
Gambar 2.80 Peta Pelayanan PDAM Kabupaten Purworejo	158
Gambar 2.81 <i>System Planning</i> Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo.....	158
Gambar 2.82 Raw Water Supply Bendungan Bener dan SPAM Regional Keburejo dan SPAM regional Kamijoro	159
Gambar 2.83 Peta Wilayah Layanan Air Minum Kabupaten Purworejo	159
Gambar 2.84 Persentase Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	163
Gambar 2.85 Persentase Kinerja infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	164
Gambar 2.87 Peta Kawasan Kumuh di Kabupaten Purworejo.....	175
Gambar 2.88 Rasio Konektivitas Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	178
Gambar 2.89 Terminal Tipe A Purworejo	182
Gambar 2.90 Terminal Tipe B Kutoarjo	182
Gambar 2.91 Kondisi Eksisting Terminal Tipe C Purwodadi (kiri) dan Terminal Tipe C Kutoarjo (kanan).....	183
Gambar 2.92 Penurunan Angka Kecelakaan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	185
Gambar 2.93 Indeks Kinerja Layanan Irigasi (IKSI) Kabupaten Purworejo Tahun 2020- 2024.....	187
Gambar 2.94 Persentase Peningkatan Kepastian Hukum atas Tanah bagi Masyarakat dan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	189
Gambar 2.95 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Purworejo	193
Gambar 2.96 Tingkat Inflasi Kota Purwokerto Tahun 2020-2024	197
Gambar 2.97 Grafik Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Purworejo Tahun 2020- 2024.....	197
Gambar 2.98 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	199
Gambar 2.99 Grafik Nilai SAKIP Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	200
Gambar 2.100 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024 .	203
Gambar 2.101 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024...	205
Gambar 2.102 Survei Penilaian Integritas Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2024	207

Gambar 2.103 Grafik Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 208

Gambar 2.104 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 210

Gambar 2.105 Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2024 215

Gambar 2.106 Manajemen Risiko Indeks Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 216

Gambar 2.107 Indeks Sistem Merit Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2024 218

Gambar 2.108 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 222

Gambar 2.109 Grafik Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2024 224

Gambar 2.110 Grafik Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB tahun 2023-2024 225

Gambar 2.111 Grafik Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB di Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2024 226

Gambar 2.112 Grafik *Return on Asset* (ROA) BUMD Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2024 227

Gambar 2.113 Grafik Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2024 228

Gambar 2.114 Konflik Sosial di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 229

Gambar 2.115 Jumlah Pelanggaran Perda Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 232

Gambar 2.116 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2020-2024 (%) 233

Gambar 2.117 Perkembangan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 (dalam Juta Rupiah) 273

Gambar 2.118 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 277

Gambar 2.119 Grafik Proporsi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 279

Gambar 2.120 Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 281

Gambar 2.121 Proporsi pendapatan Transfer Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 287

Gambar 2.122 Pertumbuhan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 294

Gambar 2.123 Anggaran, Realisasi serta Persentase Realisasi Belanja Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 295

Gambar 2.124 Realisasi Belanja Kabupaten Purworejo per Kelompok Belanja Tahun 2020-2024 295

Gambar 2.125 Rasio Realisasi Belanja Pegawai Terhadap Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 297

Gambar 2.126 Pembiayaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....298

Gambar 2.127 Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....300

Gambar 2.128 Proporsi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....300

Gambar 2.129 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....302

Gambar 2.130 Rasio Aset Tetap pada Neraca Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.....304

Gambar 2.131 Perkembangan Nilai TJSLP Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 316

Gambar 2.132 Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 343

Gambar 2.133 Arah Pengembangan Wilayah WP Keburejo 345

Gambar 2.134 Bagan Pohon Masalah Isu Strategis Ketahanan Sosial 354

Gambar 2.135 Pohon Masalah Isu Strategis Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif.....356

Gambar 2.136 Pohon Masalah Isu Strategis Pemerataan Layanan Infrastruktur Dasar 360

Gambar 2.137 Pohon Masalah Isu Strategis Kualitas Lingkungan Hidup yang Berketahanan Bencana 363

Gambar 2.138 Pohon Masalah Isu Strategis Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas, Adaptif, Akuntabel, dan Kolaboratif.....365

Gambar 3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 371

Gambar 3.2 Cascading Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 372

Gambar 3.3 Pentahapan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.....391

Gambar 3.4 Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.....415

Gambar 3.5 Arah Pengembangan Wilayah WP Keburejo 418

Gambar 3.6 Peta Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Purworejo.....421

DAFTAR NAMA PERANGKAT DAERAH

1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(Dindikbud)
2	Dinas Kesehatan Daerah	(Dinkesda)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(DPUPR)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	(Dinperkimtan)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(Satpol PP Damkar)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(BPBD)
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	(DINSOSDALDUKKB)
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	(DLHP)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(Disdukcapil)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(DPPAPMD)
11	Dinas Perhubungan	(Dinhub)
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	(Dinkominfoasandi)
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan	(DKUKMP)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(DPMPTSP)
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	(Dinporapar)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(Dinpusip)
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(DKPP)
18	Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja	(Dinperintrasnaker)
19	Sekretariat Daerah	(Setda)
20	Sekretariat DPRD	(Set. DPRD)
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	(Bapperida)
22	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	(BPKPAD)
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(BKPSDM)
24	Inspektorat Daerah	(Inspektorat Daerah)
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(Bakesbangpol)
26	Kecamatan Grabag	(Kec. Grabag)
27	Kecamatan Ngombol	(Kec. Ngombol)
28	Kecamatan Purwodadi	(Kec. Purwodadi)
29	Kecamatan Bagelen	(Kec. Bagelen)
30	Kecamatan Kaligesing	(Kec. Kaligesing)
31	Kecamatan Purworejo	(Kec. Purworejo)
32	Kecamatan Banyuurip	(Kec. Banyuurip)
33	Kecamatan Bayan	(Kec. Bayan)
34	Kecamatan Kutoarjo	(Kec. Kutoarjo)



35	Kecamatan Butuh	(Kec. Butuh)
36	Kecamatan Pituruh	(Kec. Pituruh)
37	Kecamatan Kemiri	(Kec. Kemiri)
38	Kecamatan Bruno	(Kec. Bruno)
39	Kecamatan Gebang	(Kec. Gebang)
40	Kecamatan Loano	(Kec. Loano)
41	Kecamatan Bener	(Kec. Bener)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Purworejo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang menyimpan sejarah penting ketika masa penjajahan berlangsung. Puncak sejarah Purworejo terjadi pada masa pasca-proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gubernur Jawa Tengah saat itu, KRT. Mr. Wongsonegoro memindahkan ibu kota provinsi ke Purworejo dengan lokasi di Kecamatan Bruno dari periode 1945-1949. Keputusan itu diambil karena pada saat itu Semarang masih dikuasai oleh Belanda, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pusat pemerintahan lagi.

Pemilihan Kecamatan Bruno di Kabupaten Purworejo sebagai lokasi pusat administrasi sementara karena kontur tanah dan lokasi Kecamatan Bruno dikelilingi oleh hutan lebat, sehingga ideal untuk dijadikan tempat persembunyian yang sulit terdeteksi oleh pasukan Belanda. Karena alasan ini pula, Pangeran Diponegoro pun menjadikan Purworejo sebagai tempat persembunyiannya dan pasukannya selama perang berlangsung, jauh sebelum keputusan pemindahan ibu kota ini bergulir.

Setelah situasi politik kembali membaik, pemerintah memutuskan untuk memindahkan kembali ibu kota provinsi Jawa Tengah ke Semarang. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Jawa Tengah secara resmi ditetapkan sebagai salah satu provinsi di Indonesia, dan Semarang kembali menjadi ibu kota Provinsi Jawa Tengah.

Adapun sejarah terbentuknya Purworejo sempat mengalami perubahan. semula hari jadi Purworejo ditetapkan tanggal 5 Oktober 901 sesuai Perda nomor 9 tahun 1994 Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo. Tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi berdasarkan Prasasti Arahiwang yang dianggap sebagai bukti otentik sejarah terbentuknya Purworejo, yang ditemukan di Desa Boro Tengah Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo.

Penetapan tanggal 27 Februari 1831 M sebagai Hari Jadi Kabupaten Purworejo, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo dan masyarakat Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Kabupaten Purworejo. Disamping itu penetapan Hari Jadi Kabupaten Purworejo dengan mengambil momentum perubahan nama Brengkelan menjadi Purworejo diharapkan dapat memantapkan jati diri dan melengkapi identitas serta sebagai motivasi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam membangun daerah.

Penetapan hari jadi Purworejo pada saat nama Brengkelan dikukuhkan menjadi nama Purworejo menjadi salah satu aset yang mampu memiliki nilai aspek historis dan filosofis karena nama Purworejo diistilahkan lain dengan sebutan “Awal kemakmuran”. Peristilahan lain dari Purworejo sebagai awal kemakmuran dapat mendorong pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah berorientasi ke depan. Disamping itu, ikon sebagai awal kemakmuran

tentunya sangatlah mampu memberikan tampilan yang jelas dalam promosi kepariwisataan di Kabupaten Purworejo.

Selaras dengan makna kata "Purworejo" dan harapan dalam melaksanakan pembangunan, agar nantinya daerah ini benar-benar akan bisa menjadi daerah yang mandiri, maju, makmur, sejahtera dan penuh berkah bagi masyarakatnya, maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Daerah yang baik, tepat sasaran dan terukur, baik yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja pemerintahan Daerah (RKPD) yang terintegrasi dalam satu sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perencanaan Pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, optimalisasi partisipasi masyarakat, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 telah menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dari hasil pemilihan tersebut, telah ditetapkan Kepala Daerah terpilih yaitu Ibu Hj. Yuli Hastuti, S.H. sebagai Bupati dan Bapak Dion Agasi Setiabudi, S.I.Kom., M.Si. sebagai Wakil Bupati untuk periode 2025-2030. Dengan ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo melalui pelantikan pada tanggal 20 Februari 2025, Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 merupakan tahap I atau periode pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045. Sehingga penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 serta mengacu pada RPJMN 2025-2029 sebagai pedoman utama pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 diarahkan agar sejalan dengan kebijakan nasional serta mampu merespon tantangan dan peluang pembangunan di tingkat daerah.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 melewati beberapa tahapan, yaitu:

- a.** Persiapan penyusunan;
- b.** Penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJMD;
- c.** Penyusunan dokumen Rancangan RPJMD;
- d.** Pelaksanaan kegiatan Musrenbang;
- e.** Perumusan Rencama Akhir RPJMD; dan
- f.** Penetapan Peraturan Daerah RPJMD.

Proses persiapan penyusunan telah dilakukan sejak tahun 2024 dengan menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD yang kemudian disempurnakan hingga Bupati dan Wakil Bupati dilantik. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati

telah dilaksanakan, maka disusunlah Rancangan Awal RPJMD yang menjabarkan visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam visi, misi, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Proses penyusunan Rancangan Awal RPJMD ini kemudian akan berlanjut hingga penetapan Peraturan Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat strategis, RPJMD tidak hanya menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah yang harus diacu oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Purworejo, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Komitmen ini tercermin melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Hal ini mencakup aspek keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup guna menjamin kualitas hidup masyarakat saat ini dan generasi mendatang.

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) serta visi nasional Indonesia Emas 2045, RPJMD Kabupaten Purworejo 2025–2029 diarahkan untuk mendorong pembangunan yang inklusif, tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana, berpihak kepada kelompok rentan, serta berwawasan lingkungan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan juga dilakukan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Lebih lanjut, dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) 2025-2029 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun sehingga pembangunan di Kabupaten Purworejo menjadi selaras, lebih terarah, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RenstraPD) 2025-2029 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun sehingga pembangunan di Kabupaten Purworejo menjadi selaras dan lebih terarah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
 - i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
 - j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
 - k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- p. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 - q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
 - r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peratyrn Daerah Kabupatem Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)

1.3. Hubungan antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Hubungan antar dokumen perencanaan daerah secara relevan dan kontekstual sangat mendukung dalam upaya membangun keselarasan perencanaan antar dokumen perencanaan dalam lingkup daerah maupun dengan lingkup nasional dan provinsi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan daerah, RPJMD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dijelaskan sebagai berikut.

Hubungan RPJMD Kabupaten Purworejo dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045*

Penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo antara lain memperhatikan RPJMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029 dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan

program pembangunan jangka menengah provinsi dengan arah kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 juga mengacu serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan arah serta prioritas pembangunan daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Sedangkan untuk keterkaitan dengan dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045, RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 merupakan Pembangunan Jangka Menengah yang menjadi Tahap I dari tahapan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Dalam penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 dengan cara menyelaraskan sasaran strategis, arah kebijakan, dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Hubungan RPJMD dan RTRW

Penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 berpedoman pada arah kebijakan pengembangan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten Purworejo. Penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo juga mengintegrasikan rencana struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Purworejo sebagai bentuk operasionalisasi perwujudan rencana struktur dan pola ruang dalam RTRW.

Hubungan RPJMD Kabupaten Purworejo dengan KLHS RPJMD

KLHS RPJMD merupakan rangkaian analisis sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program dalam RPJMD.

Penyusunan RPJMD secara kaidah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah perlu mengintegrasikan pertimbangan rekomendasi isu strategis, permasalahan, dan sasaran hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dengan maksud agar penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan pelaksanaan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang memuat 17 tujuan/*goals* dan 4 pilar yang meliputi Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola.

Hubungan RPJMD Kabupaten Purworejo dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada selanjutnya menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Hubungan RPJMD Kabupaten Purworejo dengan RKPD

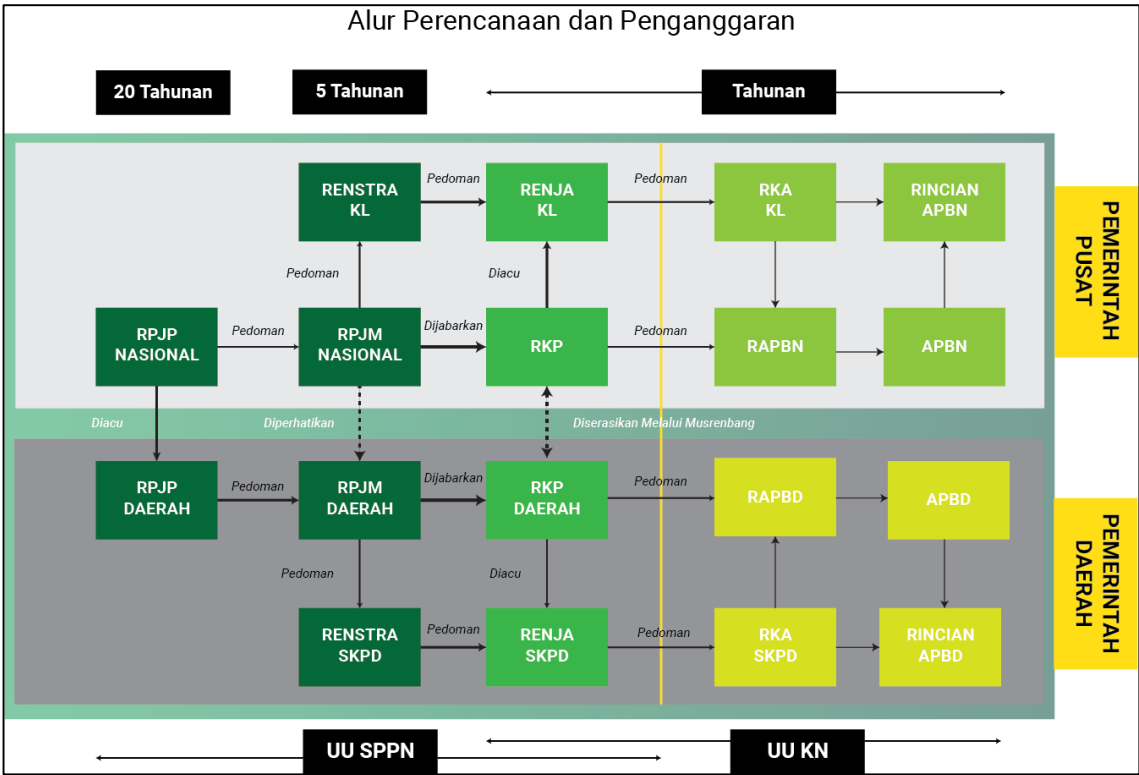
RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo mulai tahun 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030 melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Dalam pelaksanaannya tahunan RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Hubungan RPJMD Kabupaten Purworejo dengan Renja Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Hubungan RPJMD dengan Dokumen Lainnya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1. 1 Grafik Hubungan RPJMD dengan Dokumen Lainnya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003

Hubungan RPJMD Kabupaten Purworejo RIPJPID

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perencanaan riset dan inovasi. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk dipercepat capaian target programnya. Dokumen RIPJPID Kabupaten Purworejo telah disusun untuk periode tahun 2024-2029 yang didasarkan pada RPJMD periode tahun 2021-2026 dan perodesasi RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045. Dengan disusunnya RPJMD Kabupaten Purworejo periode 2025-2029, dokumen RIPJPID Kabupaten Purworejo Tahun 2024-2029 perlu dievaluasi untuk melihat apakah perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan dokumen RPJMD yang baru.

Hubungan RPJMD Kabupaten Purworejo dengan Dokumen Perencanaan Lintas Sektor

Penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, juga harus memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral pada tingkat nasional dan provinsi, antara lain Rencana Aksi Nasional Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi, Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2026 juga akan dijadikan acuan dalam Dokumen Perencanaan Lintas Sektor Kabupaten yang akan disusun setelah RPJMD ini ditetapkan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah terhadap strategi dan kebijakan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka menengah (*sustainability development*) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pada setiap anggaran 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Purworejo.

Dalam RPJMD juga terdapat rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, semua dokumen operasional di dalam perencanaan periode 2025-2029 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Purworejo harus mengacu pada dokumen ini.

Tujuan ditetapkan RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029, adalah:

1. Sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah tahun 2025-2029;
2. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap strategi dan kebijakan pembangunan daerah tahun 2025-2029;
3. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) tahun 2025-2029;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030;
5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
6. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; serta
7. Sebagai tolok ukur dalam evaluasi kinerja tahunan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Memuat gambaran umum daerah beberapa tahun terakhir meliputi gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis. Gambaran umum kondisi daerah disajikan dalam 8 (delapan) aspek yaitu geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, kerjasama daerah, rencana pembangunan infrastruktur, badan usaha milik daerah, dan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Gambaran keuangan daerah memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah beberapa tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Permasalahan dan isu strategis daerah meliputi permasalahan pembangunan daerah serta isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo periode 2025-2029 serta strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat program perangkat daerah yang terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Memuat pengaturan mengenai pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

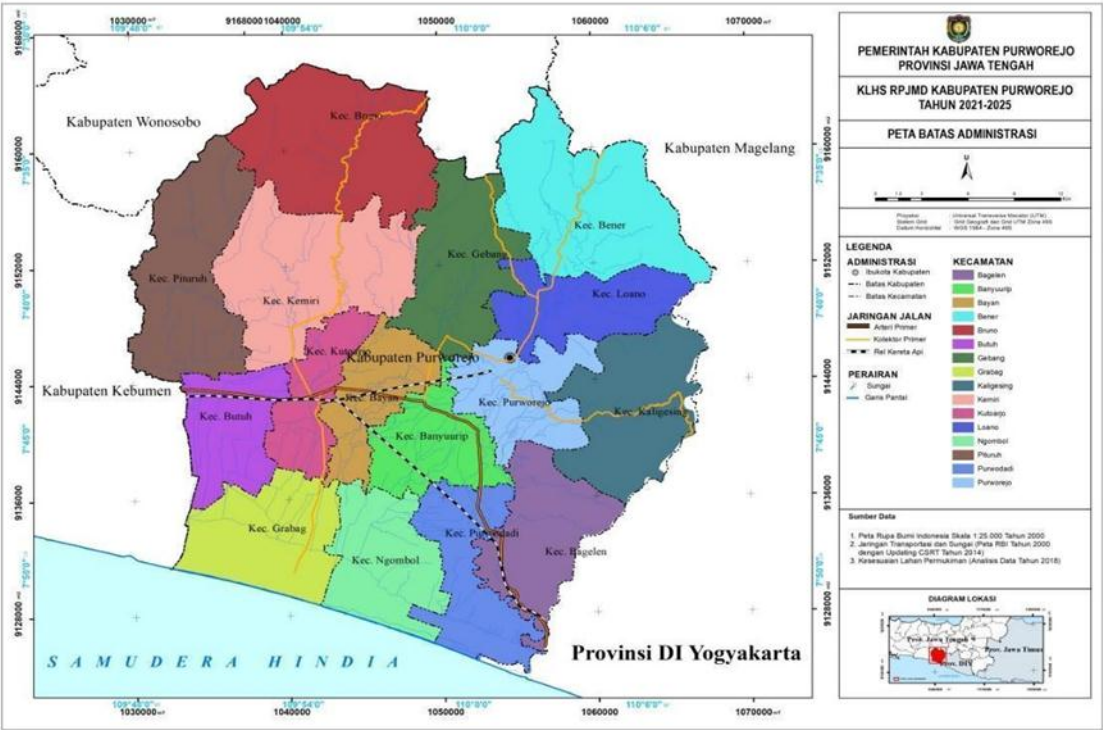
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Purworejo. Wilayah ini terletak pada posisi antara 109 0 47’ 28” sampai 110 0 8’ 20” Bujur Timur dan 70 32’ – 70 54” Lintang Selatan dengan luas 1.081,45 km² atau $\pm$ 3,18% dari luas Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kebumen
- Sebelah Timur : Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta

Secara administratif Kabupaten Purworejo terdiri atas 16 kecamatan, 25 kelurahan, dan 469 desa. Jumlah desa/kelurahan dan luas menurut kecamatan di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Tabel 2.1. Kecamatan Bruno dengan luas 105,68 km² merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling luas di Kabupaten Purworejo, sedangkan Kecamatan Ngombol merupakan kecamatan dengan jumlah desa paling banyak yakni 57 desa dengan luas wilayah 59,33 km².



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Purworejo

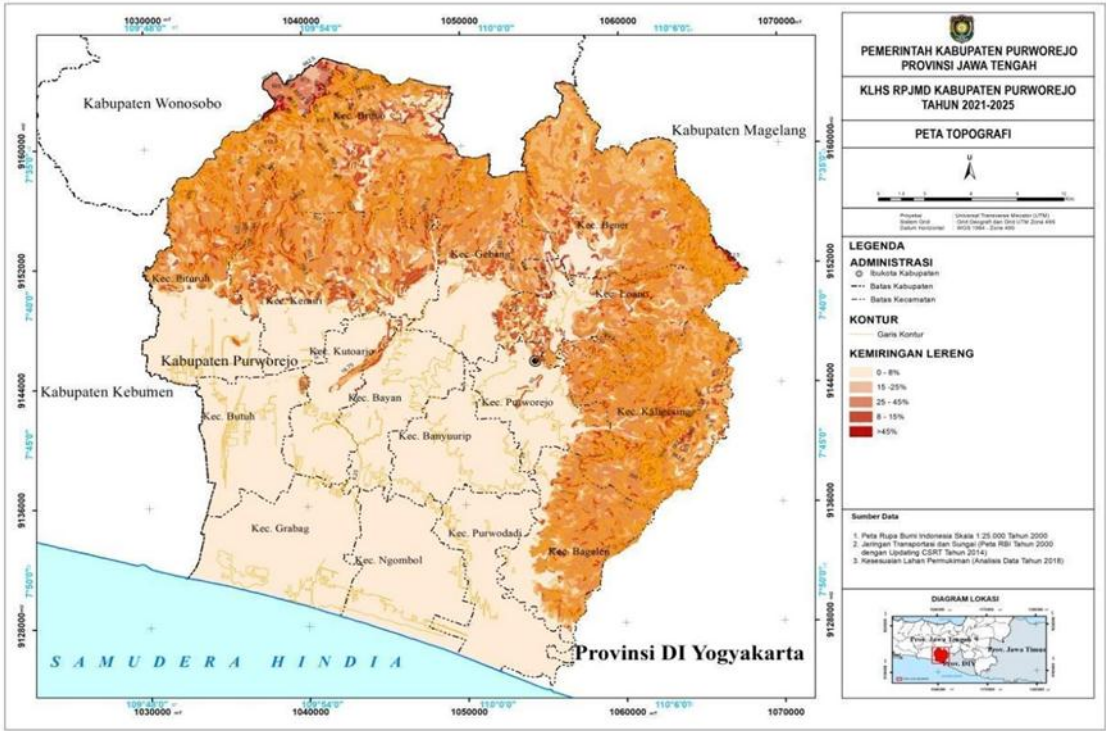
Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023

Tabel 2. 1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (km ²)
1	2	3	4
1.	Grabag	32	67,80
2.	Ngombol	57	59,33
3.	Purwodadi	40	56,15
4.	Bagelen	17	63,44
5.	Kaligesing	21	78,33
6.	Purworejo	25	53,25
7.	Banyuurip	27	47,78
8.	Bayan	26	44,66
9.	Kutoarjo	27	39,20
10.	Butuh	41	47,21
11.	Pituruh	49	89,01
12.	Kemiri	40	103,15
13.	Bruno	18	105,68
14.	Gebang	25	70,51
15.	Loano	21	53,51
16.	Bener	28	102,44
	Jumlah	494	1.081,45

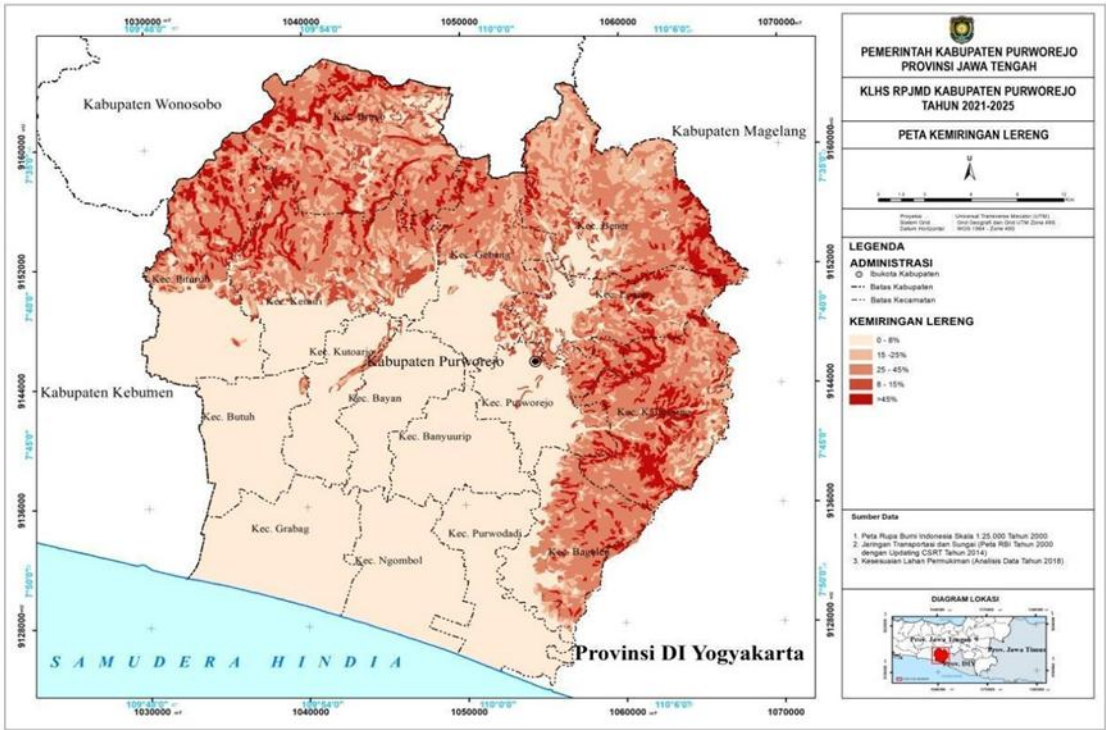
Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041

Ketinggian wilayah Kabupaten Purworejo berkisar antara 0 - 1.064 meter di atas permukaan laut (mdpl). Topografi wilayah Kabupaten Purworejo secara umum terbagi menjadi dua yaitu bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25–1.050 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sedangkan bagian selatan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-25 mdpl.



Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Purworejo

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023



Gambar 2. 3 Peta Kelerengan Kabupaten Purworejo

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023

Kondisi kemiringan lereng atau kelerengan Kabupaten Purworejo dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kategori yaitu:

- Kemiringan 0 – 2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah Kabupaten Purworejo;
- Kemiringan 2 – 15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri, Bruno, Bener, Loano, dan Bagelen;
- Kemiringan 15 – 40% meliputi bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo;
- Kemiringan > 40% meliputi sebagian Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemiri, dan Pituruh;

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, Kabupaten Purworejo termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan Keburejo yaitu kawasan regional yang memiliki keterkaitan pengembangan dari aspek fisik, sosial, ekonomi, dan/atau budaya dengan cakupan daerah meliputi Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo. Adapun dalam peraturan daerah tersebut WP Keburejo memiliki arah pengembangan sebagai berikut:

1. Menyelaraskan pembangunan Kawasan Perkotaan Purworejo Kutoarjo dengan Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo;
2. Pengembangan koridor wisata Kebumen – Purworejo – Borobudur – Magelang;
3. Pengembangan potensi wisata keunikan geologi dan pantai;
4. Meningkatkan keterwujudan Perkotaan Kebumen sebagai PKW;
5. Meningkatkan akses wisata pantai – Geopark Kebumen;
6. Mengembangkan Kawasan Industri Kebumen yang terintegrasi dengan Kawasan Otorita Borobudur;

7. Pengembangan wilayah dengan memperhatikan mitigasi bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah;
8. Pengembangan industri manufaktur dan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
9. Mengembangkan Pelabuhan Perikanan; dan
10. Mengendalikan alih fungsi lahan sawah.

Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, disebutkan pada bagian arahan pembangunan kewilayahan bahwa Kabupaten Purworejo merupakan salah satu wilayah yang diperuntukkan sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Dieng-Serayu-Bogowonto bersama dengan 6 Kabupaten lainnya yang meliputi Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen.

Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Dieng-Serayu-Bogowonto merupakan inisiatif pembangunan wilayah yang berfokus pada integrasi lintas sektor dalam pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dan berkelanjutan. Kawasan ini mencakup wilayah-wilayah strategis di sekitar dataran tinggi Dieng dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu-Bogowonto yang melintasi beberapa kabupaten di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Purworejo. Konsep kawasan ini bertumpu pada pengelolaan terpadu sektor pertanian, sumber daya air, dan energi terbarukan untuk mencapai ketahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kawasan ini memiliki keunggulan berupa kesuburan tanah vulkanik, ketersediaan sumber daya air dari DAS Serayu-Bogowonto, serta potensi energi terbarukan seperti panas bumi, mikrohidro, dan biomassa. Kawasan ini dirancang sebagai pusat pertumbuhan baru yang mengedepankan prinsip pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan ramah lingkungan. Dari sisi ketahanan pangan, kawasan ini mengandalkan pengembangan pertanian berbasis kawasan, baik hortikultura dataran tinggi, tanaman pangan di lahan basah dan kering, pertanian budidaya dan tangkap, maupun peternakan terpadu. Dukungan infrastruktur irigasi menjadikan kawasan ini sebagai salah satu lumbung pangan regional yang potensial. Integrasi pertanian dengan teknologi modern, pemberdayaan petani, dan penguatan kelembagaan menjadi strategi utama dalam mewujudkan swasembada pangan.

Dalam hal sumber daya air, kawasan ini memainkan peran penting sebagai wilayah tangkapan dan penyedia air bagi wilayah hilir. Upaya konservasi hutan dan lahan di hulu DAS, rehabilitasi jaringan irigasi, serta pengelolaan air terpadu menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan suplai air untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan industri. Dari aspek energi, kawasan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan energi terbarukan, terutama melalui pemanfaatan panas bumi di Dieng, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di aliran Serayu dan Bogowonto, serta pengembangan biomassa dan biogas berbasis limbah pertanian dan peternakan. Pendekatan ini sejalan dengan target pengurangan emisi karbon dan pencapaian bauran energi nasional.

KABUPATEN WONOSOBO

KABUPATEN MAGELANG

KABUPATEN KEBUMEN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SAMUDERA HINDIA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2041

PETA CURAH HUJAN

SKALA 1:50.000

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

BUNOTA PEMERINTAHAN :

BATAS ADMINISTRASI :

PERSAIRAN :

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI :

CURAH HUJAN

Sumber Peta Dan Kewilayahan :

BUPATI PURWOREJO

AGUS BASTIAN

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023

Tabel 2.2 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Purworejo

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	2	3
1	Belukar	286,10
2	Hutan	18.936,40
3	Kebun	32.685,74
4	Permukiman	21.910,27
5	Rawa	8,35
6	Sawah Irigasi	25.134,81
7	Sawah Tadah Hujan	5.177,08
8	Sungai	779,54
9	Tambak	369,28
10	Tanah Ladang	3.137,99
Total		108.425,57

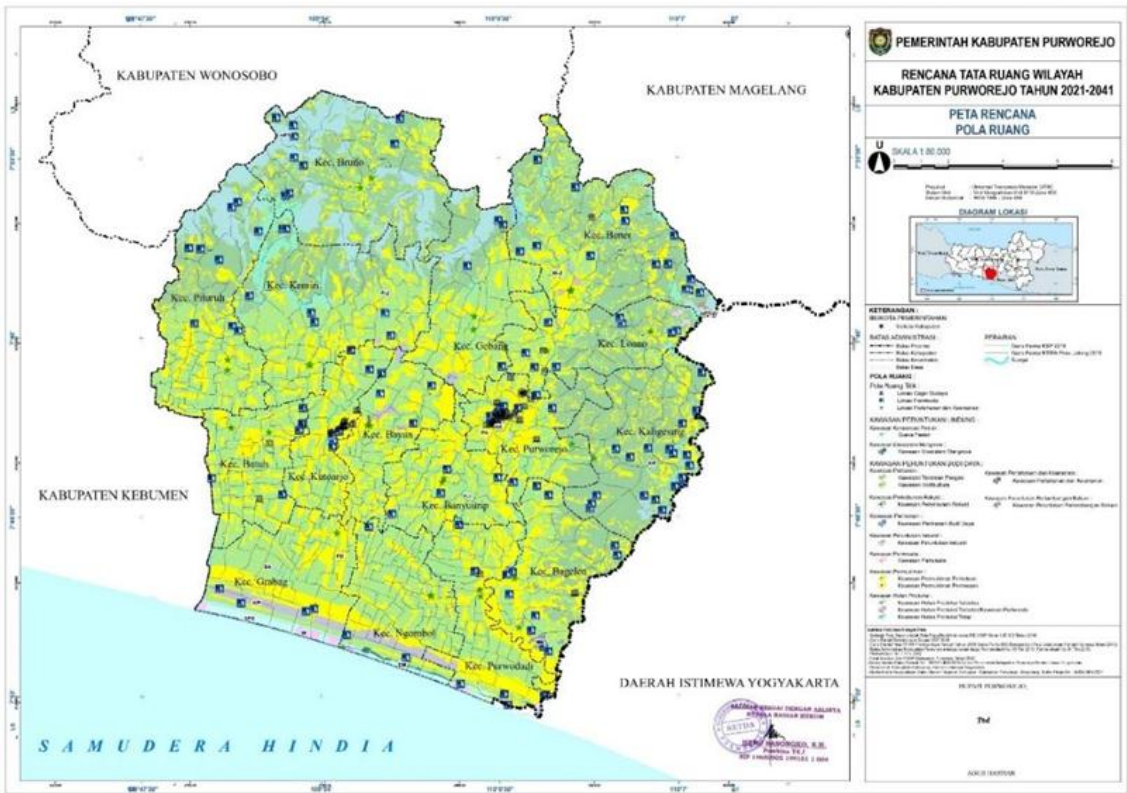
15

Pemanfaatan ruang berkaitan erat dengan penggunaan lahan. Kawasan Pertanian dan Kawasan Perkebunan Rakyat secara umum menjadi yang paling dominan dan dapat menjadi gambaran kondisi kegiatan ekonomi di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, rencana pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan di Kabupaten Purworejo meliputi:

Tabel 2.3 Luasan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041

Rencana Pola Ruang Wilayah		Luas (Ha)	Luas Total (Ha)
1		2	3
Kawasan Peruntukan Lindung	Kawasan Konservasi	827	919
	Kawasan Cagar Budaya	0,0	
	Kawasan Ekosistem Mangrove	92	
Kawasan Peruntukan Budi Daya	Kawasan Hutan Produksi	8.322	105.894
	Kawasan Perkebunan Rakyat	28.214	
	Kawasan Pertanian	39.082	
	Kawasan Perikanan	18	
	Kawasan Pertambangan dan Energi	96	
	Kawasan Peruntukan Industri	1.250	
	Kawasan Pariwisata	343	
	Kawasan Permukiman	28.517	
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	52	
Badan Air	Badan Air	1.332	1.332
Luas Total (ha)		108.145	108.145

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041



Gambar 2. 5 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Purworejo
Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041

Kabupaten Purworejo memiliki lima **potensi rawan bencana**, yaitu potensi rawan bencana tanah longsor, potensi rawan bencana banjir, potensi rawan bencana gelombang pasang dan tsunami, potensi rawan bencana gempa bumi, dan potensi rawan bencana kekeringan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Data Informasi Bencana Indonesia yang diluncurkan dari BNPB, diketahui dari tahun 2020-2024 Kabupaten Purworejo telah mengalami berbagai jenis kejadian bencana alam, yang meliputi banjir, tanah longsor, gelombang pasang, puting beliung, dan kekeringan.

Tabel 2. 4 Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Tahun	Banjir	Tanah Longsor	Gelombang Pasang	Puting Beliung	Kekeringan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
2024	3	32	0	107	1	143
2023	0	8	0	34	685	727
2022	45	47	0	48	52	192
2021	0	2	0	2	0	4
2020	62	69	0	68	176	375
Jumlah	110	158	0	259	914	1441

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (Dibi), 2024

Selama lima tahun terakhir terdapat 1.441 kejadian bencana alam di Kabupaten Purworejo dengan rincian bencana banjir sebanyak 110 kali, tanah longsor sebanyak 158 kali, puting beliung sebanyak 259 kali, serta kekeringan 914 kali. Berikut merupakan dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2. 5 Dampak Bencana Alam di Kabupaten Purworejo Tahun 2020 - 2024

Kejadian Bencana	Jumlah Kejadian	Korban Jiwa (penduduk)			Kerusakan								
		Meninggal	Terluka	Menderita	Rumah	Fasilitas Pendirian	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Peribadatan	Fasilitas Umum	Perkantoran	Jembatan	Pabrik	Kios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2020													
Banjir	62	0	0	150	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Tanah Longsor	69	0	2	0	75	1	0	2	0	0	1	0	1
Puting Beliung	68	1	0	70	21	0	0	0	0	0	0	0	0
Kebakaran Hutan dan Lahan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021													
Tanah Longsor	2	0	0	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Puting Beliung	2	0	0	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2022													
Banjir	45	0	0	18.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanah Longsor	47	2	0	120	36	0	0	1	0	0	0	0	0
Puting Beliung	48	0	0	55	36	0	0	0	0	0	0	0	1
Kekeringan	52	0	0	2.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023													
Banjir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tanah longsor	8	0	0	35	10	0	0	0	2	0	0	0	0
gelombang pasang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Kejadian Bencana	Jumlah Kejadian	Korban Jiwa (penduduk)			Kerusakan								
		Meninggal	Terluka	Menderita	Rumah	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Peribadatan	Fasilitas Umum	Perkantoran	Jembatan	Pabrik	Kios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
puting beliung	34	0	1	58	17	0	0	0	12	0	0	1	0
kebakaran hutan/ lahan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kekeringan	685	0	0	25.740	6.435	0	0	0	0	0	0	0	0
Gempa bumi	1	0	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0
2024													
Banjir	3	0	0	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tanah longsor	32	4	0	69	16	0	0	2	13	0	1	0	0
gelombang pasang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
puting beliung	107	0	0	593	157	0	0	0	0	0	0	0	0
kebakaran hutan/ lahan	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kekeringan	1	0	0	16.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gempa bumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banjir	3	0	0	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0

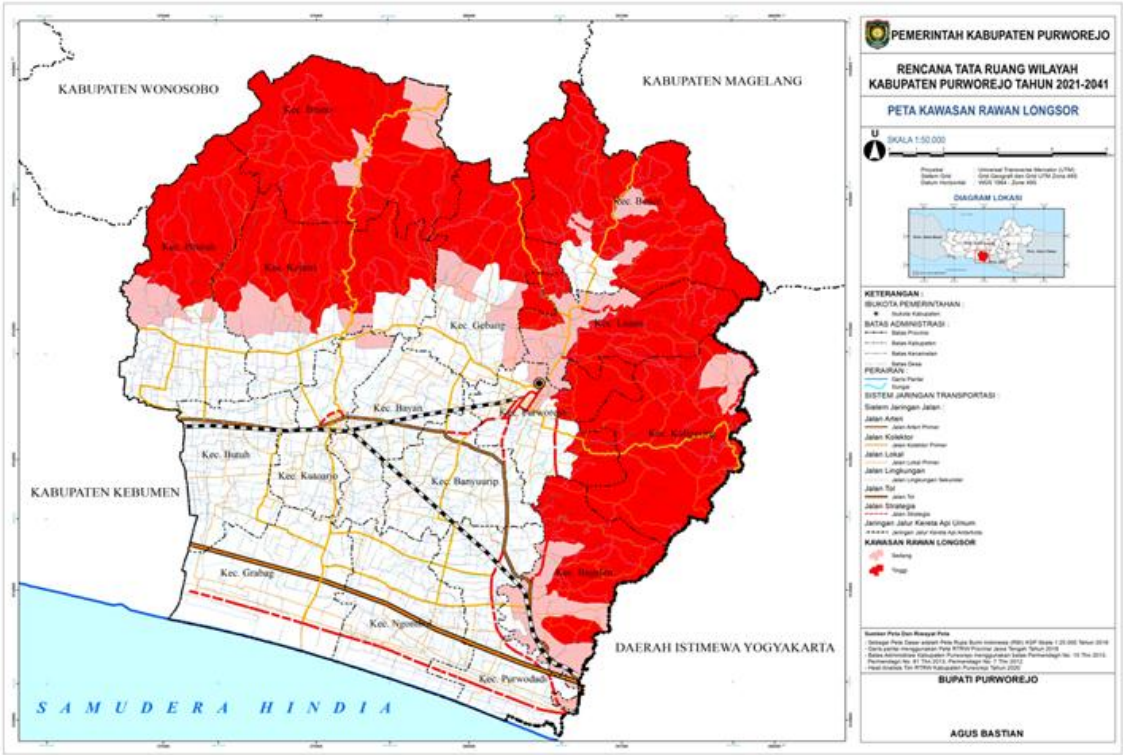
Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (Dibi), 2024

Potensi rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Purworejo terdapat di Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Purworejo, Loano, Bener, Gebang, Bruno, Kemiri, Pituruh dan Kutoarjo. Hal ini tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Desa/Kelurahan Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Purworejo

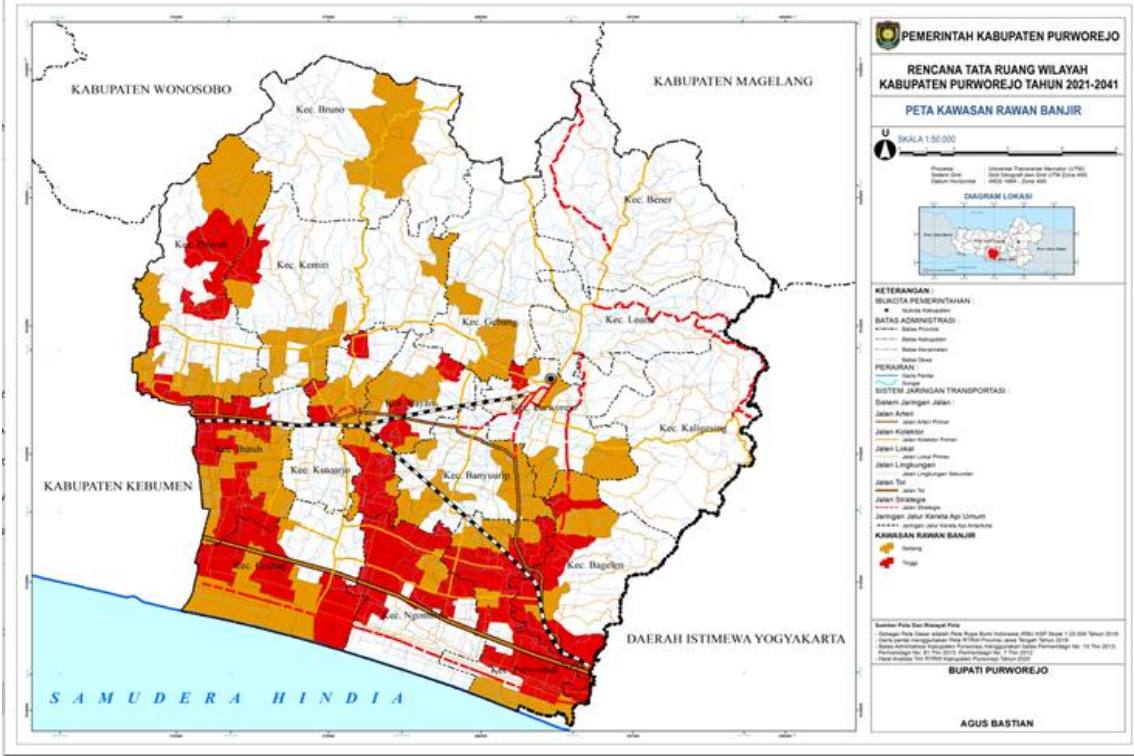
Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Longsor		
	Tinggi	Sedang	Rendah
1	2	3	4
Grabag	0	0	0
Ngombol	0	0	0
Bagelen	6	1	9
Kaligesing	20	0	1
Purworejo	7	0	6
Banyuurip	0	0	0
Bayan	0	0	2
Kutoarjo	0	0	9
Butuh	0	0	0
Pituruh	8	0	10
Kemiri	8	0	20
Bruno	13	0	5
Gebang	8	0	12
Loano	13	0	8
Bener	10	0	18
Jumlah	96	1	97

Sumber: BPBD Kabupaten Purworejo, 2023



Gambar 2. 6 Peta Tanah Longsor Kabupaten Purworejo
Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023

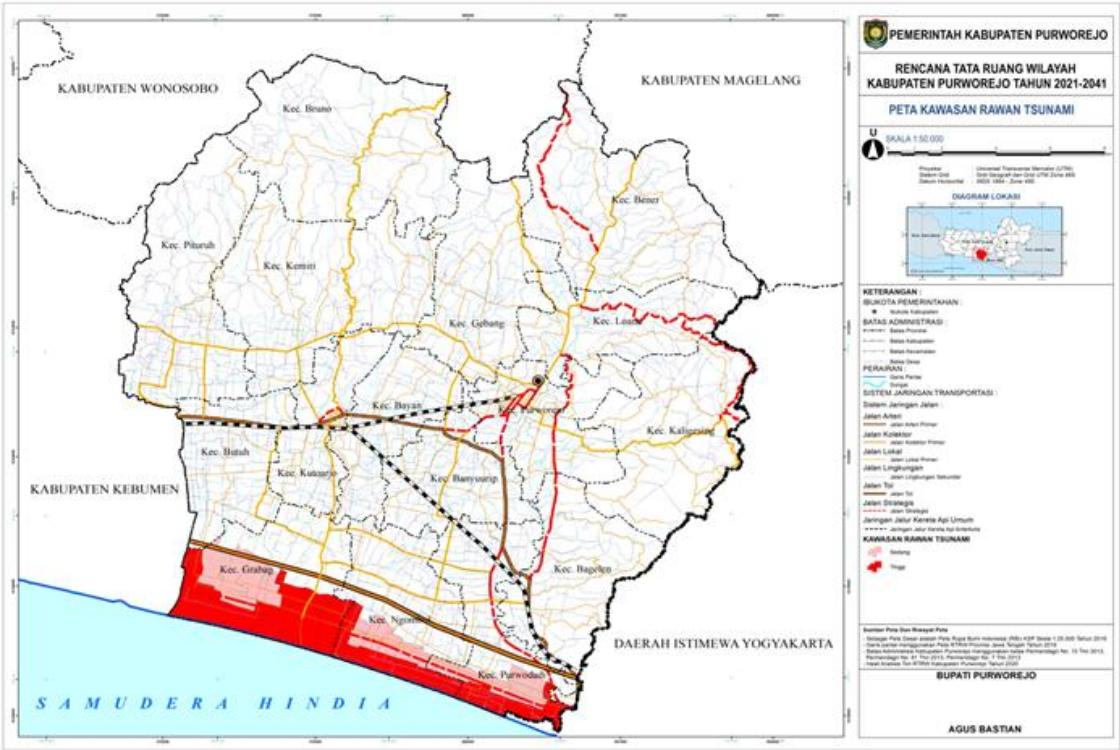
Potensi rawan bencana banjir di Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan, yaitu di Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi, Bagelen, Banyuurip, Purworejo, Bayan, Kutoarjo, Butuh, Kutoarjo, Kemiri, Pituruh, Gebang, Loano, dan Bener. Kawasan ini memiliki topografi yang rendah. Selain merendam kawasan permukiman, banjir juga merendam kawasan pertanian sehingga mengakibatkan seringnya terjadi gagal panen di kawasan tersebut.



Gambar 2. 7 Peta Bencana Banjir Kabupaten Purworejo
Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023

Potensi rawan gelombang pasang dan tsunami di Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan, yaitu di pesisir Pantai Selatan yang

meliputi wilayah Kecamatan Grabag, Ngombol, dan Purwodadi. Pada jarak 0-500 m dari pantai terdapat 11 desa yang berpotensi rawan terhadap bencana gelombang pasang. Sedangkan bencana tsunami berpotensi melanda kawasan yang lebih luas. Dengan radius $\pm 1,5$ km dari tepi pantai terdapat 33 desa berpotensi rawan tsunami dan dengan radius ± 5 km terdapat 56 desa berpotensi rawan tsunami.



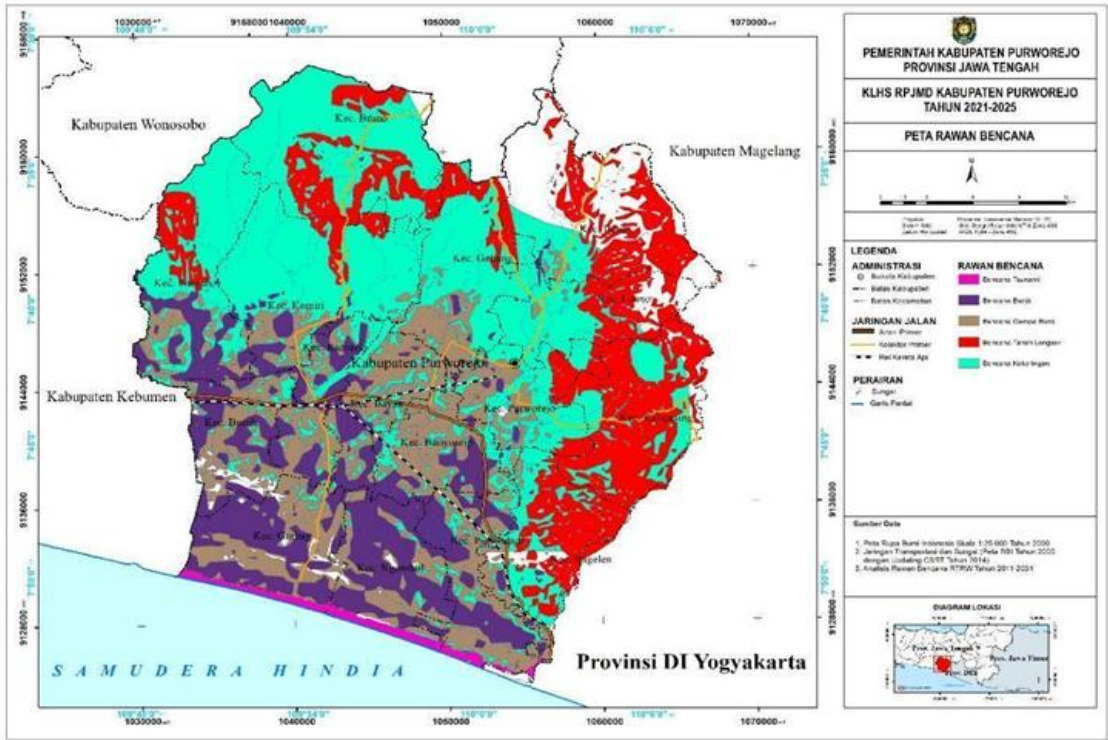
Gambar 2. 8 Peta Gelombang Pasang dan Tsunami Kabupaten Purworejo

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2020

Potensi rawan bencana gempa bumi meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Purworejo. Hal ini dikarenakan Kabupaten Purworejo berada pada zona tektonik aktif dan memiliki beberapa sesar lokal.

Potensi rawan bencana kekeringan ada dua macam, yaitu kekeringan pada daerah irigasi dan pada daerah permukiman penduduk. Kekeringan pada daerah irigasi berdasarkan ketersediaan air irigasi pada waduk dan bendung *control point*. Sedangkan kekeringan dari aspek air bersih berdasarkan kriteria kesulitan mendapatkan akses air minum, banyaknya penyakit karena kekurangan air bersih, dan mahal biaya memperoleh air bersih.

Kekeringan pada daerah irigasi disebabkan karena berkurangnya debit air, tingginya kebocoran pada saluran, tidak adanya saluran tersier, tidak taatnya jadwal pola tanam, kelembagaan P3A tidak berjalan dengan baik, pengambilan air secara liar, kurangnya kesadaran untuk bertanam palawija, dan sistem konvensional yang masih digunakan petani dalam bertanam padi. Di sisi lain, debit sungai di Kabupaten Purworejo dari tahun ke tahun semakin menurun dikarenakan kurangnya sistem penyimpanan air yang disebabkan oleh berkurangnya daerah konservasi di sekitar aliran sungai. Bahkan terdapat beberapa sungai yang kering pada musim kemarau. Sementara itu, potensi rawan bencana kekeringan air bersih hampir merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo. Hal ini disebabkan karena beberapa wilayah memiliki sumber air bersih yang berada jauh dari permukiman penduduk.



Gambar 2. 9 Peta Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Purworejo
Sumber: DPUPR Kab. Purworejo, 2020

b. Potensi Sumber Daya Alam

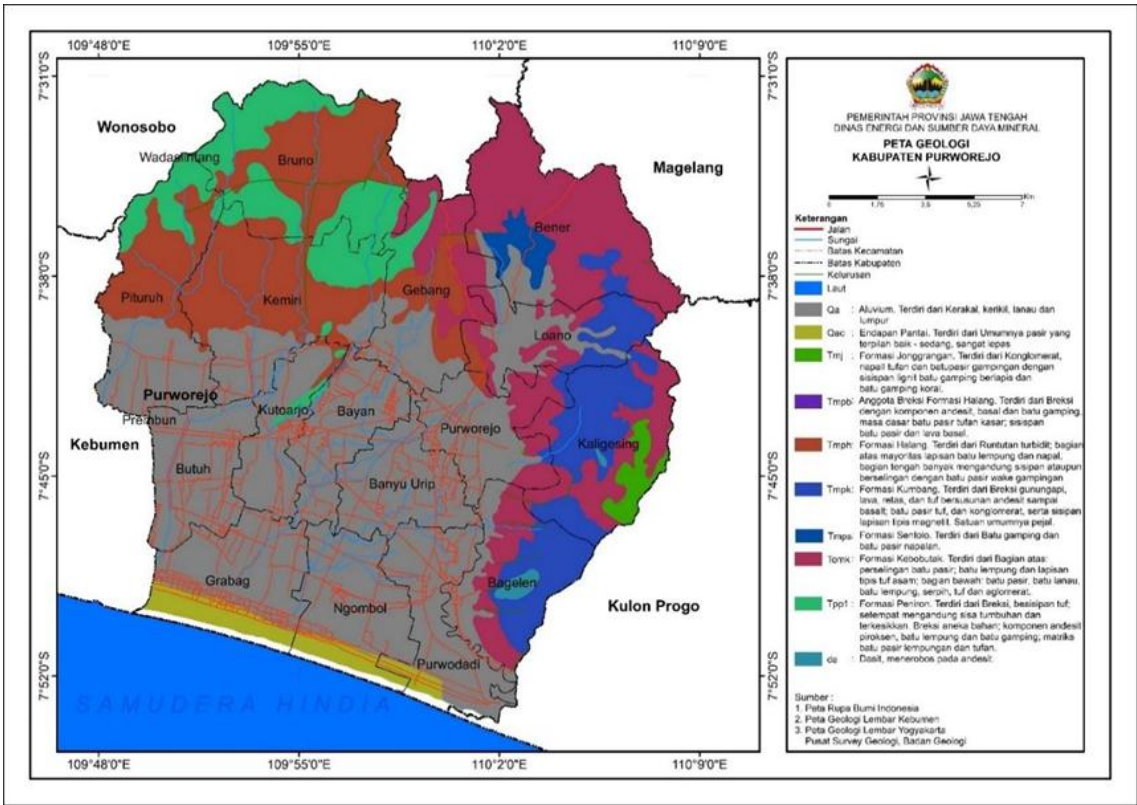
1) Sumber Daya Geologis

Kabupaten Purworejo yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah, memiliki kondisi geologis yang kompleks dan beragam. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Purworejo berada di zona tektonik yang dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik di sekitar Pulau Jawa serta terdapat sesar-sesar lokal yang mempengaruhi morfologi wilayah, terutama di perbukitan dan pegunungan. Kondisi geologi Kabupaten Purworejo dapat dijelaskan melalui aspek litologi atau batuan, stratigrafi, dan struktur geologi. Ketiga komponen ini memiliki peran penting, terutama terkait fenomena alam seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan.

Secara umum, batuan di Kabupaten Purworejo terdiri dari batuan sedimen dan campuran batuan gunung api, yang mencakup sekitar 60,1% wilayah bagian utara dan timur dengan topografi tinggi. Sementara itu, sekitar 39,9% wilayahnya berupa aluvium yang tersebar di bagian selatan dan barat dengan topografi rendah. Stratigrafi wilayah Purworejo mengikuti pola stratigrafi Pegunungan Serayu Selatan di bagian utara serta Pegunungan Menoreh di bagian timur. Secara morfologi, Kabupaten Purworejo memiliki empat jenis bentukan lahan berdasarkan proses pembentukannya, yaitu bentukan lahan dari proses struktural, fluvial (sungai), marin (laut), dan denudasional (erosi). Secara eksploratif Kabupaten Purworejo dari beberapa jenis tanah, yaitu:

- a) Tanah Alluvial mempunyai agihan sebesar 31,9% di wilayah Kabupaten Purworejo. Untuk keperluan pertanian, jenis tanah ini mempunyai produktivitas rendah sampai dengan tinggi. Disamping untuk budidaya pertanian tanah jenis ini juga dimanfaatkan untuk pengembangan permukiman.
- b) Tanah Regosol mempunyai produktivitas rendah sampai dengan tinggi dengan agihan sebesar 5,03%. Tanah jenis ini banyak dimanfaatkan

- masyarakat Kabupaten Purworejo untuk keperluan pertanian dan perkebunan.
- c) Tanah Latosol mendominasi wilayah Kabupaten Purworejo dengan agihan sebesar 63,07%, dengan produktivitas sedang hingga tinggi. Jenis tanah ini merupakan tanah pertanian yang relatif baik.



Gambar 2.10 Peta Geologi Kabupaten Purworejo
Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023

Kondisi sumber daya alam untuk mendukung kegiatan pembangunan berhubungan dengan sumber daya batuan. Kabupaten Purworejo memiliki potensi bahan tambang yang dapat mendukung kegiatan pembangunan. Adapun potensi sumber daya alam non logam berupa batuan di Kabupaten Purworejo tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7 Potensi Sumber Daya Batuan di Kabupaten Purworejo

No.	KECAMATAN	JENIS BATUAN TAMBANG						TOTAL
		ANDESIT	BATU BELAH	DASIT	SIRTU	TANAH URUG	TRAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kec. Bagelen	3.197,25	-	328,96	-	-	-	3.526,21
2	Kec. Bener	1.723,80	1,51	-	45,47	-	-	1.770,79
3	Kec. Gebang	-	-	-	0,22	-	-	0,22
4	Kec. Kaligesing	2.927,94	-	24,39	62,76	-	-	3.015,10
5	Kec. Kemiri	-	-	-	84,97	-	-	84,97
6	Kec. Loano	1.630,35	-	-	254,67	138,49	-	2.023,51
7	Kec. Purworejo	677,78	-	-	110,93	73,24	33,66	895,60
KAB. PURWOREJO		10.157,12	1,51	353,36	559,02	211,73	33,66	11.316,40

Sumber: Data Sebaran Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Tengah, 2023

Dilihat dari potensi persebarannya, menunjukkan bahwa andesit, andesit pasir dan kaolin memiliki potensi luasan yang besar di Kabupaten Purworejo. Andesit merupakan jenis bahan tambang yang besar di Kabupaten Purworejo, dimana luasannya sekitar 10.157,12 hektar untuk luas potensi tambang andesit. Luas potensi tersebar adalah bahan tambang andesit yang tersebar di Kecamatan Bagelen, Bener, Kaligesing, Loano, dan Purworejo. Selain bahan galian andesit, terdapat beberapa bahan galian batuan lainnya di Kabupaten Purworejo seperti bahan galian sirtu yang menjadi bahan galian tambang dengan potensi terbesar kedua di Purworejo, ada juga bahan galian batu belah, dasit, tanah urug, dan tras. Keenam bahan tambang batuan yang potensial ini tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Bagelen, Bener, Gebang, Kaligesing, Kemiri, Loano, dan Purworejo.

2) **Sumber Daya Air**

Secara **hidrogeologis**, sumber air di Kabupaten Purworejo terdiri dari air permukaan dan air tanah. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo meliputi sungai, mata air, dan waduk/bendungan. Terdapat beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Purworejo yang bermuara di Samudera Indonesia. Sungai-sungai tersebut termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto, Cokroyasan dan Wawar. Hulu-hulu sungai tersebut umumnya berada di bagian timur dan utara Kabupaten Purworejo.

Tabel 2. 8 Data DAS di Kabupaten Purworejo

No.	Nama DAS	Panjang Sungai (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Debit Min (M ³ /Det)	Debit Max (M ³ /Det)	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DAS Cokroyasan	35,93	65,00	62,00	251	541	35.100
2	DAS Mawar	68,98	50,00	45,00	245	1.347	78.000
3	DAS Bogowonto	91,38	49,00	47,00	600	1.187	59.000

Sumber: BPSDA Probolo, 2024

Selain sungai, bendung/waduk juga menjadi sumber air permukaan di Kabupaten Purworejo. Pembangunan Bendung Bener di Kabupaten Purworejo yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat juga menjadi salah satu sumber air yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat.

Setidaknya terdapat 41 danau/embung/situ/waduk yang ada di Kabupaten Purworejo, adapun daftarnya sebagai berikut.

Tabel 2. 9 Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung di Kabupaten Purworejo

No	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Lokasi
1	2	3
1	Kembangkuning	Desa Kembangkuning, Kec. Ngombol
2	Kedungloteng	Desa Kedungloteng, Kec. Bener
3	Penungkulan	Desa Penungkulan, Kec. Gebang
4	Sukowuwuh	Desa Sukowuwuh, Kec. Bener
5	Sukowuwuh	Desa Sukowuwuh, Kec. Bener
6	Banyuasinsepare	Desa Banyuasinsepare, Kec. Loano
7	Ngadirejo	Desa Ngadirejo, Kec. Kaligesing
8	Bapangsari	Desa Bapangsari, Kec. Bagelen
9	Kamijoro	Desa Kamijoro, Kec. Bener



No	Nama Danau/Waduk/ Situ/Embung	Lokasi
1	2	3
10	Ngargosari	Desa Ngargosari, Desa Loano
11	Ngasinan	Desa Ngasinan, Kec. Bener
12	Nglaris	Desa Nglaris, Kec. Bener
13	Pakisarum	Desa Pakisarum, Kec. Bruno
14	Sedayu	Desa Sedayu, Kec. Loano
15	Sidomukti	Desa Sidomukti, Kec. Bener
16	Somoleter	Desa Somoleter, Kec. Bruno
17	Tepansari	Desa Tepansari, Kec. Loano
18	Watuduwur	Desa Watuduwur, Kec. Bruno
19	Kaliglagah	Desa Kaliglagah, Kec. Loano
20	Brunosari	Desa Brunosari, Kec. Bruno
21	Plipiran	Desa Plipiran, Kec. Bruno
22	Karanggedang	Desa Karanggedang, Kec. Bruno
23	Gunungcondong	Desa Gunungcondong, Kec. Bruno
24	Cepedak	Desa Cepedak, Kec. Bruno
25	Gowong	Desa Gowong, Kec. Bruno
26	Sendangsari	Desa Sendangsari, Kec. Bener
27	Wadas	Desa Wadas, Kec. Bener
28	Pekacangan	Desa Pekacangan, Kec. Bener
29	Jati	Desa Jati, Kec. Bener
30	Bener	Desa Bener, Kec. Bener
31	Medono	Desa Medono, Kec. Bener
32	Kaliboto	Desa Kaliboto, Kec. Bener
33	Banyuasinkembaran	Desa Banyuasinkembaran, Kec. Loano
34	Sucenjuritengah	Desa Sucenjuritengah, Kec. Bayan
35	Cacaban Kidul	Desa Cacaban Kidul, Kec. Bener
36	Sidomukti	Desa Sidomukti, Kec. Bener
37	Brondong	Desa Brondong, Kec. Bener
38	Bleber	Desa Bleber, Kec. Bener
39	Sedayu	Desa Sedayu, Kec. Loano
40	Banyuasin Separe	Desa Banyuasin Separe, Kec. Loano
41	Wonosri	Desa Wonosri, Kec. Ngombol

Sumber: DIKPLHD Kabupaten Purworejo, 2023

Di sisi lain, terdapat 58 titik mata air di Kabupaten Purworejo dengan total debit 169,2 m³/ detik. Berikut daftar kawasan mata air di Kabupaten Purworejo:

Tabel 2. 10 Data Kawasan Mata Air di Kabupaten Purworejo

No	Nama Mata Air	Desa	Kecamatan	Debit
1	2	3	4	5
1	Tuk Umbul	Medono	Bener	10,10
2	Siloko	Ngasinan	Bener	3,00
3	Pening	Ngasinan	Bener	2,00
4	Sirebut	Benowo	Bener	10,00
5	Tuksiwaru	Limbangan	Bener	10,00
6	Tuk Siwuang	Limbangan	Bener	7,00
7	Tuk Mudal	Kalinongko	Loano	42,50
8	Simbar Joyo	Mudalrejo	Loano	27,78
9	Sedayu / Ngrau	Sedayu	Loano	3,40
10	Tuk Songo	Purworejo	Purworejo	7,00
11	Kedungkebo	Pangenrejo	Purworejo	4,64
12	Sekalapan	Pakem	Gebang	1,50
13	Tirip	Rendeng	Gebang	1,70



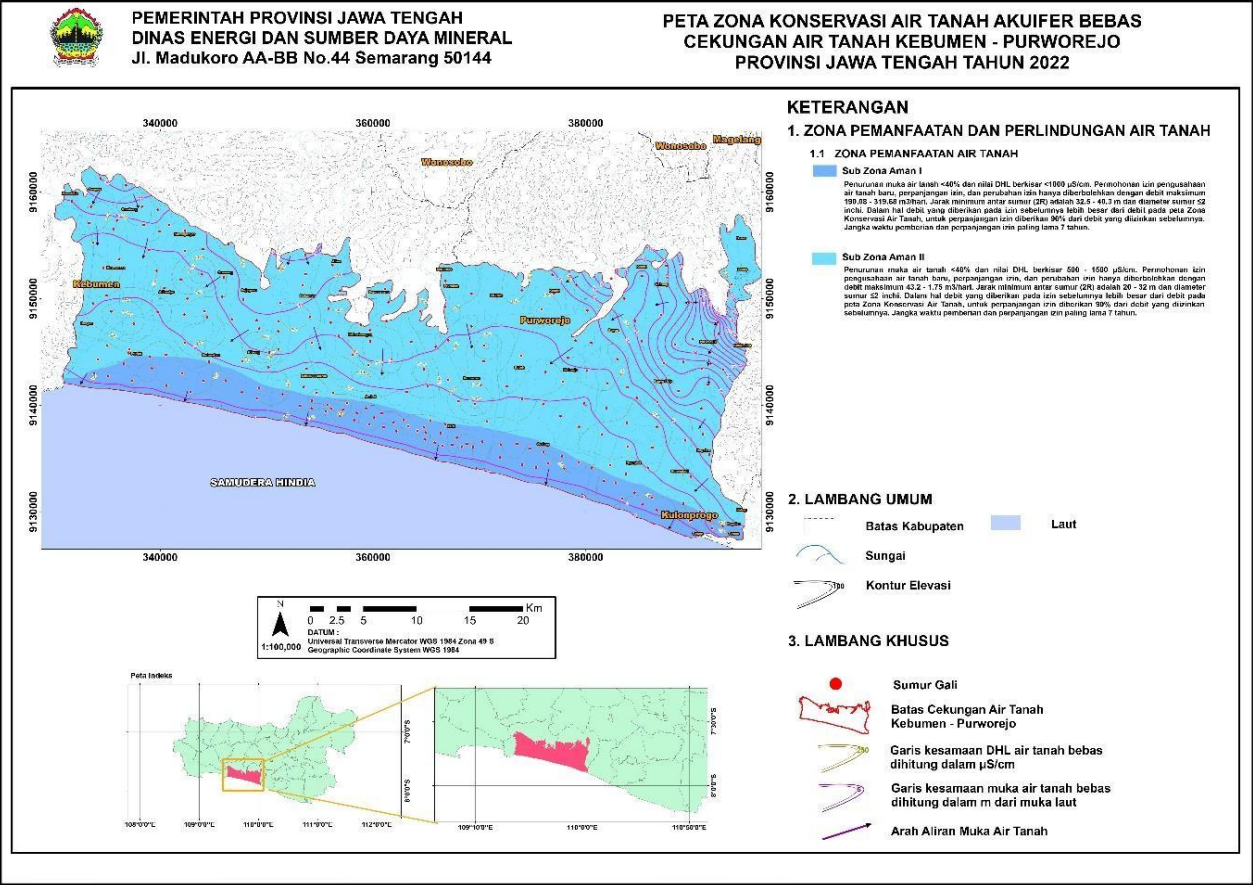
No	Nama Mata Air	Desa	Kecamatan	Debit
1	2	3	4	5
14	Siranda	Girijoyo	Pituruh	5,00
15	Gondosuli I	Pamriyan	Pituruh	2,00
16	Gondosuli II	Pamriyan	Pituruh	3,00
17	Sipetung	Wonosido	Pituruh	3,00
18	Kedondong	Kaligondang	Pituruh	2,00
19	Andong	Brunosari	Bruno	3,00
20	Siglodak	Cempedak	Bruno	2,00
21	Pakisarum	Pakisarum	Bruno	1,00
22	Plipiran	Plipiran	Bruno	2,00
23	Tirip	Clapar	Bagelen	10,00
24	Beji	Clapar	Bagelen	5,00
25	Kaliputat	Clapar	Bagelen	3,00
26	Kali Clapar	Clapar	Bagelen	3,00
27	Nglegok	Soko	Bagelen	5,00
28	Lemah Putih	Soko	Bagelen	20,00
29	Sipoh	Semagung	Bagelen	5,00
30	Ngaglik	Semagung	Bagelen	4,00
31	Sekopek	Semono	Bagelen	4,00
32	Karangginem	Semono	Bagelen	4,00
33	Gandik	Semono	Bagelen	4,00
34	Depok	Semono	Bagelen	6,00
35	Klegen	Semono	Bagelen	3,00
36	Belik	Piji	Bagelen	5,00
37	Pernolo	Kemanukan	Bagelen	5,00
38	Jembangan	Kemanukan	Bagelen	3,00
39	Bawi	Kemanukan	Bagelen	3,00
40	Sipucung	Kemanukan	Bagelen	3,00
41	Sitolang	Sokoagung	Bagelen	2,00
42	Pucungsawit	Sokoagung	Bagelen	2,00
43	Sidandang	Hargorojo	Bagelen	10,00
44	Curug	Sokoagung	Bagelen	6,00
45	Pancuran	Tlogokotes	Bagelen	2,00
46	Singobarong	Somorejo	Bagelen	2,00
47	Pletuk Kidul	Dadirejo	Bagelen	2,00
48	Sudorogo 1	Sudorogo	Kaligesing	2,00
49	Sudorogo 2	Sudorogo	Kaligesing	2,00
50	Tawang Sari 1	Tawang Sari	Kaligesing	3,00
51	Tawang Sari 2	Tawang Sari	Kaligesing	1,00
52	Tawang Sari 3	Tawang Sari	Kaligesing	1,00
53	Tlogobulu 1	Tlogobulu	Kaligesing	3,00
54	Tlogobulu 2	Tlogobulu	Kaligesing	1,00
55	Purbowono 1	Purbowono	Kaligesing	2,00
56	Purbowono 2	Purbowono	Kaligesing	3,00
57	Purbowono 3	Purbowono	Kaligesing	2,00
58	Kaliglagah	Kaliglagah	Kemiri	2,00

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo 2021-2041

Sedangkan air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air (akuifer) di bawah permukaan tanah. Air tanah dibagi menjadi dua yakni air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur. Potensi air bawah tanah Kabupaten Purworejo berada

pada cekungan air bawah tanah (CAT) Kebumen-Purworejo meliputi daerah Gombang bagian barat sampai Kabupaten Purworejo bagian Timur. Luas CAT Kebumen-Purworejo ini adalah 109.800 hektar dengan potensi air bawah tanah bebas/ dangkal sebesar 269,6 juta m³ per tahun. Sedangkan luas cekungan yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Purworejo adalah 48.480 hektar dengan potensi air bawah tanah bebas/dangkal 119,04 juta m³/tahun.

Selain air permukaan, efisiensi pemanfaatan sumber daya air tanah juga perlu diperhatikan sebagai salah satu cadangan air untuk pemenuhan kebutuhan air di Kabupaten Purworejo. Pemanfaatan dan perlindungan air tanah di Kabupaten Purworejo dapat dibagi menjadi 2 (dua) zona, yaitu zona pemanfaatan air tanah sub zona aman 1 dan zona pemanfaatan air tanah sub zona aman 2. Secara lengkap peta cekungan air tanah di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 11 Peta Zona Cekungan Air Tanah Kebumen-Purworejo
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo, 2024

3) **Sumber Daya Hutan**

Hutan di definisikan sebagai sebuah tempat yang berupa lahan luas dan terdiri dari komponen-komponen biotik dan abiotik yang didalamnya terdapat ekosistem yang saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini setara dengan yang tercantum pada UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 1 yang mendefinisikan hutan sebagai satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Berikut merupakan luasan pembagian kawasan hutan di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2. 11 Luasan Hutan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Purworejo (Ha)

Tahun	Luas Pembagian Kawasan Hutan (Hektar)				Jumlah
	Hutan Lindung	Kawasan Perlindungan	Kawasan untuk Produksi	Kawasan untuk Pengguna Lain	
1	2	3	4	5	6
2020	0	927	7.413,40	492,2	8.832,60
2021	0	927	7.408,03	497,64	8.832,67
2022	0	1.031,40	7.235,69	532,48	8.799,57
2023	0	1.090,94	7.293,14	559,08	8.943,16
2024	0	1.196,57	6.788,58	560,1	8.545,25

Sumber: Perum Perhutani Divisi Regional I Jawa Tengah

Berdasarkan tabel di atas, hutan di Kabupaten Purworejo di dominasi oleh hutan kawasan produksi dengan luas 6.788,58 Ha pada tahun 2024. Luas hutan di Kabupaten Purworejo dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan luasan dari seluas 8.832,60 Ha di tahun 2020 menjadi 8.545,25 Ha di tahun 2024. Penurunan luasan hutan ini perlu diantisipasi melalui penguatan pengawasan, pengelolaan hutan lestari, penyelesaian konflik lahan, rehabilitasi hutan, edukasi masyarakat, dan mitigasi kerusakan lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan Perum Perhutani, sangat penting untuk menjaga keberlanjutan hutan produksi di Purworejo.

c. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Secara umum, konsep daya dukung dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi ketersediaan dengan melihat karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah, serta dari sisi kebutuhan yaitu dengan melihat kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya dan arahan kebijakan prioritas suatu wilayah.

Status daya dukung dan daya tampung air Kabupaten Purworejo dihitung dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air di tiap grid. Nilai negatif (-) menunjukkan daya dukung terlampaui, sedangkan nilai positif (+) berarti daya dukung masih mencukupi. Hasil perhitungan tiap kecamatan disajikan dalam tabel berikut.

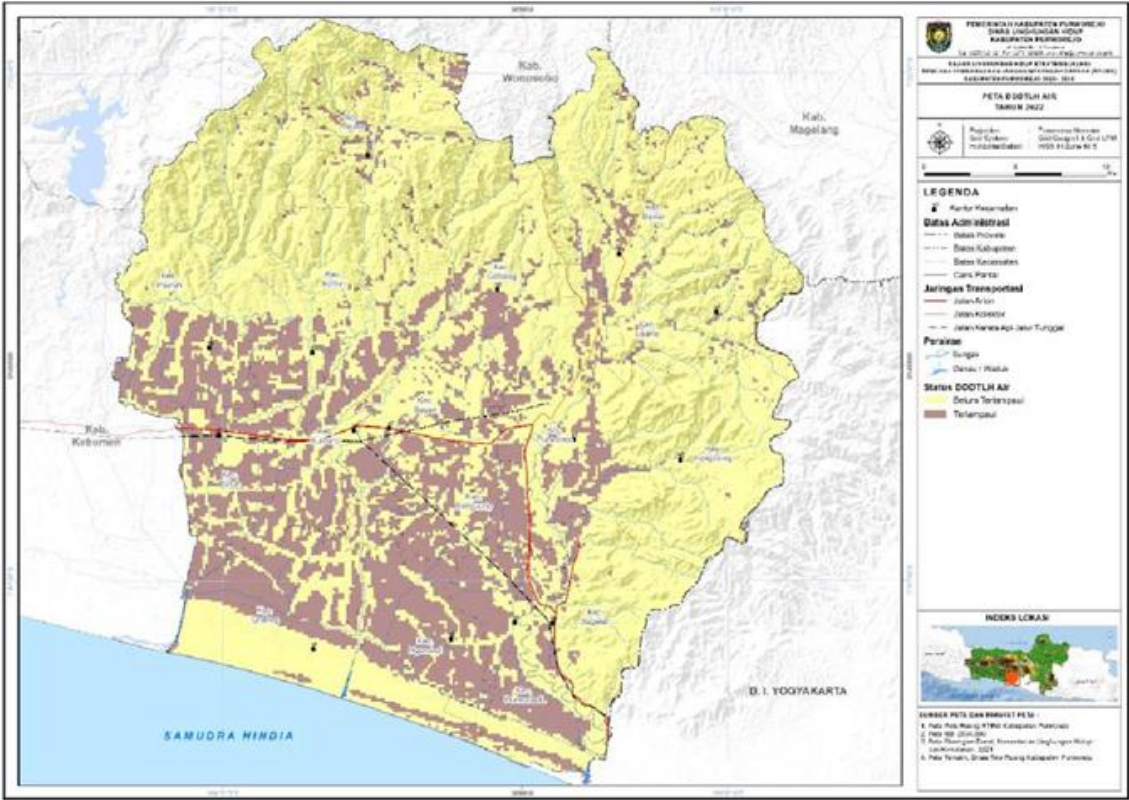
Tabel 2. 12 Status Daya Dukung Air Per Kecamatan di Kabupaten Purworejo

No	Nama Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air (m3/tahun)	Selisih (m3/tahun)	Daya Dukung Air	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bagelen	76430872.27	40445758.63	35985113.64	Surplus	89.20%	10.80%
2.	Banyuwirip	68802508.24	75965451.34	-7162943.1	Defisit	38.39%	61.61%
3.	Bayan	58060611.69	50080960.67	7979651.019	Surplus	63.86%	36.14%
4.	Bener	137837334.7	62720731.75	75116602.95	Surplus	92.10%	7.90%
5.	Bruno	138547401.5	50578048.54	87969352.96	Surplus	91.88%	8.12%
6.	Butuh	65701892.15	72407573.28	-6705681.13	Defisit	37.90%	62.10%
7.	Gebang	86366251.68	67506593.33	18859658.35	Surplus	79.51%	20.49%
8.	Grabag	78257277.05	74895209.34	3362067.709	Surplus	58.28%	41.72%
9.	Kaligesing	96156365.13	32397216.57	63759148.56	Surplus	99.02%	0.98%
10.	Kemiri	123085698.4	83008307.97	40077390.43	Surplus	83.16%	16.84%
11.	Kutoarjo	43925313.71	45659111.56	-1733797.85	Defisit	44.67%	55.33%

No	Nama Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air (m3/tahun)	Selisih (m3/tahun)	Daya Dukung Air	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Loano	63489700.25	44248786.82	19240913.43	Surplus	85.49%	14.51%
13.	Ngombol	74848076.54	86460583.38	-11612506.8	Defisit	36.63%	63.37%
14.	Pituruh	113708131.1	62941683.96	50766447.14	Surplus	71.89%	28.11%
15.	Purwodadi	63034715.13	68117331.83	-5082616.7	Defisit	44.65%	55.35%
16.	Purworejo	59290523.72	48403913.83	10886609.89	Surplus	70.75%	29.25%
Total		1347542673	965837262.8	381705410.2	Surplus	72.58%	27.42%

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Kabupaten Purworejo memiliki kondisi daya dukung air surplus sebesar 381.705.410,52 m³/tahun, dengan ketersediaan air 1.347.542.673,30 m³/tahun dan kebutuhan air 965.837.262,8 m³/tahun. Kebutuhan air hanya 2/3 dari ketersediaan, sehingga potensi surplus mencapai 72,58%. Namun, terdapat lima kecamatan yang mengalami defisit, dengan defisit tertinggi di Kecamatan Ngombol (63,37%), Butuh (62,10%), dan Banyuurip (61,61%), sedangkan 10 kecamatan lainnya berstatus surplus. Gambaran spasial status daya dukung air tersedia pada ilustrasi berikut.



Gambar 2. 12 Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Purworejo

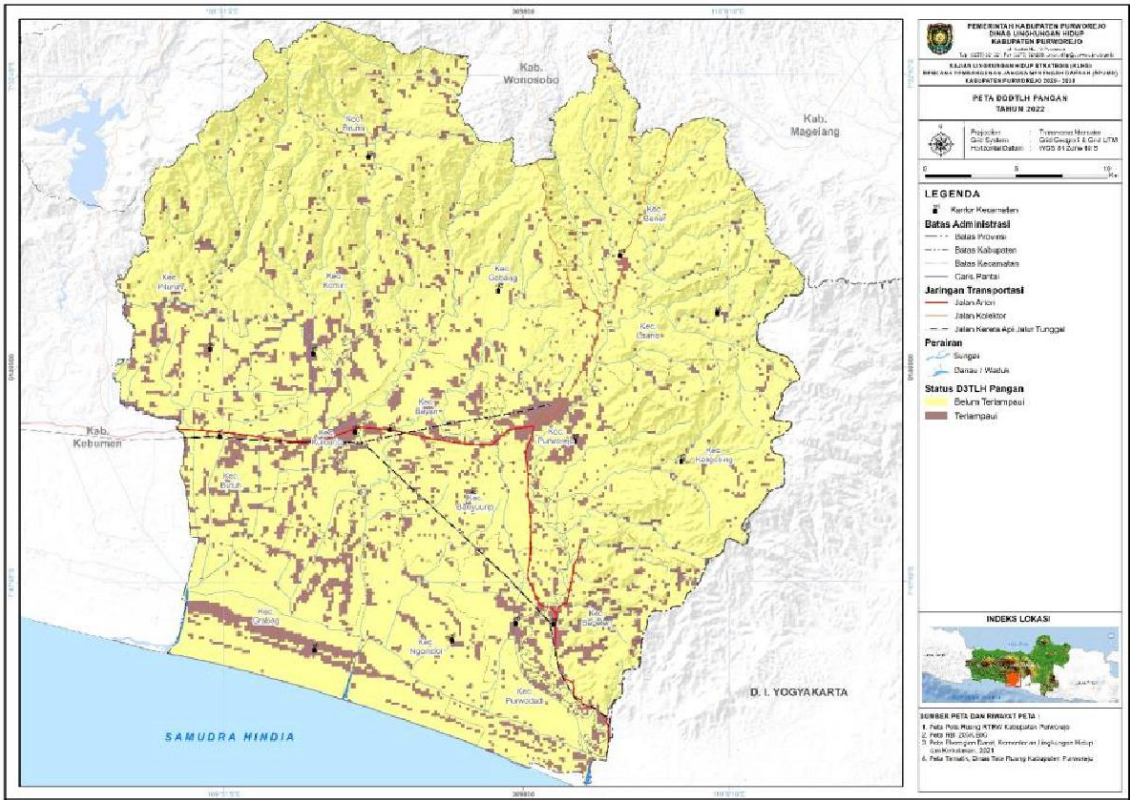
Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Kabupaten Purworejo memiliki kondisi **daya dukung pangan** surplus sebesar 3.967,03 ton, dengan ketersediaan pangan 7.672,91 ton dan kebutuhan 3.705,88 ton. Meski surplus, 21,67% wilayahnya telah melampaui daya dukung pangan. Seluruh kecamatan berstatus surplus, dengan Kecamatan Bener memiliki persentase belum terlampaui tertinggi (95,71%) karena dominasi lahan sawah dan jumlah penduduk yang relatif rendah. Hasil lengkap perhitungan daya dukung pangan tiap kecamatan di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 13 Status Daya Dukung Pangan Per Kecamatan di Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (Ton)	Kebutuhan Pangan (Ton)	Selisih (Ton)	Daya Dukung Pangan	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bagelen	8495,48	3.832,23	4.663,24	Surplus	80,83%	19,17%
2.	Banyuwirip	9.933,65	4.046,05	5.887,60	Surplus	87,78%	12,22%
3.	Bayan	8.003,95	3.640,92	4.363,03	Surplus	81,18%	18,82%
4.	Bener	14.995,44	3.720,29	11.275,15	Surplus	95,71%	4,29%
5.	Bruno	13.422,27	2.914,94	10.507,34	Surplus	94,03%	5,97%
6.	Butuh	9.520,64	4.277,55	5.243,09	Surplus	80,65%	19,35%
7.	Gebang	10.651,55	2.879,10	7.772,46	Surplus	93,47%	6,53%
8.	Grabag	10.995,70	5.191,51	5.804,19	Surplus	77,63%	22,37%
9.	Kaligesing	9.076,40	2.180,58	6.895,82	Surplus	95,14%	4,86%
10.	Kemiri	13.929,60	4.536,33	9.393,27	Surplus	87,17%	12,83%
11.	Kutoarjo	6.270,56	3.184,61	3.085,95	Surplus	73,77%	26,23%
12.	Loano	7.150,07	2.046,33	5.103,73	Surplus	95,14%	4,86%
13.	Ngombol	10.867,62	4.036,10	6.831,51	Surplus	88,21%	11,79%
14.	Pituruh	12.853,06	4.535,96	8.317,11	Surplus	88,01%	11,99%
15.	Purwodadi	8.963,11	3.952,18	5.010,93	Surplus	82,29%	17,71%
16.	Purworejo	7.672,91	3.705,88	3.967,03	Surplus	78,33%	21,67%
Total		162.802	58.680,58	104.121,42	Surplus	87,62%	12,38%

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029



Gambar 2.13 Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Purworejo

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

d. Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis Jasa Lingkungan Hidup

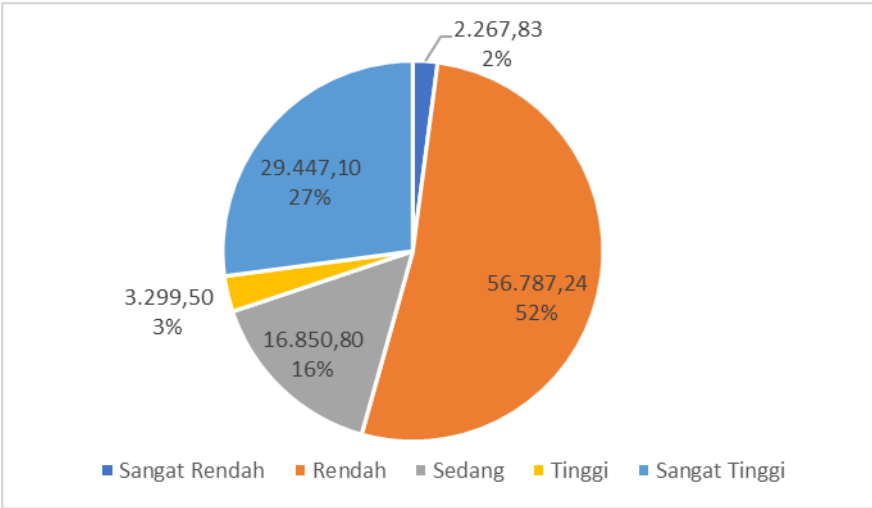
Analisis daya dukung daya tampung lingkungan hidup bertujuan untuk memetakan kemampuan lahan di suatu wilayah studi dalam menunjang kehidupan makhluk hidup di atasnya. Secara umum, terdapat empat fungsi ekosistem yang dievaluasi, yaitu fungsi penyedia, fungsi pengatur (regulasi), sosial budaya, dan fungsi pendukung. Analisis tersebut penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo

memberikan jasa kepada manusia yang tinggal di dalamnya. Jasa ekosistem/lingkungan hidup yang dianalisis sebagai berikut.

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Daya dukung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem penyedia bahan pangan (P1) mengacu pada kemampuan alamiah ekosistem dalam menyediakan pangan, baik dari sumber hayati seperti tanaman dan hewan maupun dari air, seperti ikan. Faktor utama yang memengaruhi kemampuan ini adalah ekoregion bentang lahan dan tutupan lahan. Ekoregion dengan tanah subur, seperti dataran aluvial, memiliki potensi tinggi untuk menyediakan pangan. Tutupan vegetasi yang rapat juga meningkatkan potensi penyediaan pangan karena keberagaman tumbuhan yang dapat dimanfaatkan.

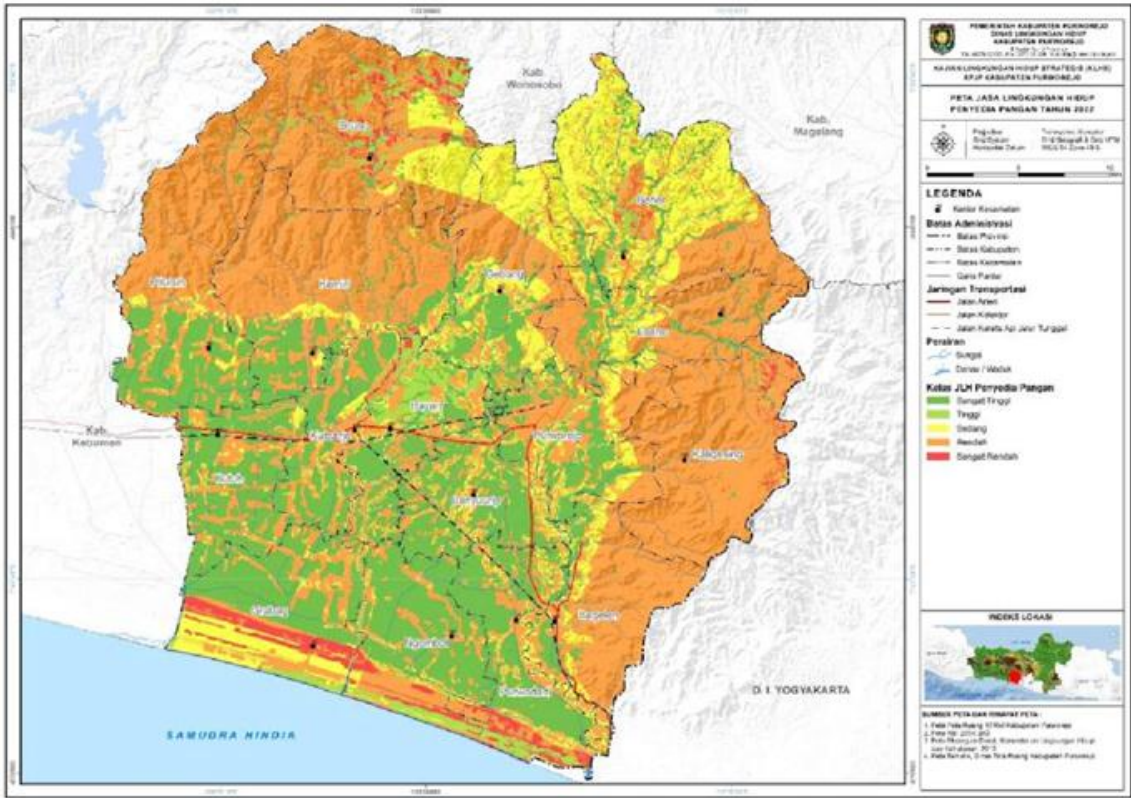
Layanan ekosistem pangan mencakup hasil hutan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Analisis daya dukung ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan guna mendukung penyediaan pangan secara luas. Pangan sebagai kebutuhan dasar sebagian besar disediakan oleh alam dalam bentuk beragam. Oleh karena itu, manusia bertanggung jawab menjaga dan melestarikan sumber daya tersebut untuk keberlanjutan bersama semua makhluk hidup. Potensi jasa ekosistem sangat ditentukan oleh jenis ekoregion dan tingkat tutupan lahan.



Gambar 2. 14 Persentase Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kab. Purworejo

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Purworejo

Berdasarkan hasil analisis, Kabupaten Purworejo didominasi kemampuan penyediaan bahan pangan kelas sedang (52%), dengan konsentrasi di bagian selatan, seperti Kecamatan Purwodadi, Ngombol, Grabag, Butuh, Banyuurip, dan Bayan. Penyediaan bahan pangan kelas sangat tinggi mencakup 27% wilayah, umumnya berada di daerah datar yang cocok untuk sawah. Sisanya memiliki kelas rendah, sedang, tinggi, hingga sangat rendah. Wilayah utara dan timur Purworejo, dengan topografi pegunungan yang lebih heterogen, memiliki kemampuan penyediaan pangan yang lebih terbatas. Peta berikut menggambarkan distribusi kemampuan penyediaan bahan pangan di kabupaten tersebut.



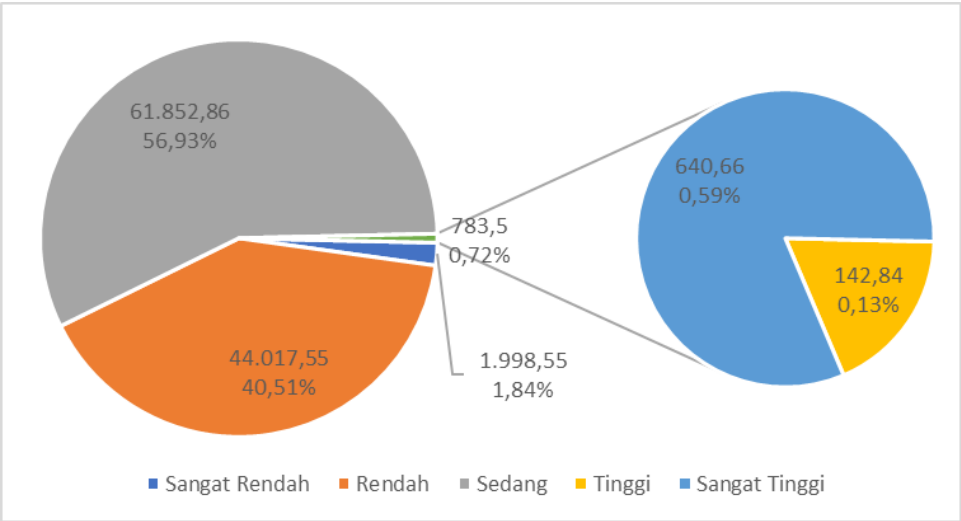
Gambar 2. 15 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Kabupaten Purworejo

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air

Daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem penyedia air bersih (P2) mencakup berbagai sumber air seperti air permukaan, air tanah, dan air hujan yang diperlukan untuk mendukung kehidupan. Faktor utama yang memengaruhi jasa ekosistem ini meliputi curah hujan, jenis tanah dan batuan, bentanglahan, tutupan lahan, serta vegetasi. Lahan dengan vegetasi rapat umumnya memiliki potensi tinggi untuk penyediaan air bersih karena kemampuannya menyimpan air dalam jumlah besar.

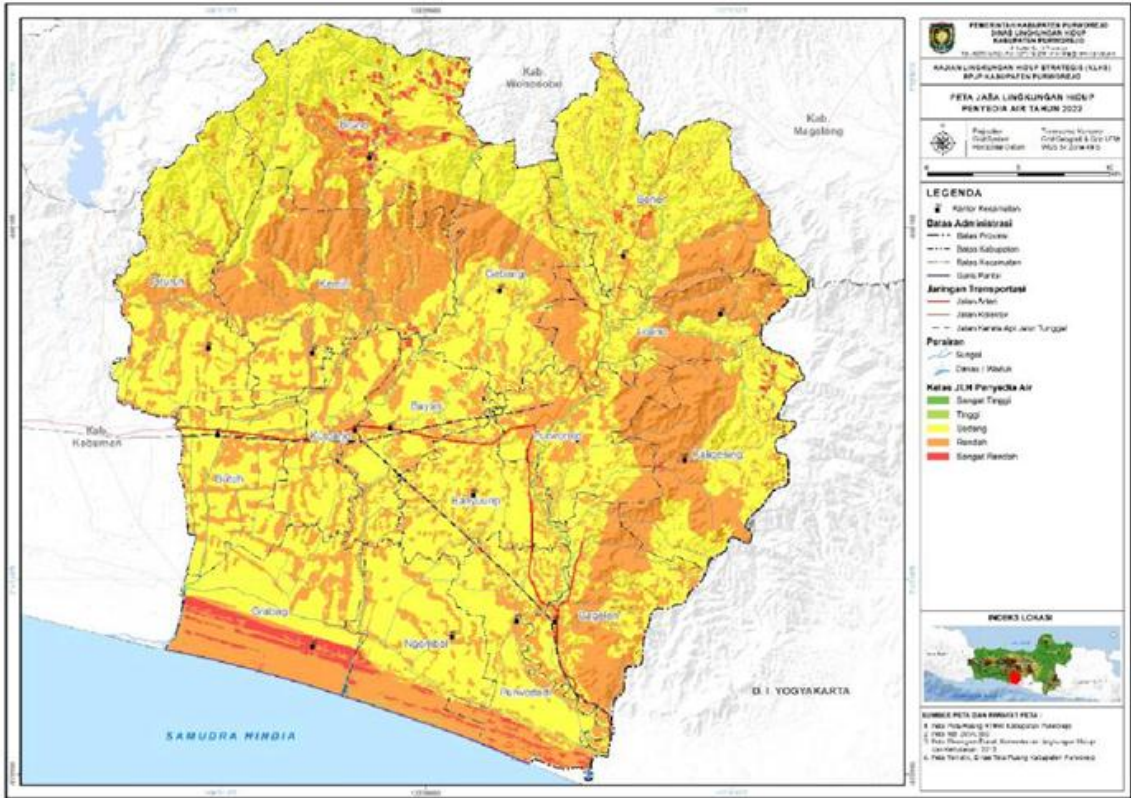
Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia yang lebih sering diprioritaskan dibandingkan pangan. Ketersediaan air, terutama di wilayah *recharge area*, penting untuk menjaga stabilitas pasokan. Sumber air bersih dapat berasal dari sungai, danau, sumur, maupun air olahan. Menurut Permenkes RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990, air bersih adalah air yang memenuhi standar kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak, serta digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pengelolaan dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekologis bagi generasi saat ini dan mendatang..



Gambar 2. 16 Persentase Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten Purworejo

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Purworejo

Diagram diatas menunjukkan bahwa jasa ekosistem di Kabupaten Purworejo sebagian besar berada pada kelas sedang, dengan persentase mencapai 57%. Hal ini menunjukkan ekosistem di Kabupaten Purworejo cukup terjaga. Hutan, perkebunan, dan lahan basah di wilayah ini turut berperan penting dalam menyerap, menampung, dan mengelola air hujan untuk mencegah banjir. Selain itu, hutan juga memiliki kemampuan untuk menyaring limbah berbahaya yang tercampur dalam air dan mendukung proses pembersihan limbah secara alami. Berikut peta daya dukung berbasis jasa ekosistem penyedia air di Kabupaten Purworejo.

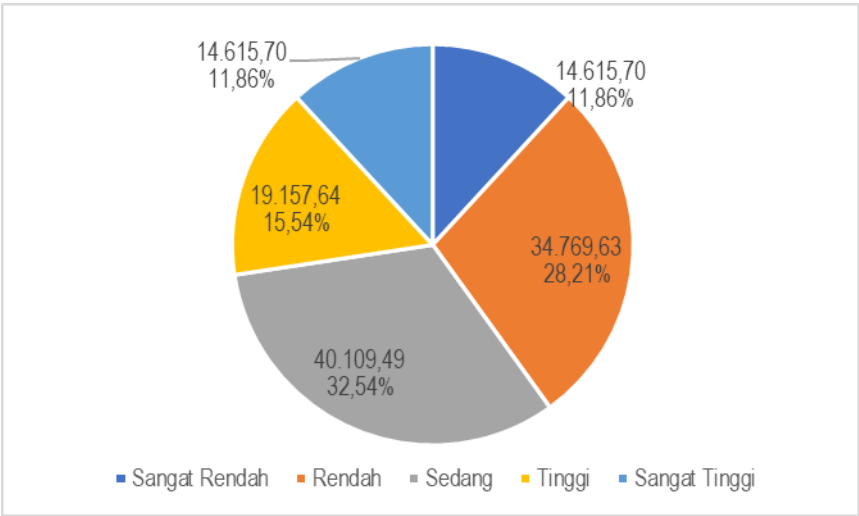


Gambar 2. 17 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Kabupaten Purworejo

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

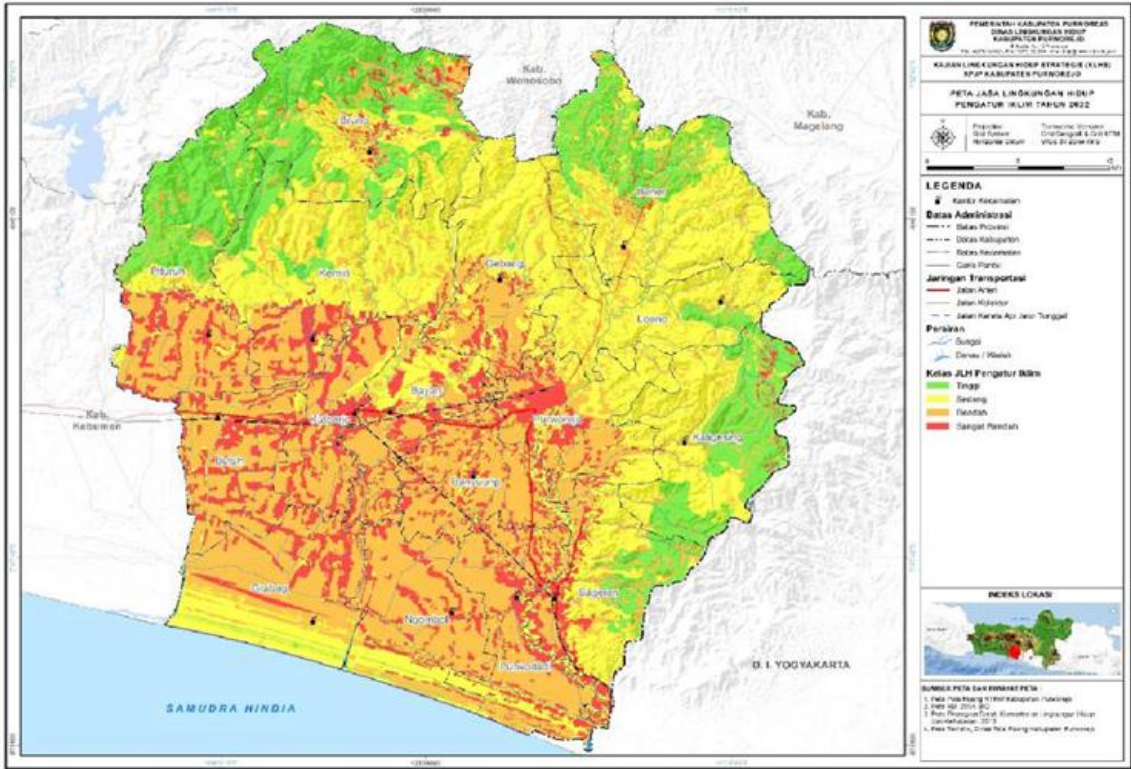
Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim

Jasa ekosistem pengaturan iklim merupakan kemampuan alami ekosistem untuk mengendalikan suhu, kelembaban, curah hujan, angin, gas rumah kaca, dan menyerap karbon. Faktor-faktor yang memengaruhi jasa ini meliputi tutupan vegetasi, ketinggian tempat, dan bentuk lahan. Wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi, vegetasi rapat, dan ketinggian besar, seperti pegunungan, memiliki pengaturan iklim yang lebih baik. Hal ini bermanfaat dalam mengurangi emisi karbon dioksida, efek rumah kaca, serta dampak pemanasan global, seperti kenaikan permukaan laut, perubahan iklim ekstrem, dan gelombang panas.



Gambar 2. 18 Persentase Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Kab. Purworejo
Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

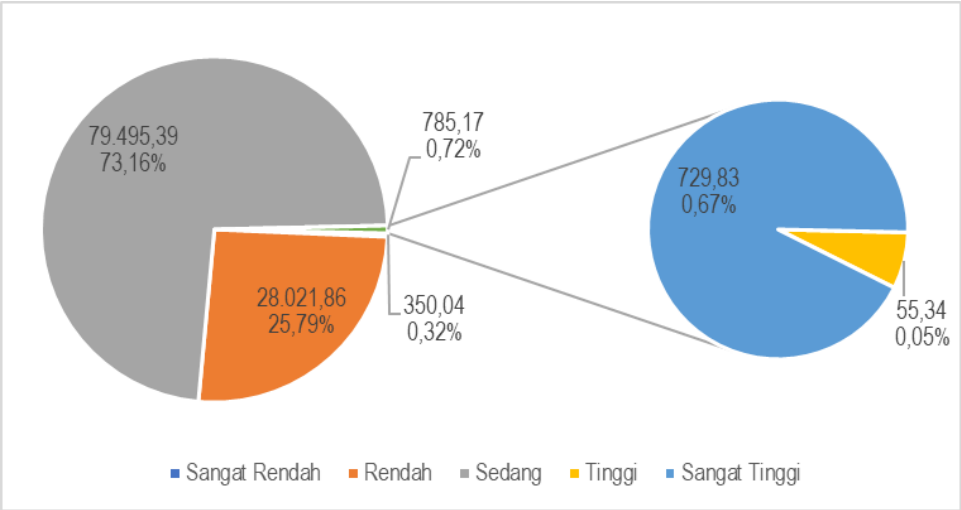
Diagram menunjukkan bahwa jasa ekosistem pengatur iklim di Kabupaten Purworejo didominasi oleh kelas sedang (37%) dan rendah (32%). Hal ini mencerminkan bahwa kondisi jasa pengatur iklim masih cukup terjaga, terutama di wilayah utara dan timur yang didominasi lahan kebun. Beberapa wilayah juga memiliki kelas tinggi, menandakan kualitas pengaturan iklim yang baik. Sebaliknya, wilayah dengan kelas rendah dan sangat rendah, yang terpusat di bagian tengah dan barat, memiliki topografi datar dan penggunaan lahan berupa area terbangun serta sawah, yang berkontribusi pada kemampuan pengaturan iklim yang lebih rendah. Distribusi spasial lengkap kelas jasa lingkungan hidup pengatur iklim di Kabupaten Purworejo ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 2. 19 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim Kabupaten Purworejo
Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tata Aliran Air

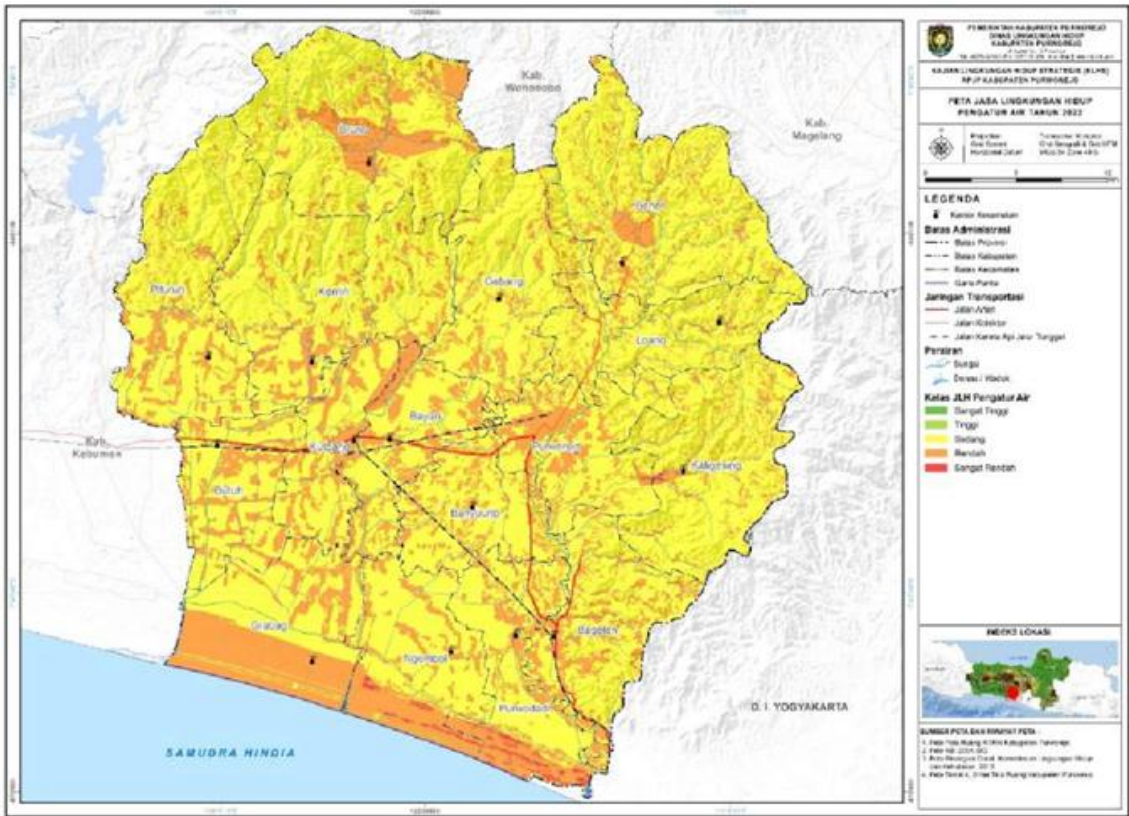
Siklus hidrologi adalah pergerakan air di atmosfer, biosfer, dan litosfer yang melibatkan penguapan, kondensasi, presipitasi, dan aliran air. Siklus ini mempengaruhi pengaturan tata air untuk kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Keberhasilan pengaturan tata air bergantung pada tutupan lahan dan fisiografi wilayah, di mana tutupan lahan yang rapat meningkatkan kapasitas pengelolaan air, sementara kondisi lereng memengaruhi potensi banjir. Siklus hidrologi yang efektif dapat meminimalisir bencana akibat luapan air dan mendukung kelangsungan ekosistem air.



Gambar 2. 20 Persentase Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Tata Air Kab. Purworejo

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Diagram di atas menunjukkan pembagian jasa ekosistem dalam lima kelas: Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah, yang menggambarkan kemampuan wilayah dalam pengaturan tata air. Keberadaan sungai dan bendungan mendukung siklus hidrologi dengan mengatur aliran air, serta berperan dalam menetralkan limbah dan pencemaran. Sungai-sungai di Kabupaten Purworejo, yang meliputi sungai ordo satu hingga ordo tiga, juga berkontribusi terhadap fungsi tersebut. Peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem pengaturan tata aliran air juga disajikan.



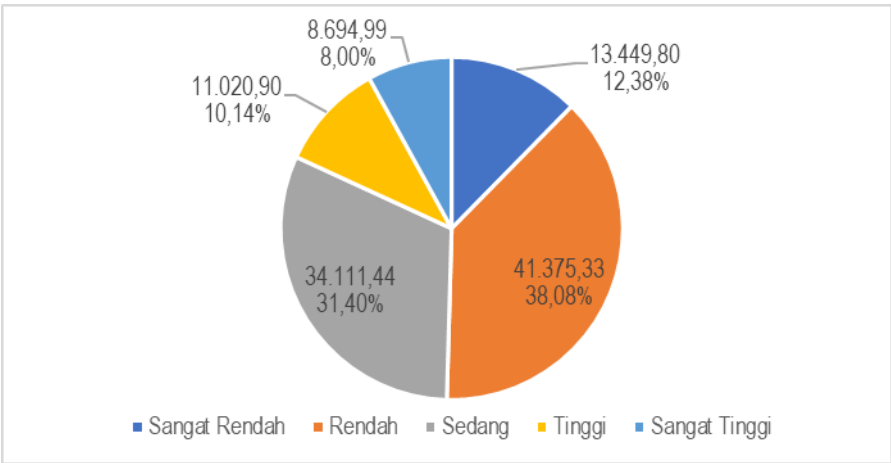
Gambar 2. 21 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Aliran Air Kabupaten Purworejo

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

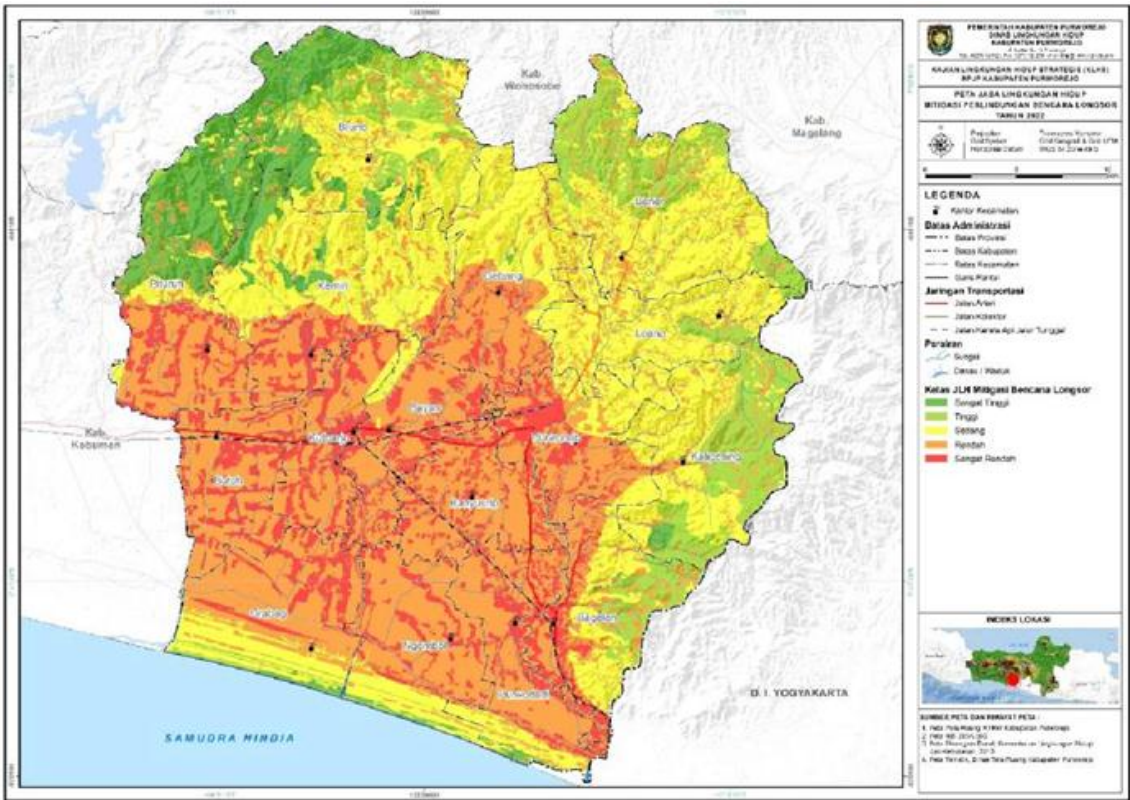
Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor

Jasa lingkungan mitigasi bencana longsor merujuk pada kapasitas ekosistem dalam mencegah dan melindungi terhadap bencana tanah longsor. Seperti bencana banjir, longsor dapat dicegah di area dengan vegetasi rapat. Bentuk lahan, terutama di perbukitan, juga berpengaruh pada risiko bencana, dengan bencana erosi dan longsor sering terjadi pada lahan struktural dan denudasional. Indikator keadaan meliputi karakteristik bentang alam, vegetasi, dan tutupan lahan, sementara indikator kinerjanya adalah luasnya area yang berfungsi mencegah dan melindungi dari longsor. Hasil analisis perhitungan jasa lingkungan mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Purworejo, berdasarkan peta tutupan lahan terbangun 2022, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah berada di kelas sangat rendah (38,08% atau 41.375,33 Ha). Selain itu, 31,40% (34.111,44 Ha) wilayah termasuk dalam kelas sedang. Kondisi ini dipengaruhi oleh topografi dan penggunaan lahan, terutama di

wilayah selatan hingga pesisir Kabupaten Purworejo yang memiliki kemiringan rendah.



Gambar 2. 22 Kelas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Purworejo
Sumber: Dokumen RPPLH Kab. Purworejo

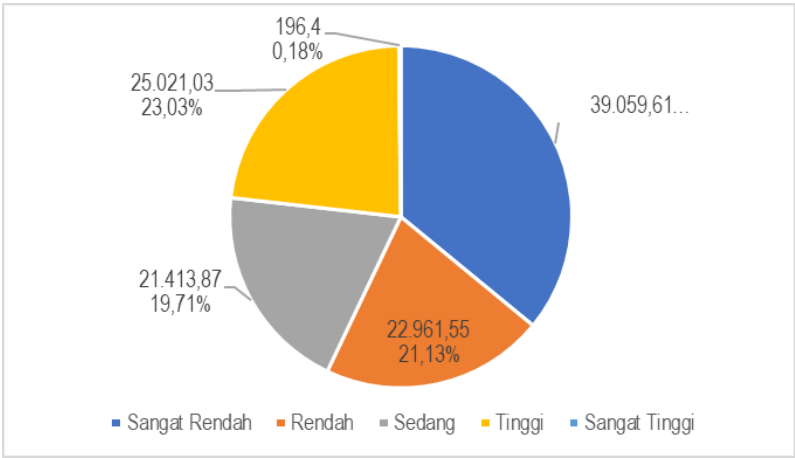


Gambar 2. 23 Peta Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Bencana Longsor Kab. Purworejo
Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Banjir

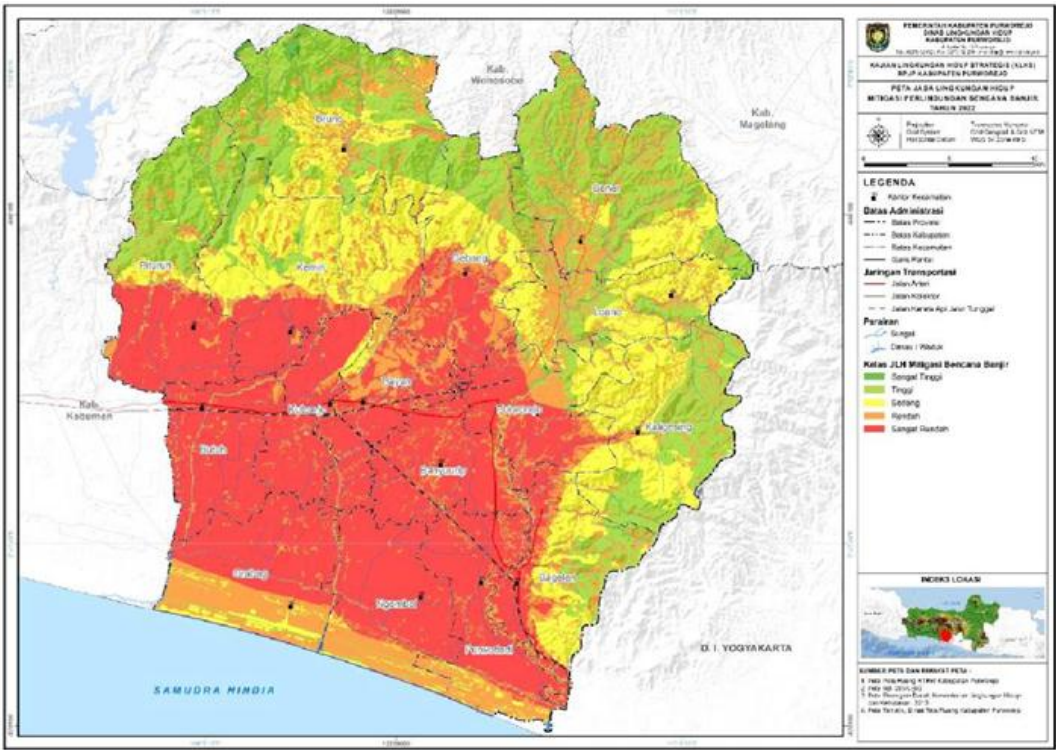
Jasa lingkungan mitigasi perlindungan bencana banjir di Kabupaten Purworejo didominasi oleh kelas rendah seluas 39.059,61 Ha (35,09% dari total wilayah) dan kelas sangat tinggi seluas 25.021,03 Ha (23,03%). Meskipun demikian, dalam lima tahun terakhir, hanya tercatat 6 kejadian banjir. Rendahnya kejadian banjir ini disebabkan oleh luas wilayah yang termasuk

dalam kelas sangat tinggi, yang relatif besar dan memberikan perlindungan terhadap bencana banjir.



Gambar 2. 24 Diagram Kelas JLH Pegatur Mitigasi Bencana Banjir di Kab. Purworejo

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029



Gambar 2. 25 Peta Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Bencana Banjir Kab. Purworejo

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

e. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1) Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan (Badan Pangan Nasional, 2022). Kondisi ini tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, dari sisi jumlah, dan mutu, seperti aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan salah satu inovasi dalam penyediaan data dan informasi pangan serta gizi untuk unit analisis tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKP

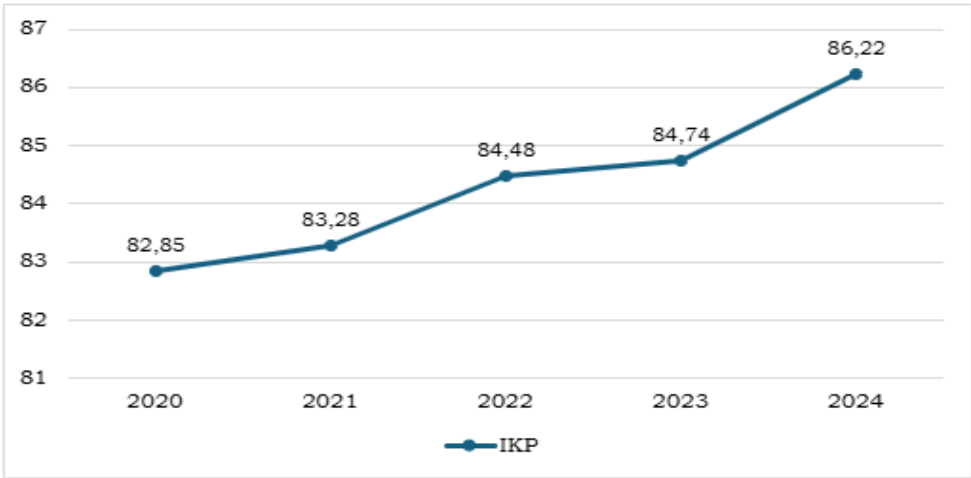
merupakan bagian dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) yang merupakan adopsi dari indeks global (*Global Food Security Index – GFSI*).

Indikator IKP secara garis besar terdiri dari aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Secara lebih rinci indikator masing-masing aspek disajikan pada tabel di bawah. Perhitungan indeks ketahanan pangan dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan IKP yaitu sangat rentan, rentan, agak rentan, agak tahan, tahan, dan sangat tahan.

Tabel 2.14. Indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

No	Indikator
Aspek Ketersediaan Pangan	
1.	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah
Aspek Keterjangkauan Pangan	
2.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
Aspek Pemanfaatan Pangan	
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
8.	Persentase balita <i>stunting</i>
9.	Angka harapan hidup pada saat lahir

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023



Gambar 2. 26 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

IKP Kabupaten Purworejo dari tahun 2020 hingga 2024, ketahanan pangan di Kabupaten Purworejo selalu berada dalam kelompok dengan ketahanan pangan yang baik di tingkat nasional meskipun nilai indeksnya mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2024, Kabupaten Purworejo menempati peringkat ke-51 dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, menunjukkan posisi yang relatif kuat dalam hal ketahanan pangan. Kinerja baik ini didorong oleh meningkatnya indeks ketersediaan dan indeks keterjangkauan pangan.

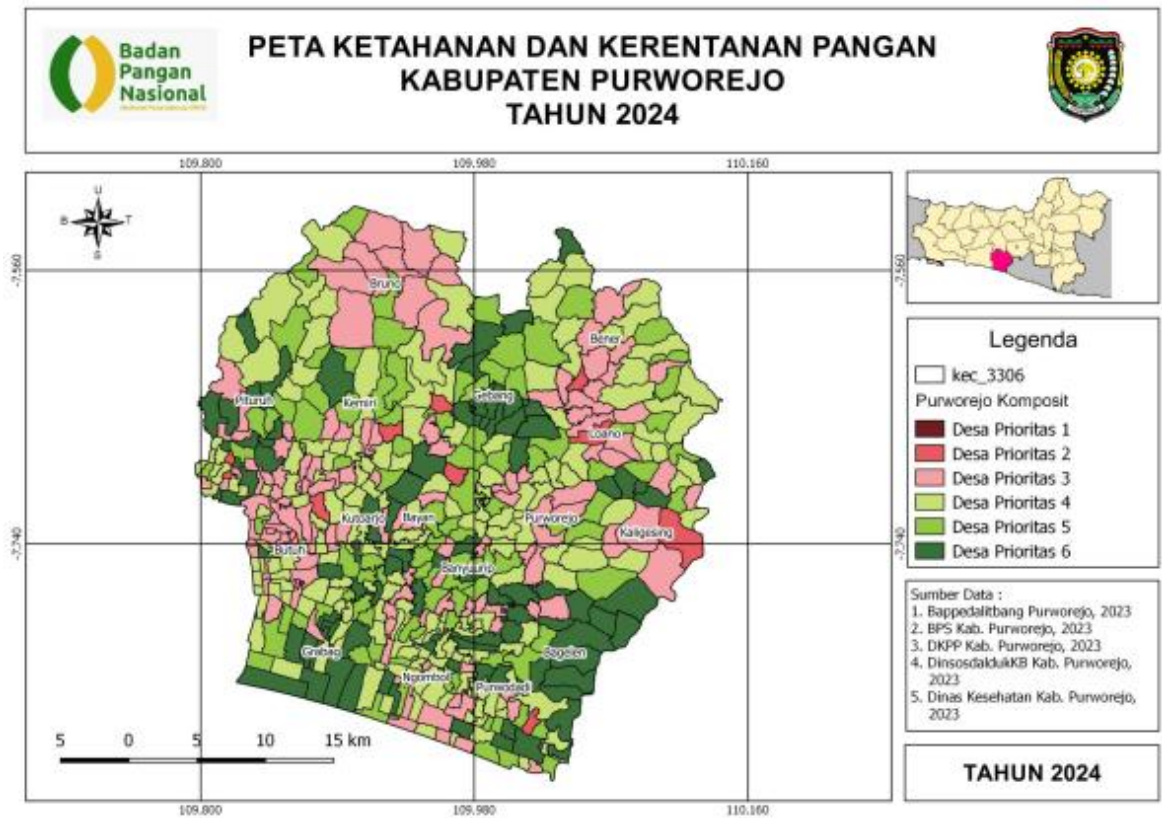
Meskipun IKP Kabupaten Purworejo menunjukkan nilai yang positif secara keseluruhan, penting untuk dicatat bahwa tidak semua kecamatan,

desa, atau penduduk di dalamnya memiliki tingkat ketahanan pangan yang sama. Untuk mengidentifikasi daerah yang benar-benar rentan terhadap masalah pangan, diperlukan pembuatan peta provinsi dan kabupaten hingga ke unit wilayah terkecil Berdasarkan Data Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security dan Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2024, terdapat 131 desa atau 26,52 persen dari total desa di Kabupaten Purworejo yang termasuk dalam kategori rentan pangan (prioritas 1-3). Dari jumlah tersebut, 10 desa masuk dalam prioritas 2 (rentan) dan 121 desa berada dalam prioritas 3 (agak rentan). Sementara itu, sisa desa terklasifikasi dalam kategori tahan pangan sebanyak 177 desa pada prioritas 4 (agak tahan),98 desa pada prioritas 5 (tahan), dan 8 desa pada prioritas 6 (sangat tahan). Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hasil analisis FSVA tahun 2024 menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk fokus pada perbaikan ketahanan pangan di wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai rentan untuk memastikan bahwa semua penduduk dapat menikmati tingkat ketahanan pangan yang memadai.

Tabel 2. 15 Analisis FSVA di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Prioritas	Jumlah Desa				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	
1	Prioritas 1 (Sangat Rentan)	8	9	9	0	0
2	Prioritas 2 (Rentan)	65	45	45	15	10
3	Prioritas 3 (Agak Rentan)	74	55	55	77	121
4	Prioritas 4 (Agak Tahan)	84	74	74	192	177
5	Prioritas 5 (Tahan)	131	188	188	167	98
6	Prioritas 6 (sangat tahan)	132	123	124	43	8
	Desa Rentan Rawan Pangan (Prioritas 1 s/d 3)	147	109	109	92	131

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025



Gambar 2. 27 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Sumber: Dokumen FSVA Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Peta di atas menunjukkan bahwa desa rentan/rawan pangan yang berada di prioritas 1, 2, dan 3 didominasi pada wilayah-wilayah perbatasan dataran tinggi. Prioritas 1 paling banyak berada di Kecamatan Bruno. Desa-desanya yang dalam posisi prioritas 2-3 merupakan desa-desa dengan rasio lahan baku sawah yang rendah, daya beli masyarakat yang rendah, memiliki lokasi yang cukup jauh dari pusat kota, dan mengalami kendala untuk mendapatkan akses air bersih.

Pemerintah Kabupaten Purworejo terus berupaya menangani desa rentan/rawan pangan melalui beberapa cara yaitu menyalurkan cadangan pangan pada desa rawan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Selain penyaluran cadangan pangan, pada desa-desa tersebut juga dilakukan pendampingan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan lokal. Berikut penanganan desa rawan/ rentan pangan di Kabupaten Purworejo dari tahun 2020 – 2024.

Tabel 2. 16 Penanganan Desa Rawan/Rentan Pangan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

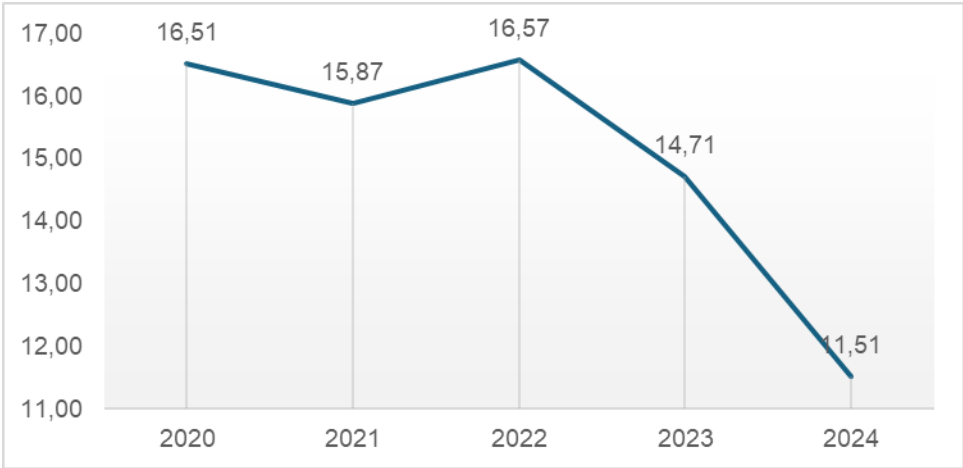
No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Desa Rawan/ Rentan Pangan yang Tertangani	13	6	8	28	30

Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo, 2024

Meskipun telah dilakukan penanganan namun jumlah desa rentan rawan pangan belum menunjukkan pengurangan yang cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh penanganan desa rentan/rawan pangan di Kabupaten Purworejo yang dilakukan belum komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor penyebab desa rentan/rawan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan yang meliputi akses ekonomi, akses fisik/ infrastruktur, dan akses sosial, serta pemanfaatan pangan dengan indikator akses terhadap air bersih dan rasio tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antar sektor yang terkait dalam penanganan desa rentan/rawan pangan di Kabupaten Purworejo.

2) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Untuk mengukur seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan, dapat digunakan indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU). Indikator ini mencerminkan proporsi penduduk yang mengalami kekurangan gizi, yaitu mereka yang tidak memenuhi kebutuhan energi yang diperlukan untuk kesehatan dan kesejahteraan. Semakin tinggi nilai PoU, semakin besar proporsi penduduk yang tidak memperoleh konsumsi pangan dengan kandungan nutrisi yang memadai. Dengan demikian, nilai PoU yang tinggi mengindikasikan adanya masalah serius dalam pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah tersebut. Berikut adalah capaian PoU di Kabupaten Purworejo untuk tahun 2020 hingga 2024, yang menunjukkan perubahan dalam prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan selama periode tersebut.



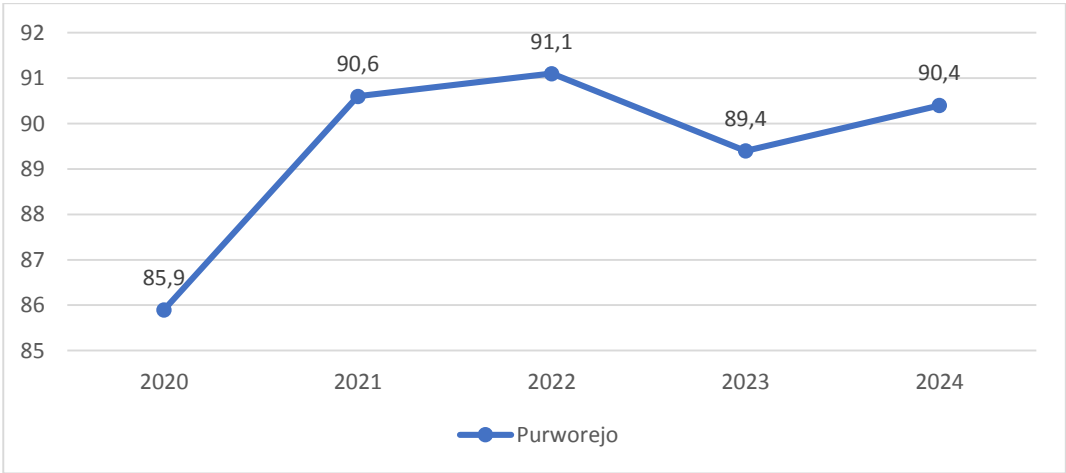
Gambar 2. 28 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) di Kabupaten Purworejo menempati posisi tertinggi di Jawa Tengah pada tahun 2023. Meskipun demikian, analisis tren menunjukkan adanya penurunan PoU tiap tahun dari tahun 2020 hingga 2024, yang mengindikasikan perbaikan dalam pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah tersebut. Meskipun tren penurunan ini menggambarkan upaya positif dalam mengatasi masalah ketidacukupan pangan, angka tersebut tetap menunjukkan tantangan signifikan yang harus diatasi untuk memastikan semua penduduk mendapatkan akses pangan yang cukup dan bergizi.

3) Skor Pola Pangan Harapan

Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan, karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi (gizi salah) serta penyakit yang menyertainya kemudian. Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Melalui pendekatan PPH ini, kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH, dengan skor maksimal sebesar 100.



Gambar 2.29 Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo, 2024

Skor PPH (Pola Pangan Harapan) di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren perbaikan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, dengan skor yang semakin mendekati angka 100, menandakan peningkatan kualitas konsumsi pangan. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023, hal ini disebabkan oleh perubahan metodologi perhitungan yang kini didasarkan pada data pengeluaran masyarakat untuk kelompok pangan tertentu. Penurunan ini tidak mencerminkan penurunan kualitas konsumsi pangan secara keseluruhan, melainkan lebih pada penyesuaian data yang lebih akurat.

Peningkatan skor PPH ini menggambarkan bahwa kualitas dan keragaman konsumsi pangan di Kabupaten Purworejo semakin membaik, yang berkontribusi pada pola makan yang lebih beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA). Meskipun pencapaian skor PPH di Kabupaten Purworejo merupakan kemajuan signifikan, nilai tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, Kabupaten Purworejo masih menghadapi tantangan dalam mencapai standar nasional. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan pola konsumsi pangan agar dapat bersaing dengan capaian di tingkat provinsi dan nasional.

Tabel 2. 17 Perkembangan Skor PPH Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Kelompok Pangan	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Padi-padian	25	22,7	25	25	24,1	23,9
2	Umbi-umbian	2,5	2,2	1,1	1,3	0,9	1
3	Pangan Hewani	24	16,8	17,9	18,6	19,2	19,9
4	Minyak dan Lemak	5	3,2	5	5	4,5	5
5	Buah/Biji Berminyak	1	1	1	1	0,9	0,9
6	Kacang-kacangan	10	10	8,2	7,7	7,8	7,8
7	Gula	2,5	1,7	2,4	2,5	2	1,9
8	Sayur dan Buah	30	28,3	30	30	30	30
9	Lain-lain	0	0	0	0	0	0
10	Skor PPH	100	85,9	90,6	91,1	89,4	90,4

Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo, 2024

Pada tahun 2024, skor PPH (Pola Pangan Harapan) Kabupaten Purworejo menunjukkan penurunan pada beberapa kelompok pangan utama, termasuk padi-padian dan gula. Penurunan ini mencerminkan bahwa konsumsi pada kelompok pangan tersebut tidak mencapai standar yang diharapkan. Misalnya, konsumsi padi-padian menurun menjadi 23,9% dari standar 25%. Peningkatan konsumsi gula tidak sebanding dengan standar 2,5% yang diharapkan, hanya mencapai 1,9%. Selain itu, konsumsi kacang-kacangan tetap di bawah standar 10%, dengan angka 7,8% pada tahun 2023.

Di sisi lain, konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, serta minyak dan lemak menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya menuju peningkatan konsumsi protein hewani, namun masih terhambat oleh faktor harga dan preferensi konsumsi yang lebih

berorientasi pada karbohidrat. Keterbatasan kemampuan finansial masyarakat untuk membeli pangan hewani, yang umumnya lebih mahal dibandingkan dengan kelompok pangan lainnya, juga menjadi faktor penyebab. Oleh karena itu, penting untuk mendorong peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan, khususnya pada kelompok pangan hewani dan kacang-kacangan, guna mencapai skor PPH yang lebih baik dan mendekati standar yang diharapkan.

4) **Konsumsi Listrik per Kapita**

Konsumsi listrik dibedakan dalam beberapa jenis (bangunan), antara lain: rumah tangga, sosial (tempat ibadah, dll), industri (pengolahan barang mentah menjadi barang jadi), bisnis (toko, dll), dan pemerintah. Berdasarkan data PLN ULP Purworejo dan ULP Kutoarjo, pemakaian listrik secara keseluruhan di Kabupaten Purworejo selama tahun 2022 sebesar 370,72 GWh. Pemakaian listrik ini 59,19% untuk keperluan rumah tangga, selebihnya untuk bangunan sosial, industri, bisnis, pemerintah, dan *loss storm*. Sejak tahun 2013, terjadi peningkatan pelanggan listrik PLN pemakaian rumah tangga (29,62%). Di samping itu, konsumsi pemakaian listrik rumah tangga juga mengalami peningkatan sebesar 31,27%.

Pada tahun 2022, pemenuhan/pemakaian listrik pada rumah tangga sebesar 370,7 GWh. Apabila dilihat per kapita, konsumsi listrik sebesar 313,88 kWh/kapita pada 2013, meningkat menjadi 470,30 kWh/kapita di tahun 2022. Kondisi konsumsi listrik Kabupaten Purworejo ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata konsumsi listrik di tingkat nasional (1.173 kWh/kapita).

Tabel 2. 18 **Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Purworejo**

No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi kebutuhan listrik Tahun 2025
1	2	3	4
1	Grabag		
	Penduduk (jiwa)	50.573	51.772
	Listrik (GWh)	18,7	72,5
2	Ngombol		
	Penduduk (jiwa)	35.826	36.572
	Listrik (GWh)	13,3	51,2
3	Purwodadi		
	Penduduk (jiwa)	42.291	43.153
	Listrik (GWh)	15,7	60,4
4	Bagelen		
	Penduduk (jiwa)	30.829	31.093
	Listrik (GWh)	11,4	43,5
5	Kaligesing		
	Penduduk (jiwa)	32.339	32.782
	Listrik (GWh)	12,0	45,9
6	Purworejo		
	Penduduk (jiwa)	85.483	85.688
	Listrik (GWh)	31,7	120,0
7	Banyuurip		
	Penduduk (jiwa)	43.951	44.482
	Listrik (GWh)	16,3	62,3
8	Bayan		
	Penduduk (jiwa)	52.699	53.732

No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi kebutuhan listrik Tahun 2025
1	2	3	4
	Listrik (GWh)	19,5	75,2
9	Kutoarjo		
	Penduduk (jiwa)	62.866	63.463
	Listrik (GWh)	23,3	88,8
10	Butuh		
	Penduduk (jiwa)	42.728	43.259
	Listrik (GWh)	15,8	60,6
11	Pituruh		
	Penduduk (jiwa)	52.587	53.594
	Listrik (GWh)	19,5	75,0
12	Kemiri		
	Penduduk (jiwa)	60.272	61.737
	Listrik (GWh)	22,3	86,4
13	Bruno		
	Penduduk (jiwa)	54.551	56.357
	Listrik (GWh)	20,2	78,9
14	Gebang		
	Penduduk (jiwa)	44.220	44.821
	Listrik (GWh)	16,4	62,7
15	Loano		
	Penduduk (jiwa)	38.891	39.503
16	Bener		
	Penduduk (jiwa)	58.159	59.662
	Listrik (GWh)	21,6	83,5
	Kab. Purworejo		
	Penduduk (jiwa)	788.265	801.670
	Listrik (GWh)	370,7	1.122,3

Sumber: Hasil Analisis, 2023

5) Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pada tahun 2020 hingga 2024, persentase akses air minum di Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan tiap tahunnya. Berikut adalah persentase akses air minum Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 19 Persentase Akses Air Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (PDAM dan non PDAM)	24,92	26,50	25,71	28,72	31,58
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	24,92	26,50	27,51	28,72	31,58

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang Telah Sesuai Standar Air Minum Permenkes 2 Tahun 2023 atau Hasil SKAM RT)	13,43	17,17	19,56	22,43	29,21

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Purworejo, 2024

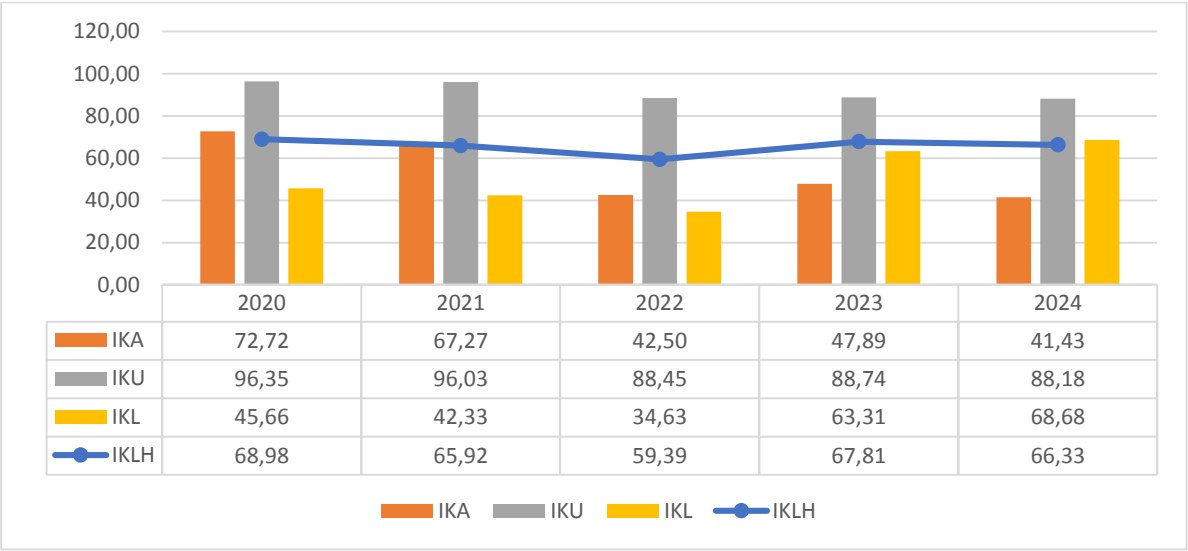
Pada periode tahun 2020 hingga 2024, persentase akses air minum di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan yang signifikan. Akses terhadap jaringan perpipaan meningkat dari 24,92% pada tahun 2020 menjadi 31,58% pada tahun 2024. Begitu pula dengan akses terhadap air minum aman yang menunjukkan tren kenaikan dari 24,92% di tahun 2020 menjadi 31,58% pada tahun 2024. Secara khusus, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan yang telah sesuai standar Permenkes juga menunjukkan perkembangan positif yaitu persentasenya naik dari 13,43% pada tahun 2020 menjadi 29,21% di tahun 2024.

Hasil capaian persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (PDAM dan non PDAM) dan persentase Rumah tangga dengan akses air minum aman di Kabupaten Purworejo nilainya mengalami peningkatan tiap tahun; walaupun nilai capaian indikator keduanya cenderung identik. Hal tersebut disebabkan karena sumber utama “air minum aman” biasanya berasal dari jaringan perpipaan. Di beberapa wilayah Kabupaten Purworejo, area layanan PDAM dan SPAM Perdesaan dianggap sudah memenuhi kualitas air minum (uji laboratorium, pengolahan, dan distribusi) sehingga cakupannya otomatis dihitung sebagai akses air minum aman. Kenaikan akses capaian tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur air minum bagi masyarakat. Hal tersebut menandakan bahwa selain peningkatan kuantitas akses, kualitas air minum juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah.

f. Lingkungan Hidup Berkualitas

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup suatu wilayah dapat dilihat dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara lengkap disajikan pada diagram berikut:



Gambar 2. 30 IKA IKU IKL dan IKLHD Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024
Sumber: DLHP Kabupaten Purworejo, 2025

Dari tahun 2020-2024 terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo. Penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo tertinggi berada pada tahun 2022. Perhitungan IKLH sejak tahun 2022 telah dilakukan penyempurnaan dimana Kementerian LHK melakukan perhitungan yang terintegrasi dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. IKLH Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 meningkat karena adanya peningkatan yang cukup signifikan dari komponen Indeks Kualitas Lahan yang disebabkan adanya perubahan metode pengumpulan data tutupan lahan dari tabular menjadi data spasial. Meskipun kualitas lingkungan hidup pada tahun 2023 meningkat namun kualitas air di Kabupaten Purworejo perlu menjadi perhatian karena masih terdapat pencemaran di beberapa titik di Kabupaten Purworejo.

IKLH Kabupaten Purworejo tahun 2024 mendapatkan predikat sedang, dimana komponen IKA mendapatkan predikat kurang, IKL mendapatkan predikat sedang, sedangkan IKU berada pada predikat baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo diperlukan intervensi khusus pada kualitas air dan kualitas lahan. Meskipun IKU berada pada predikat baik, namun terdapat tren penurunan kualitas udara dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Penurunan kualitas udara tersebut disebabkan rendahnya pengendalian polusi dari industri manufaktur melalui skema sirkular, belum optimalnya pengendalian emisi kendaraan bermotor, sistem angkutan massal yang menurun kualitas dan kuantitasnya, serta masih bergantungnya pada pemanfaatan energi berbasis bahan bakar fosil. Di samping itu, turunnya kualitas tutupan lahan di Kabupaten Purworejo disebabkan berkurangnya luasan tutupan lahan dan alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun.

2) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi yang aman merupakan salah satu indikator penting dalam mencapai kualitas hidup yang sehat dan lingkungan yang berkelanjutan. Di Kabupaten Purworejo, upaya untuk meningkatkan akses sanitasi aman bagi rumah tangga telah menjadi fokus utama dalam rangka mendukung pencapaian lingkungan hidup yang berkualitas. Sanitasi yang aman, bukan hanya sekedar

concern pada penyediaan jamban yang layak, tetapi juga melibatkan rantai pengelolaan air limbah secara menyeluruh sehingga aman bagi manusia dan lingkungan. Hal tersebut tidak hanya berperan untuk menjaga kesehatan masyarakat utamanya dalam mencegah penyakit berbasis air (*water -borne diseases*), tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan (pengurangan bahan pencemar organik dan mikrobiologis pada air tanah dan air permukaan); keberlanjutan ekologi (penggunaan limbah organik sebagai biogas, pupuk organik yang mendukung prinsip ekonomi sirkular) serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2. 20 Persentase Akses Sanitasi Aman Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase akses sanitasi aman	2,62	3,19	3,76	4,39	4,58

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan tabel di atas, persentase akses sanitasi aman di Kabupaten Purworejo cenderung mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, persentase akses sanitasi layak di Kabupaten Purworejo yaitu 2,62%. Sementara itu, pada tahun 2024, sekitar 4,58% rumah tangga di Kabupaten Purworejo sudah memiliki akses ke sanitasi yang aman, yang mencakup fasilitas jamban dengan sistem pembuangan yang sesuai standar kesehatan. Pencapaian ini mencerminkan upaya keras yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik melalui pembangunan infrastruktur sanitasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya terkait dengan kesehatan dan lingkungan.

3) Pengelolaan Sampah

Efektivitas pengelolaan sampah di suatu wilayah dapat dilihat melalui indikator persentase sampah terkelola dan persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah. Indikator pengelolaan sampah menunjukkan jumlah sampah yang sudah ditangani secara sistematis agar tidak mencemari lingkungan baik melalui pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pemanfaatan, maupun penimbunan akhir. Sedangkan indikator pengolahan sampah menunjukkan proporsi sampah yang berhasil ditangani oleh fasilitas resmi pengolahan sampah di suatu wilayah. Tingginya persentase sampah terkelola mencerminkan sistem layanan pengelolaan sampah yang berfungsi baik, cakupan layanan persampahan yang semakin luas, dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang meningkat. Sedangkan tingginya persentase sampah yang terolah mencerminkan keberhasilan sistem pengelolaan sampah dalam mengurangi beban TPA, mengurangi dampak lingkungan, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Sebaliknya, rendahnya capaian indikator ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan terhadap metode pembuangan akhir dan belum optimalnya pemanfaatan fasilitas pengolahan yang ada. Berikut disajikan data capaian persentase timbulan sampah yang terkelola dan persentase timbulan sampah

terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Purworejo dari tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2. 21 Capaian Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola dan Persentase Timbulan Sampah yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Timbulan Sampah (ton)	105.146,86	105.420,18	105.694,22	117.432,91	117.937,34
2	Persentase Sampah Terkelola (%)	41,75	43,62	49,11	49,15	49,92
3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	25,45	25,27	25,59	23,70	26,43

Sumber: DLHP Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024, capaian timbulan sampah yang terkelola dan timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan sampah, baik dari sisi peningkatan kapasitas fasilitas, penguatan kelembagaan pengelola sampah, maupun kesadaran masyarakat terhadap pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya. Namun demikian, capaian ini belum sepenuhnya optimal jika dibandingkan dengan total timbulan sampah yang terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk.

g. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1) Penurunan Emisi GRK

Isu perubahan iklim menjadi bagian dari pembangunan di Indonesia, terutama sejak pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi 26% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Upaya penurunan emisi nasional ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan peran serta pemerintah daerah untuk bersama-sama memerangi ancaman perubahan iklim global. Dalam upaya mengurangi emisi GRK nasional, sesuai dengan ketentuan pada Perpres No. 61 tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca nasional maka provinsi dan kabupaten/kota juga diwajibkan untuk melakukan inventarisasi gas rumah kaca. Berikut ditampilkan total emisi berdasarkan sektor di Kabupaten Purworejo.

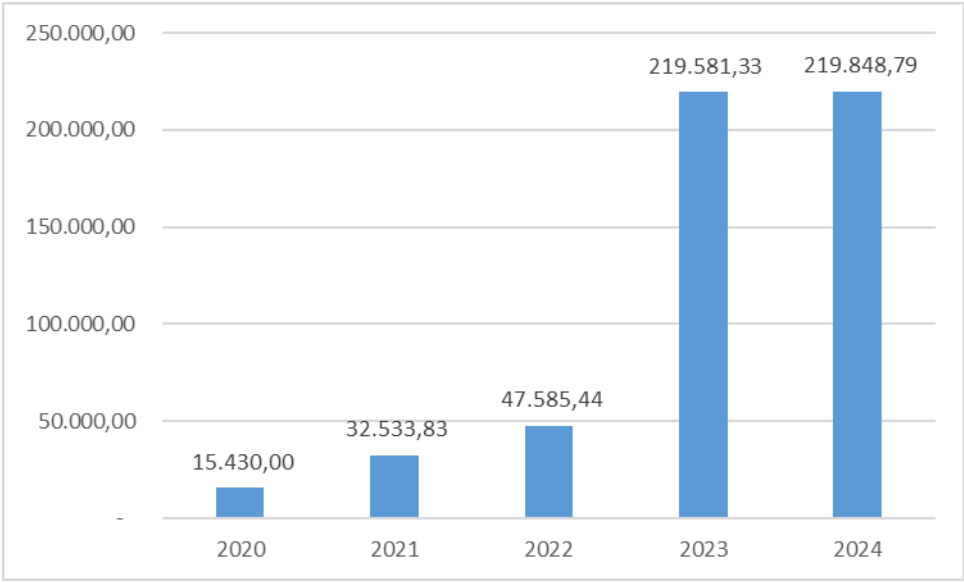
Tabel 2. 22 Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2023

No	Sektor	Emisi per Tahun (GgC02eq)			
		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Energi	348,50	340,38	427,54	442,92
2	IPPU (Industrial Processes and Product Use)	21,31	22,15	23,54	24,99
3	Pertanian	403,67	396,47	387,00	412,60
4	Kehutanan	123,44	108,64	114,81	-31,41
5	Limbah	55,96	57,73	60,67	71,90
Total (GgC02eq)		952,88	925,37	1.013,56	921,00

Sumber: Dokumen IGRK Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Berdasarkan hasil inventarisasi GRK, menunjukkan bahwa kategori kunci penghasil emisi GRK di Kabupaten Purworejo diantaranya yaitu dari kegiatan transportasi, pertanian dan peternakan. Peningkatan konsumsi BBM di Kabupaten Purworejo dipicu oleh peningkatan BBM untuk kendaraan penumpang utamanya kendaraan pribadi. Rencana aksi sub transportasi dapat difokuskan dalam upaya peningkatan kualitas dan kapasitas transportasi umum masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum serta mengadopsi beberapa rencana aksi transportasi berkelanjutan yang telah dikeluarkan oleh kementerian lingkungan hidup. Sedangkan, kegiatan industri berpotensi memberikan kontribusi emisi GRK di Kabupaten Purworejo, jika dilihat secara distribusi PDRB berada di urutan kedua setelah pertanian sebesar 19,63%. Dengan demikian industri/swasta berpotensi untuk terlibat dalam aksi mitigasi penurunan emisi GRK. Perlu adanya koordinasi dan pendataan lebih detail dari kegiatan industri terkait besarnya penggunaan BBM, kapasitas dan penggunaan pelumas, kapasitas produksi untuk masing-masing jenis industri serta potensi rencana aksi penurunan emisi dari sektor industri yang mewakili peran swasta. Pada sektor *Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU)* Tahun 2020-2023 mengalami tren penurunan emisi terjadi pada subsektor pertanian akibat berkurangnya luasan panen dan penggunaan pupuk urea serta penyerapan dari lahan. Aksi mitigasi dapat difokuskan pada penurunan emisi subsektor peternakan serta mempertahankan serapan emisi pada subsektor lahan.

Sementara itu, potensi penurunan emisi GRK di Kabupaten Purworejo mengalami tren peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, potensi penurunan emisi GRK di Kabupaten Purworejo yaitu 15.430 tonCO²eq dan meningkat menjadi 219.848,79 tonCO²eq pada tahun 2024 (data diunduh per 5 Agustus 2025) dimana penurunan terbesar berasal dari sektor pertanian. Berikut merupakan grafik potensi penurunan emisi GRK di Kabupaten Purworejo.

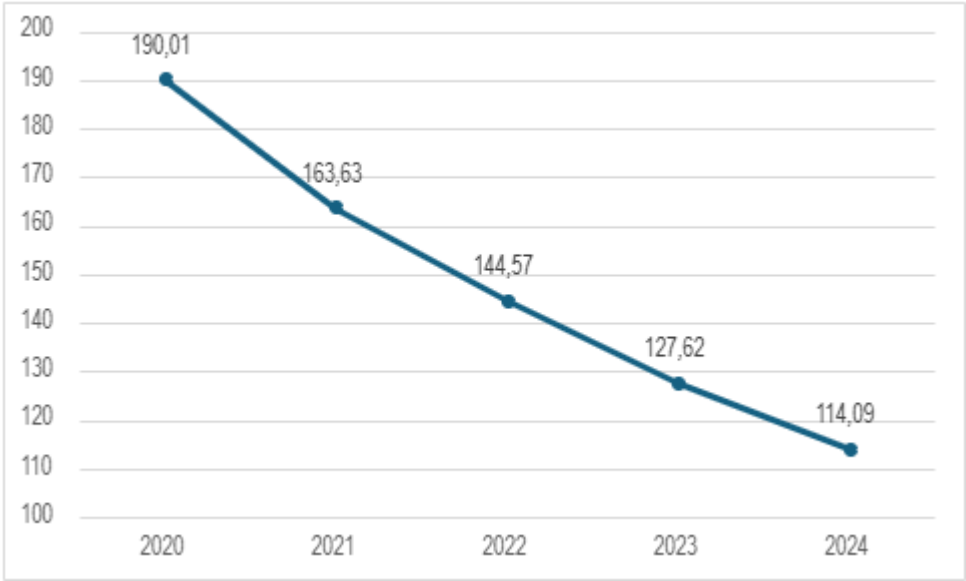


Gambar 2. 31 Potensi Penurunan Emisi GRK Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rendah Karbon Indonesia (AKSARA) Bappenas, 2025

2) Indeks Risiko Bencana

Proses pembangunan suatu wilayah dipengaruhi oleh kebencanaan. Tingkat kebencanaan suatu wilayah digambarkan melalui perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang memberikan informasi tingkat risiko bencana pada tiap Kabupaten/Kota di Indonesia yang dipublikasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hasil pengkajian risiko bencana terbagi menjadi empat bagian yang meliputi: 1) Tingkat Bahaya; 2) Tingkat Kerentanan; 3) Tingkat Kapasitas yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana alam dan non-alam; dan 4) Tingkat Risiko yang terbagi menjadi tiga kelas yakni, rendah, sedang, dan tinggi.



Gambar 2. 32 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024
Sumber: inaRISK, 2024

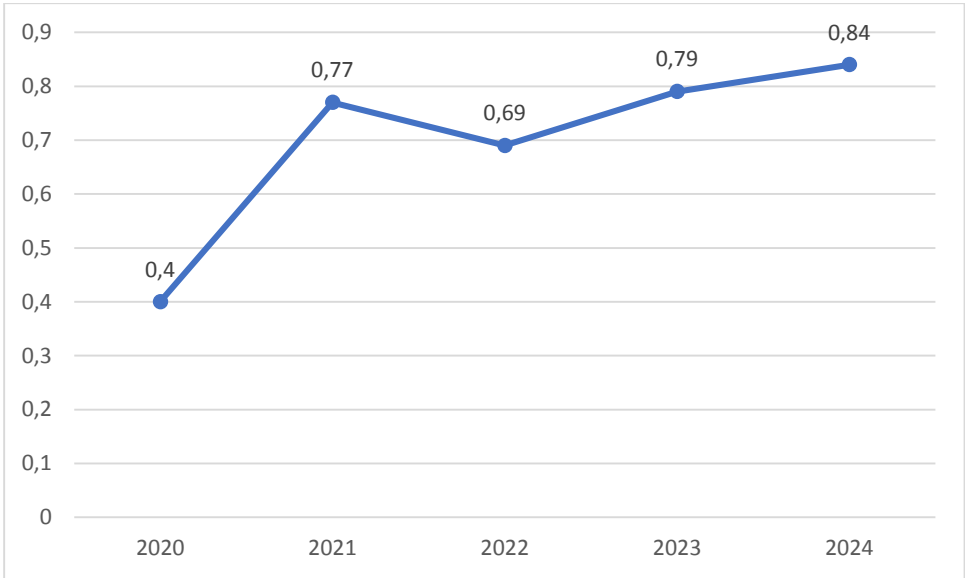
Kabupaten Purworejo merupakan daerah yang secara geografis merupakan daerah multi ancaman bencana. Terdapat berbagai jenis bencana yang terjadi seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, kekeringan, dan angin puting beliung. Pada tahun 2020, IRB Kabupaten Purworejo yaitu 190,01 (tinggi) kemudian mengalami penurunan tiap tahunnya dan menjadi 114,09 pada tahun 2024. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Purworejo mengalami penurunan dari yang awalnya tergolong tinggi menjadi sedang pada periode tersebut.

Penurunan IRBI di Kabupaten Purworejo didukung oleh bertambahnya dokumen pendukung dan peningkatan sarana prasarana kebencanaan, serta dukungan pemerintah terhadap kegiatan pra hingga pasca bencana. Namun, ketersediaan dokumen dan sarana prasarana belum memadai untuk mengatasi tingkat bahaya tinggi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan respons cepat dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar penanggulangan bencana berjalan efisien dan efektif

3) Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai ketahanan sebuah daerah terhadap berbagai tantangan dan ancaman yang mungkin terjadi, termasuk bencana alam, perubahan iklim, kerawanan sosial, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. IKD bertujuan untuk membantu pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan

lainnya dalam mengidentifikasi area-area yang mungkin memerlukan perhatian khusus dan sumber daya untuk memperbaiki ketahanan dan kesiapsiagaan daerah.



Gambar 2. 33 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024
Sumber: BPBD, 2024

Diagram di atas menggambarkan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Purworejo meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2024. Pada tahun 2020, IKD Kabupaten Purworejo tergolong rendah, namun meningkat menjadi kategori sedang pada 2021–2024, yang menunjukkan peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Peningkatan ini didukung oleh komitmen pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Namun, masih terdapat hambatan berupa banyaknya wilayah rawan bencana dan kurangnya sosialisasi serta pelatihan kesiapsiagaan bagi seluruh masyarakat.

Infrastruktur kebencanaan di Kabupaten Purworejo meliputi *Early Warning System* (EWS) dan mobil pemadam kebakaran, namun masih terbatas secara kuantitas dan kualitas. Pemkab Purworejo memiliki EWS Banjir di 2 titik (1 rusak, 1 baik), EWS Longsor di 25 titik (14 normal, 9 rusak), dan EWS Tsunami di 24 titik (3 rusak). Selain itu, hanya tersedia 6 unit mobil damkar untuk 16 kecamatan yang berjauhan, dengan beberapa kawasan padat penduduk sulit dijangkau akibat akses jalan sempit, yang menghambat penanganan kebakaran.

Tabel 2. 23 Jumlah *Early Warning System* (EWS) Banjir di Kabupaten Purworejo

No	Lokasi	Tahun Pengadaan	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
1	Bendung Boro	2017	1	Rusak
2	Bendung Jrasah	2023	1	Baik
	Jumlah		2	

Sumber: BPBD Kabupaten Purworejo, 2024

Tabel 2. 24 Jumlah *Early Warning System* (EWS) Longsor di Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Desa	Tahun Pengadaan	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5	6
1	Purworejo	Donorati	2018	1	Rusak
		Pacekelan	2023	1	Baik
		Sidorejo	2023	1	Baik
2	Loano	Kalikalong	2017	1	Rusak
		Kalisemo	2017	1	Rusak
		Tepansari	2024	1	Rusak
3	Kaligesing	Jelok	2017	2	Rusak
		Jelok	2024	1	Baik
		Donorejo	2017	1	Rusak
		Donorejo	2024	1	Baik
		Tlogoguwo	2023	1	Baik
		Purbowono	2023	1	Baik
		Kaligono	2023	1	Baik
		Jatirejo	2023	1	Baik
4	Gebang	Ngaglik	2017	1	Rusak
		Penungkulan	2016	1	Rusak
		Wonotopo	2023	1	Baik
		Redin	2023	1	Baik
		Rendeng	2022	1	Baik
5	Bruno	Brunosari	2020	1	Baik
6	Bener	Legetan	2020	1	Baik
		Sukowuwuh	2024	1	Baik
7	Bagelen	Durensari	2023	1	Baik
		Semagung	2023	1	Baik
8	Pituruh	Kaligondang	2024	1	Baik
	Jumlah			25	

Sumber: BPBD Kabupaten Purworejo, 2024

Tabel 2. 25 Jumlah *Early Warning System* (EWS) Tsunami di Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Desa	Tahun Pengadaan	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5	6
1	Grabag	Kertojayan I	2013	1	Rusak
		Kertojayan II	2017	1	Rusak
		Kertojayan III	2019	1	Baik
		Nambangan	2022	1	Baik
		Patutreja	2024	1	Baik
		Harjobinangun	2022	1	Baik
2	Ngombol	Keburuhan	2011	1	Baik
		Pagak	2013	1	Baik
		Girirejo	2013	1	Baik
		Wero	2013	1	Rusak
		Malang	2013	1	Baik
		Awu-Awu	2022	1	Baik
		Wonosari	2024	1	Baik
		Harjobinangun	2022	1	Baik
3	Purwodadi	Gedangan	2013	1	Baik
		Jatikontal	2013	1	Baik

No	Kecamatan	Desa	Tahun Pengadaan	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5	6
		Jatimalang I	2011	1	Baik
		Jatimalang II	2021	1	Baik
		Jatimalang III	2021	1	Baik
		Nampurejo	2013	1	Baik
		Jogoboyo	2017	1	Baik
		Watukuro	2019	1	Baik
		Karanganyar	2023	1	Baik
		Jogoresan	2024	1	Baik
		Kentengrejo	2024	1	Baik
	Jumlah			24	

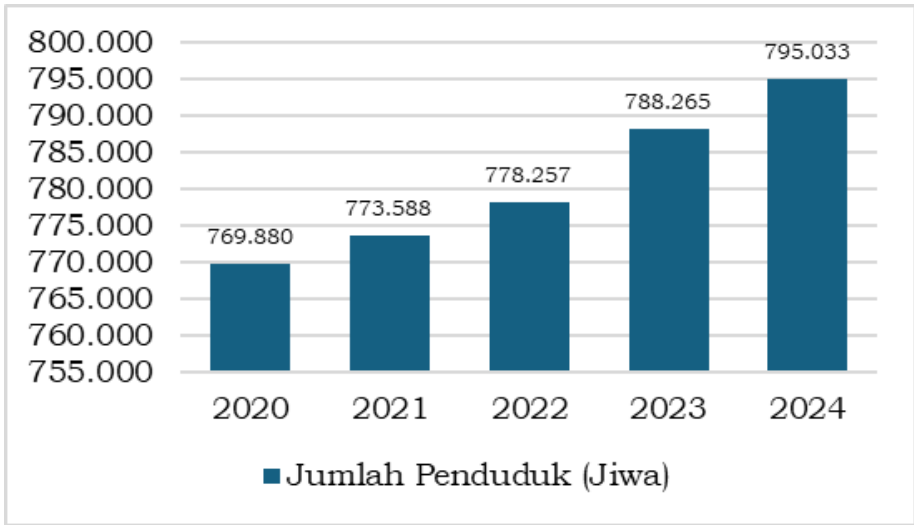
Sumber: BPBD Kabupaten Purworejo, 2024

h. Demografi

Jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah memiliki sifat yang dinamis karena adanya perubahan yang terjadi di wilayah tersebut. Perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi. Berikut kondisi demografi Kabupaten Purworejo yang terdiri atas jumlah penduduk, distribusi penduduk, struktur penduduk, dan proyeksi penduduk.

1) Jumlah Penduduk

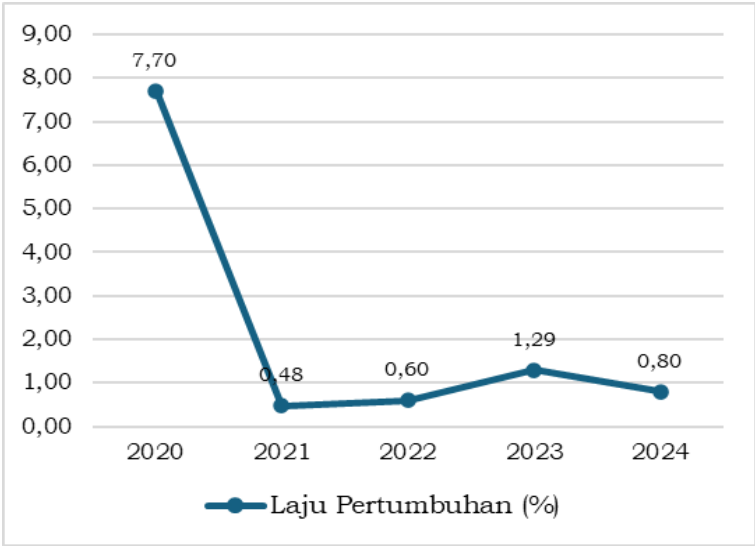
Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo berfluktuasi dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Peningkatan jumlah penduduk terjadi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Data jumlah penduduk Kabupaten Purworejo dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam gambar berikut ini.



Gambar 2. 34 Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024 (diolah)

Laju pertumbuhan penduduk secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor alami mencakup kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas), sedangkan faktor nonalami mencakup migrasi (imigrasi dan emigrasi). Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purworejo dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 35 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2025 (diolah)

Pada dasarnya, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purworejo cukup fluktuatif dan selalu rendah. Namun, pada tahun 2020, pandemi Covid-19 membawa perubahan signifikan. Jumlah kelahiran (fertilitas) menjadi lebih tinggi dari jumlah kematian (mortalitas), dan angka migrasi masuk juga meningkat signifikan dibandingkan dengan migrasi keluar yang disebabkan oleh banyaknya penduduk asli Purworejo yang pulang ke daerah asal.

2) Struktur Penduduk

Struktur penduduk di Kabupaten Purworejo berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada data *sex ratio* di wilayah tersebut. Data *sex ratio* menampilkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan yang dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data terkait jumlah penduduk Kabupaten Purworejo berdasarkan *sex ratio* dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.26 Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 Berdasarkan Sex Ratio

Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo				
Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasio
1	2	3	4	5
2020	385.266	384.614	769.880	100,17
2021	387.047	386.541	773.588	100,13
2022	389.302	388.955	778.257	100,09
2023	394.698	393.567	788.265	100,29
2024	398.135	396.898	795.033	100,31

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2025

Pada periode 2020 hingga 2024, jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan. Kenaikan angka *sex ratio* ini mengindikasikan adanya keseimbangan baru dalam jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini meliputi tingginya angka kelahiran bayi laki-laki dibandingkan bayi perempuan, peningkatan jumlah penduduk laki-laki melalui migrasi masuk, serta kemungkinan adanya penurunan jumlah perempuan di wilayah tersebut.

Struktur penduduk di suatu wilayah juga dapat dilihat melalui kelompok usia. Analisis terhadap kelompok usia memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika demografis. Jumlah penduduk menurut usia di Kabupaten Purworejo dari tahun 2020 hingga 2024 tersaji dalam tabel berikut, yang memperlihatkan distribusi penduduk berdasarkan kategori usia selama periode tersebut. Data ini sangat penting untuk memahami komposisi usia penduduk, yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.27 Persentase Penduduk Menurut Usia di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
Usia 0-4	6,70	6,67	6,59	7,03	6,44
Usia 5-9	6,74	6,71	6,63	6,55	4,55
Usia 10-14	7,21	7,18	7,07	6,83	5,37
Usia 15-19	7,50	7,46	7,35	7,25	3,89
Usia 20-24	7,64	7,61	7,44	7,53	4,10
Usia 25-29	7,34	7,30	7,20	7,58	10,77
Usia 30-34	7,18	7,14	7,07	7,21	5,56
Usia 35-39	6,63	6,60	6,57	6,83	6,69
Usia 40-44	6,67	6,64	6,61	6,45	7,95
Usia 45-49	6,76	6,73	6,76	6,49	5,41
Usia 50-54	7,12	7,09	7,12	6,64	6,68
Usia 55-59	6,63	6,60	6,71	6,64	7,67
Usia 60-64	5,68	5,66	5,78	5,81	6,98
Usia 65-69	4,30	4,28	4,42	4,62	5,60
Usia 70-74	2,69	2,67	2,83	3,04	4,93
Usia 75+	3,69	3,67	3,85	3,50	7,41

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2025

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2024, penduduk Kabupaten Purworejo didominasi oleh penduduk usia 25-29 tahun yakni sebanyak 10,77 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Purworejo. Sementara persentase penduduk paling sedikit terdapat pada kelompok usia 15-19 tahun yakni hanya sebesar 3,89 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Purworejo.

3) Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk yang menggambarkan bentuk penyebaran dan pemerataan penduduk di suatu wilayah. Data terkait tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.28 Distribusi Penduduk Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Jumlah Jiwa	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Jumlah Jiwa	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Jumlah Jiwa	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Jumlah Jiwa	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Jumlah Jiwa	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Grabag	67,8	48.903	753	49.303	727	49.727	765	50.573	778	51.175	755
2.	Ngombol	59,33	34.791	629	35.026	590	35.277	638	35.826	648	36.202	610
3.	Purwodadi	56,15	41.095	762	41.364	737	41.652	771	42.291	783	42.725	761
4.	Bagelen	63,44	30.486	478	30.507	481	30.541	478	30.829	483	30.965	488
5.	Kaligesing	78,33	31.735	425	31.838	406	31.955	427	32.339	432	32.564	416
6.	Purworejo	53,25	85.308	1.618	85.107	1.598	85.541	1.622	85.483	1.621	85.595	1.607
7.	Banyuurip	47,78	43.234	959	43.339	907	43.464	964	43.951	975	44.221	926
8.	Bayan	44,66	51.268	1.186	51.583	1.155	51.923	1.202	52.699	1.220	53.220	1192
9.	Kutoarjo	39,2	62.079	1.651	62.151	1.585	62.249	1.669	62.866	1.686	63.172	1.612
10.	Butuh	47,21	42.011	912	42.120	892	42.248	916	42.728	937	42.998	911
11.	Pituruh	89,01	51.191	661	51.495	579	51.823	669	52.587	679	53.095	597
12.	Kemiri	103,15	58.230	633	58.724	569	59.247	643	60.272	654	61.008	591
13.	Bruno	105,68	52.033	480	52.698	499	53.395	492	54.551	503	55.454	525
14.	Gebang	70,51	43.401	604	43.539	617	43.697	608	44.220	615	44.525	631
15.	Loano	53,51	38.052	709	38.213	714	38.391	715	38.891	724	39.201	733
16.	Bener	102,44	56.063	596	56.581	552	57.127	607	58.159	618	58.913	575

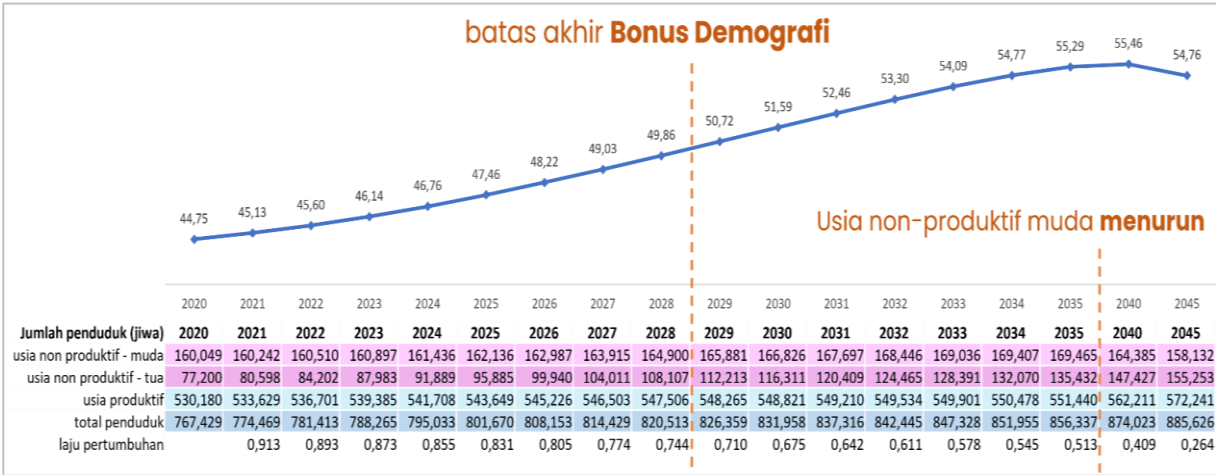
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2025

Kepadatan penduduk di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren peningkatan dari 2020 hingga 2024. Kecamatan Purworejo memiliki kepadatan tertinggi, yakni 1.607 jiwa/km² pada tahun 2024, sementara Kecamatan Kaligesing memiliki kepadatan terendah, yaitu 416 jiwa/km². Perbedaan ini disebabkan oleh luas wilayah dan aksesibilitas. Kecamatan Purworejo sebagai pusat kabupaten memiliki infrastruktur dan fasilitas yang baik, sedangkan Kecamatan Kaligesing, dengan topografi berbukit (>40% kemiringan), lebih sulit diakses. Hal ini mengindikasikan perlunya pemerataan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata.

Peningkatan jumlah penduduk harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Jika tidak, pertambahan penduduk dapat memicu pengangguran, kemiskinan, dan eksploitasi sumber daya alam akibat ketidakcukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

4) Proyeksi Penduduk

Proyeksi dilakukan dengan memanfaatkan hasil Sensus Penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian ditampilkan jumlah total penduduk per kecamatan, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, serta kepadatan penduduk di Kabupaten Purworejo. Berikut hasil analisis proyeksi penduduk Kabupaten Purworejo hingga tahun 2045.



Gambar 2. 36 Grafik Proyeksi Penduduk Kabupaten Purworejo
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2023

Pada tahun 2023, seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo mengalami bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan penduduk non-produktif. Namun, pada tahun 2025, tiga kecamatan diprediksi keluar dari fase bonus demografi, yaitu Kecamatan Ngombol (angka ketergantungan 51,05), Kecamatan Bagelen (50,72), dan Kecamatan Butuh (50,50). Pada tahun 2030, hanya empat kecamatan yang masih mengalami bonus demografi yakni Kecamatan Purworejo (angka ketergantungan 47,35), Kecamatan Kutoarjo (49,54), Kecamatan Gebang (47,72), dan Kecamatan Loano (49,88). Secara keseluruhan, Kabupaten Purworejo diperkirakan keluar dari fase bonus demografi pada tahun 2029, dan pada tahun 2035 seluruh kecamatannya tidak lagi berada dalam fase ini. Hal ini menunjukkan perlunya strategi jangka panjang untuk memanfaatkan

peluang bonus demografi yang tersisa dengan mengoptimalkan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi.

Jumlah Total Penduduk

Kabupaten Purworejo memiliki penduduk sejumlah 788.265 jiwa pada tahun 2023 (Juni). Sebaran penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Purworejo dengan 85.483 jiwa, sementara jumlah penduduk terendah di Kecamatan Bagelen (30.829 jiwa). Saat ini, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purworejo sebesar 0,87, pertumbuhan tertinggi di Kecamatan Bruno (1,66) dan terendah di Kecamatan Purworejo (0,15). Kecamatan Purworejo cukup menarik dikarenakan pusat ibukota namun memiliki laju pertumbuhan penduduk terendah. Lebih lanjut penduduk per kecamatan beserta proyeksinya dapat diamati pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.29 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grabag	50.573	51.772	51.334	51.906	52.468	53.017
	LPP	1,20	1,17	-0,85	1,11	1,08	1,05
2	Ngombol	35.826	36.572	36.521	36.875	37.221	37.558
	LPP	1,06	1,03	-0,14	0,97	0,94	0,91
3	Purwodadi	42.291	43.153	43.138	43.547	43.947	44.335
	LPP	1,04	1,01	-0,03	0,95	0,92	0,88
4	Bagelen	30.829	31.093	32.002	32.118	32.224	32.319
	LPP	0,46	0,43	2,92	0,36	0,33	0,29
5	Kaligesing	32.339	32.782	33.313	33.519	33.716	33.902
	LPP	0,71	0,68	1,62	0,62	0,59	0,55
6	Purworejo	85.483	85.688	89.547	89.597	89.623	89.613
	LPP	0,15	0,12	4,50	0,06	0,03	-0,01
7	Banyuurip	43.951	44.482	45.383	45.628	45.859	46.075
	LPP	0,63	0,6	2,03	0,54	0,51	0,47
8	Bayan	52.699	53.732	53.817	54.307	54.784	55.246
	LPP	1,00	0,97	0,16	0,91	0,88	0,84
9	Kutoarjo	62.866	63.463	65.165	65.432	65.679	65.904
	LPP	0,5	0,47	2,68	0,41	0,38	0,34
10	Butuh	42.728	43.259	44.099	44.344	44.576	44.793
	LPP	0,65	0,62	1,94	0,56	0,52	0,49
11	Pituruh	52.587	53.594	53.736	54.214	54.679	55.128
	LPP	0,98	0,95	0,26	0,89	0,86	0,82
12	Kemiri	60.272	61.737	61.125	61.824	62.512	63.184
	LPP	1,23	1,2	-0,99	1,14	1,11	1,07
13	Bruno	54.551	56.357	54.620	55.481	56.338	57.188
	LPP	1,66	1,63	-3,08	1,58	1,54	1,51
14	Gebang	44.220	44.821	45.559	45.838	46.105	46.356
	LPP	0,71	0,67	1,65	0,61	0,58	0,54
15	Loano	38.891	39.503	39.944	40.231	40.507	40.771
	LPP	0,81	0,78	1,12	0,72	0,69	0,65
16	Bener	58.159	59.662	58.850	59.568	60.275	60.970
	LPP	1,31	1,28	-1,36	1,22	1,19	1,15
Kab. Purworejo		788.265	801.670	808.153	814.429	820.513	826.359
LPP		0,87	0,84	0,81	0,78	0,75	0,71

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Keterangan:

LPP = Laju Pertumbuhan Penduduk

Pada tahun 2029, penduduk Kabupaten Purworejo secara keseluruhan diproyeksikan mencapai 826.359 jiwa atau bertambah 38.094 jiwa dari tahun 2023. Laju pertumbuhan penduduk yang semula 0,87 menurun, terakhir menjadi 0,71 pada tahun 2029. Pada tahun tertentu, terdapat daerah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk minus, seperti Kecamatan Grabag (-0,01 pada tahun 2026), Kecamatan Bener (-1,36 pada tahun 2026), serta Kecamatan Purworejo (-0,01 pada tahun 2029). Dengan keberagaman laju pertumbuhan penduduk ini, perencanaan jangka jangka menengah mengenai pemenuhan kebutuhan sarana prasarana umum (pendidikan, kesehatan, dll) perlu dipertimbangkan dan dianalisis secara seksama.

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk dapat dikategorikan dalam jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Pada tahun 2023, penduduk laki-laki Kabupaten Purworejo berjumlah 394.698 jiwa, sementara penduduk perempuan 393.567. Hal ini menunjukkan penduduk laki-laki relatif lebih banyak dengan rasio 100,29. Saat ini, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purworejo sebesar 0,87, pertumbuhan penduduk laki-laki (0,89) lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk perempuan (0,86). Di tingkat kecamatan, pertumbuhan penduduk laki-laki tertinggi terdapat di Kecamatan Bruno (1,85) dan terendah di Kecamatan Purworejo (0,15). Selaras dengan hal tersebut, pertumbuhan penduduk perempuan tertinggi di Kecamatan Bruno (1,46) dan terendah di Kecamatan Purworejo (0,16). Proyeksi mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin selanjutnya dapat diamati pada tabel berikut ini.

Tabel 2.30 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grabag	50.573	51.772	51.334	51.906	52.468	53.017
	Laki-Laki	25.399	26.001	25.796	26.082	26.362	26.634
	LPP Lk	1,21	1,17	-0,79	1,11	1,07	1,03
	Perempuan	25.174	25.771	25.538	25.824	26.106	26.383
	LPP Prp	1,19	1,17	-0,90	1,12	1,09	1,06
	Rasio	100,89	100,89	101,01	101,00	100,98	100,95
2	Ngombol	35.826	36.572	36.521	36.875	37.221	37.558
	Laki-Laki	17.745	18.067	18.173	18.324	18.470	18.610
	LPP Lk	0,93	0,9	0,59	0,83	0,80	0,76
	Perempuan	18.081	18.505	18.348	18.551	18.751	18.948
	LPP Prp	1,19	1,16	-0,85	1,11	1,08	1,05
	Rasio	98,14	97,63	99,05	98,78	98,50	98,22
3	Purwodadi	42.291	43.153	43.138	43.547	43.947	44.335
	Laki-Laki	20.794	21.146	21.334	21.498	21.656	21.807
	LPP Lk	0,87	0,84	0,89	0,77	0,73	0,70
	Perempuan	21.497	22.007	21.804	22.049	22.291	22.528
	LPP Prp	1,21	1,17	-0,92	1,12	1,10	1,06
	Rasio	96,73	96,09	97,84	97,50	97,15	96,80
4	Bagelen	30.829	31.093	32.002	32.118	32.224	32.319
	Laki-Laki	15.267	15.379	15.886	15.933	15.975	16.010
	LPP Lk	0,4	0,37	3,30	0,30	0,26	0,22
	Perempuan	15.562	15.714	16.116	16.185	16.249	16.309
	LPP Prp	0,52	0,49	2,56	0,43	0,40	0,37
	Rasio	98,1	97,87	98,57	98,44	98,31	98,17
5	Kaligesing	32.339	32.782	33.313	33.519	33.716	33.902



No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Laki-Laki	16.274	16.496	16.772	16.875	16.973	17.064
	LPP Lk	0,73	0,68	1,67	0,61	0,58	0,54
	Perempuan	16.065	16.286	16.541	16.644	16.743	16.838
	LPP Prp	0,7	0,68	1,57	0,62	0,59	0,57
	Rasio	101,3	101,29	101,40	101,39	101,37	101,34
6	Purworejo	85.483	85.688	89.547	89.597	89.623	89.613
	Laki-Laki	42.359	42.459	44.407	44.430	44.433	44.424
	LPP Lk	0,15	0,12	4,59	0,05	0,01	-0,02
	Perempuan	43.124	43.229	45.140	45.167	45.190	45.189
	LPP Prp	0,16	0,12	4,42	0,06	0,05	0,00
	Rasio	98,23	98,22	98,38	98,37	98,32	98,31
7	Banyuurip	43.951	44.482	45.383	45.628	45.859	46.075
	Laki-Laki	21.634	21.872	22.395	22.501	22.599	22.690
	LPP Lk	0,57	0,55	2,39	0,47	0,44	0,40
	Perempuan	22.317	22.610	22.988	23.127	23260	23.385
	LPP Prp	0,7	0,65	1,67	0,60	0,58	0,54
	Rasio	96,94	96,74	97,42	97,29	97,16	97,03
8	Bayan	52.699	53.732	53.817	54.307	54.784	55.246
	Laki-Laki	26.153	26.678	26.710	26.957	27.197	27.428
	LPP Lk	1,02	0,99	0,12	0,92	0,89	0,85
	Perempuan	26.546	27.054	27.107	27.350	27.587	27.818
	LPP Prp	0,99	0,95	0,20	0,90	0,87	0,84
	Rasio	98,52	98,61	98,54	98,56	98,59	98,60
9	Kutoarjo	62.866	63.463	65.165	65.432	65.679	65.904
	Laki-Laki	31.167	31.389	32.434	32.528	32.611	32.681
	LPP Lk	0,41	0,35	3,33	0,29	0,26	0,21
	Perempuan	31.699	32.074	32.731	32.904	33.068	33.223
	LPP Prp	0,6	0,59	2,05	0,53	0,50	0,47
	Rasio	98,32	97,86	99,09	98,86	98,62	98,37
10	Butuh	42.728	43.259	44.099	44.344	44.576	44.793
	Laki-Laki	21.120	21.368	21.830	21.943	22.049	22.147
	LPP Lk	0,63	0,58	2,16	0,52	0,48	0,44
	Perempuan	21.608	21.891	22.269	22.401	22.527	22.646
	LPP Prp	0,67	0,65	1,73	0,59	0,56	0,53
	Rasio	97,74	97,61	98,03	97,96	97,88	97,80
11	Pituruh	52.587	53.594	53.736	54.214	54.679	55.128
	Laki-Laki	26.540	27.097	27.058	27.322	27.580	27.829
	LPP Lk	1,09	1,04	-0,14	0,98	0,94	0,90
	Perempuan	26.047	26.497	26.678	26.892	27.099	27.299
	LPP Prp	0,87	0,86	0,68	0,80	0,77	0,74
	Rasio	101,89	102,26	101,42	101,60	101,77	101,94
12	Kemiri	60.272	61.737	61.125	61.824	62.512	63.184
	Laki-Laki	30.471	31.240	30.871	31.239	31.599	31.951
	LPP Lk	1,3	1,25	-1,18	1,19	1,15	1,11
	Perempuan	29.801	30.497	30.254	30.585	30.913	31.233
	LPP Prp	1,17	1,15	-0,80	1,09	1,07	1,04
	Rasio	102,25	102,44	102,04	102,14	102,22	102,30
13	Bruno	54.551	56.357	54.620	55.481	56.338	57.188
	Laki-Laki	28.221	29.265	28.116	28.611	29.105	29.595
	LPP Lk	1,85	1,82	-3,93	1,76	1,73	1,68
	Perempuan	26.330	27.092	26.504	26.870	27.233	27.593
	LPP Prp	1,46	1,43	-2,17	1,38	1,35	1,32
	Rasio	107,18	108,02	106,08	106,48	106,87	107,26
14	Gebang	44.220	44.821	45.559	45.838	46.105	46.356
	Laki-Laki	22.431	22.790	23.045	23.212	23.372	23.524
	LPP Lk	0,82	0,79	1,12	0,72	0,69	0,65
	Perempuan	21.789	22.031	22.514	22.626	22.733	22.832
	LPP Prp	0,59	0,55	2,19	0,50	0,47	0,44
	Rasio	102,95	103,45	102,36	102,59	102,81	103,03
15	Loano	38.891	39.503	39.944	40.231	40.507	40.771

No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Laki-Laki	19.603	19.909	20.146	20.289	20.426	20.556
	LPP Lk	0,82	0,77	1,19	0,71	0,68	0,64
	Perempuan	19.288	19.594	19.798	19.942	20.081	20.215
	LPP Prp	0,8	0,79	1,04	0,73	0,70	0,67
	Rasio	101,63	101,61	101,76	101,74	101,72	101,69
16	Bener	58.159	59.662	58.850	59.568	60.275	60.970
	Laki-Laki	29.520	30.343	29.794	30.187	30.574	30.954
	LPP Lk	1,42	1,37	-1,81	1,32	1,28	1,24
	Perempuan	28.639	29.319	29.056	29.381	29.701	30.016
	LPP Prp	1,19	1,17	-0,90	1,12	1,09	1,06
	Rasio	103,08	103,49	102,54	102,74	102,94	103,13
Kab. Purworejo		788.265	801.670	808.153	814.429	820.513	826.359
Laki-Laki		394.698	401.499	404.767	407.931	410.981	413.904
LPP Lk		0,89	0,85	0,81	0,78	0,75	0,71
Perempuan		393.567	400.171	403.386	406.498	409.532	412.455
LPP Prp		0,86	0,83	0,80	0,77	0,75	0,71
Rasio		100,29	100,33	100,34	100,35	100,35	100,35

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Keterangan:

LPP Lk = Laju Pertumbuhan Penduduk Laki-Laki

LPP Prp = Laju Pertumbuhan Penduduk Perempuan

Terdapat 8 (delapan) kecamatan yang memiliki tingkat rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan di bawah 100, yakni Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Bayan, Kecamatan Kutoarjo, serta Kecamatan Butuh. Sementara itu, Kecamatan Bruno memiliki rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan tertinggi, sebesar 107,18. Hingga 5 (lima) tahun ke depan (2029), diproyeksikan penduduk laki-laki tetap lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, dengan tren yang semakin tinggi jumlah penduduk laki-lakinya terhadap penduduk perempuan. Selisih penduduk laki-laki dan perempuan yang semula 1.131 jiwa pada tahun 2023 melebar menjadi 1.449 jiwa pada tahun proyeksi 2029. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purworejo pada tahun 2029 sebesar 0,71. Pertumbuhan penduduk laki-laki (0,71) sama dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk perempuan (0,71).

Kepadatan Penduduk

Kabupaten Purworejo memiliki luas 1.081,45 km2, terbagi dalam 16 (enam belas) kecamatan. Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo yang merupakan kawasan urban memiliki kepadatan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 1.604 jiwa/km2. Sementara itu, Kecamatan Kaligesing menjadi daerah dengan kepadatan penduduk terendah, berkisar 413 jiwa/km2 pada tahun 2023. Selanjutnya, proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Purworejo hingga tahun 2045 dapat diamati pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.31 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Purworejo



No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/ km2)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grabag						
	Penduduk (jiwa)	50.573	51.772	51.334	51.906	52.468	53.017
	Luas (km2)	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	746	764	757	766	774	782
2	Ngombol						
	Penduduk (jiwa)	35.826	36.572	36.521	36.875	37.221	37.558
	Luas (km2)	59,33	59,33	59,33	59,33	59,33	59,33
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	604	616	616	622	627	633
3	Purwodadi						
	Penduduk (jiwa)	42.291	43.153	43.138	43.547	43.947	44.335
	Luas (km2)	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	753	769	768	776	783	790
4	Bagelen						
	Penduduk (jiwa)	30.829	31.093	32.002	32.118	32.224	32.319
	Luas (km2)	63,44	63,44	63,44	63,44	63,44	63,44
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	486	490	504	506	508	509
5	Kaligesing						
	Penduduk (jiwa)	32.339	32.782	33.313	33.519	33.716	33.902
	Luas (km2)	78,33	78,33	78,33	78,33	78,33	78,33
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	413	419	425	428	430	433
6	Purworejo						
	Penduduk (jiwa)	85.483	85.688	89.547	89.597	89.623	89.613
	Luas (km2)	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	1.605	1.609	1682	1683	1683	1683
7	Banyuurip						
	Penduduk (jiwa)	43.951	44.482	45.383	45.628	45.859	46.075
	Luas (km2)	47,78	47,78	47,78	47,78	47,78	47,78
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	920	931	950	955	960	964
8	Bayan						
	Penduduk (jiwa)	52.699	53.732	53.817	54.307	54.784	55.246
	Luas (km2)	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	1.180	1.203	1205	1216	1227	1237
9	Kutoarjo						
	Penduduk (jiwa)	62.866	63.463	65.165	65.432	65.679	65.904
	Luas (km2)	39,20	39,20	39,20	39,20	39,20	39,20
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	1.604	1.619	1662	1669	1675	1681
10	Butuh						
	Penduduk (jiwa)	42.728	43.259	44.099	44.344	44.576	44.793
	Luas (km2)	47,21	47,21	47,21	47,21	47,21	47,21
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	905	916	934	939	944	949
11	Pituruh						
	Penduduk (jiwa)	52.587	53.594	53.736	54.214	54.679	55.128
	Luas (km2)	89,01	89,01	89,01	89,01	89,01	89,01
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	591	602	604	609	614	619
12	Kemiri						
	Penduduk (jiwa)	60.272	61.737	61.125	61.824	62.512	63.184
	Luas (km2)	103,15	103,15	103,15	103,15	103,15	103,15

No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/ km2)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	584	599	593	599	606	613
13	Bruno						
	Penduduk (jiwa)	54.551	56.357	54.620	55.481	56.338	57.188
	Luas (km2)	105,68	105,68	105,68	105,68	105,68	105,68
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	516	533	517	525	533	541
14	Gebang						
	Penduduk (jiwa)	44.220	44.821	45.559	45.838	46.105	46.356
	Luas (km2)	70,51	70,51	70,51	70,51	70,51	70,51
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	627	636	646	650	654	657
15	Loano						
	Penduduk (jiwa)	38.891	39.503	39.944	40.231	40.507	40.771
	Luas (km2)	53,51	53,51	53,51	53,51	53,51	53,51
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	727	738	746	752	757	762
16	Bener						
	Penduduk (jiwa)	58.159	59.662	58.850	59.568	60.275	60.970
	Luas (km2)	102,44	102,44	102,44	102,44	102,44	102,44
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	568	582	574	581	588	595
Kab. Purworejo							
Penduduk (jiwa)		788.265	801.670	808.153	814.429	820.513	826.359
Luas (km2)		1.081,45	1.081,45	1.081,45	1.081,45	1.081,45	1.081,45
Kepadatan penduduk (jiwa/km2)		729	741	747	753	759	764

Sumber: Analisis 2023

Setelah dilakukan proyeksi penduduk, Kabupaten Purworejo akan semakin padat, menjadi 764 jiwa/km2 pada tahun 2029, meningkat 35 jiwa/km2 dari tahun 2023 (semula 729 jiwa/km2). Pada tahun 2029, Kecamatan Purworejo (1.683 jiwa/km2) dan Kecamatan Kutoarjo (1.881 jiwa/km2) menjadi yang paling padat. Tren penduduk yang semakin meningkat ini perlu diantisipasi dalam 5 tahun ke depan, salah satunya dengan mengatur pola ruang melalui RDTR pada kawasan perkotaan dan kawasan strategis, beberapa di antaranya: kawasan perkotaan Purworejo-Kutoarjo (yang telah disusun), kawasan otoritatif Badan Otorita Borobudur, kawasan kota perbatasan (*border city*) sekitar Bandar Udara YIA, kawasan perkotaan sekitar kawasan peruntukan industri Purwodadi-Ngombol-Grabag, kawasan perkotaan Bener sekitar Bendungan Bener, kawasan perkotaan Grabag, kawasan perkotaan Kemiri-Pituruh, serta kawasan perkotaan Bruno.

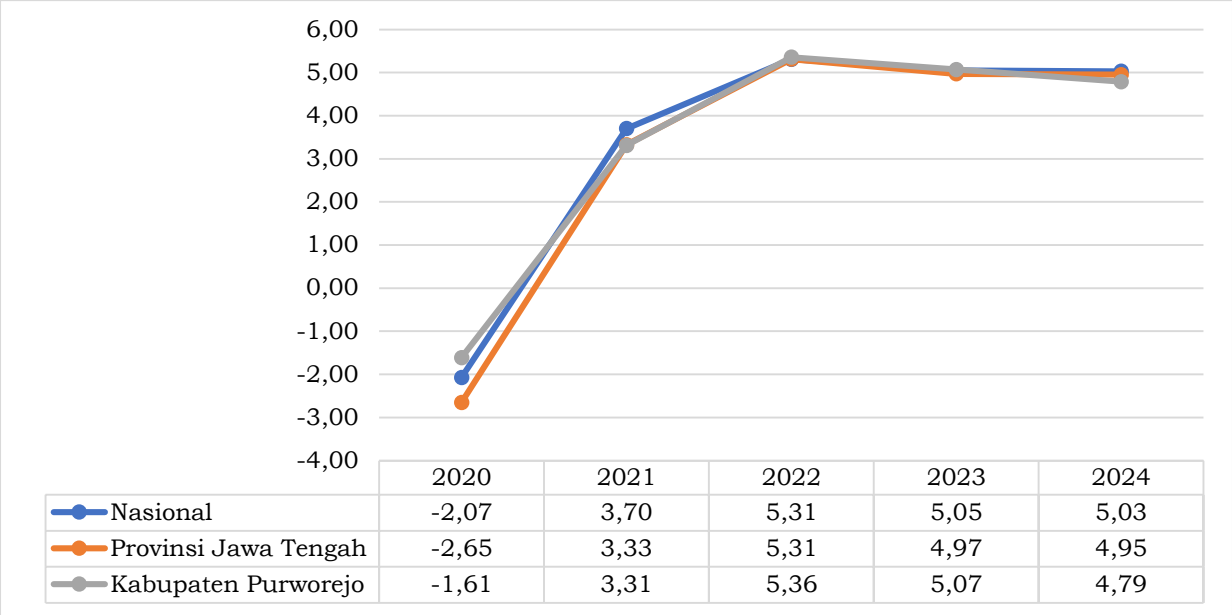
2.1.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan Ekonomi

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Selama periode tahun 2020-2024, Kabupaten Purworejo menunjukkan kinerja ekonomi yang positif dengan pertumbuhan ekonomi yang mayoritas lebih tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2023, Kabupaten Purworejo mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07 persen, yang melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang hanya mencapai 4,97 persen dan sedikit lebih tinggi dari

pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05 persen. Namun pada tahun 2024, Kabupaten Purworejo mengalami penurunan sebesar 0,28 persen menjadi 4,79 persen. Tren penurunan ini sudah terjadi semenjak tahun 2022. Di tahun 2024, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo berada dibawah Nasional dan Provinsi. Hal ini mengindikasikan adanya pelambatan dalam laju pertumbuhan yang perlu diperhatikan. Gambaran laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 37 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2024 (Persen)

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

2) Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kesejahteraan ekonomi. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kondisi kemiskinan dapat dianalisis menggunakan beberapa indikator antara lain garis kemiskinan, persentase penduduk miskin (P0), serta indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2).

Garis Kemiskinan (GK) adalah batas untuk menentukan penduduk miskin atau tidak miskin, yang merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM mencakup pengeluaran kebutuhan minimum makanan setara 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan GKNM mencakup kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Garis kemiskinan Kabupaten Purworejo pada tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan yang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, garis kemiskinan di Kabupaten Purworejo sebesar Rp364.289/Kapita/Bulan dalam waktu empat tahun nilainya meningkat hingga mencapai Rp459.253/Kapita/Bulan. Peningkatan nilai garis kemiskinan ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Kabupaten Purworejo yang hidup dalam kondisi yang kurang memadai. Namun apa bila dibandingkan dengan nilai garis kemiskinan

Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, garis kemiskinan Kabupaten Purworejo masih dibawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Begitu pula juga dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya, garis kemiskinan Kabupaten Purworejo masih relatif lebih rendah.

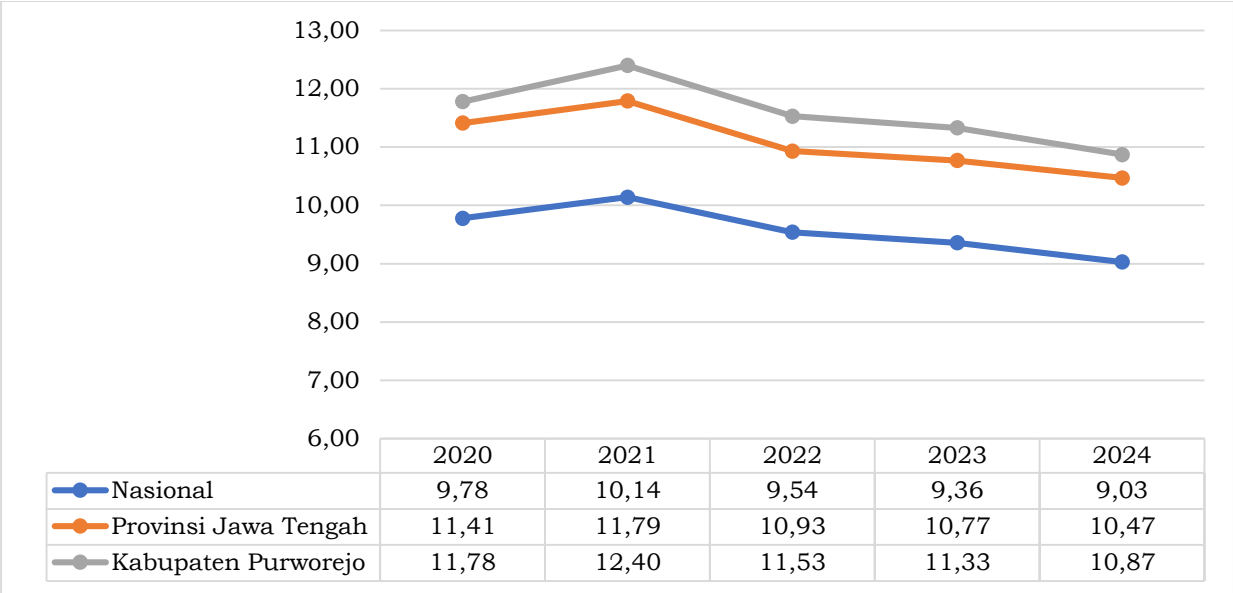
Tabel 2.32 Garis Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2020-2024

Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Kab. Purworejo	364.289	376.127	393.731	427.622	459.253
Kab. Kebumen	380.557	390.599	416.004	451.678	471.824
Kab. Wonosobo	362.683	373.474	399.180	425.105	456.351
Kab. Magelang	342.430	353.608	377.497	411.129	431.289
Kab. Kulon Progo	353.807	360.202	381.666	416.870	438.007
Prov. Jawa Tengah	395.407	409.193	464.879	477.580	507.001
Indonesia	454.652	472.525	535.547	550.458	595.242

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Persentase penduduk miskin (P0) adalah salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk merepresentasikan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Purworejo pada tahun 2020-2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Purworejo sebesar 11,41 persen kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 11,79 persen. Namun pada tahun 2022-2024 nilainya mengalami penurunan hingga mencapai 9,03 persen pada tahun 2024, lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Kenaikan persentase penduduk miskin (P0) yang terjadi pada tahun 2020-2021 disebabkan karena adanya pandemi Covid-19, yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pendapatan masyarakat menjadi berkurang. Oleh Pemerintah kondisi tersebut dapat dikendalikan sehingga pada periode tahun selanjutnya angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo mengalami penurunan, dimana hal ini menunjukkan terdapat perbaikan kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Purworejo. Meski demikian, kondisi kemiskinan di Kabupaten Purworejo tetap harus menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah. Hal ini disebabkan karena jika dilihat secara keseluruhan selama periode tahun 2020-2024 angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo nilainya lebih tinggi dari angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, sehingga kemiskinan menjadi sebuah isu besar yang perlu diselesaikan bersama serta membutuhkan peran berbagai pihak untuk saling bersinergi dalam pengentasannya.



Gambar 2.38 Grafik Persentase Penduduk Miskin (PO) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dimensi lain yang perlu diperhatikan untuk menganalisis kondisi kemiskinan di suatu daerah adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Kebijakan pemerintah harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) merupakan representasi atau gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai P2, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode tahun 2020-2024, indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Purworejo menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Selama periode tersebut tercatat nilai P1 tertinggi terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar 1,78 dan nilai P1 terendah pada tahun 2020 yakni sebesar 0,98. Pada tahun 2024 nilai P1 Kabupaten Purworejo adalah sebesar 1,08. Hal ini menunjukkan terjadinya perbaikan kondisi kemiskinan di Kabupaten Purworejo dari tahun 2023, namun nilainya belum bisa kembali sama atau lebih rendah dari tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, nilai P1 Kabupaten Purworejo pada periode tahun 2020-2024 masih lebih rendah. Begitu pula jika dibandingkan dengan daerah lain di sekitar Kabupaten Purworejo. Nilai P1 Kabupaten Purworejo cenderung lebih rendah.

Tabel 2.33 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2020-2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Kab. Purworejo	0,98	1,36	1,31	1,78	1,08
Kab. Kebumen	2,62	3,24	3,41	2,89	2,35
Kab. Wonosobo	2,42	2,75	3,18	2,60	2,41
Kab. Magelang	1,23	1,63	1,66	1,73	1,23

Indeks Kedalaman Kemiskinan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Kab. Kulon Progo	3,32	3,01	2,32	2,54	2,48
Prov. Jawa Tengah	1,72	1,91	1,77	1,75	1,64
Indonesia	1,61	1,71	1,56	1,53	1,46

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Serupa dengan nilai P1, nilai indeks keparahan kemiskinan (P2) pada periode tahun 2020-2024 di Kabupaten Purworejo juga mengalami perubahan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2024, nilai P2 tercatat sebesar 0,18 dimana nilai tersebut turun cukup signifikan dari tahun 2023 sebesar 0,43. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan kondisi kemiskinan, dimana menurunnya kesenjangan di antara penduduk miskin. Data mengenai Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan ini memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Purworejo. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, upaya terus dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Tabel 2.34 Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2020-2024

Indeks Keparahannya Kemiskinan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Kab. Purworejo	0,12	0,28	0,24	0,43	0,18
Kab. Kebumen	0,55	0,88	1,02	0,75	0,48
Kab. Wonosobo	0,47	0,65	0,86	0,63	0,60
Kab. Magelang	0,20	0,35	0,41	0,41	0,23
Kab. Kulon Progo	0,86	0,75	0,56	0,61	0,62
Prov. Jawa Tengah	0,34	0,45	0,42	0,42	0,37
Indonesia	0,38	0,42	0,38	0,38	0,35

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

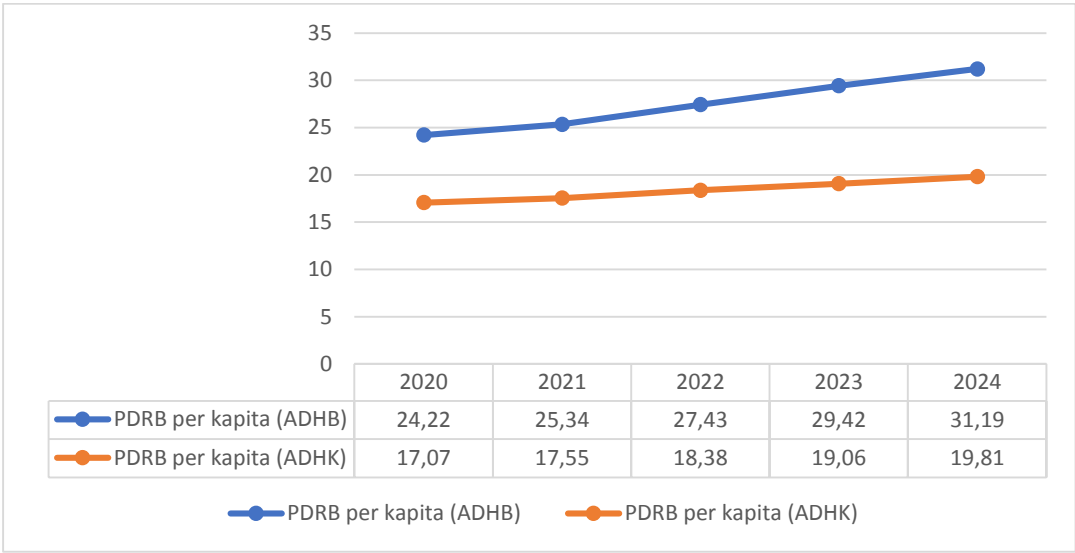
Kondisi di tahun terakhir ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Purworejo, kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan serta ketimpangan rata-rata pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung lebih rendah daripada daerah di sekitarnya, namun masih berada di atas Provinsi Jawa Tengah serta di tingkat nasional.

3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Kesejahteraan masyarakat suatu wilayah dapat dianalisis melalui berbagai indikator, salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Indikator ini memberikan gambaran mengenai pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap individu dalam suatu populasi, sehingga memberikan wawasan tentang tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. PDRB per kapita juga mencerminkan daya beli masyarakat, yang merupakan indikator penting dalam menilai kesejahteraan ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Dengan memahami PDRB per kapita, kita dapat mengevaluasi bagaimana perubahan ekonomi mempengaruhi standar hidup dan kualitas hidup masyarakat.

Pada periode 2020-2024, PDRB per kapita Kabupaten Purworejo menunjukkan tren kenaikan. Pada tahun 2024, PDRB per kapita Kabupaten Purworejo tercatat sebesar 31,19 juta rupiah jika dihitung berdasarkan harga

berlaku, sedangkan pada harga konstan 2010, angkanya mencapai 19,81 juta rupiah. Meskipun ada peningkatan, capaian ini masih berada di bawah target nasional yang menetapkan PDRB per kapita lebih dari 50 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan, Kabupaten Purworejo masih perlu melakukan upaya signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya agar sesuai dengan standar target nasional. Untuk informasi lebih detail tentang tren ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

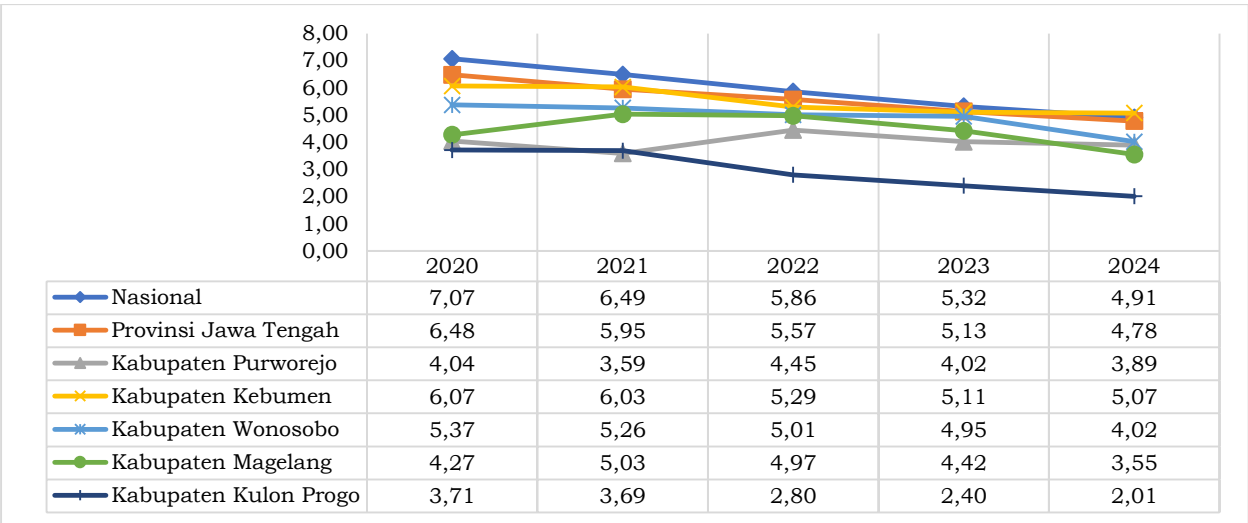


Gambar 2. 39 Grafik Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Purworejo Tahun 2020 – 2024 (Juta Rupiah)

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024 (diolah)

4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencerminkan persentase angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja. TPT di Kabupaten Purworejo relatif lebih baik jika dibandingkan TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2020-2024. Begitu pula jika dibandingkan kabupaten sekitarnya, TPT Kabupaten Purworejo berada pada posisi yang relatif lebih baik. Dari tahun 2020-2024, TPT Kabupaten Purworejo relatif menurun sebesar 0,15 persen.



Gambar 2. 40 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

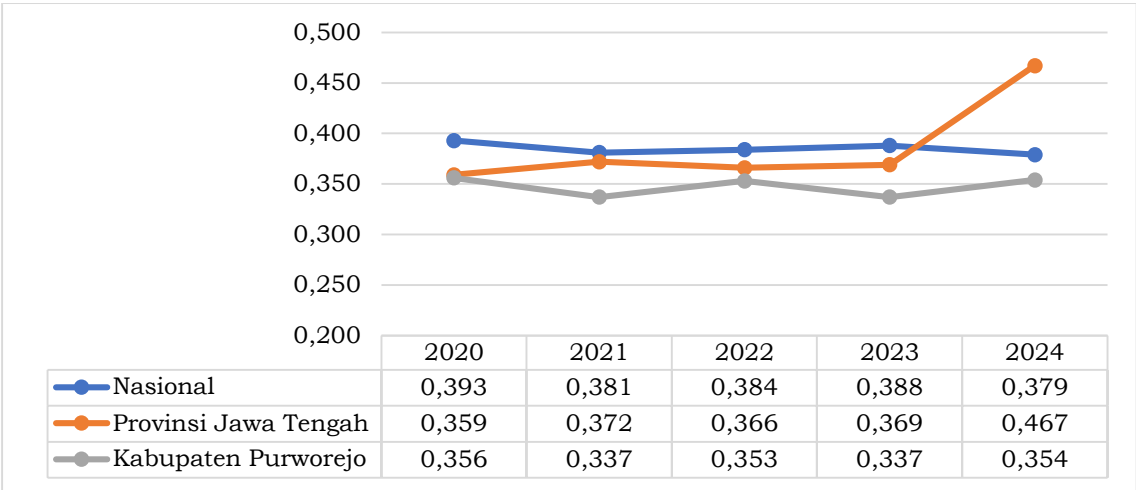
Peningkatan TPT di Kabupaten Purworejo disebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja (rata-rata sebesar 1,7 persen per tahun) yang tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja yang tersedia. Berdasarkan tingkat pendidikannya, TPT pada tingkat pendidikan menengah ke atas dan pendidikan tinggi lebih tinggi dibandingkan TPT pada tingkat pendidikan SMP ke bawah. Disamping itu, berdasarkan kategorinya pengangguran di Kabupaten Purworejo didominasi oleh pengangguran yang Merasa Tidak Mungkin Mendapat Pekerjaan/*Hopeless of Job*. Banyaknya pengangguran dengan tingkat pendidikan menengah dan tinggi serta *hopeless of job* yang disebabkan *mismatch* atau ketidaksesuaian antara kualifikasi pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang ada. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mengatasi permasalahan pengangguran.

Di sisi lain penduduk bekerja didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah (sebesar 58,34 persen pada tahun 2023) yang merupakan *low skilled workers* dimana rentan terhadap otomatisasi di era reformasi teknologi. Selain itu, berdasarkan status pekerjaannya, penduduk bekerja di Kabupaten Purworejo didominasi oleh pekerja informal sebesar 70,07 persen. Sektor informal dapat menjadi salah satu solusi bagi pengurangan pengangguran di Kabupaten Purworejo karena mampu menyerap tenaga kerja dengan pendidikan rendah dan tanpa keterampilan tinggi. Meskipun demikian pekerja pada sektor informal rentan terdampak guncangan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Purworejo diperlukan perluasan kesempatan kerja baik di sektor formal maupun non formal serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

5) Indeks Gini

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Rasio Gini atau Indeks Gini. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk semakin tinggi, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 tingkat ketimpangan pendapatan semakin rendah, atau mendekati pemerataan sempurna. BPS mengkategorikan Indeks Gini menjadi tiga tingkat, yaitu rendah (Indeks Gini < 0,3), sedang (0,3 < Indeks Gini < 0,4) dan tinggi (Indeks Gini > 0,4).

Indeks Gini Kabupaten Purworejo pada tahun 2020-2024 menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Selama periode tersebut, tercatat indeks gini tertinggi pada tahun 2020 sebesar 0,356 dan indeks gini terendah pada tahun 2021 dan 2023 sebesar 0,337. Nilai indeks gini Kabupaten Purworejo berada pada kisaran 0,337 hingga 0,356 dimana setiap tahunnya nilai indeks gini tersebut bergantian mengalami kenaikan dan penurunan. Secara keseluruhan nilai indeks gini Kabupaten Purworejo terus berada pada kategori sedang. Selain itu, selama 5 tahun indeks gini Kabupaten Purworejo selalu berada di bawah indeks gini Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan di Kabupaten Purworejo lebih merata dibandingkan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, namun tetap memerlukan perhatian dari pemerintah.



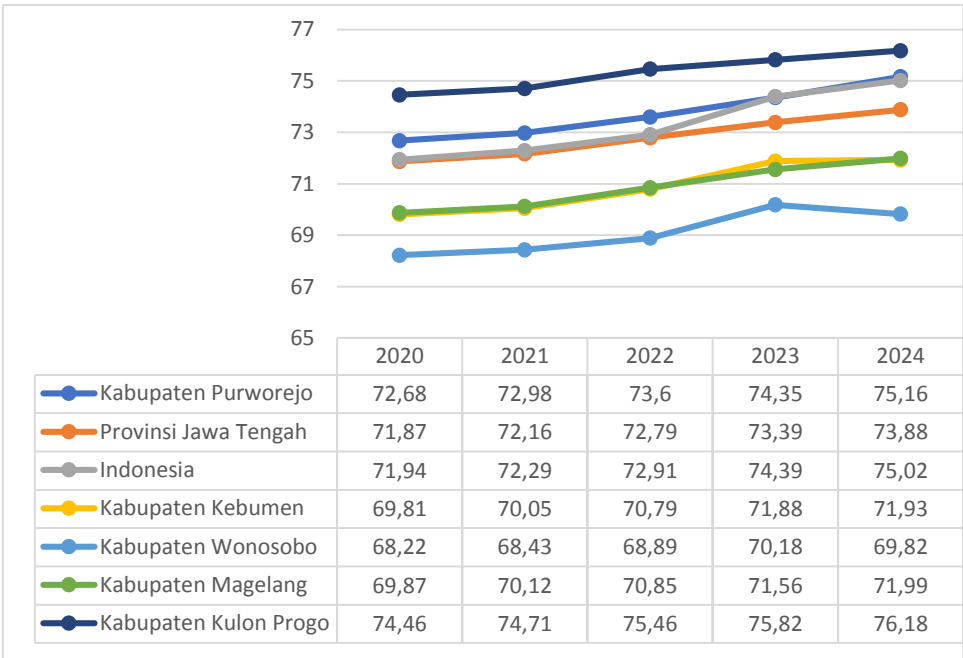
Gambar 2. 41 Grafik Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024

6) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan suatu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai. IPM mengukur 3 (tiga) dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk yaitu: umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Angka Harapan Hidup, tingkat pengetahuan yang diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, serta standar hidup layak yang diukur melalui Pengeluaran Per Kapita.

IPM Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahun serta selalu berada di atas IPM Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam grafik berikut.



Gambar 2. 42 Perkembangan IPM Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia serta Kabupaten Sekitar Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024

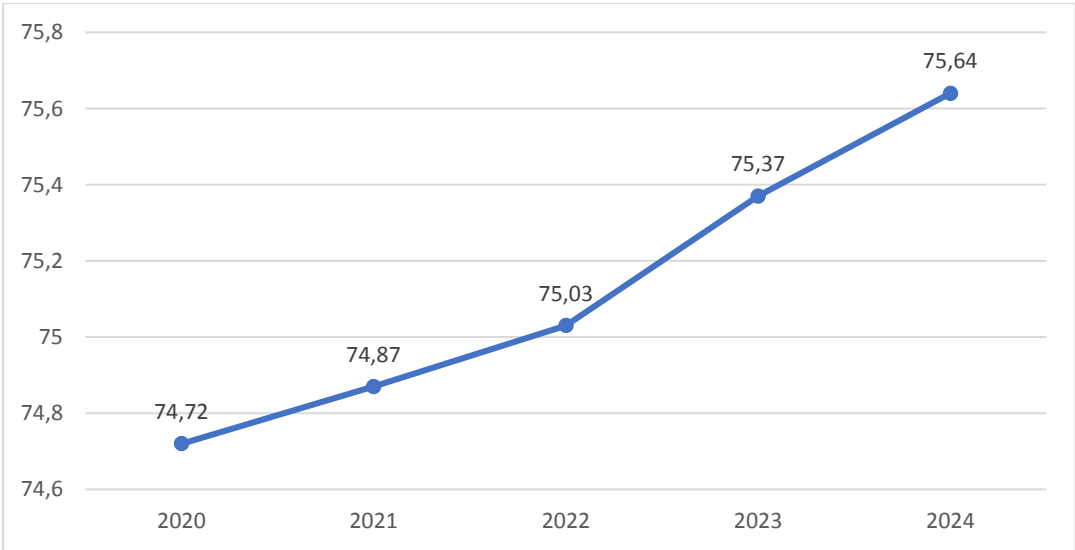
Dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, nilai IPM Kabupaten Purworejo berada di peringkat yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Kebumen, Wonosobo, dan Magelang. Namun, Kabupaten Purworejo masih berada di bawah Kabupaten Kulon Progo. Meskipun capaian IPM Kabupaten Purworejo cenderung lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain di sekitarnya, pertumbuhan IPM di Kabupaten Purworejo menjadi yang paling lambat dibandingkan dengan daerah-daerah tersebut.

Pertumbuhan IPM Kabupaten Purworejo selama periode 2020 hingga 2024 meningkat sebesar 3,4%. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan IPM di Kabupaten Purworejo perlu dianalisis lebih lanjut. Salah satu faktor yang mungkin berkontribusi adalah tingkat pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, dan daya beli masyarakat yang masih memerlukan peningkatan. Selain itu, upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program-program peningkatan kualitas hidup masyarakat perlu lebih diintensifkan.

Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya mendorong laju pertumbuhan IPM di Kabupaten Purworejo sehingga dapat bersaing dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Pembangunan manusia yang baik akan menciptakan pertumbuhan yang positif baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan serta peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat, sehingga tujuan masyarakat dapat menikmati umur panjang dan sehat serta berkehidupan layak dan produktif dapat terwujud.

b. Kesehatan untuk Semua

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Indikator ini dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan.



Gambar 2. 43 Grafik Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Purworejo selalu meningkat dari tahun 2020 hingga 2024 dan mencapai angka 75,64 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan harapan hidup bayi yang baru lahir di Kabupaten Purworejo

semakin tinggi dan mengindikasikan semakin membaiknya kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Purworejo. Membaiknya tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Purworejo disebabkan berbagai faktor diantaranya kemajuan teknologi di bidang kesehatan, pengetahuan akan pentingnya menjaga kesehatan sejak bayi oleh keluarga dekat, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat.

Jumlah kasus kematian balita merupakan kasus kematian anak berusia 0-5 tahun pada tahun tertentu yang dihitung pada pertengahan tahun yang sama termasuk kematian bayi. Kasus kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya kematian bayi. Dengan demikian angka kematian balita termasuk bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Tabel 2. 35 Kasus Kematian Balita di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
a.	Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun)	114	101	74	98	96

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2025

Jumlah kasus kematian balita di Kabupaten Purworejo mengalami perubahan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah kasus kematian balita tercatat sebanyak 114 anak dan meskipun sempat mengalami penurunan, pada tahun 2023 angka ini meningkat menjadi 98 kasus. Jumlah kasus kematian balita masih menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan adanya tantangan dalam upaya penurunan angka kematian tersebut. Salah satu faktor utama yang menyebabkan masih adanya kematian bayi dan balita di Kabupaten Purworejo adalah kehamilan risiko tinggi. Kehamilan risiko tinggi dapat menimbulkan komplikasi serius yang mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi yang dikandung, yang pada akhirnya berkontribusi pada tingginya angka kematian bayi dan balita.

Untuk mencegah kematian balita, diperlukan upaya kesehatan anak yang terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya ini harus dimulai sejak janin masih dalam kandungan hingga anak berusia lima tahun. Peningkatan kesehatan anak memerlukan perhatian khusus pada beberapa aspek penting. Dengan mengimplementasikan upaya-upaya ini secara konsisten, diharapkan angka kematian bayi dan balita di Kabupaten Purworejo dapat terus menurun. Upaya ini akan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat, sehingga dapat mencapai potensi penuh mereka di masa depan.

Kasus Kematian Ibu dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Jumlah kematian ibu dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan

selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Berikut adalah tabel Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024.

Tabel 2. 36 Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah kasus kematian ibu yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas	19	22	6	5	7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2024

Kasus kematian ibu di Kabupaten Purworejo pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2020 jumlah kematian ibu tercatat sebanyak 19 kasus dan meningkat menjadi 22 kasus pada tahun 2021. Pada tahun 2023, jumlah kasus kematian ibu turun secara signifikan menjadi hanya 5 kasus. Namun, pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 7 kasus. Meskipun jumlah kasus kematian ibu masih fluktuatif, tren menunjukkan penurunan yang mengarah pada kondisi yang lebih baik setiap tahunnya. Faktor-faktor yang menyebabkan masih tingginya kasus kematian ibu di Kabupaten Purworejo sangat beragam. Salah satu faktor utama adalah kehamilan risiko tinggi yang memerlukan perhatian khusus dan penanganan medis yang lebih intensif. Ibu hamil dengan kondisi medis tertentu atau yang memiliki komplikasi selama kehamilan lebih rentan mengalami komplikasi serius saat persalinan. Frekuensi kunjungan ibu hamil yang kurang juga merupakan faktor yang signifikan. Kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan selama kehamilan sangat penting untuk memantau kesehatan ibu dan janin, mendeteksi dini masalah yang mungkin timbul, serta memberikan intervensi yang diperlukan tepat waktu. Sayangnya, banyak ibu hamil di Kabupaten Purworejo yang tidak melakukan kunjungan rutin ini, sehingga risiko komplikasi meningkat. Selain itu, banyak persalinan yang masih dilakukan tidak di fasilitas kesehatan dan dengan bantuan dukun bayi. Persalinan di rumah atau dengan dukun bayi tanpa kehadiran tenaga medis terlatih dapat meningkatkan risiko komplikasi yang tidak tertangani dengan baik. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mendorong persalinan di fasilitas kesehatan yang dilengkapi dengan peralatan dan tenaga medis yang memadai. Gerakan Sayang Ibu dan Anak, yang seharusnya menjadi program unggulan untuk mengurangi jumlah kasus kematian ibu, belum berjalan maksimal. Program ini membutuhkan peran serta lintas sektor untuk benar-benar efektif. Dukungan dari sektor kesehatan, pendidikan, serta komunitas lokal sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan praktik kesehatan yang aman bagi ibu hamil dan bayi.

Di beberapa wilayah, norma sosial dan budaya masyarakat kurang mendukung pengambilan keputusan yang tepat terkait kehamilan dan persalinan yang aman. Kepedulian masyarakat mengenai pentingnya akses ke layanan kesehatan yang berkualitas perlu ditingkatkan melalui edukasi dan kampanye yang berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama yang erat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal. Program-program yang fokus pada edukasi kesehatan reproduksi, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat perlu terus

dikembangkan dan diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian, diharapkan jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Purworejo dapat terus menurun, sehingga kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan bayi dapat terjamin.

Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Prevalensi *stunting* mengacu pada persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami *stunting* dalam pertumbuhan fisiknya. Prevalensi balita *stunting* digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara. Semakin tinggi nilainya, semakin serius dan mendesak perluasan upaya untuk mengatasi masalah ini.

Stunting dan gizi buruk adalah dua kondisi kesehatan yang berbeda meskipun keduanya berhubungan dengan masalah gizi pada anak-anak. *Stunting* mengacu pada bentuk kegagalan pertumbuhan (*growth faltering*) akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Akibatnya, tinggi dan berat badan mereka lebih rendah dari anak sebayanya. Sementara itu, gizi buruk merupakan kondisi di mana anak mengalami kekurangan nutrisi esensial seperti protein, energi, vitamin, dan mineral. Gizi buruk dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk berat badan yang sangat rendah, kulit kering dan keriput, rambut kusam, kelemahan fisik, dan gangguan pada sistem kekebalan tubuh.

Tabel 2. 37 Prevalensi Gizi Buruk dan Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Berdasarkan E-PPGBM Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Prevalensi gizi buruk	0,07%	0,12%	0,11%	0,12%	0,20%
2	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada Balita	8,99%	11,81%	11,90%	13,30%	15,93%

Sumber: Dinas Keseharan Kabupaten Purworejo, 2024

Prevalensi Balita Pendek (*stunting*) berdasarkan ePPGBM menunjukkan angka yang meningkat cukup signifikan dari tahun 2020 sebesar 8,99% dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 15,93%. Diperlukan upaya keras dalam mengatasi permasalahan terkait penurunan angka *stunting* di Kabupaten Purworejo. Perbedaan utama antara *stunting* dan gizi buruk terletak pada fokusnya. *Stunting* lebih menitikberatkan pada aspek pertumbuhan fisik, khususnya tinggi badan, sementara gizi buruk mencakup berbagai defisiensi nutrisi yang mempengaruhi fungsi tubuh secara keseluruhan.

Tabel 2. 38 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada Balita	NA	15,7%	21,3%	20,6%	14,90

Sumber : Kementerian Kesehatan RI, 2025

Penyebab terjadinya *stunting* yaitu kualitas dan kuantitas makanan balita kurang memenuhi standar, pola asuh balita masih kurang optimal, ketersediaan pangan tingkat rumah tangga kurang mencukupi karena 50 persen gizi buruk dari keluarga miskin, pemanfaatan pekarangan di tingkat rumah tangga belum optimal, pemberdayaan keluarga masih kurang serta masih adanya ibu hamil kekurangan energi kronik (KEK) yang beresiko melahirkan bayi *stunting*. Meningkatnya prevalensi ibu hamil dengan anemia juga turut berpengaruh dalam meningkatkan risiko *stunting*.

Kesehatan ibu juga berperan penting terhadap kualitas kesehatan secara keseluruhan. Banyak perempuan yang mengalami hamil pada saat usia masih remaja dan kurangnya edukasi tentang kesehatan ibu dan anak sehingga tidak mengkonsumsi makanan secara benar selama kehamilan kemudian melahirkan bayi yang kecil atau berat badan rendah. Selain itu, keterbatasan dalam pemanfaatan pangan dikarenakan pemahaman/ pengetahuan yang terbatas terhadap pangan dan gizi, serta pola asuh. Selain itu, sanitasi yang layak juga menjadi hal yang perlu diperhatikan karena lingkungan yang tidak sehat dapat menyebabkan berbagai penyakit.

Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi, sehingga masih diperlukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan secara lebih efektif dan efisien. Penyakit menular berpotensi menjadi wabah yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Tabel 2. 39 Jumlah Penderita Penyakit Menular di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	TBC (+)	544	546	935	914	1.141
2	Pneumonia	109	54	171	275	334
3	HIV (kasus baru)	64	51	83	64	120
4	Diare	3.983	4.089	3.402	6.342	7.424
5	Kusta	6	8	14	9	8
6	Frambusia	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2025

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah penderita penyakit menular di Kabupaten Purworejo bersifat fluktuatif. Penyakit menular dengan jumlah penderita terbanyak adalah diare, diikuti oleh tuberkulosis (TBC). Semua penyakit menular menunjukkan peningkatan jumlah penderita pada tahun 2022, kecuali penyakit frambusia yang tidak ada lagi penderita sejak tahun 2020 hingga 2024 di Kabupaten Purworejo. Peningkatan jumlah penderita penyakit menular pada tahun 2022 dapat dikaitkan dengan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat. Selama pandemi COVID-19, masyarakat terbiasa dengan PHBS yang ketat, seperti mencuci tangan secara rutin, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Namun, setelah pandemi berakhir, kebiasaan-kebiasaan ini tidak berlanjut dengan konsistensi yang sama, yang mengakibatkan peningkatan kasus penyakit menular seperti diare dan TBC. Selain itu, cakupan skrining yang semakin luas juga berkontribusi pada peningkatan jumlah kasus yang terdeteksi. Dengan

lebih banyak orang yang menjalani pemeriksaan kesehatan, lebih banyak kasus penyakit menular yang berhasil diidentifikasi. Khususnya untuk TBC, mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan terus meningkat sampai tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh cakupan skrining yang meningkat sehingga penemuan kasus semakin banyak.

Adapun kasus HIV di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan yang signifikan, yang disebabkan oleh berbagai faktor kompleks. Salah satu faktor utama adalah meningkatnya perilaku seks yang menyimpang dan hubungan seks yang berisiko. Praktik-praktik ini sangat meningkatkan kemungkinan penularan HIV di kalangan masyarakat, terutama ketika tidak disertai dengan langkah-langkah pencegahan yang memadai seperti penggunaan kondom. Edukasi mengenai HIV/AIDS dan perilaku seks yang aman masih kurang tersebar luas di Kabupaten Purworejo. Kurangnya informasi dan pemahaman yang memadai di kalangan masyarakat membuat banyak orang tidak menyadari risiko dan cara pencegahan penularan HIV. Selain itu, cakupan skrining HIV juga masih terbatas. Dengan skrining yang belum luas, banyak kasus HIV yang tidak terdeteksi sehingga tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat. Stigma dan rasa malu yang masih melekat pada penderita HIV/AIDS juga menjadi penghalang signifikan dalam penanganan penyakit ini. Banyak orang enggan untuk menjalani tes atau mendapatkan pengobatan karena takut akan diskriminasi dan penilaian negatif dari masyarakat. Stigma ini tidak hanya menghalangi deteksi dini dan pengobatan, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup mereka yang hidup dengan HIV/AIDS. Lebih lanjut, terdapat kesulitan dalam menjangkau populasi kunci yang rentan terhadap penularan HIV, seperti pekerja seks komersial, pengguna narkoba suntik, dan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. Populasi ini sering kali sulit dijangkau oleh program-program kesehatan karena cenderung berada di luar jangkauan layanan kesehatan konvensional dan sering kali menghadapi stigma ganda yang lebih kuat.

Selanjutnya penyakit diare dan kusta di Kabupaten Purworejo merupakan penyakit berbasis lingkungan yang prevalensinya masih tinggi, sebagian besar dipengaruhi oleh belum tercapainya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM merupakan pendekatan terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sanitasi di masyarakat melalui lima pilar utama: stop buang air besar sembarangan (BABS), cuci tangan pakai sabun, pengembangan air minum rumah tangga yang aman, pengelolaan sampah yang efektif, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga yang baik.

Demam Berdarah Dengue juga masih menjadi penyakit yang mengancam di Kabupaten Purworejo. Setiap tahunnya jumlah penderita penyakit DBD selalu meningkat. Jumlah kasus infeksi *dengue* pada tahun 2023 sebanyak 1.434 kasus, meningkat pada tahun 2024 sebanyak 3.312. Sedangkan untuk kematian akibat dengue pada tahun 2023 sebesar 0,35% meningkat pada tahun 2024 sebesar 0,36%. Pentingnya pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3M Plus, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Pentingnya edukasi langsung kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap ancaman DBD, terutama pada musim penghujan.

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di masyarakat. Penyakit ini berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia dan berpengaruh terhadap peningkatan angka kesakitan dan kematian kelompok rentan yaitu ibu hamil/melahirkan bayi dan balita.

Tabel 2. 40 Kasus Malaria di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Kasus Malaria	5	535	561	41	0
2	Annual Parasite Incidence (API)	0,0	0,69	0,7	0,05	0,01

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2024

Kabupaten Purworejo terletak di kawasan Perbukitan Menoreh, habitat alami nyamuk *Anopheles* yang merupakan vektor malaria. Kabupaten Purworejo pernah menjadi salah satu penyumbang kasus malaria tertinggi di Pulau Jawa. Pada tahun 2022, dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah hanya Kabupaten Purworejo yang belum eliminasi malaria. Lonjakan kasus malaria terjadi berawal dari kejadian KLB malaria di Desa Wadas pada tahun 2021, yang hingga akhir tahun 2021 kemudian ditemukan sebanyak 535 kasus. Sedangkan tahun 2022 hingga Desember minggu kedua, ada 502 kasus yang tersebar di 6 kecamatan, 10 Puskesmas dan 58 desa wilayah Kabupaten Purworejo, dengan kasus tertinggi di Kecamatan Kaligesing. Pada tahun 2024, tercatat 0 kasus malaria di Kabupaten Purworejo dengan nilai API 0,012. Hal ini menunjukkan bahwa kasus malaria semakin menurun sejak tahun 2022 ke tahun 2024 ini.

Salah satu cara untuk mengurangi penularan malaria adalah dengan penemuan kasus malaria sedini mungkin untuk diobati, dan pengendalian vector (nyamuk) setepat mungkin. Kabupaten Purworejo memiliki relawan Gebrak Malaria terdiri dari 158 relawan yang berada pada wilayah malaria di 58 desa. Tugasnya adalah melaporkan kepada Juru Malaria Desa (JMD) dan Puskesmas, manakala ada warga yang sakit malaria dengan gejala seperti panas, demam, dan sakit kepala, serta mendata setiap ada warga /pendatang dari daerah endemis malaria. Penanggulangan malaria oleh Relawan Gebrak Malaria dilakukan melalui upaya promotif, preventif dan kuratif, yang bertujuan menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta mencegah KLB. Mobilitas penduduk yang tidak bisa dibatasi. Adanya kasus migrasi yang tidak tertangani dengan baik sehingga menjadikan kasus indegenous dan penularan tinggi. Selain itu juga kepatuhan dalam menggunakan kelambu berinsektisida masih rendah.

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) merupakan indikator penting dalam upaya pengendalian penyakit ini di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan yang sesuai dalam periode tertentu. Data mengenai penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kabupaten Purworejo memberikan gambaran tentang efektivitas program kesehatan yang sedang dijalankan untuk mengatasi

penyakit menular ini. Berikut merupakan data penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2. 41 Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Tahun	Perkiraan Kasus	Ditemukan	Diobati	Treatment Coverage
1	2	3	4	5	6
1	2020	1.567	591	544	37,7%
2	2021	1.736	545	543	31,4%
3	2022	1.742	946	915	54,3%
4	2023	1.753	917	905	52,3%
5	2024	1.886	1.159	1.112	61,5%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2025

Data ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (TB), namun masih terdapat tantangan dalam mencapai cakupan yang optimal. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian ini termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang TB, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, serta upaya pemerintah dalam memperluas cakupan skrining TB. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam meningkatkan kapasitas skrining dan memastikan bahwa semua pasien yang ditemukan mendapatkan pengobatan yang tepat dan mematuhi regimen pengobatan sampai selesai. Berikut merupakan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment succes rate*) sebagai persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap.

Tabel 2. 42 Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Succes Rate*) di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
1	3	4	5	6	7
Target	90	90	90	90	95
Capaian	83	83	84	82	79

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2025

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) di Kabupaten Purworejo semakin menurun di tahun 2024. Capaian ini masih jauh dari target yang diharapkan, mencerminkan adanya tantangan signifikan dalam penanganan TB di Kabupaten Purworejo. Namun capaian 2024 masih dapat berubah dikarenakan keberhasilan pengobatan baru akan terlihat pada 6-9 bulan setelah pengobatan.

Saat ini dari 27 puskesmas di Kabupaten Purworejo, masih 10 puskesmas yang sudah mencapai *Treatment coverage (TC)* > 90%, *treatment success rate (TSR)* >90 %, dan memenuhi 2 ketentuan lainnya dari 3 ketentuan yaitu ODIV Virulen tersuspensi > 95%, Eradikasi Frambusia, serta Eliminasi Malaria. Angka populasi bebas penyakit menular di Kabupaten Purworejo masih pada angka 40%. Semakin banyak puskesmas melakukan pelayanan sesuai target maka angka populasi bebas penyakit menular (PM) akan semakin tinggi atau semakin baik.

Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kabupaten Purworejo masih dihadapkan dengan tantangan besar karena masih menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Di tengah upaya untuk mengendalikan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan penting, peningkatan morbiditas dan mortalitas akibat PTM menambah beban ganda dalam pelayanan kesehatan. Kondisi ini menuntut strategi pembangunan kesehatan yang komprehensif dan terpadu untuk menghadapi kedua jenis penyakit ini secara bersamaan, memastikan bahwa upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Tantangan ini memerlukan perhatian dan dukungan dari seluruh sektor terkait untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan, edukasi masyarakat, dan penguatan sistem kesehatan guna mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang holistik di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2. 43 Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	ODGJ	818	2.397	3.052	3.880	4.138
2	Diabetes Melitus	2.433	6.919	6.853	9.327	11.876
3	Hipertensi	23.635	25.669	30.708	61.663	81.252

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2025

Berdasarkan data di atas, jumlah penderita penyakit tidak menular di Kabupaten Purworejo cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga tahun 2024. Hipertensi adalah jenis penyakit tidak menular dengan jumlah penderita terbanyak dengan jumlah 61.663 penderita pada tahun 2023. Penderita penyakit hipertensi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Penyakit tidak menular yang cukup tinggi selanjutnya adalah diabetes. Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ di Kabupaten Purworejo juga mengalami peningkatan hingga tahun 2023. Penerapan pola hidup sehat menjadi kunci utama dalam pencegahan penyakit tidak menular. Hal ini menunjukkan masyarakat semakin tidak hidup dengan baik adanya banyak jenis makanan yang beredar perlu diuji kesehatannya dan dampak ke depannya.

Saat ini belum ada puskesmas di Kabupaten Purworejo yang sudah mencapai indeks SPM Hipertensi dan DM >80% dan sudah menerapkan perbup KTR. Angka populasi bebas penyakit tidak menular (PTM) di Kabupaten Purworejo masih pada angka 0%. Semakin banyak puskesmas melakukan pelayanan sesuai target maka angka populasi bebas penyakit tidak menular (PTM) akan semakin tinggi atau semakin baik.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa menghadapi hambatan finansial. Salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan program ini adalah persentase cakupan kepesertaan, yaitu indikator yang menggambarkan sejauh mana penduduk telah terdaftar dalam sistem jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Hal ini menjadi cerminan dari kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap pentingnya perlindungan kesehatan serta efektivitas mekanisme pembiayaan jaminan sosial.

Tabel 2. 44 Cakupan Kepesertaan dan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	77,98	83,18	87,27	95,85	98,31
2	Cakupan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	NA	NA	NA	73,54	73,65

Sumber: Dinas Keseharan Kabupaten Purworejo, 2024

Selama periode 2020–2024, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, cakupan kepesertaan tercatat sebesar 77,98%, dan meningkat menjadi 98,31% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses jaminan kesehatan, terutama melalui integrasi penduduk miskin dan tidak mampu ke dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), baik yang didanai oleh APBN maupun APBD.

Meskipun telah mendekati target *Universal Health Coverage*, tantangan masih dihadapi dalam menjangkau kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal dan belum terdaftar sebagai peserta JKN. Selain itu, upaya untuk menjaga validitas data kepesertaan dan memastikan keaktifan peserta dalam membayar iuran juga menjadi perhatian utama dalam menjaga keberlanjutan program. Data menunjukkan meski pada tahun 2023 dan 2024 cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Purworejo mencapai lebih dari 95%, akan tetapi keaktifan peserta jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Purworejo hanya pada kisaran 73%. Hal ini berarti 23% peserta jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Purworejo memiliki status peserta yang tidak aktif. Perlu adanya sinergi lintas sektor dan upaya sosialisasi yang masif untuk memastikan seluruh penduduk tidak hanya terdaftar, tetapi juga terlindungi secara aktif dalam sistem jaminan kesehatan nasional.

Sarana Kesehatan yang mendukung pencapaian indikator bidang kesehatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 45 Sarana dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
	SARANA KESEHATAN	
1	Rumah Sakit	12
2	Puskesmas	27
3	Puskesmas Pembantu	64
4	Poliklinik	29
5	Posyandu	1.644
6	Praktik Bidan	64
7	Apotek	106
	TENAGA KESEHATAN	
1	Dokter	338
2	Perawat	1.289
3	Bidan	791
4	Farmasi	244
5	Ahli Gizi	78

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2024

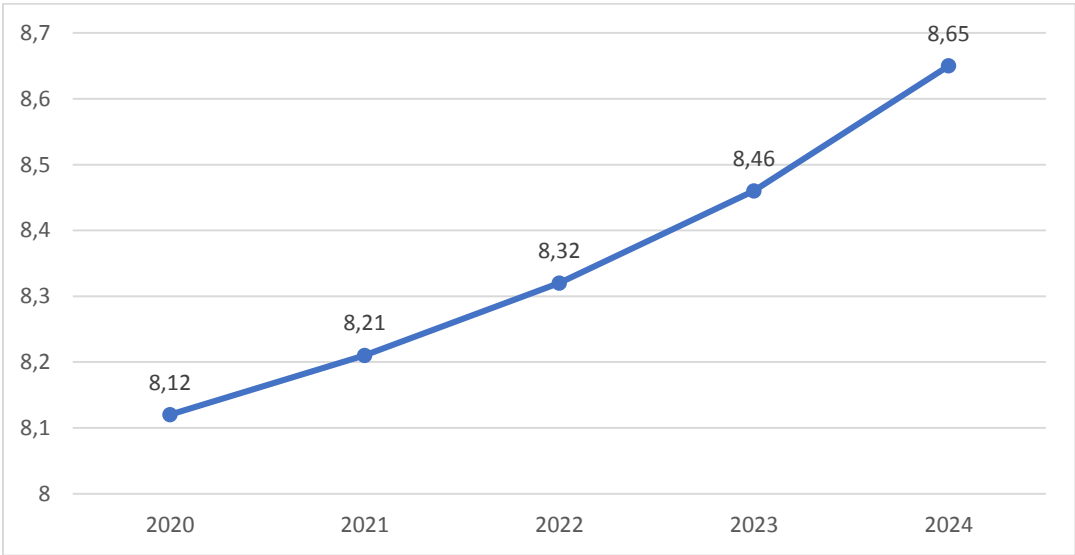
Akreditasi Paripurna adalah pengakuan tertinggi yang diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien yang ditetapkan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 sudah mencapai 69% dan meningkat menjadi 79% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan di Kabupaten Purworejo sudah semakin baik sesuai dengan standar.

Ketersediaan fasilitas kesehatan ini merupakan fondasi penting dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, meskipun keberadaan fasilitas ini sudah tersedia, masih ada kebutuhan untuk peningkatan baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Fasilitas-fasilitas ini perlu terus diperbarui dan ditingkatkan untuk memastikan berbagai kebutuhan kesehatan masyarakat secara efektif dan efisien.

Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi tahun 2024 masih di kisaran angka 3 per 1.000 penduduk. Keberadaan tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih sangat krusial untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Meskipun demikian, masih terdapat kebutuhan untuk peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan. Peningkatan ini bisa melalui program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta penyediaan insentif yang memadai untuk menarik dan mempertahankan tenaga kesehatan di daerah tersebut.

c. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu ukuran capaian pada bidang pendidikan yang menggambarkan capaian pendidikan jangka panjang. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk laki-laki dan perempuan usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.



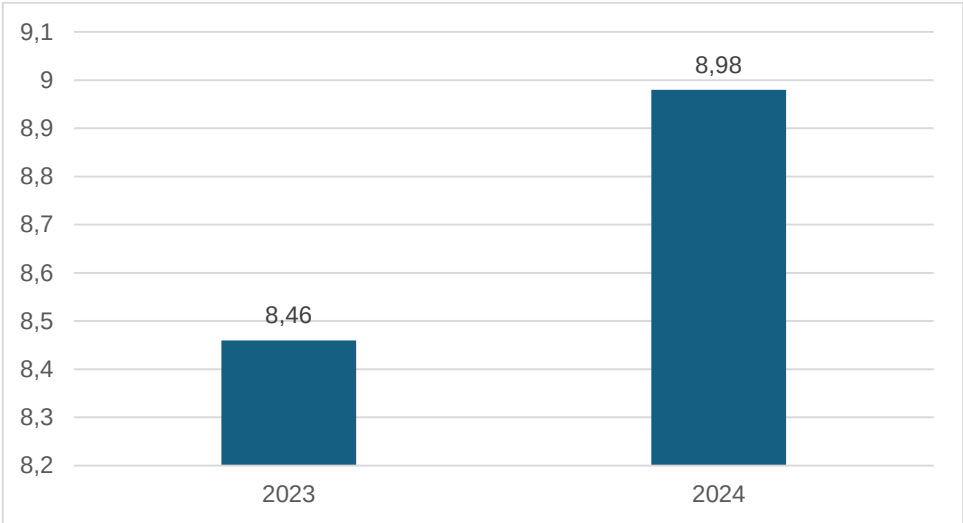
Gambar 2. 44 Grafik Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari tahun 2020 senilai 8,12 tahun menjadi 8,65 tahun pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Purworejo berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas

VIII SMP/Sederajat. Melalui perhitungan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih awal terkait akses pendidikan di Kabupaten Purworejo.

Selain pada penduduk berusia 25 tahun ke atas, perhitungan rata-rata lama sekolah juga dilakukan pada penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Purworejo. Berikut merupakan grafik rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Purworejo tahun 2023-2024.

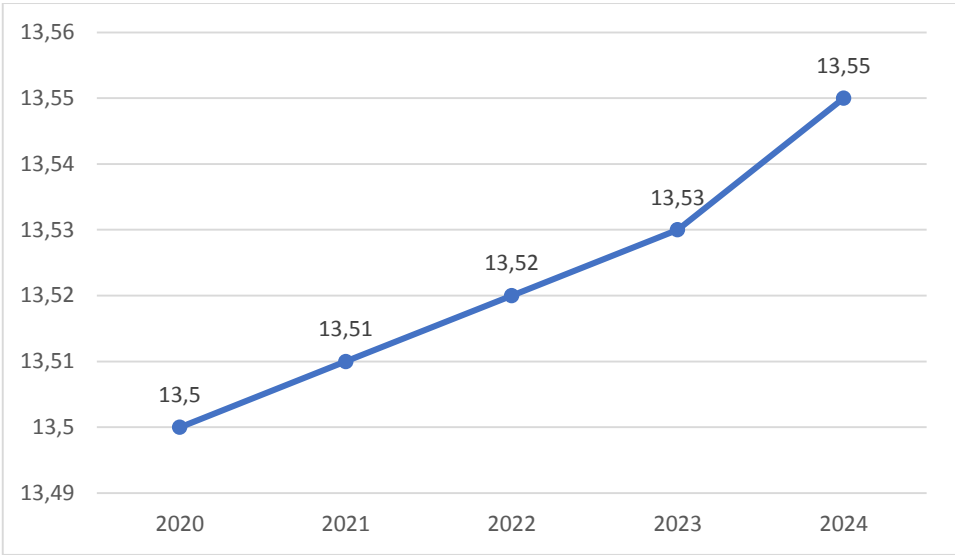


Gambar 2. 45 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2024

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa nilai Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan pada tahun 2023 ke tahun 2024, yakni dari 8,46 menjadi 8,98. Hal ini menandakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan semakin mudahnya akses pendidikan yang dijangkau masyarakat. Selain itu, apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata lama sekolah reguler, nilai rata-rata lama sekolah pada penduduk usia 15 tahun ke atas hanya mengalami selisih yang tidak signifikan dengan nilai rata-rata lama sekolah reguler. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada kesenjangan akses pendidikan antara generasi muda yang sedang mengenyam pendidikan maupun dengan kelompok penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Purworejo.

Harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang serta menjadi gambaran tentang keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Purworejo. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Purworejo menunjukkan angka peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan yang cenderung stabil hingga tahun 2024. Pada tahun 2024, harapan lama sekolah di Kabupaten Purworejo yaitu 13,55 tahun yang berarti diharapkan penduduk Kabupaten Purworejo dapat menyelesaikan pendidikan SMA dan melanjutkan hingga pendidikan tinggi.



Gambar 2. 46 Grafik Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui ketercapaian pendidikan berkualitas yang merata yaitu proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi.

Tabel 2. 46 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi	43.310	39.664	36.398	45.697	58.240
2	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas	563.729	449.265	569.383	628.615	634.845
3	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	7,68%	8,83%	6,39%	7,27%	9,17%

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2025

Pada tahun 2020-2024 di Kabupaten Purworejo, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi mengalami fluktuasi dari semula 7,68% di tahun 2020 lalu menurun menjadi 6,39% di tahun 2022 dan kembali meningkat secara konsisten hingga mencapai 9,17% di tahun 2024. Penurunan proporsi di tahun 2022 dapat dipengaruhi oleh pandemi covid yang menyebabkan gangguan proses pendidikan dan belum pulihnya layanan pendidikan tinggi terakreditasi. Namun, pada tahun 2023 hingga 2024 telah terjadi pemulihan yang ditandai dengan kenaikan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi. Tren tersebut menunjukkan arah positif menuju pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu. Untuk mengetahui seberapa banyak

penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu.

Tabel 2. 47 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Purworejo Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	79,35	80,89	82,23	82,41	85,50
2.	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	90,38	90,51	90,98	91,38	92,08
3.	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	81,78	82,25	83,05	96,64	97,70
4.	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun (Kesetaraan)	-	-	3,72	10,86	16,65

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Rapor Pendidikan Kemendikdasmen, 2024

Persentase partisipasi sekolah usia 7-12 tahun pada pendidikan dasar cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan usia 5-6 tahun dalam PAUD dan partisipasi anak usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama. Hal ini dipengaruhi oleh regulasi masuk SD yang tidak mewajibkan anak harus melalui PAUD terlebih dahulu sehingga tidak optimal. Selain itu mutasi siswa keluar daerah, anak berkebutuhan khusus dan anak yang belajar di pondok non formal yang tidak menjalani pendidikan sesuai standar sehingga tidak terdaftar dalam dapodik.

Secara umum, Angka Partisipasi Sekolah kelompok umur 7-12 tahun relatif baik yaitu mendekati 100% artinya hampir seluruh anak berusia 7-12 tahun bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah kelompok umur 5-6 tahun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menandakan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Kabupaten Purworejo akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Akan tetapi Angka Partisipasi Sekolah kelompok 13-15 tahun mengalami penurunan yang signifikan terutama di tahun 2024 yakni hanya 85,83 persen. Hal ini menandakan masih adanya anak usia SMP/ sederajat yang tidak bersekolah. Sedangkan Angka Partisipasi Sekolah untuk kelompok umur 7-18 tahun (Kesetaraan) meningkat namun relatif masih sangat rendah. Hal ini menandakan masih rendahnya partisipasi masyarakat yang mengalami Putus Sekolah untuk mengenyam pendidikan kesetaraan (kejar paket).

Literasi dan Numerasi merupakan kompetensi atau kemampuan yang sifatnya general dan mendasar. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami informasi. Ini tidak hanya terbatas pada keterampilan dasar membaca dan menulis, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap teks, kemampuan menganalisis informasi, serta keterampilan berpikir kritis untuk mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif. Literasi tidak hanya terkait dengan kata-kata tertulis, tetapi juga mencakup literasi numerik atau numerisasi. Numerisasi adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan dan berinteraksi dengan angka, serta menerapkan konsep-konsep matematika dalam berbagai situasi. Kemampuan ini melibatkan pemahaman terhadap

bilangan, operasi matematika dasar, dan keterampilan dalam menggunakan angka dalam konteks sehari-hari maupun profesional.

Indeks Literasi/Numerisasi digunakan untuk mengukur atau menilai tingkat pemahaman, pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, memahami informasi yang kompleks, serta memahami, menggunakan, dan bekerja dengan angka. Indeks Literasi/Numerisasi Kabupaten Purworejo dihitung pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tabel 2. 48 Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2024

No	Indikator Asesmen Tingkat Nasional	Nilai			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	Literasi Membaca SD/Sederajat	1,92	59,46	65,62	69.49
2	Literasi Membaca SMP/Sederajat	1,96	68,39	79,18	81.51
3	Numerisasi SD/Sederajat	1,78	47,84	49,14	57.57
4	Numerisasi SMP/Sederajat	1,70	57,67	68,76	69.91

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud, 2025

Berdasarkan data di atas nilai literasi dan numerisasi pada semua jenjang mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke 2024. Dari rapor pendidikan pada jenjang SD dan SMP, kemampuan literasi membaca lebih tinggi dari kemampuan numerasi. Dalam memaksimalkan kemampuan literasi membaca dan numerasi siswa di Kabupaten Purworejo masih diperlukan pemetaan dan distribusi SDM pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan, konten pembelajaran yang berkualitas, refleksi dan perbaikan pembelajaran, optimalisasi implementasi program guru penggerak, serta penyediaan bahan bacaan.

Penguatan nilai-nilai budaya lokal di dunia pendidikan menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan jati diri bangsa. Salah satu bentuk nyata dari upaya ini adalah penyelenggaraan mata pelajaran muatan lokal (mulok) seperti bahasa daerah dan seni budaya di satuan pendidikan. Keberadaan guru yang mengajar mulok tidak hanya mendukung pelestarian warisan budaya, tetapi juga memperkuat pendidikan karakter peserta didik agar lebih mencintai dan menghargai kebudayaan daerahnya. Indikator persentase satuan pendidikan yang memiliki guru pengampu mulok bahasa daerah dan seni budaya mencerminkan sejauh mana sekolah telah mengintegrasikan aspek kebudayaan dalam kurikulumnya. Indikator ini juga menjadi ukuran terhadap komitmen daerah dalam mengarusutamakan kebudayaan melalui jalur pendidikan formal.

Tabel 2. 49 Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	23,57%	23,57%	24,22%	24,05%	24,13%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan di Kabupaten Purworejo pada Tahun 2020 – 2024 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2020 sekitar 23,57% dan meningkat menjadi 24,13%. Meskipun meningkat, persentasenya masih relatif rendah. Ketersediaan guru yang mampu mengajarkan muatan lokal masih menjadi tantangan. Beberapa sekolah masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan bahan ajar yang kontekstual dengan budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk pelatihan guru, penyediaan media pembelajaran berbasis kearifan lokal, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah agar pendidikan kebudayaan dapat berjalan lebih optimal. Dengan semakin banyaknya sekolah yang memiliki guru pengampu mulok kebudayaan, Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya dalam melestarikan budaya lokal sekaligus membentuk generasi muda yang memiliki rasa bangga dan kepedulian terhadap nilai-nilai budaya daerahnya sendiri.

Ketersediaan sarana prasarana sesuai standar serta tenaga pendidik dan kependidikan merupakan hal penting dalam penyediaan akses pendidikan. Berikut data ketersediaan satuan pendidikan dan guru di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 50 Kinerja Program Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2023	2023	2024
1	2	4	5	6	7	7
a.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1.	Jumlah PAUD yang terakreditasi minimal B	320	320	320	411	559
2.	Jumlah semua PAUD	813	802	800	814	802
3.	Jumlah murid PAUD	19.014	18.670	19.099	19.360	19.239
4.	Jumlah guru PAUD	1.337	1.348	2.051	2.156	1.393
b.	Sekolah Dasar (SD)					
1.	Jumlah SD yang terakreditasi minimal B	518	513	480	475	475
2.	Jumlah semua SD	525	522	489	489	489
3.	Jumlah murid SD	61.164	60.516	58.913	57.731	63.808
4.	Jumlah guru SD	4.026	3.826	3.798	4.670	4.597
c.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
1.	Jumlah SMP yang terakreditasi minimal B	80	80	76	77	78
2.	Jumlah semua SMP	90	90	88	90	89
3.	Jumlah murid SMP	25.572	26.762	66,51	27.064	34.760
4.	Jumlah guru SMP	1.700	1.829	3.798	1.832	1.981
d.	Sekolah Kesetaraan/NonFormal					
1.	Jumlah pendidikan nonformal/ kesetaraan yang terakreditasi minimal B	7	7	8	8	7
2.	Jumlah semua pendidikan nonformal/ kesetaraan	10	10	10	10	10
3.	Jumlah murid kesetaraan	1.171	1.171	1.171	1.424	1.169
4.	Jumlah guru kesetaraan	43	43	43	57	102

Sumber: Dindikbud Kabupaten Purworejo, 2024

Pada tahun 2024 terdapat 489 satuan pendidikan sekolah dasar yang terdiri dari 462 Sekolah Negeri dan 27 Sekolah Swasta. Setiap tahunnya kuota SD pada penerimaan siswa baru tidak pernah 100% terpenuhi. Hal ini

menunjukkan bahwa jumlah sekolah dasar di Kabupaten Purworejo sudah lebih dari kebutuhan atau jumlah calon siswa. Banyaknya jumlah sekolah dasar mempengaruhi jumlah kebutuhan guru dan kebutuhan rehabilitasi sekolah. Ketersediaan guru pada jenjang sekolah dasar apabila dibandingkan dengan jumlah murid sudah mencukupi kebutuhan, namun apabila dibandingkan dengan jumlah satuan pendidikan atau rombongan belajar masih mengalami kekurangan. Kebijakan regrouping masih menjadi polemik di masyarakat. Kondisi bangunan sekolah masih banyak yang sudah tidak layak beserta sarana prasarana dan mebel. Selain itu, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masih banyak yang belum mempunyai sertifikat pendidik.

Berdasarkan jumlah SMP Negeri di kabupaten Purworejo masih terdapat SMP yang kuota tidak terpenuhi. Hal tersebut disebabkan karena jumlah lulusan SD di sekitar SMP dimaksud memang sangat sedikit. Namun juga terdapat SMP dengan pendaftar melebihi kuota. Secara umum kondisi Gedung/bangunan serta sarana dan prasarana SMP masih lebih baik jika dibandingkan dengan SD. Demikian juga kondisi atau kelengkapan sarana prasarana. Namun demikian kondisi yang ada saat ini perlu untuk ditingkatkan secara kualitas maupun kuantitasnya. Dari segi Pendidk dan Tenaga Kependidikan, jumlah guru pada beberapa mata pelajaran ada yang lebih ada yang kurang. Namun secara keseluruhan jumlah tersebut masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah jam pelajaran ideal. Mayoritas guru sudah bersertifikat. Rasio guru penggerak saat ini juga sangat kecil.

Sementara untuk pendidikan non formal, jumlah PKBM masih terbatas dan belum merata di semua kecamatan sehingga belum semua kecamatan dapat terlayani pendidikan nonformal/kesetaraan. Sebagaimana diketahui di Kabupaten Purworejo, jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) baik anak yang tidak melanjutkan, anak putus sekolah, maupun anak yang tidak pernah sekolah masih tinggi.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan kajian yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat. Terdapat 7 unsur IPLM, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan memiliki Standar Nasional Perpustakaan (SNP), keterlibatan masyarakat kegiatan sosialisasi/promosi, dan anggota perpustakaan (Perpusnas, 2023). IPLM Kabupaten Purworejo tahun 2022 adalah 56,98 kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 78,43. Berikut merupakan indikator indeks pembangunan literasi masyarakat tahun 2022-2024.

Tabel 2. 51 Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024

No	Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai		
		2022	2023	2024
1	2	3	4	5
	INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT	56,98	78,43	78,32
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,0032	1,0000	0,5367
2	Ketercukupan Koleksi	1,5074	0,2626	0,4663
3	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	0,0046	1,0000	0,6280

No	Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai		
		2022	2023	2024
1	2	3	4	5
4	Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	0,3767	0,0298	0,8514
5	Perpustakaan ber-SNP	1,6128	0,2275	1,000
6	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan	0,0333	1,0000	1,000
7	Anggota Perpustakaan	0,4503	1,0000	1,000

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data di atas, pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan nilainya menurun. Sementara tingkat kunjungan perpustakaan ke perpustakaan meningkat. Dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan minat baca masyarakat diperlukan upaya untuk menambah jumlah bahan pustaka baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan yaitu kurangnya promosi dan sosialisasi akan program-program perpustakaan, beberapa kecamatan mempunyai jarak yang cukup jauh dari perpustakaan, minimnya SDM untuk layanan perpustakaan keliling, dan koleksi ebook belum update sejak tahun 2019.

Tingkat pemanfaatan perpustakaan dihitung dengan banyaknya pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari di tahun tersebut dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama. Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan berasal dari kunjungan harian perpustakaan (onsite dan online) dan kunjungan pemustaka yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan. Perpustakaan yang dimaksud dengan perpustakaan adalah perpustakaan kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Perguruan Tinggi dan Khusus. Tingkat pemanfaatan perpustakaan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2. 52 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	8.804	4.751	18.606	33.428	56.401

Sumber: Dinpusip Kabupaten Purworejo, 2025

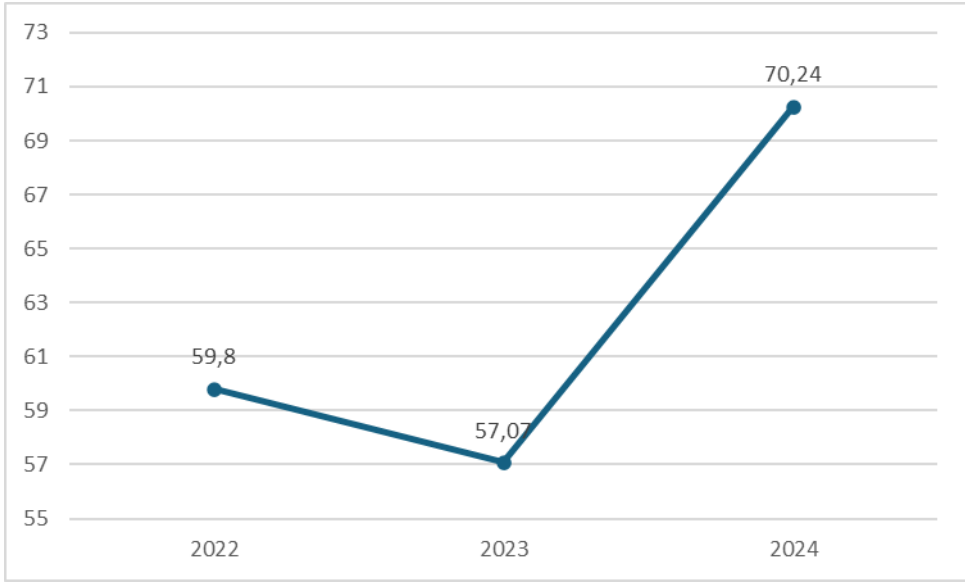
Jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan terutama pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 layanan keliling ke Sekolah terhambat dan baru dimulai lagi bulan November 2021 dikarenakan adanya penerapan kebijakan PPKM. Namun jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2022 kembali meningkat sebesar 6,67% sampai pada tahun 2023 menjadi 11,23%.

Pada tahun 2024, jumlah pengunjung perpustakaan semakin meningkat, Hal ini didorong oleh bangunan perpustakaan daerah Kabupaten Purworejo yang baru dan representatif dengan sarana prasarana yang memadai sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung. Selain itu, adanya inovasi safari perpustakaan ke desa prioritas penanganan kemiskinan. Aktivitas ini menambah wawasan dan pengetahuan terkait keberadaan

perpustakaan dan pemanfaatan perpustakaan terkait layanan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat menuju kesejahteraan.

Dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan minat baca masyarakat diperlukan upaya untuk menambah jumlah bahan pustaka baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan yaitu kurangnya promosi dan sosialisasi akan program-program perpustakaan, beberapa kecamatan mempunyai jarak yang cukup jauh dari perpustakaan, minimnya SDM untuk layanan perpustakaan keliling, dan koleksi *e-book* belum *update* sejak tahun 2019.

Tingkat gemar membaca merupakan indikator penting dalam menilai minat literasi masyarakat dan menjadi fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Indikator ini mencerminkan seberapa besar ketertarikan masyarakat terhadap kegiatan membaca, baik melalui media cetak maupun digital, serta mencerminkan keberhasilan program literasi yang dijalankan di suatu wilayah. Budaya membaca yang tinggi erat kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan, produktivitas, dan kemampuan berpikir kritis masyarakat.



Gambar 2. 47 Grafik Tingkat Gemar Membaca Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Tingkat gemar membaca Kabupaten Purworejo menunjukkan tren positif dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 nilai tingkat gemar membaca Kabupaten Purworejo tercatat sebesar 59,80 dan mengalami peningkatan hingga mencapai 70,24 pada tahun 2024, meskipun sempat mengalami penurunan menjadi 57,07 pada tahun 2023. Capaian ini sejalan dengan berbagai upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem literasi, seperti penyediaan taman bacaan masyarakat, penguatan peran perpustakaan desa, dan penyelenggaraan program literasi digital di sekolah-sekolah.

Meskipun terjadi peningkatan, tantangan masih ada, terutama dalam menjangkau kelompok usia produktif dan masyarakat di wilayah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan strategi literasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan kebiasaan membaca dapat tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Informasi lebih rinci

tentang perkembangan tingkat gemar membaca dapat dilihat pada grafik berikut.

Perpustakaan memiliki peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program literasi di Kabupaten Purworejo. Semakin banyak jumlah perpustakaan, maka diharapkan minat membaca masyarakat dapat terakomodasi dan juga meningkat.

Tabel 2. 53 Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah perpustakaan yang terakreditasi	17	17	27	39	52
2	Jumlah semua jenis perpustakaan yang menjadi tanggungjawab perpustakaan Kabupaten	701	701	701	701	701
3	Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi (%)	2,43%	2,43%	3,85%	5,56%	7,42%

Sumber: Dinpusip Kabupaten Purworejo, 2025

Persentase perpustakaan yang terakreditasi di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Hal ini didukung oleh komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam membina perpustakaan dan mendukung sampai mengajukan dalam proses akreditasi.

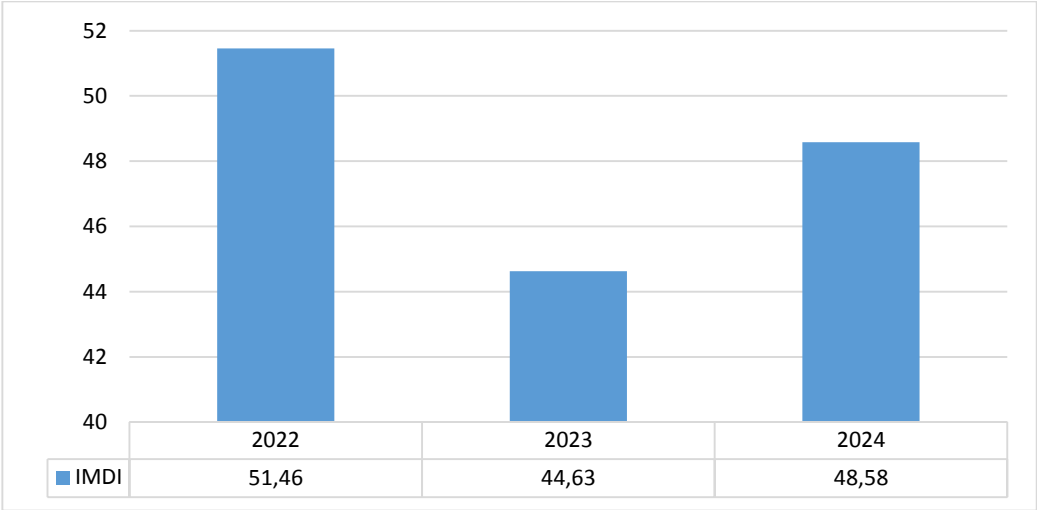
Saat ini masih ada perpustakaan, baik di sekolah maupun di instansi dan masyarakat yang belum memiliki tenaga khusus perpustakaan. Petugas yang melayani pemustaka juga merangkap tugas lain sebagai tugas utamanya. Semakin majunya teknologi informasi dan adanya keterbatasan tenaga khusus perpustakaan mendorong perlunya ketersediaan dan pengolahan data perpustakaan berbasis digital yang memudahkan pemustaka untuk mendapatkan informasi secara mandiri.

Indeks Masyarakat Digital merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Masyarakat digital sendiri diartikan sebagai sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (*paperless*) menjadi suatu hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, dimana kehidupannya sangat bergantung pada TIK, mulai dari penciptaan, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya. Terdapat empat pilar utama pembentuk Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan, Pemberdayaan, serta Pekerjaan.

Nilai Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten Purworejo pada tahun 2022-2024 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2022 nilai IMD Kabupaten Purworejo sebesar 51,46 dan masuk dalam kategori tinggi, namun pada tahun 2023 nilainya turun cukup signifikan menjadi 44,63 yang masuk dalam kategori cukup. Pada tahun 2024, nilai IMD Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan menjadi 48,58 dan masuk dalam kategori tinggi.

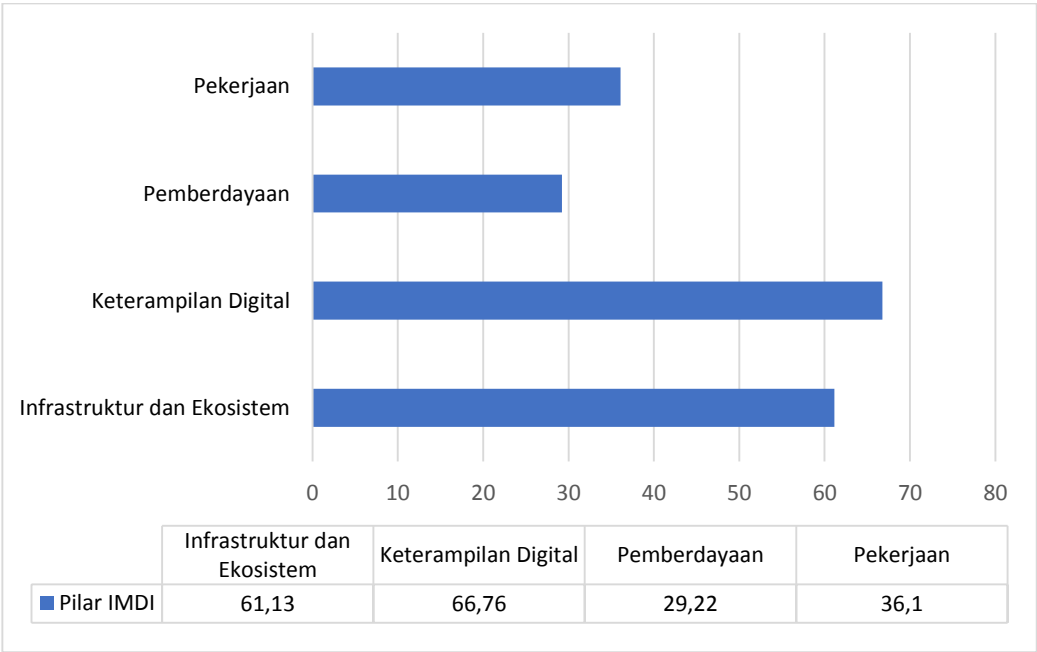
Jika melihat pada masing-masing nilai pilar pembentuk IMD, pada tahun 2024 nilai pilar keterampilan digital memiliki nilai tertinggi

dibandingkan dengan nilai pilar yang lain, yakni sebesar 66,76. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari masyarakat Kabupaten Purworejo telah memiliki keterampilan digital atau memiliki penguasaan teknologi yang baik. Kemudian terdapat pilar infrastruktur dan ekosistem dengan nilai 61,13. Selanjutnya pilar pekerjaan dengan nilai 36,10. Nilai pilar IMD terendah terdapat pada pilar pemberdayaan, yakni sebesar 29,22. Ini artinya teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik dalam kegiatan masyarakat. Sehingga meskipun masyarakat Kabupaten Purworejo memiliki keterampilan digital yang baik, masyarakat belum mampu memanfaatkannya dalam kegiatan sehari-hari.



Gambar 2. 48 Grafik Nilai Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2025

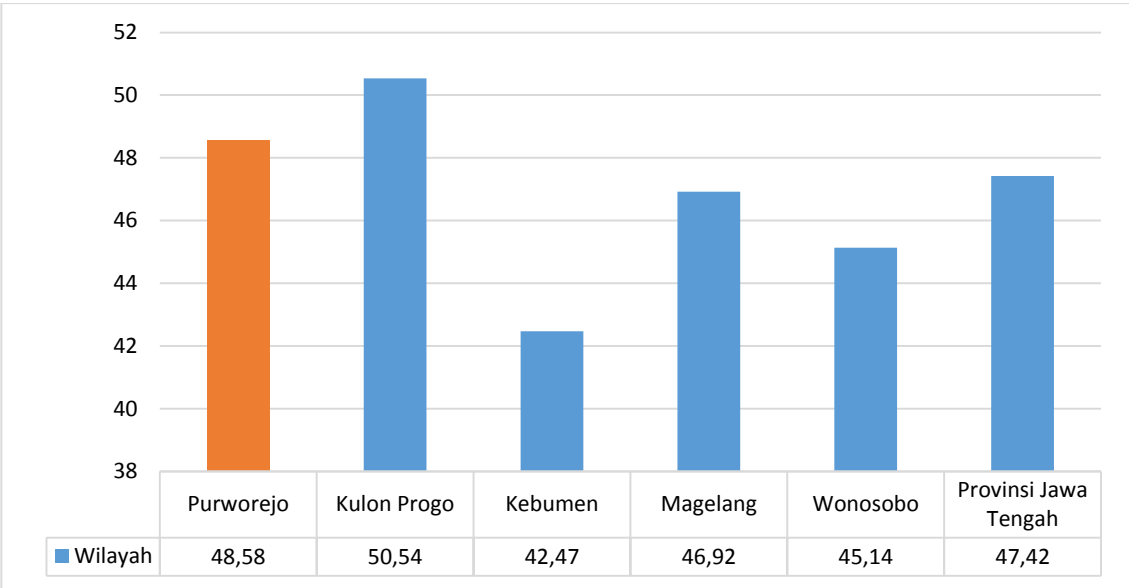


Gambar 2. 49 Grafik Nilai Pilar Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2025

Apabila dibandingkan dengan wilayah lain yang berdekatan dengan Kabupaten Purworejo, seperti Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Wonosobo, nilai IMD Kabupaten

Purworejo cenderung tinggi. Nilai IMD Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 sebesar 48,58 lebih tinggi dari Kabupaten Kebumen (42,47), Kabupaten Magelang (46,92), dan Kabupaten Wonosobo (45,14). Namun nilai tersebut masih dibawah nilai IMD Kabupaten Kulon Progo yang mencapai 50,54. Jika dibandingkan lagi dengan nilai IMD Provinsi Jawa Tengah, nilai IMD Kabupaten Purworejo lebih tinggi daripada nilai IMD Provinsi Jawa Tengah (47,42). Secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa nilai IMD Kabupaten Purworejo lebih tinggi daripada nilai rata-rata IMD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2. 50 Grafik indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2024
Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2025

d. Perlindungan Sosial yang Adaptif

1) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. Berikut data *coverage* perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang didapatkan dari BPS Ketenagakerjaan.

Tabel 2. 54 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan	101.278	110.331	120.794	103.501*
2	Jumlah semesta penduduk bekerja	251.559	256.382	262.887	326.612*
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	40,26%	43,03%	45,95%	31,69%*

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2024

*Keterangan : *: data sementara*

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan BPJS tenaga kerja semakin baik dari tahun 2022 hingga tahun 2024, namun

terjadi penurunan pada tahun 2025 hingga triwulan II, hal ini disebabkan oleh berkurangnya kepesertaan aktif yang sebelumnya adalah petugas pemilu pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 juga terjadi lonjakan potensi semesta karena terjadi peningkatan angkatan kerja. Semakin tinggi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak. Namun jika dilihat dari total tenaga kerja yang ada di Kabupaten Purworejo, persentase tenaga kerja yang tidak memiliki jaminan sosial masih banyak. Hal ini dikarenakan adanya ketidakmampuan pekerja sektor informal untuk membayar premi jaminan ketenagakerjaan. Selain itu, ketidaktahuan pekerja dan pemberi kerja pada baik pada sektor formal maupun informal akan manfaat program juga menjadi salah satu kendala dalam pencapaian indikator ini.

2) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Tabel 2. 55 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Anak Balita Terlantar (ABT)	176	279	113	71	15
Anak Terlantar (AT)	170	107	83	53	5
Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)	55	89	38	25	7
Anak Jalanan	26	20	19	15	6
Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	410	840	667	639	458
Anak dengan Disabilitas Fisik	280	606	235	200	144
a.1. Tubuh (Tuna Daksa)	147	352			
a.2. Mata (Tuna Netra)	57	155			
a.3. Rungu/Wicara (Bisu Tuli)	76	99			
Disabilitas Sensorik			109	106	75
Disabilitas Mental	94	162	223	229	158
b.1. Mental Retardasi (Tuna Grahita)	85	141			
b.2. Mental Eks Psikotik (Tuna Laras)	9	21			
Disabilitas Mental dan Fisik	36	72	100	104	81
Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	11	8	7	4	3
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	11	8	18	8	4
Lanjut Usia Terlantar	3	9	2.079	1.466	152
Penyandang Disabilitas	6.403	7.435	6.547	6.434	6.305
Penyandang Disabilitas Fisik	5.057	5.365	2.437	2.385	2.122
a.1. Tubuh (Tuna Daksa)	2.491	2.674			
a.2. Mata (Tuna Netra)	1.651	1.688			
a.3. Rungu/Wicara (Bisu Tuli)	915	1.003			
Penyandang Disabilitas Sensorik			1.232	1.129	1.133
Disabilitas Mental	1.027	1.738	2.410	2.485	2.592
b.1. Mental Retardasi (Tuna Grahita)	674	903			

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
b.2. Mental Eks Psikotik (Tuna Laras)	353	835			
Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	319	332	468	435	458
Tuna Susila (TS)	131	79	80	63	50
Gelandangan	42	35	35	35	21
Pengemis	76	58	57	49	36
Pemulung	80	101	102	105	87
Kelompok Minoritas/Waria	1	2	1	-	0
Waria	-	-	1	-	0
Gay	-	-	-	-	0
Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	357	255	230	195	1
Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	3	8	8	7	6
Korban Penyalahgunaan NAPZA	9	10	10	6	1
Korban Trafficking	1	2	2	1	1
Korban Tindak Kekerasan	23	18	15	3	1
Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	2	2	15	-	0
Korban Bencana Alam	3	20	20	18	0
Korban Bencana Sosial	2	2	2	2	2
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	959	965	906	664	308
Fakir Miskin	123.000	129.779	112.545	121.993	117.594
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	30	36	40	28	8
Komunitas adat Terpencil	-	-	-	-	0
JUMLAH	131.984	140.167	123.626	131.884	125.151

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di atas, menunjukkan bahwa PPKS terbanyak di Kabupaten Purworejo tahun 2024 adalah keluarga fakir miskin sebanyak 117.594 dan penyandang disabilitas sebanyak 6.305.

Tabel 2. 56 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah PPKS yang tertangani	83.436	84.436	88.676	131.884	121.151
2	Jumlah seluruh PPKS yang ada	83.436	84.436	88.676	131.884	121.151
3	Persentase PPKS yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kenaikan Jumlah PPKS	2,37%	1,18%	4,78%	32,76%	-8,14%*

Sumber: Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data capaian pada tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa jumlah PPKS dari tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan, khususnya peningkatan yang sangat besar terjadi di tahun 2023. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat PPKS menjadi tanggung jawab pemerintah dalam penanganannya. Sementara itu pada tahun 2024 jumlah PPKS menurun. Hal ini menjadi salahsatu tolok ukur bahwa kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Persentase PPKS yang tertangani telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% selama 5 tahun. Penanganan dan pemberdayaan PPKS yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dan target akhir yang

ditentukan dapat terlampaui. Penanganan dilakukan pada PPKS yang terdata dan adanya bantuan dari pemerintah pusat serta provinsi dalam intervensi PPKS di Kabupaten Purworejo. Namun penanganan tersebut ternyata tidak mengurangi jumlah PPKS di Kabupaten Purworejo.

Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam penanganan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purworejo, yaitu belum maksimalnya perlindungan sosial terhadap kelompok rentan. Perlindungan sosial yang belum optimal ini mencakup kurangnya akses PPKS untuk berpartisipasi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. Partisipasi yang rendah ini mengakibatkan terbatasnya peluang bagi PPKS untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi produktif. Kemudian, masih tingginya masyarakat yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mencerminkan kondisi hidup yang kurang memadai, yang berpotensi menghambat upaya peningkatan kesejahteraan mereka.

Belum optimalnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PPKS juga menjadi tantangan. Sumber daya yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan dukungan yang diperlukan oleh PPKS. Penanganan PPKS di Kabupaten Purworejo perlu diarahkan pada strategi yang bersifat *pro-job* dan *pro-growth*. Sementara program *pro-poor* seperti proteksi dan afirmasi lewat bantuan sosial serta jaminan sosial sangat relevan dan memberikan dampak positif, perlu dikedepankan program-program yang mendukung penciptaan lapangan kerja (*pro-job*), dan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) untuk membantu warga miskin menjadi mandiri.

e. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1) Indeks Religiusitas Daerah

Indeks Religiusitas Daerah disusun sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana kehidupan keagamaan masyarakat berjalan secara harmonis, mendalam, serta berdampak pada perilaku sosial sehari-hari. Indeks ini menggunakan lima dimensi utama, yaitu ideologis, ritualistik, intelektual, pengalaman, dan konsekuensial, yang dirumuskan dengan mengacu pada teori religiusitas serta disesuaikan dengan kondisi lokal Kabupaten Purworejo.

Dimensi Ideologis mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ajaran agama yang dianut. Dalam pengukuran, dimensi ini direpresentasikan melalui indikator persentase dukungan pemerintah terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap ajaran agama dan Jumlah penduduk yang percaya terhadap ajaran beragama. **Dimensi Ritualistik** menggambarkan frekuensi pelaksanaan ibadah dan ritual keagamaan masyarakat. Hal ini diukur melalui persentase terselenggaranya berbagai kegiatan keagamaan di Kabupaten Purworejo yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. **Dimensi Intelektual** menilai tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama. Indikator yang digunakan adalah persentase siswa yang mengikuti pendidikan agama, baik melalui jalur formal di sekolah maupun jalur nonformal seperti taman pendidikan alquran atau kegiatan keagamaan lainnya. **Dimensi Pengalaman** berkaitan dengan pengalaman spiritual masyarakat, termasuk kondisi

kejiwaan dan keterpaparan terhadap ajaran menyimpang. Indikator yang dipakai adalah persentase masyarakat yang terpapar aliran sesat atau radikalisme. **Dimensi Konsekunsial** mengukur dampak nyata agama dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga keharmonisan sosial. Indikator yang digunakan antara lain persentase konflik sosial berlatar agama yang terjadi dalam satu tahun dan mampu diselesaikan, persentase penduduk yang lahir dari pernikahan yang sah serta indeks zakat nasional.

Berdasarkan perhitungan, Indeks Religiusitas Kabupaten Purworejo Tahun 2024 menunjukkan nilai 71,25. Angka ini mencerminkan bahwa nilai-nilai keagamaan telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat dan memberikan pengaruh nyata terhadap pola pikir, sikap, serta perilaku sosial. Indeks ini sekaligus menjadi modal sosial penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan aspek sosial budaya dan peningkatan kerukunan masyarakat di Kabupaten Purworejo.

2) Pembangunan Kebudayaan Daerah

Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan merupakan cakupan Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang mendapatkan intervensi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan/atau pembinaan.

Tabel 2. 57 Data Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Objek Diduga CB	284	284	284	284	284
2	CB	20	43	55	65	81
3	Objek Diduga WBTB	2	3	3	3	5
4	WBTB	2	3	3	3	4
5	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	7,69%	16,03%	20,21%	23,69%	29,41%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang telah dimasukkan dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya (ODCB) Kabupaten Purworejo dari tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah 284. Jumlah tersebut tidak mengalami peningkatan dikarenakan tidak adanya penemuan baru. Sementara CB adalah ODCB yang telah dikaji dan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten oleh Bupati Purworejo. Jumlah CB yang ditetapkan dari tahun 2020-2024 selalu meningkat. Dalam penetapan cagar budaya diperlukan tenaga ahli bersertifikasi untuk menjadi tim ahli. Di Kabupaten Purworejo, jumlah tenaga ahli cagar budaya bersertifikasi masih sangat terbatas. Sementara Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Purworejo dari tahun 2020-2024 meningkat dari 2 menjadi 4. WBTB tersebut terdiri dari Tradisi Jolenan desa Somongari Kaligesing, Tari Dolalak, dan Tari Cing Po Ling.

Kendala yang dihadapi dalam pengusulan WBTB adalah sangat minimnya Naskah Akademik dari OD WBTB yang mengandung kajian dari aspek sejarah, fungsi, makna, dan narasumber. Upaya pendataan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya bendawi maupun non bendawi di

Kabupaten Purworejo masih rendah sehingga pelaksanaan pemajuan kebudayaan belum optimal. Hal ini menyebabkan pula pemajuan kebudayaan di Kabupaten Purworejo belum memberikan dukungan dalam pembangunan.

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya berguna untuk pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak lupa pada sejarah dan budaya bangsa.

Tabel 2. 58 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dikembangkan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah kebudayaan yang dikembangkan	7	7	7	8	7
2	Jumlah kebudayaan yang terdata	10	10	10	10	10
3	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan	70,00	70,00	70,00	80,00	70,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, 2025

Kebudayaan yang terdata di Kabupaten Purworejo terdiri dari:

- a) **Manuskrip**
Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, seperti serat, babad, kitab, dan catatan lokal lainnya. Contoh babad antara lain Babad Kedung Kebo, Babad Loano, Babad Diponegoro, Babad Banyuurip
- b) **Tradisi lisan**
Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, seperti sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya. Contoh cerita rakyat dari Kabupaten Purworejo.
- c) **Adat istiadat**
Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, Merti Desa, Jolenan, Grebeg Ingkung.
- d) **Ritus**
Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
- e) **Pengetahuan Tradisional**
Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan lintas generasi. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman lokal, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku

mengenai alam dan semesta. Contoh Batik Purworejo.

- f) Teknologi Tradisional
Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan dikembangkan secara terus menerus serta diwariskan lintas generasi. Contoh teknologi tradisional adalah Tosan Aji.
- g) Seni
Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni terdiri atas seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, dan seni media. Seni pertunjukan antara lain seni tari, seni teater atau seni musik. Contoh seni sastra yaitu lukisan, patung, atau keramik
- h) Bahasa
Bahasa adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Di Purworejo bahasa daerah yang dipakai adalah Jawa. Kegiatan seperti Panata Cara dengan Bahasa Jawa.
- i) Permainan Rakyat
Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menghibur diri. Contoh permainan rakyat antara lain permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor. Dilaksanakan pada acara Pameran Temporer Museum Tosan Aji Purworejo.
- j) Olahraga Tradisional
Olahraga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus, dan diwariskan lintas generasi. Contoh olahraga tradisional antara lain bela diri pencak silat.

Kabupaten Purworejo memiliki beberapa lokasi bersejarah, diantaranya Lingga Bulat Telur, Situs Goa Silawang, Situs Goa Silumbu, Situs Perigi, Gereja Kyai Sadrach, Memorial House WR. Soepratman, Situs Goa Gong, Gereja GPIB Purworejo, Masjid Al Iman Loano, Masjid Jatisalam, Museum Tosan Aji. Berikut merupakan data jumlah pengunjung lokasi bersejarah di Kabupaten Purworejo dari tahun 2020-2024.

Tabel 2. 59 Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

NO	Tempat Bersejarah	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Lingga Bulat Telur	175	127	160	146	150
2	Situs Goa Silawang	307	167	160	144	113
3	Situs Goa Silumbu	146	99	101	116	96
4	Situs Perigi	66	646	1.472	1.725	5.029
5	Gereja Kyai Sadrach	66	25	55	35	42

NO	Tempat Bersejarah	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
6	Memorial House WR. Soepratman	50	105	210	237	130
7	Situs Goa Gong	2.190	924	1.025	1.159	159
8	Gereja GPIB Purworejo	3.760	4.090	4.060	4.141	3.738
9	Masjid Al Iman Loano	156	976	845	878	723
10	Masjid Jatisalam	400	500	400	300	315
11	Museum Tosan Aji	2.221	952	6.118	48.957	18.061
	TOTAL Pengunjung	7.316	7.659	13.581	57.838	28.556

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, 2025

Berdasarkan data di atas, jumlah pengunjung tempat bersejarah di Kabupaten Purworejo selalu meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2023, kunjungan pada museum tosan aji melonjak karena adanya kerjasama dengan sekolah dan lembaga pendidikan. Adanya kerjasama dalam pemanfaatan tempat sejarah terutama museum tosan ajo melalui program pendidikan mampu meningkatkan kunjungan dari siswa sekolah guna menunjang muatan sejarah lokal di sekolah masing-masing.

Pemajuan kebudayaan diharapkan dapat mendorong pembangunan terutama dimensi ekonomi dalam hal ini melalui keaktifan kelompok kesenian dalam pertunjukan kesenian. Persentase kelompok kesenian yang aktif menggambarkan cakupan kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian. Pertunjukan atau festival kesenian dapat berskala internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan selama para pelaku seni tersebut memperoleh penghasilan/pendapatan/honor. Berikut merupakan data jumlah kelompok kesenian yang ber-SKT dan Kesenian Aktif di Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024.

Tabel 2. 60 Jumlah Kelompok Kesenian yang Ber-SKT dan Kesenian Aktif di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

NO	Kelompok Kesenian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Kelompok Kesenian ber-SKT	394	457	597	604	689
2	Jumlah Kelompok Kesenian yang Aktif	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
3	Persentase kelompok kesenian yang aktif	30,08%	34,89%	45,57%	46,11%	52,60%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah kelompok kesenian yang ber-SKT atau memilik Surat Keterangan Terintegrasi dari tahun 2020 sampai dengan 2024 selalu meningkat. Begitu juga untuk kelompok kesenian yang aktif juga selalu meningkat. Kelompok kesenian yang aktif adalah kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian. Pertunjukan atau festival dapat berskala internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan selama pelaku seni tersebut memperoleh penghasilan/pendapatan/honor.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kebudayaan di Kabupaten Purworejo dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya pada kehidupan sosial cukup baik.

Kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan masih perlu ditingkatkan. Upaya pelindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan terkait Objek Pemajuan Kebudayaan, termasuk Seni, merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Diperlukan adanya peran dan sinergi seluruh pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di bidang kebudayaan.

Perlindungan aset budaya juga dapat terwujud dengan menyediakan museum yang dikelola secara representatif. Pada Kabupaten Purworejo terdapat Museum Tosan Aji yang berfungsi yang telah dikelola dengan baik dan menjadi salah satu tujuan wisata budaya dan sejarah di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2. 61 Jumlah Pengunjung Museum Tosan Aji Tahun 2020-2024

NO	Kelompok Kesenian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah pengunjung museum	2.221	952	11.920	48.921	18.061
2	Jumlah pengunjung museum tahun n-1	3.841	2.221	951	11.920	48.921

Sumber: Dindikbud Kabupaten Purworejo, 2025

f. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1) Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks pembangunan keluarga atau iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia, serta untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang, atau rentan. Peningkatan kualitas keluarga dapat menumbuhkan rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Peningkatan kualitas keluarga menjadi salah satu syarat yang harus diwujudkan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Keluarga merupakan unit sosial terkecil di masyarakat mempunyai peran pertama dan utama dalam menentukan kualitas hidup setiap anggota keluarga. Berikut angka iBangga Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024.

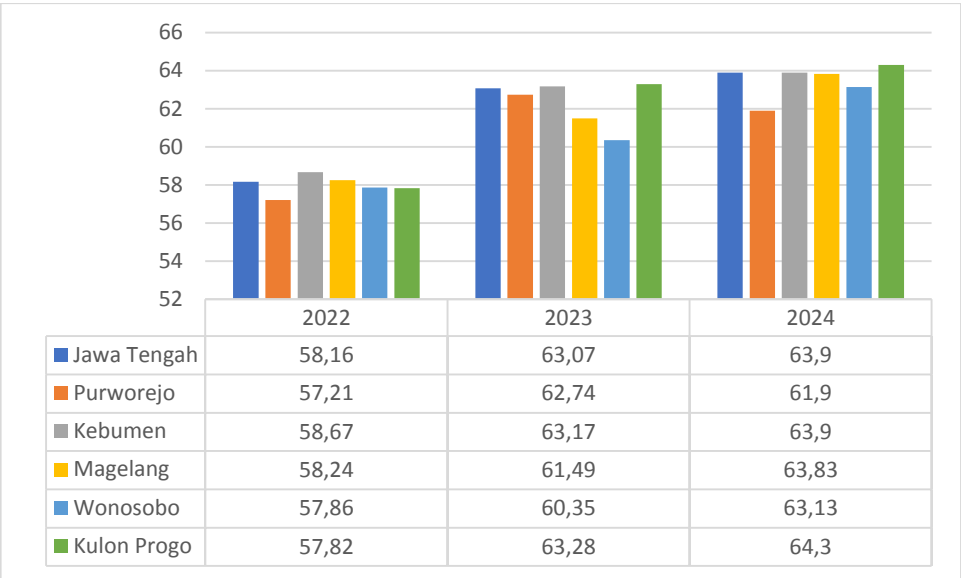
Tabel 2.62 Angka iBangga Kabupaten Purworejo beserta Dimensinya Tahun 2022-2024

No	Dimensi	Tahun		
		2022	2023	2024
1	2	3	4	5
1	Dimensi Ketenteraman	60,54	60,88	62,65
2	Dimensi Kemandirian	54,20	55,65	53,05
3	Dimensi Kebahagiaan	56,90	71,70	69,98
4	iBangga	57,21	62,74	61,90

Sumber : BKKBN, (2025)

Data di atas menunjukkan bahwa angka iBangga Kabupaten Purworejo tahun 2024 meningkat dari tahun 2022. Selain itu angka tersebut juga sudah mencapai target nasional yaitu 57. Di antara ketiga dimensi tersebut, dimensi kemandirian mempunyai angka terendah dan belum maksimal. Hal ini

menunjukkan bahwa kondisi keluarga di Kabupaten Purworejo masih kurang mandiri dilihat dari kepemilikan penghasilan, makan beragam, rumah layak huni, kepemilikan tabungan, tidak ada putus sekolah, tidak ada anggota rumah tangga sakit, dan akses media online sehingga diperlukan upaya dalam meningkatkan dimensi kemandirian keluarga dengan kolaborasi lintas sektor pembangunan. Berbagai upaya dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas gizi, sanitasi, lingkungan, pendidikan, dan sebagainya. Hal ini bertujuan meningkatkan pembangunan keluarga secara menyeluruh sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas.



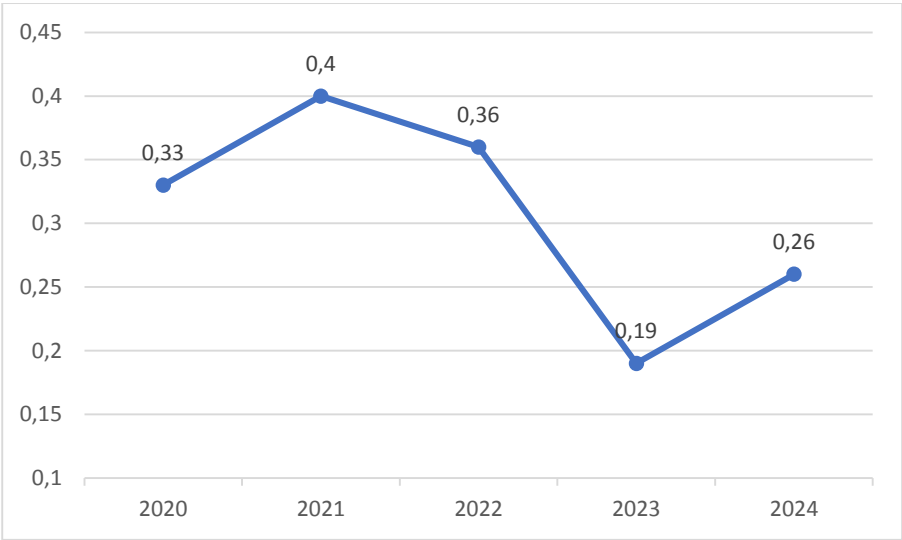
Gambar 2.51 Angka iBangga Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2022-2024

Sumber : BKKBN, (2024)

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2022 angka iBangga Kabupaten Purworejo terendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten sekitar. Namun pada tahun 2023 meningkat dan menjadi lebih tinggi dari Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo. Sementara itu, pada tahun 2024 Kabupaten Purworejo kembali menjadi kabupaten dengan iBangga terendah. Angka iBangga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membenahi seluruh program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, lebih meningkatkan komitmen dan sinergisitas antar kementerian/lembaga, serta perlu digencarkan sosialisasi iBangga hingga ke seluruh desa agar terwujud keluarga yang berkualitas

2) Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. IKG menunjukkan ketidakefektifan pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan pencapaian pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin rendah nilai IKG maka semakin baik kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.



Gambar 2. 52 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Pada tahun 2023, IKG di Kabupaten Purworejo menurun menjadi 0,193 dibandingkan dengan 2022 sebesar 0,356. Menurunnya IKG terutama dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi. Hal yang paling mempengaruhi penurunan ketimpangan gender di Kabupaten Purworejo adalah penurunan proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan. Akan tetapi, pada tahun 2024 nilai IKG Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan menjadi 0,26. Peningkatan nilai IKG perlu ditangani dan diantisipasi agar kedepannya ketimpangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan tidak semakin besar.

Tabel 2. 63 Indeks Ketimpangan Gender dan Komponen Penyusunnya

Tahun	Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan	Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berumur <20th	Persentase Keterwakilan di Legislatif		Persentase Penduduk Usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA ke atas		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		IKG
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	0,029	0,243	82,22	17,78	37,04	33,25	80,40	60,14	0,335
2021	0,080	0,193	82,22	17,78	37,25	31,46	84,49	62,57	0,398
2022	0,042	0,204	82,22	17,78	39,31	32,44	83,96	61,29	0,356
2023	0,000	0,199	80,00	20,00	40,59	32,97	85,74	63,86	0,193
2024	0,014	0,215	77,78	22,22	45,68	34,86	84,64	62,87	0,264

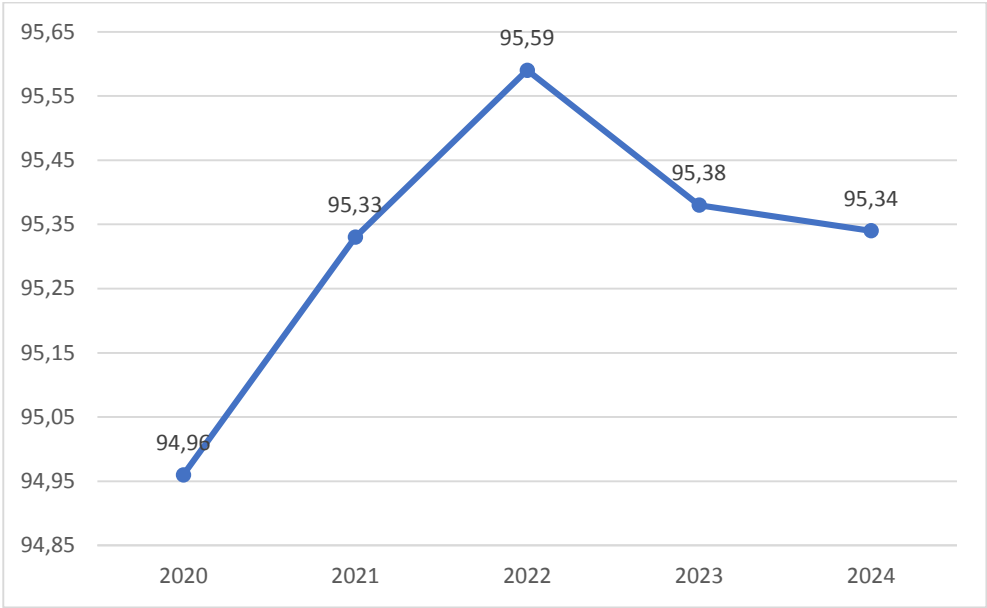
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2025

Berdasarkan data di atas, IKG Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 termasuk mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun meningkat kembali di tahun 2024. Peningkatan tersebut disebabkan aspek kesehatan mengalami penurunan kinerja yaitu meningkatnya perempuan yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan dan meningkatnya perempuan melahirkan hidup di usia kurang dari 20 tahun. Selain itu TPAK baik laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan.

3) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG yang

difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level.



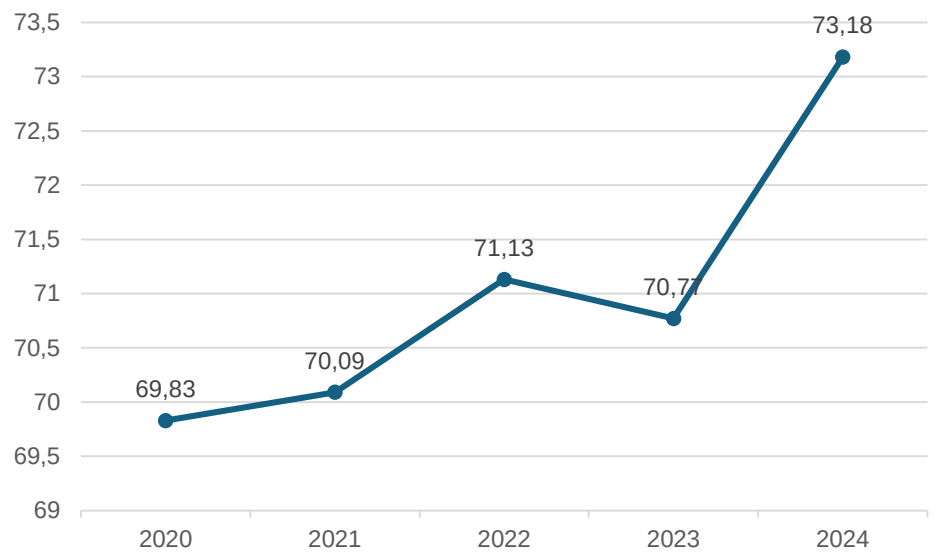
Gambar 2. 53 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Pada tahun 2024, nilai Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Purworejo yaitu 95,34 atau mengalami sedikit penurunan dari nilai tahun 2023 yang mencapai 95,38. Namun disisi lain nilai IPG Kabupaten Purworejo masih di bawah 100, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian pembangunan laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan capaian pembangunan perempuan. Pencapaian hasil baik IPG menyisakan pekerjaan dan tugas yang tidak ringan, terutama yang terkait dengan isu disparitas pencapaian pembangunan manusia antargender.

4) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks komposit yang digunakan dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Indonesia. Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi. Meski masih belum menyamai laki-laki, kualitas pembangunan perempuan di Kabupaten Purworejo senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang terkait dengan pemberdayaan gender.

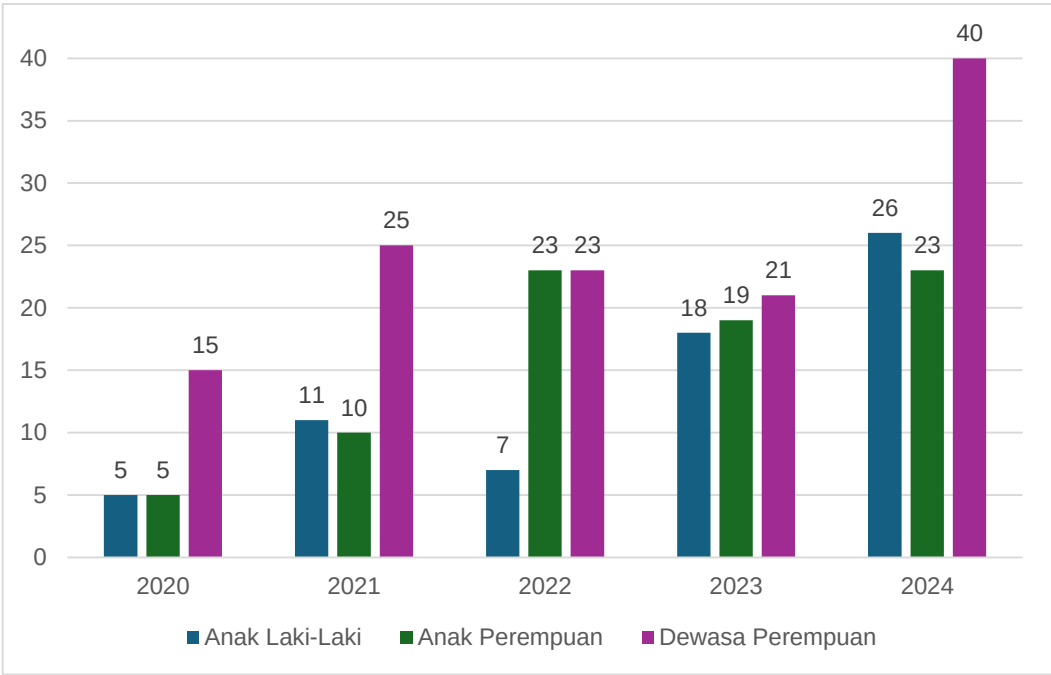


Gambar 2. 54 Grafik Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Secara umum nilai IDG Kabupaten Purworejo cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 nilai IDG Kabupaten Purworejo adalah 69,83 dan meningkat menjadi 73,18 pada tahun 2024 meski sempat mengalami penurunan nilai pada tahun 2023 yakni 70,77 dibanding tahun sebelumnya yakni tahun 2022 yang mencapai 71,13.

5) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap kesehatan fisik, mental, sosial, dan psikologis korban. Penanganan korban kekerasan tidak hanya mencakup aspek perlindungan hukum, tetapi juga layanan pemulihan, seperti pendampingan psikologis, medis, dan sosial. Oleh karena itu, jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tertangani menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap isu perlindungan kelompok rentan. Di Kabupaten Purworejo, perhatian terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat dalam lima tahun terakhir. Hal ini tercermin dari semakin kuatnya sistem pelaporan dan respons kasus melalui unit layanan terpadu, serta penguatan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, serta jejaring organisasi masyarakat sipil.



Gambar 2. 55 Jumlah Kasus Kekerasan yang Ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinsosdukpppa Kabupaten Purworejo, 2024

Pada tahun 2020 sampai dengan 2024, data kasus kekerasan yang ditangani P2TP2A Kabupaten Purworejo cenderung meningkat meski sempat mengalami penurunan di tahun 2023 (terutama kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak perempuan). Selain karena masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini juga menunjukkan bahwa kesadaran dan keberanian korban untuk melaporkan tindak kekerasan semakin meningkat. Namun demikian, tantangan masih ada, terutama dalam menjangkau korban di wilayah terpencil, menangani kekerasan berbasis digital, serta memperkuat layanan purna penanganan agar korban benar-benar pulih dan mandiri. Masih terdapat kasus yang tidak dilaporkan karena alasan rasa malu, takut stigma sosial, atau kurangnya informasi tentang mekanisme pengaduan. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak, melalui peningkatan kapasitas tenaga pendamping, layanan konseling, integrasi data kekerasan, dan penguatan peran lintas sektor termasuk pendidikan, kesehatan, hukum, dan sosial. Upaya kolektif ini akan mendukung terciptanya lingkungan yang aman, setara, dan ramah bagi perempuan dan anak.

Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah sistem yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya untuk memenuhi hak anak dalam berbagai aspek pembangunan. Setelah penilaian KLA oleh KemenPPPA terhadap Kabupaten Purworejo pada tahun 2022 yang hasilnya rilis di tahun 2024 adalah memperoleh predikat pratama. Selanjutnya untuk hasil penilaian KLA Tahun 2023 baru saja rilis di tahun 2025 hasilnya masih pratama. Predikat tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan kabupaten dalam memenuhi hak anak. Kabupaten Purworejo masih memperoleh nilai tingkat dasar yang artinya masih perlu upaya pengembangan untuk membangun inisiatif pemerintahan daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

6) **Total Fertility Rate**

Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total merupakan indikator demografi yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduktifnya (usia 15–49 tahun), dengan asumsi pola fertilitas yang berlaku saat itu. Indikator ini sangat penting dalam perencanaan kependudukan karena berkaitan langsung dengan dinamika pertumbuhan penduduk, beban ketergantungan, serta kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

TFR yang ideal menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan standar internasional adalah sekitar 2,1. Angka ini menunjukkan tingkat penggantian populasi yang seimbang, di mana satu generasi perempuan digantikan oleh jumlah generasi berikutnya secara proporsional. Angka TFR yang terlalu tinggi dapat menyebabkan ledakan penduduk, sedangkan angka yang terlalu rendah dapat mengarah pada masalah penuaan populasi dan kekurangan tenaga kerja di masa depan.

Tabel 2. 64 Total Fertility Rate Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Total Fertility Rate	2,10	2,10	2,10	2,05	2,11

Sumber: Dinsosdukpppa Kabupaten Purworejo, 2024

Tren TFR Kabupaten Purworejo dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan stabil. Pada tahun 2020, TFR tercatat sebesar 2,10 dan sedikit meningkat menjadi 2,11 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan berbagai program pengendalian kelahiran dan kampanye keluarga berencana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, khususnya melalui pelayanan kesehatan reproduksi, peningkatan akses terhadap alat kontrasepsi, serta edukasi tentang keluarga berencana yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

Meskipun telah mendekati angka ideal 2,1, tantangan masih ada terutama dalam menjaga agar penurunan TFR berlangsung secara proporsional dan tidak terlalu drastis. Ketidakseimbangan angka fertilitas antara wilayah desa dan kota, serta antara kelompok usia, juga perlu menjadi perhatian dalam perencanaan intervensi program kependudukan ke depan. Dengan pengelolaan yang tepat, stabilitas angka fertilitas di level yang ideal akan berkontribusi pada pencapaian bonus demografi, sekaligus memperkuat kualitas pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Purworejo secara berkelanjutan.

7) **Demand Satisfied**

Demand Satisfied adalah indikator yang menggambarkan persentase perempuan usia subur (15–49 tahun) yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan, dan telah menggunakan metode kontrasepsi modern. Indikator ini mencerminkan sejauh mana kebutuhan akan pengaturan kehamilan telah terpenuhi melalui akses terhadap layanan kontrasepsi yang efektif, aman, dan sesuai preferensi pengguna. Tingginya angka *demand satisfied* menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana dalam menjangkau kelompok sasaran dengan pelayanan yang memadai. Sebaliknya, rendahnya angka ini mengindikasikan adanya kesenjangan akses, keterbatasan informasi, atau hambatan sosial budaya yang menghambat penggunaan kontrasepsi modern.

Tabel 2. 65 Demand Satisfied Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Demand Satisfied	79,2	80,42	81,42	82,95	83,9

Sumber: Dinsosdukpppa Kabupaten Purworejo, 2024

Capaian *demand satisfied* Kabupaten Purworejo menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, cakupan kebutuhan kontrasepsi modern yang terpenuhi tercatat sebesar 79,2%, dan meningkat menjadi 83,9% pada tahun 2024. Kenaikan ini tidak terlepas dari penguatan program pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan, peningkatan peran tenaga lini lapangan seperti penyuluh KB dan bidan desa, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan alat dan metode kontrasepsi yang beragam. Dengan peningkatan capaian *demand satisfied*, Kabupaten Purworejo menunjukkan kemajuan dalam mendukung hak-hak reproduksi perempuan dan memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan manusia yang berkelanjutan.

8) Kehamilan Tidak Direncanakan

Kehamilan tidak direncanakan merupakan kondisi di mana seorang perempuan mengalami kehamilan tanpa adanya keinginan untuk hamil saat itu atau sama sekali tidak menginginkan anak lagi. Indikator ini penting dalam menggambarkan tingkat keberhasilan pelayanan keluarga berencana, pendidikan kesehatan reproduksi, serta akses terhadap kontrasepsi yang efektif. Kehamilan yang tidak direncanakan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan anak, kelanjutan pendidikan, serta stabilitas ekonomi dan sosial keluarga. Angka kehamilan tidak direncanakan yang tinggi biasanya terjadi akibat penggunaan kontrasepsi yang tidak konsisten atau tidak efektif, kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi, serta keterbatasan akses terhadap layanan KB, terutama di kalangan remaja, kelompok miskin, dan wilayah pedesaan. Selain itu, faktor budaya dan tekanan sosial juga dapat menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan kontrasepsi.

Tabel 2. 66 Prevalensi Kehamilan Tidak Direncanakan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Prevalensi Kehamilan Tidak Direncanakan	17,42	16,2	15,67	15,21	14,8

Sumber: Dinsosdukpppa Kabupaten Purworejo, 2024

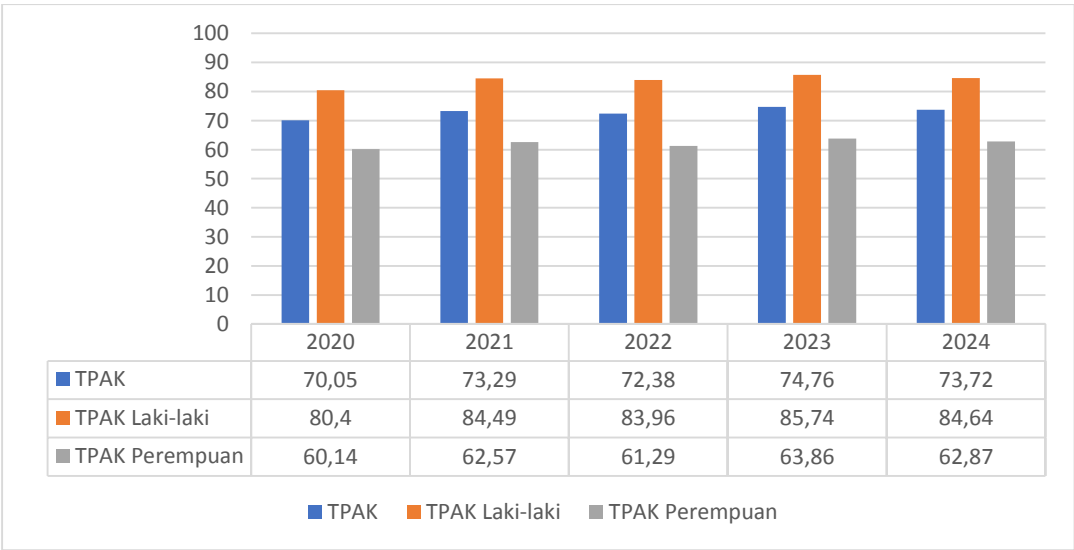
Prevalensi kehamilan tidak direncanakan di Kabupaten Purworejo selama periode 2020–2024 menunjukkan kecenderungan menurun, seiring dengan meningkatnya cakupan penggunaan kontrasepsi modern dan penguatan edukasi kesehatan reproduksi di tingkat komunitas. Pada tahun 2020, proporsi kehamilan tidak direncanakan berada pada kisaran 17,42%, dan turun menjadi sekitar 14,8% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah dan mitra pembangunan dalam meningkatkan akses terhadap informasi dan layanan KB yang berkualitas.

Meskipun demikian, tantangan masih dihadapi dalam menurunkan angka kehamilan tidak direncanakan di kalangan remaja dan pasangan usia muda. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk penguatan pendidikan kesehatan reproduksi berbasis sekolah dan komunitas, layanan ramah remaja, serta pelibatan aktif tokoh masyarakat dalam mendorong perubahan perilaku. Penurunan kehamilan yang tidak direncanakan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak, penurunan angka kematian maternal, serta perencanaan keluarga yang lebih baik dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

9) **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Angka TPAK digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif bekerja ataupun mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPAK maka semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Purworejo relatif meningkat dari tahun 2020 (70,05) hingga 2024 (73,72). Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian semakin meningkat. TPAK Laki-Laki Kabupaten Purworejo dari tahun 2020-2024 relatif lebih tinggi jika dibandingkan TPAK Perempuan.



Gambar 2. 56 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Meskipun TPAK di Kabupaten Purworejo relatif meningkat dari tahun 2020-2024 namun tidak diimbangi dengan peluang serapannya dalam pasar kerja. Secara alamiah pertumbuhan penduduk akan searah dengan pertumbuhan angkatan kerja. Namun, pertumbuhan penciptaan lapangan kerja baru relatif berjalan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk usia kerja. Hal ini mengakibatkan tidak semua angkatan kerja terserap oleh pasar kerja, sehingga terjadi ketidakseimbangan yang akan menciptakan persoalan ketenagakerjaan yaitu pengangguran.

Selama periode tahun 2020-2024, TPAK perempuan di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren peningkatan meskipun bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020, TPAK perempuan tercatat sebesar 60,14 dan meningkat menjadi 62,57 pada tahun 2021. Terjadi penurunan TPAK perempuan pada tahun 2022 menjadi 61,29 dan meningkat kembali menjadi 63,86 pada tahun 2023, hingga pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 62,87.

Meskipun angka TPAK Perempuan Kabupaten Purworejo mengalami perbaikan dibandingkan awal periode, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih relatif rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Sepanjang periode lima tahun tersebut, selisih TPAK antara laki-laki dan perempuan konsisten berada di kisaran 21 hingga 23 poin, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan gender yang signifikan dalam pasar tenaga kerja di Kabupaten Purworejo. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, melalui kebijakan yang inklusif gender, penguatan pelatihan keterampilan kerja, penyediaan infrastruktur pendukung, serta perubahan pola pikir masyarakat terkait peran perempuan dalam pembangunan ekonomi.

10) Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan

Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kapasitas dan kualitas pembangunan pemuda serta kemajuan sektor olahraga di suatu daerah. Indeks ini merupakan indikator yang digunakan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan membandingkan pemuda berprestasi, atlet berprestasi, dan wirausaha pemuda dengan jumlah pemuda. Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. Pemuda merupakan aset bangsa yang tidak hanya menjadi penerus kepemimpinan di masa depan, tetapi juga agen perubahan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Sementara itu, olahraga menjadi wahana pembentukan karakter, peningkatan kebugaran, serta sarana penguatan prestasi daerah di tingkat nasional maupun internasional.

Pada tahun 2024, nilai Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Purworejo mencapai 9,02, yang relatif cukup tinggi. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya capaian belum dapat dihitung karena belum adanya pencatatan terhadap data wirausaha pemuda. Sedangkan data pemuda dan atlet berprestasi meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2. 67 Jumlah Pemuda dan Atlet Berprestasi di Kabupaten Purworejo

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Pemuda Berprestasi (jiwa)	N/A	N/A	45	88	81
2	Jumlah Atlet Berprestasi (jiwa)	2.127	2.376	2.563	2.983	3.196

Sumber : Dinporapar, 2025

Peningkatan jumlah pemuda dan atlet berprestasi tersebut mencerminkan adanya kemajuan dalam pemberdayaan pemuda, termasuk melalui kegiatan wirausaha pemuda, pelibatan dalam forum-forum kebijakan publik, serta peningkatan partisipasi dalam event olahraga lokal dan regional. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, terutama dalam hal pemerataan

akses kegiatan kepemudaan di wilayah pedesaan, minimnya fasilitas olahraga berstandar, serta belum optimalnya sinergi antar instansi dalam pembinaan atlet muda dan organisasi kepemudaan. Dengan penguatan daya saing pemuda dan olahraga, Kabupaten Purworejo dapat mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara intelektual dan fisik, tetapi juga memiliki semangat inovasi, sportivitas, dan kepemimpinan yang mampu mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.

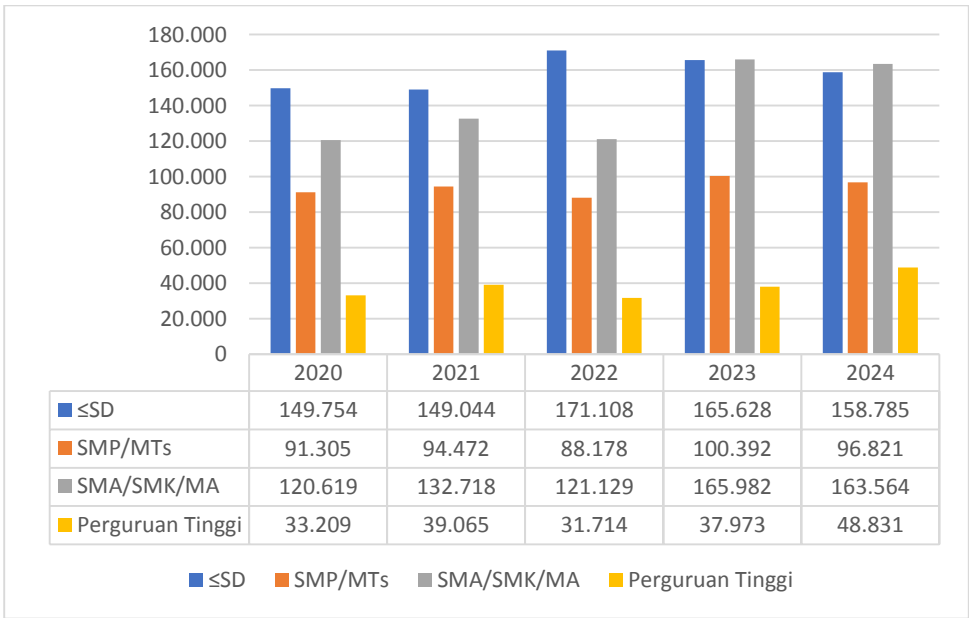
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

a. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1) Tingkat Kesempatan Kerja

Secara alamiah pertumbuhan angkatan kerja searah dengan pertumbuhan penduduk. Namun, pertumbuhan penciptaan lapangan kerja baru berjalan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk usia kerja. Hal ini mengakibatkan tidak semua angkatan kerja terserap oleh pasar kerja, sehingga terjadi ketidakseimbangan ini akan menciptakan persoalan ketenagakerjaan yaitu pengangguran. Besarnya persentase penduduk yang telah bekerja merupakan suatu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan telah teratasi atau belum.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pada gambar berikut ini merupakan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024.



Gambar 2. 57 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 (Jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Pada tahun 2024, penduduk usia kerja meningkat dari tahun 2023 yang diiringi dengan peningkatan jumlah Angkatan Kerja. Sejalan dengan hal tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan. TPAK menunjukkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi pada suatu daerah, TPAK di Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 menurun menjadi 73,72%. Sedangkan Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 menurun menjadi 3,89 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 orang menganggur.

Tabel 2. 68 Indikator Makro yang Terkait Kinerja Urusan Tenaga Kerja

No	Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Penduduk Usia Kerja (jiwa)	563.729	566.620	569.380	628.615	634.845
2	Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	394.887	415.299	412.130	469.977	468.001
3	Jumlah Penduduk Bekerja (jiwa)	378.951	400.401	393.780	451.105	449.811
4	Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	168.842	151.330	157.250	158.638	166.844
5	Pengangguran (jiwa)	15.936	14.890	18.350	18.872	18.190
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,04	3,59	4,45	4,02	3,89
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	70,05	73,29	72,38	74,76	73,72
	a. Laki-laki	80,40	84,49	83,96	85,74	84,64
	b. Perempuan	60,14	62,57	61,29	63,86	62,87
8	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	95,96	96,41	95,54	95,98	96,11

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023 sejalan dengan menurunnya TPT pada tahun 2024. Peningkatan TKK memberikan indikasi adanya perbaikan kondisi perekonomian di Kabupaten Purworejo. Meskipun demikian, persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui layanan antar kerja di Kabupaten Purworejo pada kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 cenderung menurun. Pencari kerja terdaftar diperoleh berdasarkan data pemohon kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja yang sering disebut pula dengan kartu AK1. Pemilik kartu AK1 secara otomatis akan terdaftar di Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sehingga bila sewaktu-waktu ada informasi lowongan kerja, maka pihak dinas akan memprioritaskan pemilik kartu AK1 untuk mendapatkan informasi. Dinperintransnaker juga mempromosikan pemilik kartu AK1 kepada perusahaan-perusahaan yang mencari karyawan baru melalui Dinperintransnaker. Adapun data jumlah pencari kerja terdaftar dan ditempatkan melalui layanan antar kerja di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 69 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

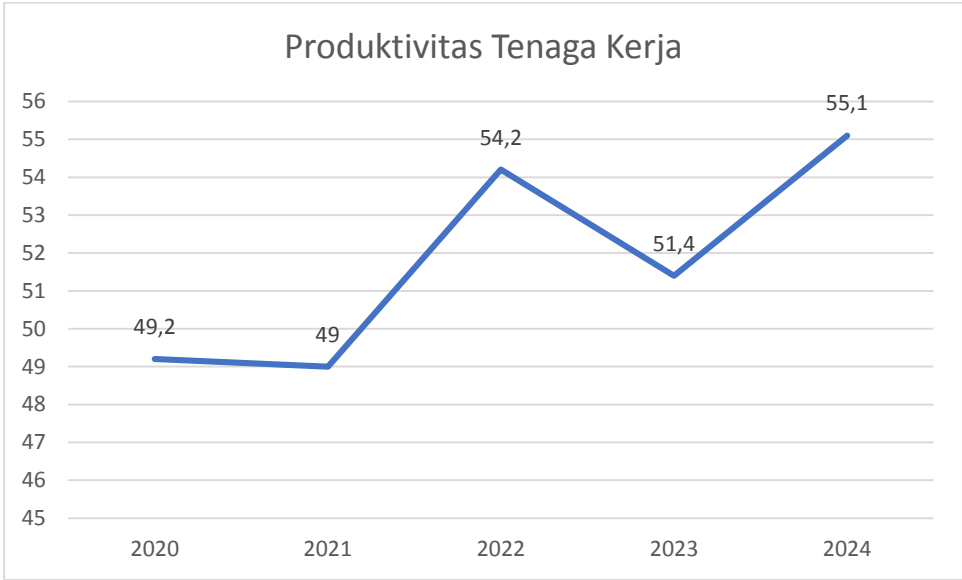
No	Tahun	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar (jiwa)	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan (jiwa)	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (%)
1	2	3	4	5
1	2020	6.346	3.097	24,58
2	2021	6.389	3.097	48,47
3	2022	5.102	2.526	49,51
4	2023	4.948	2.602	52,59
5	2024	4.214	2.861	67,89

Sumber: Dinperintransnaker, 2023

Berdasarkan data di atas, menunjukkan terjadinya tren penurunan pencari kerja yang melakukan permohonan AK1 yang mencapai angka terendah pada tahun 2023. Di samping itu, pencari kerja yang ditempatkan

juga menurun dan mencapai jumlah terendah pada tahun 2023. Penurunan jumlah pencari kerja terdaftar dan jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui layanan antar kerja ini tidak selaras dengan penurunan TPT di Kabupaten Purworejo. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak jumlah pencari kerja yang tersalurkan tidak melalui layanan antar kerja.

Peningkatan kesempatan kerja biasanya akan diikuti dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, begitu pula sebaliknya. Hal ini karena kesempatan kerja yang lebih luas dapat mendorong peningkatan kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Berikut merupakan data produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Purworejo. Produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Purworejo dihitung dari PDRB ADHB dibagi jumlah penduduk bekerja.

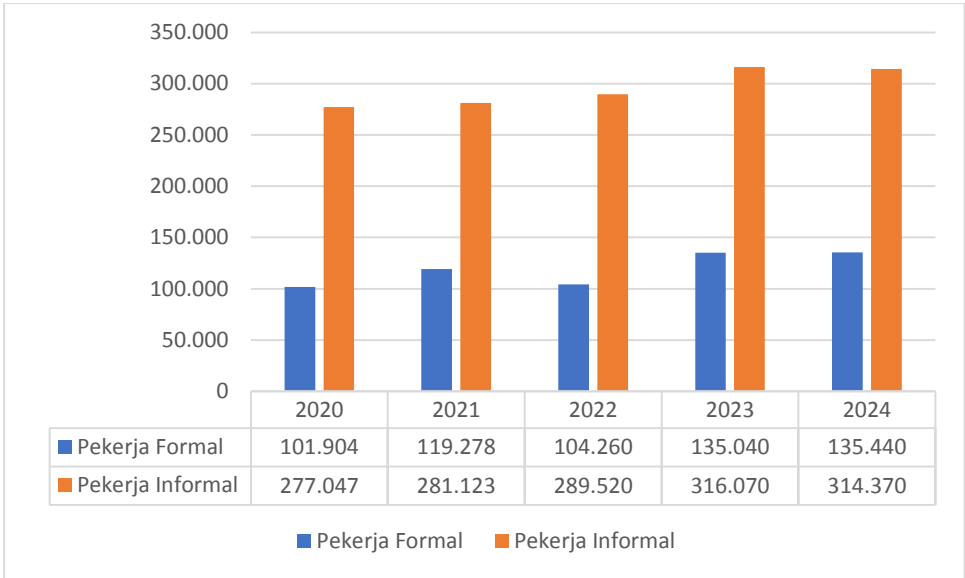


Gambar 2. 58 Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 (juta rupiah/tenaga kerja)

Sumber: Disperintransnaker Kabupaten Purworejo, 2025

Peningkatan produktivitas tenaga kerja pada tahun 2024 di Kabupaten Purworejo menunjukkan perubahan yang signifikan dari tahun 2020. Pada tahun 2020, produktivitas tenaga kerja yaitu Rp49,2 juta/tenaga kerja lalu meningkat menjadi Rp55,1 juta/tenaga kerja. Hal ini dapat disebabkan oleh perkembangan perusahaan di Kabupaten Purworejo melalui konsultasi produktivitas. Pada tahun 2024 sekitar 53,28% perusahaan telah memiliki sarana hubungan industrial dan menerapkan syarat kerja. Capaian ini meningkat tiap tahunnya dari tahun 2020-2024.

Selanjutnya, terkait pekerja formal dan informal yang secara sederhana dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Pekerja formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai, selebihnya termasuk pekerja informal. Berdasarkan status pekerjaan utamanya, sebagian besar penduduk di Kabupaten Purworejo bekerja secara informal.



Gambar 2. 59 Perbandingan Pekerja Informal dan Pekerja Formal di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Gambar di atas menunjukkan kondisi ketenagakerjaan dari tahun 2020 hingga tahun 2024, pekerja di Kabupaten Purworejo masih didominasi oleh pekerja informal. Meskipun terdapat kenaikan pekerja formal namun lajunya tidak sebesar kenaikan pekerja informal. Sektor informal dapat menjadi salah satu solusi bagi pengurangan pengangguran di Kabupaten Purworejo karena mampu menyerap tenaga kerja dengan pendidikan rendah dan tanpa keterampilan tinggi. Meskipun demikian pekerja pada sektor informal rentan terdampak jika terjadi gejolak secara ekonomi.

2) Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Rasio ketergantungan adalah suatu ukuran yang menjelaskan mengenai beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15–64 tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi atau penduduk yang berpotensi sebagai modal pembangunan. Sedangkan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi dan semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.

Tabel 2.70 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Proporsi penduduk	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
Persentase penduduk usia produktif	69,15	68,83	68,61	68,43	65,7
Persentase Penduduk usia tidak produktif	31,33	31,18	31,39	31,57	34,3

Proporsi penduduk	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
Rasio beban ketergantungan	45,31%	45,30%	45,75%	46,13%	52,21%

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2025

Perkembangan rasio ketergantungan di Kabupaten Purworejo selama tahun 2020-2024 dapat diamati pada tabel di atas. Data dari BPS tahun 2025 menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Kabupaten Purworejo memiliki proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 65,70%, atau sebanyak 522.292 jiwa. Rasio beban ketergantungan di Purworejo pada tahun 2024 adalah 52,21%, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif rata-rata menanggung 52-53 penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 dan 65 tahun ke atas).

Kondisi ini menunjukkan adanya bonus demografi, di mana jumlah penduduk produktif lebih banyak daripada penduduk non-produktif. Bonus demografi ini merupakan periode yang menguntungkan karena lebih banyak penduduk yang berada dalam usia produktif dapat berkontribusi secara ekonomi, mendukung pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini memberikan peluang bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memanfaatkan potensi ini dengan meningkatkan investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

b. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1) Produksi Sektor Pertanian

Pertanian di Kabupaten Purworejo merupakan sektor basis yang signifikan, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama periode 2020 hingga 2024, sektor pertanian, yang mencakup pertanian, kehutanan, dan perikanan, menunjukkan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah, meskipun dengan fluktuasi laju pertumbuhannya. Kontribusi sektor ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti cuaca, kebijakan pertanian, dan kondisi pasar. Sektor kehutanan dan perikanan juga memberikan kontribusi, meskipun dalam proporsi yang lebih kecil dibandingkan pertanian.

Tabel 2.71 Laju dan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Miliar Rp)	2.756,84	2.764,46	2.835,78	2.908,97	2.906,71
2	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Miliar Rp)	4.260,28	4.359,33	4.650,88	5.002,45	5.184,90
3	% Kontribusi	22,85	22,24	21,78	21,57	20,91
4	% Laju Pertumbuhan	-0,01	0,28	2,58	2,58	-0,08

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Meskipun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Purworejo memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian, terjadi penurunan kontribusi rata-rata dari 22,85 persen pada tahun 2020 menjadi 20,91% pada tahun 2024. Laju pertumbuhan sektor ini juga menunjukkan fluktuasi, dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 2,58 persen pada tahun 2023 dan pertumbuhan terendah sebesar -0,08 persen pada tahun 2024. Selama pandemi COVID-19, sektor ini mengalami kontraksi, namun tidak terlalu signifikan, menunjukkan ketahanan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di tengah krisis. Penurunan kontribusi dan laju pertumbuhan yang rendah dibandingkan sektor lainnya disebabkan oleh stagnasi produksi, kelemahan kelembagaan ekonomi petani dan nelayan, alih fungsi lahan pertanian tanpa peningkatan produktivitas, rendahnya nilai tambah, ketidakseimbangan skala usaha dengan skala ekonomi, serta kurangnya modernisasi peralatan pertanian. Penurunan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini perlu didorong dengan meningkatkan produksi pertanian di seluruh komoditas yang dilakukan melalui penyediaan sarana, prasarana, pengendalian kesehatan hewan, pengendalian bencana pertanian dan penyuluhan pertanian.

Berdasarkan analisis BPS Provinsi Jawa Tengah dalam publikasinya mengenai Ketimpangan Pengembangan Pertanian Tahun 2012-2022, Kabupaten Purworejo berada pada kuadran II, yang menunjukkan daerah pertanian potensial dengan kontribusi pertanian yang lebih besar dibandingkan rata-rata provinsi, namun memerlukan peningkatan dalam hal pertumbuhan. Hasil analisis sektor basis pada tiap subsektor akan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel berikut.

Tabel 2. 72 Analisis Subsektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Purworejo Tahun 2012-2022

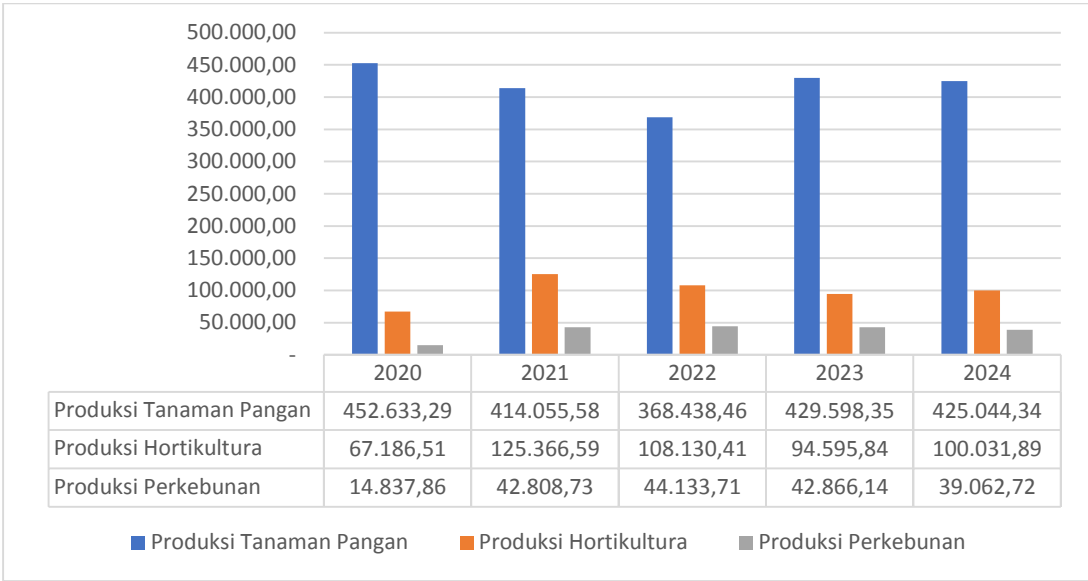
No	Subsektor	Tahun 2012		Tahun 2022	
		LQ	Keterangan	LQ	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tanaman Pangan	1,13	Basis	1,03	Basis
2	Hortikultura	-0,86	Non basis	-0,94	Non basis
3	Perkebunan	0,98	Non basis	1,67	Basis
4	Peternakan	-0,74	Non basis	-0,80	Non basis
5	Jasa Pertanian	1,07	Basis	1,12	Basis
6	Kehutanan	1,21	Basis	1,36	Basis
7	Perikanan	-0,52	Non basis	-0,56	Non basis

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pada tahun 2022, terdapat perubahan signifikan dalam subsektor basis pertanian di Kabupaten Purworejo, dari sebelumnya hanya tanaman pangan, jasa pertanian, dan kehutanan pada tahun 2012, menjadi empat subsektor yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, jasa pertanian, dan kehutanan. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja, terutama di subsektor perkebunan, jasa pertanian, dan kehutanan. Namun, subsektor tanaman pangan, meskipun masih menyumbang kontribusi terbesar, mengalami penurunan nilai LQ. Di sisi lain, subsektor hortikultura, peternakan, dan perikanan menunjukkan kemunduran yang signifikan dari tahun 2012 hingga 2022.

Dalam hal produksi, data tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan rata-rata penurunan produksi jumlah produksi hasil tanaman pangan sebesar 0,98% per tahun hingga menjadi 425.044,34 ton. Sementara itu, pada produksi

hortikultura dan perkebunan terjadi peningkatan produksi dengan rata-rata peningkatan 20,10% dan 62,91%. Pada tahun 2024, produksi hortikultura mencapai 100.031,89 ton, sedangkan produksi perkebunan mencapai 39.062,72 ton. Berikut merupakan data produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.



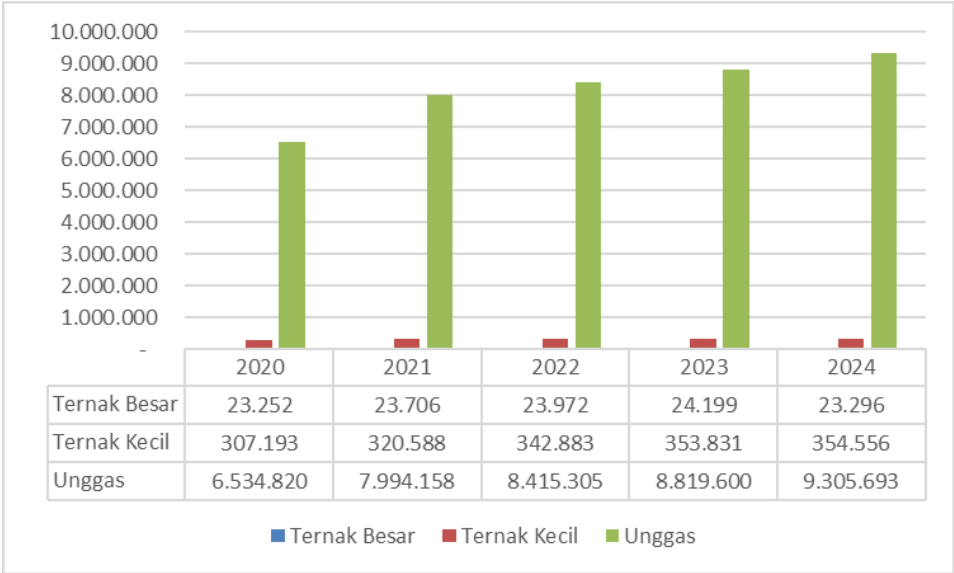
Gambar 2.60 Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo, 2024

Penurunan produksi tanaman pangan terjadi pada komoditas jagung, kedelai, dan ubi jalar. Meskipun demikian, terdapat peningkatan produksi pada komoditas padi sawah dan beberapa tanaman lainnya yang berkontribusi pada peningkatan produksi tanaman pangan secara keseluruhan pada tahun 2023. Peningkatan ini terutama didorong oleh lonjakan produksi padi sawah, yang membantu mengimbangi penurunan di komoditas lainnya.

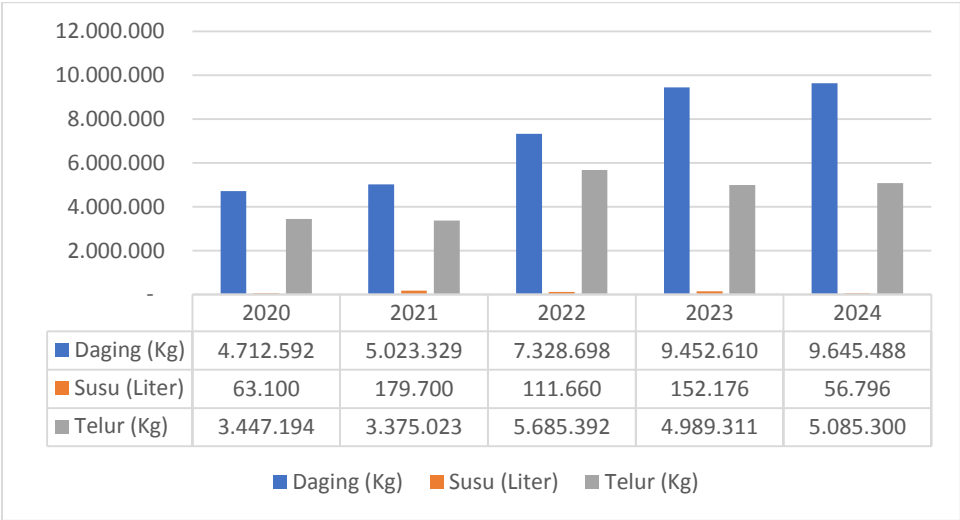
Meskipun ada peningkatan dalam produksi pertanian, kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi Kabupaten Purworejo menunjukkan penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, termasuk alih fungsi lahan pertanian untuk tujuan lain. Data dari DPUPR Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa lahan pertanian berkurang dari 56.877 hektar pada tahun 2011 menjadi 46.857 hektar pada tahun 2021, mengindikasikan alih fungsi sebesar 10.020 hektar selama periode tersebut. Selain itu, penurunan kontribusi sektor pertanian dipengaruhi oleh berkurangnya daya dukung lahan, lambannya regenerasi petani, keterbatasan dalam mengadopsi teknologi pertanian, perubahan iklim yang mempengaruhi pola tanam, serta rendahnya nilai tambah produk pertanian.

Di sisi lain, populasi ternak di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan populasi ternak di Kabupaten Purworejo didominasi oleh unggas dan ternak kecil. Peningkatan populasi ternak tersebut harus diikuti dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi peternak, perekonomian daerah, dan lingkungan.



Gambar 2. 61 Populasi Ternak di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024
Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo, 2024

Sementara itu, hasil peternakan di Kabupaten Purworejo juga mengalami fluktuasi pada periode tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan populasi ternak di Kabupaten Purworejo juga diikuti dengan peningkatan pada produk hasil turunannya seperti daging dan telur sebagaimana tersaji dalam diagram berikut.



Gambar 2. 62 Produksi Daging, Susu, dan Telur di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024
Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo, 2024

Meningkatnya produksi daging dan telur di Kabupaten Purworejo tidak lepas dari faktor peningkatan populasi ternak dan keberhasilan pengendalian penyakit hewan menular. Meskipun demikian, produksi daging dan telur di Kabupaten Purworejo tidak cukup signifikan jumlahnya jika dibandingkan kabupaten lain di Jawa Tengah. Hal ini disebabkan mayoritas peternakan di Purworejo dijalankan oleh peternak dengan skala kecil, yang membatasi produksi masal. Sedangkan produksi susu di Kabupaten Purworejo dari tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung menurun yang disebabkan oleh penurunan produksi susu kambing perah yang diakibatkan penurunan populasi dan produktivitas kambing perah. Meskipun Kabupaten Purworejo bukan menjadi bukanlah pusat utama produksi susu di Jawa Tengah, namun penurunan ini perlu diantisipasi untuk menjaga keberlanjutan sektor peternakan dan ketahanan pangan lokal.

2) Produksi Hasil Kelautan dan Perikanan

Urusan sektor perikanan di Indonesia bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ikan sambil meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pemerintah memainkan peran krusial dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengelolaan berkelanjutan, seperti regulasi penangkapan ikan, perlindungan habitat laut, dan pengawasan terhadap praktik perikanan ilegal. Fokus utama juga termasuk peningkatan produktivitas dan kualitas hasil tangkapan serta pengembangan akuakultur yang ramah lingkungan. Dukungan berupa pelatihan, teknologi modern, dan fasilitas pembiayaan disediakan untuk membantu nelayan dan pembudidaya ikan. Dengan demikian, sektor perikanan berkontribusi pada ketahanan pangan, kesejahteraan nelayan, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kabupaten Purworejo, yang terletak di pesisir selatan dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, memiliki potensi besar dalam sektor Kelautan dan Perikanan. Namun, produksi perikanan di daerah ini dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Fluktuasi ini mungkin dipengaruhi oleh perubahan kondisi cuaca, keberagaman spesies ikan, serta dinamika pasar dan teknologi perikanan. Tantangan seperti pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, pencemaran laut, dan perubahan iklim juga dapat memengaruhi hasil produksi. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Kabupaten Purworejo perlu mengadopsi kebijakan yang lebih adaptif, meningkatkan dukungan kepada nelayan lokal, memperkuat infrastruktur pendukung, dan mengimplementasikan praktik perikanan ramah lingkungan.

Tabel 2. 73 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap (pertahun) (%)	172,86	4,29	-6,22	4,05	4,86
2.	Persentase kenaikan produksi perikanan budidaya (pertahun) (%)	-12,66	3,28	2,90	2,00	2,088

Sumber: Statistik Sektoral Kabupaten Purworejo (diolah), 2024

Kinerja bidang urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Purworejo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Produksi perikanan tangkap mengalami variasi besar, dengan penurunan tajam pada tahun 2022. Sebaliknya, produksi perikanan budidaya mengalami perubahan yang lebih stabil, meskipun ada penurunan di tahun-tahun tertentu. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa sektor perikanan tangkap menghadapi ketidakstabilan yang lebih besar dibandingkan dengan sektor budidaya, yang cenderung menunjukkan pertumbuhan yang lebih konsisten namun moderat. Berikut merupakan jumlah produksi ikan di Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024.

Tabel 2. 74 Produksi Perikanan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No.	Jenis	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Perikanan Budidaya	3.724	3.846	3.957	4.036,51	4.120,77
2	Perikanan Tangkap	152,8	159,36	149,45	155,51	163,08
Total Produksi Ikan (Ton)		3.876,80	4.005,36	4.106,45	4.192,02	4.283,85

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo, 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah produksi ikan di Kabupaten Purworejo mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat. Pada tahun 2020 jumlah produksi ikan di Kabupaten Purworejo sebesar 3.867,80 ton dimana 3.724 ton merupakan hasil dari perikanan budidaya dan 152,80 ton merupakan hasil dari perikanan tangkap. Sedangkan pada tahun 2024 jumlah produksi ikan di Kabupaten Purworejo meningkat menjadi 4.283,85 ton dimana 4.120,77 ton merupakan hasil dari perikanan budidaya dan 163,08 ton merupakan hasil dari perikanan tangkap. Di samping itu, berikut merupakan nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Purworejo tahun 2020 – 2024.



Gambar 2. 63 Nilai Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

Sumber: Statistik Sektoral Kabupaten Purworejo (diolah), 2025

Pada tahun 2024, nilai produksi perikanan tangkap di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan yang kurang signifikan yaitu sebesar Rp8.059,89 juta dimana sebelumnya di tahun 2020 hanya mencapai Rp7.327,48 juta. Faktor cuaca memainkan peran penting dalam produksi perikanan tangkap, namun beberapa faktor lain turut mempengaruhi peningkatan ini, seperti penggunaan alat penangkapan ikan modern, peningkatan pengetahuan nelayan, dan subsidi bahan bakar. Meskipun ada tren peningkatan, nilai produksi perikanan tangkap masih tergolong rendah dan memerlukan upaya tambahan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Sementara itu, nilai produksi perikanan budidaya di Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp169.299,53 juta di tahun 2020 menjadi Rp183.427,10 juta pada tahun 2024. Peningkatan produksi budidaya dipengaruhi oleh pemberian bantuan bibit ikan kepada kelompok pembudidaya. Namun, masalah seperti tingginya

tingkat kematian ikan akibat perubahan suhu ekstrim, mutu pakan yang rendah, dan harga pakan yang tinggi masih menjadi kendala utama. Dibandingkan dengan kabupaten lain, produksi perikanan budidaya di Kabupaten Purworejo masih memerlukan perbaikan substansial untuk dapat bersaing dan memenuhi potensi yang ada.

Sementara itu, nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai produksi tercatat sebesar Rp1.235,78 juta kemudian meningkat menjadi Rp2.416,05 juta di tahun 2024. Berikut merupakan data nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di Kabupaten Purworejo.



Gambar 2. 64 Nilai Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo, 2025

Peningkatan nilai produksi di tahun 2022-2024 mencerminkan adanya pertumbuhan positif dalam hilirisasi perikanan yang didorong oleh berbagai faktor seperti bertambahnya unit usaha pengolahan skala kecil dan rumah tangga, pelatihan peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta dukungan akses pemasaran. Namun, pada tahun 2024, laju peningkatannya tidak sebesar tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi baru untuk mendorong diversifikasi produk olahan, peningkatan standar mutu hasil pengolahan, dan penguatan akses pasar khususnya pasar regional dan nasional.

Berbanding terbalik potensi perikanan tangkap, potensi garam di kawasan selatan masih cukup besar sementara produktivitas yang dihasilkan dari sejumlah kelompok petani garam belum optimal. Sebagai daerah yang memiliki garis pantai sepanjang 22 kilometer, Kabupaten Purworejo dapat mengoptimalkan potensi laut salah satunya produksi garam. Peluang pengembangan produktivitas garam masih sangat besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kebutuhan garam konsumsi untuk masyarakat Purworejo sebanyak 2.313 ton per tahun, sedangkan produksi garam berada pada kisaran 2-3 ton per bulan. Sehingga peluang pasarnya masih sangat lebar untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Purworejo. Di bawah ini tersaji data produksi garam selama tahun lima tahun.

Tabel 2. 75 Data Produksi Garam Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Periode	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Rp)
1	2	3
2020	4.437	13.311.000
2021	37.500	112.500.000
2022	58.750	176.250.000
2023	147.930	443.790.000
2024	172.800	2.592.000.000

Sumber: DLHP Kabupaten Purworejo, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa antara tahun 2020 hingga 2024 terjadi peningkatan produksi garam di Kabupaten Purworejo. Meskipun demikian, jumlah produksi garam saat ini masih belum mencukupi kebutuhan lokal dan belum mampu memenuhi permintaan pasar secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas produksi agar dapat memenuhi kebutuhan pasar lokal serta berpotensi menjadi komoditas ekspor ke wilayah lain. Melihat potensi ini, pengembangan produksi garam di pesisir selatan Purworejo menjadi langkah strategis yang penting untuk meningkatkan ketersediaan garam secara lokal dan membuka peluang ekspor yang lebih luas.

3) Rasio PDRB Industri Pengolahan

Perindustrian di Kabupaten Purworejo memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk struktur perekonomian daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor industri pengolahan, yang merupakan sektor terbesar kedua setelah pertanian, kehutanan, dan perikanan, sangat penting bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purworejo. Sektor ini tidak hanya menyumbang secara substansial terhadap PDRB, tetapi juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi lokal.

Perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Purworejo menunjukkan dinamika yang penting bagi perekonomian daerah. Sektor ini mencakup berbagai subsektor yang mendukung pemrosesan bahan mentah lokal menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Dengan demikian, sektor industri pengolahan tidak hanya memperkuat basis ekonomi daerah tetapi juga meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Dukungan terhadap sektor ini sangat krusial untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo. Pada tahun 2020 hingga 2024, sektor ini mengalami peningkatan yang konsisten.

Tabel 2. 76 Laju dan Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan (Miliar Rp)	2.388,46	2.476,35	2.562,41	2.693,35	2.824,20
2	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan (Miliar Rp)	3.645,20	3.881,47	4.190,37	4.593,66	4.975,90
3	% Kontribusi	19,55	19,8	19,62	19,81	20,06
4	% Laju Pertumbuhan	0,57	3,68	3,48	5,11	4,86

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2025

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) di atas menunjukkan kinerja sektor industri pengolahan di Kabupaten Purworejo yang mengalami tren pertumbuhan positif selama lima tahun

terakhir. Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan tercatat sebesar Rp3.645,20 miliar lalu meningkat signifikan menjadi Rp4.975,90 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya peningkatan aktivitas produksi dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah. Beberapa faktor yang berperan dalam peningkatan tersebut antara lain adalah tumbuhnya industri skala kecil dan menengah, peningkatan permintaan pasar lokal dan regional, serta dukungan pemerintah daerah melalui fasilitasi perizinan usaha dan pembinaan UMKM.

Berdasarkan kontribusinya, sektor industri pengolahan di Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan relatif dari tahun 2020 (19,55 persen) hingga tahun 2024 (20,06 persen). Dalam periode waktu tersebut, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB meningkat sebesar 0,75 persen, menandakan kinerja yang positif. Meskipun pada tahun 2020 sektor ini mengalami kontraksi akibat dampak pandemi COVID-19, laju pertumbuhannya tidak turun ke angka minus. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa sebagian besar industri di Kabupaten Purworejo merupakan industri mikro, kecil, dan menengah (IKM) yang bahan bakunya bersumber dari sektor pertanian, sehingga dampak pembatasan aktivitas dapat dikelola dengan baik.

Meskipun sektor industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan positif, laju pertumbuhan sektor ini belum berhasil mengakselerasi sektor primer, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain skala industri agro yang masih kecil, rendahnya produktivitas, dan kurangnya pengembangan kemitraan antara industri agro besar dengan industri kecil dan rumah tangga. Selain itu, keterbatasan teknologi dan sarana prasarana dalam pengolahan produk, serta kurangnya dukungan kerjasama antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, petani, dan industri dalam pengembangan produk dan inovasi teknologi, turut mempengaruhi belum optimalnya peran sektor industri pengolahan dalam mendorong pertumbuhan sektor primer di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2. 77 Jumlah Industri dan Tenaga Kerja di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Industri	10.928	13.331	18.672	18.672	18.672
2	Jumlah Tenaga Kerja	18.301	18.860	18.860	18.860	18.860

Sumber: Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo, 2024

Dalam periode 2020-2024, Kabupaten Purworejo menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah industri, meningkat dari 10.928 unit pada tahun 2020 menjadi 18.672 unit pada tahun 2022 dan tetap stabil hingga tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan dinamika positif dalam sektor industri, dengan jumlah unit industri yang meningkat secara substansial dalam lima tahun terakhir. Jumlah industri yang mengalami pertumbuhan yang pesat juga diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerja sejumlah 18.301 orang di tahun 2020 menjadi 18.860 di tahun 2021 dan tetap stabil hingga 2024. Stabilitas jumlah tenaga kerja ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah industri bertambah, penambahan tenaga kerja tidak mengikuti laju pertumbuhan industri secara proporsional. Hal ini mungkin

dipengaruhi oleh peningkatan efisiensi operasional atau perubahan dalam struktur industri yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja tambahan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri diikuti oleh penyesuaian dalam penyediaan tenaga kerja yang sesuai, agar manfaat ekonomi dari pertumbuhan industri dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Kabupaten Purworejo.

Tabel 2. 78 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Peningkatan Produktivitas IKM Tiap Tahunnya	0	7,29	10,64	10,42	7,87
2	Persentase Perizinan Industri Kewenangan Kabupaten yang Memenuhi Komitmen Perizinan	6,67	10,00	15,20	42,72	27,96
3	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Informasi Industri	53,33	60,00	63,83	65,67	65,67

Sumber: Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo, 2024

Pertumbuhan yang fluktuatif dalam sektor industri pengolahan di Kabupaten Purworejo selama periode 2020-2024 dipengaruhi oleh beberapa tantangan utama yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satu isu utama adalah ketidakstabilan dalam peningkatan produktivitas industri kecil dan menengah (IKM) setiap tahunnya. Meskipun ada kenaikan signifikan pada tahun-tahun tertentu, seperti 2021 dan 2022, fluktuasi ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas IKM secara konsisten.

Permasalahan lain yang perlu diatasi adalah terkait dengan proses perizinan industri yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Meskipun persentase perizinan yang memenuhi komitmen meningkat pada tahun 2023, fluktuasi sebelumnya mengindikasikan tantangan dalam konsistensi implementasi dan penerapan kebijakan perizinan. Ketidakpastian ini dapat menghambat investasi dan pertumbuhan industri secara keseluruhan, karena proses perizinan yang tidak stabil menimbulkan biaya tambahan dan hambatan administratif bagi pelaku industri.

Selain itu, kepatuhan pelaporan informasi industri juga menjadi perhatian. Walaupun terdapat peningkatan dalam tingkat kepatuhan pada tahun 2023, fluktuasi sebelumnya menunjukkan adanya tantangan dalam manajemen data dan informasi yang konsisten. Ketidakpastian dalam kepatuhan pelaporan dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas, yang penting untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pertumbuhan sektor industri.

Untuk mengatasi masalah fluktuasi dan meningkatkan stabilitas pertumbuhan sektor industri pengolahan di Kabupaten Purworejo, diperlukan langkah-langkah konkret. Ini meliputi memperkuat kebijakan produktivitas IKM yang konsisten, menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan industri, serta meningkatkan sistem pengawasan dan kepatuhan terhadap

regulasi. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung bagi pertumbuhan industri dalam jangka panjang.

4) Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Pariwisata memainkan peran vital dalam perekonomian Kabupaten Purworejo, tidak hanya sebagai kontribusi langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga sebagai penggerak bagi sektor-sektor ekonomi lainnya. Sektor ini memberikan dampak signifikan terhadap subsektor Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum, yang merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling langsung terpengaruh oleh aktivitas pariwisata.

Sektor Akomodasi, Makan, dan Minum memiliki peran strategis dalam mendukung produktivitas ekonomi di Kabupaten Purworejo. Sektor sektor Akomodasi, Makan, dan Minum meliputi berbagai subsektor yang saling mendukung, seperti penginapan, restoran, kafe, dan penyedia layanan makanan lainnya. Sebagai bagian dari sektor pariwisata, sektor Akomodasi, Makan, dan Minum di Kabupaten Purworejo memberikan kontribusi dan mengalami peningkatan yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Purworejo.

Tabel 2. 79 Laju dan Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	PDRB ADHK Sektor Akomodasi dan Makan Minum (Miliar Rp)	296,15	311,02	350,8	385,05	410,40
2	PDRB ADHB Sektor Akomodasi dan Makan Minum (Miliar Rp)	385,48	412,51	472,21	523,85	569,38
3	% Kontribusi	2,07	2,1	2,21	2,26	2,30
4	% Laju Pertumbuhan	-4,84	5,02	12,79	9,76	6,58

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum terhadap total PDRB Kabupaten Purworejo dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan yang konsisten meskipun angkanya tidak terlalu besar. Meskipun demikian, pada tahun 2022, sektor ini mengalami laju pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan bahkan melampaui laju pertumbuhan sektor-sektor lainnya yang menyumbang besar terhadap PDRB. Pada tahun 2020, sektor akomodasi dan makan minum mengalami kontraksi signifikan akibat pandemi COVID-19, menandakan ketidakmampuan sektor pariwisata dalam menghadapi krisis tersebut.

Kontribusi rendah dari sektor akomodasi dan makan minum mencerminkan peran pariwisata yang belum optimal dalam perekonomian Kabupaten Purworejo. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengeluaran pengunjung wisata pada sektor ini dan dominasi kunjungan wisata lokal yang memberikan dampak ekonomi terbatas. Rendahnya tingkat penghunian kamar hotel, baik bintang maupun non-bintang, juga menunjukkan kelemahan sektor ini, dengan tingkat penghunian di Kabupaten Purworejo pada tahun 2022 menjadi yang terendah di Provinsi Jawa Tengah.

5) Jumlah Kunjungan Wisatawan

Kinerja sektor pariwisata tidak hanya mencerminkan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan pendapatan dan lapangan kerja, tetapi juga memicu pertumbuhan dan pengembangan di sektor-sektor terkait seperti perhotelan, restoran, dan layanan pendukung lainnya. Dengan demikian, pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Purworejo memiliki efek berantai yang positif, memperkuat basis ekonomi daerah, dan berpotensi meningkatkan daya tarik serta keunggulan kompetitif wilayah dalam peta pariwisata regional dan nasional.

Jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dari sektor pariwisata. Berikut data kunjungan wisatawan di Kabupaten Purworejo dari tahun 2020-2024.

Tabel 2.80 Kunjungan Wisata di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	133	0	0	101	148
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	492.411	246.911	617.606	636.498	790.969

Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, 2024

Jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, di Kabupaten Purworejo mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas wisatawan. Kunjungan wisatawan mancanegara juga tergolong rendah, sebagian besar karena dukungan infrastruktur pariwisata yang belum memadai untuk menarik wisatawan asing. Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) menawarkan peluang promosi yang dapat digunakan untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara ke Purworejo. Sementara itu, kunjungan wisatawan lokal mendominasi, berkat akses transportasi dan lokasi wisata yang memadai. Pada tahun 2023 dan 2024, jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara mulai menunjukkan peningkatan meskipun belum optimal seperti sebelum adanya pandemi COVID-19.

Besaran PAD sektor pariwisata mencerminkan kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. PAD sektor pariwisata terdiri dari pajak dan retribusi pada objek wisata di Kabupaten Purworejo. Selanjutnya, data mengenai PAD sektor pariwisata dari tahun 2020 hingga 2024 akan menggambarkan sejauh mana sektor ini menyumbang terhadap keuangan daerah.

Tabel 2.81 PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Hotel	439.283.714	399.711.813	470.810.855	624.574.001	621.721.659
2	Pajak Restoran	4.345.444.075	6.701.487.003	7.423.657.382	9.759.372.345	11.031.020.103
3	Pajak Hiburan	63.338.750	49.386.300	125.102.700	180.726.950	190.172.575
4	Retribusi Tempat	940.054.000	840.971.500	1.792.534.701	1.672.369.800	1.966.035.000

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	Rekreasi dan Olahraga					
5	Jumlah Total PAD Sektor Pariwisata	5.788.120.539	7.991.556.616	9.812.105.638	12.237.043.096	13.808.949.337
6	Total PAD	304.800.202.905	438.264.776.270	330.885.725.311	380.642.720.439,53	448.842.283.387
7	Persentase	1,90	1,82	2,97	3,21	3,08

Sumber: BPKAD Kabupaten Purworejo (diolah), 2024

PAD sektor pariwisata pada tahun 2024 di Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Total PAD sektor pariwisata mencapai Rp13.808.949.337, meningkat dari tahun sebelumnya, terutama didorong oleh kenaikan tajam dalam Pajak Restoran. Meskipun terdapat fluktuasi dalam Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Retribusi Tempat Rekreasi serta Olahraga, secara keseluruhan, kontribusi sektor pariwisata terhadap total PAD mengalami kenaikan dari 1,9% pada tahun 2020 menjadi 3,08% pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata semakin berperan penting dalam perekonomian daerah.

6) Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sektor Perdagangan di Kabupaten Purworejo memainkan peranan penting dalam struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi daerah. Laju dan kontribusi PDRB sektor perdagangan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai salah satu pilar utama ekonomi, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Data yang disajikan menggambarkan bagaimana sektor perdagangan mempengaruhi struktur perekonomian Kabupaten Purworejo, dengan kontribusi yang stabil dan laju pertumbuhan yang menunjukkan dinamika sektor ini dalam merespons kondisi ekonomi. Sebagai bagian integral dari perekonomian daerah, sektor perdagangan berfungsi sebagai penggerak penting dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung sektor-sektor ekonomi lainnya.

Tabel 2. 82 Laju dan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Miliar Rp)	1.754,95	1.870,04	1.917,79	2.000,76	2.071,10
2	PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Miliar Rp)	2.277,07	2.461,86	2.623,30	2.832,19	2.985,96
3	% Kontribusi	12,21	12,56	12,29	12,21	12,04
4	% Laju Pertumbuhan	-4,36	6,56	2,55	4,33	3,52

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2023

Dari tahun 2020 hingga 2024, kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Purworejo menunjukkan fluktuasi peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2020, sektor perdagangan mengalami laju pertumbuhan sebesar -4,36% kemudian meningkat menjadi 6,56% di tahun 2021 dan kembali menurun menjadi 3,52% di tahun 2024. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2020, disebabkan oleh pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang menghambat kegiatan perdagangan. Meskipun sektor perdagangan mengalami pemulihan yang cukup pesat pada tahun 2021, berkat adopsi cepat platform perdagangan online, laju pertumbuhan sektor ini kembali menurun pada tahun 2022.

Penurunan kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Purworejo sebagian disebabkan oleh peningkatan transaksi perdagangan online, di mana banyak toko beroperasi di luar kabupaten dan sebagian besar barang yang diperdagangkan merupakan komoditas pertanian. Ketika kontribusi sektor pertanian menurun, dampaknya juga dirasakan pada sektor perdagangan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, yang merupakan sektor ketiga terbesar setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor industri pengolahan. Upaya tersebut diperlukan untuk memperkuat kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian Kabupaten Purworejo dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, nilai net ekspor Kabupaten Purworejo negatif yang berarti bahwa ekspor antar daerah masih lebih kecil dibandingkan dengan impor. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo masih bergantung pada barang-barang dari luar daerah, khususnya produk kebutuhan pribadi dan rumah tangga.

Kondisi ini menggambarkan ketergantungan masyarakat Purworejo terhadap barang-barang dari luar daerah, dengan barang-barang yang diekspor sebagian besar berupa bahan mentah seperti hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan, yang nilainya lebih rendah dibandingkan barang-barang yang diimpor. Dengan kata lain, meskipun terdapat ekspor, nilai barang yang diekspor masih kalah dibandingkan dengan barang yang diimpor, menyebabkan ketidakseimbangan dalam perdagangan antar daerah. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk meningkatkan nilai tambah pada produk yang diekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Indikator lain pada sektor perdagangan adalah disparitas harga yang memberikan gambaran tentang perbedaan harga antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan harga ini sering dipengaruhi oleh faktor jarak; semakin jauh jarak antara daerah penghasil dan daerah konsumen, semakin besar kemungkinan terjadinya perbedaan harga. Tabel berikut menunjukkan kondisi disparitas harga di Kabupaten Purworejo dan menggambarkan bagaimana harga-harga barang dan jasa dapat bervariasi di berbagai daerah dalam kabupaten tersebut.

Tabel 2. 83 Disparitas Harga Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Komoditas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Beras Cap IR 64 Medium	-6%	-5%	1%	-4%	1%
2	Gula Pasir, Kristal Putih, plastik	8%	2%	3%	3%	-3%
3	Minyak Goreng, Kemasan Sederhana					
4	Minyak Goreng, Kemasan Premium					-4%
5	Daging Sapi, Lokal, Paha Belakang	4%	21%	8%	4%	9%
6	Daging Ayam, Broiler/Ras	-9%	-7%	-6%	-6%	-3%
7	Telur Ayam, Negeri	-2%	-2%	-2%	-1%	-1%
8	Tepung Terigu, Bogasari, Eceran, Protein Sedang					11%
9	Kedelai, kuning, plastik, Import	9%	8%	28%	-5%	4%
10	Cabe, Merah, Keriting	-14%	-1%	1%	1%	0%
11	Cabe, Rawit, Merah	-12%	-11%	-7%	-1%	-2%
12	Bawang, Merah, Lokal	6%	6%	0%	3%	11%
13	Bawang Putih, Impor, Kating	10%	-1%	-1%	1%	3%
14	Ikan, Laut, Kembung					-3%
Rata-rata		0%	1%	2%	-1%	2%

Sumber: DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2025

Dari data yang tersedia, beberapa komoditas menunjukkan nilai negatif, yang mengindikasikan bahwa harga komoditas seperti beras, daging ayam, telur, cabe keriting, cabe rawit, dan bawang putih cenderung lebih murah di Kabupaten Purworejo dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, beberapa komoditas seperti daging sapi, kedelai, dan bawang merah memiliki nilai positif, menandakan harga yang lebih tinggi di Kabupaten Purworejo dibandingkan dengan provinsi sekitarnya. Secara rata-rata, pada tahun 2024, nilai disparitas harga menunjukkan angka positif sebesar 2%, yang berarti bahwa harga komoditas di Kabupaten Purworejo sedikit lebih meningkat dibandingkan daerah lain, tetapi tidak terlalu menunjukkan ketimpangan signifikan dengan daerah lain.

Untuk mendukung sektor perdagangan di Kabupaten Purworejo, terdapat berbagai sarana distribusi perdagangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, swasta, dan masyarakat meliputi pasar daerah, pasar desa, toko modern, SRG, dan sarana distribusi lainnya. Pada tahun 2024, Kabupaten Purworejo memiliki 31 unit pasar daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, dengan 13 di antaranya berada dalam kondisi baik menurut standar SNI 8152:2021 Pasar Rakyat. Data berikut menunjukkan jumlah pasar daerah di Kabupaten Purworejo pada tahun 2024.

Tabel 2. 84 Jumlah Pasar Daerah di Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Tipe Pasar Daerah	Jumlah Pasar Daerah	Kondisi Pasar
1	2	3	4
1	Tipe A	2	Baik
2	Tipe B	2	Rusak
3	Tipe C	9	Baik : 5 unit, Rusak : 4 unit
4	Tipe D	18	Baik : 6 unit, Rusak : 12 unit

Sumber: DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2024

Keberadaan pasar sebagai pusat perdagangan masyarakat merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap infrastruktur ekonomi. Infrastruktur ekonomi mencakup pembangunan fisik yang mendukung aktivitas ekonomi. Dari data yang ada, terlihat bahwa dari 31 pasar sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi, terdapat 18 pasar yang berada dalam kondisi rusak atau rusak sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur ekonomi di

Kabupaten Purworejo masih memerlukan perhatian dan perbaikan signifikan untuk mendukung optimalisasi aktivitas perdagangan.

7) Koperasi dan UMKM

Koperasi memainkan peran krusial dalam perekonomian suatu wilayah, berfungsi sebagai sarana penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Koperasi mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan pilar utama perekonomian rakyat, dengan memberikan kesempatan kerja dan mengurangi ketergantungan pada sektor formal. Salah satu kontribusi utama koperasi adalah melalui pemberian pinjaman modal dengan bunga rendah kepada pelaku UMKM, yang memungkinkan untuk mengembangkan usaha dan memperluas jangkauan bisnis. Dengan adanya koperasi, khususnya jenis simpan pinjam, pelaku UMKM mendapatkan akses ke sumber daya finansial yang diperlukan untuk pertumbuhan dan stabilitas usaha.

Tabel 2. 85 Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah koperasi yang aktif	168	235	239	239	277
2	Jumlah keseluruhan koperasi	273	280	284	284	284
3	Persentase koperasi aktif	61,54	83,93	84,15	84,15	97,54
4	Jumlah koperasi sehat	52	123	121	119	114
5	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	150	150	150	125	125
6	Persentase koperasi sehat	34,67	82,00	80,67	95,20	92,68

Sumber: DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2025

Kinerja koperasi di Kabupaten Purworejo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan baik dalam jumlah maupun kesehatan koperasi. Meskipun terdapat 277 koperasi aktif pada tahun 2024, jumlah ini masih rendah dibandingkan dengan total 284 koperasi yang ada. Selain itu, jumlah koperasi yang sehat mengalami penurunan dari 123 pada tahun 2021 menjadi 114 pada tahun 2024, tetapi persentase koperasi sehat meningkat menjadi 92,68%. Fluktuasi jumlah koperasi yang sehat dan jumlah koperasi aktif menyoroti tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan manajemen kelembagaan koperasi. Faktor-faktor seperti ketergantungan pada pembiayaan internal, keterbatasan keterampilan SDM perkoperasian, dan rendahnya kesadaran anggota mengenai kewajiban simpanan wajib berkontribusi terhadap kinerja koperasi yang belum optimal.

Manajemen kelembagaan koperasi merupakan kunci untuk meningkatkan kesehatan dan keaktifan koperasi di Kabupaten Purworejo. Beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya manajemen kelembagaan koperasi adalah masih banyak koperasi yang hanya mengandalkan pembiayaan dari sisi internal atau kemampuan anggotanya saja dan belum memanfaatkan akses pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi, terbatasnya kemampuan/ keterampilan SDM perkoperasian, koperasi kalah bersaing dengan badan usaha lainnya, dan rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, sehingga tidak membayar simpanan wajib.

Volume usaha tidak hanya membantu menciptakan kemandirian koperasi dan mengukur kesehatan koperasi, tetapi juga menjadi kunci keberhasilan serta mempengaruhi tingkat aktivitas koperasi. Selain itu, volume usaha berperan dalam perhitungan *Asset Turn Over* dan berdampak signifikan pada aspek finansial koperasi. Dengan demikian, pengembangan volume usaha yang baik merupakan faktor determinan utama dalam memastikan keberhasilan atau kegagalan koperasi, terutama di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2. 86 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Volume Usaha Koperasi (Juta Rupiah)	292.408	464.087	320.924	393.083	501.928
2	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	18.646.490	19.602.720	21.352.540	23.188.030	24.800.930
3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,57	2,37	1,50	1,70	2,02

Sumber: DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2024

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Purworejo mengalami fluktuasi antara tahun 2020 hingga 2024. Meskipun ada peningkatan volume usaha koperasi pada tahun 2021, rasio terhadap PDRB mencapai puncaknya pada 2,37%, tetapi pada tahun 2023, volume usaha mengalami penurunan yang mengakibatkan rasio kembali turun menjadi 1,70%. Sementara itu, pada tahun 2024, volume usaha koperasi kembali meningkat menjadi 501.928 juta rupiah dengan rasio 2,02%. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun koperasi mengalami lonjakan dalam volume usaha pada tahun tertentu, kontribusi relatif koperasi terhadap perekonomian daerah tidak konsisten, mencerminkan ketidakstabilan dalam pengaruh koperasi terhadap PDRB Kabupaten Purworejo.

Sementara itu, peran koperasi di Kabupaten Purworejo dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan masih belum optimal, khususnya dalam membangun kemitraan dengan pelaku UMKM. Pada tahun 2024, UMKM yang bermitra dengan koperasi tercatat baru mencapai 9,17%, menunjukkan bahwa sinergi antara kedua sektor ini masih sangat terbatas. Rendahnya tingkat kolaborasi ini menjadi tantangan yang perlu diatasi ke depan seiring dengan upaya peningkatan kapasitas koperasi dan pemberdayaan UMKM secara lebih terintegrasi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilai aset dan omsetnya. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan.

Tabel 2. 87 Kondisi UMKM Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Usaha Mikro Kecil	33.532	39.115	33.532	33.532	33.532
2	Jumlah Usaha Mikro yang Dibina	4.486	5.583	2.075	2.580	2.820
3	Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang dibina	20,09	25,00	6,19	7,69	8,41
4	Jumlah usaha mikro berizin yang menjadi wirausaha	732	800	460	433	508
5	Jumlah usaha mikro yang telah memiliki izin minimal NIB	4.900	5.840	7.023	6.105	6.105

Sumber: DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2024

UMKM di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Kontribusi Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan dalam membina usaha mikro hanya mencapai 8,41% dari keseluruhan UMKM. Peningkatan jumlah UMKM disebabkan oleh program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), yang mensyaratkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro bertahan selama pandemi Covid-19. Program ini berhasil meningkatkan jumlah usaha mikro yang terdaftar dengan izin NIB secara signifikan pada tahun 2022. Namun, efektivitas dan cakupan program pembinaan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan masih perlu ditingkatkan untuk memperluas dampaknya pada keseluruhan sektor UMKM.

Pertumbuhan jumlah UMKM di Kabupaten Purworejo, terutama dalam sektor kuliner dan kriya/kerajinan, menunjukkan kemajuan, peningkatan omset tidak sejalan dengan pertumbuhan tersebut. Masalah utama meliputi rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha, kualitas produk yang belum memenuhi standar, kurangnya inovasi dan jaringan pemasaran, serta kesulitan dalam mengakses pasar dan teknologi. Sebagian besar UMKM masih beroperasi di sektor informal dengan pekerja berkeahlian rendah dan nilai tambah yang minim. Untuk meningkatkan omset UMKM secara keseluruhan, diperlukan upaya berkelanjutan dalam pembinaan yang mencakup peningkatan keterampilan, inovasi, dan akses pasar.

Sedangkan, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit di Kabupaten Purworejo dari tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan. Meningkatnya proporsi kredit UMKM ini menunjukkan bahwa terjadi perluasan akses keuangan pada UMKM di Kabupaten Purworejo. Berikut data proporsi kredit UMKM terhadap total kredit di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 88 Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Kredit UMKM (Juta Rupiah)	1.814.185	2.208.447	2.728.382	3.103.014	3.185.395
2	Total Kredit (Juta Rupiah)	4.365.381	4.626.580	5.377.803	5.823.665	6.119.683
3	Proporsi Kredit UMKM (%)	41,56	47,73	50,73	53,28	52,05

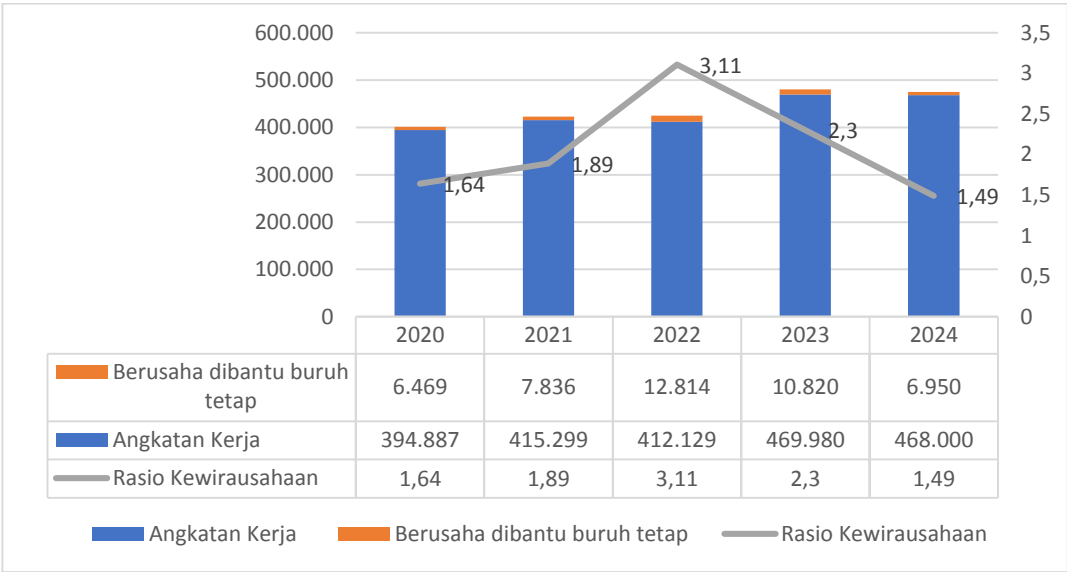
Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia, 2024

Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan yang signifikan selama periode tahun 2020 hingga 2024, menunjukkan peran yang semakin penting dari sektor UMKM dalam perekonomian daerah. Pada tahun 2020, proporsi kredit UMKM hanya sebesar 41,56%, tetapi meningkat menjadi 52,05% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM semakin mendapatkan akses terhadap sumber pembiayaan yang lebih besar, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha dan berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Purworejo. Peningkatan ini juga mencerminkan upaya yang lebih intensif dalam mendukung dan memperkuat sektor UMKM, meskipun masih perlu terus ditingkatkan untuk mengatasi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan peningkatan kapasitas usaha.

8) Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap dengan total angkatan kerja pada tahun yang sama. Kewirausahaan merupakan salah satu roda penggerak pembangunan ekonomi yang akan mendorong inovasi, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan peningkatan penerimaan negara melalui pajak. Pada level nasional, Rasio Kewirausahaan menjadi prasyarat Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045 dengan target yang harus dicapai minimal sebesar 4,00. Saat ini Rasio Kewirausahaan Nasional Sebesar 3,57. Peningkatan rasio kewirausahaan perlu dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat struktur ekonomi nasional, karena pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

Rasio Kewirausahaan Daerah untuk Kabupaten Purworejo pada periode tahun 2020-2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Kondisi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

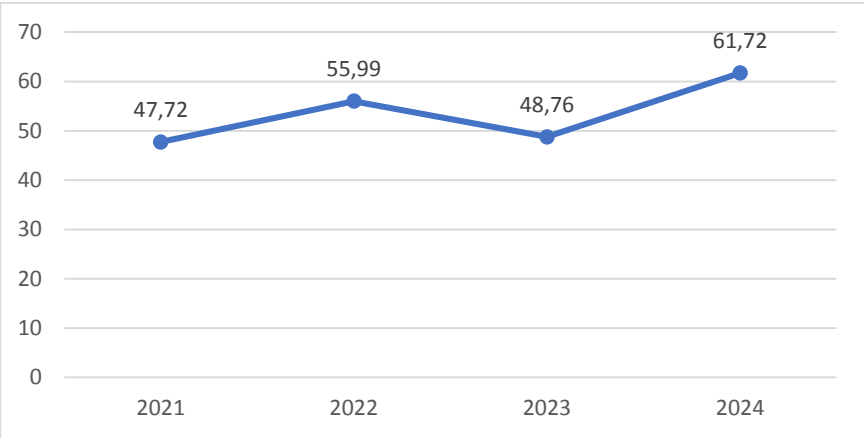


Gambar 2.65 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Jumlah wirausaha dan rasionya di Kabupaten Purworejo dari tahun 2020 hingga 2024 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2024, rasio kewirausahaan di Kabupaten Purworejo adalah 1,49 persen, lebih rendah dibandingkan rasio kewirausahaan nasional yang mencapai 3,47 persen. Rendahnya jumlah wirausaha di Indonesia, termasuk di Kabupaten Purworejo, dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat yang lebih cenderung mencari pekerjaan daripada menciptakan usaha, rendahnya kapasitas kewirausahaan, dan kendala dalam mengakses modal. Survei Bank Indonesia (BI) 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia lebih memilih untuk tetap berskala kecil dan informal. Padahal, mengembangkan usaha dan mendaftarkan usaha menjadi formal akan membuka akses ke pinjaman modal dan insentif dari pemerintah.

9) Indeks Inovasi Daerah

Inovasi daerah adalah pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan data dalam gambar berikut, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo menunjukkan tren yang fluktuatif dalam empat tahun terakhir.



Gambar 2. 66 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2024

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2024

Pada tahun 2021, indeks inovasi Purworejo berada pada angka 47,72, dan meningkat menjadi 55,99 pada tahun 2022, yang menempatkannya pada peringkat ke-68 secara nasional. Namun, pada tahun 2023, indeks ini kembali menurun menjadi 48,76. Penurunan ini disebabkan oleh tingkat kematangan inovasi daerah yang belum optimal, terutama dari aspek mutu inovasi dan dampak inovasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada tahun 2024, nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo kembali meningkat menjadi 61,72 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo masih berada dalam kategori inovatif.

Hasil pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan terlihat pada capaian indikator kinerja utama yaitu Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan 100% di tahun 2023. Kendala utama dari pelaksanaan program penelitian dan pengembangan adalah belum sepenuhnya hasil penelitian ditindaklanjuti dan menjadi dasar pengambilan kebijakan Selain itu sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Bappeda selaku perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan bertugas mendorong, mengawal, dan mengevaluasi inovasi daerah. Akan tetapi belum sepenuhnya pengawalan inovasi ini dapat berjalan

dengan optimal. Capaian kinerja Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 89 Capaian Kinerja Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

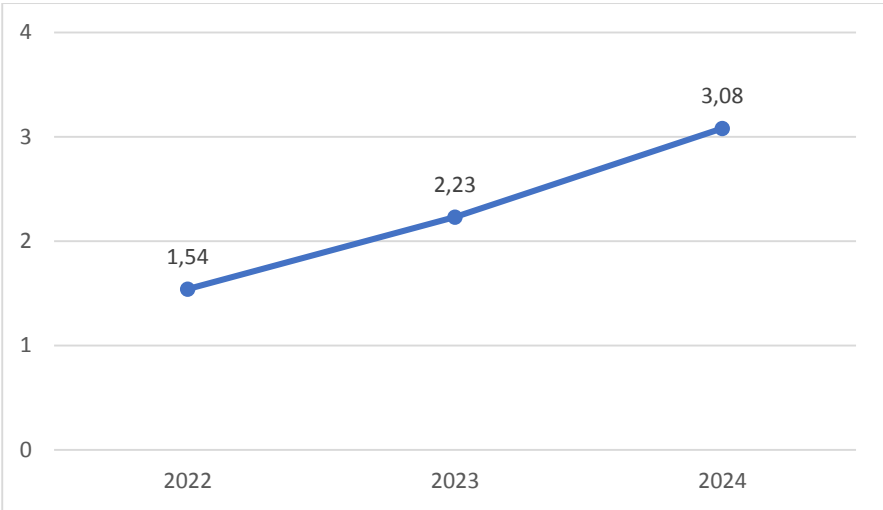
No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	N/A	N/A	100%	100%	100%

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2025

Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintasvisi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang.

Kapabilitas Inovasi ini merupakan salah satu pilar dalam komponen penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dirilis sejak tahun 2022. IDSD dibentuk berdasarkan 12 pilar daya saing wilayah yang diturunkan dari Global Competitiveness Index. Masing-masing pilar kemudian diukur dengan sejumlah indikator, yaitu infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, akses ke pasar, kondisi perekonomian, dan sebagainya. Penghitungan skor IDSD dilakukan dengan melakukan standarisasi data dari seluruh indikator tersebut yang kemudian dikompositkan dengan menggunakan rata-rata aritmetika.

IDSD 2022 mengedepankan konsep pengukuran yang objektif dengan cara mensubstitusi pengukuran yang berdasarkan pada opini dengan proksi data sekunder. IDSD 2022 memiliki empat komponen utama yang diadaptasi dari GCI 2019, yaitu komponen lingkungan pendukung (*enabling environment*), komponen sumber daya manusia (*human capital*), komponen pasar (*market*), dan komponen ekosistem inovasi (*innovation ecosystem*). Kapabilitas Inovasi masuk dalam komponen ekosistem Inovasi, Komponen ekosistem inovasi (*innovation ecosystem*) meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi. Dalam pilar kapabilitas inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi yang meningkatkan nilai tambah.



Gambar 2. 67 Kapabilitas Inovasi Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024
Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2025

Berdasarkan gambar tersebut, capaian kapabilitas inovasi Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2024, dengan nilai meningkat dari 1,54 menjadi 3,08. Peningkatan ini menggambarkan adanya kemajuan dalam berbagai aspek yang mendukung inovasi, termasuk keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang.

Kemajuan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo telah mengambil langkah-langkah positif dalam meningkatkan kapasitas inovasinya. Penambahan tenaga kerja yang beragam, pengembangan klaster yang lebih terstruktur, serta peningkatan dalam publikasi ilmiah dan aplikasi KI menunjukkan bahwa daerah ini mulai menyadari pentingnya inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Selain itu, peningkatan belanja riset dan aplikasi merek dagang mencerminkan komitmen yang lebih kuat dalam mengembangkan dan melindungi inovasi lokal.

Namun, meskipun terdapat peningkatan yang signifikan, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa kapabilitas inovasi dapat terus ditingkatkan dan memberikan dampak yang lebih luas. Salah satu tantangan utama adalah keberlanjutan dari upaya-upaya yang telah dilakukan. Peningkatan kapabilitas inovasi memerlukan komitmen jangka panjang, baik dari segi pendanaan maupun kebijakan.

Selain itu, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa semua sektor ekonomi dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari peningkatan kapabilitas inovasi. Hal ini mencakup pengembangan ekosistem inovasi yang inklusif, yang melibatkan tidak hanya sektor pemerintah dan akademik, tetapi juga sektor swasta dan komunitas lokal.

c. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Purworejo juga mengarah pada prinsip-prinsip ekonomi hijau melalui penerapan ekonomi sirkuler yang didukung dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat secara berkelanjutan. Hingga tahun 2024, terdapat 20 unit TPS3R dan 165 unit Bank Sampah yang menerapkan ekonomi sirkuler melalui pengumpulan, pemilahan,

dan pengolahan sampah menjadi barang yang bermanfaat. Total sampah yang dapat didaur ulang pada tahun 2024 sebesar 26,348.23 ton.

Di sisi lain, pengelolaan pertanian berkelanjutan juga mulai dilakukan dengan mengoptimalkan penerapan pembangunan rendah karbon di sektor pertanian melalui pemupukan berimbang, penggunaan varietas rendah emisi, penggunaan pupuk organik, dan penerapan irigasi intermitten. Hingga tahun 2024, total emisi gas rumah kaca yang berhasil diturunkan pada sektor pertanian adalah sebesar 213.159,829 tonCO₂Eq.

Selain itu, penerapan ekonomi hijau di Kabupaten Purworejo juga dapat berupa optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau (RTH) sebagai penyerap emisi karbon dioksida (CO₂). Rata-rata setiap hektar kawasan hijau mampu menyerap karbon sebesar 5,2 ton CO₂/hektar/tahun. Angka ini menjadi dasar perhitungan dalam analisis kontribusi RTH terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari 33,370ha RTH yang dikelola oleh DLHP Kabupaten Purworejo mampu menyerap CO₂ sebesar 173,522 ton/tahun.

Tabel 2. 90 Serapan CO₂ di Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Purworejo

No	RTH	Lokasi	Luas (Ha)	Serapan CO ₂ (ton/tahun)
1	2	3	4	5
	PURWOREJO			
1	Taman kota GOR WR. Supratman	Jl. Pahlawan	0,500	2,600
2	Taman kota GOR Geger Menjangan	Kelurahan Baledono	0,721	3,749
3	Taman Monumen Jend. A. Yani	Jl. Tentara Pelajar	1,000	5,200
4	Taman PKK Don Bosco	Pertigaan Don Bosco, Kec. Banyuurip	0,010	0,052
5	Taman Perjuangan	Jl. Brigjend Katamso	0,25	1,300
6	Taman Bundaran Air Mancur			
7	Taman Kresna Wijoyo			
8	Pulau Taman Jalur Lambat	Jl. Tentara Pelajar	0,450	2,340
9	Taman Aisiyah	Jl. Mayjend. Sutoyo	0,008	0,042
10	Taman Perempatan Intan	Perempatan Intan Jl. Urip Sumoharjo	0,002	0,010
11	Taman TPS Kartini	Jl. R.A Kartini	0,007	0,034
12	Taman JL. Pemuda	Jl. Pemuda	0,150	0,780
13	Taman JL. KH. Wahid Hasyim	Jl. K.H. Wakhid Hasyim	0,075	0,390
14	Taman JL. Ki Mangun Sarkoro	Jl. Ki Mangun Sarkoro	0,135	0,702
15	Taman Selatan Kantor Eks Kejaksaan	Jl. Setia Budi	0,002	0,010
16	Taman Pertigaan Kolam Renang	Jl. Gatot Subroto (Jl. Magelang)	0,002	0,008
17	Taman Segitiga Lengkong	Jl. Tentara Pelajar	0,002	0,010
18	Taman Pendowo	Purwodadi	0,148	0,767
19	Taman Bagelen	Bagelen	0,124	0,646
20	Heroes Park	Kedungsari Purworejo	10,018	52,096
21	Taman eks TPS SMP 1	Jl. Suryokusuman	0,002	0,011
22	Taman eks TPS SMP 31	Jl. Brigjend Katamso	0,005	0,027
23	Taman Brengkelan	Jl. Kyai Brengkel	0,053	0,275
24	Taman Plaosan	Jl. Kesatrian	0,023	0,117
25	Taman Pojok TBA	Jl. Setia Budi	0,014	0,070
	KUTOARJO			
1	Taman Kawedanan	Depan Kantor Wakil Bupati	0,060	0,312
2	Taman Terminal	Pertigaan Jl. Diponegoro, Jl. S. Parman	0,007	0,036
3	Taman Sudagaran	Kutoarjo	0,450	2,340
1	Alun-alun Kemiri		0,770	4,004
2	Alun-alun Cangkrep		0,641	3,333
	LOKASI TUGU			
1	Taman Tugu WR. Supratman	Jl. A. Yani	0,002	0,010
2	Taman Tugu PKK SMPN 1 Purworejo	Jl. Jend. Sudirman	0,050	0,260

No	RTH	Lokasi	Luas (Ha)	Serapan CO2 (ton/tahun)
1	2	3	4	5
3	Taman Tugu BPD	Jl. Jend. Urip Sumoharjo	0,100	0,520
4	Taman Tugu Adipura	Jl. Tentara Pelajar	0,300	1,560
5	Taman Tugu Batas Wil. Kab. Pwr-Mgl	Jl. Magelang (Ds Kalijambe)	0,015	0,078
6	Tugu Gunung Barat&Timur Pendopo	Jl. Setia Budi	0,002	0,010
7	Tugu PKK Maron	Pertigaan Maron	0,001	0,005
8	Tugu Batas Kota Don Bosco	Kec. Banyuurip	0,001	0,005
LOKASI MAKAM				
1	Tawangrejo	Kelurahan Keseneng	5,878	30,568
2	Sekampung	Kelurahan Keseneng	2,640	13,728
3	Keseneng	Kelurahan Keseneng	1,066	5,541
4	Kerkop	Kelurahan Sindurjan	1,725	8,970
5	Sibak	Kelurahan Dopleng	0,903	4,693
6	Lereng Utara	Kelurahan Kutoarjo	0,932	4,846
7	Lereng Timur	Kelurahan Kutoarjo	2,158	11,222
8	Lereng Barat	Kelurahan Kutoarjo	1,970	10,244
TOTAL			33,370	173,522

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2025

Selain itu, untuk mendukung penerapan ekonomi hijau, pemanfaatan energi baru terbarukan juga perlu didorong di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan data dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, terdapat potensi energi baru terbarukan yang dapat dioptimalkan sebagai berikut.

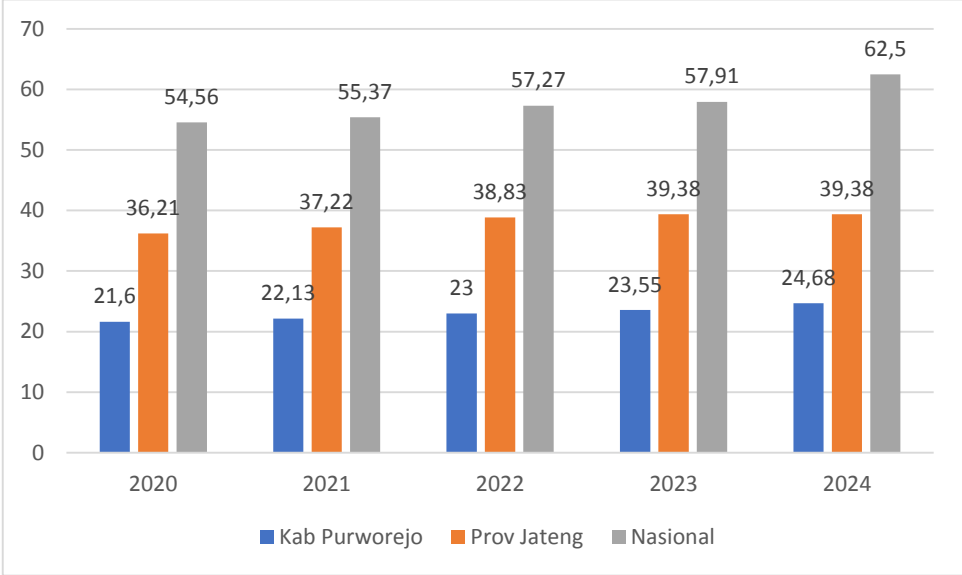
Tabel 2. 91 Potensi Komoditas EBT di Kabupaten Purworejo

No	Potensi Komoditas EBT	Potensi Daya (MW)
1	2	
1	Potensi Angin	232,6
2	Potensi Surya	7,1
3	Potensi Hidro	8,5
4	Potensi Biomassa Eksisting Limbah Industri	1,1
5	Potensi Biomassa Eksisting Produk Utama	7,2
6	Potensi Biomassa Pengembangan	80,6
7	Potensi Panas Bumi	0

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah

Dalam mendukung penerapan ekonomi biru, Kabupaten Purworejo mendorong potensi kelautan yaitu produksi garam dan perikanan baik budidaya maupun tangkap. Produksi garam sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 terus meningkat di Kabupaten Purworejo dan dikembangkan dengan sistem tunnel, yang ramah lingkungan dan mendukung produksi sepanjang tahun. Di samping itu, produksi perikanan di Kabupaten Purworejo tahun 2020 hingga tahun 2024 juga terus meningkat tiap tahunnya meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan di tingkat Provinsi Jawa Tengah jika dibandingkan kabupaten lainnya yang juga berbatasan langsung dengan laut. Kenaikan produksi ini juga diikuti dengan kenaikan angka konsumsi ikan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2020 hingga tahun 2024 meskipun nilainya dibawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Angka konsumsi ikan (AKI) merupakan salah satu indikator penting dalam ekonomi biru, yang menunjukkan seberapa banyak ikan dikonsumsi oleh masyarakat dalam periode waktu tertentu. Peningkatan AKI, seiring dengan penerapan ekonomi biru, diharapkan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan

lingkungan. Berikut data perbandingan angka konsumsi ikan di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dari tahun 2020-2024.



Gambar 2. 68 Angka Konsumsi Ikan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: DLHP Kabupaten Purworejo, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa angka konsumsi ikan di Kabupaten Purworejo cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Meskipun selalu meningkat, jumlah ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan angka konsumsi ikan nasional yang mencapai 62,5kg/kapita dan angka konsumsi ikan tingkat Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 39,38kg/kapita. Hal ini dikarenakan kecenderungan masyarakat yang memilih olahan daging dibandingkan konsumsi ikan. Di samping itu, preferensi masyarakat Purworejo yang hidup di wilayah agraris terhadap ikan juga turut berkontribusi terhadap rendahnya angka konsumsi ikan jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya tambahan untuk meningkatkan konsumsi ikan di Kabupaten Purworejo dalam rangka memenuhi gizi seimbang masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi biru.

d. Transformasi Digital

1) Rumah Tangga dengan Akses Internet

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, diperlukan pengarusutamaan transformasi digital melalui percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital. Tolok ukur transformasi digital di tingkat daerah dapat diukur dengan indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet. Definisi operasional rumah tangga dengan akses internet yaitu rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja. Sedangkan formulasi perhitungannya adalah jumlah rumah tangga dengan minimal satu anggota rumah tangga yang mengakses internet dibagi total rumah tangga dikali 100%. Semakin tinggi nilainya maka dapat digambarkan semakin baik kondisi akses internet di masyarakat. Berikut data Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Purworejo.

Tabel 2. 92 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	49,27	57,45	71,25	71,35	73,66

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa belum seluruh rumah tangga di Kabupaten Purworejo memiliki akses terhadap internet. Hal ini terlihat jelas dari persentase yang meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun belum mencapai 100%. Persentase rumah tangga yang memiliki akses internet terus meningkat dari 49,27% pada tahun 2020 menjadi 73,66% pada tahun 2024. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam penyediaan akses internet bagi rumah tangga, masih ada sekitar 26,34% rumah tangga yang belum terjangkau. Ketidakmerataan akses ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infrastruktur internet yang belum memadai di daerah terpencil, kemampuan ekonomi yang terbatas, serta kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat.

Adapun hal yang menyebabkan belum seluruh area di Kabupaten Purworejo memiliki akses terhadap internet adalah kendala yang disebabkan oleh *Blank Spot*. *Blank Spot* adalah kondisi dimana suatu tempat tidak tersentuh atau terjangkau sinyal komunikasi, baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet. Berikut data sebagian wilayah desa yang termasuk dalam *Blank Spot* di Kabupaten Purworejo khususnya pada layanan pendidikan dan kesehatan.

Tabel 2. 93 Data Wilayah Blank Spot di Kabupaten Purworejo

No.	Wilayah	Titik Koordinat	Kantor Desa	Layanan Pendidikan (SD/SMP/SMA/ SMK)	Layanan Kesehatan (Puskesmas/ Rumah Sakit)*
1	2	3	4	5	6
1.	Kecamatan Bruno				
1.1.	Desa Watuduwur				
		-7.5431, 109.916	Baldes Watuduwur		
		-7.54425, 109.916		SMP N 42 Purworejo	
		-7.54558, 109.919		SD N Watuduwur	
1.2.	Desa Kambangan				
		-7.52581, 109.897	Baldes Kambangan		
		-7.52141, 109.901		SD N Kambangan	
1.3.	Desa Giyombong				
		-7.53874, 109.883	Baldes Giyombong		
		-7.53857, 109.884		SD N Giyombong	
2.	Kecamatan Loano				
2.1.	Desa Ngargosari				
		-7.64772, 110.107	Baldes Ngargosari		
		-7.64774, 110.107		SD N Ngargosari	
2.2.	Kemejing				
		-7.65732, 110.08	Baldes Kemejing		
		-7.65737, 110.08		SD N Kemejing	



No.	Wilayah	Titik Koordinat	Kantor Desa	Layanan Pendidikan (SD/SMP/SMA/SMK)	Layanan Kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit)*
1	2	3	4	5	6
3.	Kecamatan Kaligesing				
3.1.	Desa Tlogobulu				
		-7.70093, 110.12	Baldes Tlogobulu		
		-7.70125, 110.12		SD N Tlogobulu	
3.2.	Desa Tlogoguwo				
		-7.73066, 110.115	Baldes Tlogoguwo		
4.	Kecamatan Bagelen				
4.1.	Desa Sokoagung				
		-7.79979, 110.042	Baldes Sokoagung		
		-7.80086, 110.055		SD N Sokoagung	
4.2.	Desa Semono				
		-7.78566, 110.06	Baldes Semono		
		-7.78563, 110.061			Pustu Semono
4.3.	Desa Tlogokotes	-7.83503, 110.03	Baldes Tlogokotes		
		-7.83431, 110.032		SD Tlogokotes	
5.	Kecamatan Gebang				
5.1.	Desa Kalitengkek				
		-7.58529, 109.994	Baldes Kalitengkek		
		-7.58545, 109.988		SD N Kalitengkek	
5.2.	Desa Ngaglik	-7.61282, 109.977	Baldes Ngaglik		
		-7.58527, 109.994		SD N Ngaglik	
6.	Kecamatan Pituruh				
6.1.	Desa Kaligondang				
		-7.60859, 109.834		SD Kaligondang	
6.2.	Desa Somogede				
		-7.60935, 109.823	Baldes Somogede		
		-7.6123, 109.821		SD N Somogede	
7.	Kecamatan Kemiri				
7.1.	Desa Pamriyan				
		-7.58441, 109.852	Baldes Pamriyan		
		-7.58453, 109.852		SD N Pamriyan	
7.2.	Desa Wonosido	-7.590620697376174, 109.86021218692335	Baldes Wonosido		
		-7.5903895778784385, 109.8601815428009		SD N Wonosido	

Sumber: Laporan Hasil Pemetaan Blank spot Dan Layanan Internet Tahun 2025

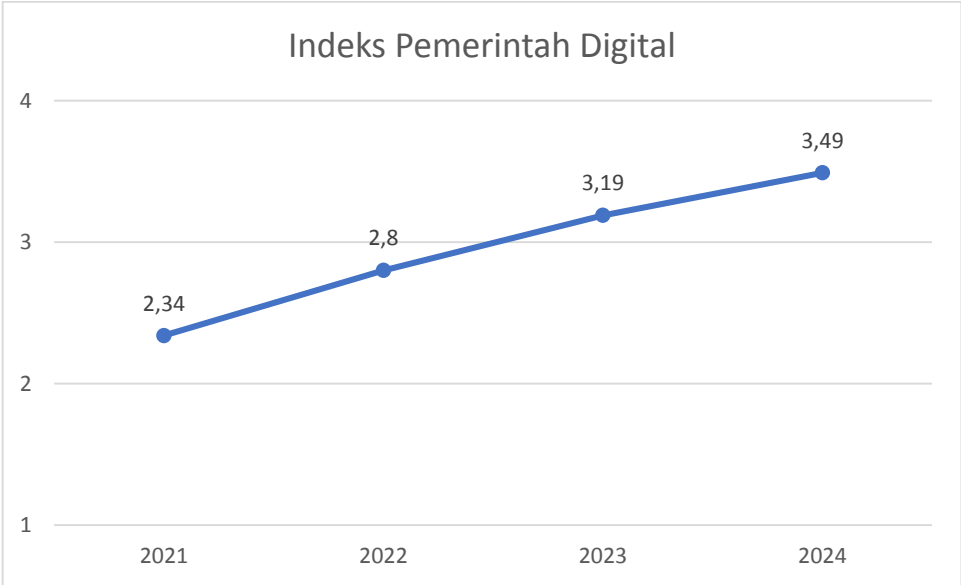
Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa dari 469 desa dan 25 kelurahan yang ada di Kabupaten Purworejo, masih terdapat 16 desa di 7

kecamatan yang belum seluruh wilayahnya terjangkau oleh sinyal komunikasi, baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet. Berdasarkan hasil pemetaan daerah *blank spot* dan layanan internet dalam mendukung transformasi digital masih terdapat 15 fasilitas pendidikan dan 1 fasilitas kesehatan yang belum terlayani oleh sinyal internet.

2) Indeks Pemerintah Digital

Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) merupakan salah satu indikator penting yang dinilai oleh Kementerian PANRB untuk mengukur kemajuan digitalisasi pemerintahan daerah. Penilaian ini menggunakan 35 indikator yang dikelompokkan dalam 9 aspek. Indeks Pemdi merupakan pembaruan/kelanjutan dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dalam indeks SPBE domain yang dinilai yaitu kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE. Sedangkan dalam Indeks Pemdi aspek yang dinilai meliputi Strategi dan Rencana, Tata Kelola dan Manajemen, Teknologi Digital, Audit Teknologi Digital, Keamanan Siber, Kapabilitas dan Budaya Digital, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi, Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah, serta Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah.

Indeks SPBE / Indeks Pemdi di Kabupaten Purworejo tahun 2021-2024 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2021, skornya yaitu 2,34 dan meningkat bertahap di setiap tahun hingga mencapai 3,49 di tahun 2024. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.



Gambar 2. 69 Indeks Pemerintah Digital Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2024

Sumber: KemenPANRB, 2025

3) Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Komunikasi dan informatika merupakan urusan yang memiliki kewenangan untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui sistem yang terintegrasi. Kementerian

Komunikasi dan Informatika mendorong badan publik, baik di pusat maupun daerah untuk meningkatkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo selaku OPD yang mengelola keterbukaan informasi di daerah juga menyediakan berbagai informasi publik. Untuk mengukur keberhasilan dalam hal ini, dilakukan pengukuran atas Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi tolok ukur tingkat transparansi pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya.

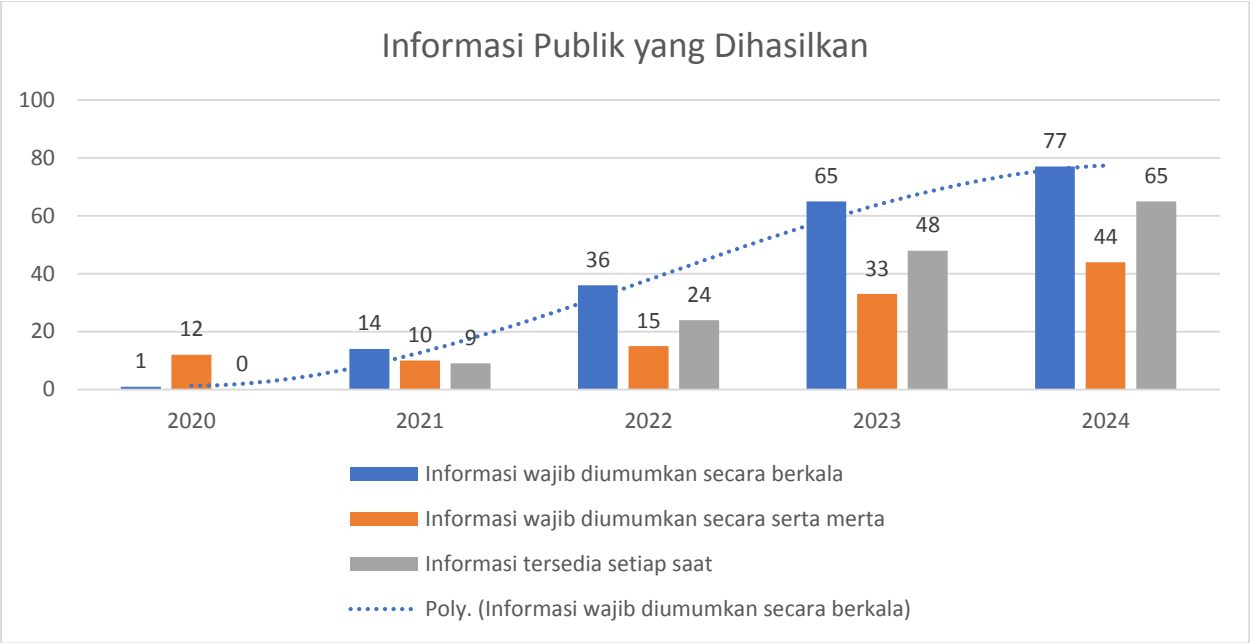
Keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan interaksi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut adalah implementasi demokrasi yang menyeluruh, mengharuskan pengetahuan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan informasi faktual, harus terpenuhi. Oleh karena itu, Pemerintah dengan dukungan masyarakat, wajib membangun sistem komunikasi yang sehat, sebagai upaya meningkatkan kualitas ruang dan komunikasi publik demi terciptanya sistem penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*). Gambaran mengenai perwujudan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 94 Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Purworejo

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Skor Keterbukaan Informasi Publik	35,8	57,43	65,98	82,22	84,66
Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Informatif	Kurang Informatif	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif

Sumber: Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo, 2025

Terlihat dalam data bahwa Kabupaten Purworejo saat ini masuk dalam kategori “Menuju Informatif” dengan nilai 84,66. Naik dari tahun 2020 yang bernilai 35,8. Peningkatan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Purworejo disebabkan oleh meningkatnya informasi yang diumumkan kepada masyarakat. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Adapun capaian dari Kabupaten Purworejo dapat dilihat sebagai berikut.



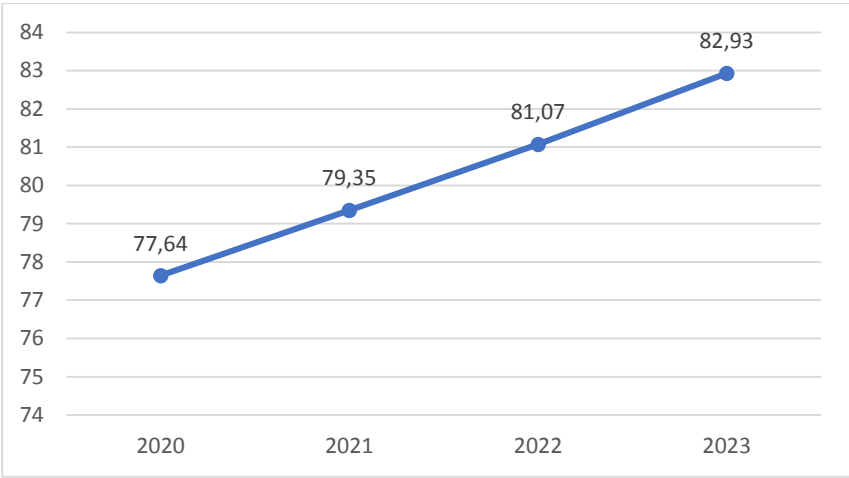
Gambar 2. 70 Jumlah Informasi Publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinkominfoستاساندي Kabupaten Purworejo, 2025

Terlihat bahwa, Pemerintah Kabupaten Purworejo menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Hingga tahun 2024, sebanyak 77 informasi wajib diumumkan secara berkala, mencakup berbagai aspek seperti informasi terkait Badan Publik, kegiatan dan kinerja Badan Publik, laporan keuangan, serta informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, Badan Publik juga wajib mengumumkan secara serta merta informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, dengan total 44 informasi yang telah dikeluarkan hingga tahun 2024.

Informasi yang tersedia setiap saat meliputi daftar seluruh Informasi Publik yang dikuasai, hasil keputusan dan pertimbangannya, seluruh kebijakan beserta dokumen pendukung, rencana kerja proyek termasuk perkiraan pengeluaran tahunan, perjanjian dengan pihak ketiga, informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh Pejabat Publik dalam pertemuan terbuka, prosedur kerja pegawai terkait pelayanan masyarakat, serta laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hingga tahun 2024, sebanyak 65 informasi tersedia setiap saat telah dikeluarkan.

Selain itu, aspek komunikasi dan informasi dapat dilihat dari persentase penduduk yang menguasai atau memiliki telepon seluler. Kondisi di Kabupaten Purworejo dapat dilihat sebagai berikut.

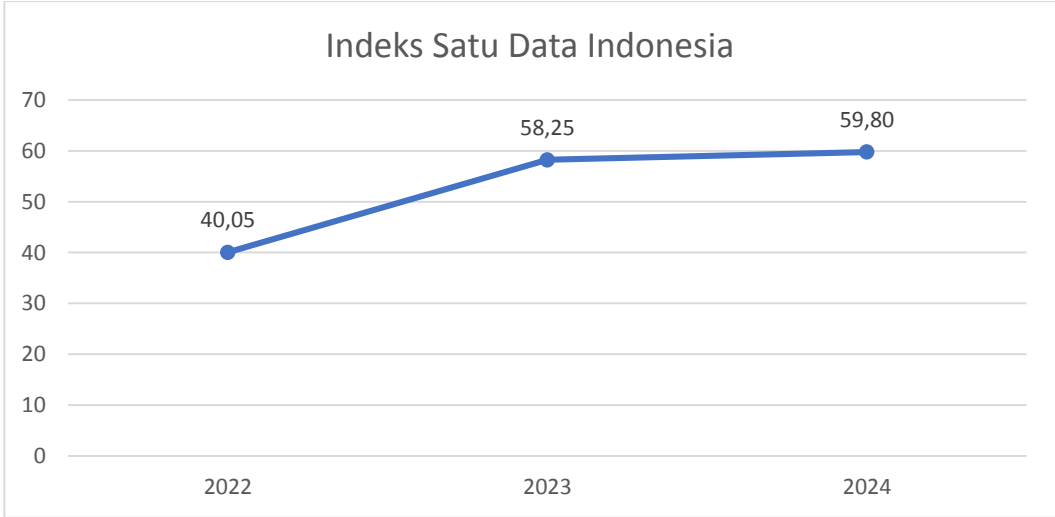


Gambar 2. 71 Persentase Penduduk yang Menguasai atau Memiliki Telepon Seluler (HP) di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2023
Sumber: Susenas dan Data SDGs Kabupaten Purworejo (diolah), 2024

Berdasarkan grafik tersebut dapat dipahami bahwa secara umum persentase penduduk yang memiliki atau menguasai penggunaan telepon seluler pada tahun 2023 masih hanya 82,93 persen. Hal ini berarti masih ada sekitar 17,07 persen penduduk yang belum memiliki atau menguasai penggunaan telepon seluler. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas penduduk telah terhubung dengan teknologi komunikasi modern, masih terdapat sebagian yang belum menikmati manfaat penuh dari penggunaan telepon seluler.

4) Indeks Satu Data Indonesia

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan penguatan sistem data yang terintegrasi melalui pelaksanaan program Satu Data Indonesia. Indeks Satu Data Indonesia (ISDI) menjadi salah satu indikator dalam penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah yang menggambarkan kualitas integrasi data sektoral antar perangkat daerah. Berikut merupakan Indeks Satu Data Indonesia di Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024.



Gambar 2.72 Indeks Satu Data Indonesia Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

Berdasarkan grafik di atas, Indeks SDI Kabupaten Purworejo masih cukup rendah yaitu 40,05 pada tahun 2022. Namun, terjadi peningkatan

signifikan pada tahun 2023 dengan indeks mencapai 58,25, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran dan komitmen perangkat daerah dalam menyediakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2024, di mana indeks SDI Kabupaten Purworejo naik menjadi 59,80. Kenaikan ini, meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya, tetap menunjukkan adanya konsistensi dalam upaya perbaikan tata kelola data, termasuk penguatan peran walidata, peningkatan kualitas metadata, serta integrasi data sektoral dalam portal satu data daerah.

Satu Data Indonesia juga mencakup urusan statistik. Urusan statistik merupakan urusan yang memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan data statistik yang akurat dan dapat diandalkan bagi daerah. Urusan ini memiliki tugas pokok untuk memastikan ketersediaan data statistik yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek pembangunan daerah. Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, diperlukan data yang akurat supaya perencanaan pembangunan benar-benar terukur, efektif, efisien, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, ketersediaan data statistik merupakan sesuatu yang mutlak ada dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki dokumen statistik yang menyediakan data-data terkait pembangunan di Kabupaten Purworejo, yang sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan juga untuk keperluan lainnya.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian terkait Urusan Statistik pada tahun 2025 adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Program ini memiliki indikator utama yaitu Cakupan Ketersediaan Statistik Dasar dan Sektoral. Melalui program ini, diharapkan capaian indikator pada urusan statistik dapat terwujud secara optimal, memastikan bahwa data statistik yang tersedia mencakup berbagai sektor penting yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya data yang komprehensif dan up-to-date, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purworejo dapat dilakukan dengan lebih baik dan tepat sasaran. Berikut capaian indikator pada urusan statistik.

Tabel 2. 95 Capaian Indikator Urusan Statistika Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan Ketersediaan Statistik Dasar dan Sektoral	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah dokumen statistik sektoral dan daerah yang telah disusun/ diterbitkan	3	3	5	4	4
3	Jumlah dokumen statistik sektoral dan daerah yang seharusnya disusun/ diterbitkan	3	3	5	4	4

Sumber: Dinkominfoستاساندي Kabupaten Purworejo, 2024

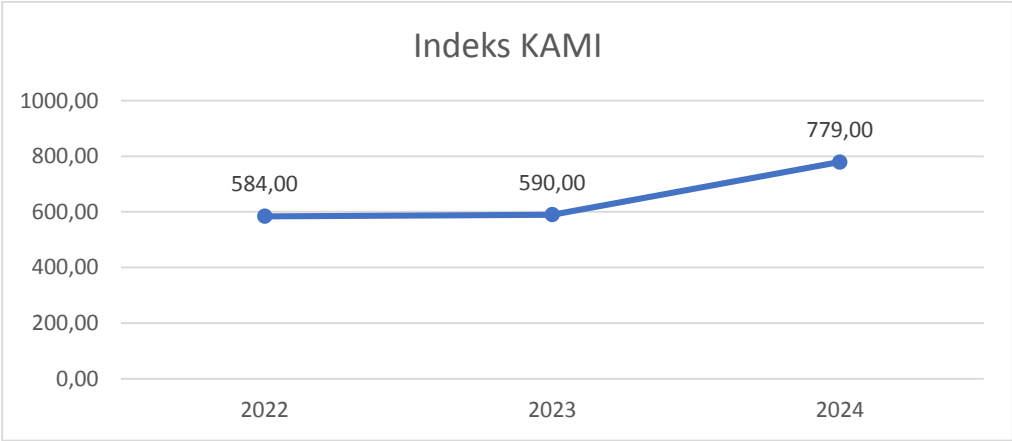
Capaian indikator pada urusan statistik di Kabupaten Purworejo menunjukkan perkembangan yang signifikan dan konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Cakupan ketersediaan statistik dasar dan sektoral mencapai 100% setiap tahunnya sejak tahun 2020, menunjukkan komitmen yang kuat dalam penyediaan data yang komprehensif dan akurat. Jumlah dokumen

statistik sektoral dan daerah yang telah disusun dan diterbitkan juga sesuai dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya, dengan angka yang stabil pada tahun 2020 dan 2021 sebanyak 3 dokumen, meningkat menjadi 5 dokumen pada tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 4 dokumen pada tahun 2023 dan 2024.

Dokumen statistik sektoral dan daerah yang telah disusun oleh Dinkominfoasandi hingga akhir tahun 2024 meliputi Buku Kompilasi Statistik Sosial, Buku Kompilasi Statistik Ekonomi, serta Album Peta. Ketiga dokumen ini dipublikasikan melalui laman <http://satudata.purworejokab.go.id>, yang memudahkan akses bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Meski capaian ini sangat positif, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan data yang disediakan tetap relevan, up-to-date, dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, upaya terus-menerus dalam pembaruan data, peningkatan kualitas, dan penyebaran informasi harus menjadi prioritas agar dapat mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien di Kabupaten Purworejo.

5) Indeks KAMI

Dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan yang andal dan aman secara digital, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah melaksanakan penguatan layanan persandian dan keamanan informasi melalui pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang disusun oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Indeks ini menggambarkan seberapa matang dan komprehensif pengelolaan keamanan informasi diterapkan dalam infrastruktur pemerintahan daerah. Berikut merupakan capaian Indeks KAMI Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024.



Gambar 2. 73 Indeks KAMI Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024

Sumber: BSSN, 2025

Berdasarkan grafik di atas, Indeks KAMI Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, skor indeks tercatat sebesar 584 kemudian mengalami peningkatan menjadi 590 di tahun 2023. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan menjadi 779. Hal tersebut menandakan penguatan kebijakan dan teknis keamanan informasi berupa langkah-langkah strategis dalam pengelolaan risiko siber, pengamanan data aset pemerintah, serta penerapan sistem elektronik yang lebih aman.

Urusan persandian merupakan upaya penting untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi pemerintah. Sehingga, keberhasilan urusan ini dicirikan oleh kemampuan untuk melindungi data dan informasi dari akses yang tidak sah, serta memastikan integritas dan keaslian informasi yang dikelola oleh pemerintah. Program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian terkait Urusan Persandian pada tahun 2025 adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator program berupa persentase layanan persandian yang efektif dan efisien. Berikut capaian indikator pada urusan persandian.

Tabel 2. 96 Capaian Indikator Urusan Persandian Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Layanan Persandian	-	-	100%	100%	100%
2	Jumlah informasi yang disandikan	-	-	2	2	2
3	Jumlah layanan persandian	-	-	2	2	2

Sumber: Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo, 2024

Capaian indikator pada urusan persandian di Kabupaten Purworejo menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak tahun 2022. Sebelum tahun tersebut, dari 2020 hingga 2021, layanan persandian meliputi pelayanan penerimaan dan penyampaian berita sandi dari pusat dan provinsi serta layanan telekomunikasi berita telepon/fax antar perangkat daerah. Mulai tahun 2022, Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo telah meningkatkan kapabilitasnya dengan membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan menyediakan layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

CSIRT merupakan tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan serta aktivitas insiden keamanan siber. Pembentukan CSIRT bertujuan untuk melakukan penyelidikan komprehensif serta melindungi sistem dan data dari insiden keamanan siber. Selain itu, CSIRT juga aktif dalam penilaian dan deteksi ancaman, perencanaan mitigasi, serta tinjauan arsitektur keamanan informasi organisasi. Tim ini berperan penting dalam memastikan bahwa layanan persandian tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif dalam mengelola ancaman keamanan siber.

Layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE), yang mengacu pada UU ITE Pasal 1 angka 12, adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. TTE berfungsi untuk memastikan integritas dan keaslian dokumen elektronik yang digunakan dalam transaksi dan komunikasi pemerintahan. Dengan adanya TTE, efisiensi administrasi dan kepercayaan terhadap dokumen elektronik di lingkungan pemerintahan dapat meningkat secara signifikan.

Meskipun capaian indikator pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan persentase layanan persandian yang mencapai 100% dan jumlah layanan serta informasi yang disandikan sebanyak 2, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa seluruh sistem dan data di Kabupaten Purworejo benar-benar terlindungi dari ancaman siber. Keberlanjutan dan peningkatan kapabilitas CSIRT serta penyebaran penggunaan TTE perlu terus didorong

untuk menjaga keamanan dan integritas informasi. Implementasi program ini memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, CSIRT, dan seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan terpercaya dalam pengelolaan informasi dan komunikasi.

e. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1) Pembentukan Modal Tetap Bruto

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu kunci pengungkit pembangunan ekonomi. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Dalam perekonomian nasional besaran investasi yang muncul dalam sebuah wilayah tercatat dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), sementara itu dalam pemerintahan yang tercatat dalam data investasi adalah investasi yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun asing. Realisasi PMTB di Kabupaten Purworejo mengalami penurunan pada tahun 2020 yang diakibatkan pandemi covid-19, kemudian meningkat kembali pada tahun 2021.

Tabel 2. 97 PMTB Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	PMTB ADHB (Miliar Rupiah)	4.864,59	5.275,30	5.633,87	5.962,79	6.483,47
2	PMTB ADHK (Miliar Rupiah)	3.260,74	3.498,22	3.625,65	3.768,97	3.981,03
3	Distribusi PMTB	26,09	26,89	26,39	25,71	26,14
4	Laju PMTB	-6,71	7,28	3,64	3,95	5,63

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2025

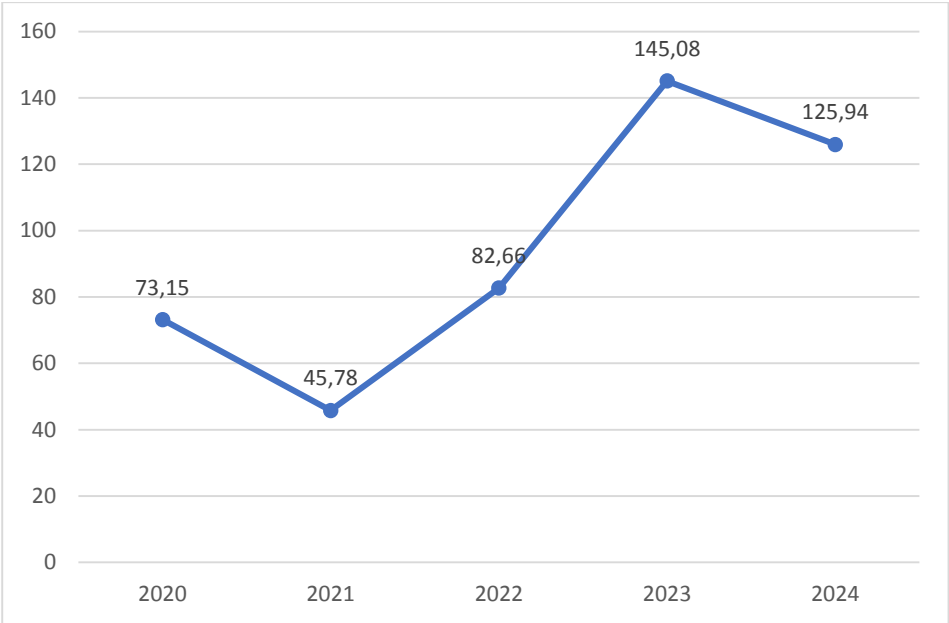
Pada tahun 2020 terjadi kontraksi 6,71 persen, disebabkan oleh dampak pandemi yang berpengaruh terhadap nilai investasi. Namun, pada tahun 2021 hingga 2024, nilai PMTB telah mengalami peningkatan laju sebesar 5,63%. Sementara itu, di sisi kontribusi, pengeluaran untuk kapital (PMTB) di Kabupaten Purworejo berperan cukup besar dimana berada pada posisi ke-2 setelah konsumsi rumah tangga. PMTB dalam bentuk bangunan memberikan proporsi lebih besar dibanding non-bangunan dalam pembentukan modal tetap bruto. Rata-rata perbandingan antara kedua komponen ini adalah 85 persen untuk PMTB bangunan dan 15 persen untuk non-bangunan. Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB.

Untuk mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan investasi dan berkembangnya sektor riil, diperlukan berbagai kebijakan pemerintah, meliputi penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, stabilitas politik di daerah, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya mendukung penciptaan kebijakan pemerintah yang pro investasi dan dapat mendorong berkembangnya dunia usaha. Kebijakan tersebut adalah penciptaan iklim kondusif bagi investor dalam dan luar negeri dalam segala hal, seperti meningkatnya jaminan kepastian hukum, promosi terpadu,

intermediasi perbankan, pelatihan keterampilan tenaga kerja, penyediaan prasarana dan sarana dan kebijakan tata ruang daerah yang konsisten. Pada tahun 2021 telah ditetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041 yang tentunya akan memberikan kepastian hukum di bidang tata ruang.

2) Realisasi Penanaman Modal

Selain PMTB, data penanaman modal dapat dilihat melalui realisasi penanaman modal yang dicatat oleh DPMPTSP Kabupaten Purworejo. Berikut data realisasi penanaman modal di Kabupaten Purworejo pada tahun 2020-2024.



Gambar 2. 74 Realisasi Penanaman Modal di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)
Sumber: OSS, 2025

Data di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penanaman modal yang cukup pesat di Kabupaten Purworejo dari tahun 2020-2024. Realisasi penanaman modal di Kabupaten Purworejo. Realisasi penanaman modal meningkat pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya karena pada tahun 2020 telah ditetapkannya UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan pada usaha mikro untuk dapat mendapatkan Nomor Induk Berusaha. Selain itu, melalui UU Cipta Kerja, kriteria UMKM berdasarkan Modal Dasar telah diubah dimana usaha mikro kriterianya menjadi modal dasar di bawah Rp 1 miliar, dari sebelumnya di bawah Rp 50 juta. Usaha kecil kriterianya adalah mereka yang memiliki modal dasar Rp 1 miliar - Rp 5 miliar, dari sebelumnya hanya Rp 50 juta - Rp 500 juta. Kemudian kriteria modal dasar untuk usaha menengah menjadi Rp 5 miliar - Rp 10 miliar dari sebelumnya hanya Rp 500 juta - Rp 10 miliar. Sementara untuk usaha besar tidak berubah, yakni dengan kriteria modal dasar di atas Rp 10 miliar. Sementara itu, data yang dilaporkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan jumlah yang lebih rendah. Berikut data penanaman modal di Kabupaten Purworejo berdasarkan LKPM.

Tabel 2. 98 Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Ttahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Juta Rp)	72.488,9	44.815,3	67.572,00	138.975,3	125.609,5
	Jumlah Proyek PMDN	74	126	409	296	777
2	Realisasi Penanaman Modal Asing (Juta Rp)	656,64	972,36	3.667,86	229,3	326,9
	Jumlah Proyek PMA	7	3	3	8	18
3	Jumlah Realisasi Penanaman Modal (Juta Rp)	73.145,54	45.787,66	71.239,86	139.204,6	125.963,4
4	Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal (%)	294,06	-37,40	55,59	95,40%	-9,51%

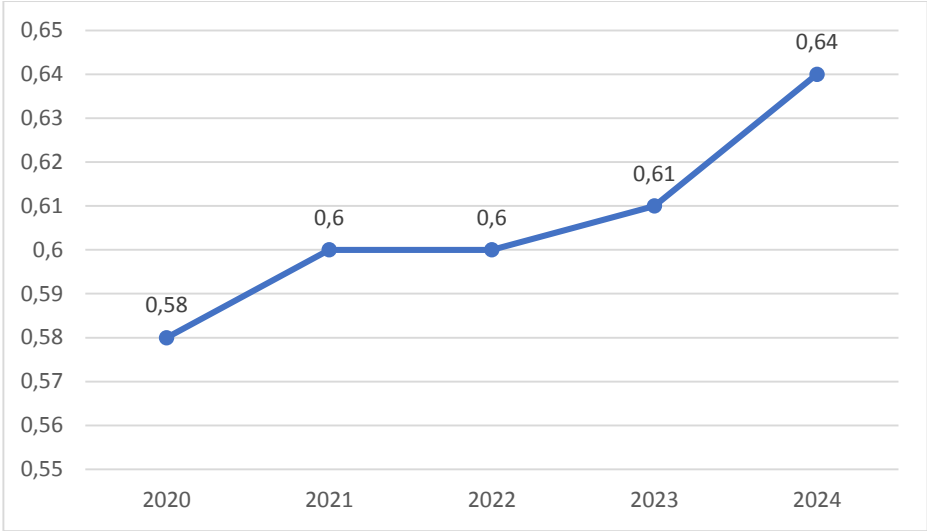
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Purworejo, 2024

Realisasi investasi di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024 dan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan oleh dominasi pelaku usaha mikro yang memiliki modal usaha di bawah 1 miliar rupiah dan belum diwajibkan melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kehadiran beberapa Proyek Strategis Nasional seperti Bendungan Bener, Bandara YIA, dan KSPN Borobudur belum mampu meningkatkan investasi secara signifikan karena promosi investasi yang kurang efektif, kesiapan infrastruktur pendukung yang belum optimal, dan investasi usaha mikro yang belum berorientasi pada peningkatan produktivitas dan skala usaha. Rendahnya nilai investasi juga memberikan citra buruk bahwa Kabupaten Purworejo tidak ramah investasi.

Dalam hal perizinan investasi, Kabupaten Purworejo telah mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mulai beroperasi pada tahun 2022 dengan menyediakan 118 layanan perizinan secara terpadu untuk menjamin kepastian hukum dan transparansi dalam proses perizinan investasi. Namun, penyediaan MPP dan kehadiran Proyek Strategis Nasional tidak otomatis meningkatkan realisasi penanaman modal tanpa dukungan peningkatan aksesibilitas seperti jaringan jalan, listrik, air bersih, internet, dan layanan perbankan. Selain itu, kondisi sosial politik yang stabil, ketenteraman dan ketertiban yang kondusif, sikap masyarakat yang toleran, upah tenaga kerja yang kompetitif, lokasi strategis, dan pangsa pasar yang luas juga menjadi faktor penting dalam menarik investor ke Kabupaten Purworejo.

3) Ekspor Barang dan Jasa

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Purworejo, ekonomi Kabupaten Purworejo masih tergerus dengan tingginya nilai impor yang besarnya sampai dengan tahun 2024 masih di atas ekspor Purworejo. Angka ini ditunjukkan dengan data *Trade Balance*. *Trade balance* merupakan rasio ekspor dibandingkan dengan impor dimana semakin mendekati angka 1 maka menunjukkan nilai ekspor akan seimbang dengan nilai impor.



Gambar 2. 75 Trade Balance Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2025

Perkembangan *trade balance* Kabupaten Purworejo sejak tahun 2020 menunjukkan tren peningkatan. Angka *trade balance* yang awalnya 0,58 pada tahun 2020 meningkat sedikit demi sedikit hingga mencapai 0,64 pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa nilai ekspor semakin mendekati nilai impor. Meskipun meningkat, namun nilai ekspor yang dibawah nilai impor menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo masih bergantung pada barang-barang dari luar daerah, khususnya produk kebutuhan pribadi dan rumah tangga.

Kondisi ini menggambarkan ketergantungan masyarakat Purworejo terhadap barang-barang dari luar daerah, dengan barang-barang yang diekspor sebagian besar berupa bahan mentah seperti hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan, yang nilainya lebih rendah dibandingkan barang-barang yang diimpor. Dengan kata lain, meskipun terdapat ekspor, nilai barang yang diekspor masih kalah dibandingkan dengan barang yang diimpor, menyebabkan ketidakseimbangan dalam perdagangan antar daerah. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk meningkatkan nilai tambah pada produk yang diekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor untuk memenuhi kebutuhan lokal. Selain itu, Kabupaten Purworejo juga melakukan ekspor ke luar negeri. Berikut merupakan data ekspor barang ke luar negeri yang berasal dari Kabupaten Purworejo.

Tabel 2. 99 Nilai Ekspor di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Tahun	Nilai Ekspor (Rp)
1	2	3
1	2020	188.278.899.825
2	2021	154.389.773.030
3	2022	124.882.751.056
4	2023	319.851.902.959
5	2024	254.993.224.925

Sumber : IPSKA Prov. Jawa Tengah

Data ekspor di atas merupakan data ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) Kabupaten Purworejo, diluar data tersebut masih banyak ekspor kabupaten purworejo yang tidak menggunakan SKA seperti ekspor mainan anjing dari kayu kopi produk olahan kelapa yang ekspornya melalui daerah lainnya. Untuk data ekspor yang menggunakan SKA Kabupaten

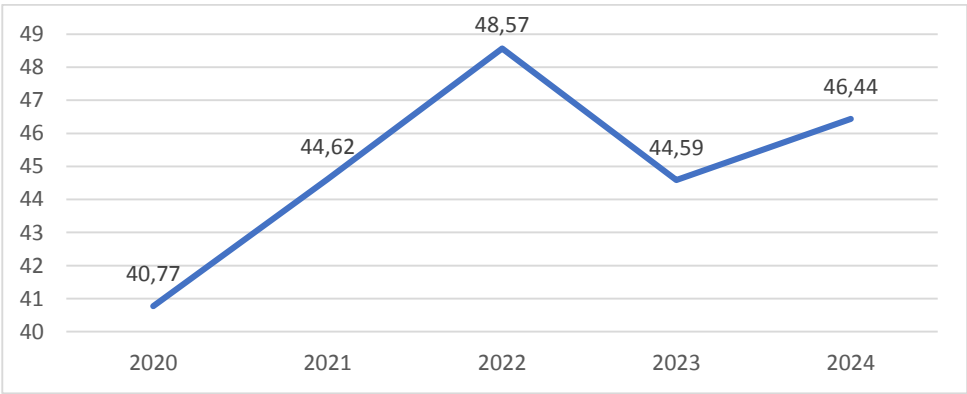
Purworejo terdiri dari olahan kayu seperti plywood, barecorewood, chipwood dari PT. Indotama, kayu sono keling dari CV. Sono Indah dan garmen dari PT. Unggul rejo wasono. Potensi peningkatan nilai ekspor masih bisa dilakukan melalui mendorong pertumbuhan industri lokal pada beberapa komoditas unggulan kabupaten Purworejo diminati Pasar global seperti olahan kelapa (brown sugar, minyak kelapa, VCO, cocofiber) kopi, produk kripik dan kerajinan.

f. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1) Indeks Infrastruktur

Perhitungan indeks Infrastruktur daerah menjadi sangat penting karena menjadi instrumen strategis untuk menilai dan mengarahkan pembangunan daerah. Indeks infrastruktur daerah pada dasarnya merupakan alat ukur komposit yang digunakan untuk menilai kondisi, ketersediaan, kualitas dan pemerataan infrastruktur di suatu daerah. Melalui perhitungan indeks infrastruktur daerah akan diketahui sejauhmana tingkat ketersediaan infrastruktur dan kualitas layanan publik di Kabupaten Purworejo. Selain itu melalui perhitungan indikator tersebut, dapat diketahui daya saing daerah dan evaluasi terhadap pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Purworejo. Perhitungan tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauhmana pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purworejo. Dengan kata lain, Indeks Infrastruktur daerah berfungsi sebagai kompas pembangunan, membantu pemerintah dalam memprioritaskan pembangunan, mengukur capaian, mengurangi tingkat kesenjangan, meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat daya saing daerah.

Terdapat 7 (tujuh) komponen yang menjadi dasar perhitungan indeks infrastruktur daerah di Kabupaten Purworejo yaitu persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten; Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan; Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman; Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak; Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten; Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah; dan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet. Berikut indeks infrastruktur daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2020-2024.



Gambar 2. 76 Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2025

Selama kurun waktu tahun 2020 - 2024, indeks infrastruktur daerah Kabupaten Purworejo, nilainya cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020-2024, nilainya meningkat sebesar (+7,8); akan tetapi pada tahun selalu mengalami sebesar (-3,9). Pada tahun 2024, indeks infrastruktur daerah kembali mengalami peningkatan signifikan (+1,85) hingga mencapai nilai sebesar 46,44 pada tahun 2024. Lebih lengkap, hasil capaian kondisi infrastruktur daerah per komponen dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2. 100 Kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

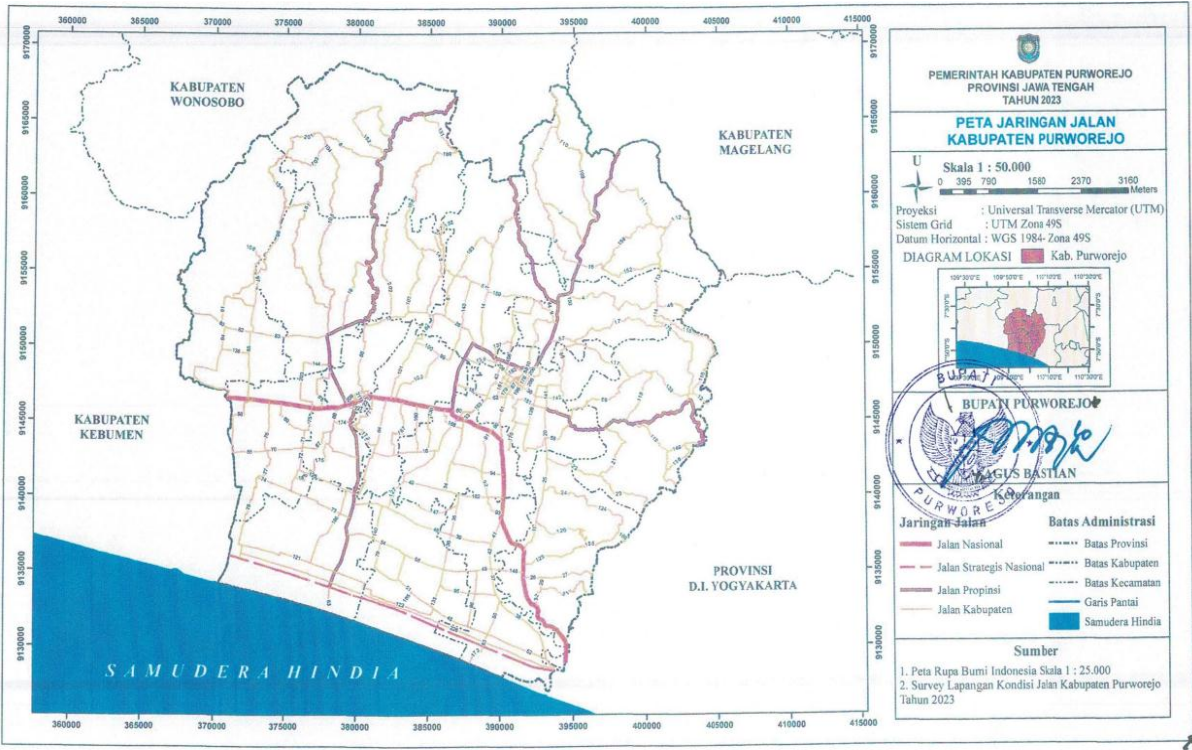
No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Infrastruktur Daerah	40,77	44,62	48,57	44,59	46,44
2	Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten	78,89	80,01	81,75	63,05	63,28
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	13,43	17,17	19,56	22,43	29,21
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	2,3	2,4	2,5	3,7	4,26
5	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	66,27	67,04	67,27	67,68	68,16
6	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	33,5	33.90	34.40	34,8	36,56
7	Persentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah	41,75	43,62	49,11	49,15	49,92
8	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	49,27	57,45	71,25	71,35	73,66

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2024

Pada tahun 2024, terdapat penurunan signifikan indeks infrastruktur daerah. Hal ini disebabkan karena menurunnya persentase panjang jalan permukaan mantap kewenangan kabupaten, dimana semula 81,75% (pada tahun 2022) menjadi 63,28% pada tahun 2023. Sementara itu, komponen lain mengalami kenaikan meskipun nilainya kurang signifikan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan prioritas penganggaran pada peningkatan jalan kabupaten sebagai tolok ukur jalan dalam kondisi mantap.

Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten

Urusan Bina Marga berkaitan dengan urusan penyelenggara jalan yang merujuk pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022. Pada peraturan tersebut jalan dikelompokkan menjadi 2 yaitu Jalan Umum dan Jalan Khusus. Jalan umum dikelompokkan ke dalam Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Kota.



Gambar 2. 77 Peta Jaringan Jalan di Kabupaten Purworejo

Sumber: Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/497/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Purworejo

Total panjang jalan yang menjadi kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 adalah sepanjang 801,055 km. Data jalan di Kabupaten Purworejo berdasarkan kewenangannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 101 Panjang Jalan (Km) Berdasarkan Kewenangan Tahun 2020-2024

No	Wilayah	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jalan Kabupaten	769,25	769,25	769,25	757,79	757,79
2	Jalan Provinsi	127,23	127,23	127,23	209,78	209,78
3	Jalan Nasional	41,56	41,56	41,56	41,25	41,25

Sumber:

- 1) SK Menteri PUPR No: 367/KPTS/M/2023
- 2) SK Gubernur Jawa Tengah No: 622/ 12 Tahun 2023
- 3) SK Bupati Purworejo No: 160.18/497/2023

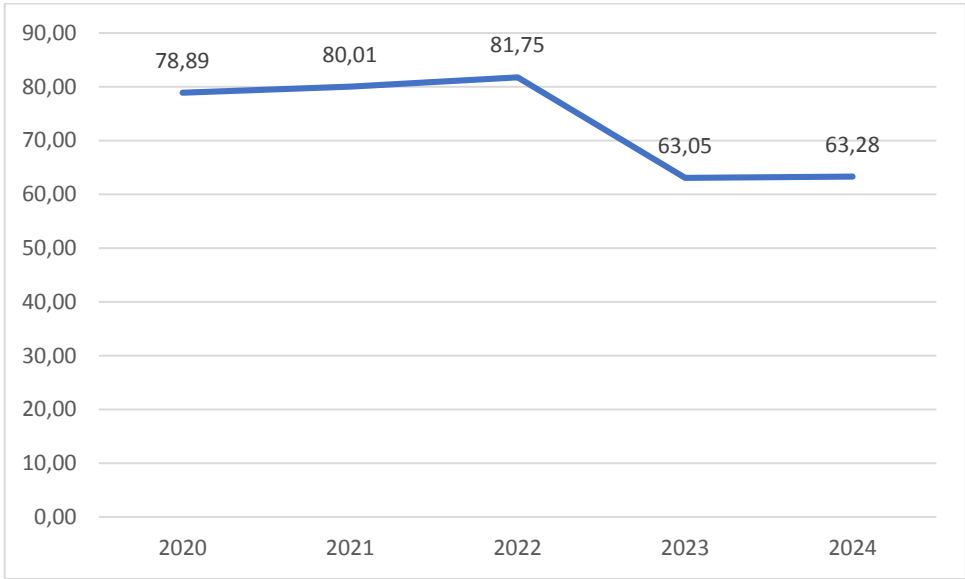
Salah satu aspek indeks infrastruktur yaitu Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap (baik dan sedang). Persentase panjang jalan permukaan mantap di Kabupaten Purworejo mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap di Kabupaten Purworejo pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 102 Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Panjang jalan kondisi baik (km)	248,00	227,96	214,09	146,22	119,94
2	Panjang jalan kondisi sedang (km)	358,89	387,51	414,78	331,570	359,58
3	Panjang jalan kondisi rusak ringan (km)	101,60	94,35	97,74	163,840	164,28
4	Panjang jalan kondisi rusak berat (km)	60,760	59,44	42,65	116,160	113,99
5	Total Panjang jaringan jalan kabupaten (km)	769,25	769,25	769,25	757,79	757,79
6	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik Sedang	78,89%	80,01%	81,75%	63,05%	63,28%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo, 2025

Berikut merupakan persentase panjang jalan permukaan mantap kewenangan Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024.



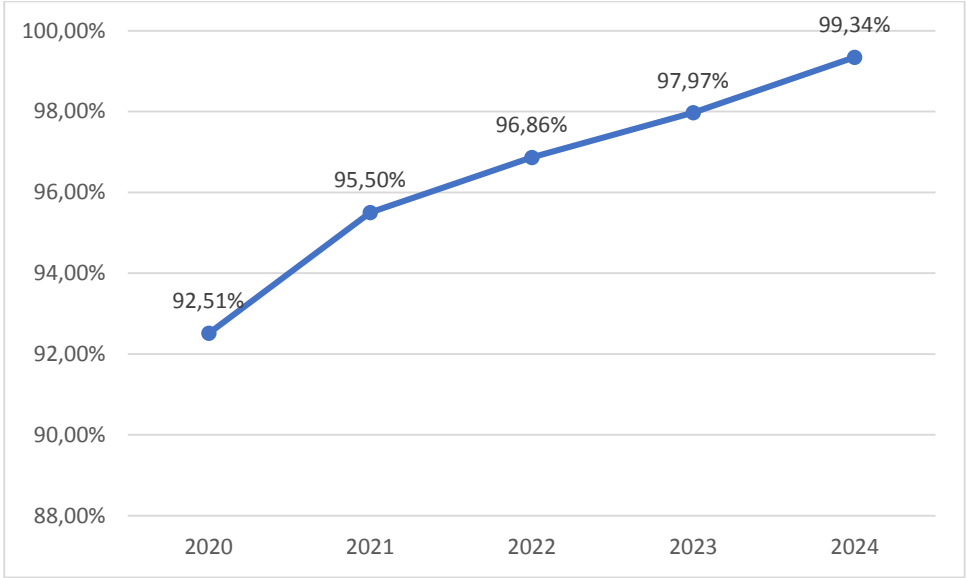
Gambar 2. 78 Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo, 2025

Pada tahun 2020, panjang jalan mantap tercatat sebesar 78,89% dari total jalan kabupaten. Angka ini mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai 81,75% pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas jaringan jalan melalui program penyelenggaraan jalan. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan menjadi 63,05%, dan sedikit meningkat menjadi 63,28% pada tahun 2024. Pengukuran kondisi jalan dilakukan menggunakan Provinsi/ Kabupaten Management System (PKRMS) yang menggunakan kriteria pengukuran lebih detail dan memasukkan kriteria kelengkapan jalan sehingga mengurangi tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Purworejo secara signifikan.

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum yang dikelola secara aman, nilainya tiap tahun selalu meningkat. Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo yang sudah mengakses air minum aman sebanyak 102.664 KK atau sekitar 28,96%. Sedangkan persentase akses air minum layak dan akses air minum aman di Kabupaten Purworejo dalam beberapa tahun terakhir (2020-2024) adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 79 Akses Air Minum Layak Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024 (diolah)

Capaian akses air minum layak dan akses air minum perpipaan di Kabupaten Purworejo sudah cukup baik, yaitu di angka 99,34%. Namun demikian, capaian akses air minum aman masih rendah karena belum semua masyarakat Kabupaten Purworejo terlayani akses air minum aman melalui sistem perpipaan. Masyarakat wilayah perkotaan mengakses air minum melalui layanan PDAM, sedangkan masyarakat wilayah pedesaan mengakses air minum secara mandiri atau melalui program-program yang didanai melalui APBN, DAK maupun APBD provinsi seperti Program Pamsimas, DAK SLBM, SPAM Perdesaan dan Inpres Air Minum. Untuk melayani kurang lebih 31.628 KK yang berada di wilayah perkotaan, PDAM Tirta Perwita Sari Kabupaten Purworejo mengoperasikan 6 (enam) cabang, yaitu:

- a) Cabang Kota Purworejo
Kapasitas terpasang 194 lps; kapasitas produksi 164,3 lps; kapasitas distribusi: 164,3 lps.
Area layanan mencakup seluruh kelurahan di Kota Purworejo, dan desa-desa di luar Kota Purworejo yaitu Desa Candisari, Desa Grantung, Kelurahan Sucen Juru Tengah, Kelurahan Kledung Karangdalem, Kelurahan Kledung Kradenan di Kecamatan Banyuurip, Desa Gintungan dan Desa Lugosobo di Kecamatan Gebang.
- b) Cabang Bener
Kapasitas terpasang 21 lps; kapasitas produksi 11,4 lps; kapasitas distribusi: 11,4 lps. Area layanan mencakup Wilayah Desa Bener, Desa

Bleber, Desa Kaliboto, Desa Kaliurip, Desa Kedung Pucang Kecamatan Bener dan Desa Mudalrejo, Desa Kebon Gunung di Kecamatan Bener.

c) Cabang Loano

Kapasitas terpasang 5 lps; kapasitas produksi 3,14 lps; kapasitas distribusi: 3,14 lps. Area layanan mencakup Desa Sedayu, Desa Banyuasin Kembaran, Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano

d) Cabang Purwodadi

Kapasitas terpasang 45 lps; kapasitas produksi 42,05 lps; kapasitas distribusi: 42,05 lps

Area layanan mencakup Kelurahan Boro Wetan, Desa Popongan, Desa Cengkawakrejo Kecamatan Banyuurip, Desa Keduren, Desa Bragolan, Desa Jenar Lor, Desa Jenar Kidul, Desa Jenar Wetan, Desa Purwosari, Desa Sumbersari, Desa Purwodadi, dan Desa Guyangan di Kecamatan Purwodadi.

e) Cabang Banyuurip

Kapasitas terpasang 18 lps; kapasitas produksi 18,25 lps; kapasitas distribusi: 18,25 lps (mendapat supply 0,25 lps dari Cabang Purworejo dan Cabang Purwodadi). Area layanan mencakup Desa Condongsari, Desa Sumbersari, Desa Candingasinan, Desa Pakisrejo, Desa Tegalrejo, Desa Banyuurip, Desa Tegalkuning dan Desa Sokowaten.

f) Cabang Kutoarjo

Kapasitas terpasang 50 lps; kapasitas produksi 39,18 lps; kapasitas distribusi: 39,18 lps

Area layanan mencakup seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Kutoarjo dan sebagian desa di Kecamatan Bayan

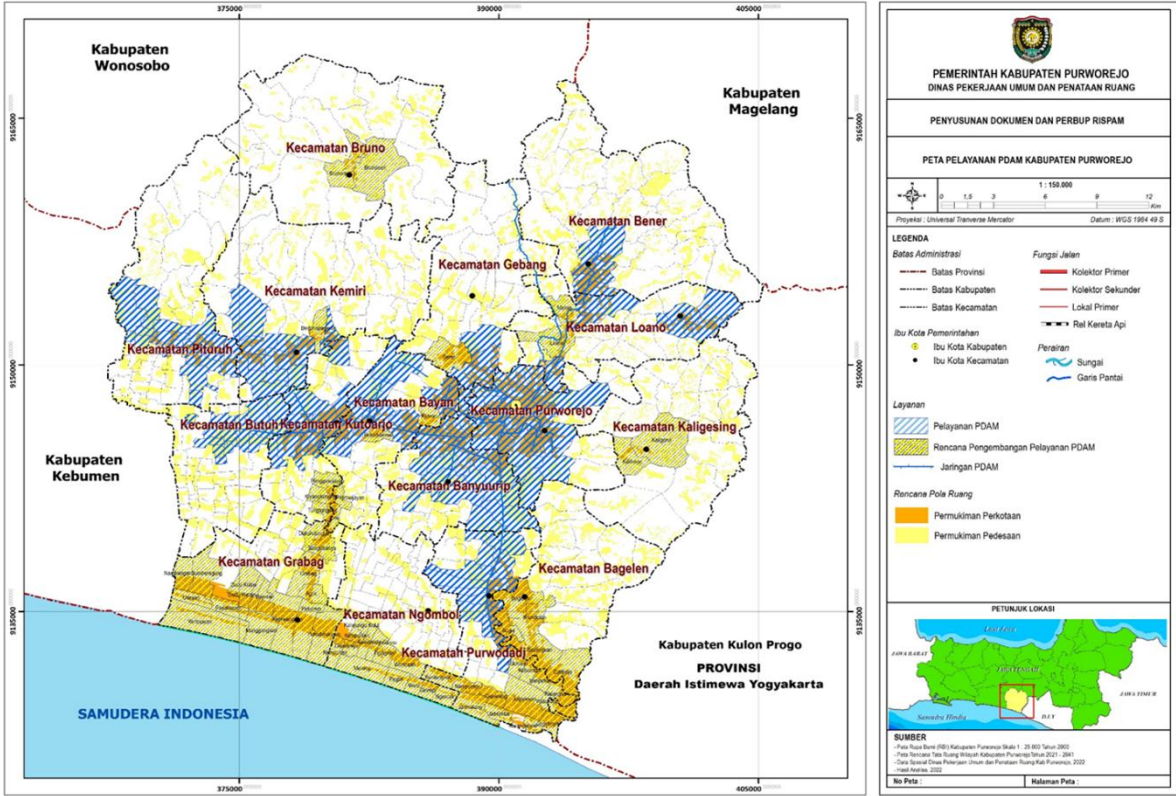
g) Cabang Pituruh dan Kemiri

Kapasitas terpasang 50 lps; kapasitas produksi 29,12 lps; kapasitas distribusi: 29,12 lps. Area layanan mencakup seluruh desa di Kecamatan Pituruh dan Kecamatan Kemiri.

h) Cabang Butuh dan Grabag

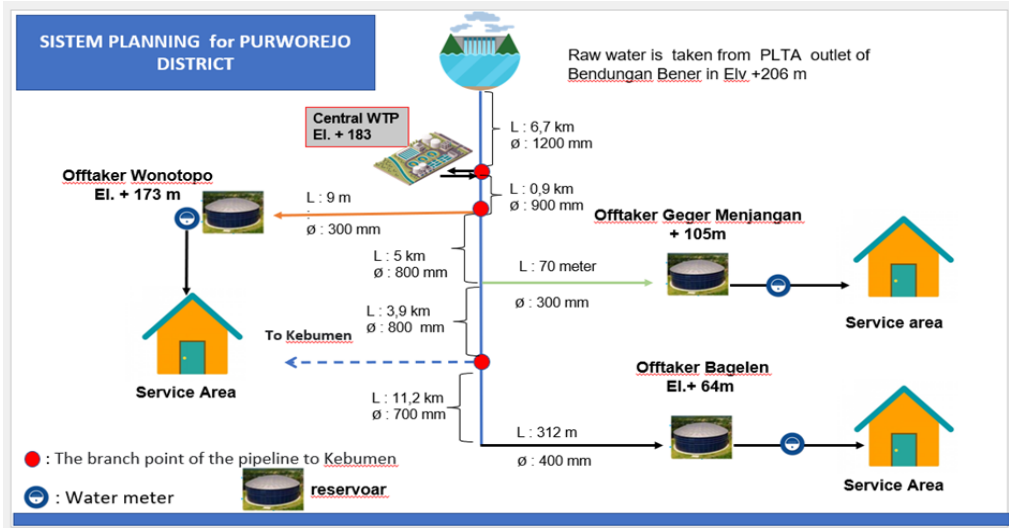
PDAM area layanan Butuh dan Grabag baru beroperasi pada Desember 2024. Cabang ini terutama melayani pelanggan wilayah Kecaatan Butuh dan Kecamatan Grabag; yang menggunakan sumber pendanaan dari Program Inpres Air Minum Tahun 2024. Dengan kapasitas 50 lps, sampai dengan akhir Desember 2025, sudah dapat melayani kurang lebih 4.014 SR. Sumber air baku mengambil dari SPAM regional Keburejo sub sistem Jembatan.

Area layanan air minum dari PDAM dapat dilihat pada peta berikut ini:

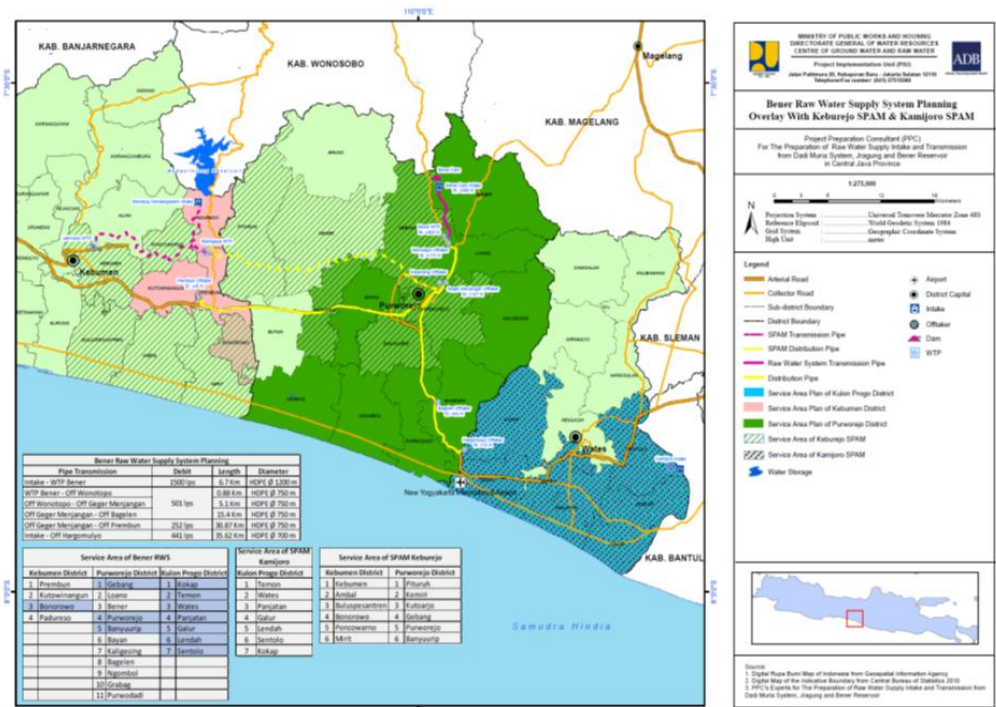


Gambar 2. 80 Peta Pelayanan PDAM Kabupaten Purworejo
Sumber: Dokumen RISPAM Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2037

Beberapa kekurangan dari layanan PDAM yaitu jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Purworejo dan kapasitas air baku yang masih terbatas, sehingga belum dapat melayani seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo. Selama ini sumber air baku untuk layanan PDAM di Kabupaten Purworejo hanya mengandalkan beberapa mata air yang ada serta beberapa sungai yang melintas di Kabupaten Purworejo. Pembangunan Regional Keburejo mengambil air baku dari IPA Jembatan dan IPA Balingasal Kebumen, ini membantu meningkatkan capaian akses air minum aman di Kabupaten Purworejo. Diharapkan dengan beroperasinya Bendungan Bener yang memiliki kapasitas 500 lps dapat melayani kurang lebih 50.000 SR.

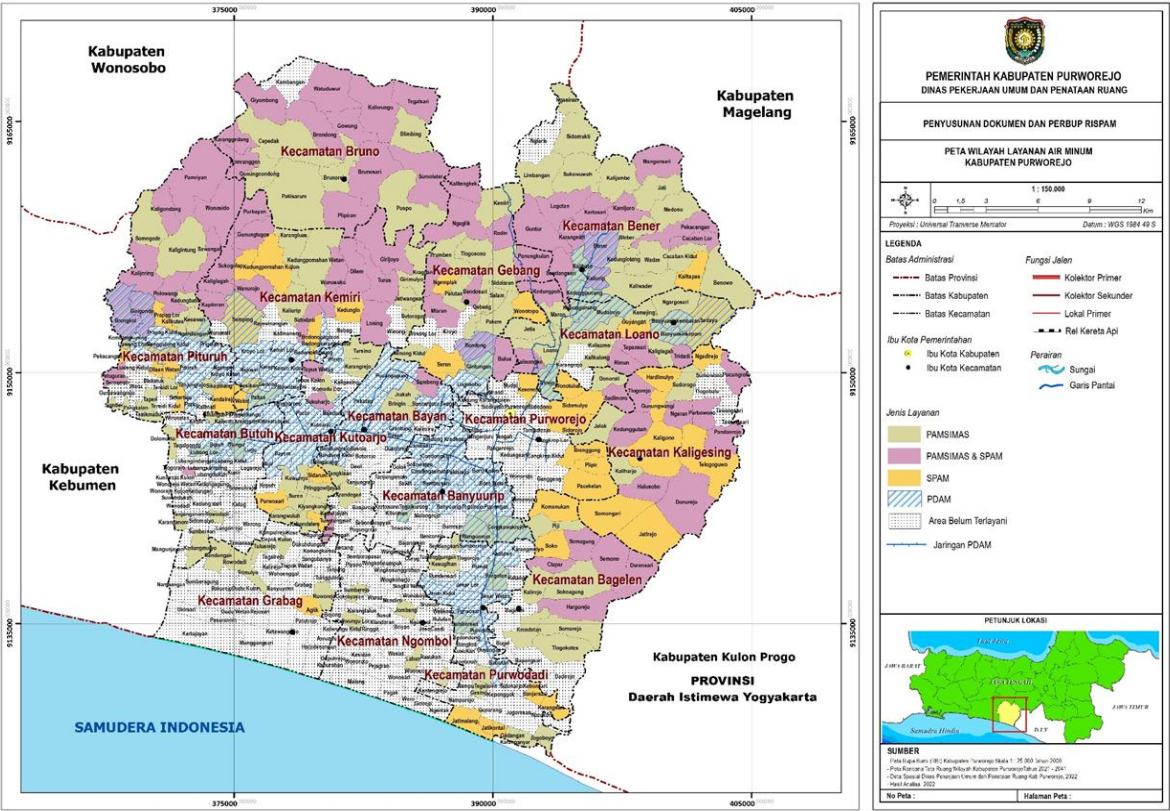


Gambar 2. 81 System Planning Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo
Sumber: BBWS Serayu Opak Yogyakarta, 2024



Gambar 2. 82 Raw Water Supply Bendungan Bener dan SPAM Regional Keburejo dan SPAM regional Kamijoro
Sumber: BBWS Serayu Opak Yogyakarta, 2024

Sementara itu sebanyak 238.308 KK masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan dilayani air minum secara mandiri melalui sumur pribadi dan melalui SPAM Perdesaan misalnya melalui Program Pamsimas, DAK SLBM, SPAM Perdesaan dan Inpres Air Minum.



Gambar 2. 83 Peta Wilayah Layanan Air Minum Kabupaten Purworejo
Sumber: Dokumen RISPAM Kabupaten Purworejo 2022-2037

Kabupaten Purworejo memiliki dua jenis layanan yang harus dipenuhi dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk jenis layanan penyediaan air minum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 103 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo

No	Jenis Layanan	Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	92,51%	95,50%	96,86%	97,97%	99,34%

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Data yang disajikan dalam tabel menunjukkan peningkatan persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dari 97,97% pada tahun 2023 menjadi 99,34% pada tahun 2024. Meskipun terdapat kemajuan yang positif dalam penyediaan air minum, persentase ini mencerminkan bahwa meskipun banyak warga telah memiliki akses ke kebutuhan pokok ini, masih ada sebagian kecil populasi yang mungkin belum sepenuhnya terlayani.

Pengolahan Air Limbah Domestik

Air limbah merupakan air buangan yang berasal dari kegiatan domestik, industri, komersial atau aktivitas lainnya yang mengandung berbagai jenis pencemar seperti bahan organik, logam berat, senyawa kimia, mikroorganisme patogen, atau nutrisi berlebih. Penanganan air limbah yang baik sangat penting untuk melindungi kualitas lingkungan terutama sumber air dan kesehatan masyarakat.

Sebagai salah satu infrastruktur layanan dasar yang vital, pelayanan pengolahan air limbah domestik diharapkan dapat dipenuhi dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan target pelayanan air limbah nasional yaitu *universal access* yang mengamanatkan pelayanan air limbah dapat diakses 100% penduduk. Sampai dengan akhir tahun 2024, persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 104 Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	85,01%	84,70%	84,94%	89,43%	95,79%
2	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	184.673	184.673	185.193	247.593	266.565

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3	Jumlah total rumah tangga kabupaten	217.249	218.030	218.030	276.870	278.295

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Purworejo semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, capaian akses sanitasi layak berada di angka 85,01%, nilainya meningkat secara signifikan menjadi 95,79% pada tahun 2024. Hal tersebut karena terdapat program penyediaan air limbah dari pemerintah berupa program DAK SLBM. Untuk desa-desa yang wilayahnya secara topografi memungkinkan, maka digunakan SPALD terpusat permukiman skala 50 KK. Sedangkan untuk desa-desa yang wilayahnya secara topografis datar, maka digunakan SPALD Setempat skala 5-10 KK atau SPALD individu.

Untuk melayani akses air limbah untuk masyarakat di wilayah perkotaan, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah membangun IPLT yang berlokasi di Desa Jetis Kecamatan Loano yang mulai beroperasi tahun 2009. Pengolahan limbah di IPLT dilakukan pada beberapa kolam yang terdiri dari kolam/bak pengumpul, kolam anaerob/kolam fakultatif, kolam maturasi dan kolam pengeringan lumpur. Kolam anaerob mempunyai kapasitas 451,04 m3; kolam fakultatif mempunyai kapasitas 191,84 m3; dan kolam maturasi mempunyai kapasitas penampungan 166,95 m3. Walaupun Kabupaten Purworejo telah mendapatkan status *Open Defecation Free* (ODF) pada akhir tahun 2023, akan tetapi akses sanitasi layak masih berada di angka 95,32%.

Walapun capaian akses sanitasi di Kabupaten Purworejo meningkat setiap tahun, akan tetapi capaian tersebut jika dikaitkan dengan indikator TPB nomor 6.2.1 (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Cakupan akses sanitasi layak di Kabupaten Purworejo masih dibawah target nasional yakni 100%. Masih rendahnya tingkat cakupan layanan akses sanitasi layak oleh masyarakat disebabkan karena:

- a) Rendahnya cakupan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALD-T). Sebagian besar wilayah masih mengandalkan pengelolaan air limbah secara individual (on-site system), seperti tangki septik, dengan minim atau tanpa sistem pengelolaan lanjutan. Infrastruktur SPALD-T belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Purworejo.
- b) Kualitas teknis sarana on-site yang tidak sesuai standar. Sebagian besar tangki septik yang ada tidak memenuhi standar teknis, misalnya tidak kedap air, tidak memiliki resapan air, dan tidak disedot secara berkala.
- c) Keterbatasan kapasitas dan kinerja Instalasi Pengeloaan Lumpur Tinja (IPLT). IPLT Jetis tidak berfungsi optimal karena adanya keterbatasan kapasitas maupun kerusakan teknis pada unit pengolahan. Unit-unit pengolahan seperti anaerobic baffled reactor (ABR) atau constructed wetlands seringkali tidak terpelihara dan tersumbat. Selain itu juga terdapat kendala berupa keterbatasan armada kendaraan penyedot

- lumpur tinja (truk tinja).
- d) Tidak terintegrasinya sistem pengelolaan air limbah grey water. Kurangnya penerapan decentralized grey water treatment systems (misalnya biofilter atau sumur resapan grey water) serta belum adanya pengelolaan pemisahan antara drainase air hujan dan air limbah.
 - e) Belum adanya regulasi yang mengatur terkait Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Air Limbah.
 - f) Belum adanya pemisahan antara operator dan regulator yang menangani air limbah domestik
 - g) Masih rendahnya inovasi dan teknologi tepat guna lokal. Sebagian besar teknologi pengelolaan air limbah domestik masih menggunakan sistem konvensional, belum menggunakan diversifikasi teknologi seperti biofilter modular, kompos limbah cair dan sistem verifikasi efluen.

Untuk itu, dalam rangka peningkatan akses sanitasi dari dasar ke layak dan mengarah ke aman, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya bantuan jambanisasi untuk masyarakat miskin, pemeliharaan dan optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jetis. Kabupaten Purworejo memiliki dua jenis layanan yang harus dipenuhi dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo untuk jenis layanan penyediaan pengolahan air limbah domestik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 105 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo

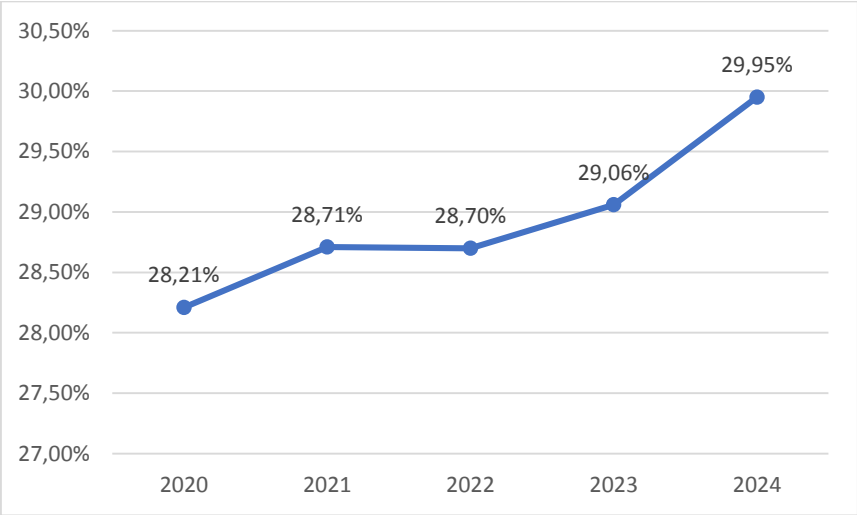
No	Jenis Layanan	Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	85,01%	84,70%	84,94%	95,32%	95,79%

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023

Data yang disajikan dalam tabel diatas menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyediaan layanan pengolahan air limbah domestik, dari 85,01% pada tahun 2020 menjadi 95,79% pada tahun 2024. Meskipun terdapat kemajuan yang positif, angka ini juga mengindikasikan bahwa meskipun persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik meningkat, sekitar 4,21% dari populasi masih belum terlayani. Kesenjangan ini menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan bahwa seluruh populasi mendapatkan akses yang memadai terhadap pengolahan air limbah yang efektif. Peningkatan ini juga menunjukkan perlunya fokus berkelanjutan untuk mengatasi kesenjangan yang ada.

Saluran drainase merupakan salah satu persyaratan teknis prasarana jalan dan bangunan pelengkap pada ruas jalan yang berfungsi untuk mengalirkan air, sehingga badan jalan tetap kering. Saluran drainase jalan

raya adalah saluran terbuka dengan menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan air menuju outlet yang mengikuti kontur jalan raya. Terkadang pembuatan drainase sering dilupakan dalam perancangan ruas jalan maupun evaluasi kerusakan jalan. Drainase sering diabaikan karena dianggap kurang penting dan kurang esensial bagi jalan secara keseluruhan. Salah satu penyebab cepatnya kerusakan jalan adalah buruknya saluran drainase di badan jalan. Panjang saluran serta infrastruktur drainase lain yang tercantum dalam *Masterplan* Drainase Perkotaan Purworejo-Kutoarjo adalah sepanjang 247.955 m. Panjang saluran yang telah dibangun dan mampu dikelola organisasi atau perangkat daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 84 Persentase Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

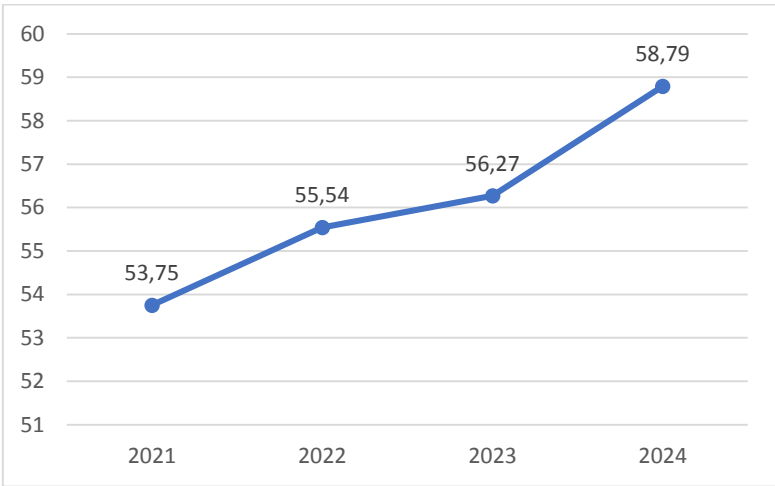
Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Panjang saluran drainase dalam kondisi baik/tidak tersumbat pembuangan aliran airnya oleh Kabupaten Purworejo pada akhir tahun 2024 adalah 74.252 m sehingga capaian di tahun 2024 sebesar 29,95%. Walaupun terdapat peningkatan capaian sebesar 0,89% dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar 29,06%, akan tetapi persentase capaian saluran drainase dalam kondisi baik tahun 2024 masih di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 32,67%. Beberapa faktor yang menjadi penghambat capaian drainase dalam kondisi baik di Kabupaten Purworejo diantaranya: panjang saluran drainase yang ditangani per tahun tidak sebanding dengan panjang total saluran drainase di Kabupaten Purworejo. Tiap tahun rata-rata pemerintah Kabupaten Purworejo hanya melakukan kegiatan rehabilitasi saluran drainase sepanjang 500-1.500 m. Selebihnya merupakan kegiatan pemeliharaan. Penanganan saluran drainase tidak ditangani secara total, hanya per titik/spot. Penanganan drainase tidak dimulai dari sumber permasalahan genangannya, sehingga sering memunculkan genangan baru khususnya pada musim penghujan. Menurunnya kapasitas saluran drainase karena sedimentasi akibat kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di sepanjang saluran drainase. Penanganan drainase tidak dilakukan secara tuntas. Seharusnya penanganan drainase dilakukan mulai dari drainase primer, sekunder dan tersier secara tuntas.

2) Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

Persentase kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum didapatkan

dari rata-rata persentase layanan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, gedung, jasa konstruksi, air minum, dan air limbah. Kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum di Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun 2021 hingga tahun 2024 dengan peningkatan terbesar terjadi di tahun 2023-2024 yaitu sebesar 3,75% hingga mencapai nilai tertinggi sebesar 52,59% di tahun 2024.



Gambar 2. 85 Persentase Kinerja infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo, 2025

3) Persentase Kinerja Penataan Ruang

Penataan ruang bersangkutan dengan lingkungan hidup yang berkelanjutan, pada urusan ini, penataan lingkungan hidup dicapai lewat penyediaan ruang terbuka hijau. Dalam upaya meningkatkan kemudahan dan iklim berinvestasi pagi para investor, peranan penataan ruang menjadi salah satu hal yang sangat urgen. Lahirnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berkaitan dengan perubahan regulasi dan kebijakan terkait penataan ruang dan izin usaha. KKPR bertujuan menselaraskan kegiatan pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut untuk memastikan aktivitas usaha dan penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KKPR membawa konsep penyelarasan antara kegiatan berusaha, tata ruang dan dampak lingkungan. Dengan mengimplementasikan KKPR, tentunya proses perizinan usaha menjadi lebih efisien, transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 106 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	100%	78,08%	89,35%	89,49%	90,95%
2	Jumlah KKPR yang sesuai	622	969	277	298	794
3	Jumlah KKPR yang dikeluarkan	622	1.241	310	333	873

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024 (diolah)

Dapat dilihat pada tabel diatas, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR mencapai angka sempurna 100%. Namun, angka ini menurun pada tahun 2021 menjadi 78,08% dan kemudian mengalami perbaikan bertahap hingga mencapai 90,95% pada tahun 2024. Penurunan tajam pada tahun 2021 mungkin menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pemanfaatan ruang atau perubahan dalam penerapan RTR yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Meskipun ada perbaikan sejak saat itu, persentase kesesuaian yang mencapai 90% menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan agar pemanfaatan ruang lebih sepenuhnya selaras dengan rencana yang ditetapkan.

Jumlah KKPR yang sesuai menunjukkan fluktuasi yang signifikan sepanjang periode tersebut. Penurunan jumlah KKPR yang sesuai pada tahun 2022 mungkin terkait dengan penurunan jumlah KKPR yang dikeluarkan, atau bisa disebabkan oleh perubahan dalam kebijakan atau praktik administrasi yang mempengaruhi kesesuaian tersebut. Namun, jumlah KKPR yang sesuai mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024.

RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) merupakan pengaturan tindak lanjut dari RTRW kabupaten/kota yang digunakan untuk mengendalikan pemanfaatan suatu kawasan dan sebagai panduan rancangan kawasan untuk mewujudkan kesatuan karakter dengan berbagai aspek, di antaranya aspek fungsional, sosial, ekonomi, dan ekosistem.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menyusun dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pusat Kota Purworejo. Penyusunan dokumen tersebut telah mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo. Sedangkan tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas PUPR menyusun dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Koridor Jl. Brigjen Katamso - Jl. Jend. Sudirman-Jl. Tentara Pelajar. Rasio Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang Disusun di Kabupaten Purworejo Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 107 Rasio Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan RTBL yang Disusun di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Rasio Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang Disusun	0%	0%	12,5%	25%	100%
2	Jumlah dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan yang telah disusun	0	0	1	2	2
3	Jumlah dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan yang direncanakan	8	8	8	8	2

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Dari data diatas, rasio RTBL yang disusun pada tahun 2020-2021 berada pada angka 0%. Namun, pada tahun 2022, rasio ini mulai meningkat menjadi 12,5%, dan kemudian meningkat lebih signifikan menjadi 100% pada tahun 2024. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa ada upaya yang

semakin konsisten dalam penyusunan RTBL, yang merupakan langkah positif dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Lonjakan pada tahun 2022-2024 menunjukkan kemajuan dalam penyusunan dokumen dan pada tahun 2024 seluruh dokumen RTBL telah dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara, bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan. Terdapat 240 bangunan gedung negara kewenangan kabupaten yang telah terinventarisasi. Dalam perkembangannya, saat ini terdapat 191 bangunan gedung negara milik daerah dalam kondisi baik. Cakupan penanganan bangunan gedung milik daerah dalam rentang waktu 2020-2024 dapat, dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 108 Persentase Bangunan Milik daerah dengan Kondisi Baik di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Bangunan Milik Daerah dengan Kondisi Baik	70,42%	73,33%	74,58%	75,83%	79,58%
2	Jumlah bangunan gedung negara milik daerah dengan kondisi baik	169	176	179	182	191
3	Jumlah seluruh bangunan gedung negara milik daerah	240	240	240	240	240

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Persentase bangunan dengan kondisi baik secara umum mengalami kenaikan, namun kenaikan ini tidak signifikan, hal ini disebabkan pembangunan Gedung Pemerintah belum menjadi prioritas Pemerintah Daerah karena pembangunan difokuskan untuk masyarakat. Jumlah bangunan gedung miliki negara tidak bertambah selama 5 tahun namun jumlah bangunan negara dengan kondisi baik meningkat, pemerintah hanya melakukan pemeliharaan namun tidak menambah jumlah gedung negara milik daerah, ini dikarenakan belum terdapat kebutuhan penambahan jumlah Gedung Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) adalah setiap orang yang memiliki ketrampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibuktikan dengan SKK Konstruksi. Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 109 Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	67,87 %	70,13 %	79,19 %	91,82%	100%
2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat	150	155	175	202	220
3	Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/ analis di wilayah kabupaten	221	221	221	220	220

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Secara umum rasio tenaga operator yang memiliki sertifikat mengalami peningkatan tiap tahunnya, sementara untuk jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis di wilayah Kabupaten cenderung statis. Jenis data dan informasi jasa konstruksi di DPUPR Kabupaten Purworejo ditargetkan 12 data/informasi. Di tahun 2024, terdapat 9 jenis data dan informasi jasa konstruksi yang sudah ada atau sebesar 100%. Jumlah data dan informasi jasa konstruksi yang seharusnya ada tidak pernah meningkat tiap tahun, hal ini disebabkan oleh kurangnya kegiatan inventarisasi data dan informasi jasa konstruksi.

Tabel 2. 110 Rasio Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Rasio Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	58,33 %	66,67 %	75,00 %	75,00%	100%
2	Jumlah data dan informasi jasa konstruksi yang ada	7	8	9	9	9
3	Jumlah data dan informasi jasa konstruksi yang seharusnya ada	12	12	12	12	9

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kecelakaan kerja dalam pekerjaan konstruksi. Faktor yang pertama yaitu kesalahan manusia atau *human error*. Kedua, faktor terganggunya material bangunan. Faktor ketiga, banyaknya peralatan konstruksi yang tidak tersertifikasi. Faktor keempat, metode pelaksanaan konstruksi di lapangan yang tidak sesuai dengan K3 (Keselamatan, dan Kesehatan Kerja) dan faktor kelima adanya efisiensi anggaran. Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 111 Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi di Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	80	80	80	94	66
3	Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	80	80	80	94	66

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Dapat dilihat bahwa pencapaian rasio 100% untuk proyek tanpa kecelakaan konstruksi adalah prestasi yang signifikan, namun demikian penting untuk memantau dan menyesuaikan sistem pengawasan seiring dengan pertumbuhan jumlah proyek. Upaya yang berkelanjutan dalam peningkatan prosedur keselamatan dan pengawasan akan memastikan bahwa standar keselamatan dapat dipertahankan bahkan dengan peningkatan jumlah proyek yang semakin besar.

Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung

Jumlah PBG yang sesuai dengan peruntukannya di Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan dari sejumlah 39 di tahun 2022 menjadi 365 di tahun 2024. Persentase kepatuhan persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Purworejo juga menunjukkan tren positif yaitu mencapai 100% dari tahun 2022 hingga 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh persetujuan bangunan gedung (PBG) yang diterbitkan telah sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, hal tersebut juga mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas dan aspek teknis dalam pembangunan gedung serta efektivitas peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan pendampingan proses perizinan.

Tabel 2. 112 Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	2	3	4	5
1	Jumlah PBG yang sesuai peruntukannya	39	229	365
2	Jumlah PBG yang diterbitkan	39	229	365
3	Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo, 2025

4) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi dua hal, yaitu Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; serta Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Namun, perhitungan indikator persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Purworejo baru menggunakan kriteria Ketahanan

bangunan (*durable housing*) saja, yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah yang memenuhi syarat. Berikut adalah persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2. 113 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	66,27	67,04	67,27	67,68	68,16
2	Jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau	172.297	174.306	174.913	175.961	177.200
3	Jumlah rumah tangga	259.980	259.980	259.980	259.980	259.980

Sumber: Disperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024

Pada tahun 2020 hingga 2024, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Purworejo meningkat walaupun kurang signifikan. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak yaitu 66,27%, sedangkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 68,16%. Hal tersebut menandakan adanya peningkatan kualitas hunian di Kabupaten Purworejo secara konsisten di setiap tahunnya. Namun, sampai dengan akhir 2024, RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Kabupaten Purworejo berjumlah 15.431 unit yang tersebar di berbagai wilayah. Penyediaan dan rehabilitas rumah layak huni juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dibawah ini disajikan data persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni korban bencana Kabupaten dan relokasi program pemerintah di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 114 Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Korban Bencana Kabupaten dan Relokasi Program Pemerintah di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Korban Bencana Kabupaten dan Relokasi Program Pemerintah	N/A	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	N/A	78	11	6	5
3	Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani	N/A	78	11	6	5

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024

Adapun desa-desa yang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni akibat bencana terdiri dari Desa Durensari Kecamatan Bagelen sebanyak 1 unit, Desa Jati Kecamatan Bener sebanyak 1 unit, Desa Brondong Kecamatan Bruno sebanyak 2 unit, Desa Wonotopo Kecamatan Gebang sebanyak 2 unit, Desa Pakem Kecamatan Gebang sebanyak 9 unit, Desa Tegalsari Kecamatan Bruno 9 unit, dan Desa Donorati Kecamatan Purworejo sebanyak 1 unit. Sedangkan persentase Masyarakat yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan

Rumah Layak Huni di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 115 Persentase Masyarakat yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Masyarakat yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	0%	0%	100%	0%	100%
2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang tertangani	0	0	9	0	0
3	Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan	0	0	9	0	0

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024

Adapun masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah diantaranya Kelurahan Kutoarjo sebanyak 1 unit, Desa Lugu Kecamatan Butuh sebanyak 2 unit, Kelurahan Bayem sebanyak 1 unit, dan Desa Sidarum Kecamatan Kutoarjo sebanyak 1 unit. Sedangkan persentase jumlah rumah susun, rumah khusus yang terbina di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 116 Persentase Jumlah Rumah Susun, Rumah Khusus yang Terbina di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase jumlah rumah susun, rumah khusus yang terbina	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah rumah susun yang dibina	1	1	1	1	1
3	Jumlah rumah susun yang ada	1	1	1	1	1

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024

Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terbit yang Diajukan Pemohon di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 117 Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terbit yang Diajukan Pemohon di Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terbit yang Diajukan Pemohon	92,19%	89,80%	90,32%	100%	100%
2	Jumlah izin perumahan yang diterbitkan	59	44	56	14	14
3	Jumlah izin pembangunan perumahan yang diajukan	64	49	62	14	14

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024

Terdapat 2 (dua) jenis layanan bidang perumahan dan permukiman yang harus dipenuhi Kabupaten Purworejo dalam rangka mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM), antara lain penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana memiliki angka yang stabil sejak tahun 2020-2024 yaitu 100%. Akan tetapi untuk fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah nilainya sebesar 0% karena tidak ada kegiatan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah. Berikut tabel capaian SPM Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purworejo.

Tabel 2. 118 Capaian SPM Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024

No	Jenis Layanan	Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024

SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dicapai pembangunan kembali rumah bagi korban bencana, pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana, serta bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana. Sementara itu, SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten dicapai melalui penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan, subsidi uang sewa, serta penyediaan rumah layak huni.

Selain permasalahan terkait penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat yang terkena bencana dan relokasi program pemerintah, penyediaan rumah tidak layak huni juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Purworejo. Masih banyaknya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mempunyai Rumah Layak Huni menjadi pekerjaan yang harus segera diselesaikan oleh Pemkab Purworejo.

Untuk rumah tidak layak huni yang berada di Kawasan kumuh akan ditangani melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan. Akan tetapi untuk RTLH, yang berada di luar kawasan kumuh harus ada program pemerintah

yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah salah satunya yaitu penyediaan Rumah Layak Huni melalui pendanaan APBD. Persentase pengurangan rumah tidak layak huni di luar Kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 119 Persentase Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase pengurangan rumah tidak layak huni di luar Kawasan kumuh	10,84%	10,80%	10,28%	9,40%	5,66%
2	Jumlah RTLH di luar kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati	20.650	20.564	19.571	17.891	15.431
3	Jumlah rumah di luar kawasan kumuh	190.429	190.429	190.429	190.429	272.500

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024

Selain Rumah Tidak Layak Huni, *backlog* di Kabupaten Purworejo menjadi permasalahan yang harus segera dituntaskan. *Backlog* merupakan jumlah unit perumahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi dalam suatu kawasan. Berdasarkan data dari SIMPERUM Provinsi Jawa Tengah, data *backlog* rumah di Kabupaten Purworejo berjumlah 15.554 unit yang tersebar di berbagai wilayah. Angka *backlog* rumah tiap kecamatan di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 120 Angka Backlog Rumah Tiap Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah KK	Backlog (unit)
1	2	3	4
1	Grabag	17.702	998
2	Ngombol	12.810	838
3	Purwodadi	15.183	1.340
4	Bagelen	10.811	468
5	Kaligesing	10.892	320
6	Purworejo	30.811	2.482
7	Banyuurip	15.554	1.472
8	Bayan	18.169	1.127
9	Kutoarjo	21.869	1.801
10	Butuh	15.226	716
11	Pituruh	19.070	1.034
12	Kemiri	20.773	940
13	Bruno	18.439	570
14	Gebang	15.365	689
15	Loano	13.282	415
16	Bener	19.578	344
	Total	275.534	15.554

Sumber: SIMPERUM, 2024

Dari data diatas dapat dilihat backlog paling tinggi terdapat di Kecamatan Purworejo, diikuti Kutoarjo dan Banyuurip, ini disebabkan karena tidak *balance*-nya *supply and demand* antara kebutuhan rumah dan

ketersediaan rumah. Hal tersebut diperparah dengan harga property yang meningkat seiring dengan kenaikan harga tanah di wilayah perkotaan, dimana hal tersebut tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang rata-rata masih dibawah UMR.

PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

Berdasarkan hasil inventarisasi data PSU yang dilakukan pada tahun 2024, terdapat 28 (dua puluh delapan) perumahan yang sudah melakukan penyerahan PSU ke pemerintah daerah; dan 256 (dua ratus lima puluh enam) perumahan yang belum menyerahkan PSU-nya ke Pemerintah Daerah. Jenis PSU yang dibangun terdiri dari jalan dan saluran drainase yang dibangun pada kurun waktu 2012-2024. Beberapa kendala belum diserahkannya PSU oleh pengembang diantaranya belum dilakukannya proses verifikasi/pengukuran PSU dan pembangunan rumah dan PSU yang belum selesai. Sementara itu terdapat 8 (delapan) perumahan yang masuk dalam kategori PSU terlantar, diantaranya Perumahan KBN, Perumahan KORPRI Sucenjurutengah, Perumahan Pepabri, Pangenrejo Regency, Perumahan KORPRI Cangkrep Lor, Perumahan Bumi Satria Permai, Perumahan Griya Butuh Permai dan Perumahan Argo Peni. Perumahan-perumahan tersebut tidak diketahui nama pengembangannya dan rata-rata dibangun pada kurun waktu 1980-2007.

Persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kabupaten Purwoejo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 121 Persentase Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	92,93%	92,93%	94,67%	94,86%	69,76%
2	Jumlah rumah yang telah dilengkapi dengan PSU	187.823	187.823	191.333	191.726	2.895
3	Jumlah rumah	202.106	202.106	202.106	202.106	4.150

Sumber: Dinperkim Kabupaten Purworejo, 2024

Sarana dan Prasarana Sosial merupakan segala bentuk fasilitas atau infrastruktur yang dibangun dan disediakan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Dibawah ini disajikan data rasio tempat ibadah di Kabupaten Purworejo Tahun 2024.

Tabel 2. 122 Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Purworejo tahun 2024

No	Bangunan tempat Ibadah	Tahun 2024		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
1	2	3	4	5
1.	Masjid/Musholla/langgar	3.975	794.737	1 : 200
2.	Gereja Protestan	74	7.543	1 : 102
3.	Gereja Katolik	23	6.721	1 : 293
3.	Pura	2	45	1 : 23
4.	Vihara	9	526	1 : 59
5	Lain-lain	0	79	
	Jumlah	4.083	809.651	

Sumber: Kabupaten Purworejo Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data yang ada, bahwa rasio jumlah sarana peribadatan terhadap pemeluknya di Kabupaten Purworejo tergolong tinggi. Untuk rasio masjid terhadap pemeluknya, bahwa 1 masjid harus melayani 200 orang jamaahnya. Demikian juga dengan gereja protestan maupun katolik. Satu gereje masing-masing harus melayani 102 dan 293 orang jamaah. (Disclaimer: rasio perhitungan hanya memperhitungkan jumlah sarana peribadatan tanpa memperhitungkan luasan).

5) Persentase Luasan Kumuh Kawasan Perkotaan yang ditangani

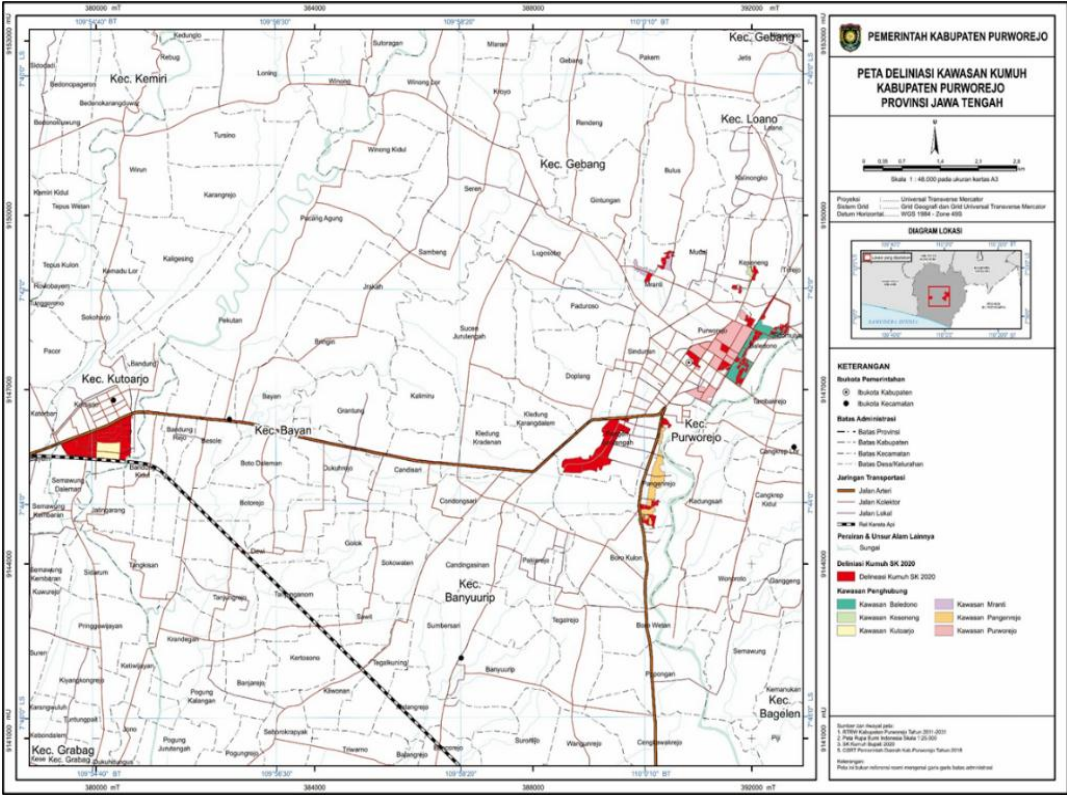
Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Salah satu permasalahan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Purworejo adalah masih tingginya luasan kawasan kumuh. Terdapat 126,811 Ha luasan kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo yang tersebar di 7 kelurahan yaitu Kelurahan Kutoarjo, Purworejo, Mranti, Pangen Juru Tengah, Baledono, Pangerejo dan Keseneng. Luasan Kawasan kumuh per kelurahan di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 123 Luasan Kawasan Kumuh Berdasarkan SK No. 60.18/536/2020

No	Kelurahan	Luasan SK Kumuh 2020 (Ha)
1	2	3
1	Pangenrejo	7,899
2	Mranti	4,390
3	Baledono	13,504
4	Purworejo	10,00
5	Keseneng	2,800
6	Pangenjurutengah	39,300
7	Kutoarjo	48,918
Luas Total		126,811

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024

Luasan kawasan kumuh pada tahun 2020 paling banyak terdapat di Kelurahan Kutoarjo, diikuti dengan Pangenjurutengah. Sedangkan persebaran peta kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 86 Peta Kawasan Kumuh di Kabupaten Purworejo

Sumber: Dokumen RP2KPKPK, 2021

Kawasan kumuh perkotaan Purworejo terdiri dari kawasan kumuh yang ada di Perkotaan Purworejo dan Perkotaan Kutoarjo. Berikut adalah gambaran dan identifikasi terkait permukiman kumuh perkotaan Purworejo secara lebih rinci.

Tabel 2. 124 Kawasan Kumuh Perkotaan Purworejo dan Kutoarjo

No	Nama Desa	Wilayah Mikro Perencanaan	Luas (Ha)
1	2	3	4
Kecamatan Purworejo			
1	Kel Pangenrejo	RT 01 /RW II RT 02 /RW V RT 01, 02/ RW VI	7,899
2	Kel Mranti	RT 03, 04 / RW III	4,390
3	Kel Baledono	RT 02, 03 ,05, 06, 07 / RW IV RT 01, 02, 03, 04 / RW V RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 / RW VII RT 03, 04, 05 / RW VIII	13,504
4	Kel Purworejo	RT 02 / RW I RT 01 / RW IX RT 01,02,03,06 / RW XII RT 02 /RW XIII	10,000
5	Kel Keseneng	RT 01,04/RW I	2,800
6	Kel Pangenjurutengah	RT 01, 02, 03 / RW IV RT 01, 02, 03 / RW V	39,300
Luas Kawasan Kumuh Kecamatan Purworejo			88,13
Kecamatan Kutoarjo			
1	Kel Kutoarjo	RT 01, 02, 03, 04 / RW I RT 01, 02, 03 / RW II RT 01, 02, 03, 04 / RW III RT 01, 02, 03, 04, 05 / RW XI RT 01, 02, 03, 04 / RW XII	48,918
Luas Kawasan Kumuh Kecamatan Kutoarjo			48,918
Total Luas Kawasan Kumuh Perkotaan Purworejo			126,811

Sumber: SK Bupati nomor 160.18/562/2020

Kawasan kumuh di Kecamatan Kutoarjo seluas 48,918 Ha sudah ditangani melalui kegiatan penanganan kumuh skala kawasan pada tahun

2021-2022 melalui pendanaan dari *National Slum Upgrading Program (NSUP)*. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo periode Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 125 Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	26,26%	45,98%	90,70%	85,29%	86,85%
2	Luas Kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani (ha)	33.308	58.313	115.022	108.157	110,14
3	Luas Kawasan kumuh di bawah 10 ha (ha)	126.811	126.811	126.811	126.811	126,811

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024

Persentase penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tahun 2020 capaiannya sebesar 26,06% dan meningkat menjadi 86,85% pada tahun 2024. Pada tahun 2020, luasan permukiman kumuh di Kabupaten Purworejo naik menjadi 126,811 ha dan telah dilegalformalkan dengan menggunakan SK Bupati Purworejo. Tahun 2021-2022 dilakukan intervensi penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Purworejo melalui Program Penanganan Kumuh Skala Kawasan yang bersumber dari dana APBN dan sharing APBD. Program ini dapat mengurangi tingkat kekumuhan di Kelurahan Kutoarjo sebesar 46,991 ha. Selain itu intervensi penanganan kumuh melalui sumber dana APBD juga digencarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo sehingga dapat mengurangi kekumuhan di Kelurahan Purworejo sebesar 9,159 ha; Kelurahan Pangen Juru Tengah 39,3 ha; Kelurahan Baledono 8,75 ha; Kelurahan Mranti 2,923 ha dan Kelurahan Pangenrejo 7,899 ha sehingga sisa luasan kumuh di Kabupaten Purworejo pada akhir tahun 2024 sebesar 16,721 ha.

Adapun rincian intervensi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh per kelurahan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 126 Rincian Intervensi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Per Kelurahan di Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas Kumuh Awal (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh s/d 2023 (Ha)	Intervensi Pengurangan Kumuh Tahun 2024	Sisa Luasan Kumuh Akhir Tahun 2024 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kutoarjo	Kutoarjo	48,918	1,927	1,927	0
2	Purworejo	Purworejo	10,000	0,841	0	2,325
3	Purworejo	Pangen Juru Tengah	39,300	4,831	0	2,996
4	Purworejo	Baledono	13,504	2,330	0	2,80
5	Purworejo	Keseneng	2,800	2,800	0	4,831
6	Purworejo	Mranti	4,390	2,923	0	2,996

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas Kumuh Awal (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh s/d 2023 (Ha)	Intervensi Pengurangan Kumuh Tahun 2024	Sisa Luasan Kumuh Akhir Tahun 2024 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7
7	Purworejo	Pangenrejo	7,899	2,996	0	0,841
	TOTAL		126,811	18,648	0	16,721

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024

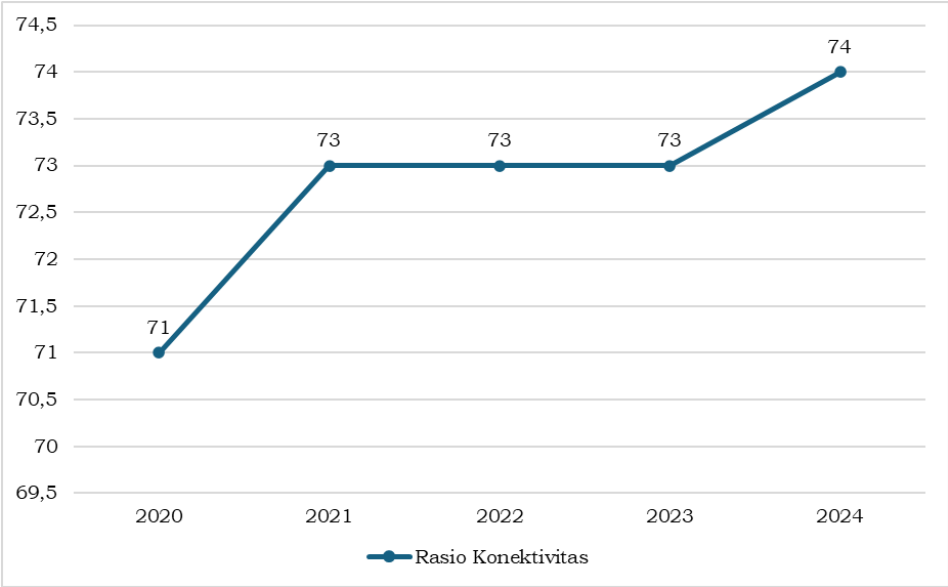
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan capaian penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Purworejo masih rendah diantaranya:

- Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo terkendala pada penanganan kawasan kumuh berdasarkan luasan, dimana kawasan kumuh dengan luas > 15 ha menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, kawasan kumuh 10 ha-15 ha menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan kawasan kumuh dengan luasan < 10 ha menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- Penanganan kumuh dengan menggunakan dana dari Pemerintah Pusat melalui APBN selama ini diintervensi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang hanya terdapat di Kecamatan Kutoarjo, sedangkan Kecamatan Purworejo tidak pernah mendapatkan Program KOTAKU. Selain itu Program KOTAKU di Kabupaten Purworejo sudah berakhir di tahun 2020.
- Selain Program KOTAKU terdapat program lain dari sumber pendanaan APBN untuk penanganan kawasan kumuh yaitu penanganan kumuh skala kawasan dan DAK integrasi. Akan tetapi proses untuk mendapatkannya sangat sulit karena harus berkompetisi dengan ratusan kabupaten/kota di Indonesia, dimana tiap tahun hanya terpilih 10 kabupaten/kota.
- Tidak adanya pendanaan dari APBD Provinsi dalam intervensi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan 10-15 ha.
- Dalam upaya intervensi penanganan kumuh masih sering terkendala pada aspek legalitas lahan sehingga tidak jadi dilaksanakan, misalnya untuk proses Konsolidasi Lahan (*Land Consolidation*).
- Masyarakat yang tinggal di *slum area* enggan untuk pindah karena mereka sudah merasa nyaman dan secara turun temurun tinggal di permukiman kumuh

6) Rasio Konektivitas

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, rasio konektivitas yaitu perbandingan antara jumlah jaringan angkutan umum (trayek) yang dilayani dengan jumlah kebutuhan trayek di kabupaten. Rasio konektivitas di Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan dari tahun 2020 senilai 71 menjadi stagnan senilai 73 di tahun 2021 hingga 2023. Dan di tahun 2024 meningkat menjadi 74. Hal tersebut mengindikasikan adanya stagnasi jumlah trayek aktif serta frekuensi layanan angkutan jalan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan pola mobilitas masyarakat, efisiensi rute trayek, serta dampak pandemi yang sempat memengaruhi layanan transportasi. Adanya peningkatan di tahun 2024 menunjukkan adanya upaya perbaikan konektivitas transportasi meskipun

belum sepenuhnya ke tingkat optimal.



Gambar 2. 87 Rasio Konektivitas Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, 2024

Pengembangan sektor transportasi diharapkan tidak hanya sekedar mendukung pembangunan di Kabupaten Purworejo tetapi harus mampu menjadi bagian dari arah pembangunan di Kabupaten Purworejo. Keberhasilan pembangunan sektor transportasi bukan hanya diukur dari ketersediaan layanan ataupun terbangunnya infrastruktur transportasi seperti jalan, jalan rel, terminal penumpang atau barang, stasiun, dan infrastruktur lainnya (*output*) tetapi bagaimana memastikan layanan dan infrastruktur yang terselenggara atau terbangun dapat digunakan dan memberikan nilai tambah bagi penggunaanya (*outcome*), serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purworejo (*impact*). Kinerja urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 127 Capaian Indikator Persentase Peningkatan Prasarana dan fasilitas LLAJ yang Tersedia di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia	46,49%	47,16%	49,52%	59,68%	61,66%
2.	Jumlah rambu-rambu	4.054	4.181	4.830	4.984	5.420
3.	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya ada	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655
4.	Jumlah terminal tipe C	3	3	3	4	4
5.	Jumlah terminal tipe C yang seharusnya ada	6	6	6	6	6
6.	Jumlah titik parkir yang terlayani	165	165	172	221	226
7.	Jumlah potensi titik parkir	224	224	224	224	224
8.	Jumlah angkutan darat	589	589	589	589	589
9.	Jumlah penumpang angkutan darat	871.759	646.751	633.135	655.720	138.585

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, terdapat beberapa tren dan tantangan signifikan terkait prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) dari tahun 2020 hingga 2024. Persentase peningkatan prasarana

dan fasilitas LLAJ menunjukkan tren yang positif, meningkat dari 46,49% pada tahun 2020 menjadi 61,66% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan upaya yang konsisten untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur transportasi secara keseluruhan.

Namun, ada ketidaksesuaian antara jumlah rambu-rambu yang ada dan jumlah yang seharusnya ada. Meskipun jumlah rambu-rambu meningkat dari 3.421 pada tahun 2020 menjadi 4.984 pada tahun 2023, angka ini masih jauh dari jumlah ideal yang seharusnya ada, yaitu 6.655 rambu. Kekurangan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk penambahan dan perbaikan rambu-rambu guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Selain itu, jumlah terminal tipe C mengalami sedikit penambahan, dari 3 terminal pada tahun 2020 menjadi 4 terminal pada tahun 2024. Meskipun ada peningkatan, jumlah ini masih belum memenuhi kebutuhan ideal, yakni 6 terminal. Keterbatasan jumlah terminal tipe C dapat menghambat efisiensi transportasi dan kenyamanan pengguna.

Dalam hal titik parkir, jumlah yang terlayani meningkat secara signifikan dari 165 titik pada tahun 2020 menjadi 226 titik pada tahun 2024, melampaui jumlah potensi titik parkir yang mencapai 224 titik. Meskipun ada perbaikan, masih terdapat potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, yang menunjukkan peluang untuk mengoptimalkan kapasitas parkir.

Jumlah angkutan darat yang tersedia dari tahun 2020 hingga 2024 tetap yakni 589 unit. Namun pada realitanya tidak semua angkutan darat yang terdaftar aktif beroperasi. Di sisi lain, jumlah penumpang angkutan darat menunjukkan penurunan dari 871.759 orang pada tahun 2020 menjadi 138.585 orang pada tahun 2024. Penurunan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan pola perjalanan atau dampak pandemi, dan perlu diteliti lebih lanjut untuk memastikan layanan angkutan darat dapat memenuhi permintaan masyarakat dengan efektif.

Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek prasarana dan fasilitas, terdapat beberapa area yang masih membutuhkan perhatian dan perbaikan. Kesenjangan antara fasilitas yang ada dan yang seharusnya ada menunjukkan perlunya investasi lebih lanjut dan perencanaan yang lebih baik dalam pengembangan infrastruktur transportasi untuk memastikan sistem transportasi yang lebih aman, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Rambu

Penyediaan rambu jalan dan RPPJ merupakan salah satu aspek yang digunakan dalam indikator ketercapaian urusan perhubungan. Rambu jalan dipasang pada daerah rawan kecelakaan, geometris jalan lurus menikung dan halus, serta volume kendaraan ramai akan tetapi belum ada rambu jalan. Berikut data ketersediaan rambu jalan di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2. 128 Ketersediaan Rambu Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah rambu	2.656	2.728	2.877	2.919	3.028
2.	Jumlah APILL	99	109	111	111	111
3.	Jumlah PJU	1.299	1.344	1.842	1.954	2.281
	Total	4.054	4.181	4.830	4.984	5.420

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2024

Tabel diatas menunjukkan peningkatan pada jumlah rambu, APILL, dan PJU dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan jumlah APILL stagnan pada dua tahun terakhir, sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait efektivitasnya.

Untuk menunjang keamanan dan keselamatan pengguna jalan, ketersediaan Alat Pengaman Jalan (APJ) mutlak diperlukan. Selain rambu jalan, APILL, dan PJU yang telah disebutkan di atas, terdapat pula alat pengaman jalan lain meliputi pagar pengaman jalan (*guard rail*), cermin tikungan, tanda patok tikungan (*delineator*), serta pita penggaduh. Berikut disajikan data ketersediaan alat pengaman jalan di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2. 129 Ketersediaan Alat Pengaman Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Traffic Light	24	26	26	26	26*
1	Jumlah pagar pengaman jalan (<i>guard rail</i>)	1.172	1.228	1.228	1.228	1.228
2	Jumlah cermin tikungan	59	59	79	91	119
3	Jumlah tanda patok tikungan (<i>delineator</i>)	256	256	256	256	256
4	Jumlah pita penggaduh	41	44	44	44	44

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa terlihat upaya untuk meningkatkan pengaturan lalu lintas dan keselamatan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah *guard rail*, dan cermin tingkungan. Upaya ini cukup baik untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, hal yang perlu menjadi perhatian ialah fasilitas keselamatan jalan lain yang tidak banyak mendapat peningkatan seperti *traffic light*, tanda patok tikungan , dan pita penggaduh.

Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota.

Pemenuhan minimal perlengkapan jalan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan minimal perlengkapan jalan adalah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrill, penerangan jalan umum (PJU) dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada jalan kabupaten/kota minimal sebesar 60% dari total kebutuhan ideal untuk masing-masing perlengkapan jalan dimaksud untuk 1 (satu) ruas jalan. Jenis dan ruang lingkup rambu, marka, guardrill dan APILL sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal di Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 sebesar 34,80%. Berikut rincian perhitungannya.

Tabel 2. 130 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal di Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2024
1	2	3
1	Jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan	79
2	Jumlah total ruas jalan kewenangan kabupaten/kota	227
3	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	34,80 %

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, 2024

Terdapat 79 ruas jalan kabupaten yang telah dilengkapi kelengkapan jalan seperti rambu jalan, cermin tikungan, PJU, APILL, *Warning Light*, marka, *guardrail*, *deliniator*, dan pita penggaduh. Ini berarti masih ada 148 ruas jalan kabupaten lagi yang perlu dilengkapi perlengkapan jalan demi meningkatkan tingkat keselamatan pengguna jalan di ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Terminal

Kabupaten Purworejo mempunyai 3 tipe terminal, yaitu Terminal Tipe A, Terminal Tipe B dan Terminal Tipe C. Terminal Bis Purworejo yang merupakan terminal Tipe A terletak di tepi jalan Raya Purworejo-Kutoarjo, Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, tepatnya persis di depan Polres Purworejo. Terminal ini melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), angkutan lintas batas antar negara, angkutan antar kota dalam propinasi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES). Pembangunan Terminal Purworejo selesai dibangun pada tahun 2023 oleh Kementerian Perhubungan. Pembangunan terminal ini merupakan bagian dari program Revitalisasi Terminal Tipe A secara nasional yang dilakukan Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat. Revitalisasi dilakukan agar fasilitas dan layanan terminal semakin baik, sehingga dapat menumbuhkan budaya masyarakat untuk menggunakan angkutan massal bus.



Gambar 2. 88 Terminal Tipe A Purworejo
Sumber: Survei Primer, 2024

Teminal Tipe B di Kabupaten Purworejo yaitu Terminal Kutoarjo yang berada di Jalan Nasional III Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo. Terminal Kutoarjo selesai dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 dan diresmikan di akhir tahun 2024. Selain berfungsi sebagai terminal pemberhentian bus, Terminal Kutoarjo juga memiliki UMKM *center* yang bernama *Keburejo Hangout Point*. Dengan adanya *Keburejo Hangout Point* diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Purworejo dan sekitarnya.



Gambar 2. 89 Terminal Tipe B Kutoarjo
Sumber: Survei Primer, 2024

Terminal Tipe C yang ada di Kabupaten Purworejo berjumlah 4 buah, yaitu Terminal Non Bis Kongs, Terminal Bis Kutoarjo, Terminal Non Bis Kutoarjo, dan Terminal Bis Purwodadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, bahwa penyelenggara terminal wajib menyediakan dan melaksanakan pelayanan kepada penumpang angkutan dalam hal pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/ keterjangkauan dan kesetaraan. Keempat terminal Tipe C di Kabupaten Purworejo sudah berusaha memenuhi pelayanan tersebut, misalnya dalam hal penyediaan fasilitas keamanan jalan, kantor penjaga terminal, petugas operasional terminal, ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan/mushola, Ruang Terbuka Hijau (RTH), fasilitas dan petugas kebersihan, drainase, ketersediaan letak jalur pemberangkatan dan kedatangan, tempat naik/turun penumpang dan tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi.



Gambar 2. 90 Kondisi Eksisting Terminal Tipe C Purwodadi (kiri) dan Terminal Tipe C Kutoarjo (kanan)

Sumber: Survei Sekunder, 2024

Titik Parkir

Kabupaten Purworejo ditargetkan menangani 184 titik parkir berdasarkan dokumen perencanaan di tahun 2023. Kondisi persentase titik parkir yang terlayani selalu membaik dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2023, jumlah titik parkir yang dikelola mencapai 221 titik dari 224 titik parkir yang ada.

Tabel 2. 131 Titik Parkir yang Terlayani di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Titik Parkir yang dikelola	165	165	172	221	226
2	Jumlah Titik Parkir	224	224	224	224	224

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, 2025

Berdasarkan kajian Survei Potensi Parkir Kabupaten Purworejo yang telah disusun oleh Dinhub pada tahun 2022, diperoleh data titik parkir yang ada di Kabupaten Purworejo dibagi menjadi dua yaitu tempat khusus parkir dan parkir tepi jalan umum (*on street*). Terdapat tujuh lokasi yang masuk dalam tempat khusus parkir yaitu Pasar Baledono, Obyek Wisata Goa Seplawan, Gor Jend. Sarwo Edy Wibowo, Pasar Purworejo, Pasar Kutoarjo, RSUD Tjitro Wardoyo, dan Kolam Arta Tirta. Sedangkan untuk parkir tepi jalan umum (*on street*) ada 224 titik parkir yang tersebar di wilayah perkotaan Purworejo-Kutoarjo.

Angkutan Darat

Untuk menunjang Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo mengajukan usulan penyediaan halte di sekolah-sekolah melalui dana APBN. Sehingga di tahun 2020 terdapat tambahan halte sebanyak 6 unit. Data sebaran letak halte di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 132 Data Halte yang Layak Fungsi pada Setiap Prasarana Kabupaten yang Telah Dilayani Angkutan Umum di Kabupaten Purworejo

No	Nama Jalan	Jumlah		Keterangan
1	2	3	4	
1	Depan PDAM	1	Lokasi	APBD PURWOREJO
2	Depan RS Permata	1	Lokasi	APBD PURWOREJO

No	Nama Jalan	Jumlah		Keterangan
1	2	3		4
3	Depan Dinas Pertanian	1	Lokasi	APBD PURWOREJO
4	Depan Kejaksaan Lama	1	Lokasi	APBD PURWOREJO
5	Alun-alun KTA	1	Lokasi	APBD 2016
6	Depan SMP N 1 Purworejo	1	Lokasi	APBD 2017
7	Simpang 3 Boro	1	Lokasi	APBD 2017
8	SMPN 26 / DPU	1	Lokasi	APBD 2019
9	SMP 2	1	Lokasi	APBNP 2020
10	SMP 31	1	Lokasi	APBNP 2020
11	SMA 3	1	Lokasi	APBNP 2020
12	RSUD Cokronegoro/AKPER	1	Lokasi	APBNP 2020
13	SMA 2	1	Lokasi	APBNP 2020
14	Kec Bayan / SMP Bayan	1	Lokasi	APBNP 2020
JUMLAH		14	Lokasi	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, 2025

Dilihat dari 5 tahun terakhir, jumlah penumpang angkutan mengalami penurunan semenjak covid-19. Penurunan jumlah penumpang ini belum dapat kembali ke angka sebelum covid-19 dan akan sulit karena masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Tabel 2. 133 Jumlah Angkutan Darat dan Penumpang Angkutan Darat di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah angkutan darat	589	589	589	589	589
2	Jumlah penumpang angkutan darat	871.759	646.751	633.135	655.720	138.585

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, 2024

Data di atas menunjukkan tren yang menarik terkait jumlah angkutan darat dan penumpang di periode 2020-2024. Terdapat stagnasi yang cukup signifikan pada jumlah angkutan darat sejak tahun 2020, mengindikasikan adanya potensi penurunan minat atau efisiensi dalam operasional angkutan darat. Di sisi lain, jumlah penumpang angkutan darat mengalami fluktuasi namun cenderung menurun sejak tahun 2020.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 jumlah penumpang di empat tahun terakhir lebih rendah dikarenakan beberapa faktor yaitu angkutan umum dinilai kurang nyaman digunakan serta angkutan umum di Kabupaten Purworejo belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Purworejo sehingga masyarakat beralih menggunakan kendaraan pribadi. Penurunan drastis jumlah penumpang di tahun 2024 dikarenakan angkutan di terminal non bus Kutoarjo pindah ke terminal tipe B Kutoarjo serta adanya kebakaran Pasar Kutoarjo yang menyebabkan lahan terminal non bus Kutoarjo digunakan untuk PKL Pasar Kutoarjo.

Uji Laik Kendaraan

Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 sebanyak 3.100 buah. Sedangkan jumlah KBWU yang memiliki KIR sebanyak 2.227 buah.

Tabel 2. 134 Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah KBWU yang memiliki KIR	3.202	3.184	2.698	2.462	2.227
2	Jumlah KBWU	4.500	4.500	4.120	3.100	3.100

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, 2024

Jumlah KBWU yang memiliki KIR terus menurun setiap tahun, ini menunjukkan bahwa setiap tahun kendaraan niaga yang wajib uji semakin sedikit. Jumlah KBWU juga mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir, ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya uji KIR kendaraan. KBWU juga mengalami penurunan yang signifikan sebanyak 31% dalam periode lima tahun terakhir, hal ini menunjukkan penurunan kebutuhan atau permintaan layanan transportasi umum.

7) Penurunan Angka Kecelakaan

Di Kabupaten Purworejo, kasus kecelakaan lalu lintas menunjukkan angka fluktuatif setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Satlantas Polres Purworejo, pada tahun 2020, jumlah kasus kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi yaitu sebanyak 505 kasus kemudian menurun menjadi 482 kasus di tahun 2021. Namun, di tahun 2022 mengalami lonjakan menjadi 688 kasus dan di tahun 2023 menjadi 761 kasus. Pada tahun 2024 menurun kembali menjadi 562 kasus.



Gambar 2. 91 Penurunan Angka Kecelakaan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Polres Kabupaten Purworejo, 2025

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kasus kecelakaan lalu lintas selain disebabkan oleh kesalahan pengemudi dan kondisi kendaraan juga disebabkan karena kondisi medan jalan, atau kurangnya rambu jalan, alat pengaman jalan, dan Penerangan Jalan Umum (PJU). Sedangkan faktor yang menyebabkan angka kecelakaan turun di tahun 2021 antara lain ketersediaan APJ seperti rambu, APILL, PJU, Guard Rail, Cermin Tikungan, Deliniator, dan Pita Penggaduh di Kabupaten Purworejo yang meningkat dari

tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas menjadi 562 kasus. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan formula perhitungan sehingga angka kecelakaan dihitung berdasarkan kejadian kecelakaan yang terjadi di jalan kewenangan kabupaten saja.

8) Indeks Kinerja Layanan Irigasi (IKSI)

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa terdapat 3 (tiga) kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi yaitu:

- a) Daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha; menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
- b) Daerah irigasi yang luasnya 1000 ha-3000 ha; menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- c) Daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha; menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Purworejo berdasarkan jenisnya dibagi menjadi Daerah Irigasi Permukaan (DIP) dan Daerah Irigasi Rawa (DIR). Daerah Irigasi permukaan di Kabupaten Purworejo berdasarkan kewenangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 135 Daerah Irigasi Permukaan (DIP) Berdasarkan Kewenangan di Kabupaten Purworejo

No	Kewenangan	Jumlah DI	Luasan (ha)
1	2	3	4
1	Pusat	3	19.908
	DI Boro		5.136
	DI Kedungputri		4.341
	DI Waduk Wadaslintang		10.431
2	Provinsi	3	2.840
	DI Watujagir		210
	DI Kalibutek		98
	DI Loning Kragilan		2.532
3	Kabupaten	250	9.470

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Daerah irigasi permukaan di Kabupaten Purworejo memiliki luasan yang bervariasi, dengan luasan paling besar dimiliki pusat, diikuti kabupaten, kemudian provinsi. Sedangkan Daerah Irigasi Rawa (DIR) di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

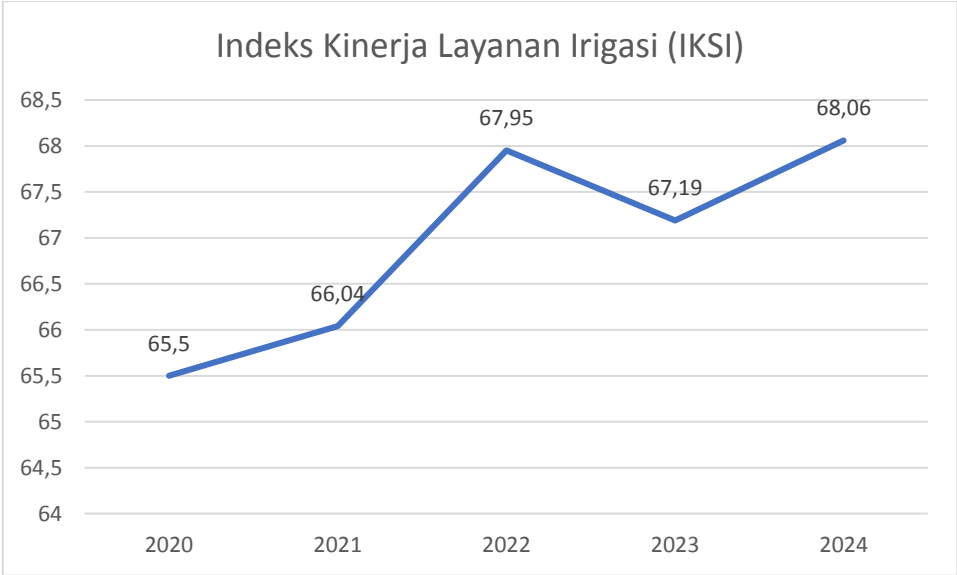
Tabel 2. 136 Daerah irigasi rawa (DIR) Kabupaten Purworejo

No	Nama DIR	Luasan (ha)
1	2	3
1	DIR Depok	11
2	DIR Gedangan	30
3	DIR Girirejo	14
4	DIR Jatikontal	60
5	DIR Jatimalang	75
6	DIR Jogoboyo	30

No	Nama DIR	Luasan (ha)
1	2	3
7	DIR Karanganyar	40
8	DIR Keburuhan	33
9	DIR Malangrejo	31
10	DIR Ngentak	47
11	DIR Pagak	43
12	DIR Pejagran	2
13	DIR Tunjungan	2
14	DIR Wero	35
	TOTAL	453

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Indeks kinerja layanan irigasi (IKSI) yaitu nilai yang menunjukkan tingkat kinerja suatu sistem irigasi secara keseluruhan. IKSI digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan jaringan irigasi dalam menyediakan air untuk pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 12 Tahun 2015, penilaian IKSI mencakup enam komponen, yaitu prasarana fisik, produktivitas tanam, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi, dan perkumpulan petani pemakai air (P3A). Berikut merupakan nilai IKSI Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024.



Gambar 2. 92 Indeks Kinerja Layanan Irigasi (IKSI) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo, 2024

Nilai IKSI Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, nilai IKSI Kabupaten Purworejo yaitu 65,5 dan meningkat menjadi 67,95 di tahun 2022 tetapi mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 67,19. Pada tahun 2024, nilai ini kembali meningkat menjadi 68,06. Meskipun mengalami peningkatan, nilai IKSI Kabupaten Purworejo masih tergolong sedang (60%-80%) dan belum mencapai kategori baik (>80%). Tabel dibawah menyajikan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik.

Tabel 2. 137 Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	62,28%	63,64%	67,95%	67,19%	68,06%
2	Persentase kondisi bangunan pengambilan	72,91%	74,62%	74,68%	75,11%	78,54%
3	Jumlah bangunan pengambilan dalam kondisi baik (buah)	169	173	174	174	183
4	Jumlah total bangunan pengambilan (buah)	233	233	233	233	233
5	Persentase kondisi bangunan pengatur	25,92%	27,12%	33,05%	32,49%	33,47%
6	Jumlah bangunan pengatur dalam kondisi baik (buah)	183	200	234	234	237
7	Jumlah total bangunan pengatur (buah)	708	708	708	708	708
8	Persentase kondisi bangunan pelengkap	67,10%	70,07%	70,55%	70,65%	71,03%
9	Jumlah bangunan pelengkap dalam kondisi baik (buah)	1.941	2.027	2.041	2.044	2.055
10	Jumlah total bangunan pelengkap (buah)	2.893	2.893	2.893	2.893	2.893
11	Persentase kondisi saluran pembawa	79,07%	81,06%	85,21%	85,50%	81,37%
12	Panjang salura irigasi dalam kondisi baik (m)	192.130	278.020	292.273	293.271	
13	Panjang total saluran irigasi (m)	242.988	242.988	242.988	242.988	243.988

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Secara umum capaian kinerja layanan irigasi di Kabupaten Purworejo meningkat tiap tahun, walaupun naiknya kurang signifikan. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan capaian capaian kinerja layanan irigasi diantaranya:

- a) Adanya kolaborasi sumber pendanaan untuk rehabilitasi jaringan irigasi, yaitu APBN melalui Program *Strategic Irrigation Modernization Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) dan Program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP) maupun pendanaan dari APBD Kabupaten.
- b) Makin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeliharaan jaringan irigasi secara mandiri.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi penghambat capaian persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik yaitu:

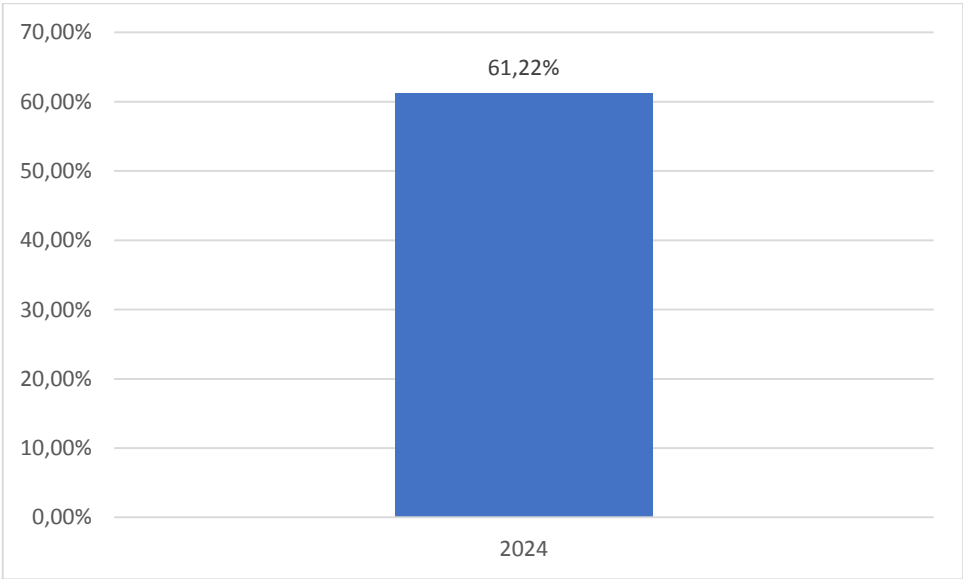
- a) Degradasi daerah hulu (deforestasi, aktivitas pertanian yang tidak ramah lingkungan) mempercepat proses erosi dan sedimentasi;
- b) Perubahan tata guna lahan (alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman) menyebabkan berkurangnya area layanan irigasi dan

- meningkatnya limpasan air;
- c) Kerusakan fisik jaringan akibat usia bangunan yang sudah tua, kurangnya pemeliharaan rutin serta penggunaan material yang tidak tahan lama;
- d) Tersumbatnya jaringan irigasi akibat sampah, gulma air majpun material bawaan banjir;
- e) Rendahnya partisipasi petani dalam pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
- f) Tidak sinkronnya penanganan saluran drainase dan jarigan irigasi.

9) Persentase Peningkatan Kepastian Hukum atas Tanah bagi Masyarakat dan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan pada urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan. Oleh sebab itu, kinerja urusan pertanahan dapat dinilai dari capaiannya dalam menyelesaikan sengketa tanah dan izin membuka tanah negara.

Pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Purworejo baru dilaksanakan tahun 2020-2023. Meskipun masih relatif baru, pelaksanaan reforma agraria telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepastian hukum atas tanah, yang menjadi landasan penting bagi pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut tercermin dari Persentase Peningkatan Kepastian Hukum atas Tanah bagi Masyarakat dan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tahun 2024 yang mencapai 61,22%. Capaian ini mencerminkan kemajuan dalam upaya penataan dan legalisasi aset tanah yang bertujuan memberikan perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat.



Gambar 2. 93 Persentase Peningkatan Kepastian Hukum atas Tanah bagi Masyarakat dan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024

Ketentuan yang secara khusus menentukan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang penyelesaian sengketa tanah terdapat dalam Keppres

Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah daerah berwenang; (a) penyelesaian sengketa tanah garapan; (b) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; (c) penyelesaian masalah tanah ulayat; dan (d) penyelesaian masalah tanah kosong. Persentase penanganan sengketa tanah garapan di Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 138 Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah sengketa tanah/konflik/perkara yang ditangani	1	1	3	12	7
3	Jumlah sengketa/konflik/perkara yang didaftarkan	1	1	3	12	7

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terjadi kenaikan jumlah sengketa tanah garapan dari tahun 2020 hingga 2023, tetapi menurun pada tahun 2024. Meskipun demikian, seluruh sengketa tersebut telah tertangani dengan baik setiap tahunnya, mencapai persentase penanganan sebesar 100%. Sengketa tanah yang terjadi pada tahun 2020 melibatkan dua lokasi yaitu Sucenjurutengah dan Borokulon. Pada tahun 2021, sengketa terjadi di empat lokasi yakni Jatikontal, Keburuhan, Purwodadi, dan Kertojayan. Tahun 2022 mencatat adanya sengketa di Katerban, Kertojayan, Pagak, dan Keburuhan. Jumlah sengketa yang signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan 12 kasus, mencakup wilayah Pagak, Purworejo, Girirejo, Tegalkuning, Cangkrepilor, Patutrejo, dan Ketawangrejo.

Dari data yang tersedia, dapat disimpulkan beberapa hal penting mengenai penanganan sengketa tanah garapan di Kabupaten Purworejo. Pertama, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah sengketa tanah dari tahun 2021 ke 2023, dengan puncaknya pada tahun 2023 yang mencapai 12 kasus. Peningkatan ini menandakan adanya masalah yang mendasar terkait kepemilikan dan penggunaan lahan yang perlu segera diatasi. Kedua, meskipun terdapat peningkatan jumlah sengketa, seluruh kasus berhasil ditangani dengan baik, terbukti dengan persentase penanganan yang selalu mencapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa yang efektif di Kabupaten Purworejo. Ketiga, sengketa tanah tersebar di berbagai wilayah, menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak terfokus pada satu area tertentu melainkan tersebar luas di seluruh kabupaten. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan menyeluruh dalam menangani sengketa tanah di Kabupaten Purworejo.

Pada dasarnya, Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) hanya sebagai dasar penguasaan tanah negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai tindak lanjut dari peningkatan sertifikasi tanah. Adapun objek dari Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) sendiri bukanlah diperuntukkan dalam

rangka komersialisasi lahan. Dalam turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat larangan untuk mengalihkan tanah dengan IMTN yang dapat memberi dampak terhadap perbuatan jual beli yang dilakukan. Untuk itu diperlukan upaya dari para pihak, baik pemerintah daerah maupun stakeholder pemangksu kepentingan, maupun masyarakat saling bahu membahu agar tidak terjadi konflik pertanahan yang bersifat horizontal. Persentase izin membuka tanah negara yang disetujui terhadap yang mengajukan di Kabupaten Purworejo tahun 2020-2023 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. 139 Persentase Permohonan Izin Membuka Tanah Negara yang Disetujui di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2023

No	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Permohonanan Izin Membuka Tanah Negara yang Disetujui	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah izin membuka tanah negara yang terbit	21	5	10	15
3	Jumlah permohonan izin membuka tanah negara	21	5	10	15
4	Luasan izin membuka tanah negara (m2)	138.951	62.221	284.064	513.250

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024

Dari data tersebut, beberapa hal penting mengenai proses permohonan izin membuka tanah negara di Kabupaten Purworejo dapat dianalisis sebagai berikut. Pertama, persentase persetujuan yang selalu mencapai 100% menunjukkan bahwa semua permohonan izin yang diajukan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya prosedur yang jelas dan transparan dalam pengajuan serta evaluasi permohonan izin. Kedua, terjadi fluktuasi dalam jumlah izin yang diterbitkan setiap tahunnya. Penurunan jumlah izin pada tahun 2021 mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, atau ketersediaan lahan. Namun, peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya peningkatan permintaan untuk membuka tanah negara, yang bisa terkait dengan perkembangan ekonomi atau kebutuhan masyarakat akan lahan. Ketiga, peningkatan luasan izin membuka tanah negara dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan adanya proyek-proyek yang lebih besar atau penggunaan lahan yang lebih luas, yang memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan dan pengawasan agar pemanfaatannya sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, setiap Gubernur dan Bupati/Wali Kota wajib mengintegrasikan kegiatan Reforma Agraria ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan program kegiatan perangkat daerah. Gubernur dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas gugus tugas Reforma Agraria provinsi dan kabupaten/kota.

Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota mempunyai tugas

sebagai berikut:

- a) Mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat kabupaten/kota
- b) Memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada gugus tugas Reforma Agraria provinsi untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan
- c) Melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA
- d) Melakukan pemetaan sosial dalam rangka Penataan Akses
- e) Melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria
- f) Melaksanakan Penataan Akses
- g) Melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat kabupaten/kota
- h) Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria kabupaten/kota kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi
- i) Melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria di tingkat kabupaten/kota dibawah koordinasi tim pelaksana percepatan Reforma Agraria
- j) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah

Kabupaten Purworejo sudah memiliki Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/273/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas pada tanggal 14 April 2022. Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Purworejo telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya melaksanakan penataan akses dan memberikan program dukungan kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan yang berbasis pada pemanfaatan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana kegiatan tersebut telah, sedang dan akan dilaksanakan di Desa Tlogoguwo Kecamatan Kaligesing pada tahun 2022-2024, Desa Wirun dan Desa Tursino Kecamatan Kutoarjo pada tahun 2023-2025, Desa Kalisemo Kecamatan Loano pada tahun 2024-2026.

Pada tahun 2024, GTRA Kabupaten Purworejo juga sedang melaksanakan pengusulan subjek dan objek Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), dengan lokasi di 18 desa di 7 Kecamatan yaitu Desa Limbangan dan Mayungsari Kecamatan Bener; Desa Giyombong, Desa Pakisarum, Desa Plipiran, Desa Puspo, Desa Somoleter Kecamatan Bruno; Desa Kemiri dan Desa Tlogosono Kecamatan Gebang; Desa Donorejo, Desa Ngadirejo, Desa Pandanrejo, Desa Pucungroto, Desa Tlogoguwo Kecamatan Kaligesing; Desa Gunung Teges, Desa Kedungpomahan Wetan Kecamatan Kemiri; Desa Tridadi Kecamatan Loano dan Desa Keburuhan Kecamatan Ngombol. Adapun objek dan subjek PPTPKH tersebut terdiri dari 107 bidang tanah, 95 permukiman, 12 fasos/fasum, dengan luasan kurang lebih 148.571,1659 m².

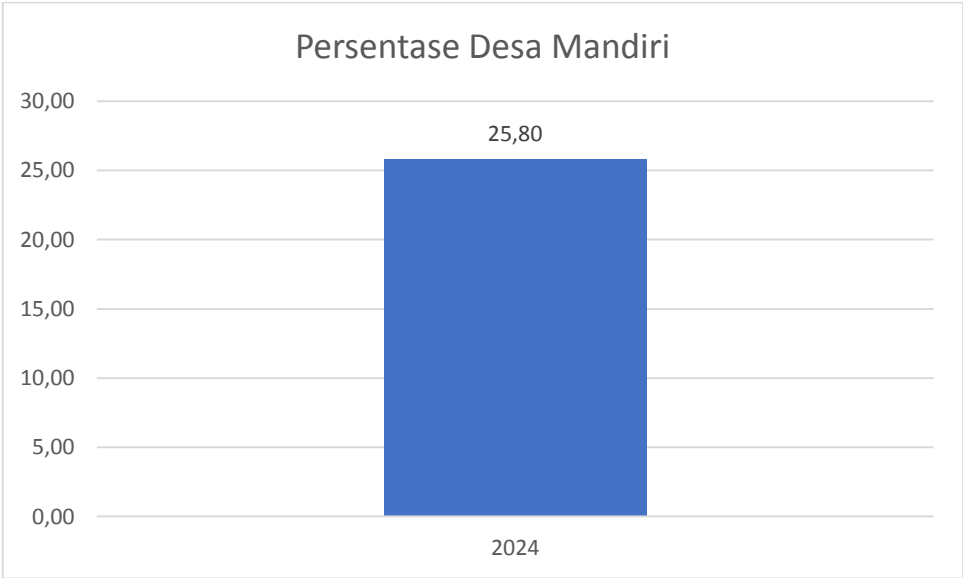
GTRA Kabupaten Purworejo juga sudah melaksanakan Kegiatan Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) di Desa Tangkisan Kecamatan Bayan. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dalam rangka pengumpulan data dan informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam suatu wilayah yang menjadi salah satu kegiatan pendukung untuk mencapai tujuan strategis percepatan pelaksanaan Reforma Agraria. Tujuan dari pelatihan ini adalah

untuk memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai tahapan kegiatan kepada tenaga partisipatif dari kalurahan yang akan membantu pelaksanaan pengumpulan data dan informasi P4T.

10) Persentase Desa Mandiri

Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Status pembangunan desa ditetapkan berdasarkan data capaian pembangunan desa yang bersumber dari Indeks. Desa Mandiri merupakan desa yang dianggap telah memenuhi seluruh aspek strategis pembangunan desa berdasarkan tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Persentase Desa Mandiri adalah Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDTT. Penilaian tersebut berdasarkan enam dimensi antara lain: 1) Layanan Dasar; 2) Sosial; 3) Ekonomi; 4) Lingkungan; 5) Aksesibilitas; dan 6)Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Desa Mandiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik. Berdasarkan data Indeks Desa dari Kementrian PPN / Bappenas tahun 2024, Persentase Desa Mandiri tahun 2019 hingga tahun 2021 hanya ada 1 desa dengan perbandingan jumlah desa di Kabupaten Purworejo 469 Desa atau hanya sebanyak 0,21%. Namun, pada tahun 2024, persentase desa mandiri di Kabupaten Purworejo meningkat menjadi 25,8%.



Gambar 2. 94 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Purworejo
Sumber: DPPPAPMD Kabupaten Purworejo, 2025

Sebelum lahirnya Indeks Desa ini, pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa dilihat dari penilaian Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan

dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Klasifikasi status desa dihasilkan berdasarkan indeks desa membangun dengan status kemajuan dan kemandirian desa dari tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2. 140 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Ju ml ah	Pers enta se	Ju ml ah	Pers enta se	Ju ml ah	Pers enta se	Ju ml ah	Pers enta se	Ju ml ah	Pers enta se
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mandiri	0	0%	0	0%	4	1%	17	4%	38	8%
2	Maju	80	17%	116	25%	160	34%	234	50%	266	57%
3	Berkembang	362	77%	346	74%	305	65%	218	46%	165	35%
4	Tertinggal	27	6%	7	1%	0	0%	0	0%	0	0%
5	Sangat Tertinggal	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
6	Jumlah Desa	469	100%	469	100%	469	100%	469	1%	469	100%
7	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Purworejo	0,6610		0,6764		0,6934		0,7229		0,7352	

Sumber: Kemendesa, 2024

IDM Kabupaten Purworejo pada tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan. Kemajuan IDM sendiri merupakan tolak ukur dari kesuksesan pelaksanaan dana desa di desa. Status desa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan peningkatan jumlah Desa Mandiri, diikuti juga dengan meningkatnya jumlah Desa Maju. Pertumbuhan Desa Mandiri masih sangat rendah, sementara jumlah desa maju semakin bertambah. Meskipun jumlah Desa Berkembang semakin turun namun jumlah tersebut masih cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Purworejo masih banyak desa yang mempunyai potensi sosial, potensi ekonomi dan potensi ekologi atau lingkungan, akan tetapi desa belum mampu mengelolanya dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Selain itu desa berkembang juga masih rentan dengan guncangan untuk turun level menjadi desa tertinggal apabila tidak dikelola dengan baik.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa menempatkan desa sebagai subjek pembangunan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup.

Tabel 2. 141 Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Penataan Desa sesuai Peraturan yang Berlaku	469	469	469	469	469
3	Jumlah desa yang tertib administrasi pemerintahan desa	469	469	469	469	469

Sumber: DPPPAPMD Kabupaten Purworejo, 2024

Dalam kurun waktu 2020-2024 terlihat adanya peningkatan pada jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama desa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah desa yang melaksanakan Kerjasama meningkat. Fasilitasi dilaksanakan melalui sosialisasi perlunya Kerjasama desa dan pendampingan ke desa. Dalam melaksanakan penataan desa permasalahan yang dihadapi yaitu belum optimalnya desa dalam menggali potensi PADesa dan belum optimal dalam mengembangkan serta memanfaatkan potensi alam. Dalam melaksanakan administrasi desa, desa masih belum optimal dalam melakukan pemetaan potensi desa dalam membentuk rintisan kawasan pedesaan. Sedangkan terkait dengan lembaga kemsyarakatan, masih kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait dalam fasilitasi kegiatan kelembagaan seperti peningkatan kapasitas dan pemberdayaan.

g. Stabilitas Ekonomi Makro
1) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rasio pajak daerah terhadap PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Tabel berikut ini menunjukkan rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2. 142 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Daerah (juta Rp)	74.189	84.227	100.654	102.276	104.217
2	PDRB ADHB (miliar Rp)	18.646,49	19.602,72	21.352,54	23.188,03	24.800,93
3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,398	0,430	0,471	0,441	0,420

Sumber: BPKPAD Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data dalam tabel di atas, dapat diamati bahwa pajak daerah dan PDRB Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan pengecualian pada tahun 2020 yang dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19. Pajak daerah meningkat dari Rp74.189 juta pada tahun 2020 menjadi Rp104.217 juta pada tahun 2024, sementara PDRB ADHB meningkat dari Rp18.646,49 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp24.800, 93 miliar pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan pajak daerah selama periode ini adalah 7,55%, sedangkan rata-rata pertumbuhan PDRB ADHB adalah 5,65%.

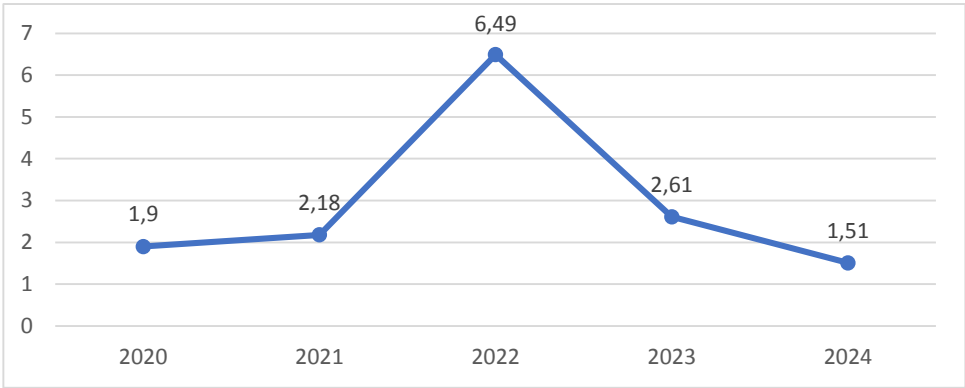
Tren peningkatan pajak daerah terhadap PDRB ini menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo berhasil meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah relatif lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara umum. Namun, meskipun ada tren peningkatan, rasio pajak daerah terhadap PDRB mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024, menjadi 0,420% dibandingkan dengan 0,441 % pada tahun 2023.

Penurunan rasio pajak daerah terhadap PDRB pada tahun 2024 mengindikasikan adanya tantangan dalam memaksimalkan pendapatan pajak daerah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan ini termasuk perubahan kebijakan pajak, kurangnya efisiensi dalam sistem pemungutan pajak, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

2) Tingkat Inflasi

Salah satu indikator makro ekonomi yang sangat penting adalah laju inflasi. Indikator ini menunjukkan tingkat perkembangan harga serta kestabilan perekonomian di suatu wilayah. Dalam roda perekonomian salah satu hal yang menjadi perhatian Pemerintah adalah laju inflasi karena inflasi akan berimplikasi pada hampir semua elemen didalam sistem ekonomi. Angka inflasi yang cenderung rendah menunjukkan tingkat kestabilan harga terpelihara dengan baik, sebaliknya semakin tinggi inflasi menggambarkan gejolak harga yang terjadi pada periode tertentu semakin besar.

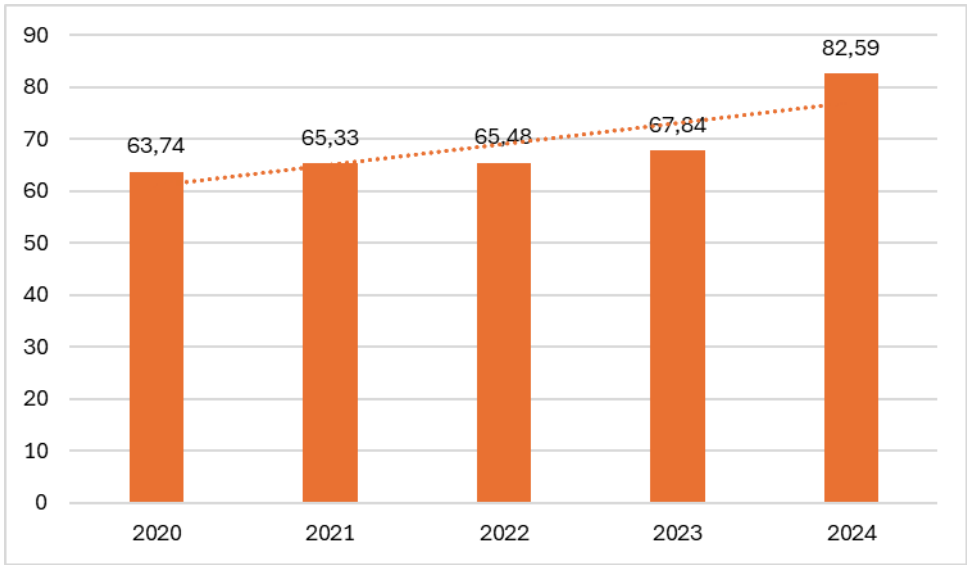
Sejak tahun 2020, BPS tidak lagi menghitung tingkat inflasi di Kabupaten Purworejo. Perkembangan inflasi selanjutnya hanya dapat ditunjukkan di tingkat nasional, provinsi, dan kota-kota besar di Jawa Tengah. Purwokerto merupakan daerah rujukan yang paling dekat untuk menggambarkan kondisi inflasi di Kabupaten Purworejo. Di daerah ini pada tahun 2020, terjadi inflasi sebesar 1,90%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan angka di tingkat provinsi dan nasional. Pada tahun 2021 dan 2022, tingkat inflasi di Purworejo mengalami peningkatan signifikan menjadi 6,49% di tahun 2022 dan kemudian menurun menjadi 1,51 di tahun 2024. Berikut merupakan grafik inflasi di Kota Purwokerto Tahun 2020-2024.



Gambar 2. 95 Tingkat Inflasi Kota Purwokerto Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2024

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum
a. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
1) Indeks Reformasi Birokrasi

Kualitas tata kelola pemerintahan dapat diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan yang berkualitas. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja pembangunan. Tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi yakni untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dalam Implementasinya Kabupaten Purworejo telah mulai melaksanakan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2020.



Gambar 2. 96 Grafik Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2024

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Purworejo dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan dari 62,74 menjadi 82,27. Masuk dalam kategori A hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di suatu wilayah telah berjalan cukup baik dan memuaskan. Kabupaten Purworejo telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

lebih baik melalui perbaikan dalam berbagai aspek seperti organisasi, tata laksana, regulasi, Sumber Daya Manusia, pengawasan, dan pelayanan publik. Namun, meskipun nilai IRB meningkat, tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal masih ada.

Salah satu masalah utama adalah belum optimalnya implementasi reformasi di berbagai bidang. Masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan pelaksanaannya di lapangan. Organisasi dan tata laksana sering kali masih dihadapkan pada birokrasi yang berbelit dan tidak efisien, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perubahan, serta SDM yang memerlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi. Pengawasan internal juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan regulasi dapat diimplementasikan secara efektif.

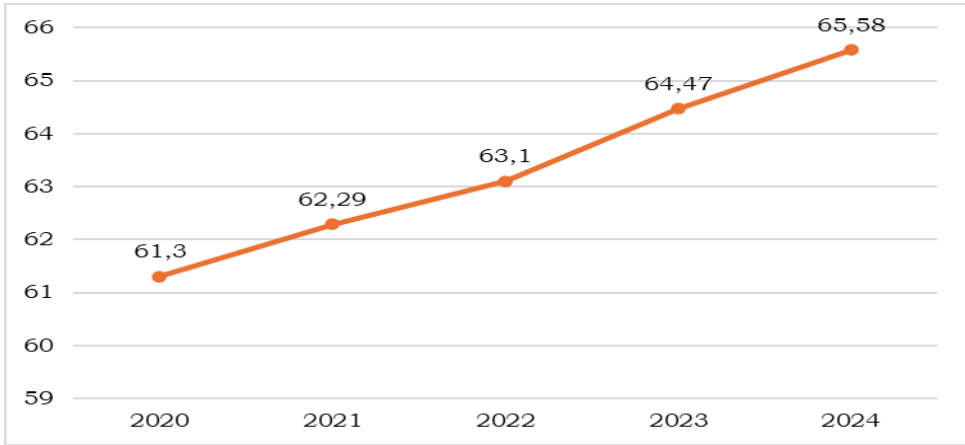
Reformasi birokrasi ini seharusnya mendorong setiap instansi pemerintah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun, di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Instansi Pemerintah di Kabupaten Purworejo harus terus berinovasi dan meningkatkan efektivitas program-program reformasi agar dapat memenuhi ekspektasi masyarakat. Tanpa adanya langkah-langkah perbaikan yang konkret dan berkelanjutan, capaian nilai IRB mungkin akan stagnan dan tidak mampu mencerminkan perubahan yang nyata dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk fokus pada peningkatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas SDM, serta penyempurnaan regulasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah strategis yang tepat, diharapkan capaian IRB dapat meningkat lebih tinggi lagi dan benar-benar mencerminkan perbaikan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purworejo

2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program utama dalam rangka reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Salah satu langkah strategis dalam penguatan akuntabilitas ini adalah penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas yang sistematis dan analitis yang melibatkan pemberian nilai, atribut, apresiasi, serta pengenalan permasalahan dan pemberian solusi atas masalah yang ditemukan. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, berikut ini adalah gambar capaian SAKIP yang menunjukkan hasil dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja di berbagai instansi pemerintah. Adapun capaian Kabupaten Purworejo dapat dilihat sebagai berikut



Gambar 2. 97 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2024

Capaian nilai SAKIP Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Nilai SAKIP pada tahun 2020 sebesar 61,3 dan terus meningkat hingga mencapai 65,58 pada tahun 2024, yang masuk dalam kategori B. Peningkatan ini didorong oleh efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan budaya kinerja birokrasi, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Namun, meskipun sudah menunjukkan hasil yang baik, capaian nilai SAKIP Kabupaten Purworejo masih belum optimal dan memerlukan perbaikan lebih lanjut. Salah satu kendala utama adalah ketidakselarasan antara perencanaan dan pelaporan, di mana indikator yang ada saat ini belum sinkron dengan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini menunjukkan perlunya pencermatan dalam merumuskan indikator yang lebih relevan dan tepat sasaran. Selain itu, kurangnya komitmen dalam manajemen kinerja juga menjadi faktor penghambat dalam pencapaian nilai SAKIP yang lebih tinggi.

Salah satu komponen penting dalam SAKIP adalah Perencanaan Kinerja yang menunjukkan seberapa baik instansi menyusun tujuan, indikator, dan sasaran kinerja secara logis, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis. Perencanaan kinerja memiliki bobot maksimal 30. Di Kabupaten Purworejo, nilai komponen ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 143 Nilai Perencanaan Kinerja Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024

Komponen yang Dinilai	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Perencanaan Kinerja	20,28	20,53	20,55	20,82	21,05

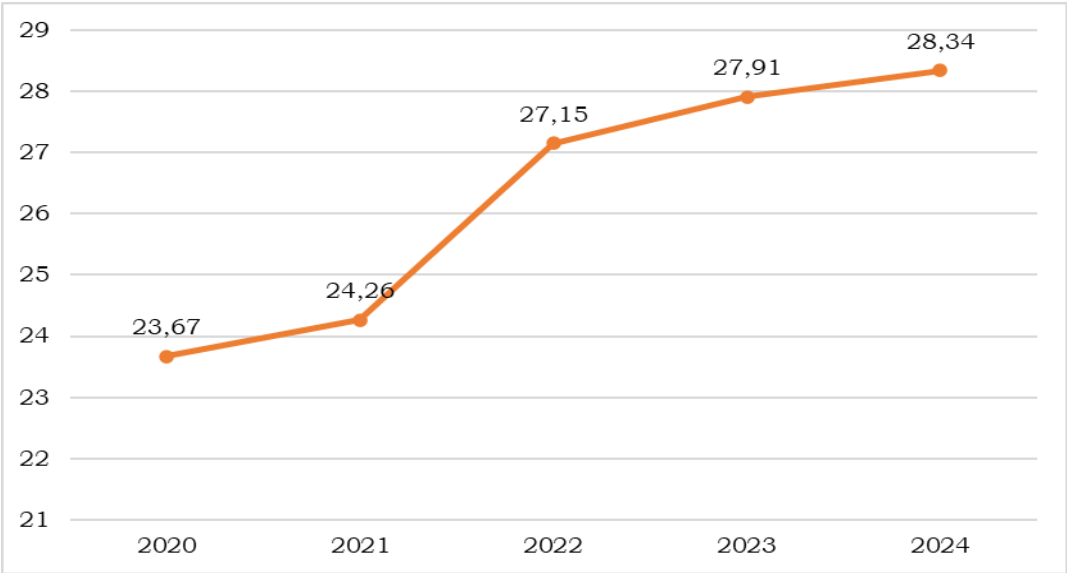
Sumber: Kementerian PANRB, 2024

Dapat diamati pada tabel di atas bahwa nilai perencanaan kinerja Kabupaten Purworejo cenderung sedikit naik dari tahun 2020 hingga 2024, namun masih berada jauh di bawah nilai optimal yang ditetapkan yaitu 30. Meskipun nilai perencanaan kinerja pada tahun 2024 mencapai 21,05, yang merupakan nilai tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, masih banyak hal yang menjadi catatan dari KemenPANRB.

Salah satu permasalahan utama adalah rumusan kinerja dalam dokumen perencanaan sebagian perangkat daerah yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (*outcome*). Indikator kinerja yang digunakan belum

sepenuhnya memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), yang menyebabkan sulitnya mengukur pencapaian kinerja secara objektif dan tepat. Selain itu, pohon kinerja yang disusun oleh perangkat daerah belum seluruhnya memenuhi prinsip logical framework yang menggambarkan hubungan sebab akibat secara jelas, serta belum mencakup *Critical Success Factor* (CSF) yang penting untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan.

Lebih lanjut, komponen lain yang juga menjadi penilaian dalam SAKIP adalah Pengukuran dan Pelaporan Kinerja. Berdasarkan data capaian selama periode 2020-2024, nilai Kabupaten Purworejo untuk komponen ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan.



Gambar 2. 98 Grafik Nilai SAKIP Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Kementerian PANRB, 2024

Peningkatan tajam pada tahun 2022 menandakan perbaikan dalam kualitas pelaporan kinerja dan penguatan mekanisme evaluasi kinerja secara internal. Nilai yang semakin tinggi menunjukkan bahwa pengukuran dan pelaporan kinerja mulai diterpkan secara sistematis, berbasis data, dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, untuk mencapai nilai optimal, masih diperlukan upaya perbaikan terutama dalam hal sinkronasi indikator antar dokumen perencanaan, peningkatan kualitas laporan kinerja (LKjIP), serta optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi.

Kendala lainnya termasuk terbatasnya kapasitas SDM perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan laporan kinerja yang komprehen sif, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja berbasis elektroni. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja juga masih bersifat administratif, sehingga sulit menjadi alat kendali yang efektif untuk melakukan koreksi arah pencapaian secara tepat waktu.

3) Indeks Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses strategis yang dirancang untuk menyusun tahapan-tahapan kegiatan pembangunan secara sistematis, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Purworejo. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara akuntabel, tepat waktu, dan berkualitas.

Tabel 2. 144 Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2024

Capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah mencakup ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten maupun perangkat daerah, serta kualitas substansi dokumen yang dihasilkan. Ketepatan waktu tersebut mencerminkan kedisiplinan birokrasi, sedangkan kualitas dokumen menunjukkan kemampuan teknis dan kapasitas analisi dari perencana daerah. Dalam rangka menjamin keberlanjutan dan konsistensi pembangunan, Pemerintah Kabupateb Purworejo telah menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara periodik sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran dan pelaksanaan program.

Tabel 2. 145 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo

No	Jenis Dokumen	Tersedi/ Tidak Tersedia	Nama Dokumen
1	2	3	4
1	RPJPD 2005-2025	Tersedia	Perda No.3 Tahun 2010
2	RPJMD 2021-2026	Tersedia	Perda No.11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Purworejo Tahun 2021-2026
3	RKPD 2017	Tersedia	Perbup No.19 Tahun 2016 tentang RKPD Kab.Purworejo Tahun 2017
4	RKPD 2018	Tersedia	Perbup No.42 Tahun 2017 tentang RKPD Kab.Purworejo Tahun 2018
5	RKPD 2019	Tersedia	Perbup No. 42 Tahun 2018 tentang RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019
6	RKPD 2020	Tersedia	Perbup No. 21 Tahun 2019 tentang RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020
7	RKPD 2021	Tersedia	Perbup No. 42 Tahun 2020 tentang RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2021
8	RKPD 2022	Tersedia	Perbup No. 33 Tahun 2021 tentang RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2022
9	RKPD 2023	Tersedia	Perbup No. 66 Tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2023
10.	RKPD 2024	Tersedia	Perbup No. 28 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2024
11.	RKPD 2025	Tersedia	Perbup No. 9 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2025

Sejalan dengan capaian kinerja tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo juga mencatat prestasi yang baik dalam Indeks Perencanaan Pembangunan. Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) merupakan indeks untuk mengukur keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) perencanaan pembangunan di Kabupaten Purworejo, termasuk konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam lingkup pencapaian target daerah. Manfaat dari Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) adalah untuk mengetahui tingkat kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian pelaksanaannya. Indeks ini diukur melalui 3 (tiga) penilaian aspek: integrasi, sinkronisasi, dan sinergi. Tabel berikut ini menunjukkan IPP Kabupaten Purworejo tahun 2021-2024.

Tabel 2. 146 Indeks Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2024

Komponen yang Dinilai	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
Indeks Perencanaan Pembangunan	98,24	99,17	99,23	99,27
Aspek Integrasi	94,71	98,14	98,51	97,62
Aspek Sinkronisasi	100,00	99,36	99,18	99,00
Aspek Sinergi	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kementerian PANRB, 2025

Selama periode tahun 2021 hingga 2024, Indeks Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo menunjukkan capain yang sangat tinggi dan konsisten, dengan skor yang selalu berada di atas angka 98. Pada tahun 2021, indeks berada pada angka 98,24, lalu mengalami peningkatan menjadi 99,17 pada tahun 2022, dan terus naik hingga mebcapai 99,27 pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Purworejo telah dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan akuntabel.

Jika ditinjau lebih dalam berdasarkan komponen penilaian, aspek Sinkronisasi dan Sinergi menunjukkan konsistensi yang luar biasa dengan capaian nyaris sempurna. Aspek Sinkronisasi mencatat angka 100,00 pada 2021 dan tetap tinggi di tahun-tahun berikutnya, yakni 99,36 (2022), 99,18 (2023), dan 99,00 (2024). Meskipun secara umum nilainya masih tergolong tinggi, terjadi tren penurunan pada asoek sinkronasi. Tren penurunan ini mengindikasikan adanya penurunan kualitas keterpaduan antar dokumen perencanaan dan penganggaran.

Penurunan pada aspek sinkronisasi ini menunjukkan adanya masalah dalam keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Ketidaksinkronan ini bisa disebabkan berbagai faktor, termasuk kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, perencanaan yang tidak terintegrasi, dan perubahan kebijakan yang tidak diantisipasi dengan baik.

Sementara itu, aspek Sinergi berhasil meraih skor sempurna (100,00) secara konsisten selama empat tahun berturut-turut, menandakan keselarasan dan kolaborasi yang optimal antara perangkat daerah maupun antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Aspek Integrasi juga mengalami peningkatan signifikan dari 94,71 pada tahun 2021 menjadi 98,14 pada 2022, lalu tetap tinggi di angka 98,51 (2023) dan 97,62 (2024). Hal ini

menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mengintegrasikan arah kebijakan nasional, provinsi, dan kebutuhan lokal ke dalam dokumen perencanaan.

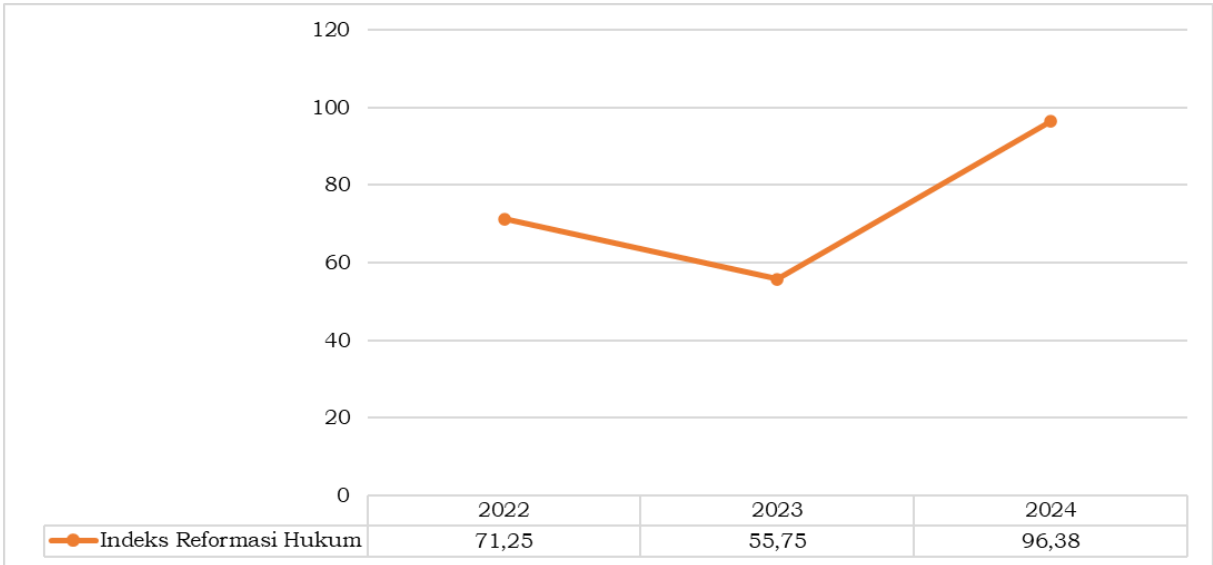
4) Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas.

Indeks Reformasi Hukum ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang kemudian menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu:

- a) Memperkuat Koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi.
- b) Mendorong regulasi dan deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil reviu.
- c) Mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level Peraturan Perundang-undangan.
- d) Meningkatkan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah.



Gambar 2. 99 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2024

Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Purworejo yang dimulai pada tahun 2022 menunjukkan capaian awal yang cukup baik dengan nilai 71,25. Menurun ditahun 2023 menjadi 55,75 dan meningkat signifikan di tahun 2024 menjadi 96,38 dengan kategori AA (ISTIMEWA). Namun masih tercapat catatan terhadap capaian ini yakni masih perlunya peningkatan

Penataan Database Peraturan Perundang-undangan agar terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

5) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (*e-Government Indeks*) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam layanan pemerintahan suatu daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah suatu daerah telah bergerak menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efisien dan terbuka. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) menghubungkan antara sistem di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Indeks SPBE mulai dihitung pada tahun 2018 sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Selama dua tahun sejak diterbitkannya Perpres No. 95/2018 tentang SPBE, tingkat kematangan SPBE masih relatif rendah. Pada tahun 2021, Kementerian PANRB melakukan evaluasi dengan instrumen baru berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Adapun proses evaluasi SPBE akan diawali dengan melakukan penilaian mandiri oleh masing-masing instansi pemerintah. Kemudian dilanjutkan dengan penilaian dengan tahapan penilaian dokumen, wawancara, dan penilaian berbasis online, dimana Kementerian PANRB akan mengoptimalkan peran perguruan tinggi di masing-masing daerah untuk pelaksanaan penilaian dan dapat membantu pembinaan penerapan SPBE di pemerintah daerah. Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Purworejo selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 147 Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks SPBE	-	2,34	2,8	3,19	3,49

Sumber: Diskominfo dan Kabupaten Purworejo, 2024

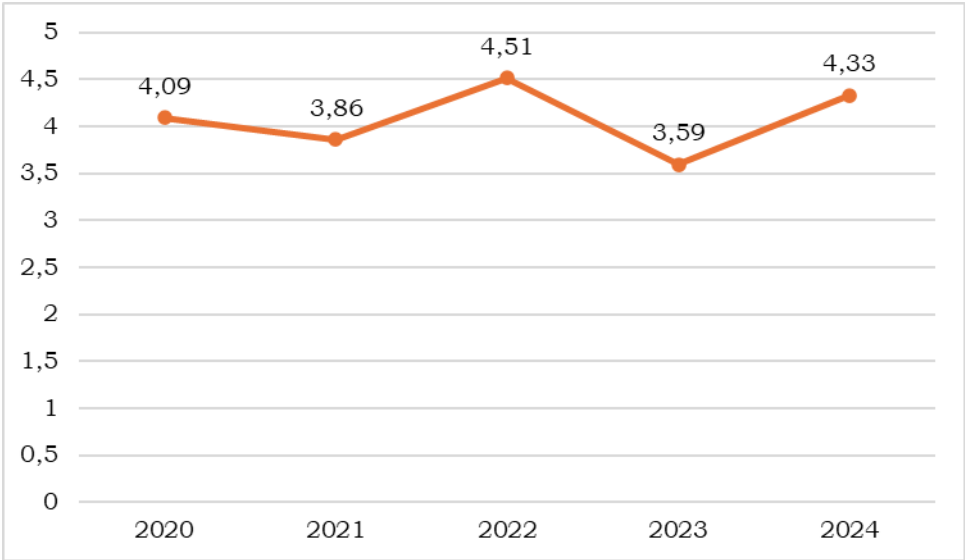
Pada tahun 2020, KemenPANRB hanya melakukan penilaian SPBE secara sampling akibat pandemi Covid-19, dan Kabupaten Purworejo tidak termasuk dalam sampel penilaian tersebut, sehingga tidak ada data yang tersedia untuk tahun tersebut. Pada tahun 2021, nilai Indeks SPBE mengalami penurunan signifikan menjadi 2,34, yang masuk dalam kategori cukup. Penurunan ini tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kinerja, melainkan disebabkan oleh perubahan indikator penilaian yang meningkat

dari 35 indikator menjadi 47 indikator, menyebabkan perbandingan langsung antar tahun menjadi tidak seimbang.

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan kembali pada nilai Indeks SPBE menjadi 2,80, yang kembali berada dalam kategori baik. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya dan kinerja SPBE meskipun tantangan indikator yang lebih banyak masih ada. Tahun 2024 menunjukkan tren positif yang berkelanjutan dengan nilai Indeks SPBE yang mencapai 3,49, tetap dalam kategori baik, mencerminkan perbaikan yang konsisten dan signifikan dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Purworejo. Peningkatan bertahap ini menggambarkan adanya komitmen dan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dan layanan publik melalui teknologi informasi.

6) Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).



Gambar 2. 100 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2024

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan dari Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo menunjukkan fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Meskipun mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022, terjadi penurunan pada tahun 2023 dengan angka 3,59, dan kembali meningkat menjadi 4,33 pada tahun 2024. Penurunan Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Purworejo disebabkan oleh rendahnya komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik serta kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik.

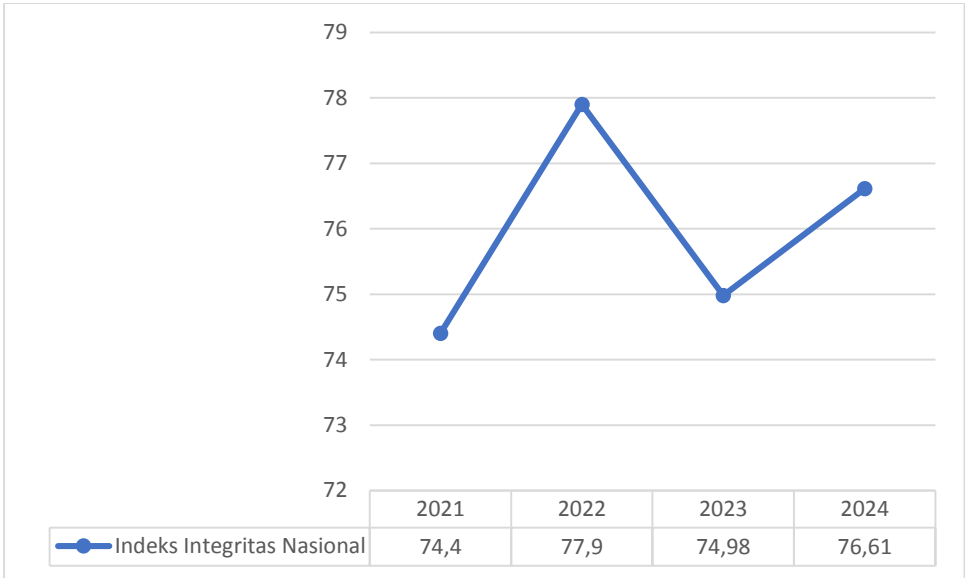
Monitoring dan evaluasi belum merata dan tidak dilakukan secara berkala, yang berdampak negatif pada kualitas pelayanan.

Selain itu, standar pelayanan pada setiap unit pelayanan di Kabupaten Purworejo belum seragam. Ketika dilakukan penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP), banyak instrumen data dukung penilaian yang belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan standar pelayanan, yang mengakibatkan penurunan nilai IPP.

Kabupaten Purworejo perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi harapan masyarakat dan memastikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Salah satu langkah penting adalah penerapan sistem inovasi dalam pelayanan publik, sehingga program dan kegiatan yang dijalankan dapat memiliki daya ungkit yang lebih tinggi. Inovasi ini penting untuk meningkatkan daya saing daerah dan memastikan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Purworejo dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

7) Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional diperoleh melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Survei ini merupakan salah satu upaya perbaikan dari KPK dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mengukur risiko korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. SPI menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan budaya birokrasi BerAKHLAK. Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan/atau organisasi. Sedangkan perhitungan untuk penilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. Sementara, penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/PD tertentu. Untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi. Survei Penilaian Integritas (SPI) berusaha menangkap penilaian persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD, yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Dimensi penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.



Gambar 2. 101 Survei Penilaian Integritas Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2024

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2025

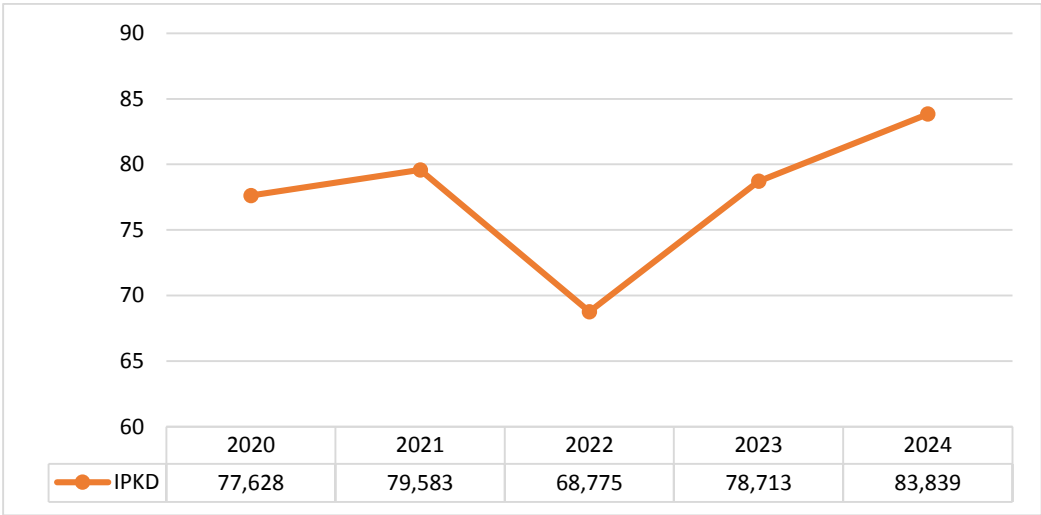
Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator transparansi berada pada angka yang relatif baik (di atas rata-rata nasional), terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal. Secara umum, pelaksanaan tugas di Kabupaten Purworejo masih menghadapi beberapa risiko dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko berupa pemberian gratifikasi/suap/ pemerasan masih tinggi di instansi ini, setidaknya dalam satu aspek penilaian integritas pegawai.

Risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih berada pada tingkat yang tinggi, setidaknya dalam satu aspek pengelolaan anggaran. Risiko terjadinya penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa diyakini masih ada dalam skala menengah. Kabupaten Purworejo dinilai cukup objektif dalam menjalankan proses promosi/mutasi. Sistem pengawasan internal untuk meminimalkan risiko perdagangan pengaruh (*trading in influence*) di instansi ini sudah cukup baik. Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan di Kabupaten Purworejo, dan berdampak cukup efektif terhadap pembentukan perilaku antikorupsi. Meskipun upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Purworejo sudah sangat baik, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi dapat meningkatkan sistem antikorupsi melalui penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti.

8) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan instrumen evaluatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangannya secara transparan, akuntabel, efisien, dan

sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. IPKD mencakup berbagai dimensi, mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan dan akuntabilitas kinerja keuangan.



Gambar 2. 102 Grafik Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024

Selama lima tahun terakhir, capaian IPKD Kabupaten Purworejo menunjukkan tren positif dengan peningkatan nilai secara konsisten, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Nilai IPKD Kabupaten Purworejo pada tahun 2020 sebesar 77,628, meningkat menjadi 79,583 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 68,775, yang mengindikasikan adanya kendala dalam tata kelola keuangan pada periode tersebut.

Pemerintah Kabupaten Purworejo merespon penurunan ini dengan langkah-langkah perbaikan yang sistematis, seperti penguatan perencanaan keuangan berbasis kinerja, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, serta optimalisasi fungsi pengawasan intern. Hasilnya pada tahun 2023 nilai IPKD kembali meningkat menjadi 78,713 dan mencapai 83,839 pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 ini merupakan nilai tertinggi selama lima tahun terakhir dan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik, kredibel, dan akuntabel.

Peningkatan nilai IPKD tersebut tidak terlepas dari konsistensi Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat waktu.

Tabel 2. 148 Ketetapan Waktu Penetapan APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2025

Tahun	Waktu Penetapan	Realisasi
1	2	3
2020	18 Desember 2019	Tepat waktu
2021	23 Desember 2020	Tepat waktu
2022	16 Desember 2021	Tepat waktu
2023	27 Desember 2022	Tepat waktu
2024	29 Desember 2023	Tepat waktu
2025	30 Desember 2024	Tepat waktu

Sumber: BPKAD Kabupaten Purworejo, 2025

Sepanjang periode tahun 2020 hingga 2025, penetapan APBD selalu dilakukan sebelum batas waktu akhir tahun anggaran berjalan. APBD tahun 2020 ditetapkan pada 18 Desember 2019, tahun 2021 ditetapkan pada 23 Desember 2020, dan 2022 ditetapkan lebih awal pada 16 Desember 2021. Sementara itu, APBD tahun 2023-2025 masin-masing ditetapkan pada 27 Desember 2022, 29 Desember 2023, dan 30 Desember 2024. Ketepatan ini menunjukkan adanya disiplin fiskal, sinergi kelembagaan, serta kesiapan dokumen perencanaan dan penganggaran yang baik dari seluruh perangkat daerah.

Keterkaitan antara IPKD dan ketepatan waktu penetapan APBD menjadi penting karena penetapan anggaran yang tepat waktu merupakan salah satu indikator dalam penilaian IPKD. Ketepatan ini menjamin bahwa tahapan pelaksanaan program dan kegiatan tidak mengalami keterlambatan akibat kendala administratif. Selain itu, disiplin dalam penetapan APBD juga menunjukkan efektivitas koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan siklus anggaran tahunan, Dengan demikian, pencapaian ketepatan waktu penetapan APBD turut memperkuat dimensi pengelolaan keuangan dalam IPKD, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap stabilitas fiskal daerah dan keberhasilan pembangunan.

9) Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK akan menghasilkan opini. Opini dari hasil pemeriksaan keuangan merupakan pernyataan profesional dari pemeriksa yang didapat dari data dan fakta hasil pemeriksaan, khususnya mengenai tingkat kewajaran informasi keuangan yang telah disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah. Antara lain Wajar tanpa pengecualian (WTP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), Opini tidak Wajar, dan Pernyataan menolak memberikan Opini. Opini BPK terhadap pemeriksaan keuangan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 149 Opini BPK Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPK, 2024

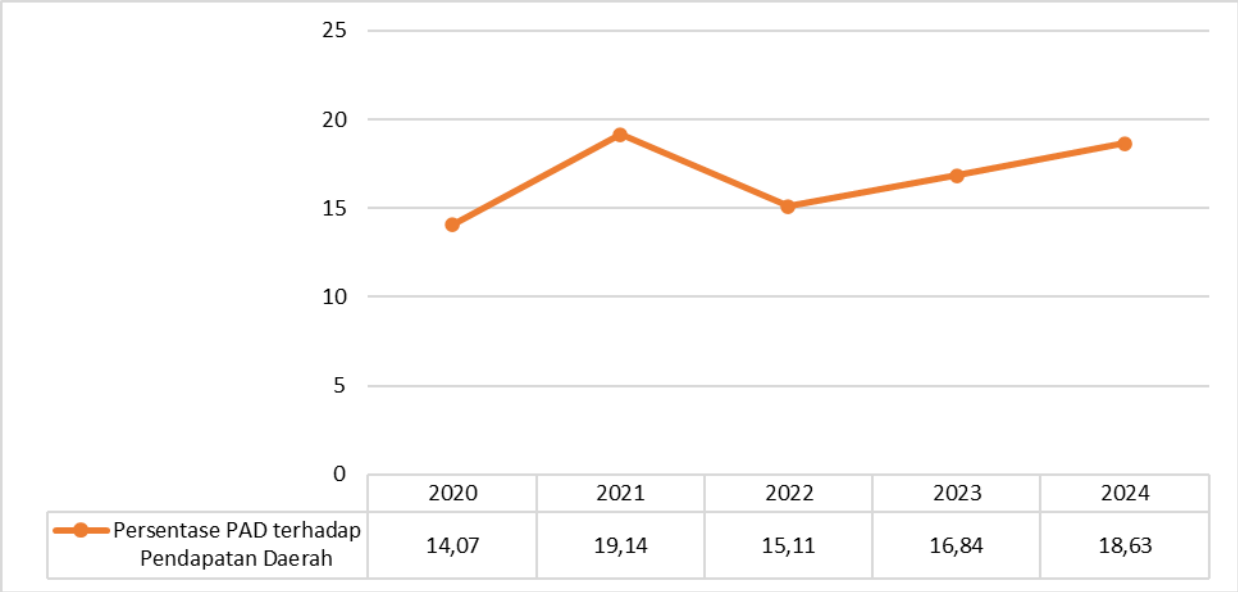
Pemerintah Kabupaten Purworejo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut sejak 2020. Opini audit yang diberikan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah satu material. Hal ini dikarenakan Auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

10) **Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen utama dalam struktur pendapatan daerah yang bersumber dari potensi lokal, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD mencerminkan kapasitas kemandirian fiskal suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa bergantung secara berlebihan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat kontribusi keuangan daerah yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri. Makin besar proporsi PAD, makin kuat kemandirian fiskal daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, persentase PAD Kabupaten Purworejo mengalami fluktuatif namun menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, proporsi PAD terhadap pendapatan daerah kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan dalam pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal, meskipun secara umum kontribusi PAD masih cukup rendah.



Gambar 2. 103 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: BPKPAD Kabupaten Purworejo, 2025

11) **Rasio Pajak terhadap PDRB**

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rasio pajak daerah terhadap PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Tabel berikut ini menunjukkan rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2. 150 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian Komponen	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Daerah (juta Rp)	74.189	84.227	100.654	102.276	104.217
2	PDRB ADHB (miliar Rp)	18.646,49	19.602,72	21.352,54	23.188,03	24.800,93
3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,398	0,430	0,471	0,441	0,420

Sumber: BPKPAD Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data dalam tabel di atas, dapat diamati bahwa pajak daerah dan PDRB Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan pengecualian pada tahun 2020 yang dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19. Pajak daerah meningkat dari Rp74.189.000,00 pada tahun 2020 menjadi Rp104.217.000,00 pada tahun 2024, sementara PDRB ADHB meningkat dari Rp18.646.490,00 pada tahun 2020 menjadi Rp24.800.930.000,00 pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan pajak daerah selama periode ini adalah 7,55%, sedangkan rata-rata pertumbuhan PDRB ADHB adalah 5,65%.

Tren peningkatan pajak daerah terhadap PDRB ini menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo berhasil meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah relatif lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara umum. Namun, meskipun ada tren peningkatan, rasio pajak daerah terhadap PDRB mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024, menjadi 0,420% dibandingkan dengan 0,441 % pada tahun 2023.

Penurunan rasio pajak daerah terhadap PDRB pada tahun 2024 mengindikasikan adanya tantangan dalam memaksimalkan pendapatan pajak daerah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan ini termasuk perubahan kebijakan pajak, kurangnya efisiensi dalam sistem pemungutan pajak, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

12) Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pasal 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) untuk menyelenggarakan SPIP. Ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi dinilai dengan tingkat maturitas. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

K/L/D bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian intern dengan melaksanakan identifikasi sampai pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi. Pengelolaan risiko

dan pengendalian korupsi yang efektif hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan peran APIP yang kapabel. Integrasi antara pengelolaan risiko, pengendalian korupsi, dan APIP yang kapabel akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan K/L/D.

Tingkat maturitas Kabupaten Purworejo tahun 2024 berada pada level 3,318. Nilai tersebut naik dibandingkan tahun 2023 pada angka 3,309. Hal ini dapat diamati pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 151 Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat Maturitas SPIP	3,023	3,023	3,014	3,309	3,318

Sumber: Inspektorat Kabupaten Purworejo, 2023

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Purworejo menunjukkan nilai yang relatif stabil dari tahun 2020 hingga 2021, dengan skor 3,023. Namun, pada tahun 2022, nilai ini sedikit menurun menjadi 3,014 sebelum kembali meningkat signifikan pada tahun 2024 menjadi 3,318. Tingkat maturitas pada level 3 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) telah melaksanakan pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun, evaluasi atas pengendalian intern seringkali dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Mulai tahun 2022, penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP menggunakan acuan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Pedoman ini mencakup empat unsur utama: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Meskipun peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 merupakan perkembangan positif, beberapa masalah utama masih perlu diatasi untuk mencapai maturitas yang lebih tinggi. Salah satu permasalahan adalah kurangnya dokumentasi yang memadai dalam evaluasi pengendalian intern. Dokumentasi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa semua langkah pengendalian yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan diperiksa secara efektif.

Selain itu, integrasi dari manajemen risiko dan pengendalian korupsi ke dalam sistem SPIP masih perlu ditingkatkan. Manajemen risiko yang efektif membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, sementara pengendalian korupsi yang kuat memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ada dapat mencegah tindakan koruptif.

13) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Purworejo terus melakukan upaya peningkatan kinerja pengelolaan kepegawaian dan pengawasan internal. Salah satu indikator yang merefleksikan efektivitas pengelolaan tersebut adalah

capaian tindak lanjut atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Melalui penguatan sistem pengawasan dan komitmen terhadap prinsip integritas, Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya menciptakan birokrasi yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.

Tabel 2. 152 Capaian Kinerja Pengawasan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah temuan BPK	14	5	14	11	7
2	Jumlah rekomendasi BPK	36	10	20	23	11
3	Persentase tindak lanjut temuan	77,78% (28 dari 36)	90,00% (9 dari 10)	100% (20 dari 20)	34,78% (8 dari 23)	45,45% (5 dari 11)
4	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		2,27	2,93	2,964	3,096

Sumber: Inspektorat Kabupaten Purworejo, 2025

Dalam periode tahun 2020 hingga 2024, Pemerintah Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam efektivitas sistem pengawasan internal dan pengendalian risiko korupsi. Hal ini tercermin dari tren kenaikan nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dari 2,27 pada tahun 2020 menjadi 3,096 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, komitmen terhadap prinsip-prinsip integritas, dan upaya pencegahan korupsi yang semakin terstruktur.

Secara paralel, capaian tindak lanjut terhadap temuan BPK juga mencerminkan dinamika pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Meskipun sempat mencapai tingkat tindak lanjut 100 persen pada tahun 2022, terjadi penurunan di tahun-tahun berikutnya, yaitu menjadi 34,78 persen pada 2023 dan 45,45 persen pada 2024. Penurunan ini menjadi catatan penting bahwa efektivitas tidak hanya tercermin dari capaian indikator tindak lanjut secara kuantitatif, tetapi juga dari upaya sistematis dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, sebagaimana tercermin dalam peningkatan nilai IEPK.

Jumlah temuan BPK relatif fluktuatif selama periode ini, dari 5 temuan pada 2020, meningkat menjadi 14 temuan pada 2021, lalu menurun menjadi 7 temuan pada 2024. Meski jumlah temuan dan rekomendasi BPK mengalami dinamika, konsistensi peningkatan skor IEPK menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak hanya fokus pada penyelesaian administrasi hasil audit, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Peningkatan IEPK yang stabil selama lima tahun terakhir menjadi indikator positif terhadap penguatan integritas birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Capaian ini penting sebagai landasan untuk mendorong reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan

pembentukan budaya organisasi yang antikorupsi di seluruh lini pemerintahan daerah.

14) Nilai Kapabilitas APIP

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, terdapat konsep pengawasan intern yang mencakup kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang secara umum bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam struktur organisasi sektor publik di Indonesia, kegiatan pengawasan intern tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal K/L dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten.

Terkait dengan pelaksanaan peran tersebut, kapabilitas dan efektivitas APIP dianggap sebagai dua indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP, sebagai institusi, telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan menantang, peran APIP dan pengawasan intern perlu dikontekstualisasikan dalam era yang lebih adaptif, dengan tetap berpegangan pada tujuan utama dan kebermanfaatan APIP bagi organisasi. Penilaian kapabilitas dan efektivitas peran APIP harus tetap diarahkan untuk menjawab mandat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bahwa perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus dapat:

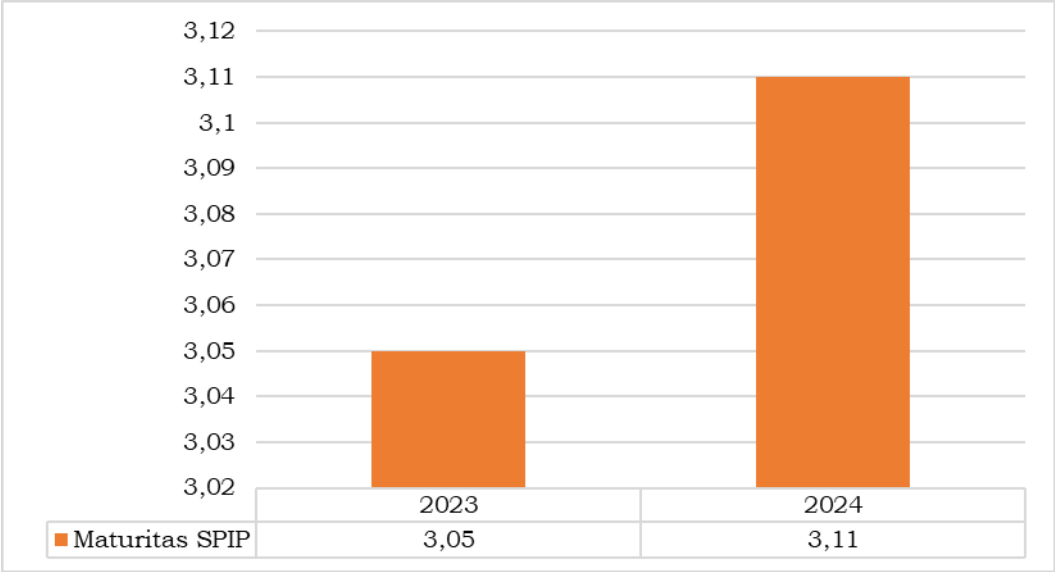
- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola tugas dan fungsi instansi pemerintah

Urgensi penyesuaian konsep dan mekanisme penilaian kapabilitas sebagai respon atas dinamika lingkungan strategis menjadi semakin relevan karena upaya peningkatan kapabilitas dan efektivitas peran APIP mulai bergeser kearah yang lebih progresif. Artinya, saat ini kapabilitas APIP tidak hanya diasosiasikan sebagai kebutuhan pembangunan infrastruktur pengawasan intern, tetapi mendorong implementasi penuh dan internalisasi aktivitas pengawasan yang bermutu. Kondisi ini menjadi fondasi penting untuk menuju tahapan aktualisasi peran APIP dan pengawasan intern yang lebih baik lagi. Selain itu, dalam konsep SPIP Terintegrasi peran APIP menjadi lebih konkret dan strategis karena dalam melaksanakan pengawasan intern, APIP memiliki tugas dan fungsi penting mengintegrasikan penyelenggaraan tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian (*Governance, Risk, Control/GRC*) di lingkup manajemen Pemerintahan Daerah.

Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Purworejo saat ini berada pada level 3 (*delivered*) yang artinya APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan

peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D. Mulai Tahun 2022 Penilaian Kapabilitas APIP diukur mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Selain Tingkat maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP sebagaimana telah disebutkan diatas, peran Inspektorat yang lain yaitu mengawal terkait dengan penilaian risiko. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu pada pasal 13 sampai dengan pasal 17, juga dinyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan. Instansi Pemerintah harus mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan (pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan), baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi, selanjutnya dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.



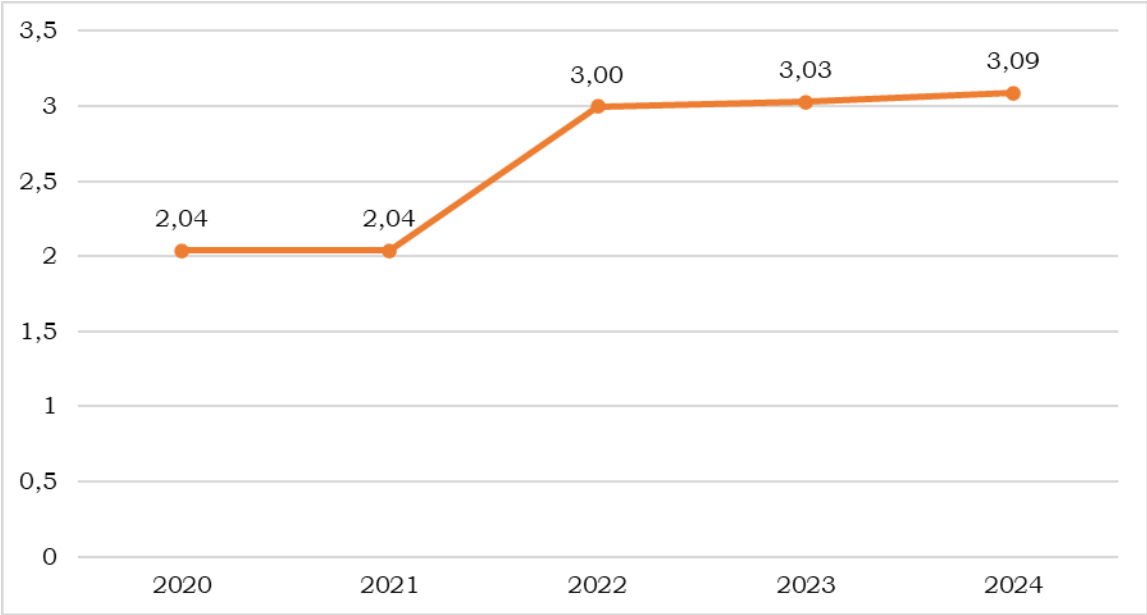
Gambar 2. 104 Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2024

Sumber: Inspektorat Kabupaten Purworejo, 2025

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan capaian maturitas SPIP level 3,11 telah melakukan penilaian risiko, namun masih terdapat permasalahan-permasalahan diantaranya:

- a. Kebijakan yang menjadi acuan dalam penilaian risiko masih berupa perintah/himbauan untuk melakukan penilaian risiko yang tertuang dalam kebijakan penyelenggaraan SPIP, dan belum terdapat pedoman pengelolaan risiko yang mengatur secara lebih teknis;
- b. Penilaian Risiko masih bersifat formalitas dan belum menjadi pertimbangan dalam perencanaan pengawasan;
- c. Rencana Tindak Pengendalian tidak ditindaklanjuti;
- d. Waktu pelaksanaan penilaian risiko tidak terstandar, dilakukan sewaktu-

- waktu;
- e. Penilaian Risiko bersifat manual belum menggunakan aplikasi;
 - f. Tahapan penilaian risiko tidak dilakukan sesuai ketentuan;
 - g. Penilaian risiko masih atas kegiatan operasional, belum atas tujuan strategis;
 - h. Penilaian risiko dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing OPD, focus pada tujuan OPD belum pada tujuan pemerintah daerah (lintas OPD);
 - i. Tidak jelas pihak yang melakukan penilaian risiko;
 - j. Pejabat strategis belum dilibatkan dalam penilaian risiko;
 - k. Belum terdapat kegiatan monitoring atas proses penilaian risiko.



Gambar 2. 105 Manajemen Risiko Indeks Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Inspektorat Kabupaten Purworejo, 2024

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka “Pengelolaan Risiko bagi Pemerintah Daerah” menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, tidak hanya sekedar pelaksanaan “Penilaian Risiko”. Dikaitkan dengan pemerintahan daerah, pada dasarnya tujuan pelaksanaan pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah antara lain melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Berbagai upaya juga telah dilakukan pemerintah daerah misalnya dalam bentuk penataan kelembagaan, perbaikan peraturan perundang-undangan, dan penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih baik. Namun demikian, masih terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang masih terjadi menunjukkan bahwa tujuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan belum secara optimal tercapai dan pengelolaan risiko harus dilakukan. Untuk itu Inspektorat harus mengambil peran dalam penilaian risiko di tingkat Pemerintah Daerah.

Perlu diingat bahwa setiap aktivitas yang dilakukan organisasi, termasuk didalamnya pemerintah daerah, tidak terlepas adanya risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak

tercapai. Pengelolaan risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan SPIP. Semakin baik pemerintah daerah dalam mengelola risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIP nya. SPIP yang baik diharapkan akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pula.

15) Indeks Profesionalitas ASN

Sumber Daya Aparatur memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan daerah. Struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2024 terdiri dari 9.121 oran, yang meliputi 5.565 PNS, 2 CPNS, dan 3.554 PPPK. Komposisi ASN didominasi oleh perempuan (65%), sementara laki-laki berjumlah 35%. Secara umum, sebaran usia ASN masih tergolong produktif, dengan kelompok usia 31-50 tahun mencakup lebih dari 54% dari total Asn. Hal ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran dan kontribusi ASN dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah maupun panjang.

Dari sisi tingkat pendidikan, sebagian besar ASN memiliki kualifikasi Strata 1 (S1) sebanyak 65% (5.776 orang), disusul oleh lulusan Diploma III (D3) sebanyak 1.563 orang (17%), dan Strata 2 (S2) sebanyak 735 orang (7,9%). Namun, masih terdapat ASN yang berpendidikan SMA ke bawah sebanyak 113 orang. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan ASN masih perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung profesionalisme aparatur.

Dari sisi jenis jabatan fungsional, ASN di sektor pendidikan mendominasi dengan jumlah 5.174 orang, khususnya guru (99%). Sektor kesehatan juga memiliki jumlah signifikan, dengan 1.893 ASN, yang terdiri dari perawat, bidan, dokter, dan tenaga laboratorium. Sementara itu, jabatan fungsional teknis mencapai 455 orang, dengan peran penting seperti pranata komputer, penyuluh pertanian, auditor, dan arsiparis. Komposisi ini menggambarkan fokus pemerintah daerah pada sektor pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkinerja tinggi dan responsif terhadap tantangan pembangunan, diperlukan ASN yang profesional, adaptif, dan memiliki integritas. Profesionalisme ASN merupakan salah satu prinsip utama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetang Aparatur Sipil Negara, yang menekankan pentingnya ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN, digunakan Indeks Profesionalitas ASN, yang mencakup empat komponen utama yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan.

Tabel 2. 153 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	7	8
1	Indeks Profesionalitas ASN	79,70	51,36	52,88	75,36	82,25

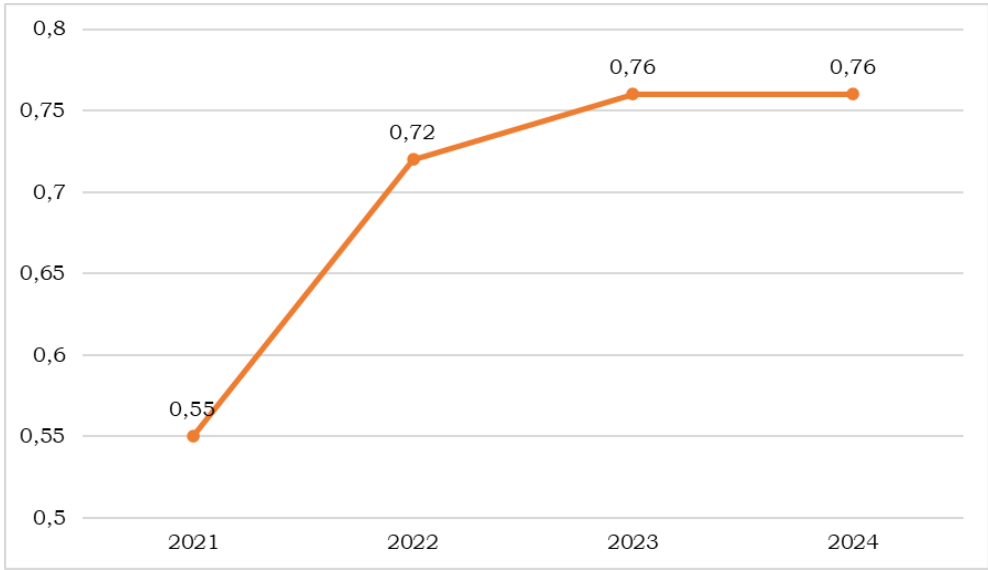
Sumber: BKPSDM Kabupaten Purworejo, 2024

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purworejo dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, nilai indeks berada di angka 79,70, menurun cukup signifikan menjadi 51,36 pada tahun 2021. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan SDM ASN, baik dari sisi kompetensi maupun kepatuhan terhadap norma kerja. Namun, sejak tahun 2022, Kabupaten Purworejo berhasil melakukan berbagai langkah strategis, seperti peningkatan pelatihan berbasis kompetensi, pemetaan kebutuhan pengembangan SDM, serta penguatan sistem evaluasi kinerja pegawai. Hasil nilai Indeks Profesionalitas ASN mengalami peningkatan signifikan, hingga mencapai 82,25 pada tahun 2024 yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Peningkatan ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mendorong reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek pengembangan kapasitas ASN. Dengan semakin banyaknya ASN yang mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatan, maka ke depan, ASN diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara lebih optimal, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, capaian Indeks Profesionalitas ASN yang positif juga menjadi indikasi bahwa Pemerintah Daerah telah memiliki fondasi kelembagaan yang kuat dalam membangun birokrasi yang profesional, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

16) Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Pelaksanaan sistem merit pada manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal penting sebagai upaya mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing.



Gambar 2. 106 Indeks Sistem Merit Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2024
Sumber: BKPSDM Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, dapat dipahami bahwa rendahnya indeks profesionalitas ASN di Kabupaten Purworejo salah satunya disebabkan oleh rendahnya penerapan sistem merit yang efektif. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa sebelum tahun 2021, Indeks Sistem Merit belum tercatat (N/A), dan baru mulai diukur pada tahun 2021 dengan nilai 0,55. Meskipun ada peningkatan signifikan pada tahun 2022

dengan indeks mencapai 0,72 dan 0,76 pada tahun 2023, nilai-nilai ini menunjukkan bahwa sistem merit masih dalam tahap perkembangan dan belum sepenuhnya matang.

Peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor kunci, termasuk adanya assessment kompetensi dan potensi ASN yang lebih terstruktur dan adanya sistem pendukung seperti aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Assessment kompetensi dan potensi ASN memungkinkan identifikasi yang lebih baik terhadap kemampuan dan kebutuhan pengembangan pegawai, sementara aplikasi SIMPEG membantu dalam mengelola data kepegawaian dengan lebih efektif dan efisien.

Namun, meskipun ada peningkatan, penerapan sistem merit di Kabupaten Purworejo masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip merit secara konsisten di seluruh perangkat daerah. Selain itu, masih terdapat hambatan dalam hal kapasitas dan keterampilan manajemen SDM yang diperlukan untuk menerapkan sistem merit secara optimal.

17) Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan, dilakukan pengawasan kearsipan. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan kearsipan internal merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Purworejo terhadap perangkat daerah di lingkungannya. Pengawasan kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan melalui audit kearsipan yang meliputi proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan di masing-masing pencipta arsip. Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Sedangkan Audit Kearsipan Eksternal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan.

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bahwa Nilai Pengawasan Kearsipan menjadi salah satu komponen penilaian dalam Reformasi Birokrasi, yaitu aspek hasil antara (Kualitas Pengelolaan Arsip diukur dengan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dari ANRI) sehingga perlu dipastikan penyelenggaraan kearsipan di suatu lembaga melalui pengawasan kearsipan, baik internal maupun eksternal. Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Purworejo dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh ANRI adalah sebagai berikut:

- a) Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Purworejo pada Tahun 2020 adalah AA (Sangat Memuaskan) dan menduduki peringkat ke 13 dari seluruh Kabupaten/ Kota di Indonesia;

- b) Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Purworejo pada Tahun 2021 adalah B (Baik) dan menduduki peringkat ke 40 dari seluruh Kabupaten/ Kota di Indonesia; dan
- c) Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Purworejo pada Tahun 2022 adalah BB (Sangat Baik) dan menduduki peringkat ke 39 dari seluruh Kabupaten/ Kota di Indonesia.
- d) Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Purworejo pada Tahun 2023 adalah A (Memuaskan) dan menduduki peringkat 53 dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
- e) Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Purworejo pada Tahun 2024 adalah BB (Sangat Baik) dan menduduki peringkat ke 104 dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan yang dilakukan oleh ANRI, Kabupaten Purworejo memperoleh nilai dengan kategori yang bervariasi, mulai dari B (Baik) hingga AA (Sangat Memuaskan). Capain tertinggi diraih pada tahun 2020 dengan nilai AA (Sangat Memuaskan) dan menempati peringkat ke-13 secara nasional. Namun demikian, capaian tersebut belum dapat dipertahankan secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya. Penurunan peringkat terjadi pada tahun 2021, dengan nilai turun menjadi B (Baik) dan peringkat menjadi B (Baik) dan peringkat menjadi ke-40.

Penurunan peringkat pada tahun 2021 tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kemunduran kinerja, melainkan lebih disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan penilaian pengawasan kearsipan oleh ANRI. Pada tahun 2020, nilai yang digunakan hanya berasal dari hasil pengawasan kearsipan eksternal, yaitu antara ANRI dengan Lembaga Kearsipan Daerah. Sementara itu, mulai tahun 2021, metode penilaian mengalami perubahan dengan melibatkan pengawasan internal ke seluruh perangkat daerah, sehingga cakupan pengawasan menjadi lebih luas dan kompleks. Sehingga, nilai yang dihasilkan pada tahun-tahun setelah 2020 lebih mencerminkan kondisi riil penyelenggaraan kearsipan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.

Tabel 2. 154 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	-	68,02	73,16	81,92	75,78
2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal	-	-	62,22	82,36	76,38
3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal	93,4	68,02	80,46	81,26	75,38

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo, 2025

Nilai hasil pengawasan kearsipan menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021-2023, yaitu 68,02 pada tahun 2021 menjadi 73,16 pada tahun 2022, dan mencapai 81,92 pada tahun 2023. Capaian ini mencerminkan perbaikan tata kelola kearsipan, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas pembinaan internal oleh lembaga kearsipan daerah. Namun,

pada tahun 2024 terjadi penurunan niai menjadi 75,78 yang mengindikasikan adanya tantangan dalam konsistensi pelaksanaan kebijakan kearsipan di seluruh perangkat daerah. Penurunan ini menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan kearsipan ke depan.

Secara umum, hasil pengawasan menunjukkan bahwa penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Purworejo telah mengalami perbaikan, meskipun masih diperlukan penguatan aspek kelembagaan, sumber daya manusia, serta pengawasan berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kearsipan daerah secara menyeluruh.

Salah satu faktor yang turut memengaruhi hasil pengawasan kearsipan adalah tingkat partisipasi dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Berdasarkan data capaian, Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN di Kabupaten Purworejo masih sangat rendah. Selama periode 2020 higga 2023, persentase unggahan tercatat 0 persen, dan baru menunjukkan peningkatan pada tahun 2024 sebesar 21,74 persen.

Tabel 2. 155 Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

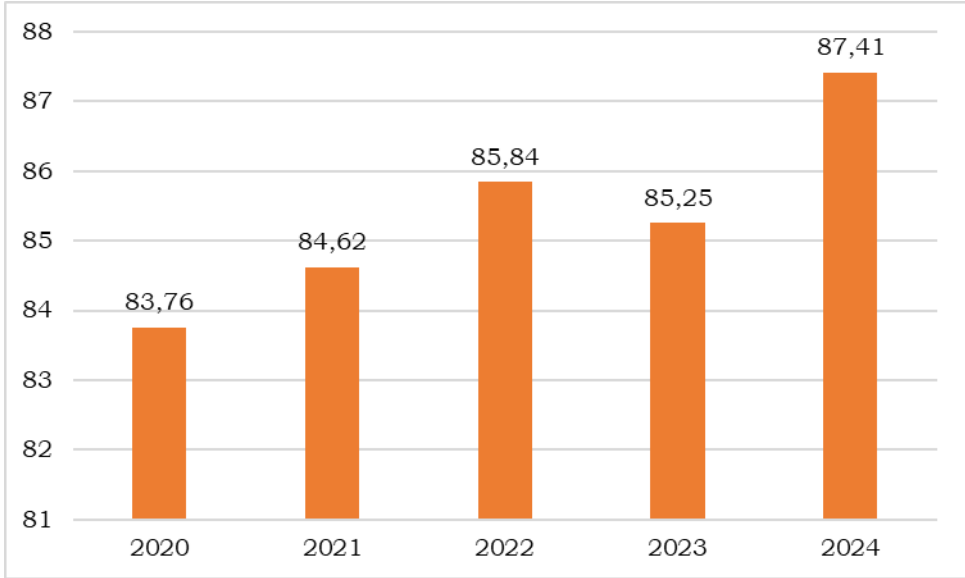
No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	0	0	0	21,74

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo, 2025

18) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator penting untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Di Kabupaten Purworejo, capaian IKM menunjukkan tren peningkatan selama periode lima tahun terakhir, yang mencerminkan adanya pebaikan kinerja pelayanan publik.

Pada tahun 2020, nilai IKM berada pada angka 83,76 dan mengalami peningkatan secara konsisten hingga mencapai 85,84 pada tahun 2022. Meskipun pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 85,25 capaian tersebut tetap berada pada kategori baik. Peningkatan signifikan kembali terjadi pada tahun 2024 dengan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 87,41.



Gambar 2. 107 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2025

Jika ditinjau lebih mendalam berdasarkan wilayah kecamatan, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Purworejo menunjukkan variansi yang cukup signifikan, namun secara umum mengalami tren peningkatan di hampir seluruh kecamatan. Berikut ini capaian nilai IKM untuk 16 kecamatan di Kabupaten Purworejoi.

Tabel 2. 156 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Bagelen	86,75	81,43	81,67	82,33	90,81
2	Banyuurip	86,83	80,75	84,81	85,19	87,75
3	Bayan	90,75	90,97	91,03	90,96	91,04
4	Bener	87,59	87,95	93,97	85,99	88,38
5	Bruno	81,25	81,25	85,50	83,27	85,97
6	Butuh	82,75	82,75	94,31	88,44	86,00
7	Gebang	81,57	80,66	82,86	86,80	83,63
8	Grabag	81,25	79,89	79,44	79,44	84,32
9	Kaligesing	81,25	79,50	82,81	82,75	87,58
10	Kemiri	79,61	77,96	78,75	80,03	84,77
11	Kutoarjo	78,21	80,13	81,19	88,22	85,54
12	Loano	84,56	84,73	85,47	85,47	85,08
13	Ngombol	85,58	83,46	86,31	85,75	86,24
14	Pituruh	84,00	84,00	84,31	84,35	86,86
15	Purwodadi	85,25	85,25	86,06	90,31	91,94
16	Purworejo	81,25	81,39	84,67	78,47	84,75
	Rata-Rata	83,65	82,63	85,20	84,86	86,92

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2025

Beberapa kecamatan mencatatkan kinerja yang sangat baik dengan nilai IKM yang secara konsisten tinggi. Kecamatan seperti Bagelen, Bayan, dan Purwodadi tercatat memiliki capaian IKM di atas 90 pada beberapa tahun

terakhir, mencerminkan kualitas layanan publik yang prima dan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah di wilayah tersebut. Kenaikan capaian IKM di kecamatan mengindikasikan adanya pembenahan yang signifikan dalam aspek pelayanan publik, baik dari sisi prosedur, kecepatan, maupun kenyamanan layanan.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa kecamatan yang memiliki nilai IKM relatif lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya, meskipun tetap menunjukkan tren peningkatan. Kecamatan Bruno, Butuh, Gebang, Grabag, Kemiri, Kutoarjo, Loano, Ngombol, Pituruh, dan Purworejo pada tahun terakhir cenderung berada di bawah rata-rata kabupaten. Kondisi ini mencerminkan perlunya perhatian dan intervensi lebih lanjut untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah-wilayah tersebut.

19) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) merupakan mekanisme penilaian kinerja pemerintah daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan setiap tahun. EPPD menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Capaian nilai EPPD Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai EPPD berada di angka 2,76 kemudian melonjak tajam menjadi 33,34 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan substansial dalam pelaporan kinerja daerah, baik dari sisi kelengkapan data, kualitas analisis capaian, hingga efektivitas koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan LPPD.

Selaras dengan peningkatan kinerja tersebut, tingkat penyelenggaraan pemerintahan umum menunjukkan capaian yang optimal. Begitu pula dengan pelaksanaan administrasi tata pemerintahan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, serta penyelenggaraan transtibumlinmas yang juga menunjukkan persentase pelaksanaan sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan dan program yang direncanakan di bidang-bidang tersebut berhasil direalisasikan secara penuh sesuai perencanaan tahunan. Kegiatan administrasi pemerintahan, koordinasi antar perangkat daerah, pemenuhan layanan dasar, serta pengelolaan keamanan dan ketertiban sosial telah terlaksana dengan baik selama lima tahun terakhir.

Tabel 2. 157 Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100
2	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	100	100	100	100	100
3	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	100	100	100	100

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100
4	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	-	-	-	100	100

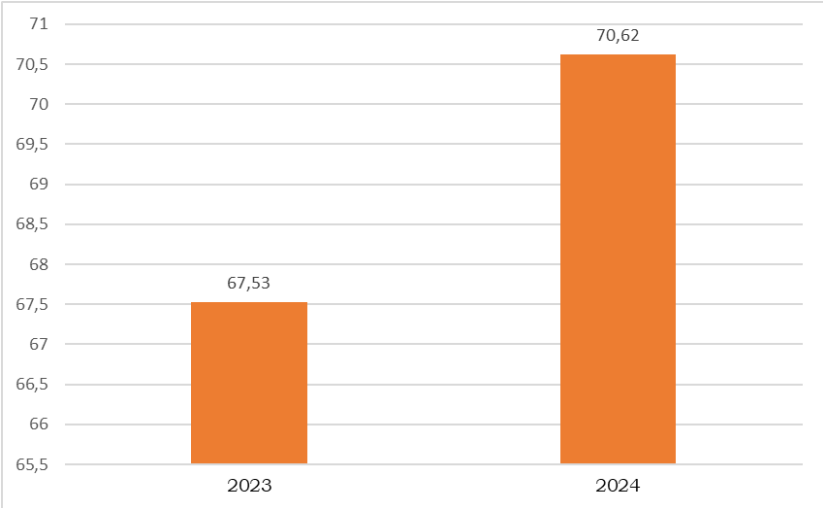
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2025

Capaian tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam memastikan seluruh urusan pemerintahan umum, pengelolaan dokumen administrasi, penyelenggaraan pelayanan dasar, serta program-program strategis di bidang kesejahteraan masyarakat – seperti pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial – terlaksana secara menyeluruh dan tepat waktu.

Namun demikian, capaian pelaksanaan 100 persen ini juga perlu dilihat lebih dalam dari sisi kualitas hasil (outcome). Pelaksanaan program yang telah terealisasi secara administratif belum tentu seluruhnya memberikan dampak yang maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat atau pencapaian target pembangunan daerah. Sebagaimana masih ditemukan dalam hal kelengkapan data dukung, ketepatan indikator kinerja, serta keselarasan antara perencanaan dan pelaporan.

20) Indeks Tata Kelola Pengadaan

Tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah. Pengelolaan pengadaan yang baik tidak hanya menjamin efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelaksanaan belanja publik. Salah satu instrumen untuk mengukur capaian tersebut adalah melalui Indeks tata Kelola Pengadaan. Indeks Tata Kelola Pengadaan adalah ukuran atau indikator kinerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dikelola secara efisien, tranparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.



Gambar 2. 108 Grafik Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2024

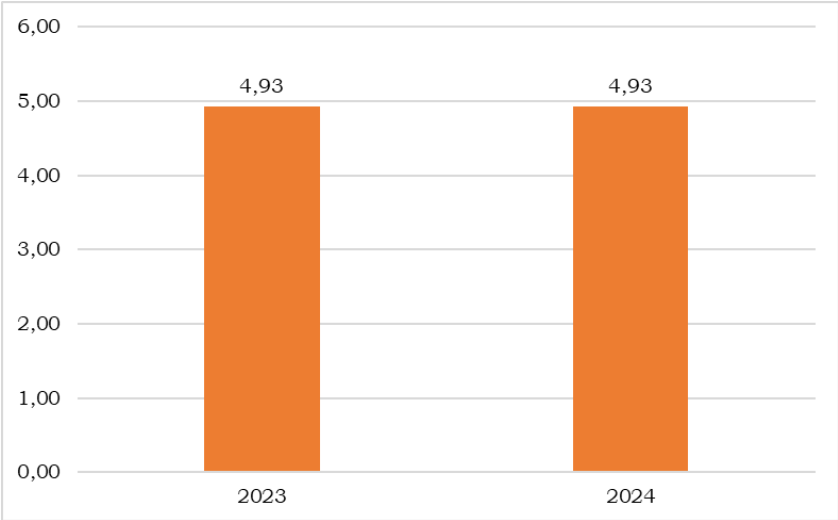
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2025

Indeks tata kelola pengadaan Kabupaten Purworejo menunjukkan tren peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, indeks berada di angka 67,53, kemudian mengalami kenaikan signifikan menjadi 70,62 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan menyeluruh dalam sistem pengadaan barang dan jasa, baik dari sisi kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan, transparansi proses, maupun profesionalisme sumber daya manusia yang terlibat.

21) Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB

Total Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank milik pemerintah daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan daerah, serta mencerminkan potensi penghimpunan dana lokal untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Jika dibandingkan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), indikator ini memberikan gambaran kontribusi sektor perbankan daerah terhadap lembaga keuangan milik daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam dua tahun terakhir, nilai total dana pihak ketiga pada bank milik Kabupaten Purworejo terhadap PDRB menunjukkan angka yang stabil, yaitu sebesar 4,93 pada tahun 2023 dan tetap di angka yang sama pada tahun 2024. Stabilitas ini menunjukkan bahwa kinerja penghimpunan dana oleh bank milik daerah relatif konsisten, meskipun belum menunjukkan pertumbuhan signifikan secara proporsional terhadap besaran PDRB.



Gambar 2. 109 Grafik Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB tahun 2023-2024

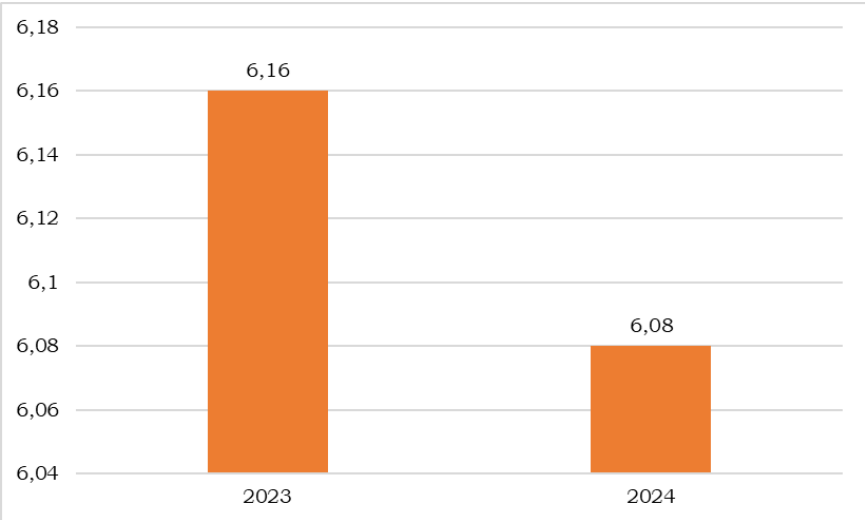
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2025

Kondisi ini dapat mencerminkan beberapa hal. Di satu sisi, stabilitas DPK dapat menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang terjaga terhadap bank milik daerah, serta kemampuan bank dalam mempertahankan basis nasabah dan simpanan. Namun di sisi lain, stagnasi angka ini juga bisa menandakan perlunya strategi ekspansi dan inovasi produk perbankan yang lebih agresif, agar peran intermediasi keuangan daerah dapat lebih optimal dalam mendukung pembiayaan sektor produktif dan memperkuat perekonomian lokal.

22) Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB

Indikator Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten terhadap PDRB mencerminkan peran lembaga keuangan daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi melalui penyaluran pembiayaan. Rasio ini menjadi tolok ukur penting untuk menilai sejauh mana bank daerah mampu menjalankan fungsi

intermediasi keuangan secara efektif, terutama dalam mendorong pertumbuhan sektor produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2. 110 Grafik Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB di Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2024

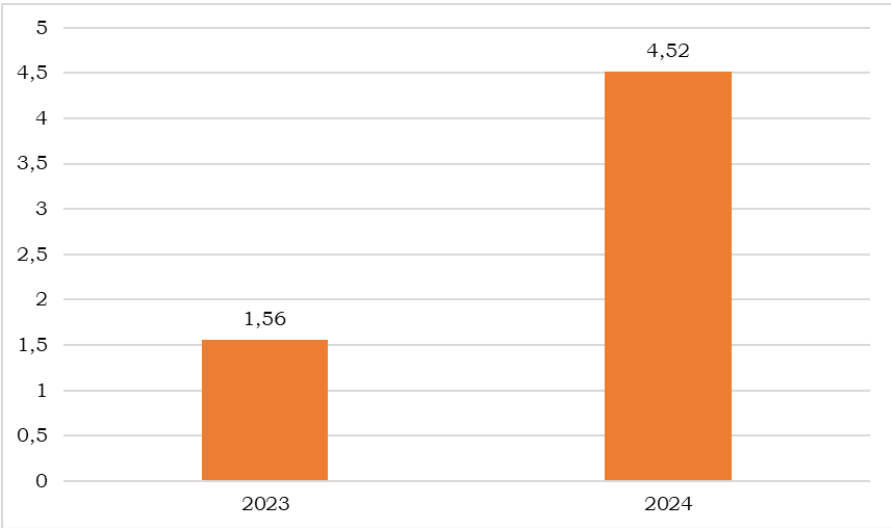
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2025

Selama dua tahun terakhir, rasio total kredit pada bank milik Kabupaten Purworejo terhadap PDRB mengalami penurunan tipis. Pada tahun 2023, rasio tersebut tercatat sebesar 6,16 kemudian turun menjadi 6,08 pada tahun 2024. Meskipun penurunan ini relatif kecil, hal tersebut tetap perlu dicermati sebagai sinyal perlambatan dalam ekspansi kredit oleh bank milik daerah.

Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya permintaan kredit di sektor ekonomi lokal, kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan karena risiko kredit, atau keterbatasan kapasitas modal bank dalam menjangkau sektor-sektor yang lebih luas, Di sisi lain, turunnya rasio kredit terhadap PDRB juga dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) berlangsung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kredit, sehingga kontribusi kredit secara relatif menjadi lebih kecil.

23) Return on Asset (ROA) BUMD

Return on Asset (ROA) merupakan indikator penting dalam mengukur kemampuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menghasilkan keuntungan dari seluruh aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien BUMD dalam memanfaatkan sumber daya untuk menciptakan laba. ROA juga mencerminkan kualitas tata kelola, kinerja operasional, serta kapasitas manajerial dalam BUMD, yang pada akhirnya turut berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan ketahanan fiskal daerah.



Gambar 2. 111 Grafik Return on Asset (ROA) BUMD Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2024

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2025

Kinerja BUMD Kabupaten Purworejo menunjukkan perbaikan signifikan dalam hal efisiensi pengelolaan aset. Hal ini tercermin dari capaian Return on Aset (ROA) yang meningkat tajam dari 1,56 persen pada tahun 2023 menjadi 4,52 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa BUMD semakin mampu mengoptimalkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Kenaikan ROA yang signifikan ini dapat diartikan sebagai hasil dari peningkatan efisiensi operasional, perbaikan struktur manajemen, atau diversifikasi usaha yang lebih strategis. Selain itu, hal ini juga mencerminkan penguatan peran BUMD dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Meskipun capaian ROA 2024 menunjukkan tren positif, keberlanjutan kinerja ini perlu dijaga melalui penguatan tata kelola BUMD, peningkatan kapasitas SDM, serta perluasan pasar dan inovasi layanan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa pengawasan, evaluasi kinerja, serta sinergi antara BUMD dan perangkat daerah terus ditingkatkan untuk menjaga peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang sehat dan kompetitif.

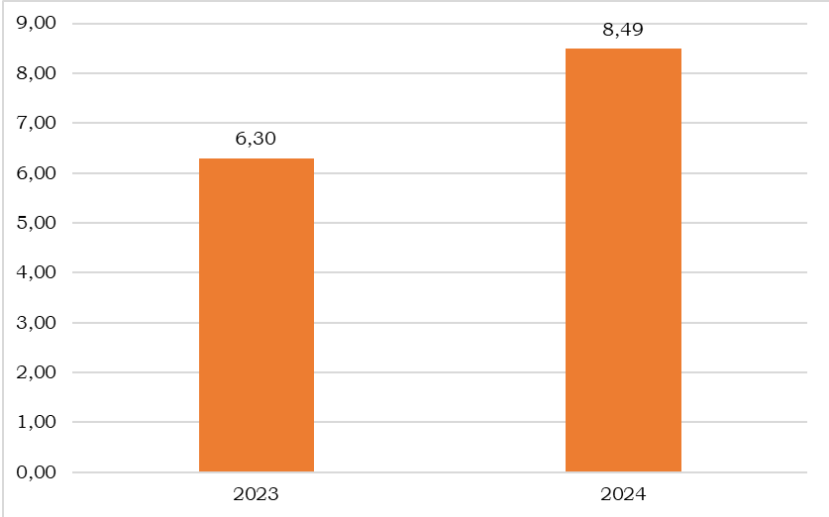
24) Persentase Kepemilikan Identitas Kepndudukan Digital

Penerapan Identitas Digital (IKD) merupakan bagian dari upaya transformasi layanan administrasi kependudukan menuju era digital. IKD tidak hanya berfungsi sebagai pengganti KTP fisik, tetapi juga sebagai fondasi dalam pengembangan layanan publik berbasis digital yang lebih efisien, aman, dan terintegrasi. Persentase kepemilikan IKD menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi informasi untuk pelayanan administrasi kependudukan.

Capaian kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren peningkatan, dari 6,30 persen pada tahun 2023 menjadi 8,49 persen pada tahun 2024. Meskipun angka tersebut masih relatif rendah, kenaikan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam proses sosialisasi dan adopsi layanan kependudukan digital di tengah masyarakat. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah

telah mulai membangun fondasi digitalisasi administrasi kependudukan melalui berbagai upaya.

Namun demikian, rendahnya tingkat kepemilikan IKD masih menjadi tantangan tersendiri. Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain: keterbatasan literasi digital masyarakat, kurangnya akses terhadap perangkat dan jaringan internet, serta resistensi terhadap perubahan dari dokumen fisik ke digital. Oleh karena itu, upaya percepatan perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih masif dan inklusif, termasuk pelatihan digital, penyediaan akses yang lebih luas, dan integrasi layanan IKD dengan pelayanan publik lainnya.



Gambar 2. 112 Grafik Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, 2025

b. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

1) Ketahanan Nasional

Indeks Ketahanan Nasional (IKN) merupakan instrumen strategis untuk mengukur tingkat ketangguhan bangsa dalam menghadapi dinamika, tantangan, serta potensi ancaman di berbagai sektor kehidupan. IKN mencakup dimensi geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, serta sosial budaya yang secara komprehensif menggambarkan kondisi aktual suatu wilayah. Pengukuran IKN di tingkat daerah difokuskan pada aspek-aspek yang menjadi lingkup kewenangan daerah, terutama dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, serta sosial budaya.

Melalui pemetaan IKN di daerah, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi sektor mana yang relatif kuat serta sektor mana yang masih rentan atau membutuhkan intervensi kebijakan lebih lanjut. IKN dihitung melalui indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif dari setiap gatra (geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, serta sosial budaya).

Secara nasional, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) adalah instansi yang memiliki otoritas dalam pengembangan metodologi, pedoman, serta penghitungan IKN secara menyeluruh. Di tingkat daerah, pemerintah daerah tidak melakukan penghitungan mandiri, melainkan berperan dalam penyediaan data, informasi, dan dukungan analisis sesuai lingkup kewenangannya. Nilai IKN Provinsi Jawa Tengah pada tahun terakhir (2023)

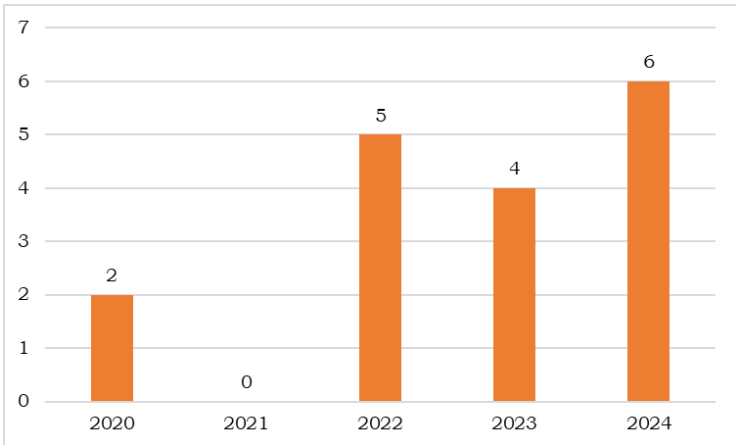
ialah 3,03. Kabupaten Purworejo akan dihitung nilai IKN-nya mulai tahun 2025.

2) Konflik Sosial dan Konflik SARA

SARA berkaitan dengan tindakan yang didasari oleh pemahaman sentimen mengenai suatu identitas yang menyangkut keturunan, suku, agama, tradisi dan lain sebagainya. Multi budaya dapat menjadi unsur dalam pembentukan negara, dimana hal tersebut dapat menjadi modal budaya (*Capital cultural*) dan kekuatan budaya (*Cultural Power*) yang dapat menggerakkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun di sisi lain, banyaknya keanekaragaman tersebut dapat juga berpotensi menimbulkan konflik yang dapat mengancam integritas bangsa dan negara. Kategori yang dapat digolongkan menjadi konflik SARA, yaitu:

- a) Individual, tindakan dilakukan oleh individu atau satu golongan, bersifat menjatuhkan, menyerang golongan lainnya.
- b) Institusional, tindakan dilakukan oleh institusi atau pemerintahan melalui aturan kebijakan yang bersifat diskriminatif antar golongan.
- c) Kultural, tindakan yang menyebarkan tradisi atau ide-ide antar golongan yang bersifat diskriminatif

Kabupaten Purworejo tercatat belum pernah mengalami adanya konflik terkait dengan SARA, akan tetapi konflik lain seperti konflik sosial pernah terjadi di Kabupaten Purworejo antara tahun 2020 hingga tahun 2024. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Berikut adalah data jumlah konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Purworejo.



Gambar 2. 113 Konflik Sosial di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024
Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Purworejo, 2025

Konflik yang terjadi di Kabupaten Purworejo pada umumnya merupakan konflik yang didasari oleh perbedaan kepentingan yang ada. Konflik kepentingan ini akhirnya memicu munculnya konflik sosial yang dikarenakan kepentingan ini bersifat esensial bagi kelangsungan hidup sehingga kerap menimbulkan gesekan hingga menjadi konflik yang lebih besar. Lonjakan konflik yang terjadi di tahun 2021 ke tahun 2022 dari 0 menjadi 5 konflik dipicu oleh adanya proyek strtaegis nasional (PSN) Bendungan Bener. Kurangnya ruang untuk membangun dialog dan diskusi antar kepentingan

masih sangat minim sehingga muncul pihak lain yang tidak bertanggungjawab sehingga membuat konflik semakin besar.

3) **Pembinaan Politik Daerah**

Pembinaan politik dalam negeri di Kabupaten Purworejo dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melibatkan unsur unsur yang terkait baik dari pemerintah daerah, instansi vertikal, masyarakat, dan Perguruan Tinggi. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman terhadap demokrasi dan peran serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik seperti partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah.

Tabel 2. 158 Capaian Kinerja Pembinaan Politik Daerah Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	87,50%	95%
2	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%	100%	100%	96,43%	100%

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Purworejo, 2025

Berdasarkan tabel di atas, ditunjukkan bahwa pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan tercapai sebesar 95%. Hal ini terjadi pada pelaksanaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.

4) **Organisasi Masyarakat**

Dari aspek Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), di Kabupaten Purworejo mengalami perkembangan yang fluktuatif, baik berdasarkan profesi, agama maupun umum. Jumlah total Organisasi Masyarakat pada tahun 2020 yaitu 226 terus bertambah hingga pada tahun 2023 mencapai 290 organisasi Masyarakat. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan yakni menjadi 217 organisasi masyarakat. Selain itu, jumlah forum komunikasi yang dibentuk oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) juga meningkat dari 3 pada tahun 2020 hingga 7 pada tahun 2022 dan 2023 dan menurun menjadi 4 pada tahun 2024.

Tabel 2. 159 Perkembangan Jumlah Organisasi Masyarakat Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Organisasi Masyarakat	226	232	249	290	217

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2	Forum Komunikasi yang dibentuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3	3	7	7	5

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Purworejo, 2025

Capaian kinerja terkait Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 160 Capaian Kinerja Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100%	100%	100%	100%	96,43 %

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Purworejo, 2025

Peningkatan jumlah organisasi masyarakat ini menunjukkan adanya pertumbuhan dan dinamika dalam kehidupan masyarakat sipil di Kabupaten Purworejo. Namun, peningkatan ini juga menimbulkan tantangan dalam hal pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat. Meskipun data menunjukkan bahwa persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya mencapai 100% setiap tahun dari 2020 hingga 2023, hal ini tidak serta-merta mencerminkan kualitas pelaksanaan program-program tersebut.

5) Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu/ pemilihan bisa menjadi tolok ukur kualitas dan perkembangan pembinaan politik di Kabupaten Purworejo. Partisipasi masyarakat di Kabupaten Purworejo dari tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2. 161 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan	70,49%	N/A	N/A	N/A	80,16%

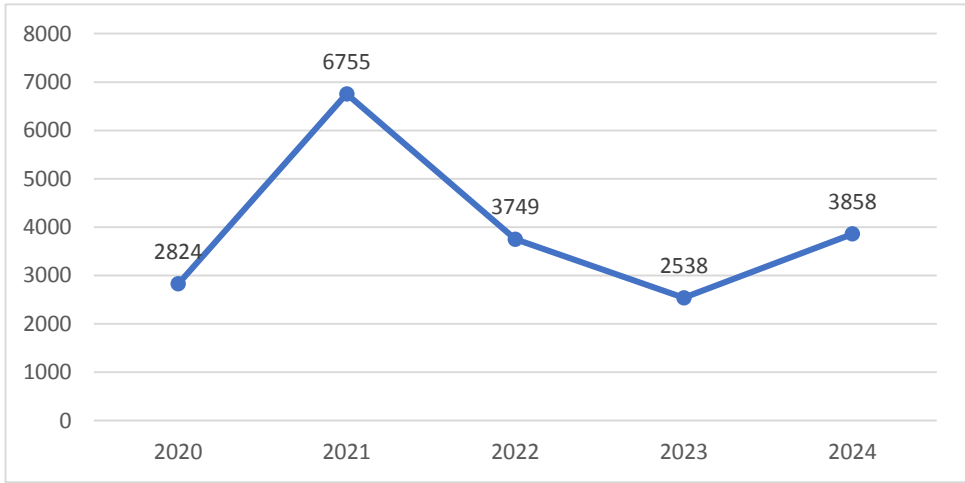
Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Purworejo, 2024

Pada tabel di atas dapat diamati bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Purworejo menunjukkan variasi yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, partisipasi masyarakat tercatat sebesar 70,49%. Pada tahun 2024, partisipasi masyarakat meningkat signifikan menjadi 80,16. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Namun, meskipun ada peningkatan, angka partisipasi masih berkisar pada 80%, menunjukkan bahwa ada segmen masyarakat yang memilih untuk tidak berpartisipasi atau mengalami kesulitan dalam mengakses proses pemilu.

6) Persentase Penegakan Perda

Penegakan Perda bertujuan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Purworejo. Penegakan Perda dilakukan dengan melakukan penyiapan, menganalisis, pengkajian dan perumusan kebijakan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pengawasan dan teknis penyidikan dan penyelidikan di tingkat Daerah. Penegakan Perda yang dilaksanakan di Kabupaten Purworejo digambarkan dengan adanya kejadian pelanggaran Perda. Kondisi jumlah kejahatan selaras dengan terjadinya pelanggaran terhadap Perda di Kabupaten Purworejo yang secara umum juga menunjukkan bahwa masih terjadinya tindakan pelanggaran terhadap Perda di Kabupaten Purworejo. Gambar berikut menunjukkan pelanggaran Perda di Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024.



Gambar 2. 114 Jumlah Pelanggaran Perda Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo, 2024

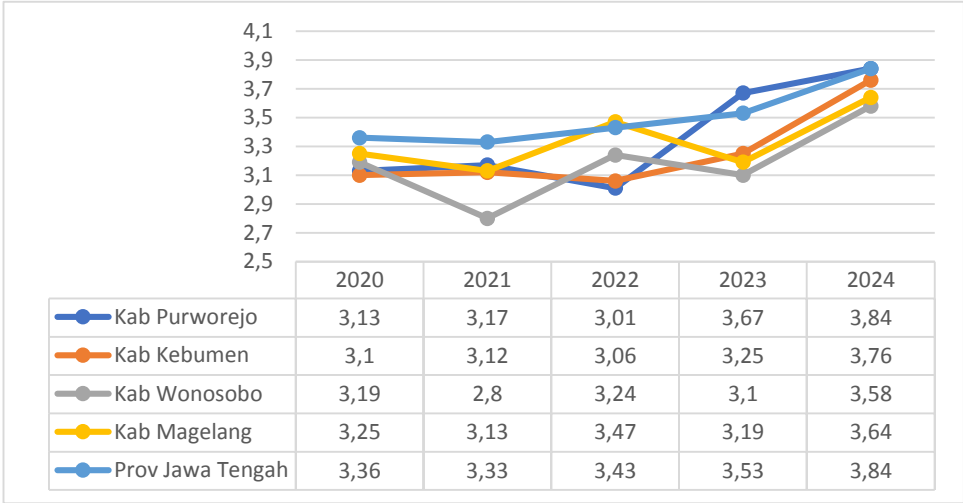
Sepanjang tahun 2020 hingga 2024 jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah terjadi dalam jumlah yang besar. Jumlah pelanggaran terbanyak terjadi di tahun 2021. Lonjakan ini disebabkan oleh penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 yang banyak dilanggar. Pada tahun 2022 dan 2023, jumlah pelanggaran terbesar ada pada pemasangan baliho atau reklame yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame. Tingginya angka pelanggaran Perda ini menjadi satu permasalahan yang menunjukkan belum optimalnya perwujudan ketentraman dan ketertiban umum.

c. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Bedaya Gentar Kawasan

1) Indeks Daya Saing Daerah

Daya saing didefinisikan sebagai suatu wilayah menunjukkan kemampuan menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), yakni instrumen pengukuran daya saing

pada tingkat daerah. IDSD diukur berdasarkan 4 aspek, yaitu ekosistem inovasi, faktor penguat (*enabling environment*), sumber daya manusia (*human capital*), serta faktor pasar (*market*). Pada perkembangannya, terdapat perbedaan pengukuran IDSD. Capaian IDSD Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan. Progress peningkatan yang dicapai pada tahun 2023 adalah yang tertinggi di Kawasan Purwomanggung yaitu sebesar 0,66. Namun di tahun terakhir (2024), progresivitas peningkatan Indeks Daya Saing Kabupaten Purworejo memiliki nilai IDSD tertinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya, mencapai 3,845, lebih tinggi dari rata-rata nilai Provinsi Jawa Tengah (3,841). Secara umum Kabupaten Purworejo lebih baik di keempat aspek, dikarenakan tingginya dukungan infrastruktur, ketenagakerjaan, akses keuangan, serta ukuran pasar. Lebih lanjut nilai IDSD Kabupaten Purworejo dan daerah sekitarnya dapat diamati pada gambar berikut.



Gambar 2. 115 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: BRIN, 2025

Kondisi daya saing daerah Kabupaten Purworejo relatif tinggi, namun masih dapat ditekan pada kapasitas inovasi dan pendidikan dan keterampilan. Kabupaten Purworejo perlu mengejar beberapa daerah yang memiliki kategori daya saing sangat tinggi seperti Kabupaten Batang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, serta Kota Surakarta.

d. Kinerja setiap Urusan pemerintahan Daerah : IKK untuk 5 (lima) tahun terakhir

Untuk menilai capaian kinerja pembangunan daerah, digunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masing-masing urusan pemerintahan. IKK memberikan gambaran hasil yang dicapai selama lima tahun terakhir dan menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan ke depan. Table berikut menyajikan data capaian IKK pada setiap bidang urusan pemerintahan daerah dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2. 162 Indikator Kinerja Kunci pada Bidang Urusan

No	Urusan/IKK Outcome	Perangkat Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1)	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar							
a)	Pendidikan							



No	Urusan/IKK Outcome	Perangkat Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Dindikbud	%	-	84,46	74,36	83,62	84,26
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Dindikbud	%	-	86,49	94,12	92,85	92,08
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Dindikbud	%	-	93,89	82,91	86,45	85,83
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Dindikbud	%	-	1,23	49,83	88,28	26,63
b) Kesehatan								
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Dinkesda	%	-	1,20	1,30	1,27	1,29
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Dinkesda	%	-	83,33	100,00	100,00	100,00
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Dinkesda	%	-	97,25	97,15	100,00	98,34
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Dinkesda	%	-	99,55	99,54	100,00	100,00
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Dinkesda	%	-	99,51	99,72	100,00	100,00
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Dinkesda	%	-	86,78	93,56	100,00	100,00
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkesda	%	-	60,22	98,02	100,00	88,83
8	Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinkesda	%	-	21,38	35,31	100,00	55,71
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinkesda	%	-	43,13	65,12	100,00	82,14
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkesda	%	-	10,85	48,39	100,00	100,00
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkesda	%	-	102,28	97,44	100,00	100,00
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dinkesda	%	-	91,38	100,00	100,00	100,00
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Dinkesda	%	-	33,54	67,93	100,00	100,00
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan	Dinkesda	%	-	92,98	84,81	100,00	100,00



No	Urusan/IKK Outcome	Perangkat Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	deteksi dini HIV sesuai standar							
c)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	DPUPR	%	-	0,00	100,00	0,00	0,00
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	DPUPR	%	-	0,00	100,00	0,00	0,00
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	DPUPR	%	-	26,18	22,68	65,66	73,76
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	DPUPR	%	-	95,45	96,83	97,97	98,74
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	DPUPR	%	-	91,63	89,45	95,32	95,21
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	DPUPR	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	DPUPR	%	-	80,01	81,75	63,05	63,28
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	DPUPR	%	-	1.000,00	79,19	107,45	103,77
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	DPUPR	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00
d)	Perumahan Rakyat							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Dinperkimtan	%	-	8,21	100,00	100,00	100,00
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Dinperkimtan	%	-	100,00	100,00	100,00	0,00
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Dinperkimtan	%	-	54,26	90,69	85,29	86,81
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Dinperkimtan	%	-	10,35	9,80	5,84	5,92
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Dinperkimtan	%	-	1,50	13,29	48,17	43,24



No	Urusan/IKK Outcome	Perangkat Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
e)	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Satpol PP Damkar	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Satpol PP Damkar	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	BPBD	%	-	524.315,00	100,00	100,00	100,00
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD	%	-	836.260,00	0,11	100,00	100,00
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	BPBD	%	-	0,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satpol PP Damkar	%	-	100,00	81,08	80,82	100,00
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Satpol PP Damkar	menit	-	15,58	10,59	5,15	6,12
f)	Sosial							
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	DINSOSDALDUKKB	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	DINSOSDALDUKKB	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2)	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar							
a)	Tenaga Kerja							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Dinperintransnaker	%	-	0,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Dinperintransnaker	%	-	1,22	1,23	1,23	0,36
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperintransnaker	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja	49,2	49,0	54,2	51,4	55,1
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Dinperintransnaker	%	-	100,00	1,72	1,56	1,88
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Dinperintransnaker	%	-	48,47	49,51	61,10	67,89
b)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	DPPPAPMD	%	-	51,53	28,48	30,28	13,88



No	Urusan/IKK Outcome	Perangkat Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	DPPAPMD	%	-	0,01	0,02	0,01	100,00
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	DPPAPMD	per 100.000 jiwa	-	9,52	11,46	9,93	13,01
c) Pangan								
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	DKPP	%	-	3,34	0,44	0,00	5,55
d) Pertanian								
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Dinperkimtan	%	-	100,00	82,52	100,00	100,00
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Dinperkimtan	%	-	100,00	100,02	0,00	0,00
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Dinperkimtan	%	-	0,00	11,73	100,00	100,00
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dinperkimtan	%	-	0,00	100,00	0,00	0,00
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Dinperkimtan	%	-	0,00	99,39	98,41	11,86
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Dinperkimtan	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00
e) Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	DLHP	Angka	-	65,92	59,39	67,81	66,33
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	DLHP	%	-	18,14	23,04	26,07	26,67
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	DLHP	%	-	0,00	0,00	45,00	35,00
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Perekaman KTP elektronik	Disdukcapil	%	-	99,30	99,88	99,80	99,70
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Disdukcapil	%	-	78,28	83,46	94,06	96,35
3	Kepemilikan akta kelahiran	Disdukcapil	%	-	97,72	98,95	93,13	100,00
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Disdukcapil	%	-	16,67	58,54	70,73	82,93
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	DPPAPMD	%	-	100,00	100,00	0,00	100,00



No	Urusan/IKK Outcome	Perangkat Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	DPPPAPMD	%	-	1,16	2,30	7,80	0,00
h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	DINSOSDALDUKKB	Angka	2,10	2,10	2,10	2,05	2,11
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	DINSOSDALDUKKB	%	51,27	52,09	69,18	63,24	65,98
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	DINSOSDALDUKKB	%	12,84	13,99	15,42	16,69	9,38
i) Perhubungan								
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Dinhub	%	71	73	73	73	74
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Dinhub	Angka	-	0,37	0,44	0,05	0,32
j) Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Dinkominfo	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Dinkominfo	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Dinkominfo	%	56,16	57,25	58,09	59,29	61,00
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	DKUKMP	%	-	32,14	46,48	0,00	25,52
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	DKUKMP	%	-	27,34	18,70	2,32	1,51
l) Penanaman Modal								
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	DPMPSTP	%	-	-16,27	134,01	95,40	-9,53
m) Kepemudaan dan Olahraga								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Dinporapar	%	-	0,06	0,31	0,31	0,35
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Dinporapar	%	-	17,76	28,86	0,30	0,53
3	Peningkatan prestasi olahraga	Dinporapar	%	-	0,00	39,00	14,00	32,00
n) Statistik								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Dinkominfo	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan	Dinkominfo	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00



No	Urusan/IKK Outcome	Perangkat Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	evaluasi pembangunan daerah							
o) Persandian								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Dinkominfo	%	-	-	90,54	91,47	84,86
p) Kebudayaan								
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Dindikbud	%	-	12,01	12,01	12,20	100,00
q) Perpustakaan								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinpusip	Angka	-	0,00	59,80	57,07	70,24
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Dinpusip	Angka	-	0,00	11,85	78,43	78,32
r) Kearsipan								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dinpusip	%	-	75,00	75,00	83,41	54,83
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Dinpusip	%	-	16,67	50,00	66,67	75,35
3) Urusan Pilihan								
a) Kelautan dan Perikanan								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	DLHP	Angka	-	4.005,00	4.107,00	4.192,00	4.283,85
b) Pariwisata								
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Dinporapar	%	-	-100,00	0,00	910,00	46,53
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Dinporapar	%	-	-49,71	115,16	1,88	24,16
3	Tingkat hunian akomodasi	Dinporapar	%	-	22,83	22,83	21,93	21,48
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Dinporapar	%	-	0,00	2,26	25,63	2,30
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Dinporapar	%	-	88,90	0,32	0,44	2,33
c) Pertanian								
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	DKPP	ton/ ha	-	6,77	6,91	6,87	6,90
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	DKPP	%	-	130,77	2,21	-15,44	-16,14
d) Kehutanan								
e) Energi dan Sumber Daya Mineral								
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi	-	%	-	0,00	100,00	0,00	0,00



No	Urusan/IKK Outcome	Perangkat Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	yang memiliki ijin di kab/kota							
f) Perdagangan								
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	DKUKMP	%	-	93,96	100,00	100,00	100,00
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	DKUKMP	%	-	87,54	98,90	79,41	93,57
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	DKUKMP	%	-	89,13	124,28	105,45	100,00
g) Perindustrian								
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	Dinperintransnaker	%	-	-20,32	19,15	346,84	-33,87
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Dinperintransnaker	%	-	100,00	79,41	112,19	43,12
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Dinperintransnaker	%	-	98,43	93,75	98,61	0,00
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Dinperintransnaker	%	-	0,00	100,00	0,00	0,00
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Dinperintransnaker	%	-	0,00	100,00	0,00	0,00
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dinperintransnaker	%	-	80,00	70,00	70,00	75,00
h) Transmigrasi								
4) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
a) Perencanaan dan Keuangan								
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	BPKPAD	%	-	9,35	9,00	8,26	8,56
2	Rasio PAD	BPKPAD	%	-	20,52	14,07	16,84	18,63
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Inspektorat Daerah	Angka	-	3,02	3,01	3,31	3,32
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Inspektorat Daerah	Angka	-	3,00	3,00	3,05	3,11



No	Urusan/IKK Outcome	Perangkat Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	BPKPAD	%	-	48,31	56,59	59,14	63,05
6	Opini Laporan Keuangan	BPKPAD	Predikat	-	WTP	WTP	WTP	WTP
b)	Pengadaan							
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Bag. Barjas Setda	%	-	0,00	0,11	0,00	0,00
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Bag. Barjas Setda	%	-	15,28	99,78	1.226,61	86,10
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Bag. Barjas Setda	%	-	50,82	50,62	51,40	100,00
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah		%	-	-30,71	142,36	0,43	-19,63
c)	Kepegawaian							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	BKPSDM	%	-	162,52	64,90	59,27	61,09
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	BKPSDM	%	-	13,70	13,06	17,18	16,85
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	BKPSDM	%	-	2,44	48,66	30,14	33,44
d)	Manajemen Keuangan							
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	BPKPAD	%	-	92,00	90,95	98,98	94,53
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	BPKPAD	%	-	142,81	90,43	95,20	97,53
3	Manajemen Aset	BPKPAD	Angka	-	4,00	4,00	4,00	4,00
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	BPKPAD	%	-	12,82	6,31	3,77	3,73
e)	Transparansi dan Partisipasi Publik							
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	BPKPAD	%	-	45,24	100,00	94,02	95,53
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	BPKPAD	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2025

2.1.5.Kerjasama Daerah

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan optimalisasi pelayanan publik, kerja sama antar daerah menjadi salah satu strategi penting yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah. Kerja sama daerah memungkinkan terjadinya sinergi lintas wilayah dalam pengelolaan

sumber daya, pelayanan infrastruktur, pengembangan ekonomi, serta penanganan isu-isu strategis yang bersifat lintas batas administratif. Melalui mekanisme ini, daerah dapat saling melengkapi potensi dan mengatasi keterbatasan yang dimiliki, sehingga mendorong efisiensi pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.

Dengan semakin kompleksnya tantangan pembangunan ke depan, penguatan kerja sama daerah bukan lagi menjadi opsi, melainkan kebutuhan strategis. Oleh karena itu, perencanaan kerja sama harus dilakukan secara terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, disertai dengan penguatan regulasi, kelembagaan, dan mekanisme monitoring serta evaluasi yang akuntabel. Secara umum, Kabupaten Purworejo telah melaksanakan kerjasama daerah dengan berbagai pihak. Berikut merupakan daftar kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh Kabupaten Purworejo.

Tabel 2. 163 Daftar Kerja Sama Daerah Kabupaten Purworejo

Tahun	Jumlah	Bidang Kerja Sama	Mitra
1	2	3	4
2020	13 Kerja sama	Kesehatan	Lembaga Negara, BUMN, Perusahaan Swasta, Perguruan Tinggi
		Pertanahan	
		Perpajakan	
		Pendidikan	
		Penelitian	
		Jaminan Sosial	
2021	17 Kerja sama	Hukum	Lembaga Negara, BUMN, Perusahaan Swasta, Perguruan Tinggi, LSM, Pemerintah Daerah
		Pendidikan	
		Penelitian	
		Pengabdian Masyarakat	
		Inovasi Daerah	
		Jaminan Sosial	
		Informatika	
		Transmigrasi	
2022	34 Kerja Sama	Pendidikan	Lembaga Negara, BUMN, Perusahaan Swasta, Perguruan Tinggi, LSM, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi
		Hukum	
		Pelayanan Publik	
		Pariwisata	
		Penelitian	
		Kesehatan	
		Pendidikan	
		Penelitian	
		Pengabdian Masyarakat	
		UMKM	
		Kebudayaan	
		Jaminan Sosial	
		Transmigrasi	
		Penanaman Modal	
		Statistik	
		Ekonomi Kreatif	
2023	14 Kerja sama	Informatika	Lembaga Negara, BUMN, Perusahaan
		Hukum	

Tahun	Jumlah	Bidang Kerja Sama	Mitra
1	2	3	4
		Penelitian Kesehatan Pendidikan Penelitian Hiburan Tenaga Kerja Inovasi Daerah	Swasta, Perguruan Tinggi, LSM, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi
		Transmigrasi Pertanian Ketahanan Pangan Ekonomi Penanggulangan Bencana Perpustakaan Keuangan Perpajakan Hukum Pendidikan Penelitian Pengabdian Masyarakat Informatika Jaminan Sosial Pertanahan Pelayanan Publik Statistik	Lembaga Negara, BUMN, Perusahaan Swasta, Perguruan Tinggi, LSM, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi
2024	33 Kerja sama		

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

2.1.6. Rencana Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas wilayah, serta pemerataan akses pelayanan dasar masyarakat. Rencana pembangunan infrastruktur disusun sebagai upaya strategis untuk menjawab kebutuhan jangka menengah dan panjang dalam penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif. Infrastruktur yang andal tidak hanya mempercepat mobilitas barang dan jasa, tetapi juga mendorong produktivitas wilayah dan meningkatkan daya saing daerah, termasuk juga mendorong transformasi sosial dan ekonomi masyarakat sehingga taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat turut meningkat.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, terdapat beberapa rencana pembangunan infrastruktur sebagai bentuk intervensi Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung terwujudnya Kabupaten Purworejo sebagai salah satu wilayah swasembada pangan, air, dan energi. Beberapa rencana tersebut diantaranya:

a. Rehabilitasi dan Peningkatan Daerah Irigasi Wadaslintang

Daerah Irigasi (DI) Wadaslintang merupakan salah satu sistem irigasi strategis yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah selatan Jawa Tengah, khususnya bagi Kabupaten Purworejo dan

sekitarnya. Sistem irigasi ini bersumber dari Waduk Wadaslintang, yang dibangun untuk memenuhi berbagai fungsi, termasuk pengairan lahan pertanian, penyediaan air baku, pengendalian banjir, dan sebagai sumber energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Daerah Irigasi (DI) Wadaslintang melayani kurang lebih 31.853 Ha sawah baku yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Keberadaan sistem irigasi ini menjadi penopang utama aktivitas pertanian, khususnya komoditas padi dan palawija, yang menjadi sektor unggulan dan sumber penghidupan mayoritas penduduk di wilayah tersebut. Oleh karena itu, keberlangsungan, rehabilitasi, dan peningkatan pengelolaan irigasi Wadaslintang menjadi kunci dalam menjaga produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan.

Ketersediaan air yang stabil dari sistem ini juga mendukung ekosistem wilayah dan menjaga fungsi lingkungan hidup. Namun demikian, tantangan seperti sedimentasi, perubahan iklim yang memengaruhi pola hujan, serta degradasi jaringan irigasi di beberapa titik memerlukan intervensi terencana dan berkelanjutan dari pemerintah pusat maupun daerah.

b. Konservasi sumber daya air melalui Rehabilitasi hutan dan lahan pada WS Serayu-Bogowonto

Wilayah Sungai (WS) Serayu-Bogowonto, yang secara geografis mencakup sebagian besar wilayah di bagian selatan Jawa Tengah dan menjadi sumber utama bagi kebutuhan air irigasi, air baku domestik, serta pengendalian banjir. WS Serayu-Bogowonto memiliki peran vital dalam mendukung kehidupan masyarakat di Kabupaten Purworejo dan sekitarnya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, wilayah sungai ini mengalami degradasi hutan dan lahan yang cukup signifikan akibat alih fungsi lahan, pembukaan lahan tanpa konservasi, dan praktik kegiatan budidaya yang tidak ramah lingkungan. Kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya kemampuan penyerapan air, meningkatnya sedimentasi sungai dan waduk, serta tingginya risiko bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor.

Sebagai upaya pemulihan dan perlindungan sumber daya air, pemerintah berkomitmen melaksanakan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada wilayah-wilayah kritis di DAS bagian hulu WS Serayu-Bogowonto. Dengan komitmen yang kuat dan sinergi antar pemangku kepentingan, konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan di WS Serayu-Bogowonto diharapkan dapat memperkuat ketahanan lingkungan dan menjamin keberlanjutan ketersediaan air bagi generasi kini dan mendatang.

c. Pembangunan Bendungan Bener

Pembangunan Bendungan Bener berlokasi di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Bendungan ini dirancang tidak hanya sebagai infrastruktur pengendali air, tetapi juga sebagai pengungkit utama pembangunan wilayah melalui penyediaan air irigasi, air baku, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik tenaga air. Secara teknis, Bendungan Bener akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia, dengan tinggi mencapai ± 159 meter, dan kapasitas tampung lebih dari 100 juta meter kubik air.

Pembangunan Bendungan Bener memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan air dan pangan di wilayah selatan Jawa. Bendungan ini akan memasok air irigasi bagi lebih dari 15.000 hektare lahan pertanian di Kabupaten Purworejo, termasuk wilayah-wilayah yang sebelumnya bergantung

pada sistem irigasi tadah hujan. Ketersediaan air yang lebih stabil sepanjang tahun akan meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas pertanian, yang juga akan memperkuat ekonomi lokal berbasis pertanian.

Kedepanya Bendungan Bener diharapkan mampu menjadi integral dari sistem pengelolaan sumber daya air terpadu di Wilayah Sungai Serayu–Bogowonto, serta menjadi pengungkit pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, hingga industri pengolahan berbasis sumber daya air di kawasan sekitarnya. Dengan dukungan lintas sektor dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, bendungan ini akan menjadi simbol dari pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pada masa depan.

2.1.7. Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah dan memperkuat kapasitas ekonomi lokal. Sebagai entitas usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, BUMD berperan strategis dalam menyediakan layanan publik, mengelola sumber daya ekonomi daerah, serta menciptakan nilai tambah bagi pembangunan daerah. Melalui BUMD pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi pelayanan sekaligus fungsi komersial secara berimbang, dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

Tabel 2. 164 Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworejo

No	BUMD	Usaha
1	2	3
1.	Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Perwitasari	Penyediaan air minum
2.	Perumda Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Purworejo	1. Hotel Ganesha 2. Hotel Puri Mandiri 3. Ganesha Resto & Catering 4. Ganesha Perdagangan dan Jasa 5. Ganesha Event Organizer 6. Ganesha Tour & Travel 7. Ganesha Air Minum Dalam Kemasan 8. Sistem Resi Gudang
3.	Perumda Graha Husada Medika	Penyediaan farmasi dan sarana Kesehatan (apotek)
4.	PT. BPR BKK Purworejo	Pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah
5.	PT. BPR BKK Jateng	Penghimpunan dan penyaluran dana serta menjadi mitra usaha bagi segmen UKM, korporasi maupun konsumen
6.	PT PRPP Jateng	- Grand Maerakaca - KSO Digital MICE venue International - Manufacture Supplier - PCO/PEP - Destination Management - Digital Tourism Platform - LPK JTTC (Jateng Tourism Training Center)
7.	PT Bank BPD Jateng	Pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan perbankan bagi masyarakat Jawa Tengah.

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2024

2.1.8. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pada sub bab ini, disajikan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Masing-masing indikator kinerja pembangunan daerah memiliki target yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.



Tabel 2. 165 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Pemerintah Kabupaten Purworejo

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Kinerja						Standar (Target RPJMD Th. 2024)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n-0)			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	72,50	72,68	72, 98	73,60	74,35	75,16	74,70	100,62%	melampaui (>)
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	7,66	8,12	8,21	8,32	8,46	8,65	8,77	98,63%	belum tercapai (<)
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	13,05	13,5	13,51	13,52	13,53	13,55	13,89	97,55%	belum tercapai (<)
4	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	%	68,32	62,63	90,60	88,20	83,79	98,74	100,00	98,74%	belum tercapai (<)
5	Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	95,46	93,01	84,00	93,20	92,85	92,39	100,00	92,39%	belum tercapai (<)
6	Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	%	82,40	83,33	74,40	100,25	86,45	94,80	100,00	94,80%	belum tercapai (<)
7	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	10,00	3,32	2,73	6,67	9,63	40,73	25,00	162,92%	melampaui (>)
8	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	tahun	74,4	74,72	74,87	75,03	75,37	75,64	75,40	100,32%	melampaui (>)
9	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	%	85,80	85,90	90,60	91,10	89,40	90,42	89,77	100,72%	melampaui (>)
10	Ketersediaan Pangan Utama	kg/ kapita	287,06	297,01	274,07	247,07	254,74	254,54	250,00	101,82%	melampaui (>)
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,26	0,22	0,48	0,62	1,29	0,8	0,26	32,50%	belum tercapai (<)
12	Total Fertility Rate (TFR)	per perempuan usia 15-49 tahun	5,37	N/A	1,30	2,11	1,16	0,92	1,16	79,31%	belum tercapai (<)
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	93,20	94,96	95,33	95,59	95,59	95,34	95,69	99,63%	belum tercapai (<)
14	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	68,96	69,83	70,09	71,13	71,13	70,77	74,18	95,40%	belum tercapai (<)



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Kinerja						Standar (Target RPJMD Th. 2024)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n-0)			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang Aktif	%	89,00	89,00	98,41	100,00	100,00	100,00	98,81	101,20%	melampaui (>)
16	Angka Kemiskinan	%	11,45	11,78	12,4	11,53	11,33	10,87	10,62-9,45	97,70%	belum tercapai (<)
17	Persentase Kelompok RT 20% Berpenghasilan Terendah	%		37,02	37,02	45,11	32,12	17,63	29,75	168,75%	melampaui (>)
18	Persentase PPKS yang Tertangani	%		115.534 jiwa	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,96	4,04	3,59	4,45	4,02	3,89	3,27	84,06%	belum tercapai (<)
20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,62	70,05	73,29	72,38	74,76	73,72	77,23	95,46%	belum tercapai (<)
21	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	97,04	95,96	96,41	95,55	95,98	96,11	96,93	99,15%	belum tercapai (<)
22	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	0,85	-0,10	0,28	2,58	2,58	-0,08	2,89	-2,77%	belum tercapai (<)
23	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	juta rupiah	2.759.875,06	2.754.144,17	2.764.460,09	2.835.779.88	2.908.970,00	2.906.710,00	2.983.634,70	97,42%	belum tercapai (<)
24	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,45	-1,06	3,38	5,36	5,36	4,79	4,57-5,57	100,00%	sesuai (=)
25	PDRB Per Kapita	juta rupiah	18,60	25,89	17,55	18,38	19,06	19,8	20,68	95,74%	belum tercapai (<)
26	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	6,18	0,57	3,68	3,48	5,11	4,86	6,41	75,82%	belum tercapai (<)
27	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	%	6,22	-4,36	6,56	2,55	4,33	3,52	5,18	67,95%	belum tercapai (<)
28	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	7,70	-4,84	5,02	12,79	9,77	19,8	20,68	95,74%	belum tercapai (<)
29	Pertumbuhan PMTB	%	5,05	-6,71	7,28	3,64	3,95	5,63	5,99	93,99%	belum tercapai (<)
30	Indeks Desa Membangun (IDM)	indeks	0,661	0,6764	0,6610	0,7135	0,72	0,74	0,74	99,62%	belum tercapai (<)
31	Persentase Desa Mandiri dan Maju	%	17,06	24,73	34,98	46,48	53,51	64,82	33,26	194,89%	melampaui (>)
32	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	62,83	-	65,33	65,48	67,84	82,59	74,00	111,61%	melampaui (>)
33	Maturitas SPIP	skor	3,023	3.023,000	3.023	3,014	3,31	3,317	3,310	100,21%	melampaui (>)



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Kinerja						Standar (Target RPJMD Th. 2024)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n-0)			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	indeks	tidak diukur	2,04	3,00	3,00	3,031	3,098	3,03	102,14%	melampaui (>)
35	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	1,00	1,00	100,00%	sesuai (=)
36	Nilai SAKIP	nilai	62,81	61,3	62,29	63,10	64,47	65,58	67,00	97,88%	belum tercapai (<)
37	Indeks Perencanaan Pembangunan	indeks			99,17	99,17	99,23	99,27	99,24	100,03%	melampaui (>)
38	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	53,8	79,7	51,36	52,88	84,16	82,25	84,11	97,79%	belum tercapai (<)
39	Indeks Sistem Merit	indeks			0,55	0,72	0,76	0,76	0,76	100,00%	sesuai (=)
40	Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,14	4,09	3,86	4,51	3,59	4,33	4,25	101,88%	melampaui (>)
41	Indeks Inovasi Daerah	indeks	3.110	1,411	47,72	55,99	48,76	61,72	64	96,44%	belum tercapai (<)
B	PELAYANAN UMUM										
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
1	Pendidikan										
	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terakreditasi Minimal B	%	98,48	98,67	98,28	98,16	97,74	97,52	99,61	97,90%	belum tercapai (<)
	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi Minimal B	%	83,52	88,89	88,89	86,36	83,70	96,30	91,01	105,81%	melampaui (>)
	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terakreditasi Minimal B	%	37,87	17,95	19,72	40,00	50,49	95,35	23,26	409,93%	melampaui (>)
	Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terakreditasi Minimal B	%	63,64	70,00	70,00	80,00	70,00	70,00	100,00	70,00%	belum tercapai (<)
	Persentase Ketersediaan Muatan Lokal pada Setiap Jenjang Pendidikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar, PAUD Dan Kesetaraan	%		60,60	88,01	67,27	44,77	58,07	89,02	65,23%	belum tercapai (<)
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Dilaksanakan	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Kinerja						Standar (Target RPJMD Th. 2024)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n-0)			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase Ketersediaan Muatan Lokal Bahasa dan Sastra pada Setiap Jenjang Pendidikan	%	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
2	Kesehatan										
	Persentase Ketercapaian Faskes yang Menyelenggarakan Pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki Kapasitas Kompetensi Sesuai Standar	%			72,50	81,15	95,83	96,00	96,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Peredaran Obat, Alat Kesehatan dan Optikal serta Makanan Yang Aman dan Bermutu	%	84,21	89,47	88,70	93,14	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	%	23,34	23,48	27,33	28,74	35,02	39,07	35,00	111,63%	melampaui (>)
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	88,74	62,43	63,64	67,02	67,17	67,37	67,22	100,22%	melampaui (>)
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak	%	91,10	92,51	95,45	96,86	97,97	99,34	99,24	100,10%	melampaui (>)
	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Persampahan	%	1,62	2,63	3,04	3,44	4,25	4,25	4,25	100,00 %	sesuai (=)
	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	85,01	84,70	84,70	89,43	95,32	95,79	95,50	100,30%	melampaui (>)
	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	28,01	28,21	28,27	28,70	29,06	29,95	32,67	91,67%	belum tercapai (<)



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Kinerja						Standar (Target RPJMD Th. 2024)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n-0)			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase Bangunan Milik Daerah dengan Kondisi Baik	%	69,58	70,42	73,33	74,58	75,83	79,58	81,25	97,94%	belum tercapai (<)
	Rasio Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang Disusun	%	-	-	0,00	12,50	37,50	100,00	62,50	160,00%	melampaui (>)
	Persentase Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik Sedang	%	78,94	78,89	80,01	81,75	63,05	63,28	82,96	76,28%	belum tercapai (<)
	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	N/A	68,18	70,45	79,19	91,82	100,00	93,18	107,32%	melampaui (>)
	Rasio Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	%	50,00	58,33	66,67	75,00	75,00	100,00	91,67	109,09%	melampaui (>)
	Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	%	-	100,00	78,08	89,35	89,49	90,95	89,61	101,50%	melampaui (>)
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman										
	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten dan Relokasi Program Pemerintah	%	87,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Masyarakat yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	%		0,00	100,00	0	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Jumlah Rumah Susun, Rumah Khusus yang Terbina	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Kinerja						Standar (Target RPJMD Th. 2024)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n-0)			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terbit yang Diajukan Pemohon	%		100,00	60,00	100,00	93,33	140,00	100,00	140,00%	melampaui (>)
	Persentase luas kawasan kumuh 0-10 ha yang ditangani	%		0,00	38,58	63,90	85,29	86,85	71,34	121,74%	melampaui (>)
	Persentase Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh	%		10,88	10,83	8,85	9,40	5,66	7,45	75,97%	belum tercapai (<)
	Persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%		75,71	75,71	89,93	94,86	69,76	86,96	80,22%	belum tercapai (<)
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
6	Sosial										



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Kinerja						Standar (Target RPJMD Th. 2024)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n-0)			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina	%		88,79	89,58	90,20	95,26	100,00	95,30	104,93%	melampaui (>)
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Penanganan	%		0,00	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	%		69,95	69,87	79,85	92,99	80,75	93,00	86,83%	belum tercapai (<)
	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	%		30,00	40,00	55,00	70,00	80,00	80,00	100,00%	sesuai (=)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
1	Tenaga Kerja										
	Persentase Rencana Tenaga Kerja yang Disusun	%	100,00	0,00	0,00	100,00	166,67	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Pencari Kerja yang Memiliki Kompetensi	%	97,90	70,07	45,34	90,44	119,66	84,62	64,00	132,22%	melampaui (>)
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	%	0,00	0,00	0,00	1,56	3,13	4,69	4,69	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan melalui	%	35,36	24,58	48,47	49,51	44,69	67,89	44,70	151,88%	melampaui (>)



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Kinerja						Standar (Target RPJMD Th. 2024)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n-0)			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Mekanisme Layanan Antar Kerja										
	Persentase Sarana Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	%	29,22	30,16	31,09	46,72	51,09	53,28	53,28	100,00%	sesuai (=)
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender	%	39,02	58,54	43,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan Peningkatan Kualitas Keluarga	%		19,75	20,00	20,00	100,00	100,00	88,00	113,64%	melampaui (>)
	Persentase Data Anak dan Gender Teranalisis dan Tersaji dalam Kelembagaan Data	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Layanan Pemenuhan Hak Anak	%	81,00	83,00	83,00	83,50	84,00	85,00	85,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	92.31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
3	Pangan										
	Persentase Infrastruktur yang Disediakan	%	1 unit	0,00	1 unit	40,00	40,00	60,00	60,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	-	-	-	341,76	286,87	254,54	100,00	254,54%	melampaui (>)
	Persentase Penanganan pada Daerah Rawan/ Rentan Pangan	%	6 desa	13 desa	6 desa	5,63	19,72	21,13	9,86	214,30%	melampaui (>)
	Persentase Pangan Segar Aman	%	100,00	100,00	100,00	96,36	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
4	Pertanahan										
	Persentase Penerbitan Izin Lokasi	%		0,00	0,00		N/A	0,00	0,00	#DIV/0!	menjadi kewenangan Provinsi



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Kinerja						Standar (Target RPJMD Th. 2024)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n-0)			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Permohonanan Izin Membuka Tanah Negara yang Disetujui	%		100,00	41,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
5	Lingkungan Hidup										
	Persentase Ketersediaannya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Berkualitas	%	20,00	20,00	60,00	60,00	60,00	75,00	75,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Pemenuhan Baku Mutu Kualitas Air Sungai dan Udara Ambien	%	66,92	85,07	85,72	85,20	87,50	87,50	65,00	134,62%	melampaui (>)
	Indeks Tutupan Lahan	indeks	46,62	45,66	42,33	45,25	63,31	68,68	49,41	139,00%	melampaui (>)
	Persentase Pengendalian B3 dan LB3	%	30,00	35,00	40,00	45,00	62,22	65,00	62,22	104,47%	melampaui (>)
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Pengendalian Pencemaran Air yang tertuang dalam persetujuan lingkungan yang diterbitkan	%		0,00	0,00	57,50	55,00	65,00	60,00	108,33%	melampaui (>)
	Persentase Pengakuan Kearifan Lokal terkait PPLH	%	0,00	0,00	0,00	2,63	4,25	4,86	5,26	92,40%	belum tercapai (<)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Bidang Lingkungan Hidup yang Aktif	%	9,75	10,17	10,59	12,43	12,85	14,12	12,85	109,88%	melampaui (>)
	Persentase Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%	100,00	33,33	0	66,67	66,67	66,67	66,67	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Penanganan Sampah	%	41,49	53,59	52,23	20,62	26,07	26,67	26,78	99,59%	belum tercapai (<)



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Kinerja						Standar (Target RPJMD Th. 2024)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n-0)			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase Pengurangan Sampah	%	10,92	38'37	45,39	26,23	23,77	23,25	27,27	85,26%	belum tercapai (<)
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	84,64	90,39	90,29	94,45	97,95	98,68	98,67	100,01%	melampaui (>)
	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	78,03	78,22	86,41	87,86	89,60	90,00	90,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Instansi/ Lembaga yang Memanfaatkan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100,00	100,00	19,51	58,54	70,73	82,93	82,50	100,52%	melampaui (>)
	Persentase Kesesuaian Profil dengan Regulasi yang Berlaku	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
	Persentase Penataan Desa sesuai Peraturan yang Berlaku	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama antar Desa	%	6,40	6,40	7,46	37,21	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
	Age Specific Fertility Rate (ASFR)	kelahiran per 1.000		19,00	18,00	4,77	3,96	3,97	16,00	24,81%	belum tercapai (<)
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) / Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki	%		51,27	52,09	69,18	63,24	65,98	64,00	103,09%	melampaui (>)



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Kinerja						Standar (Target RPJMD Th. 2024)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n-0)			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut meto										
	Persentase Kebutuhan Ber- KB yang Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	%		23,14	22,43	15,66	16,69	9,38	20,83	45,03%	belum tercapai (<)
	Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina	%		62,44	63,00	64,88	78,96	82,00	79,00	103,80%	melampaui (>)
	Persentase PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB	%	83,86	83,84	84,18	84,60	89,60	90,00	90,00	100,00%	sesuai (=)
9	Perhubungan										
	Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia	%		46,49	47,16	49,50	59,68	62,47	62,47	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	%		12,32	12,32	36,33	6,09	7,57	7,57	100,00%	sesuai (=)
10	Komunikasi dan Informatika										
	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	%	-	100,00	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Kegiatan (Event) Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah yang Dimanfaatkan secara Daring dengan Memanfaatkan Domain dan Sub Domain Instansi Penyelenggara Negara	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Kinerja						Standar (Target RPJMD Th. 2024)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n-0)			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase Rekomendasi Izin Koperasi (Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam) yang Tepat Waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Koperasi yang Kelembagaan dan Pengelolaan Usahanya Sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	%	88,35	61,54	83,93	84,15	84,15	97,54	84,51	115,42%	melampaui (>)
	Persentase Koperasi Sehat	%	80,00	34,67	82,00	100,00	95,20	92,68	96,00	96,54%	belum tercapai (<)
	Persentase Koperasi yang Memiliki SDM Berkompeten	%	N/A	N/A	N/A	23,48	74,77	78,76	81,08	97,14%	belum tercapai (<)
	Persentase Koperasi yang Dibina	%	11,19	10,83	10,71	15,25	18,32	35,21	21,98	160,19%	melampaui (>)
	Persentase Usaha Mikro yang Dibina	%	14,22	20,09	25,00	6,19	7,69	8,41	7,69	109,36%	melampaui (>)
	Persentase Usaha Mikro yang Berijin yang Meningkatkan Menjadi Wira Usaha	%	17,18	14,94	13,70	6,54	7,09	8,32	8,03	103,61%	melampaui (>)
12	Penanaman Modal										
	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	%	403,07	52,09	126,45	-24,33	141,95	0,00	5,00	0,00%	belum tercapai (<)
	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan	%	99,87	99,89	99,97	99,87	100,00	100,00	99,50	100,50%	melampaui (>)
	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Ketentuan NSPK	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
13	Kepemudaan dan Olahraga										



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Kinerja						Standar (Target RPJMD Th. 2024)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n-0)			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	%	28	95,24	95,24	100,00	100,00	100,00	95,24	105,00%	melampaui (>)
	Persentase Organisasi Keolahragaan yang Aktif	%			33,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
14	Statistik										
	Cakupan Ketersediaan Statistik Dasar dan Sektoral	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
15	Persandian										
	Persentase Layanan Persandian	%	100,00	106,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
16	Kebudayaan										
	Persentase Kebudayaan Yang Dikembangkan	%		70,00	70,00	70,00	80,00	100,00	80,00	125,00%	melampaui (>)
	Persentase Kelembagaan Pelaku Kesenian Tradisional yang Aktif	%		60,00	60,00	66,00	66,00	76,00	60,00	126,67%	melampaui (>)
	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal	%		44,44	44,44	60,00	60,00	100,00	77,78	128,57%	melampaui (>)
	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	%		11,85	11,85	11,85	11,85	23,00	11,85	194,09%	melampaui (>)
	Persentase Benda Museum yang Memenuhi Syarat Koleksi	%		20,00	33,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
17	Perpustakaan										
	Persentase Perpustakaan yang Layak	%	1,98	2,52	2,52	3,78	4,86	6,03	6,03	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang Dilestarikan	%	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	20,00	15,00	133,33%	melampaui (>)
18	Kearsipan										
	Persentase Arsip yang Dikelola	%	68,85	74,37	79,30	83,66	88,05	88,74	91,67	96,80%	belum tercapai (<)
	Persentase Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan	%	0,00	34,42	50,00	57,50	70,52	85,60	77,50	110,45%	melampaui (>)
	Urusan Pemerintahan Pilihan										
1	Kelautan dan Perikanan										



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Kinerja						Standar (Target RPJMD Th. 2024)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n-0)			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase Kenaikan Produksi Perikanan Tangkap	%	4,07	4,91	5,94	-3,25	4,08	4,86	3,00	162,00%	melampaui (>)
	Persentase Kenaikan Produksi Perikanan Budidaya	%	3,29	-12,67	3,28	2,00	6,50	2,09	2,00	104,40%	melampaui (>)
	Persentase Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	%	38,46	38,46	38,46	53,85	61,54	84,62	69,23	122,23%	melampaui (>)
	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	%	3,00	3,00	3,00	1,30	87,96	2,52	10,00	25,20%	belum tercapai (<)
2	Pariwisata										
	Persentase Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%		2,22	39,55	76,19	90,48	90,00	94,77	94,97%	belum tercapai (<)
	Persentase Jumlah Sarana Promosi/Pemasaran Pariwisata	%		100,00	10,00	100,00	35,00	100,00	35,00	285,71%	melampaui (>)
	Persentase Fasilitasi Sub Sektor Ekonomi Kreatif	%	N/A	N/A	N/A	0	40,00	100,00	40,00	250,00%	melampaui (>)
	Persentase Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata yang Dilatih	%				173,00	223,00	305,00	100,00	305,00%	melampaui (>)
3	Pertanian										
	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani	%	105 kelompok	4 kelompok	6 kelompok	36,36	89,90	143,03	60,00	238,38%	melampaui (>)
	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani	%	15 kelompok	6 kelompok	12 kelompok	25,19	54,07	81,85	60,00	136,42%	melampaui (>)
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	585 kasus	8112 kasus	7275 kasus	2,21	- 16,25	16,14	16,00	100,88%	melampaui (>)
	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial	%	11 orang	11 orang	11 orang	30,00	60,00	80,00	60,00	133,33%	melampaui (>)



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Kinerja						Standar (Target RPJMD Th. 2024)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n-0)			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Perdagangan										
	Persentase Pasar Daerah dalam Kondisi Baik	%	96,30	96,30	17,24	19,35	22,58	38,71	25,81	149,98%	melampaui (>)
	Persentase Ketertiban Pengelola Sarana Distribusi	%		11,98	15,91	25,64	39,66	67,86	40,17	168,93%	melampaui (>)
	Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu	%		8,50	5,27	11,48	11,48	8,70	20,00	43,50%	belum tercapai (<)
	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%		46,82	87,54	91,72	79,41	93,43	82,00	113,94%	melampaui (>)
	Persentase Produk UMKM yang Dipromosikan Ekspor	%		0,00	0,00	25,00	35,00	40,00	36,00	111,11%	melampaui (>)
	Persentase Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%		40,28	89,13	124,28	105,453	100,00	68,00	147,06%	melampaui (>)
	Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipromosikan	%		0,00	0,00	57,14	57,143	57,14	57,14	100,00%	sesuai (=)
5	Perindustrian										
	Persentase Peningkatan Produktivitas IKM Tiap Tahunnya	%		0,00	7,29	10,64	10,417	7,87	7,80	100,90%	melampaui (>)
	Persentase Perizinan Industri Kewenangan Kabupaten yang Memenuhi Komitmen Perizinan	%		6,67	10,00	15,20	42,718	27,96	30,00	93,20%	belum tercapai (<)
	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Informasi Industri	%		53,33	60,00	63,83	65,672	39,04	64,45	60,57%	belum tercapai (<)
6	Transmigrasi										
	Persentase Penempatan Transmigrasi	%	100,00	0,00	100,00	100,00	100,000	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan										
1	Sekretariat Daerah										
	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Kinerja						Standar (Target RPJMD Th. 2024)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n-0)			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
2	Sekretariat DPRD										
	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan										
1	Perencanaan										
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
2	Keuangan										
	Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Tertib Pengelolaan Kas Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Realisasi Bantuan Keuangan terhadap Anggaran Bantuan Keuangan	%	99,63	97,93	98,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00	100,00	95,00%	belum tercapai (<)



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Kinerja						Standar (Target RPJMD Th. 2024)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n-0)			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase Tertib Pengelolaan Pendapatan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	105,44	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
3	Kepegawaian										
	Persentase Penyelenggaraan Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Penilaian Kinerja Aparatur	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Penyelenggaraan Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi ASN	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
4	Pelatihan dan Pendidikan										
	Rata - Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JPL		14,00	15,00	17,90	33,46	35,26	35,00	100,74%	melampaui (>)
5	Penelitian dan Pengembangan										
	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%		-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Unsur Pengawasan										
1	Inspektorat										
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitas Pengawasan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Unsur Kewilayahan										
1	Kecamatan										
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Kinerja						Standar (Target RPJMD Th. 2024)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n-0)			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Unsur Pemerintahan Umum										
1	Kesatuan Bangsa dan Politik										
	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%		100,00	100,00	100,00	87,50	99,31	100,00	99,31%	belum tercapai (<)
	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	%		100,00	100,00	100,00	96,43	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%		100,00	100,00	100,00	100,00	96,43	100,00	96,43%	belum tercapai (<)
	Persentase Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	%		100,00	100,00	100,00	97,44	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH										



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Kinerja						Standar (Target RPJMD Th. 2024)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n-0)			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Indeks Risiko Bencana	indeks		190,01	163,63	144,57	127,62	114,09	126,10	110,53%	melampaui (>)
	Indeks Infrastruktur Daerah	indeks		87,01	87,61	88,24	82,356541	82,9	91,47	90,63%	belum tercapai (<)
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	indeks	68,10	68,98	65,92	62,64	67,81	66,33	75,86	87,44%	belum tercapai (<)
	Indeks Ketahanan Daerah Kewenangan BPBD	indeks	0,4	0,4	0,77	0,69	0,69	0,84	0,80	105,00%	melampaui (>)

Sumber: BPS dan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, 2025 (diolah)

Keterangan : Interpretasi: >100% : melampaui; 100% : sesuai; <100% : belum tercapai

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Purworejo menarget 215 indikator yang terbagi ke dalam aspek kesejahteraan masyarakat sebanyak 41 indikator, aspek pelayanan umum 170 indikator, dan aspek daya saing daerah sebanyak 4 indikator. Dari hasil analisis data diketahui bahwa dari 215 indikator kinerja terdapat 71 (33,02%) indikator melampaui, 92 (42,79%) indikator sesuai, dan 52 (24,19%) indikator belum tercapai.

Tabel 2. 166 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purworejo

Aspek	Indikator		
	Melampaui (>)	Sesuai (=)	Belum Tercapai (<)
1	2	3	4
Kesejahteraan Masyarakat	31,71%	9,76%	58,54%
Pelayanan Umum	32,94%	51,76%	15,29%
Daya Saing	50%	-	50%

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Analisis Faktor Kinerja

Dalam rangka mengevaluasi capaian kinerja Pemerintah Daerah selama periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, perlu dilakukan identifikasi terhadap berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah. Analisis terhadap faktor pendorong dan penghambat ini menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan dan program prioritas, serta sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan strategi perbaikan ke depan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari aspek internal maupun eksternal, baik yang bersifat struktural, teknis, sumber daya, maupun kondisi lingkungan strategis yang berkembang selama periode perencanaan.

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat yang didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dinilai kurang berhasil berdasarkan hasil pengukuran terhadap dua indikator kinerja yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) memiliki capaian kinerja sebesar 98,63 persen dengan realisasi kinerja sebesar 8,65 tahun dari target kinerja sebesar 8,77. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) memiliki capaian kinerja sebesar 97,55 persen dengan realisasi kinerja sebesar 13,55 tahun dan target kinerja sebesar 13,89 tahun. Penghambat keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut.

- 1) Masih terdapat masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan dan terdapat orang tua terbebani untuk putra-putrinya bersekolah karena keterbatasan sarana transportasi, biaya transportasi, dan merasa tidak nyaman jika anak menuju sekolah yang jauh.
- 2) Masih ada peserta didik usia 7-25 tahun yang tidak bersekolah dan putus sekolah yang disebabkan oleh kondisi ekonomi kurang mampu, anak berkebutuhan khusus, kurangnya motivasi dan faktor geografis.
- 3) Terdapat penduduk usia 25 tahun ke atas yang tidak mau melanjutkan pendidikannya karena banyak yang sudah bekerja untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarga dan merasa tidak membutuhkan ijazah.

b. Sasaran 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh Dinas Kesehatan, RSUD dr Tjitrowardojo Purworejo, dan RSUD RAA Tjokronegoro dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir dinilai berhasil karena memiliki capaian kinerja sebesar 100,32 persen dengan realisasi indikator kinerja AHH sebesar 75,64 tahun dari target kinerja sebesar 75,4 tahun. Pendukung keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut.

- 1) Dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui DAK bidang kesehatan.
- 2) Kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Purworejo akan tetap konsisten untuk fokus dalam peningkatan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan dengan:

- 1) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan melalui promotif dan preventif.
- 2) Mengoptimalkan kader kesehatan desa.
- 3) Menyediakan sarana kesehatan dengan standar kesehatan.
- 4) Memenuhi tenaga medis dan tenaga paramedis.

c. Sasaran 3 : Meningkatkan Ketahanan Pangan

Sasaran meningkatnya ketahanan pangan yang didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) dinilai berhasil karena memiliki capaian kinerja sebesar 100,72 persen dengan realisasi indikator kinerja Skor PPH sebesar 90,4 persen dari target kinerja sebesar 89,77 persen. Pendukung keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan tanaman pangan utama di Kabupaten Purworejo dalam jumlah yang memadai.
- 2) Jumlah anggota keluarga yang mendekati ideal.
- 3) Tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat Kabupaten Purworejo yang terus meningkat.

d. Sasaran 4 : Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk

Sasaran terkendalnya laju pertumbuhan penduduk yang didukung oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk dinilai kurang berhasil karena memiliki capaian kinerja sangat rendah atau sebesar 32,50 persen dengan realisasi indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,8 persen dan target kinerja sebesar 0,26 persen. Penghambat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut.

- 1) Jumlah kelahiran (fertilitas) lebih tinggi dari kematian (mortalitas) serta tingginya angka migrasi masuk lebih besar dari migrasi keluar (imigrasi dan emigrasi)
- 2) Pasangan usia subur di Kabupaten Purworejo relatif tinggi sebesar 25 persen.
- 3) Masih rendahnya rasio akseptor KB.
- 4) Masih rendahnya peserta KB aktif.
- 5) Masih tingginya persentase *Unmet Need KB* (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
- 6) Masih rendahnya jumlah peserta KB mandiri.

e. Sasaran 5 : Terwujudnya Kesetaraan Pembangunan Gender

Sasaran terwujudnya kesetaraan pembangunan gender yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan kinerja yang cukup baik namun belum mampu memenuhi target yang ditetapkan, yakni sebesar 99,63 persen dengan realisasi sebesar 95,34 dari target 95,69. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan perempuan di Kabupaten Purworejo masih di bawah laki-laki. Namun demikian pembangunan perempuan di Kabupaten Purworejo semakin menunjukkan peningkatan.

Salah satu hal yang mempengaruhi kesenjangan pembangunannya manusia antara laki-laki dan perempuan adalah dalam hal ekonomi yaitu perbedaan pendapatan yang diterima. Rendahnya capaian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Namun dimensi kesehatan untuk penduduk perempuan lebih tinggi daripada laki-laki yang dapat dilihat dari usia harapan hidup penduduk perempuan lebih tinggi dari penduduk laki-laki.

f. Sasaran 6 : Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga

Sasaran terwujudnya pembangunan pemuda dan olahraga yang didukung oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator kinerja berupa persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang aktif dinilai berhasil karena memiliki capaian kinerja sebesar 101,20 persen dengan realisasi indikator kinerja Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang aktif sebesar 100 persen dari target kinerja sebesar 98,81 persen. Pendukung keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut.

- 1) Kinerja Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang semakin baik sebagai mitra kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
- 2) Pembangunan Stadion Sarwo Edi Wibowo yang berjalan.
- 3) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) dan Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM) untuk mendapatkan bibit-bibit atlet yang unggul daerah.
- 4) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) yang berjenjang mulai dari SD sampai dengan SMA.
- 5) Hari Jadi Purworejo menjadi momentum vital dalam kegiatan kebudayaan di Kabupaten Purworejo.

g. Sasaran 7 : Berkurangnya Penduduk Miskin

Sasaran berkurangnya penduduk miskin yang didukung oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana serta Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja dengan indikator kinerja Persentase Kelompok RT 20% Berpenghasilan Terendah dinilai berhasil karena memiliki capaian kinerja sebesar 168,75 persen dengan realisasi indikator kinerja Persentase Kelompok RT 20% Berpenghasilan Terendah sebesar 17,63 persen dari target kinerja sebesar 29,75 persen. Pendukung keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut.

- 1) Bantuan sosial yang diberikan (Program Keluarga Harapan /PKH, Bantuan Pangan Non Tuna /BPNT, dan Bantuan Sosial lain) bersumber dari pusat.

- 2) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo dalam rangka program penuntasan kemiskinan sudah menyajikan data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- 3) Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Purworejo yang optimal.

h. Sasaran 8 : Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

Sasaran meningkatnya partisipasi angkatan kerja yang didukung oleh Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja dengan indikator kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dinilai kurang berhasil karena memiliki capaian kinerja sebesar 95,46 persen dengan realisasi indikator kinerja TPAK sebesar 73,73 persen dari target kinerja sebesar 77,23 persen. Penghambat keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut.

- 1) Masih adanya penduduk usia kerja yang tidak bekerja karena masih sekolah, mengurus rumah tangga dan melaksanakan kegiatan lainnya.
- 2) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang belum tercapai.
- 3) Banyaknya lulusan SMA sederajat yang belum siap kerja karena belum memiliki sertifikat keterampilan atau kompetensi kerja.

i. Sasaran 9 : Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sasaran meningkatnya nilai tambah pertanian, kehutanan, dan perikanan yang didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dengan indikator kinerja PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dinilai kurang berhasil karena memiliki capaian kinerja sebesar 97,42 persen dengan realisasi indikator kinerja PDRB Sektor Pertanian Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2.906.710,00 Juta Rupiah dari target kinerja sebesar 2.983.634,70 Juta Rupiah. Faktor penghambat kurang berhasilnya pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1) Produksi dan produktivitas hasil pertanian belum optimal.
- 2) Pembangunan infrastruktur irigasi masih bertumpu pada pendanaan IPDMIP atau hibah *reimbursement* dari Pemerintah Pusat.
- 3) Hibah kepada kelompok tani untuk sarana dan prasarana serta bibit ternak dan tanaman yang belum optimal.

j. Sasaran 10 : Meningkatnya PDRB Per Kapita

Sasaran meningkatnya PDRB Per Kapita didukung oleh beberapa OPD antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan; Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja; Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukut sasaran ini adalah PDRB Per Kapita yang mana dinilai kurang berhasil karena memiliki capaian kinerja sebesar 95,74 persen dengan realisasi indikator kinerja PDRB Per Kapita sebesar 19,8 Juta Rupiah dari target kinerja sebesar 20,68 Juta Rupiah. Penghambat keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut.

- 1) Beberapa sektor ekonomi masih dalam masa pemulihan pasca Pandemi Covid-19 seperti sektor industri pengolahan; sektor perdagangan besar dan

eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; serta sektor Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

- 2) Tingkat inflasi yang tinggi.
- 3) Roda perekonomian daerah yang masih lesu pasca Pandemi Covid-19.

k. Sasaran 11 : Meningkatnya Pembangunan Perdesaan

Sasaran meningkatnya pembangunan perdesaan yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan indikator kinerja Indeks Desa Membangun (IDM), dinilai kurang berhasil karena memiliki capaian kinerja sebesar 99,62 persen dengan realisasi indikator kinerja IDM sebesar 0,7352 indeks dari target kinerja sebesar 0,738 indeks. Penghambat keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut.

- 1) Ketersediaan anggaran pembangunan yang memadai untuk desa melalui dana transfer diantaranya Dana Desa, bantuan Keuangan Khusus ke desa dan Alokasi Dana Desa yang belum diikuti dengan ketersediaan SDM Desa.
- 2) Sarjana Pendamping Desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa yang belum optimal.
- 3) Belum optimalnya lembaga-lembaga ekonomi desa seperti BUMDes.

l. Sasaran 12 : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Sasaran terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel yang didukung oleh beberapa OPD antara lain Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; Inspektorat; serta Sekretariat Daerah, dinilai kurang berhasil berdasarkan hasil pengukuran terhadap tiga indikator kinerja yaitu:

- 1) Maturitas SPIP yang memiliki capaian kinerja sebesar 105,97 persen dengan realisasi indikator kinerja sebesar 3,318 poin dari target kinerja sebesar 3,130 poin.
- 2) Opini BPK memiliki capaian kinerja sebesar 100 persen dengan realisasi indikator kinerja Opini BPK WTP dari target kinerja Opini BPK WTP atas LKPD Kabupaten Purworejo.
- 3) Nilai SAKIP memiliki capaian kinerja sebesar 97,88 persen dengan realisasi indikator kinerja sebesar 65,58 nilai dari target kinerja sebesar 67 nilai.

Analisis penyebab tidak berhasilnya sasaran terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel disebabkan beberapa faktor berikut.

- 1) Unsur penilaian SAKIP yang terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja belum tercapai secara optimal.
- 2) Penyusunan cascading belum berdasarkan proses bisnis.
- 3) Belum optimalnya perbaikan kinerja level kabupaten sampai individu dan belum tersistematisnya pelaporan kinerja.

m. Sasaran 13 : Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel

Sasaran terwujudnya birokrasi yang kapabel didukung oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN dinilai kurang berhasil karena memiliki capaian kinerja sebesar 97,79 persen dengan realisasi 82,25 dari target 84,11. Analisis penyebab belum berhasilnya sasaran terwujudnya birokrasi yang kapabel disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut.

- 1) Belum tercukupinya jam standar pelatihan dan pengembangan SDM ASN dalam satu tahun.

- 2) Administrasi data pendukung pelatihan dan pengembangan SDM ASN belum terdokumentasi dengan baik oleh masing-masing ASN.

o. Sasaran 14 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima

Sasaran terwujudnya pelayanan publik yang prima yang didukung oleh beberapa OPD antara lain Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Sekretariat Daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; serta Kecamatan. Dinilai kurang berhasil berdasarkan hasil pengukuran terhadap dua indikator kinerja yaitu Indeks Pelayanan Publik memiliki capaian kinerja sebesar 101,88 persen dengan realisasi indikator kinerja sebesar 4,33 indeks dari target kinerja sebesar 4,25 indeks dan Indeks Inovasi Daerah memiliki capaian kinerja sebesar 96,44 persen dengan realisasi 61,72 dari target 64. Penghambat keberhasilan sasaran ini adalah sebagai berikut.

- 1) Tingkat kematangan inovasi daerah belum optimal, yaitu dari aspek mutu inovasi dan dampak inovasi.
- 2) Mall Pelayanan Terpadu belum digunakan secara optimal.
- 3) Belum semua Unit Pelayanan melakukan rewiu Standar Pelayanan yang dimiliki.
- 4) Belum semua Perangkat Daerah menganalisis dan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai alat untuk perbaikan pelayanan di waktu mendatang.

p. Sasaran 15 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum

Sarana meningkatnya kualitas infrastruktur umum yang didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perhubungan; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah Indeks Infrastruktur Daerah, dimana capaian indeks ini dinilai kurang berhasil karena memiliki capaian kinerja sebesar 90,63 persen dengan realisasi 82,9 dari target kinerja sebesar 91,47. Penghambat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut.

- 1) Pendanaan pembangunan infrastruktur publik kurang dari 40 persen dari total belanja APBD.
- 2) Pendanaan pembangunan infrastruktur publik masih sangat bergantung pada sumber dana DAK.

q. Sasaran 16 : Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan

Sasaran terkelolanya lingkungan hidup secara berkelanjutan yang didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) dinilai berhasil karena memiliki capaian kinerja sebesar 87,44 persen dengan realisasi 66,33 dari target 75,86.

Berdasarkan analisis penyebab belum berhasilnya sasaran strategis terkelolanya lingkungan hidup secara berkelanjutan adalah IKLH Kabupaten Purworejo tahun 2024 mendapatkan predikat sedang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan data pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Purworejo tahun 2024 adalah 41,43 yang

masih berada di bawah target sebesar 54,69 dan masuk dalam kategori kurang.

- 2) Hasil perhitungan IKU berdasarkan data pemantauan kualitas udara ambien dengan metode *Passive Sampler* adalah 88,18, yang sudah memenuhi target sebesar 84,75 dan memiliki kategori baik.
- 3) Hasil perhitungan IKL berdasarkan data tutupan lahan yang telah terverifikasi adalah 68,68 dengan kategori sedang dan telah memenuhi target sebesar 49,41.

r. Sasaran 17 : Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana

Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dinilai berhasil berdasarkan hasil pengukuran terhadap satu indikator kinerja sasaran yang menjadi parameter perhitungan yaitu Indeks Ketahanan Daerah dengan capaian 105,00 persen dan realisasi 0,84 dari target 0,80. Analisis penyebab keberhasilan sasaran meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana disebabkan oleh beberapa faktor antara lain.

- 1) Kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan semakin meningkat.
- 2) Dukungan Desa Tangguh Bencana.
- 3) Dukungan dari TAGANA dan BNPB.
- 4) Adanya rencana kontijensi bencana.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi: a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga; c. Penerimaan Daerah; d. Pengeluaran Daerah; e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

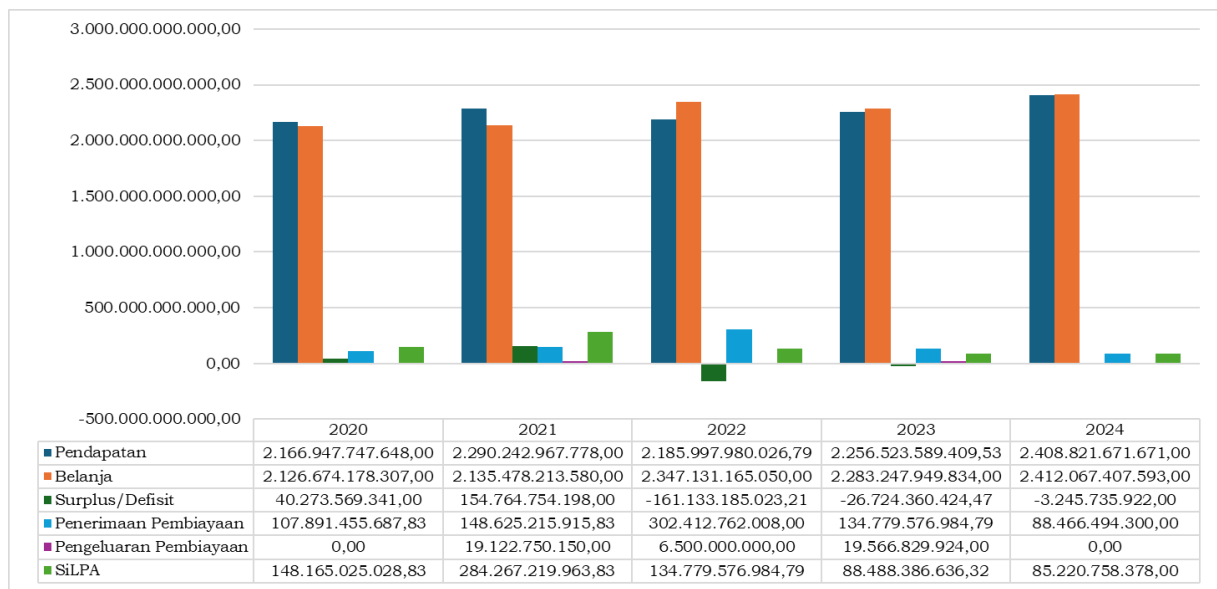
Pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan ruang lingkup meliputi kebijakan keuangan daerah pada pengelolaan pendapatan daerah,

pengelolaan belanja daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah sehingga dapat membiayai strategi pembangunan melalui program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

2.2.1. Realisasi APBD Tahun 2020-2024

a. Kinerja Pelaksanaan APBD

Analisis terhadap kinerja pelaksanaan APBD meliputi penerimaan daerah mencakup pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, serta pengeluaran daerah yang mencakup belanja daerah dan pembiayaan daerah. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan struktur masing-masing APBD. Dalam rangka memahami kinerja keuangan Kabupaten Purworejo, maka diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni kinerja keuangan Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024. Secara umum perkembangan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seperti terlihat dalam gambar berikut.



Gambar 2. 116 Perkembangan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 (dalam Juta Rupiah)

Sumber: LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Purworejo menunjukkan besaran yang fluktuatif selama tahun 2020 hingga 2024 dengan kecenderungan meningkat dengan tingkat rata-rata pertumbuhan sebesar 2,81 persen. Di tahun 2020 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Purworejo tercatat sebesar Rp2.166.947.747.648,00 dan mengalami fluktuasi hingga di tahun 2024 total pendapatan daerah mencapai Rp2.408.821.671.671,00. Sama halnya dengan pendapatan daerah, belanja daerah di Kabupaten Purworejo juga mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 2,23 persen. Di tahun 2020 belanja daerah tercatat sebesar Rp2.126.674.178.307,00 dan terus mengalami fluktuasi menjadi senilai Rp2.412.067.407.593,00 di tahun 2024. Kondisi fluktuatif pada pendapatan dan belanja daerah berpengaruh pada kondisi surplus atau defisitnya APBD Kabupaten Purworejo. Selama tahun 2020-2024, surplus anggaran terjadi pada tahun 2020 dan 2021 dimana pada tahun 2021 surplus APBD mencapai Rp154.764.754.198,00. Sedangkan defisit anggaran terjadi

pada tahun 2022-2024, dimana defisit anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang mencapai Rp161.133.185.023,21. Kondisi serupa juga terjadi pada Pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pos pengeluaran pembiayaan. Pada tahun 2020 realisasi untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp107.891.455.687,83 dan pada tahun 2024 sebesar Rp88.466.494.300,00. Sedangkan untuk pos pengeluaran pembiayaan, pada tahun 2020 dan 2024 tidak ada realisasi untuk pengeluaran pembiayaan. Untuk SiLPA pada periode tahun 2020-2024 juga menunjukkan kondisi yang fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2020, SiLPA sebesar Rp148.165.025.028,83 nilainya turun pada tahun 2024 menjadi Rp85.220.758.378,00 meskipun sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun-tahun sebelumnya. Penurunan nilai SiLPA ini menunjukkan bahwa kinerja APBD semakin membaik.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo yang meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2. 167 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah	304.800.202.905,00	438.264.776.270,00	330.274.511.807,79	379.937.415.349,53	448.851.158.304,00
	B. Pendapatan Transfer	1.777.624.550.851,00	1.772.395.566.516,00	1.848.525.446.302,00	1.874.941.153.899,00	1.958.558.013.367,00
	C. Lain-lain Pendapatan Derah Yang Sah	84.522.993.892,00	79.582.624.992,00	7.198.021.917,00	1.645.020.161,00	1.412.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.166.947.747.648,00	2.290.242.967.778,00	2.185.997.980.026,79	2.256.523.589.409,53	2.408.821.671.671,00
2	BELANJA					
	A. Belanja Operasional	1.342.979.353.854,00	1.347.548.808.129,00	1.407.986.195.525,00	1.468.395.150.359,00	1.646.965.396.160,00
	B. Belanja Modal	254.015.009.152,00	266.462.622.108,00	419.618.626.696,00	263.302.583.155,00	195.601.121.874,00
	C. Belanja Tak Terduga	1.643.942.088,00	261.499.088,00	0,00	0,00	0,00
	D. Belanja Transfer	528.035.873.213,00	521.205.284.255,00	519.526.342.829,00	551.550.216.320,00	569.500.889.559,00
	JUMLAH BELANJA	2.126.674.178.307,00	2.135.478.213.580,00	2.347.131.165.050,00	2.283.247.949.834,00	2.412.067.407.593,00
	SURPLUS/DEFISIT	40.273.569.341,00	154.764.754.198,00	-161.133.185.023,21	-26.724.360.424,47	-3.245.735.922,00
3	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	107.891.455.687,83	148.625.215.915,83	302.412.762.008,00	134.779.576.984,79	88.466.494.300,00
	B. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	19.122.750.150,00	6.500.000.000,00	19.566.829.924,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	107.891.455.687,83	129.502.465.765,83	295.912.762.008,00	115.212.747.060,79	88.466.494.300,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	148.165.025.028,83	284.267.219.963,83	134.779.576.984,79	88.488.386.636,32	85.220.758.378,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

b. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- Pendapatan Daerah terdiri atas :
- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - 2) Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana dana darurat dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan kelompok pendapatan yang sepenuhnya menjadi kewenangan daerah untuk mengelolanya sejak merencanakan hingga pengawasan, sedangkan untuk Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan untuk Kabupaten Purworejo dengan penetapan pejabat yang berwenang.

Analisis kinerja pelaksanaan APBD meliputi penerimaan daerah yang mencakup pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, serta pengeluaran daerah yang mencakup belanja daerah dan pembiayaan daerah. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan struktur masing-masing APBD. Secara umum perkembangan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seperti terlihat dalam gambar berikut.

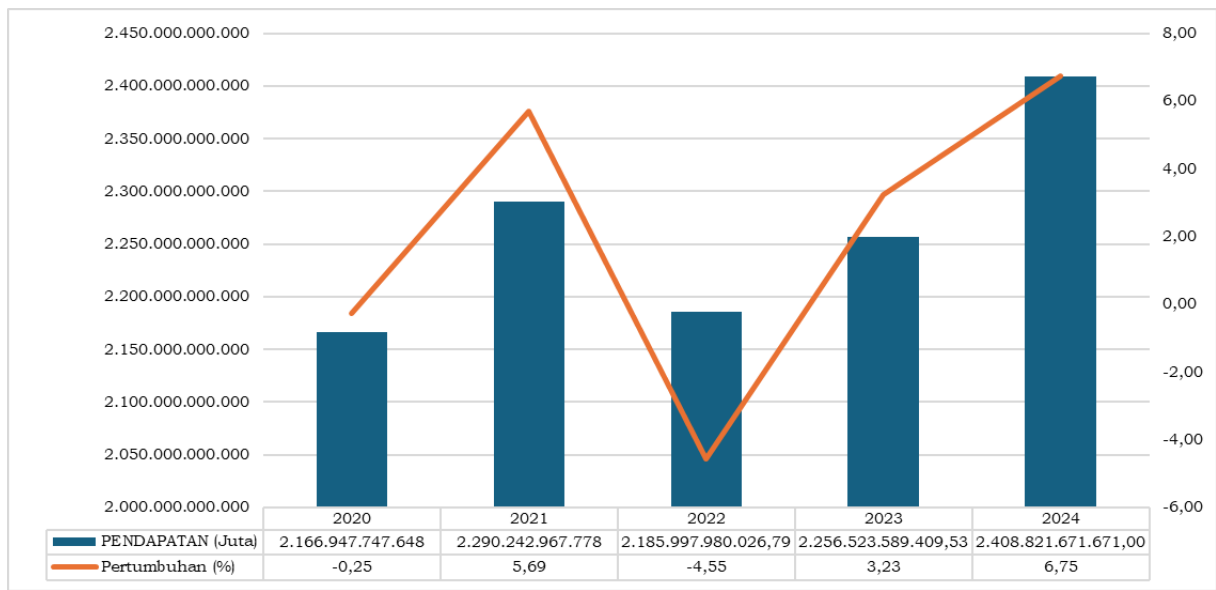
Tabel 2. 168 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5
2020	2.120.340.261.573,00	2.166.947.747.648,00	102,20%	46.607.486.075,00
2021	2.166.927.719.094,00	2.290.242.967.778,00	105,69%	123.315.248.684,00
2022	2.243.663.832.713,00	2.185.997.980.026,79	97,43%	(57.665.852.686,21)
2023	2.256.911.327.265,00	2.256.523.589.409,53	99,98%	(387.737.855,47)
2024	2.436.474.409.065,00	2.408.821.671.671,00	98,87%	(27.652.737.294,00)

Sumber: LKPD Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024

Kinerja pendapatan daerah di Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, kecuali pada tahun 2020 dan 2021 yang telah melampaui target. Belum optimalnya realisasi pendapatan disebabkan oleh beberapa komponen pembentuk pendapatan daerah yang belum terealisasi secara maksimal,

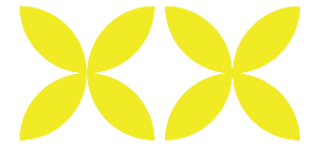
antara lain retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/Sumber Daya Alam, dana alokasi khusus, pendapatan bagi hasil, bantuan keuangan dan pendapatan hibah. Meski belum dapat terealisasi secara sepenuhnya, namun realisasi pendapatan daerah mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat selama kurun waktu 2018 hingga 2024 tingkat rata-rata pertumbuhan sebesar 2,81 persen. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2.166.947.747,64 dan terus berfluktuasi hingga di tahun 2024 realisasi mencapai Rp2.408.812.671.671,00 dapat terlihat seperti gambar berikut.



Gambar 2. 117 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Analisis, 2024

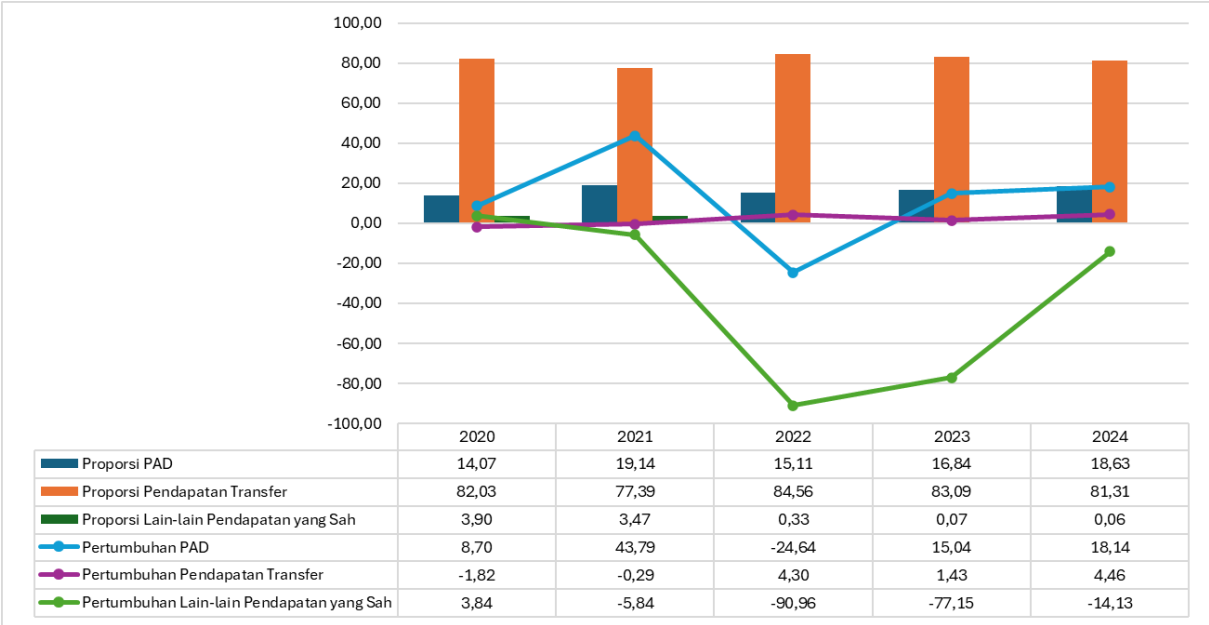
Dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, Dana Perimbangan Daerah menjadi komponen pendapatan daerah dengan porsi terbesar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan rata-rata porsinya, Dana Perimbangan Daerah memiliki rata-rata kontribusi sebesar 81,68 persen, Pendapatan Asli Daerah 16,76 persen, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 1,57 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten. Adapun berdasarkan rata-rata pertumbuhannya, Pendapatan Asli Daerah menjadi komponen pendapatan daerah dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan komponen pendapatan yang lain, yaitu dengan tingkat pertumbuhan sebesar 12,20 persen. Hal tersebut juga terjadi pada komponen Dana Perimbangan Daerah yang menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,61 persen per tahun. Disamping itu terdapat komponen pendapatan yang cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu Lain-Lain pendapatan Daerah yang Sah dengan rata-rata penurunan sebesar 36,85 persen per tahun.



Tabel 2. 169 Tren Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN ASLI DAERAH	304.800.202.905,00	438.264.776.270,00	330.274.511.807,79	379.937.415.349,53	448.851.158.304,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.777.624.550.851,00	1.772.395.566.516,00	1.848.525.446.302,00	1.874.941.153.899,00	1.958.558.013.367,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	84.522.993.892,00	79.582.624.992,00	7.198.021.917,00	1.645.020.161,00	1.412.500.000,00
JUMLAH	2.166.947.747.648,00	2.290.242.967.778,00	2.185.997.980.026,79	2.256.523.589.409,53	2.408.812.671.671,00

Sumber: LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024



Gambar 2. 118 Grafik Proporsi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dengan melihat proporsi pendapatan daerah, terlihat bahwa Pendapatan Transfer memiliki persentase paling besar dalam menyumbang Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo. Kondisi ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang rendah dan ketergantungan daerah terhadap dana transfer sehingga perlu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang menunjukkan perkembangan yang cukup positif meskipun sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan.

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu:

1) Pajak Daerah

Jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Purworejo, meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2) Retribusi Daerah

Jenis retribusi yang menjadi sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Purworejo, terdiri dari: 1) retribusi jasa umum yang meliputi: Retribusi pelayanan kesehatan (mulai tahun 2024), retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang, serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi; 2) retribusi jasa usaha, meliputi : retribusi pemakaian

kekayaan daerah, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga; 3) retribusi perizinan tertentu meliputi : retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum , retribusi persetujuan bangunan gedung, dan retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

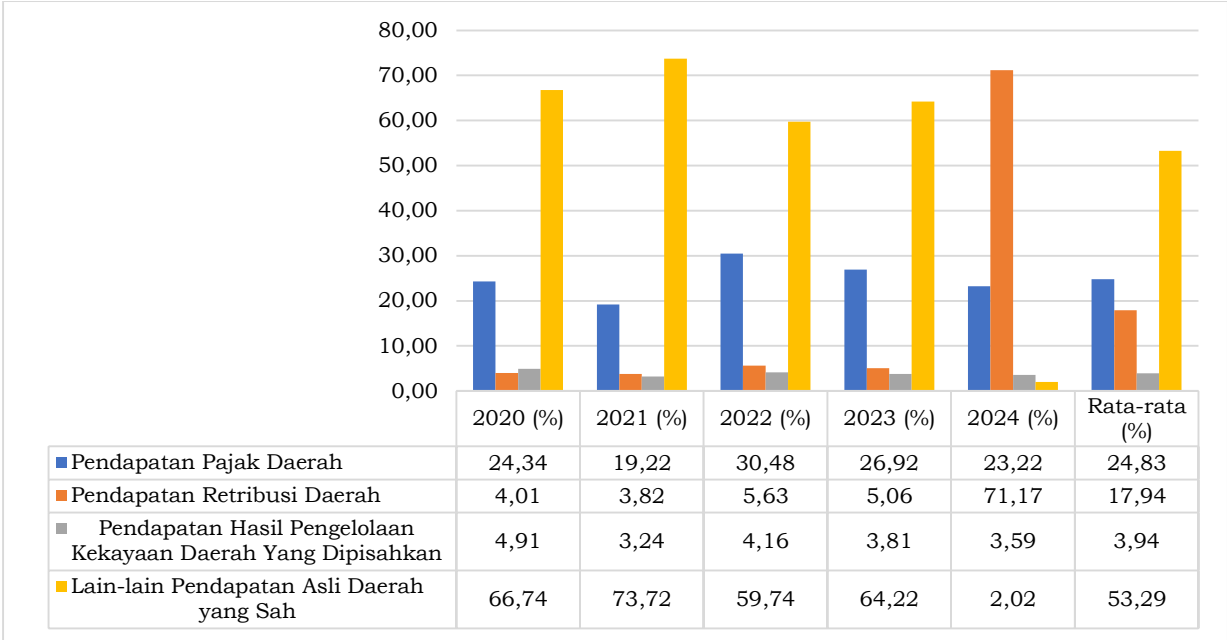
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan ini berasal dari dividen Badan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Purworejo yaitu: Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari, Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika, Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Perusahaan Daerah BPR Bank Purworejo, PT Bank Jateng, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Purworejo.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lain-lain

Pendapatan asli daerah yang sah diantaranya: hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan dari pengembalian, pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah dan pendapatan BLUD (hanya sampai tahun 2023, karena mulai tahun 2024 pencatatannya beralih ke retribusi daerah) .

Selama kurun waktu 2020-2024, pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo didominasi oleh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terutama didukung oleh pendapatan BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit, disusul pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan terakhir hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Namun, pada tahun 2024 terdapat perubahan yang signifikan pada pendapatan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah karena sesuai amanah Perda Kabupaten Purworejo 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 62 ayat 3 bahwa terdapat pengalihan pencatatan pendapatan pelayanan kesehatan pada BLUD, yang sebelumnya tercatat di lain-lain pendapatan yang sah menjadi pendapatan retribusi daerah. Persentase proporsi PAD Kabupaten Purworejo dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 2. 119 Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Perkembangan data realisasi PAD Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2. 170 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
Pendapatan Pajak Daerah	74.189.987.143	84.227.368.780	100.654.070.739,00	102.276.349.264,00	104.218.544.345,00	7,49
Pendapatan Retribusi Daerah	12.221.391.126	16.738.324.784	18.591.092.668,00	19.224.909.728,00	319.427.778.313,00	268,45
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.953.292.871	14.213.920.409	13.723.941.495,00	14.457.361.320,00	16.119.649.871,00	8,52
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	203.435.531.765	323.085.162.297	197.305.406.905,79	243.978.795.037,53	9.085.185.775,00	-7,77
Jumlah	304.800.202.905,00	438.264.776.270,00	330.274.511.807,79	379.937.415.349,53	448.851.158.304,00	9,79

Sumber: LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Perkembangan pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 9,79 persen, dimana pendapatan pada tahun 2020 sebesar Rp304.800.202.905,00 menjadi Rp448.851.158.304,00 pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan komponen pendapatan asli daerah hampir seimbang, pertumbuhan tertinggi ada pada komponen pendapatan retribusi daerah sebesar 268,45 persen dan terendah pada komponen pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang mengalami penurunan sebesar 7,77 persen. Jika dilihat per tahun, masing-masing komponen PAD mengalami fluktuasi sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut.

1) Pendapatan Pajak Daerah

Selama tahun 2020 hingga tahun 2024, pendapatan pajak daerah menunjukkan perkembangan yang positif dengan tingkat rata-rata pertumbuhan 7,49 persen. Di tahun 2020 pendapatan pajak daerah tercatat sebesar Rp74.189.987.143,00 dan terus meningkat hingga mencapai Rp104.218.544.345,00 di tahun 2024. Pada tahun 2022 terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada pajak daerah menjadi sebesar Rp100.654.070.739,00 yang bersumber pada pajak minerba (mineral batuan bukan logam) untuk mencukupi kebutuhan pembangunan bandara.

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Perkembangan realisasi retribusi daerah hampir sama dengan pajak daerah yang mengalami perkembangan positif dengan peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata tingkat pertumbuhan retribusi daerah sebesar 268,45 persen per tahun menjadikan retribusi daerah sebagai komponen pendapatan asli daerah dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2024 retribusi daerah mengalami kenaikan signifikan dari Rp19.224.909.728,00 di tahun 2023 menjadi Rp319.427.778.313,00. Hal ini karena mulai tahun 2024 pencatatan pendapatan pelayanan kesehatan pada BLUD yang sebelumnya tercatat di lain-lain pendapatan yang sah dialihkan ke pendapatan retribusi daerah. Pada tahun 2022, retribusi daerah mengalami pertumbuhan yang cukup lambat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan banyaknya pengajuan keringanan retribusi pasar sebagai akibat banyaknya pasar yang mengalami kerusakan.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pada periode tahun 2020-2024, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif yang cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 8,52 persen per tahun. Fluktuasi komponen pendapatan ini dipengaruhi oleh jumlah penerimaan dividen dari BUMD. Di tahun 2020 hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan tercatat senilai Rp14.953.292.871,00 dan terus mengalami fluktuasi hingga di tahun 2024 mencapai Rp16.119.649.871,00. Pada tahun 2022, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan karena penerimaan dividen dari Perusahaan Daerah BPR Bank Purworejo turun drastis.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah mengalami perkembangan yang sangat fluktuatif dan menjadi komponen PAD dengan tingkat rata-rata pertumbuhan

terendah yaitu (-7,77) persen per tahun. Fluktuasi lain-lain PAD yang sah ini sangat ditentukan dari pemanfaatan/penjualan BMD dan pendapatan BLUD. Pada tahun 2020 dan 2021 lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan karena adanya kenaikan pada pendapatan BLUD - RSUD sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19, yaitu menjadi Rp203.435.531.765,00 dan Rp323.085.162.297,00. Di tahun 2022 lain-lain PAD yang sah kembali mengalami penurunan menjadi Rp197.305.406.905,79 dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2023 menjadi Rp243.978.795.037,53. Pada tahun 2024, lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan sangat signifikan menjadi Rp9.085.185.775,00. Penurunan ini disebabkan adanya pemindahan pencatatan pendapatan pelayanan kesehatan pada BLUD ke pendapatan retribusi daerah.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya. Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Pendapatan Kabupaten Purworejo yang bersumber dari tranfer pemerintah pusat terdiri dari beberapa objek sebagai berikut.

a) Dana Perimbangan, yang meliputi:

- Dana transfer umum, yang terdiri dari: Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Cukai Hasil Tembakau, dan Sumber Daya Alam; dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dana transfer khusus, yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Insentif Fiskal

Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.

c) Dana Desa

Dana Desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

Pendapatan Kabupaten Purworejo yang bersumber dari transfer antara daerah terdiri dari beberapa objek sebagai berikut:

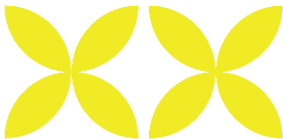
a) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

b) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Perkembangan data realisasi pendapatan transfer Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2. 171 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

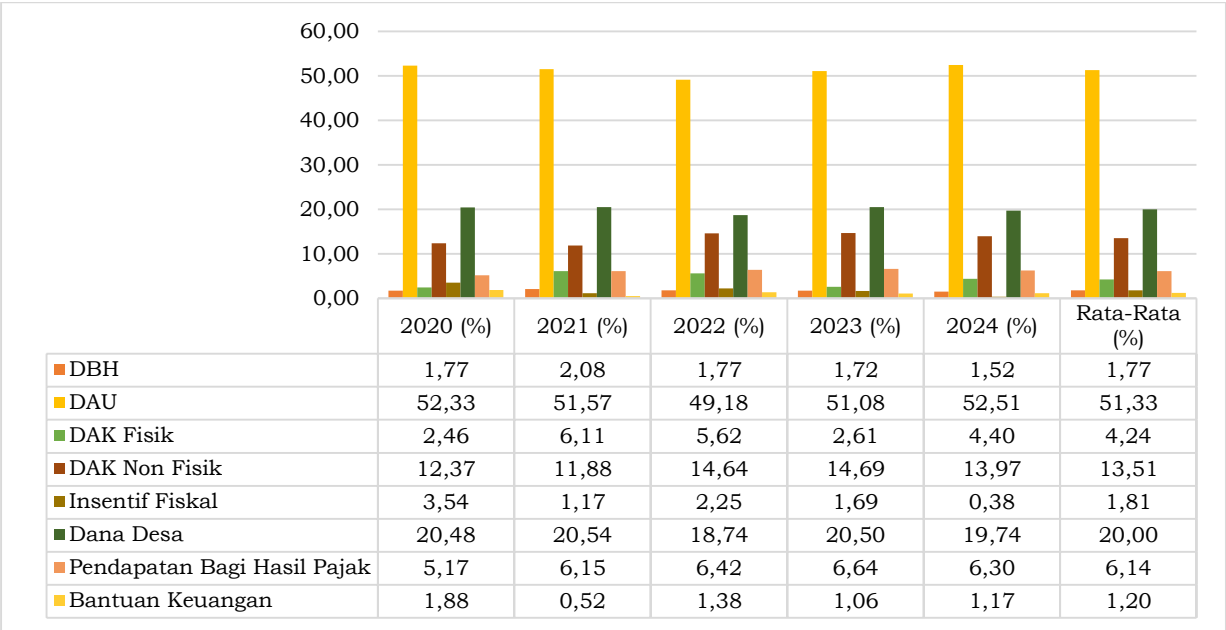
Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN TRANSFER	1.777.624.550.851	1.772.395.566.516	1.848.525.446.302,00	1.874.941.153.899,00	1.958.558.013.367,00	2,52
Transfer Pemerintah Pusat	1.652.291.183.635	1.654.201.146.712	1.704.401.246.002,00	1.730.465.289.780,00	1.812.249.208.453,00	2,34
Dana Perimbangan	1.225.319.536.635	1.269.473.877.712	1.316.418.832.627,00	1.314.410.737.780,00	1.418.035.604.453,00	2,24
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	31.402.133.052	36.804.536.889	32.739.696.982,00	32.334.378.132,00	29.857.280.000,00	5,58
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	930.205.439.000	913.937.548.000	909.104.885.900,00	957.767.136.834,00	1.028.441.374.978,00	1,87
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	43.779.898.474	108.211.646.771	103.931.970.159,00	48.952.081.524,00	86.119.209.955,00	25,62
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	219.932.066.109	210.520.146.052	270.642.279.586,00	275.357.141.290,00	273.617.739.520,00	3,50
Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal	62.978.422.000	20.734.044.000	41.600.943.000,00	31.653.321.000,00	7.523.866.000,00	50,84
Dana Desa	363.993.225.000	363.993.225.000	346.381.470.375,00	384.401.231.000,00	386.689.738.000,00	3,14
Pendapatan Transfer Antar Daerah	125.333.367.216	118.194.419.804	144.124.200.300,00	144.475.864.119,00	146.308.804.914,00	5,26
Pendapatan Bagi Hasil	91.978.353.408	108.924.659.904	118.603.095.000,00	124.577.393.119,00	123.330.794.714,00	4,07
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	91.978.353.408	108.924.659.904	118.603.095.000,00	124.577.393.119,00	123.330.794.714,00	4,07
Bantuan Keuangan	33.355.013.808	9.269.759.900	25.521.105.300,00	19.898.471.000,00	22.978.010.200,00	41,43
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	33.355.013.808	9.269.759.900	25.521.105.300,00	19.898.471.000,00	22.978.010.200,00	41,43

Sumber: LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020, pendapatan transfer pemerintah pusat Kabupaten Purworejo sebesar Rp1.652.291.183.635,00 dan bertumbuh hingga mencapai Rp1.958.558.013.367,00 di tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,52 persen per tahun. Berdasarkan komponen pembentuknya, Dana Perimbangan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,24 persen per tahun. Hal tersebut juga terjadi pada komponen Dana Insentif dan Dana Desa yang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 50,84 persen dan 3,14 persen.

Komponen selanjutnya dari pendapatan transfer adalah pendapatan transfer antar daerah yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, pendapatan transfer daerah yang diterima oleh Kabupaten Purworejo berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 5,26 persen per tahun. Pada tahun 2020, pendapatan transfer daerah sebesar Rp125.333.367.216,00 dan berfluktuasi hingga di tahun 2024 menjadi Rp146.308.804.914,00.

Selama kurun waktu 2020-2024, sumber utama pendapatan transfer berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kontribusi rata-rata sebesar 51,33 persen diikuti oleh Dana Desa sebesar 20,00 persen dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 13,51%. Proporsi Perkembangan Data realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 120 Proporsi pendapatan Transfer Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Dalam struktur pendapatan transfer, DAU menjadi komponen penyusun terbesar dengan rata-rata kontribusi sebesar 51,33 persen dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, besaran DAU yang diterima oleh Kabupaten Purworejo mencapai Rp930.205.439.000,00 dan berfluktuasi hingga di tahun 2023 menjadi sebesar Rp1.028.441.374.978,00. Komponen

dengan proporsi terbesar kedua adalah Dana Desa. Dalam rentang waktu yang sama, komponen pendapatan ini memiliki rata-rata kontribusi sebesar 20,00 persen dengan fluktuasi yang cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,14 persen per tahun, dari Rp363.993.225.000,00 di tahun 2020 menjadi Rp386.689.783.000,00 di tahun 2024. Selanjutnya komponen pendapatan transfer dengan kontribusi terbesar ketiga yaitu DAK Non Fisik dengan rata-rata kontribusi sebesar 13,51 persen. Pendapatan ini juga mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat dari Rp219.932.066.109,00 di tahun 2020 menjadi Rp273.617.739.520,00 di tahun 2024 dengan tingkat rata-rata pertumbuhan 3,50 persen per tahun. Selanjutnya Pendapatan Bagi Hasil menjadi komponen yang memberikan kontribusi terbesar ketiga dengan rata-rata besaran kontribusi sebesar 6,14 persen. Di tahun 2020 Kabupaten Purworejo mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil dari pajak sebesar Rp91.978.353.408,00 dan cenderung mengalami peningkatan rata-rata 4,07 per tahun hingga menjadi Rp123.330.794.714,00 di tahun 2024. Komponen selanjutnya yaitu DAK Fisik yang memberikan kontribusi 4,24 persen pada pendapatan transfer yang diterima Kabupaten Purworejo. Komponen pendapatan ini juga mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat dengan tingkat peningkatan 25,62 persen per tahun, dari Rp43.779.898.474,00 di tahun 2020 menjadi Rp86.119.209.955,00 di tahun 2024. Selanjutnya DBH, insentif fiskal, dan bantuan keuangan menjadi komponen terakhir pendapatan transfer dengan masing-masing kontribusi sebesar 1,77 persen, 1,81 persen 1,20 persen per tahun. Ketiga komponen pendapatan ini juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun setiap tahunnya. DBH memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 5,58 persen per tahun, dari Rp31.402.133.052,00 di tahun 2020 menjadi Rp29.857.280.000,00 di tahun 2024. Insentif fiskal atau Dana Insentif Daerah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan di setiap tahunnya dengan tingkat rata-rata pertumbuhan sebesar 50,84 persen, dari Rp62.978.422.000,00 di tahun 2020 menjadi Rp7.523.866.000,00 di tahun 2024. Adapun bantuan keuangan yang didapat Kabupaten Purworejo juga mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dengan tingkat rata-rata pertumbuhan sebesar 41,43 persen per tahun. Di tahun 2020 penerimaan bantuan keuangan senilai Rp33.355.013.808,00 dan berfluktuasi menjadi sebesar Rp22.978.010.200,00 di tahun 2024.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari beberapa objek sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai

konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

- 2) Dana Darurat
- Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pendapatan Hibah Dana BOS. Namun demikian dengan adanya ketentuan bahwa Dana BOS masuk dalam klasifikasi Dana Alokasi Khusus maka mulai Tahun Anggaran 2022, maka mulai tahun 2022 untuk Dana BOS masuk dalam Pendapatan Dana Perimbangan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Perkembangan data realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 172 Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024

Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	84.522.993.892	79.582.624.992	7.198.021.917,00	1.645.020.161,00	1.412.500.000,00	-28,44
Pendapatan Hibah	-	3.949.934.992	7.198.021.917,00	1.645.020.161,00	1.412.500.000,00	15,16
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		3.949.934.992	7.198.021.917,00	1.645.020.161,00		1,27
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		3.949.934.992	7.198.021.917,00	1.645.020.161,00		1,27
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri					1.412.500.000,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri					1.412.500.000,00	100,00
Dana Darurat	-	-	-	-		0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	84.522.993.892	75.632.690.000	-	-		1,15
Lain-lain Pendapatan	84.522.993.892	75.632.690.000				-15,52
Pendapatan Hibah Dana BOS	84.522.993.892	75.632.690.000				-15,52

Sumber: LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Komponen lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Purworejo menunjukkan besaran yang fluktuatif di setiap tahunnya. Lain-lain pendapatan yang sah bersumber dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di tahun 2020, lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Purworejo hanya berasal dari pendapatan hibah dana bos, yaitu sebesar Rp84.522.993.892,00. Di tahun 2021, Kabupaten Purworejo mendapatkan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp3.949.934.992 dan sekaligus hibah dari dana BOS sebesar

Rp75.632.690.000. Adapun di tahun 2022-2024 hanya mendapat hibah dari pemerintah pusat dengan besaran masing-masing senilai Rp7.198.021.917,00 di tahun 2022, Rp1.645.020.161,00 di tahun 2023, dan Rp1.412.500.000,00 di tahun 2024.

c. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

- 1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Belanja Barang Dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.
 - Belanja Bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
 - Belanja Subsidi, Belanja subsidi ditujukan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan

pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

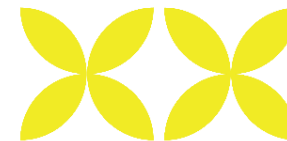
- Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.
- 2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria : a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c) batas minimal kapitalisasi aset.
- 3) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi: a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau; c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Belanja tidak terduga juga dianggarkan untuk keperluan mendesak yang meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Belanja Transfer
- Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:
- Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan daerah kabupaten kepada desa dalam jenis bantuan keuangan yang bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas



pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.
Perkembangan data realisasi belanja daerah Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut.



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029

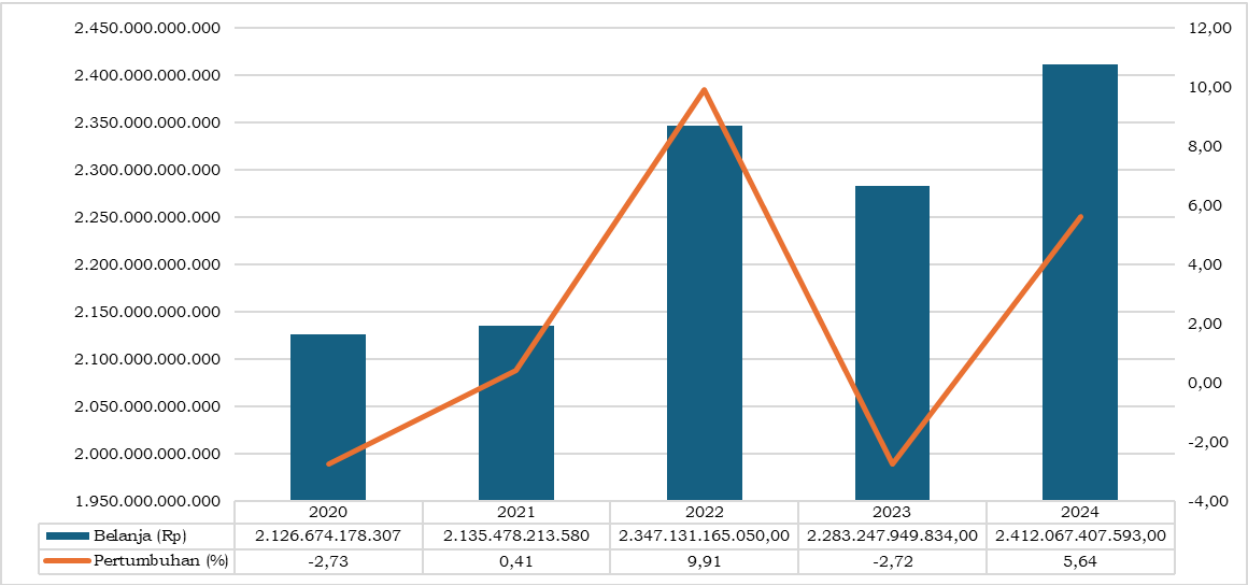


Tabel 2. 173 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA	2.126.674.178.307	2.135.478.213.580	2.347.131.165.050,00	2.283.247.949.834,00	2.412.067.407.593,00	2,23
BELANJA OPERASI	1.342.979.353.854	1.347.548.808.129	1.407.986.195.525,00	1.468.395.150.359,00	1.646.965.396.160,00	3,91
Belanja Pegawai	840.443.646.111	845.979.917.961	822.707.385.815,00	841.365.218.836,00	966.227.667.123,73	1,44
Belanja Barang dan Jasa	395.312.806.885	452.242.021.355	505.438.735.492,00	508.858.261.536,00	554.573.604.307,27	8,47
Belanja Bunga	406.391.671	63.211.321	243.496.496,00	173.234.168,00	0,00	28,65
Belanja Hibah	89.770.517.095	45.001.958.084	70.610.971.972,00	111.786.580.179,00	121.455.043.609,00	33,37
Belanja Bantuan Sosial	17.045.992.092	4.261.699.408	8.985.605.750,00	6.211.855.640,00	4.709.081.120,00	3,71
BELANJA MODAL	254.015.009.152	266.462.622.108	419.618.626.696,00	263.302.583.155,00	195.601.121.874,00	-5,59
Belanja Tanah	2.148.951.210	2.869.082.370	3.762.736.845,00	-	-	20,60
Belanja Peralatan dan Mesin	102.789.855.975	49.061.232.466	124.075.964.135,00	59.316.349.901,00	82.515.623.101,00	33,19
Belanja Bangunan dan Gedung	72.288.212.233	88.006.805.470	121.513.080.262,00	141.703.379.809,00	24.424.808.327,00	-12,28
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.975.228.032	123.731.665.794	165.297.099.601,00	56.043.062.972,00	84.341.053.291,00	7,07
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.376.901.002	2.190.272.308	4.969.745.853,00	6.239.790.473,00	4.244.637.155,00	8,48
Belanja Aset Lainnya	435.860.700	603.563.700	-	-	75.000.000,00	-11,55
BELANJA TAK TERDUGA	1.643.942.088	261.499.088	-	-	-	-30,68
Belanja Tak Terduga	1.643.942.088	261.499.088	-	-	-	-30,68
BELANJA TRANSFER	528.035.873.213	521.205.284.255	519.526.342.829,00	551.550.216.320,00	569.500.889.559,00	4,29
Belanja Bagi Hasil	9.250.002.600	521.205.284.255	19.591.324.400,00	11.955.971.218,00	12.745.328.782,00	899,17
Belanja Bantuan Keuangan	518.785.870.613		499.935.018.429,00	539.594.245.102,00	556.755.560.777,00	4,98

Sumber: LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Untuk lebih mudah melihat tren pertumbuhan anggaran belanja daerah Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

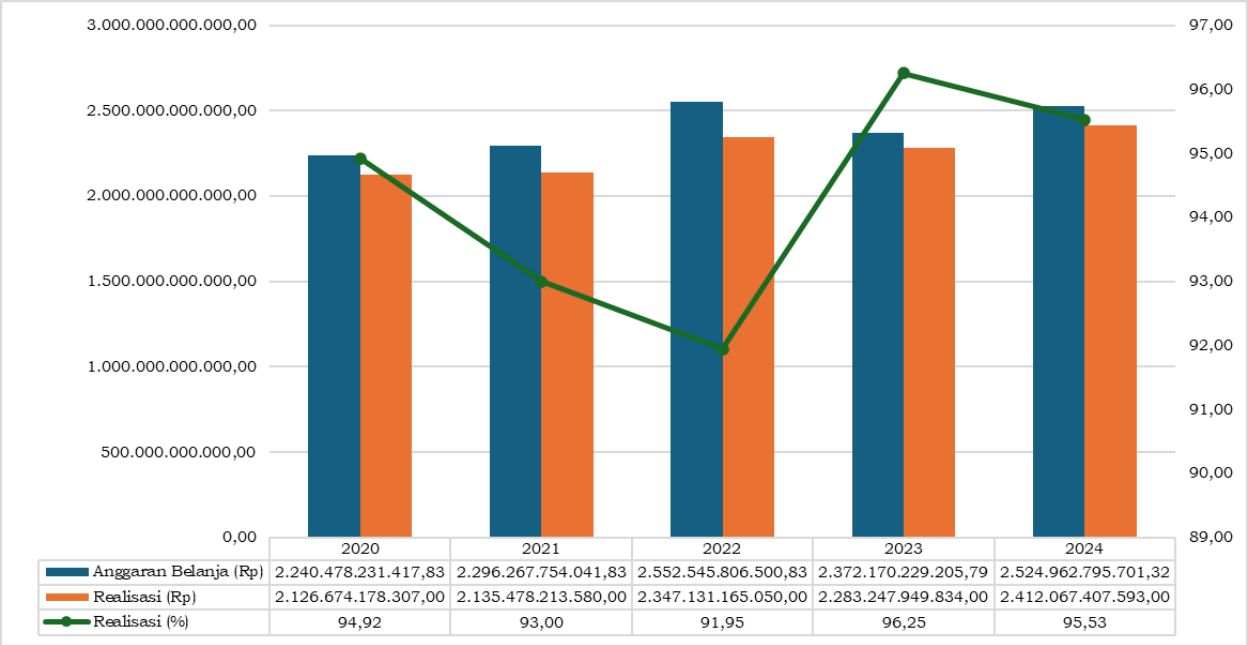


Gambar 2. 121 Pertumbuhan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Pada gambar di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa anggaran belanja daerah Kabupaten Purworejo selama lima tahun sejak 2020-2024 sangat fluktuatif, dengan lonjakan anggaran yang tinggi terjadi pada tahun 2022. Pada tahun anggaran 2022, pagu belanja mengalami peningkatan sebesar Rp. 256.278.052.459,00 atau meningkat 11,16% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang di dominasi oleh penghematan belanja akibat pandemi Covid-19 selama kurun 2020-2021.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Purworejo selama 2020-2024 juga fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 122 Anggaran, Realisasi serta Persentase Realisasi Belanja Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Analisis tahun 2020-2024

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa persentase realisasi belanja daerah Kabupaten Purworejo cenderung menurun sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2020 dan 2021 penurunan persentase realisasi belanja disebabkan karena adanya pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2022, rendahnya persentase realisasi belanja disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena pagu anggaran yang tinggi, kurang maksimalnya penyerapan belanja Tambahan Penghasilan karena banyak ASN yang purna, cuti besar serta menjalani hukuman disiplin, tidak maksimalnya realisasi Dana Alokasi Khusus baik Fisik maupun Non Fisik serta beberapa sebab lainnya.

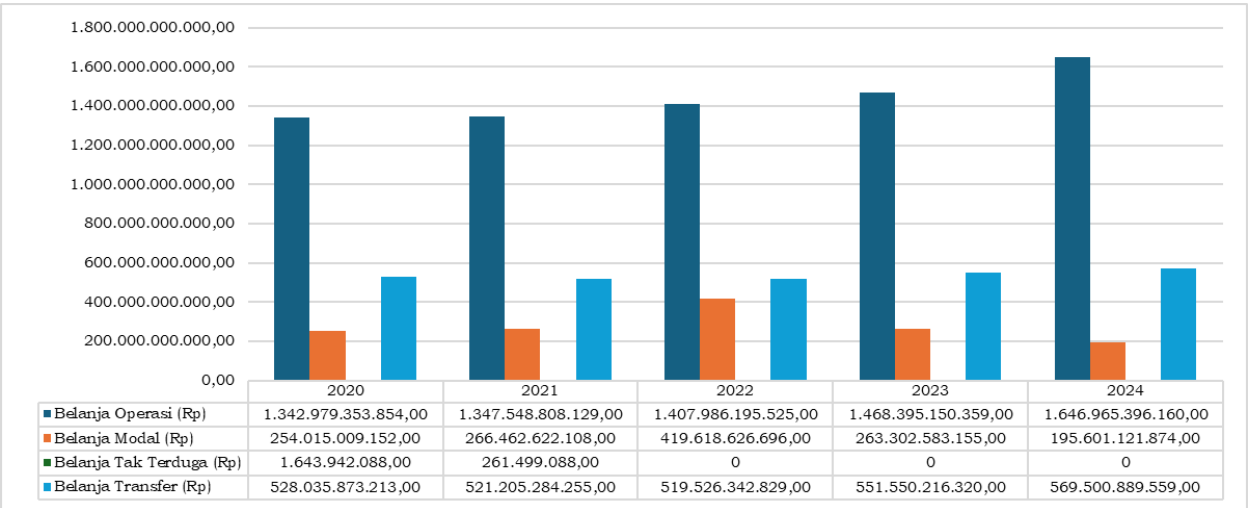
Data anggaran, realisasi serta persentase realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 174 Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5
2020	2.240.478.231.417,83	2.126.674.178.307,00	113.804.053.110,83	94,92
2021	2.296.267.754.041,83	2.135.478.213.580,00	160.789.540.461,83	93,00
2022	2.552.545.806.500,83	2.347.131.165.050,00	205.414.641.450,83	91,95
2023	2.372.170.229.205,79	2.283.247.949.834,00	88.922.279.371,79	96,25
2024	2.524.962.795.701,32	2.412.067.407.593,00	112.895.388.108,32	95,53

Sumber: LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Realisasi belanja daerah Kabupaten Purworejo per kelompok belanja dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 2. 123 Realisasi Belanja Kabupaten Purworejo per Kelompok Belanja Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dari penyajian data di atas, baik dalam bentuk tabel maupun grafik, terlihat jelas bahwa komposisi realisasi belanja Kabupaten Purworejo selama kurun 2020-2024 masih di dominasi oleh Belanja Operasi. Rata-rata proporsi realisasi belanja operasi selama lima tahun sejak tahun 2020-2024 berada pada angka 63,77 persen dibandingkan dengan total realisasi belanja daerah. Disusul berikutnya belanja transfer dengan rata-rata proporsi realisasi belanja 23,83

persen, belanja modal dengan rata-rata proporsi realisasi belanja 12,39 persen serta belanja tak terduga dengan rata-rata proporsi realisasi belanja 0,04 persen. Data detail proporsi realisasi belanja per kelompok belanja dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 175 Proporsi Realisasi Belanja per Kelompok Belanja Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Kelompok Belanja	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Operasi (%)	63,15	63,10	59,99	64,31	68,28	63,77
Belanja Modal (%)	11,94	12,48	17,88	11,53	8,11	12,39
Belanja Tak Terduga (%)	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
Belanja Transfer (%)	24,83	24,41	22,13	24,16	23,61	23,83

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Sedangkan proporsi realisasi belanja per jenis belanja terhadap total realisasi belanja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 176 Proporsi Realisasi Jenis Belanja per Jenis Belanja Terhadap Total Realisasi Belanja Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Kelompok/Jenis Belanja	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Rata-rata (%)
1	2	3	4	5	6	8
BELANJA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
BELANJA OPERASI						
Belanja Pegawai	39,52	39,62	35,05	36,85	40,06	39,16
Belanja Barang dan Jasa	18,59	21,18	21,53	22,29	22,99	20,29
Belanja Bunga	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
Belanja Hibah	4,22	2,11	3,01	4,90	5,04	3,36
Belanja Bantuan Sosial	0,80	0,20	0,38	0,27	0,20	0,42
BELANJA MODAL						
Belanja Tanah	0,10	0,13	0,16	-		
Belanja Peralatan dan Mesin	4,83	2,30	5,29	2,60	3,42	3,28
Belanja Bangunan dan Gedung	3,40	4,12	5,18	6,21	1,01	4,75
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,38	5,79	7,04	2,45	3,50	4,97
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,21	0,10	0,21	0,27	0,18	0,35
Belanja Aset Lainnya	0,02	0,03	-	-	0,00	0,04
BELANJA TAK TERDUGA						
Belanja Tak Terduga	0,08	0,01	-	-	-	0,03
BELANJA TRANSFER						
Belanja Bagi Hasil	0,43	-	0,83	0,52	0,53	0,53
Belanja Bantuan Keuangan	24,39	24,41	21,30	23,63	23,08	22,85

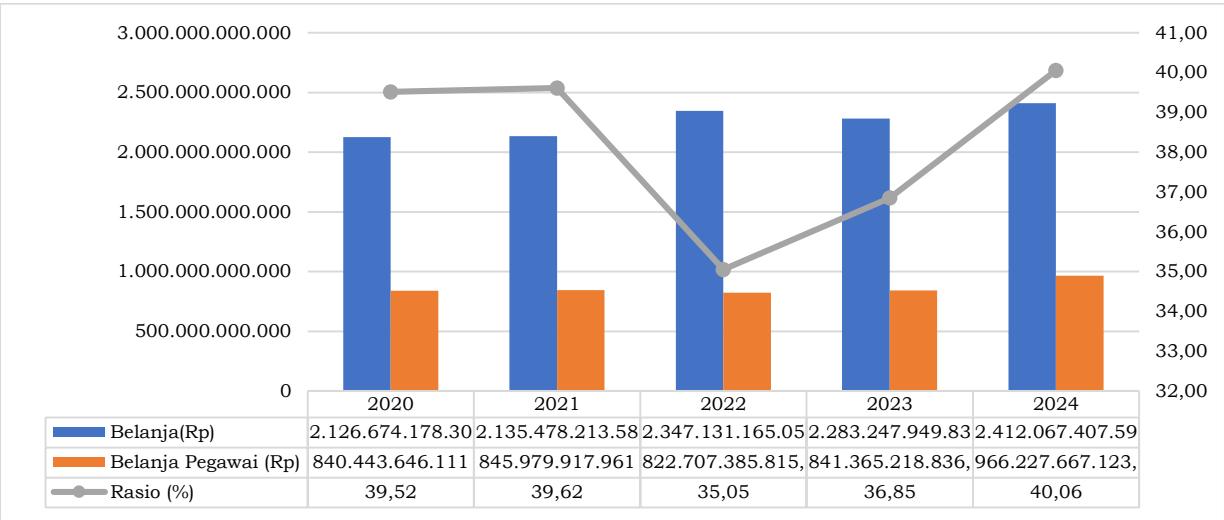
Sumber: Hasil Analisis, 2024

Selama periode 2020-2024, struktur realisasi belanja Kabupaten Purworejo menunjukkan dominasi pada Belanja Operasi dengan porsi terbesar dialokasikan untuk Belanja Pegawai yang memiliki rata-rata sebesar 39,16 persen. Pada tahun 2023 meningkat sebesar 2,16 persen dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun demikian, terdapat tren penurunan proporsi Belanja Pegawai dari 39,52 persen pada tahun 2020 menjadi 35,05 persen pada tahun 2022 yang menggambarkan adanya peningkatan efisiensi atau perubahan fokus prioritas anggaran. Sebaliknya, Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 18,59 persen pada tahun 2020 menjadi 22,99 persen

pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa kebutuhan operasional yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Pada kategori Belanja Modal, rata-rata alokasi sebesar 14,83 persen dari total belanja daerah menunjukkan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur daerah. Hal ini terlihat dari fokus pengeluaran pada Bangunan dan Gedung rata-ratanya sebesar 5,38 persen dan pengeluaran pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan rata-rata sebesar 5,22 persen yang merupakan prioritas strategis untuk mendukung konektivitas dan pengembangan ekonomi wilayah. Namun, alokasi untuk Belanja Tak Terduga sangat kecil, dengan rata-rata hanya sebesar 0,03 persen yang mengindikasikan terbatasnya cadangan dana untuk keperluan darurat. Sementara itu, Belanja Transfer yang meliputi Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan juga relatif rendah, masing-masing dengan rata-rata 0,53 persen dan 22,83 persen, menunjukkan adanya keterbatasan distribusi anggaran kepada pihak eksternal.

Proporsi atau rasio realisasi belanja pegawai dibandingkan dengan total realisasi belanja daerah Kabupaten Purworejo juga dapat dilihat pada grafik berikut.

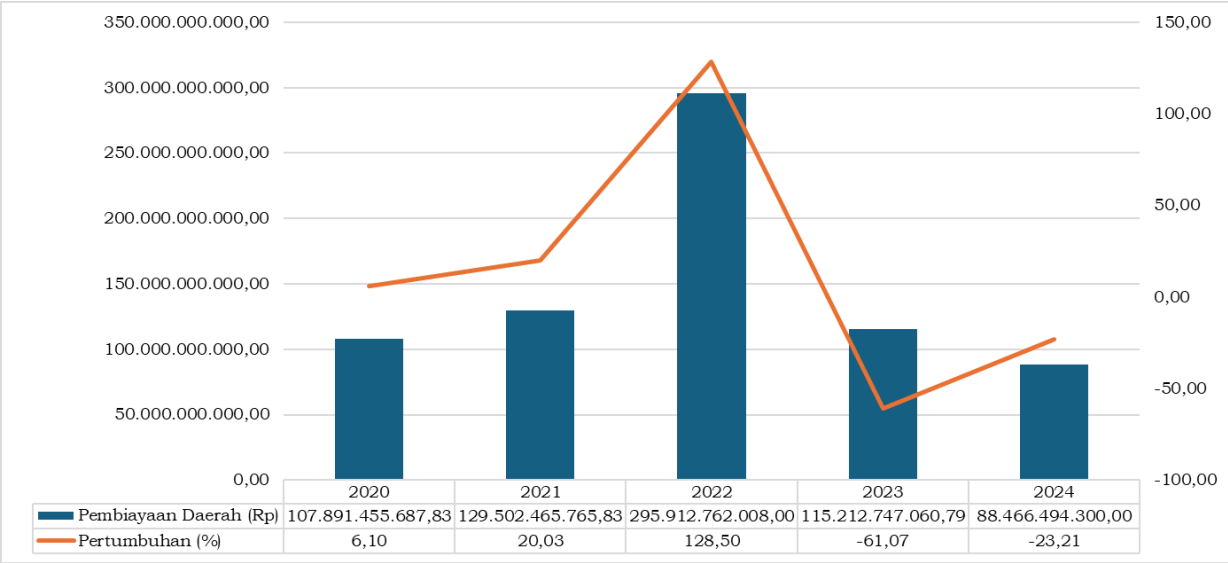


Gambar 2. 124 Rasio Realisasi Belanja Pegawai Terhadap Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Analisis, 2025

d. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau belanja yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pengelolaan pembiayaan daerah harus dilakukan secara bijaksana agar tidak memberikan beban yang berlebihan pada keuangan daerah serta memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pembiayaan daerah Kabupaten Purworejo dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 2. 125 Pembiayaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Analisis, 2025

Selaras dengan pendapatan dan belanja daerah, pembiayaan daerah Kabupaten Purworejo juga turut mengalami fluktuasi. Dari data yang telah disajikan terlihat bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2024 fluktuasi pembiayaan daerah cenderung mengalami penurunan. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar 61,07 persen dari Rp295.912.762.008,00 menjadi Rp115.212.747.060,79. Di tahun 2022 terjadi pertumbuhan yang sangat besar dengan tingkat peningkatan pembiayaan sebesar 128,50 persen dan menjadi capaian tertinggi pembiayaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pembiayaan dapat dibedakan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.



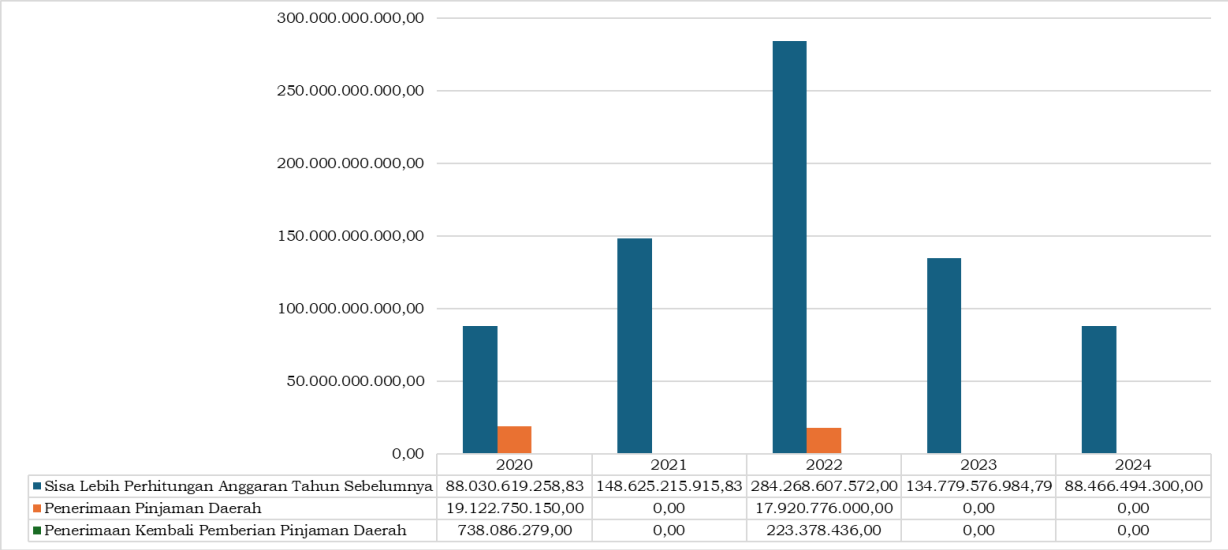
Tabel 2. 177. Realisasi Pembiayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Uraian	Realisasi Tahun (Rp)					Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
PEMBIAYAAN DAERAH						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	107.891.455.687,83	148.625.215.915,83	302.412.762.008,00	134.779.576.984,79	88.466.494.300,00	1,58%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	88.030.619.258,83	148.625.215.915,83	284.268.607.572,00	134.779.576.984,79	88.466.494.300,00	2,71%
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Penerimaan Pinjaman Daerah	19.122.750.150,00	0,00	17.920.776.000,00	0,00	0,00	0,00%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	738.086.279,00	0,00	223.378.436,00	0,00	0,00	-38,99%
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	19.122.750.150,00	6.500.000.000,00	19.566.829.924,00	0,00	22,50%
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	6.500.000.000,00	1.646.053.924,00	0,00	-12,45%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	19.122.750.150,00	0,00	17.920.776.000,00	0,00	0,00%
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan-Perundangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pembiayaan Netto	107.891.455.687,83	129.502.465.765,83	295.912.762.008,00	115.212.747.060,79	88.466.494.300,00	4,31%
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	148.165.025.028,83	284.267.219.963,83	134.779.576.984,79	88.488.386.636,32	85.220.758.378,00	8,65%

Sumber: LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

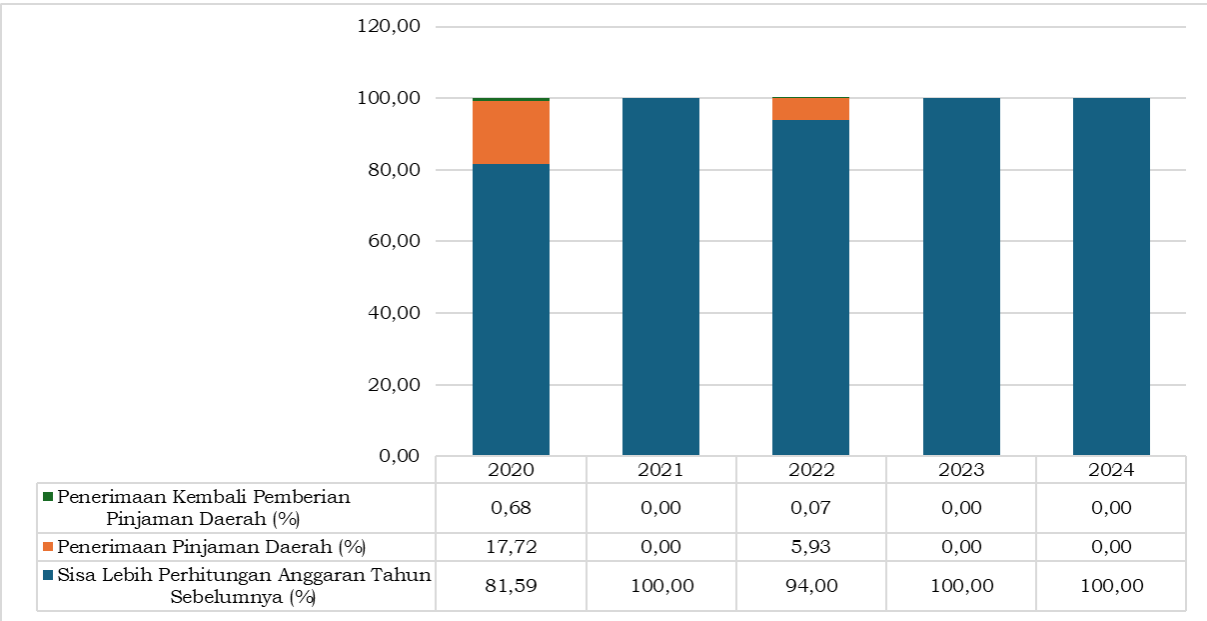
1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo selama kurun waktu tahun 2020-2024 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Untuk mengetahui tren dan proporsi realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 126 Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Gambar 2. 127 Proporsi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

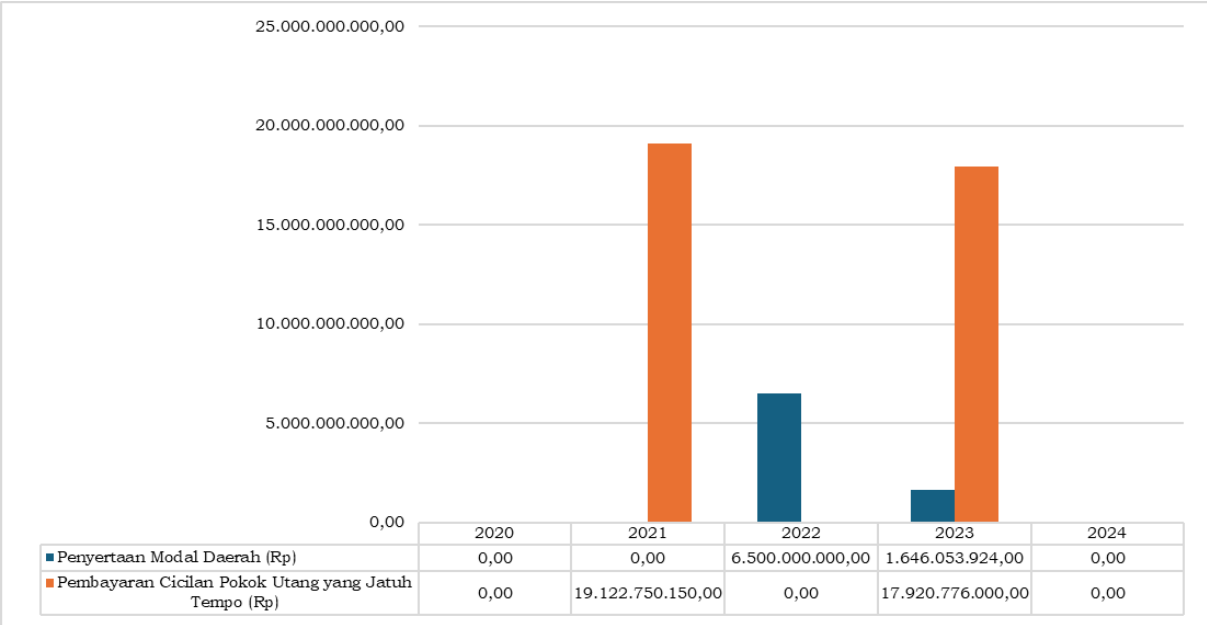
Sumber: Hasil Analisis, 2025

SiLPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran menunjukkan sisa dana pada realisasi APBD periode sebelumnya karena adanya kelebihan penerimaan pendapatan atau penghematan belanja. Besaran SiLPA akan menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam hal penganggaran dan pelaksanaan anggaran. Semakin besar nilai SiLPA menggambarkan bahwa pemerintah kurang cermat dalam melaksanakan penganggaran dan perencanaan atau kurang optimal dalam melaksanakan anggaran. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kondisi SiLPA Kabupaten Purworejo menunjukkan besaran yang fluktuatif. Pada tahun 2020, besaran SiLPA di kabupaten ini tercatat sebesar Rp88.030.619.258,83 atau sebesar 81,59 persen dari seluruh penerimaan pembiayaan yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarnya menjadi Rp88.466.494.300,00 atau sebesar 100,00 persen dari penerimaan pembiayaan. Penerimaan SiLPA terbesar terjadi pada tahun 2022 yang mencapai Rp284.268.607.572,00.

Dari gambar di atas terlihat bahwa penerimaan pembiayaan selain bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya juga dari penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Pada tahun 2020 dan 2022 terdapat penerimaan pinjaman daerah. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 19.122.750.150,00 pada tahun 2020 merupakan pinjaman daerah dari Bank Jateng Cabang Purworejo untuk pembangunan pasar Purworejo, sedangkan pada tahun 2022 penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 17.920.776.000,00 digunakan untuk Pembangunan Hotel Purworejo. Selama kurun waktu 2020-2023 terdapat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang berasal dari piutang merupakan penerimaan ex dana bergulir/ dana bergulir *hand tractor* tahun 2007-2011 yang sampai akhir tahun 2009 belum dikelola sebagai Unit Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sehingga harus di kembalikan ke kas daerah. Selain itu Penerimaan Pembiayaan dari penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah juga berasal dari penyeteroran pinjaman eks dana bergulir Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Masyarakat (P2KSM) yang mulai tanggal 31 Oktober 2018 telah dihentikan perguliran dananya dan secara berangsur-angsur dana ditarik kembali ke Rekening Kas Umum Daerah.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 128 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

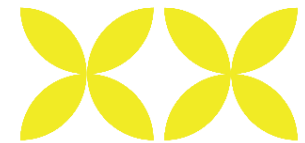
Sumber: Hasil Analisis, 2024

Selama kurun waktu Tahun 2020-2024, pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan tujuan untuk meningkatkan dividen, memperkuat kelembagaan, dan pengembangan usaha dan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Pada tahun 2022 kembali melakukan penyertaan modal untuk BUMD Perumda BPR Bank Purworejo sebesar Rp4.000.000.000,00 dan untuk BUMD Perumda Air Minum PDAM Perwita Sari sebesar Rp2.500.000.000,00, sedangkan untuk tahun 2023 penyertaan modal dilakukan pada Perumda Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Purworejo sebesar Rp.646.053.924,00.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten melakukan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo atas pinjaman daerah Tahun Anggaran 2020 untuk Pembangunan Pasar dan Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo atas pinjaman daerah pada Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan Hotel Purworejo.

e. Neraca Daerah

Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo pada periode tertentu. Komponen neraca terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas, dimana ketika jumlah Kewajiban dan Ekuitas sama dengan Nilai Aset maka menghasilkan laporan keuangan yang balance. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2020 – 2024, selama lima tahun terakhir nilai Aset Pemerintah Kabupaten Purworejo selalu menunjukkan tren positif dengan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Komposisi neraca Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.



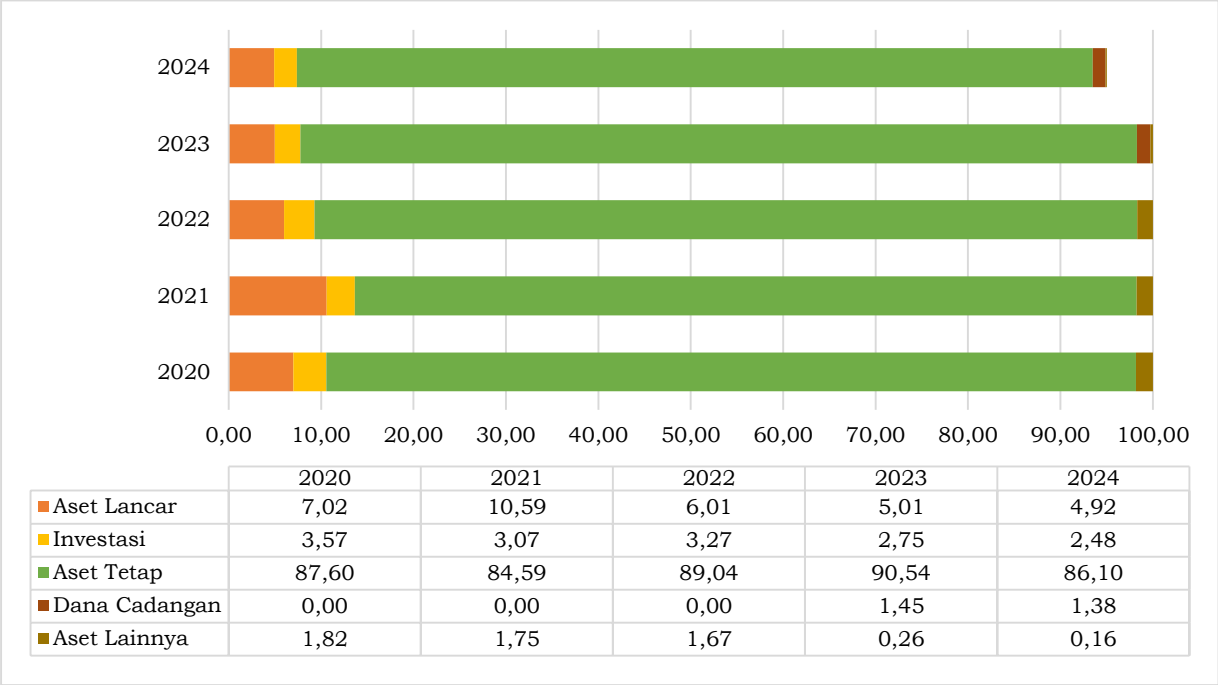
Tabel 2. 178 Neraca Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	ASET					
	A. Aset Lancar	218.085.786.416,99	349.919.711.239,73	207.887.157.495,86	175.773.595.658,68	181.940.844.151,91
	B. Investasi Jangka Panjang	111.001.394.452,00	101.411.121.723,11	113.033.858.199,78	96.509.938.607,68	91.481.167.417,69
	C. Aset Tetap	2.722.937.766.156,00	2.794.293.625.395,48	3.077.474.995.761,00	3.179.809.646.019,01	3.182.378.942.445,93
	D. Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	50.844.651.064,96	50.871.124.364,96
	E. Aset Lainnya	56.432.983.707,90	57.734.810.509,29	57.819.072.086,03	9.010.333.652,74	5.871.710.305,47
	JUMLAH ASET	3.108.457.930.732,89	3.303.359.268.867,61	3.456.215.083.542,67	3.511.948.165.003,07	3.696.171.643.254,65
2	BELANJA					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	29.886.080.519,47	40.729.600.868,40	43.013.868.417,59	35.766.572.185,58	44.317.442.240,00
	B. Kewajiban Jabgka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	29.886.080.519,47	40.729.600.868,40	43.013.868.417,59	35.766.572.185,58	44.317.442.240,00
3	EKUITAS					
	Ekuitas	3.078.571.850.213,42	3.262.629.667.999,21	3.413.201.215.125,08	3.476.181.592.817,49	3.468.226.346.445,96
	JUMLAH EKUITAS	3.078.571.850.213,42	3.262.629.667.999,21	3.413.201.215.125,08	3.476.181.592.817,49	3.468.226.346.445,96
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.108.457.930.732,89	3.303.359.268.867,61	3.456.215.083.542,67	3.511.948.165.003,07	3.512.543.788.685,96

Sumber: LKPD Kabupaten Purworejo 2020-2024

Dari tabel tersebut di atas pertumbuhan aset daerah Kabupaten Purworejo cenderung stabil dan tidak mengalami kontraksi yang berarti selama lima tahun sejak tahun 2020. Aset Tetap mempunyai proporsi atau rasio terbesar dibanding komponen-komponen aset lainnya, dengan rata-rata proporsi sebesar 88,63 persen selama periode tahun 2020-2024. Kontraksi sedikit terjadi pada tahun 2020 dan 2021 dimana rasio atau proporsi aset tetap mengalami penurunan pada kisaran 3% setiap tahunnya, sejalan dengan peningkatan aset lancar pada kisaran 2- 3% setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi *Covid-19* yang mana kebijakan dari Pemerintah Pusat banyak mengharuskan re-alokasi anggaran belanja untuk menunjang penanganan atas pandemi tersebut. Beberapa belanja yang menghasilkan aset tetap kemudian dialihkan untuk belanja lainnya. Sebagian belanja juga tidak terserap sehingga menyisakan sisa kas yang besar pada aset lancar.

Untuk lebih mudah mengetahui proporsi aset pada neraca, dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. 129 Rasio Aset Tetap pada Neraca Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Sedangkan rasio komponen neraca secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 179 Proporsi Neraca Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Rata-rata (%)
1	2	3	4	5	6	7
ASET						
ASET LANCAR	7,02	10,59	6,01	5,01	4,91	6,71
Kas dan Setara Kas	4,77	8,61	3,90	2,52	2,31	4,42
Piutang Pendapatan	1,69	1,35	1,37	1,98	2,41	1,76
Piutang Lainnya	0,10	0,08	0,07	0,00	0,00	0,05
Penyisihan Piutang	-0,57	-0,60	-0,63	-0,84	-0,98	-0,72
Beban Dibayar Di Muka	0,02	0,04	0,03	0,04	0,04	0,03
Persediaan	1,00	1,13	1,28	1,31	1,15	1,17
INVESTASI	3,57	3,07	3,27	2,75	2,48	3,03
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	3,57	3,07	3,27	2,75	2,48	3,03



Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Rata-rata (%)
1	2	3	4	5	6	7
ASET TETAP	87,60	84,59	89,04	90,54	86,10	87,57
Tanah	12,90	12,20	12,96	13,78	13,36	13,04
Peralatan dan Mesin	20,73	21,45	24,14	25,00	25,29	23,32
Gedung dan Bangunan	47,01	47,38	47,48	49,36	47,39	47,72
Jalan, Jaringan dan Irigasi	43,90	45,33	48,71	50,20	50,35	47,70
Aset tetap lainnya	2,99	2,86	2,87	3,00	3,03	2,95
Konstruksi dalam pengerjaan	0,59	0,18	1,03	1,96	2,08	1,17
Akumulasi Penyusutan	-40,51	-44,81	-48,15	-52,75	-55,40	-48,32
DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	1,45	1,38	0,56
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	1,45	1,38	0,56
ASET LAINNYA	1,82	1,75	1,67	0,26	0,16	1,13
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1,62	1,60	1,57	0,10	0,09	0,99
Aset Tidak Berwujud	0,14	0,39	0,39	0,33	0,28	0,31
Aset Lain-lain	0,06	0,01	0,02	0,14	0,02	0,05
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	-0,25	-0,29	-0,31	-0,24	-0,22
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
KEWAJIBAN	0,96	1,23	1,24	1,02	1,26	1,14
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,96	1,23	1,24	1,02	1,26	1,14
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,10
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
Pendapatan Diterima Dimuka	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,02
Utang Belanja	0,28	1,20	0,68	0,99	1,24	0,88
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
EKUITAS	99,04	98,77	98,76	98,98	98,74	98,86
EKUITAS	99,04	98,77	98,76	98,98	98,74	98,86
Ekuitas	99,04	98,77	98,76	98,98	98,74	98,86

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dari sisi tren pertumbuhan neraca, meskipun selalu mengalami peningkatan aset selama lima tahun sejak 2020, akan tetapi pertumbuhannya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 pertumbuhan aset mencapai angka 6,27 persen sedangkan pada tahun 2023 hanya tumbuh sebesar 1,61 persen. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua faktor, yaitu realokasi belanja dari belanja yang menghasilkan aset ke belanja yang tidak menghasilkan aset serta menurunnya investasi. Realokasi belanja dari belanja yang menghasilkan aset ke belanja yang tidak menghasilkan aset disebabkan karena beberapa hal yaitu *mandatory* Pemerintah Pusat terkait penanganan pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 dan 2021, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2023 serta *mandatory* Pemerintah Pusat terkait hibah penyelenggaraan Pemilukada kepada KPU dan Bawaslu pada tahun 2023.

Sedangkan berkurangnya investasi yang merupakan investasi jangka panjang permanen disebabkan karena menurunnya nilai ekuitas investasi karena dampak pandemi Covid-19 pada beberapa Perusahaan Daerah baik yang mutlak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo maupun Perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo. Hal ini terjadi di tahun 2020 dan semakin menurun pada tahun 2021. Meskipun sempat tumbuh signifikan pada tahun 2022 sebesar 11,46%, akan tetapi kemudian kembali turun pada tahun 2023 sebesar 14,62%. Hal ini disebabkan karena permasalahan yang terus terjadi pada Perusahaan Daerah yang mutlak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu Bank Purworejo yang mana mencapai puncak penurunan nilai ekuitas pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 19.188.397.043,00.

Pada sisi kewajiban, kontraksi besar terjadi pada tahun 2021 dan 2023. Pada tahun 2021 kewajiban meningkat cukup tinggi yaitu sebesar 36,28 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan karena banyaknya utang belanja insentif penanganan pandemi Covid-19 pada Dinas Kesehatan dan RSUD Dr. Tjitrowardojo. Pada tahun 2023 kewajiban mengalami penurunan sebesar -16,85 persen dari tahun 2022. Hal ini disebabkan karena tingginya utang pinjaman jangka pendek tahun 2022 yang mana pada tahun tersebut terdapat utang kepada Bank Jateng sebesar Rp. 17.920.776.000,00 yang digunakan untuk pembangunan hotel bernuansa lokal.

Untuk lebih detailnya, tren pertumbuhan neraca dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 180 Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Rata-rata (%)
1	2	3	4	5	6	7
ASET	4,06	6,27	4,63	1,61	5,25	4,92
ASET LANCAR	32,55	60,45	-40,59	-15,45	3,51	7,42
Kas dan Setara Kas	68,68	91,86	-52,52	-34,45	-3,70	8,64
Piutang Pendapatan	-9,55	-15,54	6,49	46,64	28,17	28,14
Piutang Lainnya	-18,08	-17,68	-9,00	-100,00	100	-15,14
Penyisihan Piutang	15,07	13,07	9,84	34,95	22,47	19,80
Beban Dibayar Di Muka	-6,73	80,48	-10,95	29,54	3,69	14,92
Persediaan	6,17	19,95	17,92	4,23	-7,79	7,35
INVESTASI	-2,60	-8,64	11,46	-14,62	-5,21	-1,57
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	-2,60	-8,64	11,46	-14,62	-5,21	-1,57
ASET TETAP	1,08	2,62	10,13	3,33	0,08	4,19
Tanah	-8,89	0,52	11,14	8,08	2,00	2,49
Peralatan dan Mesin	24,69	9,99	17,70	5,24	6,46	12,07
Gedung dan Bangunan	2,96	7,12	4,84	5,63	1,05	6,95
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5,49	9,74	12,43	4,70	5,58	8,24
Aset tetap lainnya	-0,36	1,69	5,16	6,21	6,23	5,82
Konstruksi dalam pengerjaan	136,19	-67,76	501,00	93,51	11,64	96,77
Akumulasi Penyusutan	16,95	17,56	12,40	11,33	10,52	13,44
DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	50,03
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	50,03
ASET LAINNYA	275,80	2,31	0,15	-84,42	-34,83	26,34
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1339,35	5,02	2,59	-93,55	0,00	208,90
Aset Tidak Berwujud	-22,33	187,42	4,90	-13,90	-8,42	28,40
Aset Lain-lain	-69,46	-74,30	29,01	727,73	-85,11	85,18
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	100,00	21,58	9,01	-16,68	28,48
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	100,00	7094,00	-100,00	0,00	1773,50
JUMLAH ASET DAERAH	4,06	6,27	4,63	1,61	5,25	4,92
KEWAJIBAN	6,79	36,28	5,61	-16,85	-23,91	13,02
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6,79	36,28	5,61	-16,85	-23,91	13,02
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	100,00	-98,55	354516,18	-100,00	0,00	59052,94
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	-4,29	-7,70	-5,63	-53,29	-1,58	-12,46
Utang Belanja	-67,61	357,98	-40,20	47,95	24,55	58,58
Utang Jangka Pendek Lainnya	344,38	-77,33	80,87	-10,83	-4,95	42,56
EKUITAS	4,03	5,98	4,62	1,85	-0,23	3,97
EKUITAS	4,03	5,98	4,62	1,85	-0,23	3,97
Ekuitas	4,03	5,98	4,62	1,85	-0,23	3,97
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,06	6,27	4,63	1,61	0,02	4,05

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Untuk memahami kemampuan keuangan Kabupaten Purworejo dilakukan analisis menggunakan analisis rasio keuangan, sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Analisis rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kemampuan keuangan Kabupaten Purworejo adalah rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintah dan hutang jangka pendeknya. Rasio Solvabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang. Hasil perhitungan untuk analisis rasio likuiditas dan rasio solvabilitas Pemerintah Kabupaten Purworejo selama 5 tahun terakhir tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2. 181 Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun (Rp Juta)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Rasio Likuiditas					
Aset Lancar	218.085.786.416,99	349.919.711.239,73	207.887.157.495,86	175.773.595.658,68	181.940.844.151,91
Persediaan	31.166.849.477,79	37.384.726.334,46	44.084.347.630,85	45.949.422.200,04	42.370.245.619,94
Kewajiban Jangka Pendek	29.886.080.519,47	40.729.600.868,40	43.013.868.417,59	35.766.572.185,58	44.317.442.240,00
Rasio Lancar	7,30	8,59	4,83	4,91	4,11
Rasio Quick	6,25	7,67	3,81	3,63	3,15
Rasio Solvabilitas					
Total Aset	3.108.457.930.732,89	3.303.359.268.867,61	3.456.215.083.542,67	3.511.948.165.003,07	3.696.171.643.254,65
Total Hutang	29.886.080.519,47	40.729.600.868,40	43.013.868.417,59	35.766.572.185,58	44.317.442.240,00
Total Ekuitas	3.078.571.850.213,42	3.262.629.667.999,21	3.413.201.215.125,08	3.476.181.592.817,49	3.468.226.346.445,96
DAR	0,00961	0,01233	0,01245	0,01018	0,01199
DER	0,00971	0,01248	0,01260	0,01029	0,01278

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Hasil perhitungan rasio likuiditas ditunjukkan dengan menggunakan rasio lancar dan rasio *quick*. Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio lancar neraca keuangan pemerintah Kabupaten Purworejo tahun 2020 sebesar 7,30, meningkat pada tahun 2021 menjadi 8,59, kemudian pada tahun 2022 nilainya turun signifikan menjadi 4,83. Namun kembali meningkat menjadi 4,91 pada tahun 2023 dan 4,11 pada tahun 2024. Relatif sama dengan rasio lancar, rasio *quick* juga menunjukkan indikasi yang sama. Pada tahun 2020, rasio *quick* pemerintah Kabupaten Purworejo sebesar 6,25, meningkat pada tahun 2021 menjadi 7,67. Kemudian mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022 menjadi 3,81 dan tahun 2024 menjadi 3,15. Dari nilai rasio lancar dan rasio *quick* ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Purworejo masih mampu melunasi kewajiban jangka pendek melalui pencairan aset lancar, dengan tetap memperhatikan bahwa penurunan nilai yang signifikan pada tahun 2022 memberi indikasi agar lebih berhati-hati dalam mengelola aset lancar, dalam rangka menjamin terpenuhinya kewajiban jangka pendek secara baik.

Rasio solvabilitas dilakukan dengan menghitung analisis rasio *Debt to Assets Rasio* (DAR) dan *Debt to Equity Rasio* (DER). Hasil perhitungan solvabilitas menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Purworejo cukup baik. Nilai DAR Kabupaten Purworejo pada periode tahun

2020-2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 DAR Kabupaten Purworejo sebesar 0,00961 meningkat menjadi 0,01199 pada tahun 2024. Kondisi serupa juga terjadi pada nilai DER Kabupaten Purworejo, yaitu 0,00971 pada tahun 2020 menjadi 0,01278 pada tahun 2024. Angka rasio solvabilitas ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024 pemerintah Kabupaten Purworejo cukup kuat untuk membayar utang jika melakukan pinjaman jangka panjang.

2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029

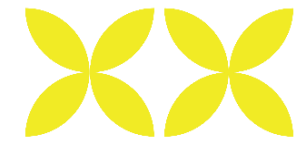
Dalam menentukan proyeksi keuangan daerah, selain berdasarkan hasil analisis atas gambaran keuangan pada periode sebelumnya perlu mempertimbangkan beberapa asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Purworejo.

Selama kurun waktu 2020-2024, proporsi pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer dengan rata-rata 82.15%, diikuti pendapatan asli daerah sebesar 15.34% dan lain-lain PAD yang sah sebesar 2,50%. Hal ini menunjukkan kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten Purworejo masih rendah. Walaupun terdapat peningkatan PAD yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan 8,12%, namun pendapatan daerah Kabupaten Purworejo 2025-2029 sebagian besar diperkirakan masih bersumber pada pendapatan transfer daerah. Namun demikian pendapatan asli daerah diharapkan akan terus mengalami peningkatan yang signifikan pada masa yang akan datang.

Sementara dari sisi belanja daerah, diproyeksikan bahwa belanja pemerintah Kabupaten Purworejo masih didominasi belanja operasi. Namun demikian belanja daerah akan difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam pengelolaan pembiayaan dan perumusan proyeksi pembiayaan daerah selama kurun waktu lima tahun ke depan, asumsi dan metode proyeksi yang digunakan adalah linear dengan asumsi dan metode yang digunakan pada pendapatan dan belanja daerah

Secara keseluruhan, proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Purworejo untuk tahun 2025-2030 disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan asumsi yang relevan, memastikan bahwa rencana tersebut realistis dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu dalam menentukan proyeksi pendapatan dan belanja daerah dilakukan koreksi terhadap data pertumbuhan didasarkan pada analisis data historis dan kondisi ekonomi terkini. Koreksi ini dilakukan untuk menyesuaikan proyeksi dengan realitas ekonomi yang ada, serta menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga proyeksi yang dihasilkan lebih akurat dan dapat diandalkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Proyeksi anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2030 dapat dilihat dalam tabel berikut.

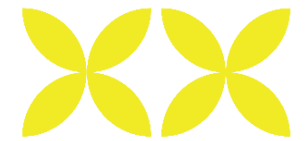


Tabel 2. 182 Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2030

No	Uraian	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)
4	PENDAPATAN	2.462.092.193.493,00	2.466.116.713.176,00	2.482.580.124.692,41	2.500.329.266.336,67	2.539.780.060.760,50	2.582.599.314.352,52
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	554.994.672.704,00	559.965.858.176,00	574.712.159.892,41	590.658.336.246,67	628.216.017.116,01	669.047.501.475,80
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	168.432.135.537,00	172.385.552.413,00	184.452.541.081,91	197.364.218.957,64	211.179.714.284,68	225.962.294.284,61
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	364.411.070.499,00	367.460.763.979,00	369.538.076.959,50	371.145.827.961,03	393.502.090.108,33	417.680.684.016,19
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16.957.535.263,00	16.495.361.735,00	17.097.361.802,00	18.524.109.279,00	19.910.032.674,00	21.780.343.126,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.193.931.405,00	3.624.180.049,00	3.624.180.049,00	3.624.180.049,00	3.624.180.049,00	3.624.180.049,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.907.097.520.789,00	1.906.150.855.000,00	1.907.867.964.800,00	1.909.670.930.090,00	1.911.564.043.644,50	1.913.551.812.876,73
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.798.709.234.789,00	1.804.621.351.000,00	1.806.338.460.800,00	1.808.141.426.090,00	1.810.034.539.644,50	1.812.022.308.876,73
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.423.312.849.789,00	1.429.224.966.000,00	1.430.942.075.800,00	1.432.745.041.090,00	1.434.638.154.644,50	1.436.625.923.876,73
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	34.342.196.000,00	34.342.196.000,00	36.059.305.800,00	37.862.271.090,00	39.755.384.644,50	41.743.153.876,73
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.032.283.504.000,00	1.032.283.504.000,00	1.032.283.504.000,00	1.032.283.504.000,00	1.032.283.504.000,00	1.032.283.504.000,00
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	47.763.621.000,00	47.763.621.000,00	47.763.621.000,00	47.763.621.000,00	47.763.621.000,00	47.763.621.000,00
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	308.923.528.789,00	314.835.645.000,00	314.835.645.000,00	314.835.645.000,00	314.835.645.000,00	314.835.645.000,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal	6.564.101.000,00	6.564.101.000,00	6.564.101.000,00	6.564.101.000,00	6.564.101.000,00	6.564.101.000,00
4.2.1.3	Dana Desa	368.832.284.000,00	368.832.284.000,00	368.832.284.000,00	368.832.284.000,00	368.832.284.000,00	368.832.284.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	108.388.286.000,00	101.529.504.000,00	101.529.504.000,00	101.529.504.000,00	101.529.504.000,00	101.529.504.000,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	93.891.286.000,00	87.032.504.000,00	87.032.504.000,00	87.032.504.000,00	87.032.504.000,00	87.032.504.000,00
4.2.2.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	93.891.286.000,00	87.032.504.000,00	87.032.504.000,00	87.032.504.000,00	87.032.504.000,00	87.032.504.000,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	14.497.000.000,00	14.497.000.000,00	14.497.000.000,00	14.497.000.000,00	14.497.000.000,00	14.497.000.000,00
4.2.2.2.1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	14.497.000.000,00	14.497.000.000,00	14.497.000.000,00	14.497.000.000,00	14.497.000.000,00	14.497.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.3.1	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA	2.545.312.951.871,00	2.528.982.713.176,00	2.602.080.124.692,41	2.498.829.266.336,67	2.537.780.060.760,50	2.587.599.314.352,52
5.1	BELANJA OPERASI	1.739.327.926.700,00	1.803.968.821.265,00	1.740.758.310.787,29	1.741.287.179.644,46	1.757.476.544.335,51	1.717.926.446.777,02
5.1.1	Belanja Pegawai	1.066.816.953.266,00	1.007.476.614.467,00	948.158.293.910,29	911.687.162.767,46	917.876.527.458,51	927.326.429.900,02
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	587.635.079.508,00	704.462.534.151,00	704.462.534.151,00	704.462.534.151,00	704.462.534.151,00	704.462.534.151,00
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	77.797.353.926,00	83.689.543.847,00	77.797.353.926,00	112.797.353.926,00	122.797.353.926,00	77.797.353.926,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.078.540.000,00	8.340.128.800,00	8.340.128.800,00	8.340.128.800,00	8.340.128.800,00	8.340.128.800,00
5.2	BELANJA MODAL	238.804.496.141,00	152.042.435.509,00	287.586.287.106,92	182.723.637.133,30	204.347.997.967,34	292.523.426.774,17
5.2.1	Belanja Tanah	0,00	5.039.000.000,00	5.665.000.000,00	3.800.000.000,00	10.475.000.000,00	15.135.000.000,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	85.007.869.176,00	66.445.862.868,00	69.768.156.011,40	46.837.121.030,24	70.519.479.011,05	80.765.361.602,70
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	60.830.385.605,00	16.432.375.600,00	63.871.904.885,25	40.646.057.347,78	47.084.446.667,64	73.939.713.892,79
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	91.477.204.691,00	63.002.667.491,00	146.755.039.263,77	89.855.339.007,39	74.622.073.099,32	120.971.378.675,85
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.141.505.750,00	1.122.529.550,00	1.178.656.027,50	1.237.588.828,88	1.299.468.270,32	1.364.441.683,83
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	347.530.919,00	0,00	347.530.919,00	347.530.919,00	347.530.919,00	347.530.919,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	4.061.680.709,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	4.061.680.709,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	563.118.848.321,00	568.471.456.402,00	569.235.526.798,20	570.318.449.558,91	571.455.518.457,66	572.649.440.801,34
6.1.1	Belanja Bagi Hasil	15.541.776.737,00	20.627.100.204,00	21.658.455.214,20	22.741.377.974,91	23.878.446.873,66	25.072.369.217,34



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Uraian	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)
6.1.3	Belanja Bantuan Keuangan	547.577.071.584,00	547.844.356.198,00	547.577.071.584,00	547.577.071.584,00	547.577.071.584,00	547.577.071.584,00
	SURPLUS/DEFISIT	-83.220.758.378,00	-62.866.000.000,00	-119.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	-5.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	85.220.758.378,00	65.616.000.000,00	150.000.000.000,00	56.000.000.000,00	58.000.000.000,00	40.000.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	85.220.758.378,00	65.616.000.000,00	50.000.000.000,00	46.000.000.000,00	43.000.000.000,00	40.000.000.000,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	100.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang						
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.750.000.000,00	30.500.000.000,00	57.500.000.000,00	60.000.000.000,00	35.000.000.000,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.750.000.000,00	5.500.000.000,00	7.500.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah						
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan-Perundangan						
	Pembiayaan Netto	83.220.758.378,00	62.866.000.000,00	119.500.000.000,00	-1.500.000.000,00	-2.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Pendapatan daerah tahun 2025-2030 diproyeksi mengalami kenaikan dari Rp2.426.092.193.493,00 pada tahun 2025 menjadi Rp2.582.599.314.352,52 pada tahun 2030. Dari tabel di atas terlihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Purworejo sebagian besar bersumber dari pendapatan transfer. Pendapatan diproyeksikan naik namun dilakukan koreksi terhadap proyeksi rata-rata pertumbuhan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan potensi masing-masing komponennya, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Pajak dan Retribusi

Adanya perubahan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo nomor 11 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebabkan beberapa perubahan seperti penurunan tarif pajak dan retribusi, penghapusan jenis tarif pajak dan retribusi serta pengurangan NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak).

2) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Koreksi pertumbuhan dilakukan karena terdapat satu BUMD Kabupaten Purworejo yaitu BPR Bank Purworejo dilikuidasi sehingga pendapatan dari dividen BUMD diproyeksikan turun.

3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Adanya perubahan pencatatan sebagai akibat berlakunya UU HKPD antara lain sewa BMD dan pendapatan BLUD yang semula terdapat dalam rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pindah ke rekening retribusi. Selain itu, pendapatan bunga mengalami penurunan yang signifikan seiring dengan berkurangnya penyimpanan uang pemerintah daerah di Bank RKUD sehingga lain-lain PAD yang sah diproyeksikan turun pertumbuhannya.

b. Pendapatan Transfer

1) Proyeksi pertumbuhan pendapatan transfer yang bersumber dari DBH, DAU dan bagi hasil dilakukan koreksi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang kemungkinan akan berlangsung hingga lima tahun mendatang.

2) Pendapatan transfer yang bersumber dari DAK fisik, DAK non fisik dan bantuan keuangan dilakukan koreksi sama dengan anggaran tahun 2025 karena pertumbuhannya sangat fluktuatif dan pendapatan tersebut merupakan pendapatan terikat yang harus dibelanjakan sesuai dengan jumlah pendapatannya sehingga tidak mempengaruhi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat diproyeksikan sama dengan tahun 2025 karena pendapatan tersebut merupakan pendapatan terikat yang harus dibelanjakan sesuai dengan jumlah pendapatannya sehingga tidak mempengaruhi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

Belanja daerah Kabupaten Purworejo tahun 2025-2030 diproyeksikan mengalami kenaikan dari Rp2.545.312.951.871,00 pada tahun 2025 menjadi Rp2.587.599.314.352,52 pada tahun 2030. Belanja daerah diproyeksikan mengalami kenaikan dengan dilakukan koreksi terhadap pertumbuhan rata-

rata tahunan dan mempertimbangkan pengalokasian belanja pegawai yang maksimal 30% dari total belanja dan ketentuan peningkatan belanja modal setiap tahunnya yang tertuang dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Nomor 1 Tahun 2022. Sebagai catatan belanja modal di Kabupaten Purworejo akan difokuskan pada Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta Belanja Gedung dan Bangunan sebagai langkah kongkrit untuk mendukung pelayanan publik. Selain itu juga mempertimbangkan kondisi-kondisi lain seperti diberlakukannya efisiensi anggaran tahun 2025 yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Sebagai upaya optimalisasi dan memfokuskan penggunaan belanja daerah maka direkomendasikan beberapa arah kebijakan penggunaan komponen belanja sebagai berikut.

a. Belanja Operasional

1) Belanja Pegawai

- a) Menjaga proporsionalitas belanja pegawai agar tidak membebani struktur APBD. Mulai tahun 2027 sudah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yaitu maksimal adalah 30% dari total belanja APBD. Perlu dipahami bahwa batasan 30% tersebut dihitung tidak termasuk gaji dan tunjangan guru PNSD, tunjangan profesi guru, maupun tunjangan khusus guru yang bersumber dari Dana Transfer Pusat. Dengan demikian, rasio belanja pegawai yang diperhitungkan benar-benar mencerminkan beban belanja di luar sektor pendidikan yang telah mendapat alokasi pendanaan khusus. Dengan demikian, rasio belanja pegawai yang diperhitungkan benar-benar mencerminkan beban belanja di luar sektor pendidikan yang telah mendapatkan alokasi pendanaan khusus, sehingga pengendalian belanja pegawai dapat lebih tepat sasaran
- b) Pemerintah Daerah Purworejo memfokuskan pada peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem *reward and punishment* berbasis kinerja.
- c) Melakukan optimalisasi penggunaan belanja pegawai untuk mendukung reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik.

2) Belanja Barang dan Jasa

- a) Meningkatkan efisiensi belanja barang dan jasa untuk mendukung pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
- b) Menyusun standar prioritas pada pengadaan barang/jasa berbasis kebutuhan riil dengan prinsip *value for money*.
- c) Mengutamakan pengadaan barang/jasa dari UMKM lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- d) Menggunakan barang/jasa yang memiliki masa pakai lebih panjang dan mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang.

3) Belanja Hibah

- a) Memberikan hibah secara selektif untuk mendukung program strategis daerah pemerintah Kabupaten Purworejo, termasuk hibah kepada organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan keagamaan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
- b) Memastikan akuntabilitas, transparansi, dan hasil manfaat dari setiap hibah yang diberikan.
- 4) Belanja Bantuan Sosial (Bansos)
 - a) Difokuskan pada kelompok rentan, miskin, dan terdampak bencana sosial.
 - b) Penyaluran bantuan sosial berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar tepat sasaran.
 - c) Difokuskan pada program bansos produktif yang mengarah pada pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.
- b. Belanja Modal
 - a. Belanja modal mendukung pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari total belanja daerah.
 - b. Prioritas pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah, puskesmas, dan sarana air bersih.
 - c. Pembangunan fasilitas pendukung kawasan strategis pariwisata dan ekonomi lokal.
 - d. Menggunakan pendekatan *multi-years project* untuk pembangunan infrastruktur dengan skala besar agar lebih terencana dan berkesinambungan, selain itu tidak terlalu membebani APBD pada setiap tahun nya.
- c. Belanja Tak Terduga
 - 1) Belanja ini difokuskan untuk kebutuhan yang sifatnya darurat, seperti penanganan bencana alam, kedaruratan kesehatan masyarakat, dan kondisi *force majeure* lainnya.
 - 2) Penggunaan belanja tak terduga tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dengan pelaporan khusus pasca-penggunaan.
- d. Belanja Transfer
 - 1) Melakukan optimalisasi penyaluran dana transfer ke desa untuk mendukung program pembangunan desa berbasis kebutuhan masyarakat (*bottom-up approach*).
 - 2) Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk prioritas nasional di desa seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

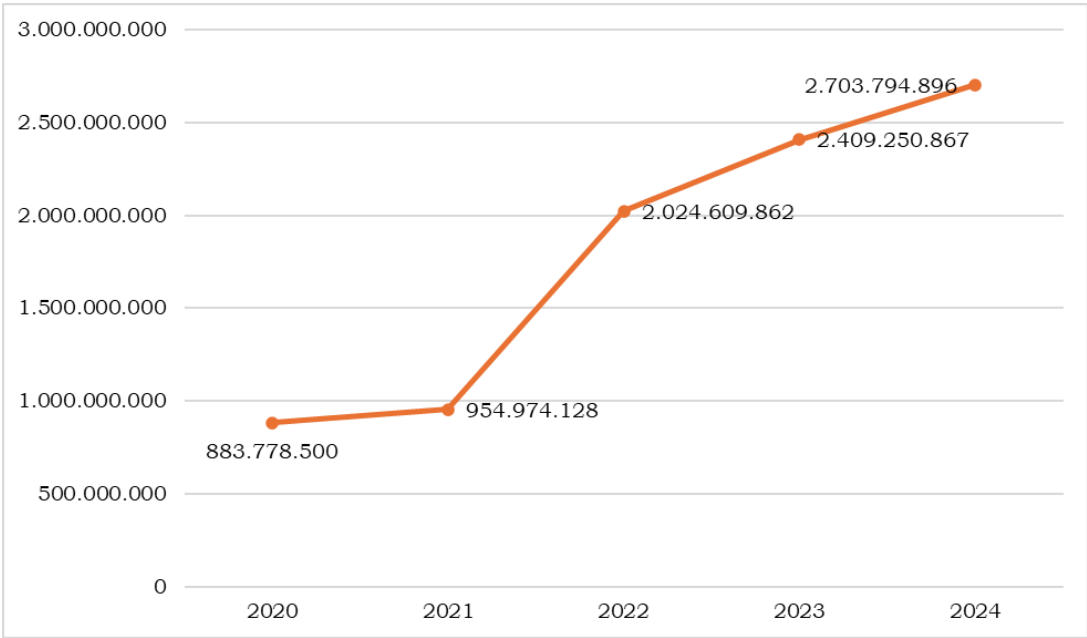
Sumber pembiayaan utama daerah Kabupaten Purworejo merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang berkisar antara Rp40.000.000.000,00 – Rp65.000.000.000,00 hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Purworejo hanya sebesar tersebut. Pada tahun 2027, pemerintah daerah akan menerima dana pencairan pinjaman daerah yang akan rencananya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian pembayaran utang tersebut akan mulai dibayarkan pada tahun 2028. Pada 2028 dan 2029, pemerintah akan melalui pencairan dana cadangan sebesar Rp25.000.000.000,00 sebagai modal untuk pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah pada tahun 2029.

Melihat bahwa kemandirian fiskal kabupaten Purworejo masih rendah, kedepan perlu upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Implementasi dari kebijakan tersebut dijabarkan dalam beberapa arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktivitas ekonomi serta adanya berbagai program investasi.
- b. Optimalisasi pungutan PAD melalui perbaikan tatakelola dan administrasi PAD. Sumber-sumber PAD terus digali untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah, melalui :
 - 1) Intensifikasi melalui penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan retribusi daerah.
 - 2) Peningkatan layanan pembayaran pajak dengan kemudahan berbasis teknologi informasi serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan.
 - 3) Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.
 - 4) Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak.
 - 5) Pengembangan dan peningkatan realisasi investasi yang menyerap banyak tenaga kerja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan perijinan dan investasi melalui OPD yang menangani pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
 - 6) Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba yang dicapai, sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah.
 - 7) Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah.
- c. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - 1) Meningkatkan kualitas digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan kepastian dan optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - 2) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi objek baru pajak daerah
 - 3) Melakukan intensifikasi retribusi daerah.
 - 4) Melakukan pemutakhiran data wajib pajak berbasis GIS (*Geographic Information System*), sehingga potensi wajib pajak terdata dengan baik dengan menggunakan database dan data pertumbuhan dapat diprediksi dengan tepat.
 - 5) Memberlakukan tambahan pungutan pajak atau opsen pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Langkah ini diambil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan tujuan meningkatkan kontribusi terhadap PAD.

- 6) Memberlakukan kebijakan pengelolaan Opsen Pajak sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerjasama tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak dengan menganggarkan 1,5% dari rencana penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setiap tahun untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a) Melaksanakan kegiatan penanganan tunggakan melalui kegiatan “Sengkuyung”, yaitu dengan melakukan verifikasi dan validasi atas data tunggakan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui BPKPAD menganggarkan alat tulis kantor untuk cetak Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan penyampaiannya ke wajib pajak melalui Camat dan Kepala Desa dan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat Daerah.
 - b) Penambahan titik pelayanan pembayaran pajak melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pajak daerah dengan pengadaan mobil Samsat Keliling dan Samsat Paten di Kecamatan untuk mempermudah masyarakat.
 - c) Melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Daerah melalui pemasangan baliho, spanduk, videotron maupun pertemuan secara luring dengan Masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - d) Melaksanakan kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak bersama tim terpadu dari BPKPAD, Satpol PP, Samsat dan Kepolisian melalui kegiatan Gadis Pantura (Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat) untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai teladan bagi masyarakat.
 - e) Melaksanakan belanja yang dananya berasal dari penerimaan pajak daerah yaitu:
 - Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dialokasikan minimal 15% untuk Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
 - Hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 15% untuk penyediaan penerangan jalan umum.
 - Hasil penerimaan Pajak Air Tanah dialokasikan paling sedikit 10% untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi penanaman pohon; pembuatan lubang atau sumur resapan; pelestari hutan; pengelolaan limbah.
- d. Pengembangan BUMD dan Unit Usaha Daerah
- 1) Merevitalisasi dan ekspansi usaha BUMD, seperti bidang air bersih, transportasi, perdagangan hasil pertanian sehingga BUMD memberikan kontribusi berupa dividen kepada Pemerintah Daerah.
 - 2) Melakukan Kemitraan BUMD dengan sektor swasta (*public-private partnership*).

- e. Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah
 - 1) Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (Kemiskinan, Pengangguran dan Pangan).
 - 2) Melakukan inventarisasi dan sertifikasi aset daerah secara menyeluruh.
 - 3) Meningkatkan pemanfaatan *aset idle* untuk investasi produktif (sewa, kerja sama operasional, BOT/*Build Operate Transfer*) kepada mitra strategis sehingga meningkatkan PAD.
- f. Optimalisasi manajemen kas pemerintah daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.
- g. *Creative Financing*
 - 1) Menjalin kerja sama pendanaan dengan swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan/atau filantropi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kontribusi swasta dalam mendukung program-program prioritas daerah, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan. Perkembang nilai Tanggung Jawab Sosila dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) / CSR di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai CSR tercatat sebesar Rp883.778.500 terus meningkat hingga mencapai Rp2.703.794.896 pada tahun 2024. Tren positif ini diharapkan dapat terus berlanjut, sehingga memperkuat kapasitas pendanaan pembangunan daerah, mendorong partisipasi aktif dunia usaha, dan menciptakan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.



Gambar 2. 130 Perkembangan Nilai TJSLP Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

Sumber: Sekretariat TJSLP Kabupaten Purworejo, 2025

- 2) Melalui Skema KPBU memungkinkan pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur publik misalnya:

- a) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM): Meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat.
- b) Transportasi dan Jalan: Pembangunan dan perbaikan jalan untuk mendukung konektivitas antar wilayah.
- c) Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan: Pembangunan rumah sakit dan sekolah untuk meningkatkan layanan publik.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan dalam pembangunan daerah merupakan isu penting karena menunjukkan ketidakselarasan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi nyata selama pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perumusan permasalahan harus dilakukan dengan cermat, karena menjadi dasar bagi penyusunan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam perencanaan pembangunan. Di Kabupaten Purworejo, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 merupakan langkah awal menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2025-2045. RPJMD ini adalah bagian dari RPJPD, sehingga setiap kebijakan dan program yang direncanakan harus selaras dengan jangka panjang yang ditetapkan dalam RPJPD. Analisis dan kajian terhadap permasalahan pembangunan daerah sangat penting, karena hasilnya akan memberikan panduan lebih lanjut tentang arah kebijakan pembangunan untuk tahap pertama periode 2025-2029 dalam RPJPD. Arah kebijakan dan identifikasi masalah utama yang dihadapi Kabupaten Purworejo akan disajikan secara visual pada tabel berikut.

Tabel 2. 183 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang dan Permasalahan Kabupaten Purworejo

Arah Kebijakan Periode I RPJPD	Permasalahan Utama
1	2
Penguatan landasan untuk peningkatan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan	Rendahnya Produktivitas Perekonomian Daerah
	Terbatasnya Kapasitas Fiskal Daerah
	Kemiskinan
Pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan ketahanan sosial budaya yang terintegrasi	Kurangnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat
	Kualitas Pendidikan Kabupaten Purworejo Belum Merata
	Kualitas Kesehatan Masyarakat Masih Rendah
	Masih Lemahnya Ketahanan Keluarga
	Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Belum Setara dan Merata
	Kurangnya Kontribusi Kebudayaan dalam Mendukung Pembangunan
	Kualitas Penduduk Usia Mudah Masih Rendah
	Tingginya Angka Kemiskinan
	Masih Rendahnya Kemandirian Desa
	Stabilitas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Belum Kondusif
Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dengan menggunakan prinsip keterpaduan dalam rangka menciptakan aksesibilitas dan konektivitas menuju pusat pelayanan dasar dan penggerak ekonomi	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Belum Memadai
	Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Belum Merata
	Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar Belum Memadai

Arah Kebijakan Periode I RPJPD	Permasalahan Utama
1	2
Memperkuat ketahanan ekologi dan manajemen risiko sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
	Masih adanya usaha dan /atau kegiatan yang belum mematuhi ketentuan persetujuan lingkungan
	Percepatan Perubahan Iklim yang Berdampak pada Bencana Alam dan Lingkungan
Membangun tata kelola pemerintahan dan desa tepat fungsi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Belum Optimal
	Pelayanan Publik Prima Belum Merata
	Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Baik
	Penyelenggaraan Statistik Sektorial Belum Optimal
	Reformasi Hukum Belum Optimal
	Belum Optimalnya Implementasi Kualitas Kebijakan

Selanjutnya, permasalahan dijabarkan ke dalam beberapa kelompok tema permasalahan yang disusun menurut dimensi pembangunan. Dimensi pembangunan yang digunakan meliputi dimensi manusia (*people*), dimensi lingkungan hidup (*planet*), dimensi kemakmuran (*properity*), dan dimensi pemerintahan (*management*).

a. Permasalahan Dimensi Manusia (*People*)

Dimensi manusia merupakan faktor penting dalam mendorong kemajuan suatu daerah, karena kualitas penduduk yang unggul menjadi penopang utama pembangunan. Oleh karena itu, penguatan dimensi manusia sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi pembangunan manusia. Beberapa permasalahan pada dimensi manusia di Kabupaten Purworejo antara lain sebagai berikut.

Tabel 2. 184 Permasalahan Dimensi Manusia (*People*)

Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Rendahnya Ketahanan Sosial	Kualitas Pendidikan Kabupaten Purworejo Belum Merata	Akses dan Layanan Pendidikan Belum Merata
		Kecakapan atau Kemampuan Literasi Masyarakat Masih Rendah
		Tingginya Masyarakat yang memiliki Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular dan Penyakit Menular
	Kualitas Kesehatan Masyarakat Masih Rendah	Cakupan Kualitas Pelayanan UKM dan UKP Masih Kurang
		Tingginya Masyarakat yang Memiliki Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular dan Penyakit Menular
	Masih Lemahnya Ketahanan Keluarga	Masih Rendahnya Kemandirian Keluarga
		Kurangnya Perencanaan Keluarga
	Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Belum Setara dan Merata	Pemenuhan Hak Anak Belum Optimal
		Perlindungan Perempuan dan Anak Belum Optimal
		Masih Rendahnya Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Kurangnya Kontribusi Kebudayaan dalam	Masih rendahnya Penerapan Kebijakan Responsif Gender
		Masih Rendahnya Upaya Perlindungan Budaya bendawi maupun Non Bendawi
		Masih Rendahnya Upaya Pengembangan Budaya Bendawi maupun Non Bendawi

Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
	Mendukung Pembangunan	Masih Rendahnya Upaya Pemanfaatan Budaya Bendawi maupun Non Bendawi
		Masih Rendahnya Upaya Pembinaan Budaya Bendawi maupun Non Bendawi
	Kualitas Penduduk Usia Muda Masih Rendah	Partisipasi Pemuda dalam Organisasi dan Kegiatan Sosial Masyarakat Masih Rendah
		Prestasi Pemuda dan Olah Raga Masih Rendah
	Tingginya Angka Kemiskinan	Masih Tingginya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		Masih adanya kantong-kantong kemiskinan
		Rendahnya pendapatan masyarakat
	Masih Rendahnya Kemandirian Desa	Masih Rendahnya Peran BUMDes/BUMDesMa dalam Pembangunan Desa
		Masih Rendahnya Kerjasama antar Desa dan Pihak Ketiga
		Belum Tercukupinya Sarana dan Prasarana Desa
		Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang <i>Good Governance</i>
		Belum Optimalnya peran Lembaga Masyarakat Desa (LKD)
	Stabilitas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Belum Kondusif	Masih Ada Potensi Konflik Sosial
	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Belum Memadai	Rendahnya Akses Masyarakat terhadap Rumah Layak Huni
		Masih Tingginya Luasan Kawasan Kumuh (<i>Slum Area</i>) Perkotaan
		Masih Adanya Perumahan yang Belum Dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
		Masih Rendahnya Akses Masyarakat terhadap Akses Air Minum Aman
		Masih Rendahnya Akses Masyarakat terhadap Sanitasi Layak
		Masih Tingginya <i>Backlog</i> Perumahan

Sumber: Tim Penyusun, 2025

1) Kualitas Pendidikan Kabupaten Purworejo Belum Merata

Kualitas pendidikan di Kabupaten Purworejo masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks dan belum merata di seluruh wilayah. Ketimpangan ini dapat ditelusuri dari dua akar utama permasalahan, yakni belum meratanya akses dan layanan pendidikan, serta rendahnya kecakapan atau kemampuan literasi masyarakat. Meskipun harapan dan rata-rata lama sekolah meningkat, SDM yang inovatif dan berdaya saing belum terbentuk.

Akses dan layanan pendidikan yang belum merata ditandai oleh berbagai kondisi yang memperburuk kesenjangan pendidikan. Terdapat ketidakseimbangan antara fasilitas pendidikan yang tersedia dengan jumlah peserta didik, sementara *regrouping* sekolah masih menjadi perdebatan. Ketimpangan lainnya terlihat dari tidak meratanya distribusi jumlah pendidik dibandingkan dengan jumlah satuan pendidikan atau rombongan belajar yang menyebabkan beban kerja guru tidak proporsional dan berimplikasi pada efektivitas pembelajaran. Selain itu, masih banyak tenaga pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik, sehingga berpotensi mempengaruhi mutu proses pembelajaran. Pelayanan pendidikan non formal yang belum

menjangkau seluruh lapisan masyarakat juga menjadi salah satu indikator lemahnya sistem pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Permasalahan juga diperkuat oleh rendahnya minat baca masyarakat, yang menjadi cerminan dari rendahnya kecakapan literasi. Kondisi tersebut terjadi karena belum semua desa memiliki perpustakaan desa sebagai sarana literasi. Bahkan di desa yang telah memiliki perpustakaan, koleksi buku yang tersedia masih terbatas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan pun masih rendah. Hal ini menunjukkan belum optimalnya dukungan terhadap budaya literasi yang inklusif dan berkelanjutan.

2) Kualitas Kesehatan Masyarakat Masih Rendah

Kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Purworejo masih tergolong rendah dan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan sumber daya manusia (SDM) secara optimal. Lambatnya peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Purworejo, yang tertinggal dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan daerah sekitarnya, mencerminkan kondisi layanan kesehatan yang belum memadai dan tingginya risiko paparan terhadap berbagai penyakit menular maupun tidak menular.

Secara struktural, rendahnya kualitas layanan kesehatan disebabkan oleh cakupan pelayanan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) yang masing kurang. Hal ini diperburuk dengan belum terpenuhinya kompetensi dan rasio jumlah tenaga kesehatan yang ideal, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang belum sesuai standar pelayanan minimum. Keterbatasan ini berdampak langsung pada masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta berbagai masalah gizi pada balita, seperti stunting dan kurang energi kronis (KEK), yang secara kumulatif menekan pencapaian AHH di Kabupaten Purworejo.

Di sisi lain, tingginya risiko kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh rendahnya penerapan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kondisi ini memperbesar potensi penyebaran penyakit, terlebih dalam konteks beban penyakit ganda (*triple burden*) yang kini dihadapi: masih tingginya kasus penyakit menular seperti TBS, HIV/AIDS, dan malaria; meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan jiwa; serta munculnya penyakit-penyakit baru. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan promotif dan preventif, serta pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, aman, dan seimbang, turut memperkuat kerentanan masyarakat terhadap ancaman kesehatan jangka panjang.

Kesehatan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, merupakan hak dasar dan investasi penting bagi pembangunan daerah. Meski Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berkontribusi dalam meningkatkan akses layanan, tantangan tetap ada dalam mempertahankan perluasan kepesertaan dan keaktifan peserta agar tujuan *Universal Health Coverage* (UHC) dapat tercapai secara menyeluruh di Kabupaten Purworejo.

3) Masih Lemahnya Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga di Kabupaten Purworejo masih menunjukkan kondisi yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat

kemandirian keluarga serta kurangnya perencanaan keluarga yang baik. Rendahnya kemandirian tercermin dalam terbatasnya kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, yang berdampak pada ketahanan sosial dan kesejahteraan keluarga. Sementara itu, perencanaan keluarga yang belum memadai, termasuk perencanaan kehamilan dan pengelolaan jumlah anggota keluarga, turut meningkatkan potensi permasalahan sosial dan ekonomi di tingkat rumah tangga.

Indikasi lemahnya ketahanan keluarga juga terlihat dari capaian dimensi kemandirian dalam Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang masih rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar keluarga di Kabupaten Purworejo belum memiliki daya adaptif yang memadai dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk itu, diperlukan intervensi yang terarah melalui program pemberdayaan keluarga dan masyarakat, khususnya dalam penguatan fungsi keluarga. Peningkatan ketahanan keluarga menjadi prasyarat penting dalam mendukung pembangunan manusia dan penguatan kualitas kehidupan sosial daerah.

4) Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Belum Setara dan Merata

Kualitas hidup perempuan dan anak di Kabupaten Purworejo masih belum setara dan merata, yang ditunjukkan oleh masih lemahnya pemenuhan hak dasar, tingginya kasus kekerasan, serta adanya kesenjangan gender dalam berbagai aspek pembangunan. Permasalahan ini bersumber dari belum optimalnya pemenuhan hak anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak, baik dari aspek kebijakan maupun implementasi di lapangan.

Partisipasi perempuan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya juga masih terbatas, yang menunjukkan bahwa perempuan belum sepenuhnya terlibat secara aktif dan setara dalam pembangunan. Selain itu, masih rendahnya penerapan kebijakan responsif gender memperkuat ketimpangan akses dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan, serta antara anak-anak dan kelompok usia dewasa.

Ketimpangan ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan menghambat terwujudnya pembangunan inklusif. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak harus diarahkan pada penguatan perlindungan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan kebijakan yang responsif gender dan ramah anak, baik melalui regulasi, program afirmatif, maupun integrasi dalam perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.

5) Kurangnya Kontribusi Kebudayaan dalam Mendukung Pembangunan

Kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Purworejo masih tergolong rendah, meskipun daerah ini memiliki kekayaan budaya yang melimpah, baik berupa budaya bendawi (*tangible*) seperti situs, bangunan bersejarah, dan cagar budaya, maupun budaya non bendawi (*intangible*) seperti tradisi, kesenian, dan kearifan lokal. Permasalahan ini terutama disebabkan oleh masih rendahnya upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan budaya bendawi maupun non bendawi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Banyak potensi budaya di Kabupaten Purworejo yang belum terdata dengan baik, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti pariwisata, ekonomi kreatif, dan pembangunan karakter masyarakat. Cagar budaya dan Warisan Budaya Tak

Benda (WBTB) yang ada belum terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah, serta belum mendapatkan perlindungan hukum dan pendokumentasian yang memadai.

Selain itu, pembinaan terhadap kelompok kesenian juga masih terbatas. Hal ini tercermin dari rendahnya jumlah dan aktivitas kelompok seni yang telah memiliki legalitas atau Surat Keterangan Terintegrasi (SKT), yang menjadi salah satu indikator lemahnya dukungan dan fasilitasi terhadap pelaku budaya lokal.

6) Kualitas Penduduk Usia Muda Masih Rendah

Kualitas penduduk usia muda di Kabupaten Purworejo masih menunjukkan kondisi yang memerlukan perhatian dan penguatan. Permasalahan ini akan berimplikasi pada tidak optimalnya bonus demografi yang seharusnya dapat menjadi kekuatan strategis dalam pembangunan daerah. Masih rendahnya kualitas penduduk usia muda di Kabupaten Purworejo disebabkan oleh rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan, serta masih rendahnya capaian prestasi pemuda, termasuk di bidang olahraga. Rendahnya keterlibatan generasi muda dalam aktivitas positif menandakan belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan terhadap potensi kepemudaan di daerah.

Minimnya partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan kegiatan sosial berdampak pada kurang berkembangnya jiwa kepemimpinan, tanggung jawab sosial, dan kapasitas kolaboratif pemuda dalam mendukung pembangunan. Di sisi lain, prestasi pemuda di bidang olahraga juga belum menunjukkan capaian yang signifikan, yang dapat disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap sarana prasarana, pelatihan, serta sistem pembinaan berjenjang dan berkelanjutan.

7) Tingginya Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo masih berada pada tingkat yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 tercatat sebesar 10,87 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (10,47 persen) dan Nasional (9,03 persen). Meskipun mengalami penurunan dari puncak angka kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 12,40 persen, penurunan ini belum cukup signifikan untuk menutup kesenjangan terhadap rata-rata provinsi dan nasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan di Kabupaten Purworejo belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satu akar permasalahan utama adalah masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang mencakup kelompok masyarakat rentan serta lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak terlantar, korban bencana, dan kelompok rentan sosial lainnya. Masih lemahnya kualitas dan keterpaduan data kemiskinan juga menyebabkan intervensi program menjadi kurang tepat sasaran. Validitas data yang rendah berdampak pada penyaluran bantuan yang tidak efektif. Selain itu, kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), seperti tenaga kesejahteraan sosial dan lembaga sosial masyarakat, masih terbatas dalam menjangkau dan menangani kelompok PPKS secara komprehensif. Dukungan jaminan dan perlindungan sosial juga belum optimal, baik dalam bentuk bantuan sosial reguler maupun bantuan yang responsif terhadap

kondisi darurat, seperti bencana alam dan sosial. Tingginya tingkat kerentanan terhadap bencana turut memperbesar risiko timbulnya kemiskinan baru.

Meskipun terjadi tren penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, namun secara substansial permasalahan kemiskinan masih cukup kompleks, tidak hanya terkait pengurangan beban pengeluaran pada PPKS, namun permasalahan keterbatasan pendapatan yang menyangkut kualitas sumber daya manusia, akses terhadap pekerjaan dan usaha, serta kondisi infrastruktur wilayah. Permasalahan ini bersumber dari beberapa akar masalah struktural dan serabut masalah yang saling berkaitan.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Purworejo bekerja di sektor pertanian yang relatif lebih rendah produktivitasnya, dengan nilai tambah yang terbatas. Di samping itu, sebagian besar juga bekerja pada sektor informal yang cukup rentan jika terjadi guncangan ekonomi. Selain itu, keterampilan tenaga kerja yang masih terbatas mengakibatkan rendahnya mobilitas vertikal masyarakat untuk beralih ke sektor ekonomi yang lebih produktif. Belum optimalnya perlindungan sosial terhadap tenaga kerja, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal, memperparah kerentanan kelompok ini terhadap risiko kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Data menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo baru mencapai sekitar 39 persen, sebagian besar disebabkan oleh kurang pahamiannya manfaat dari jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja di Kabupaten Purworejo.

Di samping itu, masih tingginya angka pengangguran mencerminkan belum meratanya kesempatan kerja yang tersedia. Akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan peluang berusaha masih terbatas, khususnya di kawasan perdesaan dan wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, daya saing masyarakat, terutama dalam mengakses peluang ekonomi yang menuntut keterampilan dan teknologi, juga masih rendah. Hal ini memperkuat siklus kemiskinan karena kelompok miskin sulit keluar dari kondisi keterbatasan pendapatan akibat hambatan struktural dan kompetensi. Pelaksanaan program transmigrasi yang belum optimal juga menjadi faktor pendukung belum efektifnya redistribusi penduduk dan pemerataan peluang ekonomi antar wilayah. Meskipun bukan faktor dominan, optimalisasi program ini masih diperlukan dalam jangka panjang untuk menyeimbangkan konsentrasi penduduk dan membuka potensi ekonomi baru di wilayah transmigrasi.

Selanjutnya masih terdapat kantong-kantong kemiskinan di wilayah-wilayah tertentu yang secara geografis dan sosial mengalami keterisolasian. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi turut memperburuk kondisi rumah tangga miskin. Selain itu, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak masih belum merata di seluruh wilayah. Penanganan kerawanan pangan juga belum dilakukan secara komprehensif, sehingga kelompok rentan masih berisiko mengalami kemiskinan ekstrem akibat gangguan akses terhadap kebutuhan pokok.

8) Masih Rendahnya Kemandirian Desa

Tingkat kemandirian desa di Kabupaten Purworejo masih tergolong rendah dan belum mampu menjadi motor penggerak pembangunan di tingkat

lokal secara optimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor struktural dan kelembagaan. Salah satu penyebab utama adalah masih rendahnya peran BUMDes/BUMDesMa dalam mendukung pembangunan ekonomi desa. Banyak unit usah desa belum berkembang secara profesional dan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa maupun masyarakat.

Selain itu, rendahnya kerjasama antar desa dan dengan pihak ketiga menghambat inovasi dan kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya maupun pelayanan publik desa. Masalah lain yang turut memperlemah kemandirian adalah belum tercukupinya sarana dan prasarana desa, baik dalam mendukung pelayanan dasar maupun kegiatan ekonomi dan sosial.

Dari sisi tata kelola, desa-desa di Kabupaten Purworejo sebagian besar belum sepenuhnya menerapkan prinsip *good governance*, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan desa. Hal ini turut diperburuk dengan belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai mitra strategis dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.

9) Stabilitas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Belum Kondusif

Rendahnya ketahanan sosial masyarakat di Kabupaten Purworejo juga tercermin dari kondisi stabilitas ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kejadian kejahatan, yaitu sebanyak 150 kasus yang tercatat pada tahun 2023. Tingginya angka kriminalitas tersebut mengindikasikan belum kuatnya sistem sosial masyarakat dalam mencegah dan merespon potensi gangguan keamanan dan konflik.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah masih rendahnya penegakan Peraturan Daerah (Perda), yang disebabkan belum optimalnya reformasi hukum daerah, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang masih rendah, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Tingkat kepercayaan yang rendah ini berdampak pada enggan masyarakat melaporkan kasus atau berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan.

Selain itu, ketahanan sosial juga dilemahkan oleh masih adanya konflik sosial di masyarakat, baik dalam bentuk konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) maupun konflik pertanahan. Potensi konflik SARA dapat menimbulkan ketegangan antar kelompok masyarakat, sementara konflik pertanahan umumnya dipicu oleh ketidakjelasan kepemilikan atau penggunaan lahan. Kedua jenis konflik ini menjadi indikator lemahnya kohesi sosial dan belum optimalnya sistem penyelesaian sengketa berbasis komunitas.

10) Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Belum Memadai

Belum memadainya infrastruktur perumahan dan permukiman di Kabupaten Purworejo menjadi salah satu faktor yang melemahkan ketahanan sosial masyarakat. Keterbatasan akses terhadap hunian yang layak masih terbatas, selain itu akses terhadap prasarana dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, dan drainase menyebabkan rendahnya kualitas hunian serta meningkatkan kerentanan terhadap risiko kesehatan dan bencana.

Keberadaan kawasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan yang mencapai 11.789 ha pada akhir tahun 2023 berpotensi memperburuk kondisi sosial masyarakat. Ketika akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terbatas, peluang untuk meningkatkan kualitas hidup pun menjadi sempit. Hal ini menciptakan ketimpangan sosial yang memperlemah kohesi antarwarga dan berpotensi memperdalam kesenjangan antarwilayah serta menurunkan indeks pembangunan sosial di tingkat lokal. Di sisi lain, banyak kawasan permukiman juga berada di wilayah rawan bencana namun belum dilengkapi dengan infrastruktur mitigasi risiko yang memadai.

Secara keseluruhan, belum optimalnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur perumahan dan permukiman menjadi salah satu akar dari rendahnya ketahanan sosial masyarakat Kabupaten Purworejo.

b. Permasalahan Dimensi Kemakmuran (*Prosperity*)

Dimensi kemakmuran di Kabupaten Purworejo mencerminkan potensi besar yang dimiliki daerah ini, khususnya dalam sektor pertanian, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Potensi tersebut menjadi modal penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pengembangannya masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat terwujudnya pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Ketimpangan distribusi pendapatan menunjukkan bahwa manfaat pembangunan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, keterbatasan kapasitas fiskal daerah juga turut menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi. Upaya yang telah dilakukan, seperti pembangunan infrastruktur strategis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, masih menghadapi kendala dalam hal koordinasi antarinstansi serta kurangnya diversifikasi ekonomi, sehingga pemerataan pembangunan belum tercapai secara optimal.

Tabel 2. 185 Permasalahan Dimensi Kemakmuran (*Prosperity*)

Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Kurang Inklusif	Rendahnya Produktivitas Perekonomian Daerah	Menurunnya Daya Saing Sektor Pertanian dalam Arti Luas
		Rendahnya Daya Saing Sektor Industri Pengolahan
		Rendahnya Daya Saing Sektor Pariwisata
		Rendahnya daya Saing Sektor Perdagangan
		Rendahnya Investasi Daerah
	Terbatasnya Kapasitas Fiskal Daerah	Pendapatan Asli Daerah Terbatas
		Ketergantungan Terhadap Dana Transfer Pusat
		Pengelolaan Anggaran yang Kurang Efisien
	Ketimpangan distribusi pendapatan	Kesenjangan pembangunan wilayah
		Terbatasnya akses kesempatan kerja
		Terbatasnya keterampilan tenaga kerja

Sumber: Tim Penyusun, 2025

1) Rendahnya Produktivitas Perekonomian Daerah

Rendahnya produktivitas perekonomian daerah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purworejo. Meskipun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 20,91 persen terhadap PDRB pada tahun 2024, pertumbuhan tercatat negatif (-0,08 persen). Hal ini menunjukkan masih lemahnya produktivitas sektor primer akibat alih fungsi lahan, keterbatasan tenaga kerja, teknologi, modal, serta infrastruktur pendukung seperti jaringan

irigasi dan kelembagaan petani. Sektor perikanan juga menghadapi tantangan serupa, seperti minimnya pengelolaan, skala usaha kecil, lemahnya akses teknologi dan pasar, serta rendahnya pengelolaan hasil perikanan. Akibatnya, nilai tambah yang dihasilkan belum mampu mendorong kesejahteraan nelayan secara optimal.

Industri pengolahan yang diharapkan menjadi penggerak hilirisasi sektor primer belum berkembang secara maksimal. Industri masih didominasi skala kecil dengan keterbatasan teknologi, akses modal, dan jejaring usaha. Kondisi ini menyebabkan sektor sekunder belum dapat mengakselerasi pertumbuhan sektor primer secara efektif. Di sisi lain, penanaman modal yang ada belum sepenuhnya mendukung penguatan sektor produktif. Iklim investasi pun belum sepenuhnya kondusif akibat keterbatasan infrastruktur, belum optimalnya promosi investasi, serta potensi konflik sosial dan kelembagaan masyarakat yang belum stabil. Sektor pariwisata meskipun tumbuh, kontribusinya terhadap PAD masih rendah (2,33 persen). Hal ini disebabkan oleh pengelolaan destinasi, kapasitas SDM, dan promosi yang belum optimal, serta belum kuatnya keterkaitan pariwisata dengan sektor ekonomi lokal. Sektor perdagangan pun menghadapi tantangan berupa rantai distribusi panjang, jaringan pasar lemah, dan infrastruktur logistik yang belum memadai.

Secara keseluruhan, rendahnya produktivitas ekonomi daerah disebabkan oleh lemahnya sinergi antar sektor, terbatasnya pemanfaatan potensi lokal, dan belum optimalnya dukungan infrastruktur serta kelembagaan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang ada belum inklusif dan berkelanjutan.

2) Terbatasnya Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal Kabupaten Purworejo masih tergolong terbatas, yang berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara mandiri. Permasalahan ini berakar pada rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, serta belum efisiennya pengelolaan anggaran daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang terbatas menjadi salah satu akar utama lemahnya kapasitas fiskal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih lemahnya basis ekonomi lokal yang menyebabkan terbatasnya objek dan potensi pajak serta retribusi. Di sisi lain, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah juga masih perlu ditingkatkan. Rendahnya kepatuhan ini menunjukkan bahwa potensi PAD belum tergarap secara maksimal. Selain itu, pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah masih belum dilakukan secara optimal, baik dari sisi regulasi, mekanisme pelayanan, maupun pengawasan lapangan. Tak kalah penting, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang semestinya menjadi salah satu sumber pendapatan daerah juga belum berkontribusi secara signifikan karena pengelolaannya belum efisien dan belum berbasis pada prinsip bisnis yang berkelanjutan.

Permasalahan lain yang melemahkan kapasitas fiskal daerah adalah tingginya ketergantungan Kabupaten Purworejo terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Meskipun selama sepuluh tahun terakhir Kabupaten Purworejo mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, kondisi tersebut belum mencerminkan kemandirian fiskal.

Ketergantungan ini diperparah oleh kurangnya upaya sistematis dan inovatif dalam menggali sumber pendanaan alternatif Non-APBD, seperti kemitraan dengan pihak swasta, pemanfaatan pembiayaan kreatif, serta pengembangan skema pembiayaan berbasis aset dan potensi lokal.

Akar permasalahan lainnya terletak pada pengelolaan anggaran yang masih kurang efisien. Hal ini terlihat dari belum optimalnya pemanfaatan aset daerah, baik dalam bentuk lahan, bangunan, maupun infrastruktur ekonomi lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan pendapatan. Utilitas aset yang rendah mengindikasikan adanya peluang fiskal yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.

3) **Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Distribusi pendapatan merata memastikan bahwa manfaat pertumbuhan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta menciptakan basis konsumen yang lebih luas untuk mendorong permintaan dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Ketimpangan ini biasanya diukur menggunakan Gini Ratio (atau Indeks Gini), yang bernilai antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Indeks Gini Kabupaten Purworejo dalam lima tahun terakhir, yaitu sebesar 0,356 (2020), 0,337 (2021), 0,353 (2022). 0,337 (2023), dan meningkat kembali menjadi 0,354 pada tahun 2024. Nilai ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih berada dalam kategori sedang, namun cenderung belum mengalami perbaikan yang signifikan dan stabil.

Ketimpangan ini menandakan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi belum merata dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu, sementara sebagian masyarakat lainnya, terutama di sektor informal dan perdesaan, belum merasakan dampak langsung dari pembangunan. Rendahnya akses terhadap peluang ekonomi, permodalan, pendidikan berkualitas, dan pekerjaan yang layak turut memperkuat ketimpangan tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif ini berisiko memperlebar kesenjangan sosial, memperlambat pengentasan kemiskinan, serta melemahkan daya beli dan produktivitas masyarakat kelas bawah.

c. Permasalahan Lingkungan Hidup (Planet)

Dimensi lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari persoalan kewilayahan, infrastruktur, dan kebencanaan. Pembangunan infrastruktur yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan serta kondisi geografis berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Di Kabupaten Purworejo, permasalahan utama pada dimensi ini meliputi layanan infrastruktur dasar yang belum merata serta menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berketahanan bencana.

Tabel 2. 186 Permasalahan Dimensi Lingkungan Hidup (Planet)

Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Layanan Infrastruktur	Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Belum Merata	Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan yang Kurang Memadai
		Integrasi antar moda transportasi belum optimal

Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Dasar Belum Merata		Sarana dan jaringan transportasi publik yang kurang optimal
		Layanan akses informasi dan komunikasi yang belum optimal
	Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar Belum Memadai	Kualitas Infrastruktur pendukung perekonomian belum memadai
		Kualitas Infrastruktur pendidikan belum memadai
		Kualitas Infrastruktur kesehatan belum memadai
		Kualitas Infrastruktur sosial belum memadai
		Kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman belum memadai
		Tingginya Risiko Bencana
Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berketahanan Bencana	Meningkatnya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Pencemaran Air
		Peningkatan Pencemaran Udara
		Penurunan Kualitas Tutupan Lahan
		Peningkatan Kerusakan Lingkungan dan Sumber Daya Alam
		Pengelolaan sampah yang belum optimal
	Masih Adanya Usaha dan/ atau Kegiatan yang Belum Mematuhi Ketentuan Persetujuan Lingkungan	Lemahnya penegakan hukum terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan
		Belum optimalnya kegiatan pengawasan lingkungan hidup
	Percepatan Perubahan Iklim	Belum Adanya Rencana Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
		Masih Rendahnya Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dari Berbagai Sektor
		Belum Terbentuknya Kelembagaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Perubahan Iklim di Daerah
		Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam aksi penurunan emisi gas rumah kaca
	Kondisi Geografis Kabupaten Purworejo yang Berpotensi Terjadinya Berbagai Ancaman Bencana Alam	Banyaknya Wilayah yang Masuk dalam Kategori Rawan Bencana
	Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Belum Optimal	Belum optimalnya mitigasi bencana
		Belum Optimalnya Pencegahan Bencana
		Belum Optimalnya Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
		Belum Optimalnya Penanganan Darurat Bencana

Sumber: Tim Penyusun, 2025

1) Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Belum Merata

Permasalahan aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang belum merata di Kabupaten Purworejo utamanya disebabkan karena kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan yang kurang memadai. Hal ini diperparah oleh kondisi jalan yang tidak sesuai kelasnya, tingginya beban lalu lintas karena banyaknya kasus *Over Dimension Over Load* (ODOL), serta lemahnya pemeliharaan secara berkala. Infrastruktur pelengkap seperti drainase dan talud juga kurang optimal, serta belum adanya koordinasi perencanaan lintas sektor, khususnya perencanaan jaringan jalan dengan jaringan bawah tanah. Selain itu, integrasi antar moda transportasi dan sarana transportasi publik di Kabupaten Purworejo juga belum optimal akibat kurangnya infrastruktur pendukung seperti halte, terminal, serta tidak sinkronnya sistem tarif antar

moda. Masalah ini diperparah dengan belum tersedianya informasi jadwal dan rute transportasi, dokumen kajian tatanan transportasi lokal yang belum *up to date*, serta belum adanya regulasi dan insentif yang mendukung transportasi publik. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi juga tergolong rendah. Di sisi lain, layanan akses informasi dan komunikasi yang belum optimal juga menjadi bagian dari permasalahan aksesibilitas, utamanya disebabkan oleh jaringan internet yang belum merata dan tidak stabil, serta rendahnya literasi digital masyarakat.

2) Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar Permukiman Belum Memadai

Permasalahan kualitas infrastruktur pelayanan dasar yang belum memadai di Kabupaten Purworejo mencakup infrastruktur berbagai sektor, mulai dari sektor ekonomi, pertanian, perdagangan, pendidikan, kesehatan, sosial, hingga perumahan dan permukiman. Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya penyediaan infrastruktur dasar, baik untuk sektor perekonomian, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun perumahan dan permukiman. Akar masalahnya adalah belum memadainya infrastruktur pendukung seperti jalan menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sosial yang masih rusak atau tidak terhubung dengan baik. Banyak fasilitas tersebut juga belum dapat dijangkau oleh moda transportasi umum. Selain itu, akses internet di fasilitas pelayanan dasar belum merata, menghambat digitalisasi layanan publik.

Untuk infrastruktur perumahan dan permukiman, permasalahan juga muncul dalam bentuk rendahnya akses terhadap rumah layak huni, tingginya luasan kawasan kumuh, serta kurangnya prasarana, sarana, dan utilitas umum. Akses air minum dan sanitasi layak juga masih rendah, dan angka backlog perumahan masih tinggi, menandakan belum optimalnya ketersediaan perumahan yang memenuhi standar hidup layak bagi masyarakat di Kabupaten Purworejo. Di samping itu, risiko bencana yang tinggi serta kapasitas penanggulangan yang belum optimal turut menambah daftar panjang permasalahan infrastruktur dasar di Kabupaten Purworejo. Tingginya risiko bencana di Kabupaten Purworejo disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Purworejo yang berpotensi terjadinya berbagai ancaman bencana alam, Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana masih belum optimal, serta infrastruktur penanggulangan bencana masih kurang memadai. Dokumen pendukung dan sarana prasarana penanganan bencana diperlukan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

3) Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup juga menjadi permasalahan krusial. Di Kabupaten Purworejo. Permasalahan ini bersumber dari pencemaran air, udara, dan kerusakan tutupan lahan. Pencemaran air terjadi karena masih rendahnya penerapan teknologi pengolahan air limbah domestik, kebiasaan masyarakat yang belum menerapkan PHBS, dan belum adanya regulasi yang mewajibkan pengolahan limbah domestik. Keterbatasan sarana pengujian kualitas lingkungan dan penggunaan pupuk tidak ramah lingkungan semakin memperburuk kondisi pencemaran air di Purworejo. Pencemaran udara di Kabupaten Purworejo dipicu oleh tingginya pemakaian Bahan Perusak Ozon (BPO) pada kendaraan bermotor, sektor industri, dan aktivitas rumah tangga. Sementara itu sarana

pemantauan kualitas udara di Kabupaten Purworejo masih sangat terbatas dan turut diperparah oleh kesadaran masyarakat untuk tidak membakar sampah juga masih rendah.

Kerusakan lahan di Kabupaten Purworejo terjadi karena alih fungsi lahan, serta minimnya program penghijauan dan konservasi, baik oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan. Selain itu, pengelolaan sampah Kabupaten Purworejo juga tergolong belum optimal yang ditandai oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya kepedulian masyarakat, buruknya manajemen limbah B3, serta adanya praktik pembuangan sampah ilegal dari luar daerah. Disisi lain, budaya ekonomi sirkular belum terbentuk, dan tingkat *food loss & food waste* juga masih tinggi.

4) Masih adanya usaha dan/atau kegiatan yang belum mematuhi ketentuan persetujuan lingkungan

Permasalahan lingkungan berikutnya di Kabupaten Purworejo yang tak kalah krusial adalah masih adanya usaha dan/atau kegiatan yang belum mematuhi ketentuan persetujuan lingkungan. Permasalahan ini menunjukkan lemahnya penegakan regulasi lingkungan di tingkat daerah yakni Kabupaten Purworejo. Masih banyak usaha/kegiatan yang beroperasi tanpa mengikuti ketentuan persetujuan lingkungan. Hal ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta belum optimalnya kegiatan pengawasan lingkungan hidup. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, sistem monitoring, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaku usaha di Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan dampak lingkungan.

5) Percepatan Perubahan Iklim yang Berdampak pada Bencana Alam dan Lingkungan

Percepatan perubahan iklim yang Berdampak pada Bencana Alam dan Lingkungan menambah tantangan sekaligus permasalahan baru bagi daerah seperti Kabupaten Purworejo. Perubahan iklim dapat meningkatkan tingkat kerentanan daerah terhadap bencana dan kerusakan ekosistem. Akar masalahnya adalah belum adanya rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta rendahnya pengendalian emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor. Kelembagaan pengendalian emisi di tingkat daerah juga belum terbentuk, sehingga tidak ada struktur yang memfasilitasi pelaksanaan kebijakan iklim. Partisipasi masyarakat dalam aksi mitigasi masih sangat rendah, sejalan dengan kurangnya edukasi dan kesadaran tentang pentingnya peran individu dalam pengendalian emisi karbon.

6) Kondisi Geografis Kabupaten Purworejo yang Berpotensi Terjadinya Berbagai Ancaman Bencana Alam

Berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Purworejo, berpotensi terjadi berbagai ancaman bencana alam. Hal ini disebabkan karena banyaknya wikayah yang masuk dalam kategori rawan bencana. Untuk itu, hal ini penting untuk ditindaklanjuti dan dimitigasi.

7) Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Belum Optimal

Kabupaten Purworejo memiliki kapasitas dalam penanggulangan bencana yang belum optimal. Setidaknya, hal ini disebabkan atas empat faktor. Beberapa faktor tersebut antara lain belum optimalnya mitigasi

bencana, belum optimalnya pencegahan bencana, belum optimalnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana, serta belum optimalnya penanganan darurat bencana.

d. Permasalahan Dimensi Pemerintahan (*Management*)

Dimensi pemerintahan di Kabupaten Purworejo memegang peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Namun, dalam praktiknya masih dijumpai sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal, pelayanan publik prima belum merata, serta tata kelola pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya baik. Selain itu, penyelenggaraan statistik sektoral dan reformasi hukum juga belum berjalan optimal. Belum optimalnya implementasi kualitas kebijakan semakin menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo perlu memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahannya agar mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Tabel 2. 187 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Purworejo

Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas, Adaptif, Akuntabel, dan Kolaboratif	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Belum Optimal	Kualitas Perencanaan Pembangunan Belum Optimal
		Pengukuran Kinerja Pemerintahan Belum Optimal
		Pelaporan Kinerja Belum Optimal
		Evaluasi Kinerja Belum Optimal
		Akuntabilitas Keuangan Belum Optimal
		Belum Terciptanya Lingkungan Berintegritas
	Pelayanan Publik Prima Belum Merata	Kapasitas Inovasi Daerah
		Layanan Publik Sesuai Harapan Stakeholder
		Penerapan SPBE Belum Optimal
	Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Baik	Penggunaan <i>e-procurement</i> Masih Rendah
		Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
		Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
		Belum Menerapkan Prinsip Satu Data Indonesia
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Belum Optimal	Proses Bisnis Statistik Belum Optimal
		Kebijakan Kelembagaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Belum Optimal
		Pemanfaatan Data dalam Perencanaan Pembangunan Belum Optimal
		Kualitas Data
	Reformasi Hukum Belum Optimal	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan Belum Optimal
		Tingkat Koordinasi Kemenkum untuk Harmonisasi Regulasi Rendah
	Belum Optimalnya Implementasi Kualitas Kebijakan	Penyusunan Perencanaan Kebijakan Belum Optimal
		Evaluasi Kebijakan Belum Optimal

Sumber: Tim Penyusun, 2025

1. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Belum Optimal

Permasalahan mengenai akuntabilitas kinerja di Kabupaten Purworejo terindikasi dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diperoleh pada tahun 2024, yakni sebesar 65,58 (kategori B). Nilai ini

mencerminkan beberapa akar masalah utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan di Kabupaten Purworejo. Pertama, kualitas perencanaan pembangunan belum optimal, yang ditandai dengan belum optimalnya keselarasan antardokumen perencanaan, perencanaan kinerja belum memenuhi standar yang baik karena *logframe* dan *crosscutting* belum tersusun dengan baik, belum tersedianya pedoman teknis perencanaan kinerja, perencanaan kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, belum optimalnya manajemen risiko Pemda dan Perangkat Daerah, serta perencanaan kinerja yang belum menjawab isu strategis daerah karena kualitas data belum optimal serta pengendalian dan evaluasi belum optimal.

Kedua, pengukuran kinerja pemerintahan juga belum optimal. Hal ini disebabkan oleh implementasi capaian kinerja yang seringkali tidak disertai dengan bukti yang memadai, sehingga sulit untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian secara akurat. Selain itu, pengukuran kinerja juga belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*.

Ketiga, pelaporan kinerja belum optimal. Hal ini disebabkan oleh dokumen pelaporan yang belum memenuhi standar serta pelaporan kinerja yang belum digunakan sepenuhnya dalam penyusunan perencanaan berikutnya.

Keempat, evaluasi kinerja belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh evaluasi akuntabilitas kinerja yang belum dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai serta evaluasi SAKIP belum memberikan dampak nyata dalam efektivitas dan efisiensi kinerja.

Kelima, akuntabilitas keuangan belum optimal. Akuntabilitas keuangan dilihat dari indikator indeks pengelolaan keuangan daerah. Nilai IPKD Kabupaten Purworejo sempat mengalami penurunan tetapi kembali meningkat 83,839 pada tahun 2024, meskipun belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh belum stabilnya kondisi keuangan daerah, anggaran belanja daerah yang kurang efektif dan efisien, penyerapan anggaran kurang efektif, dan kurangnya kemudahan akses informasi keuangan daerah oleh publik. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya berlandaskan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, akar masalah utama yang perlu diatasi yaitu belum terciptanya lingkungan yang berintegritas. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya penerapan manajemen kepegawaian berbasis merit sistem, pelaksanaan pengawasan, serta kapabilitas APIP.

2. Pelayanan Publik Prima Belum Merata

Pelayanan publik yang belum merata juga menjadi salah satu permasalahan utama di Kabupaten Purworejo. Nilai Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 yaitu sebesar 4,33. Nilai ini belum optimal karena Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Purworejo sempat mencapai angka 4,51 di tahun 2022 lalu menurun di tahun 2023. Kualitas pelayanan masyarakat yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor.

Salah satu faktor penyebab belum meratanya pelayanan publik prima yaitu kapasitas inovasi daerah yang belum optimal khususnya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi pelayanan yang masih rendah menunjukkan bahwa banyak perangkat daerah belum mengembangkan atau

menerapkan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Faktor kedua yaitu layanan publik di Kabupaten Purworejo yang juga masih belum sesuai harapan stakeholder, khususnya layanan DPRD, kecamatan, layanan aduan, dan layanan publik berbasis digital yang belum optimal. Fungsi legislasi DPRD yang belum optimal, yang berdampak pada kurangnya regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Sarana prasarana layanan publik yang belum memadai juga menyebabkan layanan tidak bisa diberikan secara maksimal.

Faktor ketiga yaitu penerapan SPBE di Kabupaten Purworejo yang belum optimal. Hal tersebut ditandai dari masih rendahnya penerapan kebijakan SPBE serta layanan dan tata kelolanya yang belum optimal. Penerapan manajemen SPBE juga masih rendah karena belum optimalnya keterbukaan informasi publik dan belum semua arsip dilakukan digitalisasi. Belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik menunjukkan bahwa banyak proses administrasi dan pelayanan publik yang masih dilakukan secara manual sehingga mengurangi efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

3. Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Baik

Tata kelola pengadaan barang dan jasa yang belum baik di Kabupaten Purworejo digambarkan melalui Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). Indeks ini mengukur sejauh mana sistem pengadaan berjalan dengan baik melalui indikator penggunaan sistem pengadaan, kualitas sumber daya manusia (SDM) pengadaan, dan tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Tahun 2024 ITKP Kabupaten Purworejo berada pada angka 70,62 berada pada kategori cukup. Angka ini meningkat dari tahun 2023 namun masih perlu perbaikan menyeluruh dalam sistem pengadaan barang dan jasa, baik dari sisi kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan, transparansi proses, maupun profesionalisme sumber daya manusia yang terlibat. Tata kelola pengadaan barang dan jasa yang belum optimal ini juga di akar masalahkan oleh kualitas sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, baik dari aspek kualifikasi maupun kompetensi teknis. Belum optimalnya kualifikasi dan kompetensi tersebut dapat berupa terbatasnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip pengadaan berbasis teknologi dan regulasi terbaru. Selain itu, tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) juga belum maksimal. Kapasitas UKPBJ dalam menjalankan perannya juga masih terbatas baik dari aspek kelembagaan, SDM, maupun sistem kerja yang berbasis digital. Permasalahan ini berdampak pada gambaran tingkat profesionalisme, efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan, keadilan, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Purworejo mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

4. Penyelenggaraan Statistik Sektorial Belum Optimal

Belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Purworejo menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan berorientasi hasil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti belum optimalnya penerapan Satu Data Indonesia, proses bisnis statistik yang belum optimal, kebijakan kelembagaan penyelenggaraan statistik sektoral yang belum optimal, pemanfaatan data

dalam perencanaan pembangunan yang belum optimal, serta kualitas data yang belum optimal.

Belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia menyebabkan kurangnya integrasi data sehingga terjadi kesulitan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Proses bisnis statistik, meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data, yang belum optimal menyebabkan rendahnya kualitas data. Selain itu, kualitas data statistik sektoral dari segi akurasi, ketepatan waktu, dan konsistensi antar tahun juga perlu menjadi perhatian. Disparitas antar sumber data juga masih kerap terjadi, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pengambilan keputusan. Rendahnya validitas dan reabilitas data menyebabkan data kurang maksimal untuk dimanfaatkan dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Dari sisi kelembagaan, belum seluruh perangkat daerah memiliki sumber daya yang secara khusus menangani kegiatan statistik sektoral atau kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah maupun dengan Badan Pusat Statistik. Secara keseluruhan, belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral menunjukkan bahwa pembangunan data belum menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan.

5. Reformasi Hukum Belum Optimal

Belum optimalnya reformasi hukum menjadi salah satu permasalahan di Kabupaten Purworejo. Meskipun Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Purworejo mencapai 96,38 dan termasuk kategori AA (ISTIMEWA), masih terdapat permasalahan terkait penataan *database* peraturan perundang-undangan yang belum optimal. Kurangnya sistem digitalisasi yang terintegrasi menyebabkan pengelolaan dokumen dan informasi hukum belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam penataan dan integrasi database peraturan perundang-undangan secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, belum optimalnya reformasi hukum di Kabupaten Purworejo juga disebabkan oleh rendahnya koordinasi Kemenkum untuk harmonisasi regulasi. Hal tersebut berdampak pada belum optimalnya harmonisasi regulasi dan pemantapan konsep rancangan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

6. Belum Optimalnya Implementasi Kualitas Kebijakan

Belum optimalnya implementasi kualitas kebijakan di Kabupaten Purworejo disebabkan oleh penyusunan perencanaan kebijakan yang belum optimal serta evaluasi kebijakan yang belum optimal. Proses perencanaan kebijakan cenderung bersifat sektoral dan belum sepenuhnya berbasis pada data. Belum optimalnya perencanaan dan kajian kebijakan yang sistematis akan menghasilkan kebijakan yang kurang responsif terhadap permasalahan aktual di daerah dan dapat berisiko tidak mencapai hasil yang diharapkan.

Evaluasi kebijakan yang belum optimal dapat berupa evaluasi yang cenderung bersifat administratif dan kurang substantif terkait implementasi dan efektivitas kebijakan. Selain itu, rendahnya kualitas evaluasi juga dapat disebabkan oleh keterbatasan kapasitas aparatur dalam merancang instrumen evaluasi kebijakan yang tepat dan terukur. Evaluasi kebijakan yang

belum optimal cenderung kurang efektif untuk dijadikan dasar dalam penyempurnaan kebijakan.

2.3.2. Isu Strategis

a. Identifikasi Isu Strategis sesuai Konteks

Identifikasi dilakukan terhadap isu sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni laporan resmi dari lembaga pemerintah dan lembaga internasional, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo 2025-2045, serta Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo.

b. Isu Strategis Global

Berdasarkan *World Economic Forum Global Risk Report 2024*, terdapat 10 (sepuluh) risiko (isu) global jangka menengah. Beberapa isu global ini menjadi tantangan dalam pembangunan jangka menengah ke depan, termasuk di Kabupaten Purworejo. 10 (sepuluh) risiko (isu) global tersebut antara lain:

- 1) cuaca ekstrem,
- 2) perubahan kritikal terhadap ekosistem,
- 3) *biodiversity loss* dan gangguan ekosistem,
- 4) krisis sumber daya alam,
- 5) misinformasi dan disinformasi,
- 6) dampak buruk teknologi AI,
- 7) *involuntary migration, cyber insecurity*,
- 8) polarisasi sosial, serta
- 9) serta polusi.

Sementara itu, terdapat 5 (lima) isu global jangka menengah berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Beberapa isu global tersebut menjadi peluang dalam pembangunan jangka menengah ke depan, termasuk di Kabupaten Purworejo. 5 (lima) isu global tersebut antara lain:

- 1) Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia,
- 2) Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral,
- 3) Penerapan standar *sustainability* yang tinggi di level global,
- 4) Transisi energi untuk mendorong pemerataan, serta
- 5) *Aging population* negara maju.

c. Isu Strategis Nasional

Pada RPJMN Tahun 2025-2029, dirumuskan 5 (lima) isu strategis. Isu strategis pertama yakni transformasi sosial, dijabarkan dalam isu: kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, perlindungan sosial yang adaptif. Isu strategis kedua yakni transformasi ekonomi, dijabarkan pada

beberapa isu: industri, produktivitas tenaga kerja, pertanian, ekonomi biru, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, pekerjaan hijau, percepatan transisi energi, pengelolaan hutan lestari, digital, badan usaha milik negara, pariwisata, integrasi ekonomi domestik dan global, serta perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Isu strategis ketiga yakni transformasi tata kelola dapat dijelaskan dalam beberapa isu: Integritas partai politik, transformasi dan digitalisasi pelayanan publik, sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan, sistem penggajian tunggal, kualitas regulasi, manajemen talenta, integrasi proses bisnis. Sementara itu, isu strategis keempat yakni supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dijabarkan dalam beberapa isu: stabilitas makro, politik luar negeri, keamanan, demokrasi, hukum, dan pertahanan. Terakhir, isu strategis kelima yakni ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, dapat dijabarkan pada beberapa isu: keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, budaya, pangan, energi, dan bencana dan perubahan iklim.

d. Isu Strategis Regional (Jawa-Bali)

Telah dirumuskan isu strategis Jawa-Bali pada RPJMN Tahun 2025-2029. Beberapa isu strategis tersebut antara lain:

- 1) Masih tingginya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara utara dan selatan, barat dan timur (Bali), serta daerah kepulauan.
- 2) Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir selatan Pulau Jawa.
- 3) Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri.
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian.
- 5) Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.
- 6) Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta *scarring effect* akibat pandemi Covid-19.

e. Isu Strategis Regional (Provinsi Jawa Tengah)

Selanjutnya, sesuai dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, terdapat isu strategis regional di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Beberapa isu strategis tersebut di antaranya: perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan; penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana; kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia; kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat; serta tata kelola pemerintahan yang dinamis.

f. Potensi Daerah

Potensi daerah merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Beberapa potensi daerah di Kabupaten Purworejo antara lain bonus demografi, PDRB Sektor Jasa Pendidikan, kawasan selatan, adanya Proyek Strategis Nasional (PSN), serta Wilayah Pengembangan (WP) Keburejo.

Bonus Demografi

Sampai tahun 2028 sebagai masa akhir bonus demografi Kabupaten Purworejo. Rasio beban ketergantungan di Purworejo tahun 2023 adalah 46,14% yang artinya 100 penduduk usia produktif rata-rata menanggung 46-47 penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 dan 65 tahun ke atas). Hal ini menunjukkan kondisi bonus demografi, yakni jumlah penduduk produktif lebih banyak daripada penduduk non produktif.

Gambaran penduduk yang aktif bekerja maupun mencari pekerjaan dapat dilihat dari angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK di Kabupaten Purworejo relatif meningkat dari angka 64,48 di tahun 2017 menjadi 73,72 di tahun 2024. Tingginya angka TPAK tersebut berpeluang besar bila diimbangi dengan peluang serapan dalam pasar kerja. Penyerapan tenaga kerja penting untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo.

Peluang bonus demografi yang sedang terjadi di Kabupaten Purworejo pada saat ini menuntut lahirnya SDM yang berkualitas. Optimalisasi bonus demografi dan pemenuhan kebutuhan SDM yang berkualitas dilakukan agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang.

PDRB Sektor Jasa Pendidikan

PDRB sektor jasa pendidikan di Kabupaten Purworejo senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jasa Pendidikan yang berkontribusi sebesar 8% dari PDRB merupakan potensi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks pendidikan di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan yang stabil setiap tahunnya dari senilai 0,587 pada tahun 2010 hingga mencapai angka 0,665 pada tahun 2024. Jasa Pendidikan di Kabupaten Purworejo dibentuk dari aktivitas pendidikan negeri dan swasta di Purworejo yang terdiri atas 453 unit TK/ sederajat, 539 SD/ sederajat, 108 SMP/ sederajat, serta 73 SMA/ sederajat. Potensi pengembangan sektor jasa pendidikan di Kabupaten Purworejo tidak hanya meliputi pendidikan formal, tetapi juga pendidikan nonformal keagamaan untuk membentuk lingkungan masyarakat Purworejo yang religius. Salah satu pendidikan formal keagamaan di Kabupaten Purworejo yaitu pesantren dengan jumlah 119 unit dan jumlah santri 18.651 jiwa pada tahun 2021.

Potensi Kawasan Pesisir Selatan

Kabupaten Purworejo terletak di wilayah selatan Pulau Jawa, yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Purworejo yang memiliki garis pantai sepanjang 21,7 km mempunyai potensi dan nilai ekonomi tinggi di sektor pariwisata, perikanan (perikanan tangkap, perikanan budidaya air payau), dan industri garam rakyat. Dalam memaksimalkan potensi perikanan, upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mensinergikan dan mengharmonisasikan tiga strategi terobosan yaitu minapolitan, industrialisasi perikanan dan *Blue economy*. Ketiga strategi ini, merupakan motor penggerak (*driving force*) untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing yang mengusung paradigma ekonomi berkelanjutan berbasis wilayah dan kawasan.

Potensi yang ada di wilayah pesisir selatan Kabupaten Purworejo yang mempunyai peluang untuk dikembangkan yaitu:

1) Sektor perikanan Tangkap

Jenis perikanan tangkap yang berpotensi untuk dikembangkan di wilayah selatan pesisir Kabupaten Purworejo yaitu bawal putih, lobster, layur, tengiri, jahan, manyung, dan pari. Jumlah produksi dan nilai produksi ikan hasil tangkap di laut tahun 2020 sebesar 71,840 ton dengan nilai produksi Rp5.747.169.000. Tahun 2024 produksi perikanan tangkap sebesar kurang lebih 78,226 ton, dengan nilai Rp5.229.398.000. Jenis ikan yang ditangkap antara lain ikan bawal, tenggiri, pari, layur, lea/siro, hiu, tombol/pirijalo, luthok/manyung, lobster, keong/siput laut, kwe, dan rucah. Kabupaten Purworejo Memiliki 5 (lima) Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yaitu TPI Kertojayan, Keburuhan, Pagak, Jati Malang, dan Jatikontal dengan jumlah nelayan seluruhnya 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) orang dan jumlah perahu nelayan berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) unit. Melihat potensi yang sangat besar di wilayah pesisir selatan Purworejo, perikanan tangkap sebenarnya masih belum optimal. Masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi antara lain *pertama*, nelayan Purworejo masuk katagori nelayan kecil, sedangkan yang harus dihadapi adalah ombak yang besar laut selatan. Tantangan kedua yaitu sulitnya membangun dermaga karena dataran pantai yang berubah- rubah. Kemudian tantangan yang ketiga dari potensi perikanan tangkap yaitu terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh nelayan saat menangkap ikan.

Berdasarkan perkembangan produksi ikan hasil tangkapan yang menunjukkan trend peningkatan, maka potensi yang ada perikanan tangkap masih dapat dikembangkan, antara lain dengan peningkatan teknologi tangkap ikan yang ramah lingkungan. Berkembangnya perikanan tangkap akan memberikan dampak positif (*multiflier effect*) usaha yang luas. Dengan berkembangnya usaha penangkapan ikan dapat mengurangi pengangguran atau menambah lapangan kerja, penyediaan bahan pangan (protein ikan), meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan peningkatan pendapatan asli daerah.

2) Sektor Perikanan Budidaya Perairan Payau dan Tawar

Perikanan tangkap masih mendominasi produksi ikan di Kabupaten Purworejo. Namun demikian, terjadinya trend *overfishing* di perairan laut mengakibatkan produksi perikanan laut semakin menurun. Adanya perubahan iklim serta fenomena kenaikan suhu laut, pengasaman air laut serta pemutihan karang telah berdampak pada ketersediaan ikan yang semakin menurun sehingga nelayan membutuhkan waktu lebih untuk menangkap ikan yang berdampak pada peningkatan biaya penangkapan. Kegiatan budidaya ikan dapat menjadi solusi efektif peningkatan produksi ikan untuk ketahanan pangan di masa mendatang. Secara umum, perikanan budidaya diklasifikasikan dalam jenis budidaya laut, tambak, kolam, karamba, jaring apung, dan sawah. Kegiatan budidaya ikan di Kabupaten Purworejo mempunyai potensi yang sangat besar yang terdiri dari budidaya ikan air tawar dan payau. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo tahun 2021, pembesaran perikanan budidaya di wilayah pesisir pantai selatan Kabupaten Purworejo mempunyai potensi

seluas 48 ha, dengan tingkat pemanfaatan seluas 23,12 ha (48,1 %). Pembesaran perikanan budidaya di Kecamatan Purwodadi, Ngombol dan Grabag secara berurutan mempunyai potensi seluas 17 ha, 15 ha, dan 16 ha, dengan tingkat pemanfaatan seluas 6,61 ha (38,8 %); 5,38 ha (35,8 %); dan 11,13 ha (69,5 %). Pembenihan perikanan budidaya di Kabupaten Purworejo mempunyai potensi seluas 78 ha, dengan tingkat pemanfaatan seluas 11,41 ha (14,6 %). Pembenihan perikanan budidaya di Kecamatan Purwodadi, Ngombol dan Grabag secara berurutan mempunyai potensi seluas 2 ha, 2 ha, dan 3 ha. Luas lahan dan Rumah Tangga Perikanan (RTP) budidaya di Kabupaten Purworejo untuk pembesaran seluas 174,24 ha dan sebanyak 14.787 RTP; pembenihan seluas 11,43 ha dan sebanyak 238 RTP; tambak seluas 203,61 ha dan sebanyak 627 RTP. Apabila dilihat dari potensi sumber daya alam yang ada, kegiatan budidaya yang meliputi pembenihan dan pembesaran ikan di Kabupaten Purworejo masih relatif rendah. Rendahnya produksi ikan berkaitan secara langsung dengan ketersediaan benih yang tidak mencukupi. Data statistik Kominfo Purworejo (2022) menunjukkan Balai Benih Ikan belum mampu memproduksi benih ikan untuk kebutuhan masyarakat, sementara Unit Pembenihan Rakyat baru dapat memproduksi benih sebanyak 30 juta ekor pada tahun 2021. Melihat potensi wilayah Kabupaten Purworejo, jumlah benih tersebut sangat tidak mencukupi kebutuhan budidaya ikan. Solusi pemanfaatan potensi daerah melalui kegiatan perikanan adalah dengan melakukan produksi benih secara optimal pada Balai Benih Ikan yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo serta pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya ikan. Hal ini dapat dimulai dengan kegiatan pelatihan dan pendampingan kegiatan pembenihan hingga BBI mampu memproduksi benih dalam jumlah yang cukup. Disamping itu, kualitas benih juga harus diperhatikan dengan mendatangkan induk hasil pemuliaan induk unggul. Kualitas dan kuantitas benih akan menjadi kunci pengembangan budidaya sehingga potensi lahan yang ada dapat dioptimalkan untuk kegiatan produktif yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Potensi perikanan tambak di Kabupaten Purworejo relatif besar dibandingkan potensi lahan untuk budidaya air tawar. Tambak perikanan budidaya di wilayah pesisir pantai selatan Kabupaten Purworejo mempunyai potensi seluas 1.210 ha, dengan tingkat pemanfaatan seluas 203,61 ha (16,8 %). Total produksi budidaya tambak pada tahun 2024 sebesar 3.120.415 kg. Perikanan budaya tambak memberikan produksi udang vaname sebesar 3.100.282 kg dan nila 20.133 kg dengan nilai produksi udang vaname sebesar Rp156.855.668 dan Rp541.558. Tambak perikanan budidaya di kecamatan Purwodadi, Ngombol dan Grabag secara berurutan mempunyai potensi seluas 210 ha, 255 ha, dan 645 ha, dengan tingkat pemanfaatan seluas 47,36 ha (22,5 %); 58,84 ha (23,0 %); dan 97,41 ha (15,1 %). Budidaya udang jenis vanamae sudah dimulai dikembangkan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2010 dengan sistem mulsa, artinya budidaya udang yang kolamnya dilapisi plastik mulsa dengan teknologi semi intensif sampai intensif. Budidaya udang vanamae sangat cocok dikembangkan di wilayah Kabupaten Purworejo. Saat ini sudah ada 380 (tiga ratus delapan puluh) orang pembudidaya udang vaname dan tersebut sangat berdampak positif karena membuka sentra ekonomi baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir

Purworejo. Produksi udang vanamae Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 mencapai kurang lebih 3.100 ton dengan nilai kurang lebih Rp 156 Miliar. Udang vanamae tersebut telah dipasarkan sampai ke Jakarta, Surabaya, Cirebon, dan Cilacap.

Berdasarkan hasil penelitian, di wilayah pesisir pantai selatan menunjukkan bahwa budidaya udang vaname pada lahan tersebut merupakan sistem intensif dengan luas tambak rata-rata 1.300 m². Luas rata-rata pada kategori tambak < 1.000 m² adalah 636 m²; kategori tambak 1.000-1.500 m² adalah 1.357 m² dan rata-rata kategori tambak >1.500 – 2.500 m² adalah 2.191 m². Biaya tetap budidaya udang tambak yang dikeluarkan sebesar Rp. 24.876.128,00/tambak/siklus dan biaya variabel sebesar Rp. 72.839.121,00/tambak/siklus (Rp.218.517.362,00/ tambak/ tahun). Pendapatan budidaya sebesar Rp 109.709.805,00/ tambak/tahun, dengan nilai rasio antara total pendapatan dengan total biaya [Rasio Pendapatan (R) /Biaya (C)] sebesar 1,37. *Break Event Point* (BEP) produk udang sebesar 4.909 kg dan *Break Event Point* (BEP) harga udang sebesar Rp 34.312,00. Produktivitas udang tertinggi adalah 19,7 ton/ha/siklus yang dibudidayakan di tambak seluas 1.000-1.500 m² dengan pendapatan Rp 169.507.143,00/kolam/siklus dan rasio Pendapatan/Biaya (R/C rasio) sebesar 1,60. BEP produk udang sebesar 5.069 kg dan BEP harga udang sebesar Rp 28.187,00. Hasil penelitian tambak intensif budidaya udang vaname di Desa Keburuhan, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa produktivitas berkisar antara 3.828-14.652 kg/ha (rata-rata 8.831 kg/ha), termasuk berada di bawah target untuk tambak budidaya intensif. Sintasan udang tambak yang dihasilkan berkisar rata-rata sebesar 81%, termasuk dalam kategori baik; sedangkan nilai nisbah konversi pakan berkisar antara 1,35-1,93 (rata-rata 1,54) termasuk kurang efektif untuk pertumbuhan udang. Dalam usaha budidaya udang tambak yang berkelanjutan harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan keadaan lokasi tambak, desain tambak, penggunaan air, induk dan benih, manajemen pakan, manajemen kesehatan, keamanan pangan, dan tanggungjawab sosial.

3) Sektor Pasca Panen/Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Pascapanen merupakan salah satu kegiatan industri hilir/pengolahan yang berbasis nilai tambah (ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pajak, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat). Industri perikanan dan kelautan yang kuat harus berbasis pada industri hilir (pengolahan) sebagai salah satu langkah maju dalam meningkatkan ketahanan dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Industri pengolahan menjadi tulang punggung penggerak ekonomi wilayah sehingga sektor perikanan dan kelautan harus dibangun secara komprehensif (hulu-antara-hilir). Terdapat beberapa industri pengolahan hasil perikanan yang bisa dikembangkan diantaranya penggaraman/ pengeringan ikan; pemindangan ikan; pengasapan/ pemanggangan ikan; peragian/ fermentasi ikan; pembuatan minyak ikan; pengalengan ikan; pengolahan rumput laut; pembekuan ikan. Selain itu pengolahan makanan dengan bahan dasar dari ikan seperti pembuatan abon dan empek-empek dapat dilakukan oleh istri-istri nelayan, yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian para nelayan.

4) Industri Garam Rakyat

Salah satu potensi kelautan di Kabupaten Purworejo adalah potensi produksi garam. Potensi ini juga didukung oleh panjang pantai yang mencapai 21,7 km, dengan pantai berpasir yang menjadikan suhu relatif tinggi untuk mendukung penguapan air laut sebagai kunci dalam proses produksi garam. Air laut di pantai Purworejo mempunyai salinitas yang tinggi, dengan kandungan suspensi lumpur yang rendah sehingga dapat menghasilkan garam dengan kualitas tinggi. Kebutuhan garam nasional yang selalu meningkat dari tahun ke tahun tidak sebanding dengan peningkatan produksi garam nasional hingga saat ini, menyebabkan swasembada garam semakin jauh untuk dapat dicapai. Sebagai gambaran ketimpangan kebutuhan dan produksi garam nasional terlihat pada tahun 2022, kebutuhan garam nasional mencapai 4,5 juta ton sedangkan produksi garam pada tahun tersebut hanya mencapai 635,9 ribu ton. Ini berarti terjadi defisit sebanyak 3,9 juta ton yang harus dipenuhi dengan impor. Produksi garam nasional juga mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019 produksi garam nasional mencapai 2,5 juta ton, merosot tajam hanya mencapai 635,9 ribu ton pada tahun 2023. Dalam rangka menyelesaikan ketimpangan neraca kebutuhan dan produksi garam nasional tersebut, Presiden RI telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. Nomor 126 tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Dengan PERPRES tersebut pemerintah akan mempercepat pembangunan pergaraman nasional pada Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) melalui sistem bisnis pergaraman yang meliputi tahapan praproduksi, produksi, pasca produksi, pasca produksi, pengolahan dan pemasaran secara terintegrasi. Dalam PERPRES tersebut juga ditetapkan bahwa Jawa Tengah adalah merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) propinsi dalam pembangunan SEGAR. Oleh karena itu, Kabupaten Purworejo yang mempunyai potensi produksi garam dapat berkontribusi nyata dalam peningkatan produksi garam nasional ini. Purworejo diharapkan menjadi salah satu SEGAR di Propinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Purworejo saat ini sedang mengembangkan garam rakyat. Ada 3 (tiga) kelompok usaha garam dengan sistem cunel. Ada kelompok usaha garam Pugar Pendowo Limo yang menghasilkan produksi garam 8- 9 ton/bulan. Kemudian kelompok Kugar Kencono Sari memproduksi garam 3-4 ton/bulan. Dan kelompok usaha garam Kugar Langgeng Tri Mulyo itu memproduksi 3-6 kwintal garam/bulan. Untuk pemasaran garam, dilakukan oleh Koperasi Produsen Garam Pendowo Limo Jaya dengan pengolahan berkisar 15 ton garam/bulan. Dan yang menarik adalah hasil uji coba yang dilakukan oleh Sucofindo Semarang tahun 2021, kandungan NaCl garam hasil produksi Kugar Pendowo Limo- Purworejo mencapai 97,49%, artinya ini sangat memenuhi syarat untuk garam konsumsi, karena kemurniannya sangat tinggi. Untuk itu perlu adanya dorongan yang kuat agar produksi garam di Purworejo semakin meningkat. Ke depannya, perlu didorong supaya ada produksi garam industri. Karena produksi garam di Purworejo baru embrio, maka perlu dorongan dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak.

5) Sektor Pariwisata

Dalam pengembangan kepariwisataan, destinasi pariwisata merupakan unsur vital sekaligus penggerak utama bagi wisatawan dalam memutuskan perjalanan dan kunjungan ke suatu daerah. Destinasi pariwisata yang dibentuk oleh serangkaian komponen produk, wilayah dan

citra atau karakter atraksi menjadi fokus penting dalam pengembangan kepariwisataan, khususnya dalam mengembangkan keunggulan banding dan keunggulan saing dalam berkompetisi untuk menarik pasar wisatawan regional maupun internasional. Keberhasilan sejumlah daerah dalam membangun sektor kepariwisataannya didukung oleh pengembangan destinasi pariwisata secara profesional, terpadu secara sektoral dan kewilayahan, memiliki konsep yang jelas, didukung oleh sistem jasa dan layanan yang handal serta diperkuat oleh sistem dan strategi pemasaran yang aktif, intensif dan terfokus. Dalam konteks Kabupaten Purworejo, pengembangan destinasi pariwisata masih mengalami sejumlah kendala dan hambatan, baik dari manajemen produk wisata yang dikembangkan di dalamnya, maupun koordinasi dan dukungan sektoral yang masih terbatas serta koordinasi lintas wilayah/daerah yang belum bisa berjalan efektif karena ego/semangat kedaerahan. Di lain pihak, perkembangan pariwisata dan tren pasar semakin menuntut pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata yang mampu memberikan daya tarik yang atraktif, manajemen atraksi yang kreatif dan non konvensional, pengalaman wisata dan pelayanan yang berkualitas serta berbagai kemudahan dari segi akses informasi, aksesibilitas maupun kemudahan dan kenyamanan berwisata lainnya.

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi pariwisata yang tinggi, baik potensi wisata alam maupun buatan. Potensi wisata tersebut perlu dikembangkan agar meningkatkan nilai manfaat dari keberadaan obyek wisata tersebut. Kabupaten Purworejo memiliki lokasi yang strategis dan dapat menjadi lokasi persinggahan. Salah satu kawasan yang menjadi kawasan persinggahan dan ramai dilewati adalah kawasan pesisir Kabupaten Purworejo. Kawasan ini berada pada jalur lintas Yogyakarta-Cilacap, yang menghubungkan wilayah-wilayah bagian barat menuju bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dan Kota Yogyakarta. Wisata pantai yang dapat dikembangkan adalah Kawasan Wisata Pesisir Terpadu Purworejo, Kawasan wisata Sungai Jogoboyo-Pasir Mendit, Kawasan wisata Pantai Keburuhan sampai dengan Pagak. Untuk melakukan pengembangan pariwisata di Kabupaten Purworejo tersebut perlu adanya konsep pengembangan destinasi.

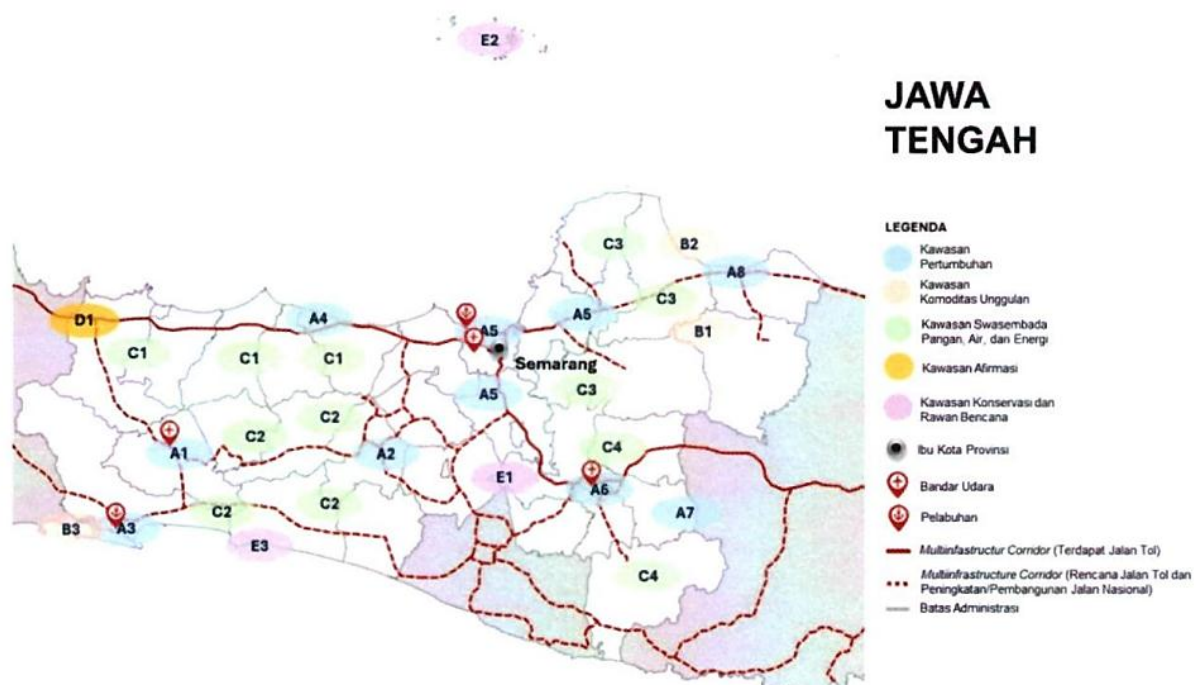
Sejak tahun 2004 Kabupaten Purworejo telah melakukan pengelolaan wilayah pesisirnya, karena kawasan pantai selatan Kabupaten Purworejo memiliki nilai strategis sumber daya alam, sumber daya manusia dan jasa-jasa lingkungan, sehingga pengembangan dan pemanfaatannya perlu diatur secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. Berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada, maka pengembangan pariwisata di Kabupaten Purworejo memerlukan perencanaan yang terpadu. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah melakukan berbagai upaya seperti investasi infrastruktur fisik di beberapa daerah tujuan wisata yang berlokasi di pantai selatan, dan juga melakukan sertifikasi atas tanah pemerintah di pantai selatan.

Namun demikian, optimalisasi kemanfaatan potensi pantai selatan masih menghadapi berbagai tantangan, utamanya adalah dalam mengkonsolidasikan kekuatan berbagai sumber daya pengelola yang ada yaitu pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat, serta investor swasta. Melihat potensi yang sangat besar di wilayah pesisir selatan, diperlukan adanya *effort* dan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholders

yang terkait untuk menggali potensi yang lebih dalam, untuk meningkatkan PAD Kabupaten Purworejo.

Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi lima kawasan, yaitu (1) kawasan pertumbuhan; (2) kawasan komoditas unggul; (3) kawasan swasembada pangan, air, dan energi; (4) kawasan afirmasi, dan (5) kawasan konservasi/rawan bencana. Arah pembangunan Kabupaten Purworejo dalam konstelasi kewilayahan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai kawasan swasembada pangan, air, dan energi Dieng-Serayu-Bogowonto yang meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purworejo.



Gambar 2. 131 Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Salah satu *highlight* indikasi intervensi nasional untuk mendukung Kabupaten Purworejo sebagai kawasan swasembada pangan, air, dan energi yaitu pembangunan Bendungan Bener (yang sebelumnya berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional). Bendungan Bener dapat mendukung swasembada air khususnya dalam peningkatan irigasi pertanian, pengendalian banjir, penyediaan air baku, dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Bendungan dengan tampungan sekitar 92 juta m³ ini akan bermanfaat mengairi lahan irigasi seluas 15.519 hektar. Selain itu, bendungan ini dapat menyuplai air baku untuk keperluan rumah tangga, kota dan industri sebesar 1.500 liter per detik ke tiga kabupaten, yakni Purworejo, Kebumen dan Kulon Progo, termasuk Bandara YIA. Bendungan Bener juga mempunyai potensi menyuplai energi listrik sebesar 10 MW dan mereduksi debit banjir dari 584 m³/detik menjadi 178 m³/detik (70%) pada debit banjir kala ulang 25 tahun (Q25). Terdapat pula sejumlah fungsi lainnya seperti perikanan, pariwisata dan konservasi DAS Bogowonto di bagian hulu. Dengan adanya proyek ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

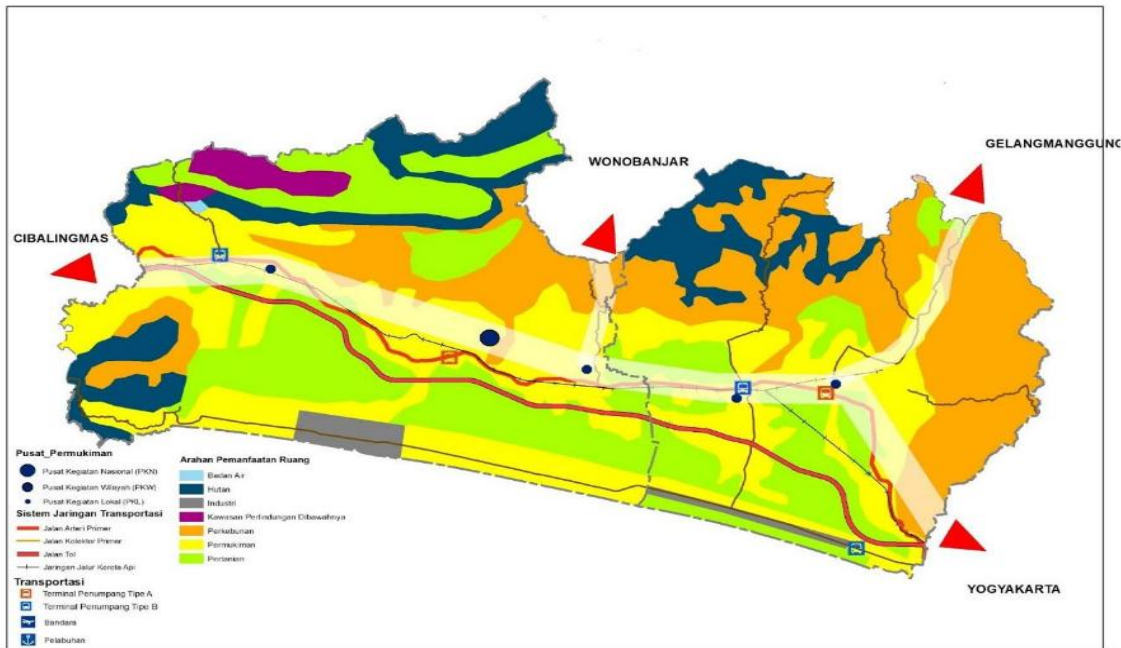
peningkatan akses terhadap pangan, air, dan energi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Wilayah Pengembangan Keburejo (Kebumen-Purworejo)

Pembangunan wilayah di Jawa Tengah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan wilayah Jawa Tengah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pembangunan wilayah di Jawa Tengah diarahkan untuk mengembangkan perekonomian wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Pembangunan perekonomian Jawa Tengah berbasis pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk memadukan fungsi budidaya dan lindung serta keterpaduan pengelolaan alam darat dan pesisir.

Pembangunan wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan (WP) dengan mempertimbangkan kesatuan geografis, karakteristik dan interaksi wilayah serta sistem permukiman. Pembagian wilayah pengembangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong kerja sama antardaerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor. Pembagian wilayah pengembangan Jawa Tengah meliputi WP Bregasmalang, WP Petanglong, WP Kedungsapur, WP Jekuti, WP Banglor, WP Subosukawonosraten, WP Gelangmanggung, WP Wonobanjar, WP Keburejo, serta WP Cibalingmas.

WP Keburejo meliputi Kabupaten Kebumen dan Purworejo yang diarahkan pengembangannya pada perwujudan perkotaan Kebumen sebagai pusat kegiatan wilayah serta menyelaraskan pembangunan Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo dengan kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kabupaten Kulon Progo sebagai koridor pengembangan ekonomi. Pengembangan wisata diarahkan pada koridor Kebumen–Purworejo–Borobudur–Magelang dan koridor wisata pantai-Geopark Karangsambung Karangbolong-KSPN Dieng sebagai pengembangan potensi wisata keunikan geologi dan pantai disertai dengan peningkatan aksesibilitas. Kawasan industri diprioritaskan di Kabupaten Kebumen yang terintegrasi dengan Kawasan Otoritas Borobudur dengan fokus pada pengembangan industri manufaktur dan pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam dan pengembangan wilayah serta upaya mitigasi bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah.



Gambar 2. 132 Arah Pengembangan Wilayah WP Keburejo

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Potensi Pertanian dan Pariwisata

Potensi Pertanian dan Pariwisata merupakan dua sektor yang saling melengkapi dan memiliki potensi peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Di Kabupaten Purworejo kedua sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap PDRB, tetapi juga menjadi tulang punggung penghidupan masyarakat, pelestarian budaya, serta perlindungan lingkungan hidup.

Dari aspek pertanian, wilayah ini memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berupa ketersediaan lahan pertanian yang relatif luas dan subur, ditopang oleh sistem irigasi teknis seperti Daerah Irigasi Wadaslintang serta dukungan dari proyek Bendungan Bener yang sedang dibangun. Komoditas utama yang dikembangkan mencakup padi, jagung, kedelai, hortikultura (sayuran dan buah-buahan), serta komoditas perkebunan rakyat seperti kelapa dan kakao. Selain itu, sektor peternakan dan perikanan turut menjadi sumber pendapatan ekonomi daerah dan masyarakat lokal.

Sementara itu, dari sisi pariwisata, wilayah ini memiliki potensi besar baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya budaya. Bentang alam berupa pegunungan, perbukitan, sungai, dan hutan di wilayah utara dan barat menjadi daya tarik untuk pengembangan ekowisata dan wisata minat khusus (wisata petualangan). Sedangkan kawasan pesisir selatan memiliki potensi pengembangan wisata bahari dan konservasi. Selain alam, kekayaan budaya seperti situs sejarah, tradisi lokal, dan kuliner khas daerah menjadi bagian penting dari identitas dan daya tarik wisata Purworejo.

Pengembangan pariwisata diarahkan pada pendekatan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yang berbasis masyarakat, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan sektor lain, seperti pertanian. Konsep agrowisata menjadi jembatan penting dalam menghubungkan pertanian dan pariwisata, sehingga selain meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru di pedesaan. Potensi pertanian dan pariwisata ini saling mendukung dan dapat diintegrasikan

dalam perencanaan pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan, desa wisata, serta kawasan strategis pariwisata dan ketahanan pangan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam pengelolaan sumber daya secara efisien, inovatif, dan inklusif.

Potensi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Potensi peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo dapat dilihat dari pencapaian dan tantangan pada indikator-indikator indeks kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas lingkungan, Kabupaten Purworejo menunjukkan capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) yang berada pada predikat baik, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) yang tergolong sedang, namun masih menghadapi tantangan serius pada aspek Indeks Kualitas Air (IKA) yang berada dalam kategori kurang. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa meskipun beberapa aspek lingkungan telah dikelola dengan cukup baik, masih terdapat ruang yang signifikan untuk perbaikan, khususnya pada pengelolaan sumber daya air.

Capaian IKU yang baik mengindikasikan bahwa tingkat pencemaran udara di wilayah ini masih relatif rendah, yang dapat disebabkan oleh minimnya aktivitas industri besar dan masih terbatasnya emisi kendaraan bermotor di kawasan ini. Hal ini merupakan peluang strategis untuk mempertahankan kualitas udara, terutama dengan mendorong penggunaan energi bersih, transportasi hijau, serta memperluas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dan permukiman.

IKL yang baik mencerminkan bahwa tutupan vegetasi dan hutan di Kabupaten Purworejo relatif masih terjaga. Ini menjadi kekuatan ekologis yang sangat penting untuk mendukung fungsi hidrologis, mencegah erosi, dan mempertahankan kesuburan tanah. Potensi ini dapat ditingkatkan melalui program konservasi lahan kritis, penanaman pohon produktif, serta pemulihan alam berbasis masyarakat.

Kapasitas Masyarakat Menghadapi Bencana

Kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana merupakan salah satu komponen utama dalam membangun ketangguhan wilayah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Kabupaten Purworejo yang secara geografis memiliki potensi kerawanan terhadap berbagai jenis bencana seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, dan gempa bumi, justru menunjukkan potensi yang signifikan dalam penguatan kapasitas adaptif masyarakat.

Potensi tersebut tercermin dari keberadaan 82 Desa Tangguh Bencana (Destana) dan 45 Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang tersebar di berbagai wilayah rawan bencana di Kabupaten Purworejo. Jumlah ini menjadi indikator kuat bahwa telah terbentuk fondasi kelembagaan dan modal sosial yang siap siaga dalam menghadapi situasi kedaruratan, sekaligus menjadi ujung tombak pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.

Desa Tangguh Bencana (Destana) berperan penting dalam menyusun rencana kontinjensi di tingkat desa, melakukan pemetaan risiko partisipatif, menyediakan jalur dan titik evakuasi, serta mengembangkan sistem peringatan dini lokal. Sementara itu, Tagana berfungsi sebagai tenaga sukarelawan yang terlatih dalam penanganan bencana, khususnya pada aspek pertolongan pertama, logistik, evakuasi, serta pemulihan psikososial.

Potensi ini dapat terus ditingkatkan melalui penguatan kapasitas teknis Destana dan Tagana, pengembangan jaringan antar wilayah rawan

bencana, serta dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai. Selain itu, integrasi program kebencanaan dengan perencanaan pembangunan desa akan memastikan bahwa mitigasi dan adaptasi bencana menjadi bagian dari arus utama pembangunan lokal. Dengan dukungan keberadaan Destana dan Tagana yang telah aktif, Kabupaten Purworejo memiliki modal sosial dan kelembagaan lokal yang kuat untuk terus mengembangkan wilayah yang resilien, adaptif, dan siap menghadapi bencana secara menyeluruh.

Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten

Potensi aparatur pemerintah yang kompeten merupakan salah satu kekuatan strategis Kabupaten Purworejo dalam mendorong efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah. Kompetensi aparatur menjadi pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, serta mampu merespons dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Data per 31 Desember 2024 mencatat jumlah ASN mencapai 9.111 orang, terdiri dari 5.555 PNS, 3.554 PPPK, dan 2 CPNS. Komposisi ini mencerminkan keberadaan sumber daya manusia pemerintah daerah yang cukup besar dan beragam dalam hal pendidikan, usia, dan jabatan fungsional maupun struktural. Mayoritas ASN telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, dengan 63,3% berpendidikan S1 dan 7,95% S2, menunjukkan kesiapan aparatur dalam merespons kompleksitas tugas-tugas pemerintahan berbasis pengetahuan dan keahlian. Lebih dari 82% ASN menduduki jabatan fungsional, yang mencerminkan pergeseran ke arah birokrasi yang lebih profesional dan berbasis keahlian.

Potensi aparatur yang kompeten ini dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi, perumusan kebijakan berbasis data, serta pelayanan publik yang cepat dan berkualitas. Aparatur yang mumpuni juga menjadi penggerak utama dalam implementasi berbagai agenda strategis daerah, seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan daya saing daerah, transformasi digital, pengelolaan lingkungan hidup, dan penguatan ekonomi lokal.

Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Purworejo menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, sebagaimana tercermin dalam peningkatan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan kedua indeks ini menandakan adanya transformasi birokrasi menuju arah yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Nilai SPBE, yang mengukur tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengalami peningkatan seiring dengan digitalisasi proses administrasi, penguatan infrastruktur TIK, serta integrasi layanan antar perangkat daerah. Peningkatan nilai SPBE mencerminkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengurangi birokrasi manual, meningkatkan interoperabilitas sistem, serta mempercepat akses informasi dan layanan publik melalui platform daring.

Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang juga menunjukkan tren positif merupakan indikator langsung dari persepsi masyarakat terhadap

mutu pelayanan yang mereka terima. Peningkatan IPP menandakan bahwa masyarakat menilai adanya peningkatan kepastian, kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, dan kenyamanan dalam memperoleh layanan dasar dari instansi pemerintah. Dengan terus meningkatkan nilai SPBE dan IPP, serta memperluas implementasi sistem digital di seluruh lini layanan, Kabupaten Purworejo memiliki potensi besar untuk menjadi contoh dalam penerapan e-government yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan publik.

g. Isu Strategis Daerah

Sebelum menentukan isu strategis jangka menengah Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029, dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap isu jangka panjang yang diangkat Kabupaten Purworejo dalam RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Adapun isu strategis jangka panjang Kabupaten Purworejo dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan antara lain:

- 1) Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan lingkungan sosial masyarakat,
- 2) Menurunnya kualitas lingkungan hidup,
- 3) Tingginya risiko bencana,
- 4) Belum terpadunya infrastruktur wilayah,
- 5) Belum optimalnya produktivitas dan kondisi inklusivitas perekonomian daerah, dan
- 6) Tata kelola pemerintahan yang belum *agile*, adaptif, dan kolaboratif.

Selanjutnya dalam RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, terdapat beberapa isu strategis:

- 1) Rencana pembangunan *double track* jalan kereta api Purworejo-Kroya,
- 2) Rencana pembangunan jalan bebas hambatan (jalan tol),
- 3) Keberadaan Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA),
- 4) Rencana pembangunan Jalan lingkaran Timur,
- 5) Pengembangan kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB),
- 6) Pembangunan Bendungan Bener.

Sementara itu pada KLHS RPJMD, dimunculkan beberapa isu:

- 1) Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia,
- 2) Distribusi kesejahteraan yang belum merata dan inklusif,
- 3) Belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata,
- 4) Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- 5) Tingginya risiko bencana dan dampak perubahan iklim, dan
- 6) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi.

Memperhatikan permasalahan, isu-isu di tingkat global, nasional, regional, jangka panjang daerah, KLHS, dapat dirumuskan isu strategis tema tata kelola pemerintahan. Tabel berikut ini menunjukkan tabulasi silang (*crosstab*) isu strategis Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029



Tabel 2. 188 Tabulasi Silang (Crosstab) Isu Strategis Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL (JAWA TENGAH)	
1	2	3	4	5	6	7
Bonus Demografi	Kualitas pendidikan Kabupaten Purworejo belum merata	Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dampak buruk teknologi AI	Transformasi sosial	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Ketahanan sosial
	Kualitas Kesehatan Masyarakat masih rendah		<i>Involuntary migration</i>	Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi	Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat	
	Masih rendahnya ketahanan keluarga		<i>Aging population</i>			
	Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Belum Setara dan Merata		negara maju			
	Kurangnya Kontribusi Kebudayaan dalam Mendukung Pembangunan					
	Kualitas Penduduk Usia Mudah Masih Rendah					
	Tingginya Angka Kemiskinan					
	Masih Rendahnya Kemandirian Desa					
	Stabilitas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Belum Kondusif					
	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan					



POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL (JAWA TENGAH)	
1	2	3	4	5	6	7
	Permukiman Belum Memadai					
Potensi Pertanian dan Pariwisata	Rendahnya Produktivitas Perekonomian Daerah	Belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata	Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia	Transformasi Ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi	Terbatasnya Kapasitas Fiskal Daerah					
Kawasan Pesisir Pantai Selatan	Kemiskinan					
	Kurangnya pemerataan pendapatan masyarakat	Distribusi kesejahteraan yang belum merata dan inklusif	Polarisasi sosial			
Wilayah Pengembangan Keburejo (Kebumen-Purworejo)	Aksesibilitas dan konektivitas wilayah belum merata	Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Transisi energi untuk mendorong pemerataan	Transformasi Ekonomi	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pemerataan layanan infrastruktur dasar
	Kualitas infrastruktur dasar permukiman belum memadai					
Potensi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Perubahan kritikal terhadap ekosistem	Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Kualitas lingkungan hidup yang berketahanan bencana
			Krisis sumber daya alam			



POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL (JAWA TENGAH)	
1	2	3	4	5	6	7
	Masih adanya usaha dan/ atau kegiatan yang belum mematuhi ketentuan persetujuan lingkungan		Biodiversity loss dan gangguan ekosistem			
Kapasitas Masyarakat Menghadapi Bencana	Percepatan Perubahan Iklim yang Berdampak pada Bencana Alam dan Lingkungan		Polusi			
			Penerapan standar sustainability yang tinggi di level global			
			Cuaca ekstrem			
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif
	Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Baik			Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia		
	Reformasi Hukum Belum Optimal					
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Pelayanan publik prima belum merata		Cyber insecurity			
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Belum Optimal		Sinkronisasi kebijakan			



POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL (JAWA TENGAH)	
1	2	3	4	5	6	7
	Belum Optimalnya Implementasi Kualitas Kebijakan		makro dan sektoral			

Sumber: Tim Penyusun, 2025

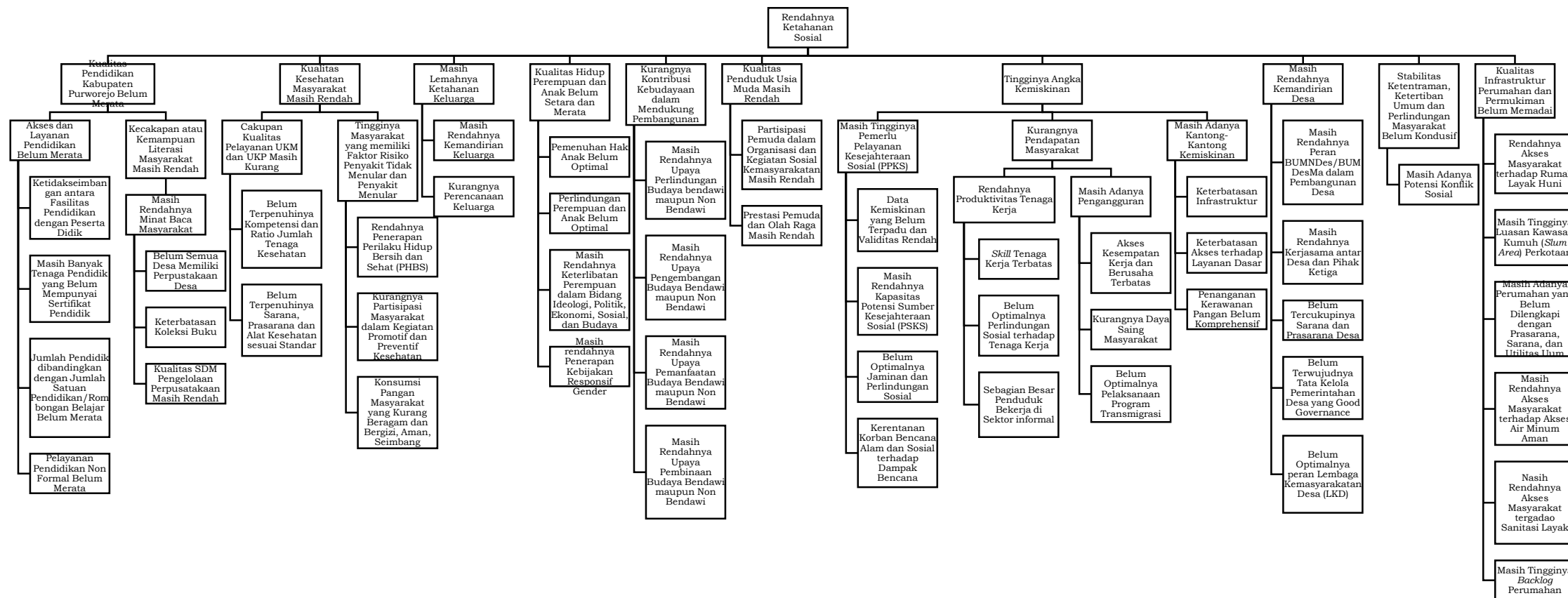
1) Ketahanan Sosial

Ketahanan Sosial pada hakikatnya merupakan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk mengantisipasi, menghadapi, serta beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan guncangan yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Ketahanan sosial yang kuat ditandai dengan terciptanya kondisi masyarakat yang inklusif, berdaya, serta memiliki ikatan solidaritas yang kuat sehingga mampu menjaga stabilitas sosial sekaligus mendorong keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks pembangunan daerah, ketahanan sosial berhubungan erat dengan kualitas manusia, ketahanan keluarga, perlindungan kelompok rentan, hingga pemeliharaan nilai budaya yang menjadi pondasi kehidupan masyarakat.

Mewujudkan ketahanan sosial bukanlah hal yang mudah. Kompleksitas permasalahan terutama di Kabupaten Purworejo seperti kualitas pendidikan yang belum merata; kualitas kesehatan masyarakat yang masih rendah; masih lemahnya ketahanan keluarga; kualitas hidup perempuan dan anak yang belum setara dan merata; kurangnya kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan; kualitas penduduk usia muda yang masih rendah; tingginya angka kemiskinan; masih rendahnya kemandirian desa; stabilitas ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat belum kondusif; serta kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum optimal. Minimnya koordinasi antar sektor serta keterbatasan mekanisme perlindungan sosial juga seringkali melemahkan daya tahan masyarakat dan perwujudan ketahanan sosial secara menyeluruh. Menghadapi dinamika tersebut, Kabupaten Purworejo perlu untuk melakukan berbagai upaya penguatan untuk mewujudkan ketahanan sosial masyarakat di Kabupaten Purworejo.



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



Gambar 2. 133 Bagan Pohon Masalah Isu Strategis Ketahanan Sosial

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2) Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif

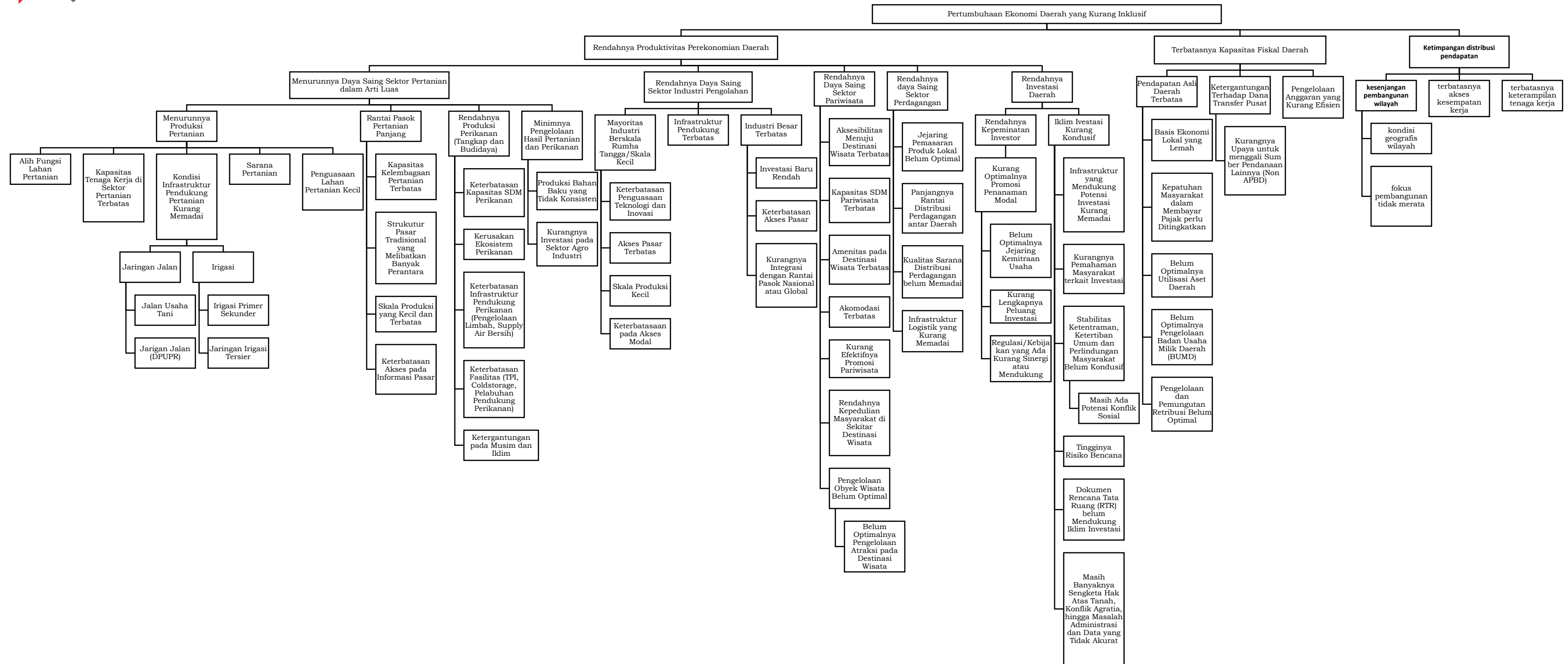
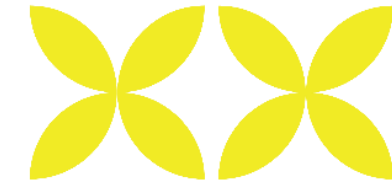
Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif merupakan proses peningkatan aktivitas ekonomi di suatu wilayah yang memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa meninggalkan kelompok tertentu. Konsep ini menekankan pada pemerataan peluang ekonomi, pengurangan kesenjangan (baik antar wilayah maupun antar sektor), peningkatan kesejahteraan, dan keberlanjutan pembangunan. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purworejo cukup stabil namun menunjukkan perlambatan. Di sisi lain, produktivitas perekonomian lokal masih rendah dan distribusi kesejahteraan belum merata. Tantangan ini diperparah oleh kapasitas fiskal daerah yang terbatas dan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat.

Basis ekonomi di Kabupaten Purworejo didominasi oleh sektor pertanian dalam arti luas, sektor pertanian juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Meskipun mendukung inklusivitas melalui peluang kerja di pedesaan, tantangan seperti produktivitas rendah dan ketergantungan pada sektor primer perlu diatasi melalui modernisasi, diversifikasi, dan infrastruktur yang lebih baik. Di sisi lain, sektor perindustrian di Kabupaten Purworejo secara konsisten menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten secara kontribusi dan laju, meskipun belum terlihat keterkaitannya dengan sektor primernya (pertanian).

Secara global, tren hilirisasi komoditas agribisnis telah mulai memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, sementara secara nasional Pemerintah mendorong percepatan transformasi ekonomi dengan menguatkan basis produksi dan memperluas akses pasar. Di tingkat Jawa Tengah, fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan daya saing dan keberlanjutan ekonomi daerah. Dalam kerangka dinamika tersebut, Kabupaten Purworejo perlu memformulasikan strategi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjamin inklusivitas, sehingga seluruh laporan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan.



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



Gambar 2. 134 Pohon Masalah Isu Strategis Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif

Sumber: Hasil Analisis, 2024

3) Pemerataan Layanan Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (*engine of growth*). Namun demikian untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan (*sustainable development*) dibutuhkan infrastruktur yang mendukung tidak hanya untuk kepentingan ekonomi saja tetapi juga mendukung sistem sosial budaya dan sistem ekologi secara terpadu. Untuk itu diperlukan model kebijakan yang bisa mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang terpadu perlu mewujudkan pentingnya penyamaan persepsi di masyarakat tentang permasalahan dan tantangan yang dihadapi di daerah dalam rangka proses pengambilan keputusan yang lebih partisipatif. Peran perguruan tinggi dan lembaga riset dalam hal *transfer knowledge* sangat diperlukan sebagai faktor pengungkit (*leverage factor*). Selain itu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga memastikan bahwa pembangunan infrastruktur bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Selain itu, pembangunan infrastruktur di samping diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas antar wilayah (perkotaan, pedesaan dan perbatasan), juga untuk pengurangan urbanisasi dan *urban sprawl*, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, dan rencana tata ruang wilayah.

Tolok ukur dari keberhasilan upaya-upaya pengembangan wilayah adalah dari tingkat ketimpangan antar wilayah. Ketimpangan antar wilayah tersebut secara umum diukur dengan menggunakan beberapa variabel. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar wilayah. Upaya-upaya pembangunan melalui intervensi program dan kegiatan terhadap suatu wilayah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus memperkecil kesenjangan antar wilayah.

Berikut ini menunjukkan tipologi wilayah yang dikelompokkan berdasarkan beberapa variabel diantaranya ketersediaan sarpras pendidikan, kesehatan, perekonomian, jaringan jalan, sarpras transportasi, ketersediaan akses internet dan angka kemiskinan. Semakin kecil ketimpangan wilayah menunjukkan tingkat pembangunan antar wilayah semakin merata. Dari 16 kecamatan, terdapat 3 kelompok tipologi wilayah-wilayah di Kabupaten Purworejo, yaitu :

Tabel 2. 189 Tipologi Wilayah Kecamatan berdasarkan Ketimpangan Wilayah

No	Tipologi Wilayah	Kecamatan
1	2	3
1	Maju dengan pertumbuhan cepat, yaitu ketersediaan sarana dan sarpras infrastruktur pendukung pendidikan, kesehatan, perekonomian, sarana	Kecamatan Purworejo, Kecamatan Banyuwirip,



No	Tipologi Wilayah	Kecamatan
1	2	3
	internet, jaringan jalan, sarana transportasi cenderung sudah lengkap	Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kutoarjo
2	Berkembang cepat, ketersediaan sarana dan sarpras infrastruktur pendukung pendidikan, kesehatan, perekonomian, sarana internet, jaringan jalan, sarana transportasi cenderung sudah tersedia akan tetapi ketersediaanya belum optimal. Wilayah tersebut diindikasikan berkembang cepat karena dampak adanya Proyek Strategis Nasional yaitu Bandara YIA dan Bendungan Bener.	Kecamatan Gebang, Kecamatan Bener, Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Bagelen
3	Berkembang, yaitu ketersediaan sarana dan sarpras infrastruktur pendukung pendidikan, kesehatan, perekonomian, sarana internet, jaringan jalan, sarana transportasi cenderung masih belum lengkap	Kecamatan Ngombol, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Butuh, Kecamatan Pituruh, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Bruno, Kecamatan Loano dan Kecamatan Grabag.

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Terdapat korelasi yang erat antara perkembangan suatu wilayah dengan infrastruktur yang terdapat di daerah tersebut. Upaya pembenahan kondisi infrastruktur disadari sangat berperan penting dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan dampak jangka panjangnya bagi PDRB per kapita. Perbaikan infrastruktur memiliki kontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Pengembangan infrastruktur ekonomi, pertanian, perdagangan, pendidikan, kesehatan, sosial, hingga perumahan dan permukiman bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Pada sektor perumahan dan permukiman pengembangan infrastruktur juga mencakup peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengakses hunian layak dan mengurangi angka *backlog* perumahan.

Pengembangan sektor transportasi diharapkan tidak hanya sekedar mendukung pembangunan di Kabupaten Purworejo tetapi harus mampu menjadi bagian dari arah pembangunan di Kabupaten Purworejo. Keberhasilan pembangunan sektor transportasi bukan hanya diukur dari ketersediaan layanan ataupun terbangunnya infrastruktur transportasi seperti jalan, jalan rel, terminal penumpang atau barang, stasiun, dan infrastruktur lainnya (*output*) tetapi bagaimana memastikan layanan dan infrastruktur yang terselenggara atau terbangun dapat digunakan dan memberikan nilai tambah bagi penggunaanya (*outcome*), serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purworejo (*impact*).

Peningkatan konektivitas wilayah di Kabupaten Purworejo tidak hanya diarahkan pada konektivitas melalui transportasi, akan tetapi juga konektivitas pada jaringan informasi dan telekomunikasi, utamanya terkait ketersediaan jaringan internet yang menjadi jaringan primer dalam komunikasi pada masa kini.

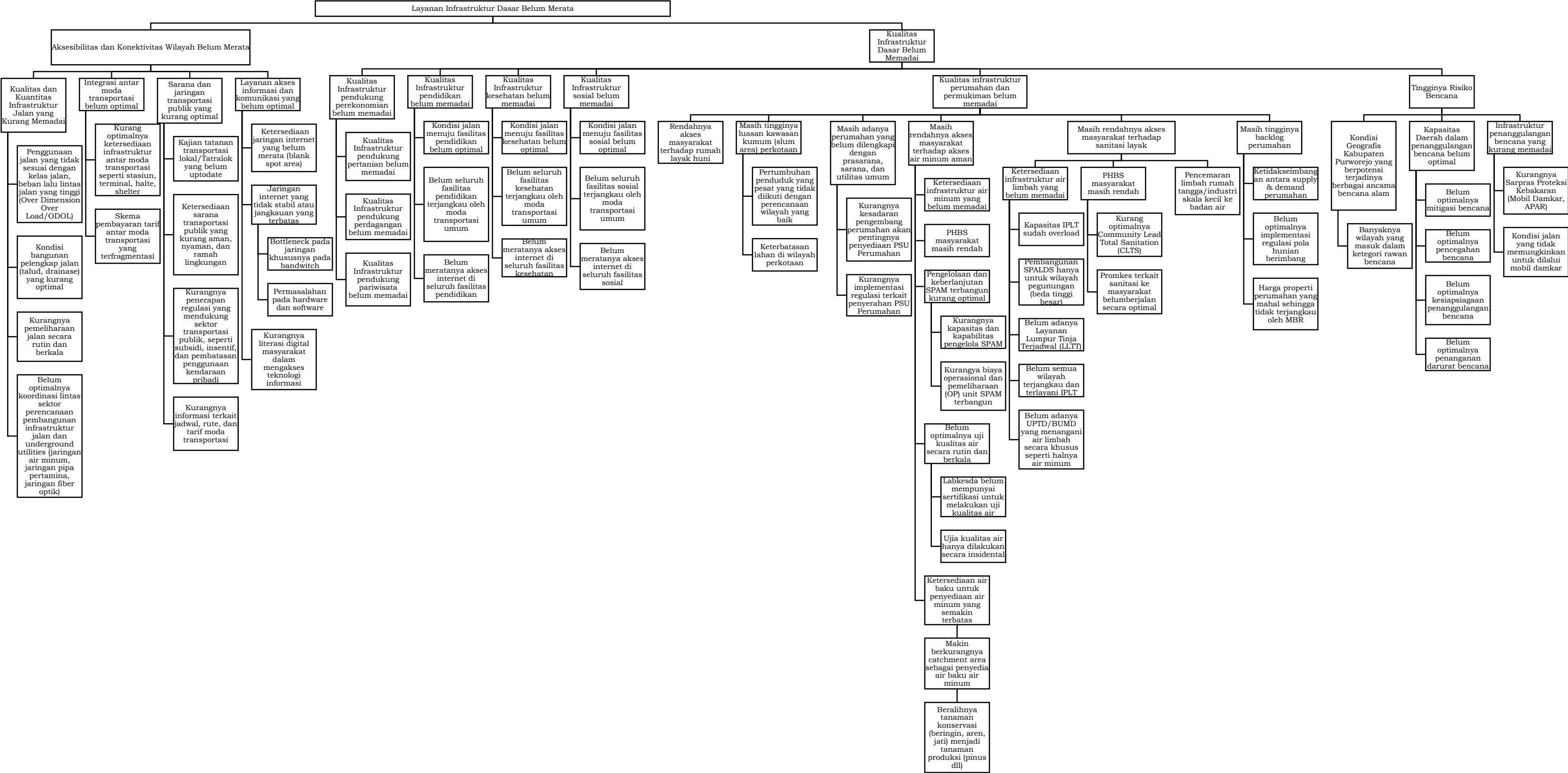
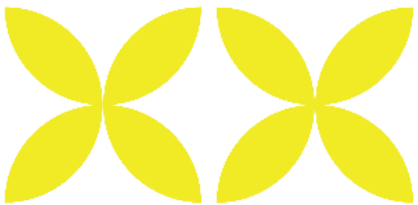
Akan tetapi pemerataan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Purworejo, termasuk pula pengembangan infrastruktur terkendala dengan tingginya risiko bencana alam di wilayah Kabupaten Purworejo.

Bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem lainnya sering terjadi di wilayah ini. Kerentanan terhadap bencana tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan dan kualitas infrastruktur. Oleh karena itu, upaya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah harus dikombinasikan dengan strategi pengurangan risiko bencana secara integratif.

Identifikasi terhadap program pembangunan infrastruktur menyimpulkan bahwa pada umumnya program ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dan konektivitas yang memperhatikan tingginya risiko bencana alam. Adapun rincian isu strategis Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah dijelaskan melalui bagan berikut.



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



Gambar 2. 135 Pohon Masalah Isu Strategis Pemerataan Layanan Infrastruktur Dasar

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4) Kualitas Lingkungan Hidup yang Berketahanan Bencana

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, karena menjadi penentu daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Purworejo, kualitas lingkungan hidup masih menghadapi tantangan yang cukup serius, tercermin dari kondisi berbagai indikator lingkungan yang menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan penurunan pada beberapa aspek kunci, khususnya kualitas air dan lahan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya kualitas lingkungan hidup adalah meningkatnya pencemaran air, terutama yang berasal dari limbah domestik dan aktivitas pertanian. Tingginya beban pencemaran dari rumah tangga seperti limbah cair yang tidak diolah, serta penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak ramah lingkungan dalam kegiatan pertanian, memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan kualitas badan air. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan air limbah dan pengawasan terhadap praktik pertanian masih belum optimal dan perlu diperkuat secara kelembagaan maupun teknis.

Selain pencemaran air, permasalahan lain yang turut memperburuk kondisi lingkungan adalah tingginya timbulan sampah yang tidak terkelola, yang mencapai 51,89% dari total sampah yang dihasilkan. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh sampah yang dihasilkan masyarakat tidak tertangani melalui sistem pengangkutan dan pengolahan yang baik. Kurangnya kesadaran masyarakat, terbatasnya sarana prasarana persampahan, dan lemahnya sistem pengelolaan sampah dari sumber asalnya menjadi penyebab utama yang harus segera diintervensi. Jika tidak ditangani dengan baik, permasalahan sampah dapat berdampak pada pencemaran tanah, air, dan udara, serta menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, penurunan kualitas tutupan lahan turut menjadi perhatian serius. Aktivitas alih fungsi lahan yang tidak terkendali, degradasi kawasan hutan dan sempadan sungai, serta praktik penggunaan lahan yang tidak mempertimbangkan aspek ekologis menyebabkan menurunnya kualitas ekosistem darat. Kondisi ini melemahkan fungsi ekologis lahan dalam menyerap air hujan, menahan laju erosi, dan menjaga keseimbangan iklim mikro. Meskipun kualitas udara masih tergolong cukup baik, tetap diperlukan langkah antisipatif dalam menghadapi peningkatan emisi dari transportasi, pembakaran terbuka, serta dampak perubahan iklim.

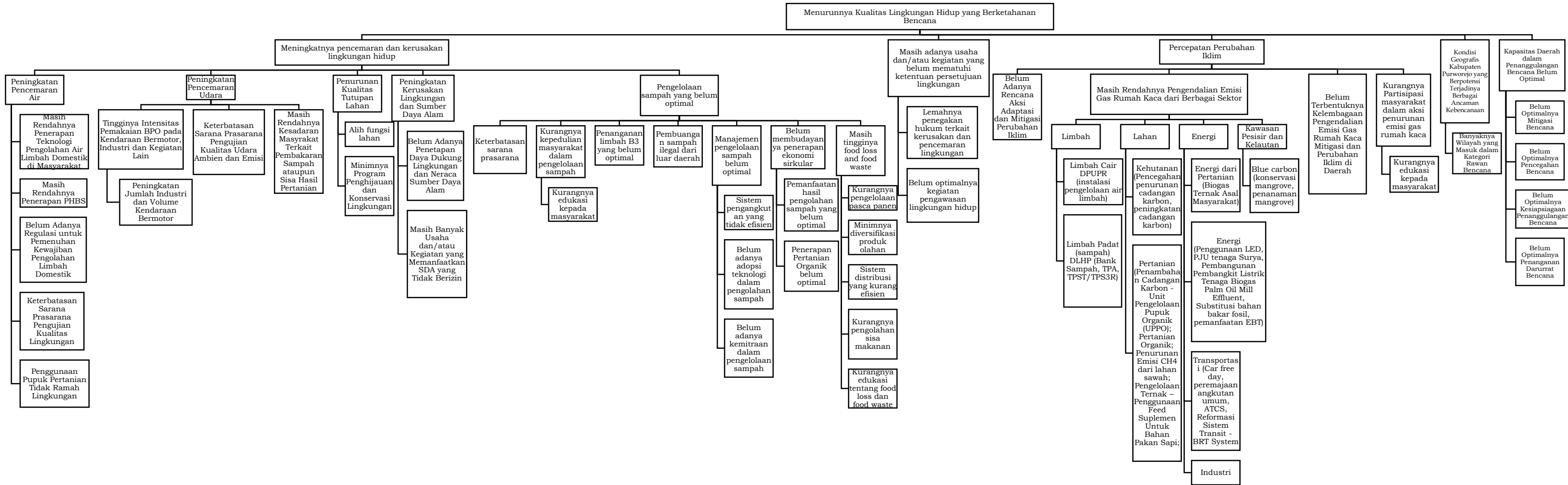
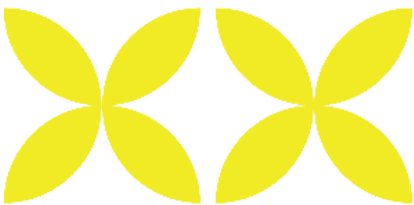
Menghadapi kondisi tersebut, Kabupaten Purworejo perlu mengintegrasikan pendekatan Pembangunan Rendah Karbon sebagai strategi utama dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menekan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan intensitas emisi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam dan ketahanan masyarakat terhadap iklim dan bencana. Dalam konteks ini, berbagai intervensi strategis dapat diarahkan pada pemanfaatan energi terbarukan seperti biogas untuk rumah tangga, rehabilitasi kawasan hulu DAS secara partisipatif, peningkatan kapasitas adaptasi petani melalui pertanian berkelanjutan, serta perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi melalui kebijakan tata ruang dan penggunaan lahan secara

berkelanjutan. Lebih jauh, upaya pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah perlu diperkuat melalui pembangunan infrastruktur pengolahan limbah domestik, peningkatan efektivitas sistem persampahan berbasis masyarakat, serta pengembangan kebijakan insentif-disinsentif bagi pelaku usaha dan rumah tangga.

Kabupaten Purworejo memiliki kondisi geografis yang beragam, sehingga berpotensi mengalami berbagai ancaman kebencanaan seperti tanah longsor, banjir, tsunami, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan (karhutla), dan angin puting beliung yang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Selain itu, kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo belum optimal pada aspek mitigasi, pencegahan kesiapsiagaan penanggulangan, dan penanganan darurat bencana. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu memperkuat koordinasi, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan partisipasi masyarakat untuk dapat meningkatkan ketahanan terhadap ancaman bencana yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan perubahan iklim. Seluruh upaya tersebut harus dilandasi oleh prinsip keadilan lingkungan, partisipasi masyarakat, serta sinergi lintas sektor dan lintas wilayah. Dengan demikian, perbaikan kualitas lingkungan hidup bukan hanya menjadi tujuan ekologis, tetapi juga strategi sosial dan ekonomi jangka panjang untuk memastikan pembangunan daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029

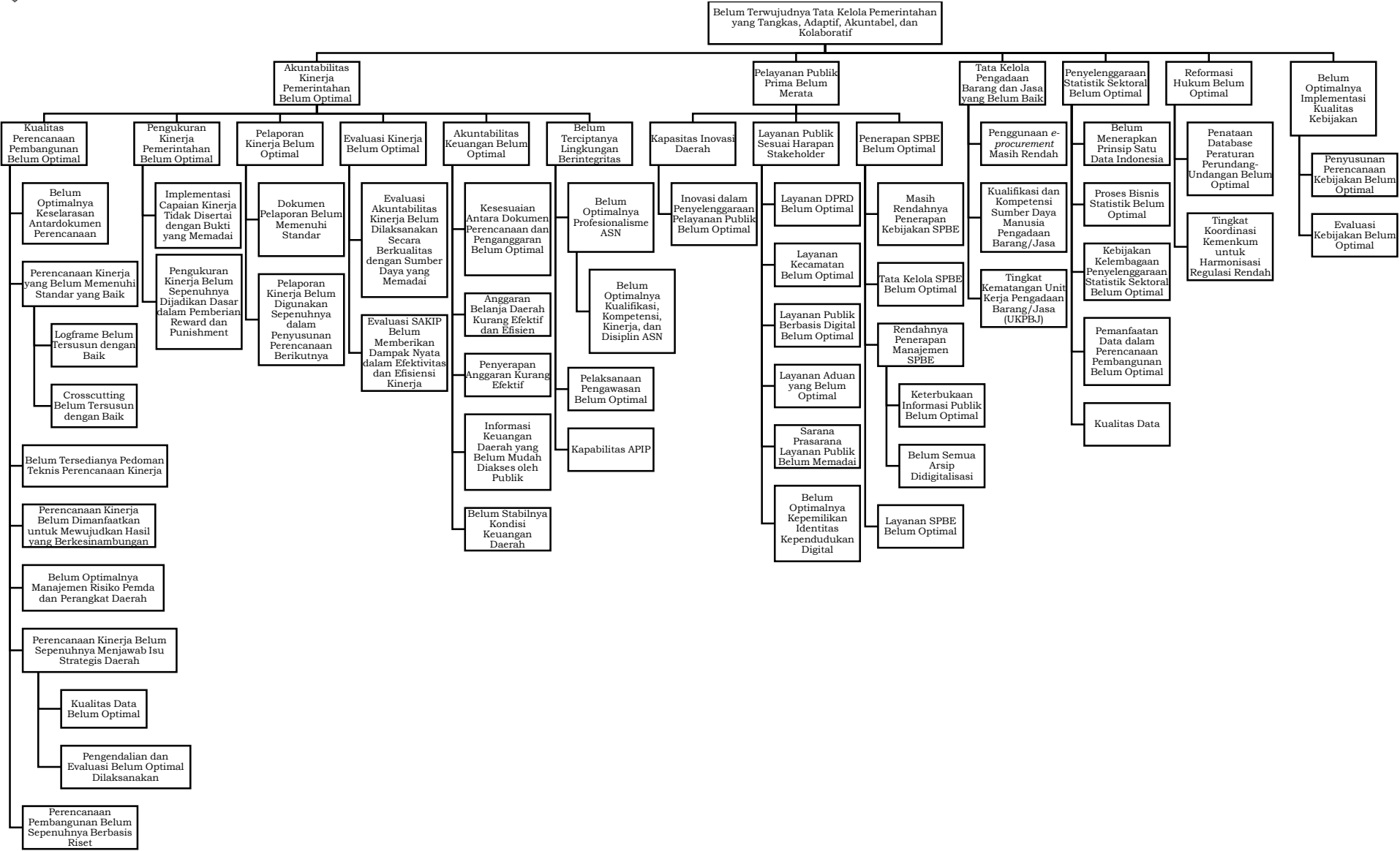
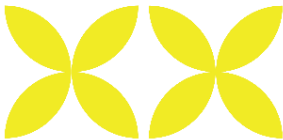


Gambar 2. 136 Pohon Masalah Isu Strategis Kualitas Lingkungan Hidup yang Berketahanan Bencana

Sumber: Hasil Analisis, 202

5) Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas, Adaptif, Akuntabel, dan Kolaboratif

Pada tema Tata kelola pemerintahan, telah dilakukan analisis permasalahan dan isu sesuai konteks. Isu global yang terkait dengan tata kelola pemerintahan yakni misinformasi dan disinformasi serta *cyber insecurity*. Isu nasional yakni sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral. Isu regional di tingkat Provinsi Jawa Tengah ialah tata kelola pemerintahan yang dinamis. Selanjutnya, memperhatikan isu jangka panjang Kabupaten Purworejo (tata kelola pemerintahan yang belum agile, adaptif, dan kolaboratif) dan KLHS (belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi), serta beberapa permasalahan di Kabupaten Purworejo: akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal; pelayanan publik prima belum merata; tata kelola pengadaan barang dan jasa yang belum baik; penyelenggaraan statistik sektoral belum optimal; reformasi hukum belum optimal; serta belum optimalnya implementasi kualitas kebijakan, maka isu strategis jangka menengah (2025-2029) Kabupaten Purworejo tema tata kelola pemerintahan yakni “Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas, Adaptif, Akuntabel, dan Kolaboratif”. Adapun rincian isu strategis Tata Kelola Pemerintah dijelaskan melalui bagan berikut.



Gambar 2. 137 Pohon Masalah Isu Strategis Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas, Adaptif, Akuntabel, dan Kolaboratif

Sumber: Hasil Analisis, 2024

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sementara misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan tujuan atau strategi utama (*goals*) serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai beserta indikator pengukurnya. Proses perumusan ini dilakukan dengan pendekatan perencanaan strategis, yang melibatkan analisis faktor internal dan eksternal serta mempertimbangkan program-program yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo terpilih untuk periode 2025-2029.

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
3.1.1.Visi

Visi adalah gambaran tentang kondisi atau tujuan ideal yang ingin dicapai di masa depan, yang berfungsi sebagai arah dan panduan dalam perencanaan serta pengambilan keputusan di pemerintahan. Berdasarkan perkembangan dan kondisi pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Purworejo 5 (lima) tahun yang akan datang, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Visi yang ditetapkan mencerminkan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan oleh kepala daerah selama masa kepemimpinannya. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada dalam menciptakan Kabupaten Purworejo sebagaimana yang dicita-citakan. Rumusan visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

**“Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif
(PURWOREJO BERSERI)”**

Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat makna yang terkandung dalam setiap kata yang digunakan pada visi tersebut. Makna yang dimaksud pada masing-masing kata dalam kalimat visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Penjelasan Makna Visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Unsur Visi	Penjelasan
1	2
Berdaya Saing	Masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan di masa datang.
Sejahtera	Terciptanya masyarakat adil dan makmur yang ditandai dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik.
Religius	Masyarakat yang memiliki ketaqwaan terhadap Tuhan YME, menjalani kehidupan sehari-hari berlandaskan nilai, norma, dan etika ajaran agama, dan bersikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan dan keberagaman, tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda.

Unsur Visi	Penjelasan
1	2
Inovatif	Pemerintah dan masyarakat dapat memecahkan setiap masalah yang dihadapi dengan mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki serta mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan (meliputi elemen <i>Smart Government, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, Smart Environment</i>).
Berseri	Kata Berseri merupakan akronim dari kata Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif. “Berseri” memiliki arti “Tampak Cerah” yang kemudian dimaknai sebagai pengharapan untuk menciptakan masa depan yang cerah. “Purworejo Berseri” mempunyai makna sebagai upaya memperkuat fondasi pembangunan dengan tujuan menciptakan masa depan yang cerah menuju Indonesia Emas 2045. Melalui inovasi, kolaborasi, dan dedikasi, Purworejo membangun landasan yang kokoh untuk generasi mendatang. Pemerintah bersama masyarakat memastikan kemakmuran yang berkelanjutan, harmoni dengan alam, serta kemajuan berkesinambungan di berbagai sektor kehidupan.

Sumber: Tim Penyusun, 2025

Visi pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 menuju pada kondisi masyarakat yang sejahtera, memiliki keterkaitan dengan visi RPJMN dalam rangka terwujudnya masyarakat yang maju serta berdaulat, dan dalam RPJMD Jawa Tengah berkaitan dengan terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera. Jika disandingkan dengan visi pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Persandingan Visi Kabupaten Purworejo dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Nasional		Jawa Tengah		Purworejo	
RPJPN 2025-2045	RPJMN 2025-2029	RPJPD 2025-2045	RPJMD 2025-2029	RPJPD 2025-2045	RPJMD 2025-2029
1	2	3	4	5	6
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan	Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045	Purworejo Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing (Pejuang)	Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)
Kaca Kunci					
	Indonesia Maju		Jawa Tengah Maju Berkelanjutan		Purworejo Berdaya Saing Sejahtera Religius Inovatif

Sumber: Tim Penyusun, 2025

3.1.2.Misi

Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Rumusan menjadi kerangka bagian tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh guna mencapai visi

pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan visi “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)” ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera.
2. Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
4. Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.

Jika dikaitkan dengan misi RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045, maka misi RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 3 Keselarasan Antara Misi RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 dengan Misi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Misi RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045	Misi RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
1	2
Misi 1: Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan	Misi 4 : Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan
Misi 2: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia, lingkungan sosial, dan budaya masyarakat	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera
Misi 3: Meningkatkan pemerataan aksesibilitas, konetivitas, serta keterpaduan infrastruktur wilayah	Misi 2 : Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah
Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Misi 3 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
Misi 5: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang agile, adaptif, dan kolaboratif	Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi

Sumber: Tim Penyusun, 2025

Sementara itu keterkaitan antara misi RPJMN Tahun 2025-2045 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita)	Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
1	2	3
Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Misi 1: Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera
Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Misi 5: Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan	
Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif	Misi 2 : Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah
Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Misi 2: Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan Berkelanjutan	Misi 3 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		Misi 4 : Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan
Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	Misi 6: Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah	



Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita)	Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
1	2	3
kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi	
Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas	Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi

Sumber: Tim Penyusun, 2025



Gambar 3. 1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

3.1.3. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

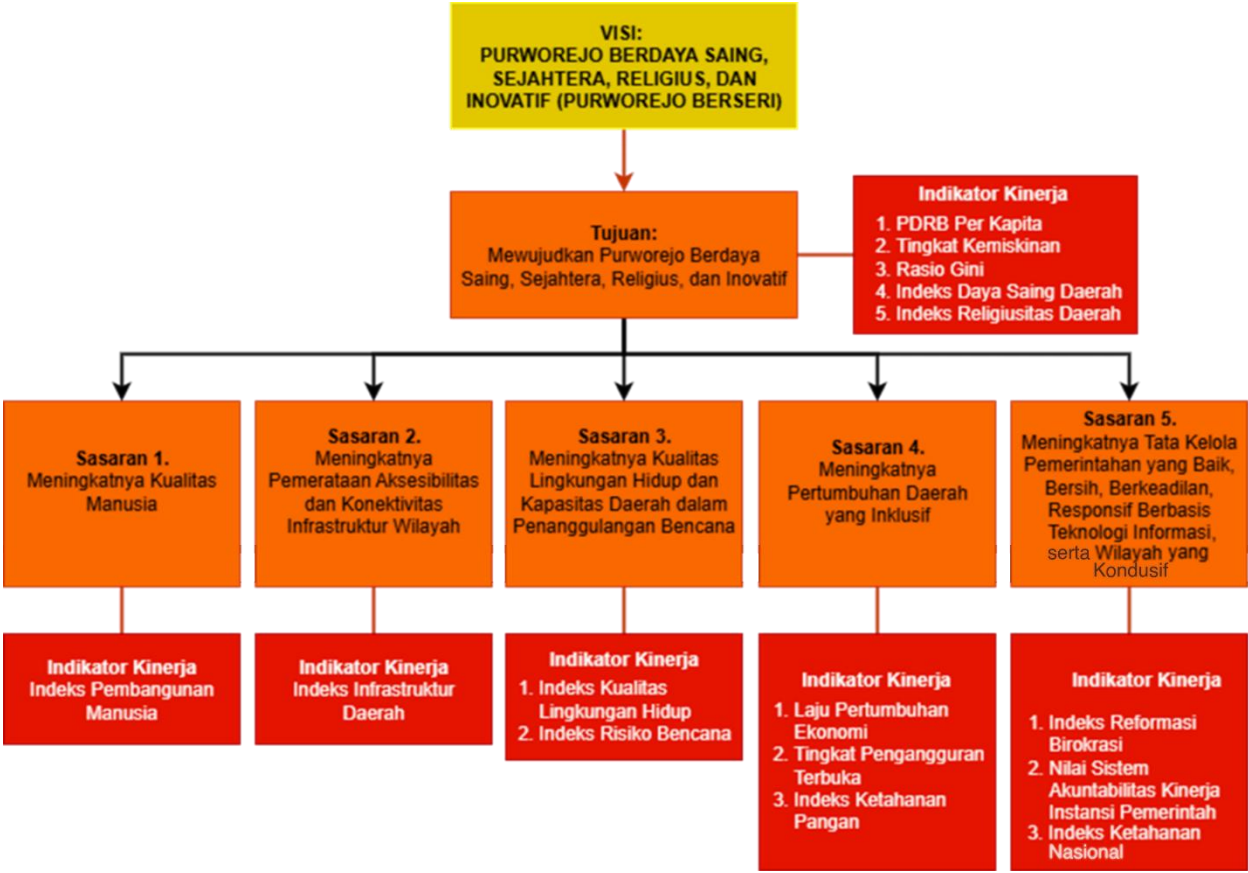
Tujuan pembangunan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi untuk periode tahun 2025-2029. Tujuan yang ditetapkan berdasarkan misi pembangunan lima tahun ke depan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut.

Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif

Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran pembangunan adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut.

- 1. Meningkatnya kualitas manusia.
- 2. Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah.
- 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.
- 4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
- 5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif.

Berikut gambaran cascading tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta indikator kinerja Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.



Gambar 3. 2 Cascading Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Purworejo kemudian ditetapkan target atau proyeksinya untuk menjadi panduan dalam penyusunan perencanaan tahunan serta sebagai instrumen evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2030. Penetapan atau proyeksi per indikator tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut.



Tabel 3. 5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Purworejo

Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan: Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	31,56	37,64	43,71	49,79	55,86	61,94
	Tingkat Kemiskinan	%	9,04 - 10,22	9,67 - 8,67	9,22 - 8,22	8,76 - 7,76	8,30 - 7,30	7,84 - 6,84
	Rasio Gini	Angka	0,335	0,334	0,333	0,332	0,331	0,33
	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,86	3,87	3,88	3,89	3,90	3,91
	Indeks Religiusitas Daerah	Angka	76,26	81,60	83,04	83,89	84,15	84,42
S1. Meningkatnya Kualitas Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,39	76,00	76,10	76,21	76,31	76,41
S2. Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	50,18	52,07	53,95	55,84	57,72	59,61
S3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	76,04	76,08	76,13	76,17	76,21	76,25
	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	110,16 - 109,00	108,53 - 106,88	106,89 - 104,76	105,26 - 102,64	103,63 - 100,52	101,99 - 98,41
S4. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,16 - 6,16	5,00 - 5,80	6,10 - 7,10	6,70 - 7,70	7,30 - 8,19	7,80 - 8,50
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,11	3,10 - 2,83	2,93 - 2,63	2,84 - 2,54	2,75 - 2,45	2,66 - 2,36
	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	86,25	86,28	86,32	86,35	86,38	86,41
S5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta wilayah yang kondusif	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	83	83,41	83,82	84,23	84,64	85,05
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2
	Indeks Ketahanan Nasional	Angka	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1

Sumber: Tim Penyusun, 2025

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini menjadi panduan dalam menentukan program prioritas serta fokus pembangunan daerah yang dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

3.2.1.Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Purworjo Tahun 2025-2029, disusunlah strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mengacu pada sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan pada setiap sasaran daerah dijabarkan sebagai berikut.

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Manusia

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas manusia sebagai berikut.

Tabel 3. 6 Strategi dan Arah Kebijakan Sasaran 1 RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Tahun	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
2026	Menguatkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata	Penguatan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui layanan pendidikan inklusif baik formal maupun nonformal, penguatan mutu, pembentukan karakter melalui pengembangan kurikulum lokal sesuai nilai-nilai luhur budaya daerah, dan kualitas pendidikan yang didukung oleh pemenuhan sarana prasarana yang memadai, pemerataan dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, serta tata kelola perizinan satuan pendidikan guna menjamin mutu dan kepatuhan terhadap standar nasional pendidikan
	Menguatkan ekosistem sosial budaya melalui pemajuan kebudayaan, keluarga berkualitas dan sejahtera, pengarusutamaan gender, budaya literasi, serta pengembangan potensi dan prestasi pemuda olahraga	Penguatan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat serta pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan berkarakter
		Penguatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, perbaikan tata kelola dan basis data, pemberdayaan sosial ekonomi kelompok rentan dan miskin secara kolaboratif dan multisektor, penguatan kebijakan, perlindungan sosial yang berkeadilan, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan terhadap PPKS serta pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk
		Penguatan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana
		Penguatan kesetaraan gender melalui penguatan peran dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, peningkatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, penurunan



Tahun	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
		kekerasan berbasis gender, dan penyediaan data pilah gender yang berkualitas
		Penguatan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non keolahragaan melalui pembinaan, pengembangan dan optimalisasi fasilitas olahraga
		Penguatan peran kebudayaan berbasis kearifan lokal, nilai-nilai sejarah dalam pembentukan karakter, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan optimalisasi perlindungan, pengembangan, pembinaan, serta pemanfaatan objek pemajuan budaya, kesenian tradisional, cagar budaya, dan museum
	Menguatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	Penguatan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar, pemenuhan mutu dan kualitas pelayanan secara optimal, sistem rujukan yang terintegrasi, serta memastikan akses dan keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat dengan menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh
		Penguatan pemetaan, penataan, dan distribusi sumberdaya kesehatan daerah dalam rangka menyediakan sumberdaya kesehatan yang kompeten dan sesuai standar
		Penguatan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat sehingga terwujud masyarakat dengan kualitas hidup yang sehat
2027	Meningkatkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata	Peningkatan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui layanan pendidikan inklusif baik formal maupun nonformal, peningkatan mutu, pembentukan karakter melalui pengembangan kurikulum lokal sesuai nilai-nilai luhur budaya daerah, dan kualitas pendidikan yang didukung oleh pemenuhan sarana prasarana yang memadai, pemerataan dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, serta tata kelola perizinan satuan pendidikan guna menjamin mutu dan kepatuhan terhadap standar nasional pendidikan
	Meningkatkan ekosistem sosial budaya melalui pemajuan kebudayaan, keluarga berkualitas dan sejahtera, pengarusutamaan gender, budaya literasi, serta pengembangan potensi dan prestasi pemuda olahraga	Peningkatan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat serta pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan berkarakter
		Peningkatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, perbaikan tata kelola dan basis data, pemberdayaan sosial ekonomi kelompok rentan dan miskin secara kolaboratif dan multisektor, penguatan kebijakan, perlindungan sosial yang berkeadilan, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan terhadap PPKS serta pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk
		Peningkatan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana



Tahun	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
		Peningkatan kesetaraan gender melalui penguatan peran dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, peningkatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, penurunan kekerasan berbasis gender, dan penyediaan data pilah gender yang berkualitas
		Peningkatan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non keolahragaan melalui pembinaan, pengembangan dan optimalisasi fasilitas olahraga
		Peningkatan peran kebudayaan berbasis kearifan lokal, nilai-nilai sejarah dalam pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan optimalisasi perlindungan, pengembangan, pembinaan, serta pemanfaatan objek pemajuan budaya, kesenian tradisional, cagar budaya, dan museum
	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar, pemenuhan mutu dan kualitas pelayanan secara optimal, sistem rujukan yang terintegrasi, serta memastikan akses dan keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat dengan menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh
		Peningkatan pemetaan, penataan, dan distribusi sumberdaya kesehatan daerah dalam rangka menyediakan sumberdaya kesehatan yang kompeten dan sesuai standar
2028	Memantapkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	Peningkatan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat sehingga terwujud masyarakat dengan kualitas hidup yang sehat
		Pemantapan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui layanan pendidikan inklusif baik formal maupun nonformal, pemantapan mutu, pembentukan karakter melalui pengembangan kurikulum lokal sesuai nilai-nilai luhur budaya daerah, dan kualitas pendidikan yang didukung oleh pemenuhan sarana prasarana yang memadai, pemerataan dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, serta tata kelola perizinan satuan pendidikan guna menjamin mutu dan kepatuhan terhadap standar nasional pendidikan
		Pemantapan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat serta pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan berkarakter
	Memantapkan ekosistem sosial budaya melalui pemajuan kebudayaan, keluarga berkualitas dan sejahtera, pengarusutamaan gender, budaya literasi, serta pengembangan potensi dan prestasi pemuda olahraga	Pemantapan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, perbaikan tata kelola dan basis data, pemberdayaan sosial ekonomi kelompok rentan dan miskin secara kolaboratif dan multisektor, penguatan kebijakan, perlindungan sosial yang berkeadilan, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan terhadap PPKS serta pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk
		Pemantapan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana



Tahun	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
		Pemantapan kesetaraan gender melalui penguatan peran dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, peningkatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, penurunan kekerasan berbasis gender, dan penyediaan data pilah gender yang berkualitas
		Pemantapan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non keolahragaan melalui pembinaan, pengembangan dan optimalisasi fasilitas olahraga
		Pemantapan peran kebudayaan berbasis kearifan lokal, nilai-nilai sejarah dalam pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan optimalisasi perlindungan, pengembangan, pembinaan, serta pemanfaatan objek pemajuan budaya, kesenian tradisional, cagar budaya, dan museum
	Memantapkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	Pemantapan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar, pemenuhan mutu dan kualitas pelayanan secara optimal, sistem rujukan yang terintegrasi, serta memastikan akses dan keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat dengan menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh
		Pemantapan pemetaan, penataan, dan distribusi sumberdaya kesehatan daerah dalam rangka menyediakan sumberdaya kesehatan yang kompeten dan sesuai standar
2029		Pemantapan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat sehingga terwujud masyarakat dengan kualitas hidup yang sehat
	Mewujudkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata	Perwujudan penerapan wajib belajar 13 tahun melalui layanan pendidikan inklusif baik formal maupun nonformal, mutu yang berkualitas, pembentukan karakter melalui pengembangan kurikulum lokal sesuai nilai-nilai luhur budaya daerah, dan kualitas pendidikan yang didukung oleh pemenuhan sarana prasarana yang memadai, pemerataan dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, serta tata kelola perizinan satuan pendidikan guna menjamin mutu dan kepatuhan terhadap standar nasional pendidikan
	Mewujudkan ekosistem sosial budaya melalui pemajuan kebudayaan, keluarga berkualitas dan sejahtera, pengarusutamaan gender, budaya literasi, serta pengembangan potensi dan prestasi pemuda olahraga	Perwujudan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat serta pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan berkarakter,
		Perwujudan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, perbaikan tata kelola dan basis data, pemberdayaan sosial ekonomi kelompok rentan dan miskin secara kolaboratif dan multisektor, penguatan kebijakan, perlindungan sosial yang berkeadilan, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan terhadap PPKS serta pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk
		Perwujudan pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana



Tahun	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
		Perwujudan kesetaraan gender melalui penguatan peran dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, peningkatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, penurunan kekerasan berbasis gender, dan penyediaan data pilah gender yang berkualitas
		Perwujudan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non keolahragaan melalui pembinaan, pengembangan dan optimalisasi fasilitas olahraga
		Perwujudan peran kebudayaan berbasis kearifan lokal, nilai-nilai sejarah dalam pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan optimalisasi perlindungan, Pengembangan, pembinaan, serta pemanfaatan objek pemajuan budaya, kesenian tradisional, cagar budaya, dan museum
	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	Perwujudan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar, pemenuhan mutu dan kualitas pelayanan secara optimal, sistem rujukan yang terintegrasi, serta memastikan akses dan keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat dengan menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh
		Perwujudan pemetaan, penataan, dan distribusi sumberdaya kesehatan daerah dalam rangka menyediakan sumberdaya kesehatan yang kompeten dan sesuai standar
		Perwujudan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat sehingga terwujud masyarakat dengan kualitas hidup yang sehat
2030	Meneguhkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata	Peneguhan penerapan wajib belajar 13 tahun melalui layanan pendidikan inklusif baik formal maupun nonformal, mutu yang berkualitas, pembentukan karakter melalui pengembangan kurikulum lokal sesuai nilai-nilai luhur budaya daerah, dan kualitas pendidikan yang didukung oleh pemenuhan sarana prasarana yang memadai, pemerataan dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, serta tata kelola perizinan satuan pendidikan guna menjamin mutu dan kepatuhan terhadap standar nasional pendidikan
	Meneguhkan ekosistem sosial budaya melalui pemajuan kebudayaan, keluarga berkualitas dan sejahtera, pengarusutamaan gender, budaya literasi, serta pengembangan potensi dan prestasi pemuda olahraga	Peneguhan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat serta pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan berkarakter
		Peneguhan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, perbaikan tata kelola dan basis data, pemberdayaan sosial ekonomi kelompok rentan dan miskin secara kolaboratif dan multisektor, penguatan kebijakan, perlindungan sosial yang berkeadilan, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan terhadap PPKS serta pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk
		Peneguhan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana



Tahun	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
		Peneguhan kesetaraan gender melalui penguatan peran dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, peningkatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, penurunan kekerasan berbasis gender, dan penyediaan data pilah gender yang berkualitas
		Peneguhan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non keolahragaan melalui pembinaan, pengembangan dan optimalisasi fasilitas olahraga
		Peneguhan peran kebudayaan berbasis kearifan lokal, nilai-nilai sejarah dalam pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan optimalisasi perlindungan, pengembangan, pembinaan, serta pemanfaatan objek pemajuan budaya, kesenian tradisional, cagar budaya, dan museum
	Meneguhkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	Peneguhan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar, pemenuhan mutu dan kualitas pelayanan secara optimal, sistem rujukan yang terintegrasi, serta memastikan akses dan keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat dengan menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh
		Peneguhan pemetaan, penataan, dan distribusi sumberdaya kesehatan daerah dalam rangka menyediakan sumberdaya kesehatan yang kompeten dan sesuai standar
		Peneguhan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat sehingga terwujud masyarakat dengan kualitas hidup yang sehat

Sumber: Tim Penyusun, 2025

Sasaran 2. Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah sebagai berikut.

Tabel 3. 7 Strategi dan Arah Kebijakan Sasaran 2 RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Tahun	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
2026	Menguatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman, aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan	Penguatan pengembangan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi, serta pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi
		Penguatan penyediaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap beserta infrastruktur dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka optimalisasi penyediaan pangan dan kemudahan akses menuju destinasi wisata
		Penguatan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap perumahan yang layak huni dan terjangkau, utamanya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan korban bencana di perkotaan maupun pedesaan
2027	Meningkatkan kualitas	Peningkatan pengembangan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi, serta



Tahun	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
	infrastruktur dasar permukiman, aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan	pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi
		Peningkatan penyediaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap beserta infrastruktur dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka optimalisasi penyediaan pangan dan kemudahan akses menuju destinasi wisata
		Peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap perumahan yang layak huni dan terjangkau, utamanya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan korban bencana di perkotaan maupun pedesaan
2028	Memantapkan kualitas infrastruktur dasar permukiman, aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan	Pemantapan pengembangan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi, serta pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi
		Pemantapan penyediaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap beserta infrastruktur dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka optimalisasi penyediaan pangan dan kemudahan akses menuju destinasi wisata
		Pemantapan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap perumahan yang layak huni dan terjangkau, utamanya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan korban bencana di perkotaan maupun pedesaan
2029	Mewujudkan kualitas infrastruktur dasar permukiman, aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan	Perwujudan pengembangan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi, serta pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi
		Perwujudan penyediaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap beserta infrastruktur dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka optimalisasi penyediaan pangan dan kemudahan akses menuju destinasi wisata
		Perwujudan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap perumahan yang layak huni dan terjangkau, utamanya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan korban bencana di perkotaan maupun pedesaan
2030	Meneguhkan kualitas infrastruktur dasar permukiman, aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan	Peneguhan pengembangan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi, serta pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi
		Peneguhan penyediaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap beserta infrastruktur dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka optimalisasi penyediaan pangan dan kemudahan akses menuju destinasi wisata
		Peneguhan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap perumahan yang layak huni dan terjangkau, utamanya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan korban bencana di perkotaan maupun pedesaan

Sumber: Tim Penyusun, 2025

Sasaran 3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah sebagai berikut.

Tabel 3. 8 Strategi dan Arah Kebijakan Sasaran 3 RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Tahun	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
2026	Menguatkan resiliensi terhadap perubahan iklim dan bencana , serta lingkungan hidup berkualitas melalui pengelolaan sumber daya alam secara efisien	Penguatan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan efisien yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendorong penerapan teknologi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif
		Penguatan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan maupun pedesaan, serta konservasi lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan berbagai sektor lainnya
		Penguatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terintegrasi hulu hilir dengan pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu
		Penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan
2027	Meningkatkan resiliensi terhadap perubahan iklim dan bencana, serta lingkungan hidup berkualitas melalui pengelolaan sumber daya alam secara efisien	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan efisien yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendorong penerapan teknologi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan maupun pedesaan, serta konservasi lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan berbagai sektor lainnya
		Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terintegrasi hulu hilir dengan pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu
		Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan
2028	Memantapkan resiliensi terhadap perubahan iklim dan bencana, serta lingkungan hidup berkualitas melalui pengelolaan sumber daya alam secara efisien	Pemantapan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan efisien yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendorong penerapan teknologi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif
		Pemantapan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan maupun pedesaan, serta konservasi lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan berbagai sektor lainnya
		Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terintegrasi hulu hilir dengan pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu



Tahun	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
2029	Mewujudkan resiliensi terhadap perubahan iklim dan bencana, serta lingkungan hidup berkualitas melalui pengelolaan sumber daya alam secara efisien	Pemantapan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan
		Perwujudan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan efisien yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendorong penerapan teknologi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif
		Perwujudan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan maupun pedesaan, serta konservasi lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan berbagai sektor lainnya
		Perwujudan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terintegrasi hulu hilir dengan pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu
2030	Meneguhkan resiliensi terhadap perubahan iklim dan bencana, serta lingkungan hidup berkualitas melalui pengelolaan sumber daya alam secara efisien	Perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan
		Peneguhan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan efisien yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendorong penerapan teknologi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif
		Peneguhan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan maupun pedesaan, serta konservasi lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan berbagai sektor lainnya
		Peneguhan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terintegrasi hulu hilir dengan pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu

Sumber: Tim Penyusun, 2025

Sasaran 4. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif sebagai berikut.

Tabel 3. 9 Strategi dan Arah Kebijakan Sasaran 4 RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Tahun	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
2026	Menguatkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian	Penguatan skema pola pengelolaan pariwisata daerah yang disertai pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat menuju pariwisata berkelanjutan



Tahun	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
	daerah melalui peningkatan produktivitas pariwisata, industri, dan perdagangan yang inklusif, ekosistem investasi yang kondusif, serta kemandirian desa,	Penguatan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau
		Penguatan sistem distribusi perdagangan dan jejaring pemasaran produk lokal
		Penguatan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian, kerja sama, perbaikan tata kelola dan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat
		Penguatan investasi daerah melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan
		Penguatan pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, mendorong klaster ekonomi lokal sesuai karakteristik wilayah, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian
		Penguatan reforma agraria dengan fokus pada kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), legalitas kepemilikan tanah, serta penyelesaian sengketa tanah
		Penguatan angkatan kerja yang berkualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hubungan industrial
		Penguatan daya saing koperasi dan UMKM yang disertai perluasan jejaring pemasaran produk lokal melalui kemitraan strategis
	Menguatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian	Penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat
		Penguatan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian
		Penguatan produksi perikanan melalui penguatan sistem usaha perikanan yang disertai diversifikasi komoditas dan peningkatan kualitas produk olahan perikanan menuju ekonomi biru
		Penguatan sistem irigasi untuk menjamin ketersediaan air sepanjang musim
2027	Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah melalui peningkatan produktivitas pariwisata, industri, dan perdagangan yang inklusif, ekosistem investasi yang kondusif, serta kemandirian desa,	Peningkatan skema pola pengelolaan pariwisata daerah yang disertai pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat menuju pariwisata berkelanjutan
		Peningkatan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau
		Peningkatan sistem distribusi perdagangan dan jejaring pemasaran produk lokal
		Peningkatan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian, kerja sama, perbaikan tata kelola dan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat
		Peningkatan investasi daerah melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan
		Peningkatan pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, mendorong klaster ekonomi lokal sesuai karakteristik wilayah, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian
		Peningkatan reforma agraria dengan fokus pada kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA),



Tahun	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
		legalitas kepemilikan tanah, serta penyelesaian sengketa tanah
		Peningkatan angkatan kerja yang berkualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hubungan industrial
		Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM yang disertai perluasan jejaring pemasaran produk lokal melalui kemitraan strategis
	Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian	Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat
		Peningkatan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian,
		Peningkatan produksi perikanan melalui penguatan sistem usaha perikanan yang disertai diversifikasi komoditas dan peningkatan kualitas produk olahan perikanan menuju ekonomi biru
		Peningkatan sistem irigasi untuk menjamin ketersediaan air sepanjang musim
	2028	Pemantapan skema pola pengelolaan pariwisata daerah yang disertai pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat menuju pariwisata berkelanjutan
		Pemantapan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau
		Pemantapan sistem distribusi perdagangan dan jejaring pemasaran produk lokal
		Pemantapan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian, kerja sama, perbaikan tata kelola dan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat
		Pemantapan investasi daerah melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan
		Pemantapan pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, mendorong klaster ekonomi lokal sesuai karakteristik wilayah, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian
		Pemantapan reforma agraria dengan fokus pada kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), legalitas kepemilikan tanah, serta penyelesaian sengketa tanah
		Pemantapan angkatan kerja yang berkualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hubungan industrial
		Pemantapan daya saing koperasi dan UMKM yang disertai perluasan jejaring pemasaran produk lokal melalui kemitraan strategis
		Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat
	Memantapkan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian	Pemantapan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian

Tahun	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
2029	Mewujudkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah melalui peningkatan produktivitas pariwisata, industri, dan perdagangan yang inklusif, ekosistem investasi yang kondusif, serta kemandirian desa,	Pemantapan produksi perikanan melalui penguatan sistem usaha perikanan yang disertai diversifikasi komoditas dan peningkatan kualitas produk olahan perikanan menuju ekonomi biru
		Pemantapan sistem irigasi untuk menjamin ketersediaan air sepanjang musim
		Perwujudan skema pola pengelolaan pariwisata daerah yang disertai pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat menuju pariwisata berkelanjutan
		Perwujudan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau
		Perwujudan sistem distribusi perdagangan dan jejaring pemasaran produk lokal
		Perwujudan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian, kerja sama, perbaikan tata kelola dan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat
		Perwujudan investasi daerah melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan
		Perwujudan pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, mendorong klaster ekonomi lokal sesuai karakteristik wilayah, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian
		Perwujudan reforma agraria dengan fokus pada kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), legalitas kepemilikan tanah, serta penyelesaian sengketa tanah
		Perwujudan angkatan kerja yang berkualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hubungan industrial
		Perwujudan daya saing koperasi dan UMKM yang disertai perluasan jejaring pemasaran produk lokal melalui kemitraan strategis
	Mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian	Perwujudan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat
		Perwujudan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian
		Perwujudan ekonomi biru melalui penguatan sistem usaha perikanan yang disertai diversifikasi komoditas dan peningkatan kualitas produk olahan perikanan
		Perwujudan swasambada air dan sistem irigasi untuk menjamin ketersediaan air sepanjang musim
2030	Meneguhkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah melalui peningkatan produktivitas pariwisata, industri, dan perdagangan	Peneguhan skema pola pengelolaan pariwisata daerah yang disertai pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat menuju pariwisata berkelanjutan
		Peneguhan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau
		Peneguhan sistem distribusi perdagangan dan jejaring pemasaran produk lokal

Tahun	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
	yang inklusif, ekosistem investasi yang kondusif, serta kemandirian desa,	Peneguhan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian, kerja sama, perbaikan tata kelola dan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat
		Peneguhan investasi daerah melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan
		Peneguhan pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, mendorong klaster ekonomi lokal sesuai karakteristik wilayah, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian
		Peneguhan reforma agraria dengan fokus pada kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), legalitas kepemilikan tanah, serta penyelesaian sengketa tanah
		Peneguhan angkatan kerja yang berkualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hubungan industrial
		Peneguhan daya saing koperasi dan UMKM yang disertai perluasan jejaring pemasaran produk lokal melalui kemitraan strategis
	Meneguhkan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian	Peneguhan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat
		Peneguhan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian
		Peneguhan ekonomi biru melalui penguatan sistem usaha perikanan yang disertai diversifikasi komoditas dan peningkatan kualitas produk olahan perikanan
		Peneguhan swasambada air dan sistem irigasi untuk menjamin ketersediaan air sepanjang musim

Sumber: Tim Penyusun, 2025

Sasaran 5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif sebagai berikut.

Tabel 3. 10 Strategi dan Arah Kebijakan Sasaran 5 RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Tahun	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
2026	Menguatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Penguatan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi
		Penguatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset
		Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)



Tahun	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
		Penguatan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah dengan penguatan kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah
		Penguatan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB, serta pemanfaatan barang milik daerah
		Penguatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi
	Menguatkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas inovasi dan digitalisasi pemerintahan	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik
		Penguatan infrastruktur kelurahan serta dukungan pada kecamatan berdaya
		Penguatan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku
		Penguatan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi
		Penguatan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif
	Menguatkan kondusivitas wilayah dengan mendorong partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pihak	Penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi, serta peningkatan kapasitas, integritas, dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi
		Penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan, serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan
2027	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Peningkatan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi
		Peningkatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset
		Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
		Peningkatan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah dengan peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah
		Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB, serta pemanfaatan barang milik daerah
		Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi
	Meningkatkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas inovasi dan digitalisasi pemerintahan	Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik
		Peningkatan infrastruktur kelurahan serta dukungan pada kecamatan berdaya
		Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data



Tahun	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
		kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku
		Peningkatan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi
		Peningkatan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif
	Meningkatkan kondusivitas wilayah dengan mendorong partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pihak	Peningkatan ideologi Pancasila dan demokrasi, serta peningkatan kapasitas, integritas, dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi
		Peningkatan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan, serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan
2028	Memantapkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Pemantapan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi
		Pemantapan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset
		Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
		Pemantapan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah dengan pemantapan kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah
		Pemantapan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB, serta pemanfaatan barang milik daerah
		Pemantapan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi
	Memantapkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas inovasi dan digitalisasi pemerintahan	Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik
		Pemantapan infrastruktur kelurahan serta dukungan pada kecamatan berdaya
		Pemantapan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku
		Pemantapan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi
		Pemantapan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif
	Memantapkan kondusivitas wilayah dengan mendorong partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pihak	Pemantapan ideologi Pancasila dan demokrasi, serta peningkatan kapasitas, integritas, dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi
		Pemantapan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan, serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan
2029	Mewujudkan akuntabilitas kinerja	Perwujudan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi



Tahun	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
	dan keuangan pemerintah daerah	Perwujudan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset
		Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
		Perwujudan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah melalui kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah
		Perwujudan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB, serta pemanfaatan barang milik daerah
		Perwujudan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi
	Mewujudkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas inovasi dan digitalisasi pemerintahan	Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik
		Perwujudan infrastruktur kelurahan serta dukungan pada kecamatan berdaya
		Perwujudan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (<i>non pemerintah</i>) sesuai dengan standar yang berlaku
		Perwujudan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi
		Perwujudan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif
	Mewujudkan kondusivitas wilayah dengan mendorong partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pihak	Perwujudan ideologi Pancasila dan demokrasi, serta peningkatan kapasitas, integritas, dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi
		Perwujudan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan, serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan
2030	Meneguhkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Peneguhan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi
		Peneguhan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset
		Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
		Perwujudan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah melalui kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah
		Peneguhan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB, serta pemanfaatan barang milik daerah
		Peneguhan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi
	Meneguhkan reformasi birokrasi	Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik

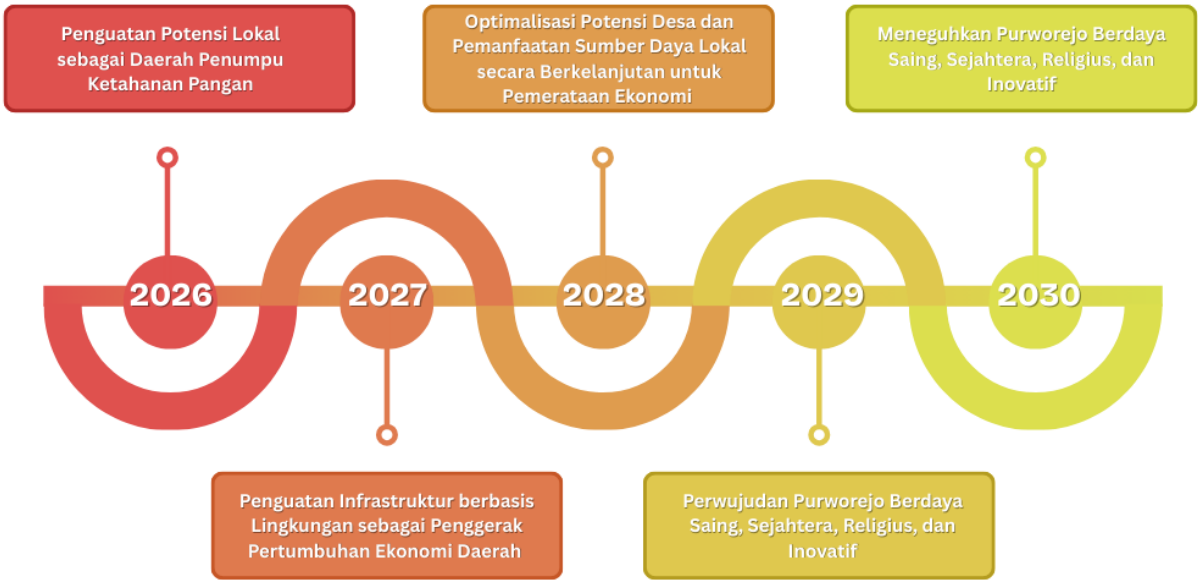
Tahun	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
	melalui peningkatan kualitas inovasi dan digitalisasi pemerintahan	Peneguhan infrastruktur kelurahan serta dukungan pada kecamatan berdaya
		Peneguhan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku
		Peneguhan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi
		Peneguhan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif
	Meneguhkan kondusivitas wilayah dengan mendorong partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pihak	Peneguhan ideologi Pancasila dan demokrasi, serta peningkatan kapasitas, integritas, dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi
		Peneguhan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan, serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan

Sumber: Tim Penyusun, 2025

Dalam rangka menetapkan arah prioritas serta fokus pelaksanaan strategi dan kebijakan setiap tahun selama lima tahun kedepan, disusunlah tahapan kebijakan pembangunan daerah. Tahapan ini merupakan penjabaran prioritas pembangunan tahunan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran kepala daerah. Fokus kebijakan pembangunan Kabupaten Purworejo untuk periode tahun 2025-2029 juga mempertimbangkan tahapan pembangunan RPJPD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045. Dimana RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama pelaksanaan RPJPD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 yang berfokus pada penguatan fondasi pembangunan, dengan upaya kebijakan jangka menengah yang harus dilakukan pada tahap ini adalah:

1. Penguatan landasan untuk peningkatan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan;
2. Pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan ketahanan sosial budaya yang terintegrasi;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dengan menggunakan prinsip keterpaduan dalam rangka menciptakan aksesibilitas dan konektivitas menuju pusat pelayanan dasar dan penggerak ekonomi;
4. Memperkuat ketahanan ekologi dan manajemen risiko sebagai landasan dan modal dasar pembangunan; dan Membangun tata kelola pemerintahan dan desa tepat fungsi.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka ditetapkanlah fokus kebijakan pembangunan daerah tahunan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 sebagai berikut.



Gambar 3. 3 Pentahapan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029
Sumber: Tim Penyusun, 2025

Tahap 1 (2026): Penguatan Potensi Lokal sebagai Daerah Penumpu Ketahanan Pangan

Arah kebijakan pada tahap pertama pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purworejo tahun 2026 diarahkan untuk terfokus pada upaya penguatan potensi lokal sebagai pondasi utama dalam memperkuat posisi Kabupaten Purworejo sebagai daerah penumpu pangan. Fokus ini diwujudkan melalui upaya sebagai berikut.

1. Penguatan kapasitas pelaku ekonomi lokal dan pengelolaan potensi unggulan berbasis sumber daya lokal untuk mendukung produktivitas dan ketahanan pangan.
2. Peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah.
3. Pemetaan kebutuhan dan kondisi infrastruktur wilayah secara menyeluruh, serta peningkatan kualitas dan keterjangkauan infrastruktur dasar.
4. Penguatan dasar dan optimalisasi sumber daya layanan pendidikan dan kesehatan dasar yang inklusif serta penguatan nilai keagamaan, budaya lokal, dan interaksi sosial di masyarakat.
5. Penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan dasar dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan berbasis data lokal terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan potensi unggulan daerah.

Sejalan dengan fokus kebijakan tersebut, pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan prioritas pembangunan daerah guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi.

1. Penguatan kapasitas pelaku ekonomi lokal dan pengelolaan potensi unggulan berbasis sumber daya lokal untuk mendukung produktivitas dan ketahanan pangan, yang dicapai dengan arah kebijakan:

- a. Penguatan skema pola pengelolaan pariwisata daerah yang disertai pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat menuju pariwisata berkelanjutan.
 - b. Penguatan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau.
 - c. Penguatan sistem distribusi perdagangan dan jejaring pemasaran produk lokal.
 - d. Penguatan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian, kerja sama, perbaikan tata kelola dan lembaga ekonomi desa. serta pemberdayaan masyarakat.
 - e. Penguatan investasi daerah melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan.
 - f. Penguatan pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, mendorong klaster ekonomi lokal sesuai karakteristik wilayah, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian
 - g. Penguatan reforma agraria dengan fokus pada kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), legalitas kepemilikan tanah, serta penyelesaian sengketa tanah.
 - h. Penguatan angkatan kerja yang berkualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hubungan industrial.
 - i. Penguatan daya saing koperasi dan UMKM yang disertai perluasan jejaring pemasaran produk lokal melalui kemitraan strategis.
 - j. Penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat.
 - k. Penguatan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian.
 - l. Penguatan produksi perikanan melalui penguatan sistem usaha perikanan yang disertai diversifikasi komoditas dan peningkatan kualitas produk olahan perikanan menuju ekonomi biru.
 - m. Penguatan sistem irigasi untuk menjamin ketersediaan air sepanjang musim.
2. Peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah, yang dicapai melalui arah kebijakan yang meliputi:
- a. Penguatan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan efisien yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendorong penerapan teknologi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif.
 - b. Penguatan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan maupun pedesaan, serta konservasi lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan berbagai sektor lainnya.

- c. Penguatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terintegrasi hulu hilir dengan pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu.
 - d. Penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana. penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan.
3. Pemetaan kebutuhan dan kondisi infrastruktur wilayah secara menyeluruh, serta peningkatan kualitas dan keterjangkauan infrastruktur dasar, yang dicapai melalui arah kebijakan berupa:
- a. Penguatan pengembangan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi, serta pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.
 - b. Penguatan penyediaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap beserta infrastruktur dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka optimalisasi penyediaan pangan dan kemudahan akses menuju destinasi wisata.
 - c. Penguatan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap perumahan yang layak huni dan terjangkau, utamanya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan korban bencana di perkotaan maupun pedesaan.
4. Penguatan dasar dan optimalisasi sumber daya layanan pendidikan dan kesehatan dasar yang inklusif serta penguatan nilai keagamaan, budaya lokal, dan interaksi sosial di masyarakat, yang dicapai melalui arah kebijakan berupa:
- a. Penguatan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui layanan pendidikan inklusif baik formal maupun nonformal, penguatan mutu, pembentukan karakter melalui pengembangan kurikulum lokal sesuai nilai-nilai luhur budaya daerah, dan kualitas pendidikan yang didukung oleh pemenuhan sarana prasarana yang memadai, pemerataan dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, serta tata kelola perizinan satuan pendidikan guna menjamin mutu dan kepatuhan terhadap standar nasional pendidikan.
 - b. Penguatan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat serta pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan berkarakter.
 - c. Penguatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, perbaikan tata kelola dan basis data, pemberdayaan sosial ekonomi kelompok rentan dan miskin secara kolaboratif dan multisektor, penguatan kebijakan, perlindungan sosial yang berkeadilan, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan

- terhadap PPKS serta pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk.
- d. Penguatan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana.
 - e. Penguatan kesetaraan gender melalui penguatan peran dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, peningkatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, penurunan kekerasan berbasis gender, dan penyediaan data pilah gender yang berkualitas.
 - f. Penguatan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non keolahragaan melalui pembinaan, pengembangan dan optimalisasi fasilitas olahraga.
 - g. Penguatan peran kebudayaan berbasis kearifan lokal, nilai-nilai sejarah dalam pembentukan karakter, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan optimalisasi perlindungan. Pengembangan, pembinaan, serta pemanfaatan objek pemajuan budaya, kesenian tradisional, cagar budaya, dan museum.
 - h. Penguatan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar, pemenuhan mutu dan kualitas pelayanan secara optimal, sistem rujukan yang terintegrasi, serta memastikan akses dan keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat dengan menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
 - i. Penguatan pemetaan, penataan, dan distribusi sumberdaya kesehatan daerah dalam rangka menyediakan sumberdaya kesehatan yang kompeten dan sesuai standar.
 - j. Penguatan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat sehingga terwujud masyarakat dengan kualitas hidup yang sehat.
5. Penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan dasar dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan, pengawasan, dan pengembalian keputusan berbasis data lokal terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan potensi unggulan daerah, yang dicapai melalui arah kebijakan berupa:
- a. Penguatan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi
 - b. Penguatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset.
 - c. Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
 - d. Penguatan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah dengan penguatan kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah.
 - e. Penguatan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB.

- f. Penguatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi.
- g. Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik.
- h. Penguatan infrastruktur kelurahan serta dukungan pada kecamatan berdaya.
- i. Penguatan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku.
- j. Penguatan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi
- k. Penguatan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif
- l. Penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi, serta peningkatan kapasitas, integritas, dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi.
- m. Penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan, serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan.

Tahap 2 (2027): Penguatan Infrastruktur berbasis lingkungan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pada tahun kedua pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purworejo, arah kebijakan pembangunan tahun 2027 diarahkan pada penguatan infrastruktur yang berbasis lingkungan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur difokuskan untuk mendukung konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus ini diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:

- 1. Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi.
- 2. Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 3. Pengembangan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.
- 4. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat.
- 5. Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien,

transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan.

Sejalan dengan fokus kebijakan tersebut, pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan prioritas pembangunan daerah guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi:

1. Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi, yang dicapai melalui arah kebijakan berupa:
 - a. Peningkatan pengembangan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi, serta pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi
 - b. Peningkatan penyediaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap beserta infrastruktur dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka optimalisasi penyediaan pangan dan kemudahan akses menuju destinasi wisata
 - c. Peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap perumahan yang layak huni dan terjangkau, utamanya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan korban bencana di perkotaan maupun pedesaan.
2. Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang dicapai melalui arah kebijakan berupa:
 - a. Peningkatan skema pola pengelolaan pariwisata daerah yang disertai pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat menuju pariwisata berkelanjutan.
 - b. Peningkatan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau.
 - c. Peningkatan sistem distribusi perdagangan dan jejaring pemasaran produk lokal.
 - d. Peningkatan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian, kerja sama, perbaikan tata kelola dan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat.
 - e. Peningkatan investasi daerah melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan.
 - f. Peningkatan pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, mendorong klaster ekonomi lokal sesuai karakteristik wilayah, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian
 - g. Peningkatan reforma agraria dengan fokus pada kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). legalitas kepemilikan tanah, serta penyelesaian sengketa tanah.
 - h. Peningkatan angkatan kerja yang berkualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hubungan industrial.

- i. Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM yang disertai perluasan jejaring pemasaran produk lokal melalui kemitraan strategis.
 - j. Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat.
 - k. Peningkatan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian.
 - l. Peningkatan produksi perikanan melalui penguatan sistem usaha perikanan yang disertai diversifikasi komoditas dan peningkatan kualitas produk olahan perikanan menuju ekonomi biru
 - m. Peningkatan sistem irigasi untuk menjamin ketersediaan air sepanjang musim
3. Pengembangan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau, yang dicapai melalui arah kebijakan berupa:
 - a. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan efisien yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendorong penerapan teknologi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif.
 - b. Peningkatan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan maupun pedesaan, serta konservasi lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan berbagai sektor lainnya.
 - c. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terintegrasi hulu hilir dengan pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu.
 - d. Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan.
4. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat, yang dicapai melalui arah kebijakan berupa:
 - a. Peningkatan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui layanan pendidikan inklusif baik formal maupun nonformal, peningkatan mutu, pembentukan karakter melalui pengembangan kurikulum lokal sesuai nilai-nilai luhur budaya daerah, dan kualitas pendidikan yang didukung oleh pemenuhan sarana prasarana yang memadai, pemerataan dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, serta tata kelola perizinan satuan pendidikan guna menjamin mutu dan kepatuhan terhadap standar nasional pendidikan.
 - b. Peningkatan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat serta pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno sebagai

bagian dari upaya membangun masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan berkarakter.

- c. Peningkatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, perbaikan tata kelola dan basis data, pemberdayaan sosial ekonomi kelompok rentan dan miskin secara kolaboratif dan multisektor, penguatan kebijakan, perlindungan sosial yang berkeadilan, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan terhadap PPKS serta pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk.
 - d. Peningkatan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana.
 - e. Peningkatan kesetaraan gender melalui penguatan peran dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, peningkatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, penurunan kekerasan berbasis gender, dan penyediaan data pilah gender yang berkualitas.
 - f. Peningkatan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non keolahragaan melalui pembinaan, pengembangan dan optimalisasi fasilitas olahraga.
 - g. Peningkatan peran kebudayaan berbasis kearifan lokal, nilai-nilai sejarah dalam pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan optimalisasi perlindungan, pengembangan, pembinaan, serta pemanfaatan objek pemajuan budaya, kesenian tradisional, cagar budaya, dan museum.
 - h. Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar, pemenuhan mutu dan kualitas pelayanan secara optimal, sistem rujukan yang terintegrasi, serta memastikan akses dan keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat dengan menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
 - i. Peningkatan pemetaan, penataan, dan distribusi sumberdaya kesehatan daerah dalam rangka menyediakan sumberdaya kesehatan yang kompeten dan sesuai standar.
 - j. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat sehingga terwujud masyarakat dengan kualitas hidup yang sehat.
5. Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan, yang dicapai melalui arah kebijakan berupa:
- a. Peningkatan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi.
 - b. Peningkatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset.

- c. Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- d. Peningkatan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah dengan peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah.
- e. Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB.
- f. Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi.
- g. Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik
- h. Peningkatan infrastruktur kelurahan serta dukungan pada kecamatan berdaya
- i. Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku.
- j. Peningkatan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi
- k. Peningkatan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif
- l. Peningkatan ideologi Pancasila dan demokrasi. serta peningkatan kapasitas, integritas, dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi.
- m. Peningkatan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan, serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan.

Tahap 3 (2028): Optimalisasi Potensi Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal secara Berkelanjutan untuk Pemerataan Ekonomi

Pada tahun ketiga pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purworejo, arah kebijakan pembangunan tahun 2028 difokuskan pada optimalisasi potensi desa dan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan sebagai strategi utama dalam mendorong pemerataan ekonomi. Fokus ini diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:

- 1. Peningkatan efektivitas produksi pengolahan sumber daya lokal dan distribusi hasil ekonomi lokal melalui efisiensi rantai pasok, pengembangan ekosistem kemitraan untuk mendukung pemerataan ekonomi.
- 2. Percepatan pemerataan akses layanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan sosial budaya melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan pemberdayaan komunitas.

3. Penguatan peran desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal berkelanjutan serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendorong pemerataan ekonomi.
4. Pengembangan konektivitas wilayah melalui pengembangan sistem jaringan transportasi dan logistik yang efisien dan terintegrasi.
5. Peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan kapasitas aparatur, digitalisasi administrasi, dan sistem pengelolaan pembangunan desa yang akuntabel dan partisipatif, guna mendorong pemerataan layanan dan keadilan pembangunan di wilayah perdesaan

Sejalan dengan fokus kebijakan tersebut, pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan prioritas pembangunan daerah guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi:

1. Peningkatan efektivitas produksi pengolahan sumber daya lokal dan distribusi hasil ekonomi lokal melalui efisiensi rantai pasok, pengembangan ekosistem kemitraan untuk mendukung pemerataan ekonomi, yang dicapai melalui arah kebijakan berupa:
 - a. Pemantapan skema pola pengelolaan pariwisata daerah yang disertai pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat menuju pariwisata berkelanjutan.
 - b. Pemantapan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau.
 - c. Pemantapan sistem distribusi perdagangan dan jejaring pemasaran produk lokal.
 - d. Pemantapan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian, kerja sama, perbaikan tata kelola dan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat.
 - e. Pemantapan investasi daerah melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan.
 - f. Pemantapan pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, mendorong klaster ekonomi lokal sesuai karakteristik wilayah, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian
 - g. Pemantapan reforma agraria dengan fokus pada kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), legalitas kepemilikan tanah, serta penyelesaian sengketa tanah.
 - h. Pemantapan angkatan kerja yang berkualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hubungan industrial.
 - i. Pemantapan daya saing koperasi dan UMKM yang disertai perluasan jejaring pemasaran produk lokal melalui kemitraan strategis.
 - j. Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat.
 - k. Pemantapan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan

- kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian.
1. Pemantapan produksi perikanan melalui penguatan sistem usaha perikanan yang disertai diversifikasi komoditas dan peningkatan kualitas produk olahan perikanan menuju ekonomi biru.
 - m. Pemantapan sistem irigasi untuk menjamin ketersediaan air sepanjang musim.
 2. Percepatan pemerataan akses layanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan sosial budaya melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan pemberdayaan komunitas, yang dicapai melalui arah kebijakan berupa:
 - a. Pemantapan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui layanan pendidikan inklusif baik formal maupun nonformal, pemantapan mutu, pembentukan karakter melalui pengembangan kurikulum lokal sesuai nilai-nilai luhur budaya daerah, dan kualitas pendidikan yang didukung oleh pemenuhan sarana prasarana yang memadai, pemerataan dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, serta tata kelola perizinan satuan pendidikan guna menjamin mutu dan kepatuhan terhadap standar nasional pendidikan.
 - b. Pemantapan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat serta pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan berkarakter.
 - c. Pemantapan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, perbaikan tata kelola dan basis data, pemberdayaan sosial ekonomi kelompok rentan dan miskin secara kolaboratif dan multisektor, penguatan kebijakan. perlindungan sosial yang berkeadilan, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan terhadap PPKS serta pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk.
 - d. Pemantapan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana.
 - e. Pemantapan kesetaraan gender melalui penguatan peran dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, peningkatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, penurunan kekerasan berbasis gender, dan penyediaan data pilah gender yang berkualitas.
 - f. Pemantapan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non keolahragaan melalui pembinaan. pengembangan dan optimalisasi fasilitas olahraga.
 - g. Pemantapan peran kebudayaan berbasis kearifan lokal, nilai-nilai sejarah dalam pembentukan karakter serta peningkatan

- kesejahteraan masyarakat dengan optimalisasi perlindungan, pengembangan, pembinaan, serta pemanfaatan objek pemajuan budaya, kesenian tradisional, cagar budaya, dan museum.
- h. Pemantapan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar, pemenuhan mutu dan kualitas pelayanan secara optimal, sistem rujukan yang terintegrasi, serta memastikan akses dan keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat dengan menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
 - i. Pemantapan pemetaan, penataan, dan distribusi sumberdaya kesehatan daerah dalam rangka menyediakan sumberdaya kesehatan yang kompeten dan sesuai standar.
 - j. Pemantapan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat sehingga terwujud masyarakat dengan kualitas hidup yang sehat.
3. Penguatan peran desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal berkelanjutan serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendorong pemerataan ekonomi, yang dicapai melalui arah kebijakan berupa:
- a. Pemantapan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan efisien yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendorong penerapan teknologi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif.
 - b. Pemantapan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan maupun pedesaan, serta konservasi lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan berbagai sektor lainnya.
 - c. Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terintegrasi hulu hilir dengan pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu.
 - d. Pemantapan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan.
4. Pengembangan konektivitas wilayah melalui pengembangan sistem jaringan transportasi dan logistik yang efisien dan terintegrasi, yang dicapai melalui arah kebijakan berupa:
- a. Pemantapan pengembangan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi, serta pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.
 - b. Pemantapan penyediaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap beserta infrastruktur dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka optimalisasi penyediaan pangan dan kemudahan akses menuju destinasi wisata.

- c. Pemantapan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap perumahan yang layak huni dan terjangkau, utamanya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan korban bencana di perkotaan maupun pedesaan.
- 5. Peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan kapasitas aparatur. digitalisasi administrasi. dan sistem pengelolaan pembangunan desa yang akuntabel dan partisipatif. guna mendorong pemerataan layanan dan keadilan pembangunan di wilayah perdesaan, yang dicapai melalui arah kebijakan berupa:
 - a. Pemantapan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi.
 - b. Pemantapan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset.
 - c. Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
 - d. Pemantapan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah dengan pemantapan kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah.
 - e. Pemantapan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB.
 - f. Pemantapan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi.
 - g. Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik.
 - h. Pemantapan infrastruktur kelurahan serta dukungan pada kecamatan berdaya
 - i. Pemantapan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku.
 - j. Pemantapan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi
 - k. Pemantapan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif
 - l. Pemantapan ideologi Pancasila dan demokrasi. serta peningkatan kapasitas, integritas, dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi.
 - m. Pemantapan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan, serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan.

Tahap 4 (2029): Perwujudan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif

Memasuki tahun keempat pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purworejo, arah kebijakan pembangunan tahun 2029 diarahkan pada konsolidasi capaian pembangunan dan transformasi menyeluruh untuk mewujudkan Purworejo yang berdaya saing, sejahtera, religius, dan inovatif. Fokus ini diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:

1. Transformasi kualitas sumber daya manusia yang mendukung perwujudan lingkungan yang sehat, berbudaya, dan sejahtera.
2. Transformasi kualitas infrastruktur wilayah serta sistem transportasi yang terintegrasi dan terwujudnya konektivitas menuju pusat pelayanan dan pergerakan ekonomi.
3. Transformasi pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana berbasis inovasi dan teknologi untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing wilayah.
4. Penguatan sistem ekonomi daerah yang berdaya saing melalui inovasi produk unggulan berbasis teknologi serta transformasi digital dalam tata kelola ekonomi lokal dalam rangka mendukung perwujudan ekonomi daerah yang berdaya saing.
5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan integratif berbasis teknologi digital serta nilai-nilai religius dan budaya lokal, untuk memperkuat kepercayaan publik, efisiensi pelayanan, serta daya saing kelembagaan pemerintahan daerah dan desa.

Sejalan dengan fokus kebijakan tersebut, pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan prioritas pembangunan daerah guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi:

1. Transformasi kualitas sumber daya manusia yang mendukung perwujudan lingkungan yang sehat, berbudaya, dan sejahtera, yang diwujudkan melalui upaya berupa:
 - a. Perwujudan penerapan wajib belajar 13 tahun melalui layanan pendidikan inklusif baik formal maupun nonformal, mutu yang berkualitas, pembentukan karakter melalui pengembangan kurikulum lokal sesuai nilai-nilai luhur budaya daerah, dan kualitas pendidikan yang didukung oleh pemenuhan sarana prasarana yang memadai, pemerataan dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, serta tata kelola perizinan satuan pendidikan guna menjamin mutu dan kepatuhan terhadap standar nasional pendidikan.
 - b. Perwujudan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat serta pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan berkarakter.
 - c. Perwujudan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, perbaikan tata kelola dan basis data, pemberdayaan sosial ekonomi kelompok rentan dan miskin secara

- kolaboratif dan multisektor, penguatan kebijakan, perlindungan sosial yang berkeadilan, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan terhadap PPKS serta pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk.
- d. Perwujudan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana.
 - e. Perwujudan kesetaraan gender melalui penguatan peran dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, peningkatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, penurunan kekerasan berbasis gender, dan penyediaan data pilah gender yang berkualitas.
 - f. Perwujudan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non keolahragaan melalui pembinaan, pengembangan dan optimalisasi fasilitas olahraga.
 - g. Perwujudan peran kebudayaan berbasis kearifan lokal, nilai-nilai sejarah dalam pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan optimalisasi perlindungan, pengembangan, pembinaan, serta pemanfaatan objek pemajuan budaya, kesenian tradisional, cagar budaya, dan museum.
 - h. Perwujudan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar, pemenuhan mutu dan kualitas pelayanan secara optimal, sistem rujukan yang terintegrasi, serta memastikan akses dan keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat dengan menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
 - i. Perwujudan pemetaan, penataan, dan distribusi sumberdaya kesehatan daerah dalam rangka menyediakan sumberdaya kesehatan yang kompeten dan sesuai standar.
 - j. Perwujudan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat sehingga terwujud masyarakat dengan kualitas hidup yang sehat.
2. Transformasi kualitas infrastruktur wilayah serta sistem transportasi yang terintegrasi dan terwujudnya konektivitas menuju pusat pelayanan dan pergerakan ekonomi, yang diwujudkan melalui upaya berupa:
- a. Perwujudan pengembangan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi, serta pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi
 - b. Perwujudan penyediaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap beserta infrastruktur dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka optimalisasi penyediaan pangan dan kemudahan akses menuju destinasi wisata.
 - c. Perwujudan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap perumahan yang layak huni dan terjangkau, utamanya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan korban bencana di perkotaan maupun pedesaan.

3. Transformasi pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana berbasis inovasi dan teknologi untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing wilayah, yang diwujudkan melalui upaya berupa:
 - a. Perwujudan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan efisien yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendorong penerapan teknologi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif.
 - b. Perwujudan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan maupun pedesaan, serta konservasi lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan berbagai sektor lainnya.
 - c. Perwujudan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terintegrasi hulu hilir dengan pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu.
 - d. Perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana. serta kolaborasi antar pemangku kepentingan.
4. Penguatan sistem ekonomi daerah yang berdaya saing melalui inovasi produk unggulan berbasis teknologi serta transformasi digital dalam tata kelola ekonomi lokal dalam rangka mendukung perwujudan ekonomi daerah yang berdaya saing, yang diwujudkan melalui upaya berupa:
 - a. Perwujudan skema pola pengelolaan pariwisata daerah yang disertai pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat menuju pariwisata berkelanjutan
 - b. Perwujudan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau.
 - c. Perwujudan sistem distribusi perdagangan dan jejaring pemasaran produk lokal.
 - d. Perwujudan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian, kerja sama, perbaikan tata kelola dan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat.
 - e. Perwujudan investasi daerah melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan.
 - f. Perwujudan pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, mendorong klaster ekonomi lokal sesuai karakteristik wilayah, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian
 - g. Perwujudan reforma agraria dengan fokus pada kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), legalitas kepemilikan tanah, serta penyelesaian sengketa tanah.
 - h. Perwujudan angkatan kerja yang berkualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hubungan industrial

- i. Perwujudan daya saing koperasi dan UMKM yang disertai perluasan jejaring pemasaran produk lokal melalui kemitraan strategis
 - j. Perwujudan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat.
 - k. Perwujudan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian.
 - l. Perwujudan ekonomi biru melalui penguatan sistem usaha perikanan yang disertai diversifikasi komoditas dan peningkatan kualitas produk olahan perikanan.
 - m. Perwujudan swasambada air dan sistem irigasi untuk menjamin ketersediaan air sepanjang musim
5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan integratif berbasis teknologi digital serta nilai-nilai religius dan budaya lokal. untuk memperkuat kepercayaan publik. efisiensi pelayanan. serta daya saing kelembagaan pemerintahan daerah, yang diwujudkan melalui upaya berupa:
- a. Perwujudan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi.
 - b. Perwujudan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset.
 - c. Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
 - d. Perwujudan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah melalui kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah.
 - e. Perwujudan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB.
 - f. Perwujudan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi.
 - g. Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik.
 - h. Perwujudan infrastruktur kelurahan serta dukungan pada kecamatan berdaya
 - i. Perwujudan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil. serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku.
 - j. Perwujudan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi
 - k. Perwujudan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif
 - l. Perwujudan ideologi Pancasila dan demokrasi, serta peningkatan kapasitas, integritas, dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi.

- m. Perwujudan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama. moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan, serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan.

Tahap 5 (2030): Meneguhkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius dan Inovatif

Tahun 2030 merupakan tonggak penting yang menandai awal tahap kedua pelaksanaan RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045, sekaligus menjadi momentum untuk meneguhkan berbagai capaian pembangunan yang telah dirintis dalam RPJMD 2025-2029. Arah kebijakan pembangunan pada tahun ini difokuskan pada konsolidasi dan penguatan sistem tata kelola daerah secara menyeluruh guna memastikan keberlanjutan transformasi menuju Purworejo yang berdaya saing, sejahtera, religius, dan inovatif. Fokus ini diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:

1. Konsolidasi sistem tata kelola pemerintahan dan desa yang tangguh. adaptif. serta terintegrasi secara digital dan fungsional. untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik yang responsif, partisipatif, dan selaras dengan prinsip-prinsip smart governance yang religius dan berdaya saing.
2. Peningkatan mutu dan keberlanjutan sumber daya manusia yang kompeten dan produktif dengan karakter religius dan budaya lokal yang kuat.
3. Konsolidasi sistem infrastruktur wilayah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan guna menjamin keberlanjutan akses dan konektivitas antarwilayah, mendukung pelayanan dasar serta mendorong daya saing ekonomi lokal.
4. Peneguhan tata kelola lingkungan hidup dan ketahanan bencana yang inklusif dan berkelanjutan sebagai pilar pembangunan daerah yang berkelanjutan.
5. Peneguhan struktur ekonomi daerah yang unggul dan inklusif melalui konsolidasi transformasi digital, penguatan kelembagaan, serta penciptaan inovasi berkelanjutan demi masyarakat sejahtera.

Sejalan dengan fokus kebijakan tersebut, pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan prioritas pembangunan daerah guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi:

1. Konsolidasi sistem tata kelola pemerintahan yang tangguh. adaptif. serta terintegrasi secara digital dan fungsional. untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik yang responsif. partisipatif. dan selaras dengan prinsip-prinsip smart governance yang religius dan berdaya saing, yang diwujudkan melalui arah kebijakan berupa:
 - a. Peneguhan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi.
 - b. Peneguhan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset.
 - c. Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

- d. Perwujudan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah melalui kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah.
 - e. Peneguhan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB
 - f. Peneguhan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi.
 - g. Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik.
 - h. Peneguhan infrastruktur kelurahan serta dukungan pada kecamatan berdaya
 - i. Peneguhan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku.
 - j. Peneguhan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi
 - k. Peneguhan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif
 - l. Peneguhan ideologi Pancasila dan demokrasi, serta peningkatan kapasitas, integritas, dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi.
 - m. Peneguhan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan, serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan.
2. Peningkatan mutu dan keberlanjutan sumber daya manusia yang kompeten dan produktif dengan karakter religius dan budaya lokal yang kuat, yang diwujudkan melalui arah kebijakan berupa:
- a. Peneguhan penerapan wajib belajar 13 tahun melalui layanan pendidikan inklusif baik formal maupun nonformal, mutu yang berkualitas, pembentukan karakter melalui pengembangan kurikulum lokal sesuai nilai-nilai luhur budaya daerah, dan kualitas pendidikan yang didukung oleh pemenuhan sarana prasarana yang memadai, pemerataan dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, serta tata kelola perizinan satuan pendidikan guna menjamin mutu dan kepatuhan terhadap standar nasional pendidikan.
 - b. Peneguhan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat serta pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan berkarakter.
 - c. Peneguhan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-

- kantong kemiskinan, perbaikan tata kelola dan basis data, pemberdayaan sosial ekonomi kelompok rentan dan miskin secara kolaboratif dan multisektor, penguatan kebijakan, perlindungan sosial yang berkeadilan, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan terhadap PPKS serta pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk.
- d. Peneguhan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana.
 - e. Peneguhan kesetaraan gender melalui penguatan peran dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, peningkatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, penurunan kekerasan berbasis gender, dan penyediaan data pilah gender yang berkualitas.
 - f. Peneguhan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non keolahragaan melalui pembinaan, pengembangan dan optimalisasi fasilitas olahraga.
 - g. Peneguhan peran kebudayaan berbasis kearifan lokal, nilai-nilai sejarah dalam pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan optimalisasi perlindungan, pengembangan, pembinaan, serta pemanfaatan objek pemajuan budaya, kesenian tradisional, cagar budaya, dan museum.
 - h. Peneguhan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar, pemenuhan mutu dan kualitas pelayanan secara optimal, sistem rujukan yang terintegrasi, serta memastikan akses dan keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat dengan menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
 - i. Peneguhan pemetaan, penataan, dan distribusi sumberdaya kesehatan daerah dalam rangka menyediakan sumberdaya kesehatan yang kompeten dan sesuai standar
 - j. Peneguhan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat sehingga terwujud masyarakat dengan kualitas hidup yang sehat
3. Konsolidasi sistem infrastruktur wilayah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan guna menjamin keberlanjutan akses dan konektivitas antarwilayah, mendukung pelayanan dasar serta mendorong daya saing ekonomi lokal, yang diwujudkan melalui arah kebijakan berupa:
- a. Peneguhan pengembangan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi, serta pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.
 - b. Peneguhan penyediaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap beserta infrastruktur dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka optimalisasi penyediaan pangan dan kemudahan akses menuju destinasi wisata.

- c. Peneguhan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap perumahan yang layak huni dan terjangkau. utamanya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan korban bencana di perkotaan maupun pedesaan.
4. Peneguhan tata kelola lingkungan hidup dan ketahanan bencana yang inklusif dan berkelanjutan sebagai pilar pembangunan daerah yang berkelanjutan, yang diwujudkan melalui arah kebijakan berupa:
 - a. Peneguhan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan efisien yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendorong penerapan teknologi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif.
 - b. Peneguhan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan maupun pedesaan, serta konservasi lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan berbagai sektor lainnya.
 - c. Peneguhan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terintegrasi hulu hilir dengan pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu.
 - d. Peneguhan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana. penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan
5. Peneguhan struktur ekonomi daerah yang unggul dan inklusif melalui konsolidasi transformasi digital, penguatan kelembagaan, serta penciptaan inovasi berkelanjutan demi masyarakat sejahtera, yang diwujudkan melalui arah kebijakan berupa:
 - a. Peneguhan skema pola pengelolaan pariwisata daerah yang disertai pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat menuju pariwisata berkelanjutan.
 - b. Peneguhan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau.
 - c. Peneguhan sistem distribusi perdagangan dan jejaring pemasaran produk lokal.
 - d. Peneguhan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian, kerja sama, perbaikan tata kelola dan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat.
 - e. Peneguhan investasi daerah melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan.
 - f. Peneguhan pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, mendorong klaster ekonomi lokal sesuai karakteristik wilayah, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
 - g. Peneguhan reforma agraria dengan fokus pada kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), legalitas kepemilikan tanah, serta penyelesaian sengketa tanah.

- h. Peneguhan angkatan kerja yang berkualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hubungan industrial.
- i. Peneguhan daya saing koperasi dan UMKM yang disertai perluasan jejaring pemasaran produk lokal melalui kemitraan strategis.
- j. Peneguhan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat.
- k. Peneguhan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian.
- l. Peneguhan ekonomi biru melalui penguatan sistem usaha perikanan yang disertai diversifikasi komoditas dan peningkatan kualitas produk olahan perikanan.
- m. Peneguhan swasambada air dan sistem irigasi untuk menjamin ketersediaan air sepanjang musim.



Tabel 3. 11 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

2026	2027	2028	2029	2030
Penguatan Potensi Lokal sebagai Daerah Penumpu Ketahanan Pangan	Penguatan Infrastruktur berbasis Lingkungan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Optimalisasi Potensi Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal secara Berkelanjutan untuk Pemerataan Ekonomi	Perwujudan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif	Meneguhkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif
Penguatan kapasitas pelaku ekonomi lokal dan pengelolaan potensi unggulan berbasis sumber daya lokal untuk mendukung produktivitas dan ketahanan pangan	Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi.	Peningkatan efektivitas produksi pengolahan sumber daya lokal dan distribusi hasil ekonomi lokal melalui efisiensi rantai pasok, pengembangan ekosistem kemitraan untuk mendukung pemerataan ekonomi	Transformasi kualitas sumber daya manusia yang mendukung perwujudan lingkungan yang sehat, berbudaya, dan sejahtera	Konsolidasi sistem tata kelola pemerintahan yang tangguh. adaptif. serta terintegrasi secara digital dan fungsional. untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik yang responsif. partisipatif. dan selaras dengan prinsip-prinsip smart governance yang religius dan berdaya saing
Peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Percepatan pemerataan akses layanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan sosial budaya melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan pemberdayaan komunitas.	Transformasi kualitas infrastruktur wilayah serta sistem transportasi yang terintegrasi dan terwujudnya konektivitas menuju pusat pelayanan dan pergerakan ekonomi	Peningkatan mutu dan keberlanjutan sumber daya manusia yang kompeten dan produktif dengan karakter religius dan budaya lokal yang kuat
Pemetaan kebutuhan dan kondisi infrastruktur wilayah secara menyeluruh, serta peningkatan kualitas dan keterjangkauan infrastruktur dasar	Pengembangan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau	Penguatan peran desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal berkelanjutan serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendorong pemerataan ekonomi	Transformasi pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana berbasis inovasi dan teknologi untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing wilayah	Konsolidasi sistem infrastruktur wilayah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan guna menjamin keberlanjutan akses dan konektivitas antarwilayah, mendukung pelayanan dasar serta mendorong daya saing ekonomi lokal.
Penguatan dasar dan optimalisasi sumber daya layanan pendidikan dan kesehatan dasar yang inklusif, serta penguatan nilai	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi,	Pengembangan konektivitas wilayah melalui pengembangan sistem jaringan transportasi dan logistik yang efisien dan terintegrasi.	Penguatan sistem ekonomi daerah yang berdaya saing melalui inovasi produk unggulan berbasis teknologi serta transformasi digital dalam tata kelola ekonomi lokal dalam	Peneguhan tata kelola lingkungan hidup dan ketahanan bencana yang inklusif dan berkelanjutan sebagai pilar pembangunan daerah yang berkelanjutan

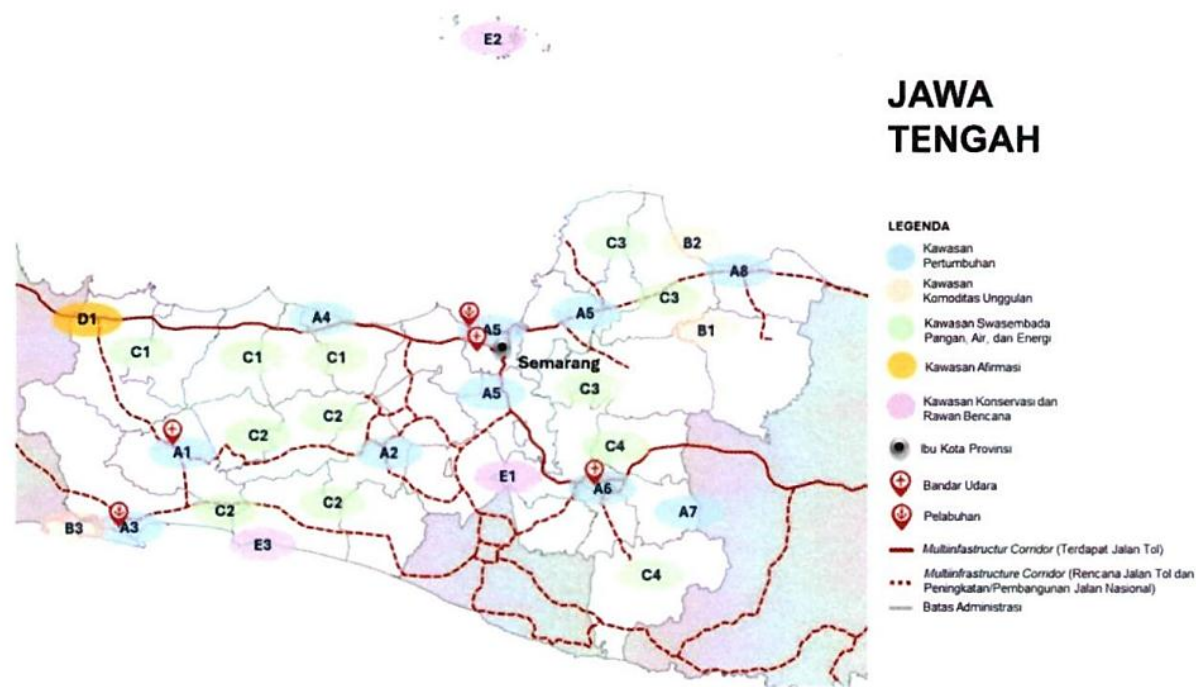


2026	2027	2028	2029	2030
Penguatan Potensi Lokal sebagai Daerah Penumpu Ketahanan Pangan	Penguatan Infrastruktur berbasis Lingkungan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Optimalisasi Potensi Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal secara Berkelanjutan untuk Pemerataan Ekonomi	Perwujudan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif	Meneguhkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif
keagamaan, budaya lokal, dan interaksi sosial di masyarakat.	partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat		rangka mendukung perwujudan ekonomi daerah yang berdaya saing	
Penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan dasar dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan berbasis data lokal terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan potensi unggulan daerah	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan kapasitas aparatur, digitalisasi administrasi, dan sistem pengelolaan pembangunan desa yang akuntabel dan partisipatif, guna mendorong pemerataan layanan dan keadilan pembangunan di wilayah perdesaan	Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan integratif berbasis teknologi digital serta nilai-nilai religius dan budaya lokal, untuk memperkuat kepercayaan publik, efisiensi pelayanan, serta daya saing kelembagaan pemerintahan daerah	Peneguhan struktur ekonomi daerah yang unggul dan inklusif melalui konsolidasi transformasi digital, penguatan kelembagaan, serta penciptaan inovasi berkelanjutan demi masyarakat sejahtera

Sumber: Tim Penyusun, 2025

3.2.2.Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Purworejo
a. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Nasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi lima kawasan, yaitu (1) kawasan pertumbuhan; (2) kawasan komoditas unggul; (3) kawasan swasembada pangan, air, dan energi; (4) kawasan afirmasi, dan (5) kawasan konservasi/rawan bencana. Arah pembangunan Kabupaten Purworejo dalam konstelasi kewilayahan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai kawasan swasembada pangan, air, dan energi Dieng-Serayu-Bogowonto yang meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purworejo.



Gambar 3. 4 Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Salah satu *highlight* indikasi intervensi nasional untuk mendukung Kabupaten Purworejo sebagai kawasan swasembada pangan, air, dan energi yaitu pembangunan Bendungan Bener (yang sebelumnya berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional). Bendungan Bener dapat mendukung swasembada air khususnya dalam peningkatan irigasi pertanian, pengendalian banjir, penyediaan air baku, dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Bendungan dengan tampungan sekitar 92 juta m³ ini akan bermanfaat mengairi lahan irigasi seluas 15.519 hektar. Selain itu, bendungan ini dapat menyuplai air baku untuk keperluan rumah tangga, kota dan industri sebesar 1.500 liter per detik ke tiga kabupaten, yakni Purworejo, Kebumen dan Kulon Progo, termasuk Bandara YIA. Bendungan Bener juga mempunyai potensi menyuplai energi listrik sebesar 10 MW dan mereduksi debit banjir dari 584 m³/detik menjadi 178 m³/detik (70%) pada debit banjir kala ulang 25 tahun (Q25). Terdapat pula sejumlah fungsi lainnya seperti perikanan, pariwisata dan konservasi DAS Bogowonto di bagian hulu. Dengan adanya proyek ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pangan, air, dan energi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Selain Pembangunan Bendungan Bener, program lainnya yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 yaitu:

- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini D.I. Wadaslintang;
- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah;
- Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi), pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan);
- Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura;
- Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura;
- Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* WS Serayu-Bogowonto;
- Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau;
- Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik;
- Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas, mitigasi OPT dan kesehatan hewan, peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani, peningkatan kualitas pasca panen melalui peningkatan prasarana pasca panen;
- Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/ gapoktan, penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani, pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani, perluasan akses asuransi usaha tani, peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang, pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama; dan
- Pengembangan pusat / laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.

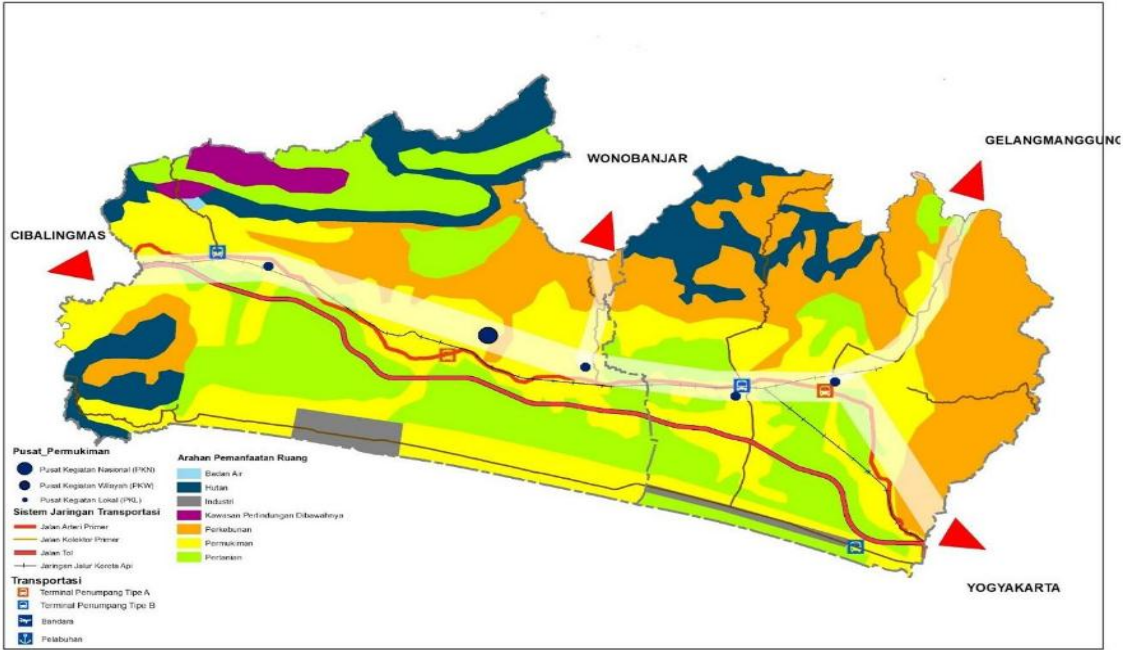
b. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi

Pembangunan wilayah di Jawa Tengah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan wilayah Jawa Tengah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pembangunan wilayah di Jawa Tengah diarahkan untuk mengembangkan perekonomian wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Pembangunan perekonomian Jawa Tengah berbasis pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk memadukan

fungsi budidaya dan lindung serta keterpaduan pengelolaan alam darat dan pesisir.

Dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, pembangunan wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan (WP). Pertimbangan penentuan wilayah tersebut diantaranya adanya keterkaitan pengembangan dari aspek fisik, alam, sosial, ekonomi dan/atau budaya sebagai dasar koordinasi pembangunan dan keterpaduan pengembangan wilayah antar Kabupaten/Kota. Selain itu pembagian Wilayah Pengembangan (WP) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong kerja sama antardaerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor. Pembagian wilayah pengembangan Jawa Tengah meliputi WP Bregasmalang, WP Petanglong, WP Kedungsapur, WP Jekuti, WP Banglor, WP Subosukawonosraten, WP Gelangmanggung, WP Wonobanjar, WP Keburejo, serta WP Cibalingmas.

WP Keburejo meliputi Kabupaten Kebumen dan Purworejo yang diarahkan pengembangannya pada peningkatan perwujudan perkotaan Kebumen sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta menyelaraskan pembangunan Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo dengan kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kabupaten Kulon Progo sebagai koridor pengembangan ekonomi. Pengembangan wisata diarahkan pada koridor Kebumen–Purworejo–Borobudur–Magelang dan koridor wisata pantai-Geopark Karangsambung Karangbolong-KSPN Dieng sebagai pengembangan potensi wisata keunikan geologi dan pantai disertai dengan peningkatan aksesibilitas. Kawasan industri diprioritaskan di Kabupaten Kebumen yang terintegrasi dengan Kawasan Otoritas Borobudur dengan fokus pada pengembangan industri manufaktur dan pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam dan pengembangan wilayah serta upaya mitigasi bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah.



Gambar 3. 5 Arah Pengembangan Wilayah WP Keburejo
Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Kabupaten Purworejo memiliki peran strategis dalam mendukung Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi “Pengembangan Geo-Tourism (Geopark Karangsambung dan Pantai) yang Terintegrasi dengan Borobudur dan Terpadu dengan Pariwisata DIY”. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas, memperkuat konektivitas antar destinasi, meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal, serta mendorong pemerataan pembangunan wilayah selatan dan barat Purworejo. Dalam upaya mendorong peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata perlu didorong pengembangan kawasan yang berorientasi transit (*Transit Oriented Development*). Keberadaan Stasiun Tipe A Kutoarjo dan Terminal Tipe B di Kecamatan Kutoarjo dapat dijadikan simpul untuk menghubungkan ke destinasi wisata Candi Borobudur melalui penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan “Trans Jateng Koridor Kutoarjo-Borobudur”.

Perlu didorong penyempurnaan pembangunan terminal Tipe B Kutoarjo yang terintegrasi dengan Stasiun Kutoarjo sebagai simpul perekonomian (sebagai Daya Tarik Wisata dan Sentra Oleh-Oleh UMKM serta pusat Kuliner Khas Purworejo). Perlu adanya inisiasi untuk memperpanjang trayek layanan “Trans Jateng”, tidak hanya sampai Terminal Tipe B Kutoarjo, tetapi sampai ke Kabupaten Kebumen dan Destinasi Wisata Dieng. Sekaligus mendorong perpanjangan layanan Kereta Api Prameks dari semula Yogyakarta-Kutoarjo menjadi Yogyakarta-Kutoarjo-Kebumen. Dalam upaya mendorong peningkatan aksesibilitas dan konektivitas ke DTW, juga perlu didorong adanya peningkatan jalan provinsi yang mendukung pengembangan koridor wisata Kebumen-Purworejo-Borobudur-Magelang, akses ke Jalan Nasional (JJLS) dan perbatasan dengan Provinsi DIY.

Keberadaan Terminal Tipe B Kutoarjo di Kabupaten Purworejo tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi yang mendukung konektivitas antarwilayah di Kabupaten Purworejo, tetapi juga sebagai pusat UMKM

“*Keburejo Hangout Point*” yang memfasilitasi pelaku UMKM lokal untuk mempromosikan dan menjual produk khas Purworejo. Pemerintah Kabupaten Purworejo, melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (DKUKMP), telah secara aktif menempatkan UMKM-UMKM unggulan di area terminal tersebut.

Dari sisi transportasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo juga merencanakan pelaksanaan *re-routing* angkutan pedesaan (angkudes) sebagai bagian dari upaya penataan sistem transportasi yang lebih efisien dan terintegrasi. Salah satu rute prioritas yang diusulkan adalah penyediaan angkutan lanjutan dari Terminal Kutoarjo menuju kawasan wisata pantai di selatan Purworejo. Rute ini diharapkan dapat mendukung mobilitas wisatawan serta membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. Dengan sinergi antara penguatan konektivitas transportasi dan pengembangan ekonomi lokal berbasis UMKM, Terminal Tipe B Kutoarjo memiliki potensi besar sebagai model terminal terpadu yang tidak hanya melayani pergerakan orang dan barang, tetapi juga menggerakkan perekonomian daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Dalam upaya mendukung “Pengembangan *Geo-Tourism* (Geopark Karangsambung dan Pantai) yang Terintegrasi dengan Borobudur dan Terpadu dengan Pariwisata DIY, perlu adanya upaya sinergis dan strategis dalam rangka mewujudkan pengembangan wisata alam di wilayah utara yang terintegrasi dengan Borobudur dan pengembangan wisata pantai di pesisir selatan yang terintegrasi dengan Geopark Karangsambung sekaligus Yogyakarta International Airport (YIA).

Kawasan sekitar BOB terus dikembangkan melalui pembangunan infrastruktur dasar, penguatan kelembagaan masyarakat pariwisata, serta pelestarian lingkungan berbasis wisata alam dan budaya. Sebagai langkah lanjutan, strategi pemasaran pariwisata terus diperkuat dengan menyusun paket wisata tematik yang menghubungkan destinasi wisata di Purworejo dengan kawasan Borobudur dan pariwisata DIY. Sinergi antarwilayah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta memperluas peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal di sektor pariwisata.

Dalam kerangka arah kebijakan pengembangan wilayah, WP Keburejo diarahkan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sektor pertanian. Kebijakan ini sejalan dengan karakteristik wilayah yang memiliki potensi lahan pertanian produktif, sentra perikanan budidaya dan tangkap, serta pengembangan komoditas lokal. Dukungan program di wilayah ini difokuskan pada peningkatan produksi pertanian dan hilirisasi komoditas unggulan, seperti kelapa, padi, serta perikanan tangkap dan budidaya. Penguatan dilakukan tidak hanya pada peningkatan hasil produksi di sektor hulu, tetapi juga pada pengembangan nilai tambah melalui pengolahan, pengemasan, dan distribusi produk (hilirisasi). Hal ini mencerminkan upaya Kabupaten Purworejo untuk membangun sistem pertanian yang modern, efisien, dan berorientasi pasar, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkelanjutan. Perlu didorong peningkatan produksi pertanian melalui berbagai upaya, diantaranya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana berupa pengadaan alsintan, penyediaan benih/bibit berkualitas, penjaminan

kualitas pakan ternak, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) dan pengembangan ternak lokal berbasis potensi dan pengembangan korporasi produksi. Dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian juga perlu didorong kegiatan peningkatan sistem jaringan irigasi kewenangan provinsi, dan saluran irigasi pergaraman; peningkatan pasokan sumber air baku pertanian melalui rehabilitasi embung, dan mendorong perbaikan tata kelola pertanian modern berbasis integrated farming dengan menggunakan teknologi dalam pengolahan pertanian.

Sedangkan dalam upaya hilirisasi pertanian, perlu didorong penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian, penjaminan keamanan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner unit usaha produk hewan, pemasaran dan branding produk, pengembangan pelabuhan perikanan, pengelolaan kawasan konservasi, pelatihan diversifikasi olahan ikan, fasilitasi kemasan dan jejaring pemasaran.

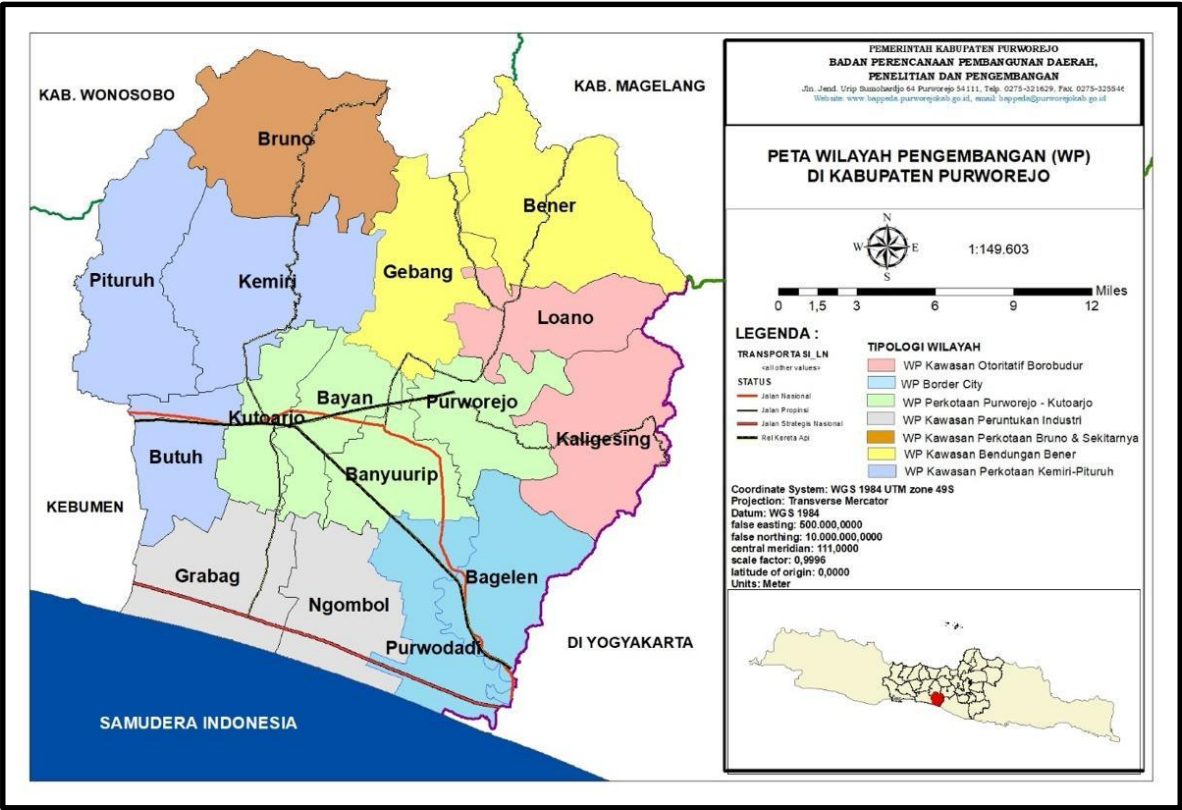
Dalam rangka mencapai rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, terutama dalam hal pemenuhan infrastruktur layanan dasar terutama air minum, perlu didorong optimalisasi sistem SPAM Regional Keburejo, yang melayani masyarakat di wilayah Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen. Dari total kapasitas rencana sebesar 200 lps, baru sekitar 50 lps yang terbangun. Perlu upaya kolaborasi pendanaan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam merealisasikan optimalisasi SPAM tersebut. Salah satunya adanya penambahan Jaringan Distribusi Utama (JDU), Jaringan Distribusi Layanan (JDL) dan Sambungan Rumah (SR). Wilayah Pengembangan Keburejo sebagai salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi baru, perlu didorong pengelolaan kawasan yang mengharmonisasikan kebutuhan keanekaragaman hayati dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Perlu adanya sinergitas pengelolaan cagar biosfer Merapi-Merbabu-Menoreh

Salah satu bentuk dukungannya yaitu melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di beberapa kawasan strategis. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menyusun RDTR Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 106 Tahun 2023. Selain itu, RDTR Kawasan Pariwisata Sekitar Badan Otorita Borobudur (BOB) yang meliputi wilayah Kecamatan Bener, Loano, dan Kaligesing juga dikembangkan sebagai bagian dari konektivitas destinasi wisata di wilayah barat Borobudur. Sebagai langkah integratif antara pengembangan industri dan pariwisata, disusun RDTR Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi–Ngombol–Grabag turut disusun sesuai amanat Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2041.

c. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten

Dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan, Kabupaten Purworejo telah menetapkan pembagian wilayah pengembangan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo. Wilayah pengembangan ini disusun dengan

memperhatikan kondisi geografis, potensi sumber daya, jaringan infrastruktur, serta pola kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Pembagian tersebut dimaksudkan untuk memperkuat keterpaduan pembangunan antar wilayah, mendorong pemerataan pertumbuhan, serta mempermudah penetapan prioritas pembangunan sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Berdasarkan RTRW, Kabupaten Purworejo terbagi ke dalam 7 (tujuh) Wilayah Pengembangan (WP) sebagai berikut.



Gambar 3. 6 Peta Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Purworejo

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2025

1) WP Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo

Deliniasi Wilayah Pengembangan Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo meliputi 5 (lima) kecamatan yaitu, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Banyuwirip, Kecamatan Bayan, Kecamatan Kutoarjo dan Kecamatan Gebang. Arah pengembangan wilayah di kawasan tersebut berupa kegiatan **pusat kantor pemerintahan** yang didukung sektor **perdagangan dan jasa skala regional, industri** dan **perumahan** serta **penyediaan tenaga kerja terampil**. Sektor industri yang dikembangkan yaitu industri kecil dan menengah. Dalam rangka mewujudkan arah pengembangan di wilayah tersebut, terdapat indikasi kebutuhan rencana program 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

- Peningkatan infrastruktur dalam rangka mendorong peningkatan sektor perdagangan dan jasa skala regional
 - Peningkatan pasokan sumber air baku, melalui pengembangan SPAM Regional Keburejo sub sistem Balingasal serta revitalisasi pipa transmisi dan Jaringan Distribusi Utama (JDU) di wilayah perkotaan Purworejo;
 - Peningkatan, dan pengembangan terminal tipe B dan tipe C.

- Revitalisasi Pasar Daerah Kutoarjo, di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi serta mendorong penataan PKL sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- b) Pengembangan industri kecil dan menengah yang memenuhi kriteria/persyaratan teknis, ekonomis dan lingkungan
 - Optimalisasi dan integrasi layanan Rumah Kemasan dan PLUT KUKM untuk mendukung hilirisasi produk lokal dan hasil riset inovasi dalam pengembangan UMKM.
- c) Pengembangan kawasan koridor jalan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial;
 - Reaktivasi jalur lambat/jalur sepeda trase Purworejo-Kutoarjo
- d) Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
 - Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh serta mendorong pencegahan muncul dan berkembangnya permukiman kumuh yang baru
 - Peningkatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat; utamanya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), korban bencana dan relokasi program pemerintah
 - Pengembangan jaringan *fiber optic* di kawasan perkotaan dalam rangka mendukung *smart city*

Optimalisasi wisata dengan tema *Urban Heritage Tourism*

- a) Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata *Urban Heritage Tourism*
- b) Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan, melalui :
 - Mendorong *event tourism* berskala lokal dan regional.
 - Mendorong pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW) *Urban Heritage Tourism* (Alun-Alun Purworejo, *Art Centre*, Masjid Agung Purworejo, dll) melalui penataan fasad bangunan dan bangunan pemerintahan di sekitarnya.
 - Mendorong promosi budaya lokal melalui pengembangan event budaya dan pengembangan paket-paket wisata (*travel package*).

Peningkatan upaya penyediaan tenaga kerja terampil melalui Balai Latihan Kerja Pemerintah dan fasilitasi lembaga swasta.

2) WP Kawasan Perbatasan (*Border City*)

Deliniasi Wilayah Pengembangan Kawasan Perbatasan/*border city* meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Bagelan. Arah pengembangan wilayah di Kawasan tersebut yaitu mewujudkan ruang wilayah pengembangan sebagai kota perbatasan yang didukung oleh **sektor pariwisata, perdagangan dan jasa**, serta **perumahan** dengan memperhatikan **ketahanan terhadap bencana**. Dalam rangka mewujudkan arah pengembangan di wilayah tersebut, terdapat indikasi kebutuhan rencana program 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

- a) Pengembangan sektor pariwisata maritim beserta infrastruktur pendukung;

- Pengembangan atraksi pariwisata berbasis potensi lokal
- Penyelenggaraan event-event wisata berskala lokal maupun regional
- b) Pengembangan koridor sektor perdagangan dan jasa sebagai pendukung optimalisasi pariwisata maritim dan perikanan
- c) Pengembangan dan peningkatan infrastruktur dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata maritim dan sektor perdagangan barang dan jasa
 - Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sepanjang koridor Jalan arteri Primer dan Kolektor Primer untuk mendukung keberadaan Bandara YIA
- d) Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang adaptif terhadap bencana, berkelanjutan dan ramah lingkungan
 - Penyediaan kawasan perumahan dan permukiman yang adaptif terhadap bencana, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
 - Peningkatan upaya mitigasi bencana, penyediaan jalur evakuasi bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya mitigasi bencana melalui pembinaan terhadap Desa Tangguh Bencana (DESTANA)

3) WP Kawasan Perkotaan Kemiri Pituruh

Wilayah pengembangan Perkotaan Kemiri Pituruh terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Kemiri, Kecamatan Butuh dan Kecamatan Pituruh. Arah Pengembangan di kawasan tersebut berupa **kawasan agropolitan** yang didukung perdagangan barang dan jasa serta sektor pariwisata. Dalam rangka mewujudkan arah pengembangan di wilayah tersebut, terdapat indikasi kebutuhan rencana program 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

- a) Pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan yang mendukung pengembangan agribisnis
 - Pengembangan kampung benih hortikultura (*horticultural seed community*), fasilitasi pelabelan bibit/benih tanaman hortikultura, serta optimalisasi peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP)
 - Pengembangan agribisnis perkebunan dan pertanian
- b) Pengembangan sarana dan prasarana, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas air dan penyediaan gudang dan fasilitas penyimpanan
 - Peningkatan/rehabilitasi, pemeliharaan Jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier
 - Pembangunan/rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)
 - Pembangunan sarana persampahan yang terintegrasi dengan kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat
 - Pengembangan Jaringan Distribusi Bagi (JDB) dan Jaringan Distribusi Layanan serta Sambungan Rumah (SR) untuk penyediaan air minum yang bersumber dari SPAM Regional Keburejo sub sistem Balingasal
- c) Pemberdayaan masyarakat yang mendukung pengembangan agribisnis
 - Pembinaan Desa Wisata melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
 - Fasilitasi kelembagaan dan pembinaan lembaga keuangan desa

- d) Pengembangan *smart village fisheries* dalam rangka mendukung budidaya perikanan air tawar terintegrasi
 - Pembenihan, pembesaran dan pemasaran benih lele
- e) Perluasan layanan kesehatan hewan dalam mendukung peningkatan populasi ternak

4) **WP Kawasan Peruntukan Industri (KPI)**

Wilayah Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Grabag dan Kecamatan Ngombol. Arah pembangunan wilayah di Kawasan tersebut berupa peruntukan **industri** yang didukung sektor pariwisata dan pertanian. Dalam rangka mewujudkan arah pengembangan di wilayah tersebut, terdapat indikasi kebutuhan rencana program 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

- a) Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagai pendukung Kawasan Industri Kebumen
 - Optimalisasi serapan air baku SPAM Regional Keburejo sub sistem Jembangan
- b) Pengembangan kawasan pariwisata pantai
 - Pengembangan pariwisata berbasis potensi kawasan pesisir berupa wisata kesehatan (*health tourism*) terapi garam di Pantai Jetis, wisata tambak, dan Agro tourism
 - Penyelenggaraan event pariwisata berskala nasional seperti festival layang-layang
- c) Pengembangan kawasan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pertanian
 - Pengembangan Kampung Nelayan Modern (KALAMO) yang terintegrasi dengan TPI Kertojayan
 - Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Keburuhan beserta sarana dan prasarana pendukungnya
 - Pengembangan budidaya tambak udang terintegrasi
 - Pengembangan kawasan hortikultura dan kawasan perkebunan kelapa
- d) Peningkatan upaya mitigasi bencana
- e) Penyediaan peta mitigasi bencana dan optimalisasi *Early Warning System* (EWS)
- f) Peningkatan upaya mitigasi bencana, penyediaan jalur evakuasi bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya mitigasi bencana melalui pembinaan terhadap Destana

5) **WP Kawasan Bendungan Bener**

Wilayah Pengembangan Bendungan Bener yang meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Bener dan Kecamatan Gebang. Arah pengembangan wilayah di kawasan tersebut berupa **penyedia air baku**, pembangkit listrik tenaga air, kawasan konservasi, serta pariwisata. Dalam rangka mewujudkan arah pengembangan di wilayah tersebut, terdapat indikasi kebutuhan rencana program 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

- a) Pengembangan kawasan pengendali banjir (*flood control area*) dengan mempertimbangkan kapasitas tampungan dan debit banjir, perubahan ekosistem sungai, pergeseran sedimentasi dan dampak terhadap lingkungan
- b) Pengembangan kawasan konservasi DAS dengan fokus utama menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat, serta mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan kegiatan manusia
- c) Penyediaan pasokan air baku untuk kebutuhan rumah tangga, industri dan perdagangan, termasuk melayani area Bandara YIA
 - Pembangunan Jaringan Distribusi Layanan (JDL), Jaringan Distribusi Bagi (JDB) dan Sambungan Rumah (SR) penyediaan air minum dari sistem Bendungan Bener;
 - Penyusunan *Real Demand Survey* (RDS) untuk rencana wilayah pelayanan yang mengambil sumber air baku dari Bendungan Bener
- d) Peningkatan fungsi dan kinerja sistem irigasi serta menambah luas areal pelayanan irigasi
 - Rehabilitasi/Peningkatan jaringan irigasi premium yang akan terkoneksi ke jaringan pemanfaatan Bendungan Bener.
 - Peningkatan integrasi jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier kewenangan kabupaten yang terkoneksi dengan jaringan pemanfaatan Bendungan Bener
- e) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 10 MW
 - Fasilitasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 10 MW
- f) Pengembangan sektor wisata dengan atraksi berupa wisata bendungan dengan tetap memperhatikan keletarian lingkungan
 - Pengembangan atraksi wisata berbasis kawasan dengan *highlights* pada wisata air dan wisata petualangan (*adventure*)
 - Penyediaan pusat kuliner dan pusat oleh-oleh

6) **WP Kawasan Otoritatif Borobudur**

Deliniasi Wilayah Pengembangan Kawasan Otoritatif Borobudur meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Kaligesing dan Kecamatan Loano. Arah pengembangan wilayah di Kawasan tersebut berupa sektor **pariwisata** melalui perbaikan skema pola pengelolaan pariwisata daerah yang disertai pengembangan ekonomi kreatif serta peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan arah pengembangan di wilayah tersebut, terdapat indikasi kebutuhan rencana program 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

- a) Peningkatan pengembangan pariwisata dengan mengedepankan konsep 3 S (*something to see, something to do, dan something to buy*) serta konsep 6 A (*Attraction, Amenities, Accessibilities, Ancillary, Activity dan Available Package*)
 - Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jalan beserta bangunan pelengkap sebagai akses menuju destinasi wisata
 - Penyediaan sarana transportasi, terminal dan area parkir yang memadai

- Penyediaan fasilitas pendukung (amenitas) di sekitar destinasi wisata yang meliputi akomodasi, tempat ibadah, dan fasilitas umum.
 - Menyusun pengembangan paket wisata (travel package) dengan mempertimbangkan analisis pasar
 - Digitalisasi dalam pemasaran pariwisata untuk meningkatkan popularitas kawasan BOB sebagai destinasi wisata, dengan mendorong penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*)
 - Penyelenggaraan event-event pariwisata berskala lokal dan regional (kontes kambing etawa, grebek durian, kenduri kopi, *bird watching* dll)
- b) Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif
- Mendorong pengembangan produk unggulan lokal, seperti kuliner khas, kerajinan tangan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi kawasan
 - Pemberdayakan masyarakat lokal dalam mengelola potensi daerah seperti manajemen pemasaran, pengembangan produk wisata serta meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola desa wisata secara profesional
 - Pelatihan kepada pokdarwis terkait mitigasi resiko bencana serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempromosikan wisata dan menjangkau pasar yang lebih luas
 - Optimalisasi pemanfaatan rumah kopi; pelatihan *blending*, *roasting*, barista dan *digital marketing*

7) WP Kawasan Perkotaan Bruno

Wilayah Pengembangan Perkotaan Bruno terdiri dari 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Bruno. Arah pengembangan wilayah di kawasan tersebut berupa pengembangan kawasan perkotaan perbatasan berbasis **pertanian hortikultura** dan perikanan serta pariwisata yang didukung peningkatan layanan dasar. Dalam rangka mewujudkan arah pengembangan di wilayah tersebut, terdapat indikasi kebutuhan rencana program 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

- a) Pengembangan komoditas unggulan tanaman hortikultura
- b) Pengembangan budidaya perikanan air tawar yang terintegrasi dari hulu menuju hilir
- c) Pengembangan pariwisata minat khusus (*special interest tourism*)
- d) Peningkatkan/pengembangan infrastruktur yang menunjang aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang mendukung akses menuju destinasi wisata Dieng maupun DTW lokal
 - h. Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jalan beserta bangunan pelengkap yang menuju destinasi wisata
- e) Pengembangan Kawasan perkotaan yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan dasar
 - Fasilitasi pembangunan SMA/SMK Negeri
 - Penambahan ruang kelas baru level menengah pertama
 - Penyediaan sarana dan prasarana penunjang sekolah
 - Peningkatan kapasitas layanan kesehatan
- f) Peningkatan upaya mitigasi bencana

- Penyediaan peta mitigasi bencana dan optimalisasi *Early Warning System* (EWS)
 - Peningkatan upaya mitigasi bencana, penyediaan jalur evakuasi bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya mitigasi bencana melalui pembinaan terhadap Desa Tangguh Bencana (DESTANA)
 - Inventarisasi kawasan yang rawan bencana dan pendataan rumah terdampak bencana
- g) Penuntasan status tanah (*Governement Ground*), sampai dengan dilekati Hak Atas Tanah (HAT)
- h) Penguatan branding Purworejo di kawasan perbatasan

3.2.3. Program-Program Prioritas Daerah

Selain menetapkan arah kebijakan, program prioritas perlu disusun guna tercapainya visi-misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo. Program prioritas merujuk pada program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut ini program prioritas dalam lima tahun ke depan.

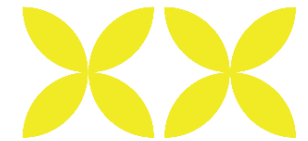


Tabel 3. 12 Program Prioritas Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

RPJMD		Renstra PD						RPJMD/ Renstra PD
Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Bidang Urusan	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Program Prioritas/ Program Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
T. Mewujudkan Purworejo berdaya saing, sejahtera, religius, dan inovatif	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten							
	Tingkat Kemiskinan							
	Rasio Gini							
	Indeks Daya Saing Daerah							
	Indeks Religiusitas Daerah							
S1. Meningkatnya kualitas manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Dindikbud	Pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan, peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
					Rata-Rata Lama Sekolah		Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	
					Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun		Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
					Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi		Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun (Kesetaraan)	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
							Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B	
							Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang): a. Literasi Membaca SD/ Sederajat b. Literasi Membaca SMP/ Sederajat	



RPJMD		Renstra PD						RPJMD/ Renstra PD
Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Bidang Urusan	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Program Prioritas/ Program Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kebudayaan		Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	Meningkatnya peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat	c. Numerasi SD/ Sederajat d. Numerasi SMP/ Sederajat	
							Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
								PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
								PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
								PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
								PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
		Dinpusip	Perpustakaan	Meningkatkan budaya literasi masyarakat, tertib arsip perangkat daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah (1)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Gemar Membaca	Meningkatkan budaya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
							Tingkat Gemar Membaca	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
		Dinkesda	Kesehatan	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Usia Harapan Hidup (UHH)	Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
							Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



RPJMD		Renstra PD						RPJMD/ Renstra PD
Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Bidang Urusan	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Program Prioritas/ Program Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
							Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
							Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna	
					Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di Puskesmas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinkesda)
							Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di RSUD Tjitrowardojo	
							Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di RSUD Tjokronegoro	
		DINSOSDALDUKKB	Sosial	Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah (1)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	Meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
								PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
								PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
								PROGRAM REHABILITASI SOSIAL



RPJMD		Renstra PD						RPJMD/ Renstra PD
Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Bidang Urusan	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Program Prioritas/ Program Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PPKB		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
							Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
							Demand Satisfied	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
							Total Fertility Rate	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
		DPPPAPMD	PPPA	Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan anak, kemandirian desa, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah (1)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
					Indeks Perlindungan Anak (IPA)		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
		Dinporapar	Pora	Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga, peranan pariwisata dalam	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Meningkatnya daya saing pemuda dan olahraga	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
								PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
								PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN



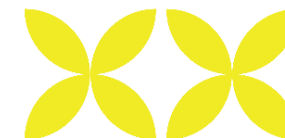
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



RPJMD		Renstra PD						RPJMD/ Renstra PD
Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Bidang Urusan	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Program Prioritas/ Program Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah (1)				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
S2. Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur Daerah	DPUPR	PUPR	Meningkatkan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum, sistem irigasi, penataan ruang, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah (1)	Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	Meningkatnya kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum	Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
								PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
								PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
								PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
								PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
								PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
								PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
		Dinperkimtan	Perumahan dan Permukiman	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman, luas kawasan kumuh perkotaan yang ditangani, tertib administrasi pertanahan, serta	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)



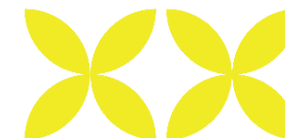
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



RPJMD		Renstra PD						RPJMD/ Renstra PD
Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Bidang Urusan	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Program Prioritas/ Program Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				akuntabilitas kinerja perangkat daerah (1)				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
					Persentase luas kawasan kumuh perkotaan yang ditangani	Meningkatnya luas kawasan kumuh perkotaan yang ditangani	Persentase luas kawasan kumuh perkotaan yang ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
				Meningkatkan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Rasio Konektivitas	Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Rasio Konektivitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
					Penurunan angka kecelakaan		Penurunan angka kecelakaan	
S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	DLHP	Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah (1)	Indeks Kualitas Air	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
					Indeks Kualitas Udara		Indeks Kualitas Udara	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
					Indeks Kualitas Lahan		Indeks Kualitas Lahan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
					Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase sampah terkelola	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



RPJMD		Renstra PD						RPJMD/ Renstra PD
Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Bidang Urusan	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Program Prioritas/ Program Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
								PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
								PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
								PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
								PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	Indeks Risiko Bencana	BPBD	Trantibumlinmas (Kebencanaan)	Meningkatkan ketahanan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		Satpol PP Damkar	Trantibumlinmas (Damkar)	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanganan kebakaran dan non kebakaran, serta	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



RPJMD		Renstra PD						RPJMD/ Renstra PD
Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Bidang Urusan	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Program Prioritas/ Program Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				akuntabilitas kinerja perangkat daerah (1)				
S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	DKPP	Pertanian	Meningkatkan produksi pertanian, kecukupan konsumsi pangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah (1)	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
					Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
					Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan		Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
					Persentase Peningkatan Produksi Daging		Persentase Peningkatan Produksi Daging	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
		DPUPR	PUPR	Meningkatkan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum, sistem irigasi, penataan ruang, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah (2)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Meningkatnya kinerja sistem irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
					Persentase Kinerja Penataan Ruang			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		Dinperkimtan	Pertanahan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman, luas kawasan kumuh perkotaan yang ditangani, tertib	Persentase Peningkatan Kepastian Hukum atas Tanah bagi Masyarakat dan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase Peningkatan Kepastian Hukum atas Tanah bagi Masyarakat dan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
								PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN



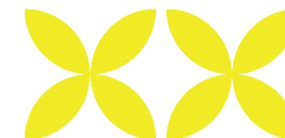
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



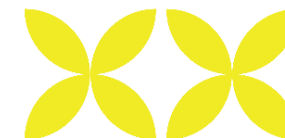
RPJMD		Renstra PD						RPJMD/ Renstra PD	
Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Bidang Urusan	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Program Prioritas/ Program Perangkat Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				administrasi pertanahan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah (2)				PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
		DPPPAPMD	Permasdes	Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan anak, kemandirian desa, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah (2)	Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
		DLHP	Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah (2)	Nilai produksi perikanan tangkap	Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan	Nilai produksi perikanan tangkap	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
					Nilai produksi perikanan budidaya		Nilai produksi perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
					Nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan		Nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
								PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
		DKUKMP	KUKM	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, UMKM dan peranan koperasi terhadap perekonomian daerah, serta	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Meningkatnya volume usaha koperasi	Jumlah volume usaha koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
									PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



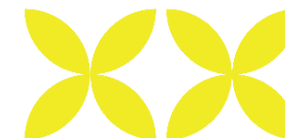
RPJMD		Renstra PD						RPJMD/ Renstra PD
Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Bidang Urusan	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Program Prioritas/ Program Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				akuntabilitas kinerja perangkat daerah				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
								PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
								PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
								PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
			Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan	Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
								PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
								PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
								PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
								PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
								PROGRAM PENGEMBANGAN
		DPMPTSP	Penanaman Modal	Meningkatkan peranan investasi dalam perekonomian	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Meningkatnya realisasi penanaman modal dan	Realisasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGEMBANGAN



RPJMD		Renstra PD						RPJMD/ Renstra PD
Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Bidang Urusan	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Program Prioritas/ Program Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		meningkatkan kualitas pelayanan perizinan		IKLIM PENANAMAN MODAL
							Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
								PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
								PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
								PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
		Dinporapar	Pariwisata	Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga, peranan pariwisata dalam perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah (2)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Meningkatnya peranan pariwisata dalam perekonomian daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
								PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
								PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
								PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		Dinperintransnaker	Perindustrian	Meningkatkan akses dan produktivitas	Rasio PDRB Industri Pengolahan		PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	PROGRAM PERENCANAAN DAN



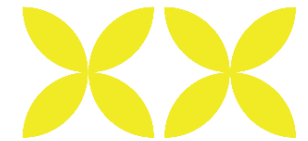
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



RPJMD		Renstra PD						RPJMD/ Renstra PD							
Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Bidang Urusan	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Program Prioritas/ Program Perangkat Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
				kerja, peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Meningkatnya nilai tambah sektor industri pengolahan		PEMBANGUNAN INDUSTRI							
	Tingkat Pengangguran Terbuka		Tenaga Kerja; Transmigrasi		Tingkat Kesempatan Kerja		Meningkatnya akses dan produktivitas kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						
									Produktivitas Tenaga Kerja	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
										PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
					Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Tingkat Kesempatan Kerja	Produktivitas Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
											Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Tingkat Kesempatan Kerja	Produktivitas Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
															PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
															PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
					Indeks Ketahanan Pangan (IKP)			Pangan	Meningkatkan produksi pertanian, kecukupan konsumsi pangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah (2)	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Meningkatnya keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		
													PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN														



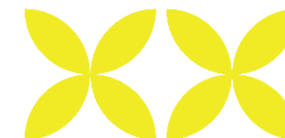
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



RPJMD		Renstra PD						RPJMD/ Renstra PD			
Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Bidang Urusan	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Program Prioritas/ Program Perangkat Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif	Indeks Reformasi Birokrasi	Bapperida	Perencanaan	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, kapabilitas inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
								Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
	Litbang									Kapabilitas Inovasi	Meningkatnya kualitas serta kemanfaatan riset dan inovasi
								BPKPAD	Keuangan		
	Meningkatnya pendapatan asli daerah		Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang Ditindaklanjuti		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
						BKPSDM	Kepegawaian; Diklat			Meningkatkan profesionalitas ASN serta akuntabilitas	Indeks Profesionalitas ASN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



RPJMD		Renstra PD						RPJMD/ Renstra PD
Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Bidang Urusan	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Program Prioritas/ Program Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				kinerja perangkat daerah				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Inspektorat Daerah	Pengawasan	Meningkatkan pengendalian internal pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatnya kualitas pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
							Nilai Manajemen Risiko Indeks	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
							Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	
							Indeks Integritas Nasional	
		DINSOSDALDUKKB	Sosial	Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah (2)	Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan)	Meningkatnya pelayanan Taman Makam Pahlawan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan)	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
		Disdukcapil	Admindukcapil	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
								PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



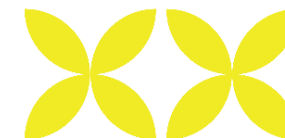
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



RPJMD		Renstra PD						RPJMD/ Renstra PD	
Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Bidang Urusan	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Program Prioritas/ Program Perangkat Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Dinkominfo	Kominfo	Mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Pemerintah Digital	Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan kematangan digital pemerintahan	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Statistik				Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
						Persandian	Meningkatnya kualitas statistik sektoral	Indeks Satu Data Indonesia	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
							Persandian	Meningkatnya layanan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI
		Dinpusip	Kearsipan	Meningkatkan budaya literasi masyarakat, tertib arsip perangkat daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah (2)	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Meningkatnya layanan dan akses arsip serta menjaga keberlanjutan arsip	Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
								PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
		Setda	Setda	Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Setda)	
					Indeks Kualitas Kebijakan			Indeks Kualitas Kebijakan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
					Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja			Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



RPJMD		Renstra PD						RPJMD/ Renstra PD
Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Bidang Urusan	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Program Prioritas/ Program Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Set. DPRD	Set. DPRD	Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan fungsi DPRD dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan terhadap DPRD	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Layanan terhadap DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
		Semua Perangkat Daerah	Program Penunjang	(menyesuaikan pada masing-masing perangkat daerah)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (sama untuk semua perangkat daerah)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (semua PD)
		Semua Kecamatan	Kecamatan	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah (sama untuk semua kecamatan)	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat (sama untuk semua kecamatan)	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
								PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
								PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
								PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	Indeks Ketahanan Nasional	Satpol PP Damkar	Trantibumlinmas	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM



RPJMD		Renstra PD						RPJMD/ Renstra PD
Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Bidang Urusan	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Program Prioritas/ Program Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				penanganan kebakaran dan non kebakaran, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah (2)				
		Bakesbangpol	Kesbangpol	Meningkatkan stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Ketahanan Ipoleksosbud	Meningkatnya stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbudm	Indeks Ketahanan Ipoleksosbud	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
								PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
								PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
								PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
								PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Sumber: Tim Penyusun, 2025

a. Program Unggulan Kepala Daerah

Di samping itu, pada Periode RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, terdapat 7 Program unggulan yang disebut dengan “PITULUNGAN”. Program ini disusun guna menyelesaikan berbagai permasalahan dan merespon berbagai isu strategis yang ada di Kabupaten Purworejo. Setiap program unggulan mencakup beberapa kegiatan unggulan yang mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Purworejo. Berikut ketujuh program unggulan tersebut.

1) Pinter Bocahe

Pinter bocahe merupakan program prioritas di bidang pendidikan dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun yang bertujuan untuk memastikan seluruh anak usia PAUD, SD, dan SMP mendapatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan inklusif yang diselenggarakan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan yang mencakup pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan bagi anak-anak yang tidak dapat menempuh jalur pendidikan reguler, yang menekankan aspek akademik dan pembentukan karakter melalui pendidikan moral, penguatan iman dan taqwa, peningkatan literasi, serta nilai-nilai kebangsaan. Program ini juga bertujuan untuk mencetak pemuda berprestasi yang berdaya saing dan menjadi agen perubahan. Melalui program ini, pemuda diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, baik dalam bidang akademik, seni budaya, olahraga, maupun teknologi. Dengan pendekatan holistik, program ini mendorong terwujudnya generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, berbudaya, berkarakter kuat, dan menguasai teknologi sebagai bekal dalam menghadapi tantangan masa depan. Berikut merupakan gambaran program Pinter Bocahe dan beberapa kegiatan unggulannya.

Tabel 3. 13 Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Pinter Bocahe

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulan
1	2
Pinter Bocahe	Pemberian beasiswa pendidikan bagi peserta didik berprestasi
	Fasilitasi teknologi informasi yang mendukung pendidikan dan pembelajaran yang inovatif
	Pembinaan dan pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi
	Pemberian pendidikan dan pelatihan lanjutan untuk peningkatan kualitas guru
	Pembaruan sarana prasarana sekolah untuk menjamin mutu pendidikan
	Pengembangan pusat pembelajaran masyarakat

Sumber: Tim Penyusun, 2025

2) Religius Masyarakat

Religius Masyarakat merupakan program prioritas yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang religius, harmonis, dan inklusif dalam keberagaman beragama. Program ini berfokus pada pendidikan anak beriman, pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya serta penyediaan dan peningkatan sarana prasarana peribadatan yang layak dan merata bagi seluruh

pemeluk agama yang diakui negara sehingga setiap individu dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan aman yang disertai dengan penguatan nilai-nilai toleransi, gotong royong, serta keharmonisan antarumat beragama dalam kehidupan sosial. Berikut merupakan gambaran program Religius Masyarakat dan beberapa kegiatan unggulannya.

Tabel 3. 14 Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Religius Masyarakat

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulan
1	2
Religius Masyarakat	Pemberian insentif bulanan, pelatihan peningkatan kompetensi, pemberian penghargaan bagi guru agama non formal, dan masyarakat berprestasi di bidang keagamaan
	Memperluas kesempatan menjalankan ibadah bagi masyarakat sesuai dengan agama yang diakui negara
	Fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan

Sumber: Tim Penyusun, 2025

3) Sehat Penduduke

Sehat Penduduke merupakan program prioritas yang bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses yang terjangkau, berkualitas, dan berkeadilan terhadap layanan dan edukasi kesehatan. Program ini mengintegrasikan berbagai langkah preventif seperti edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), *open defecation free* (ODF), serta pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga berencana (KB). Selain itu, program ini juga menitikberatkan pada penyediaan fasilitas kesehatan serta sarana dan prasarana olahraga yang memadai, peningkatan kualitas tenaga medis, serta optimalisasi sistem layanan kesehatan agar lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat yang mencakup penyediaan layanan kesehatan gratis bagi peserta kelas 3, termasuk melalui mekanisme pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menjamin masyarakat kurang mampu tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa kendala finansial. Dengan pendekatan yang komprehensif, program ini tidak hanya berfokus pada penyembuhan, tetapi juga pada upaya promotif dan preventif guna meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Berikut merupakan gambaran program Sehat Penduduke dan beberapa kegiatan unggulannya.

Tabel 3. 15 Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Sehat Penduduke

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulan
1	2
Sehat Penduduke	Perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk semua warga
	Mempermudah dan mempercepat proses pengurusan jaminan sosial kesehatan
	Pembangunan dan optimalisasi fasilitas olah raga bagi pemuda dan masyarakat
	Peningkatan kualitas gizi masyarakat

Sumber: Tim Penyusun, 2025

4) **Sejahtera Wargane**

Sejahtera Wargane merupakan program prioritas yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tenaga kerja melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup sandang, pangan, dan papan yang terjangkau serta layak bagi seluruh lapisan masyarakat yang juga berfokus pada optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapat masyarakat, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dan peningkatan tata kelola dan basis data kemiskian, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap sumber daya, serta penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan sehingga dapat mendorong terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, makmur, dan sentosa dengan memastikan stabilitas sosial, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesempatan kerja dan usaha yang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Berikut merupakan gambaran program Sejahtera Wargane dan beberapa kegiatan unggulannya.

Tabel 3. 16 Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Sejahtera Wargane

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulannya
1	2
Sejahtera Wargane	Melaksanakan program perumahan rakyat dengan merenovasi dan membangun bagi masyarakat yang membutuhkan
	Membangun dan/ atau memperbaiki sanitasi lingkungan
	Ketahanan iklim berbasis masyarakat
	Sinergitas stakeholder dalam pengelolaan sampah dan limbah industri
	Pembinaan, sosialisasi, dan edukasi tentang fungsi perlindungan dan konservasi sumber daya alam
	Penambahan kuantitas dan kualitas RTH
	Penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission
	Program pembangkit listrik tenaga terbarukan
	Pengembangan hutan sebagai kebun raya akademik
	Kabupaten bersih dan bebas sampah
	Sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi
	Pengembangan inovasi dan kompetensi teknologi informasi bagi ASN.
	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.
	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Perangkat Daerah.
	Membentuk lembaga/ forum/ satuan tugas yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat desa/ kelurahan.
	Pemberian bantuan hukum, pendidikan, pembinaan, dan pengembangan organisasi perempuan dan perempuan difabel.
	Penguatan koordinasi, kerja sama, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak.

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulannya
1	2
	Pemberian advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi, dan sinkronisasi kegiatan peningkatan kualitas keluarga.
	Pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Pelestarian warisan budaya, kepurbakalaan, permuseuman, tata nilai budaya, seni tradisional, tradisi, adat, dan tradisi.
	Penguatan mitigasi kebencanaan secara terstruktur dan non struktur.
	Pengembangan mitigasi dengan <i>Early Warning System</i> (EWS) bencana berbasis internet of thing (IoT).
	Pemberian penyuluhan dini dan pelatihan untuk mengurangi risiko dampak bencana.
	Memperbaiki keamanan pangan dan menambah aksesibilitas pangan bagi masyarakat.

Sumber: Tim Penyusun, 2025

5) **Alus Dalane**

Alus Dalane merupakan program unggulan yang berfokus pada pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang mencakup peningkatan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta drainase, dan juga penyediaan kelengkapan jalan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dengan pendanaan yang bersumber dari berbagai mekanisme, termasuk APBD, APBN, dana desa, serta skema kolaboratif lainnya seperti kemitraan dengan sektor swasta dan dana hibah, guna memastikan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Selain itu, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purworejo, dilakukan supervisi ke pemerintah desa terkait penataan desa. Dengan pendekatan yang terintegrasi, program ini diharapkan mampu menciptakan infrastruktur yang merata dan akses transportasi yang lebih baik sehingga dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung perkembangan ekonomi lokal dan nasional. Berikut merupakan gambaran program Alus Dalane dan beberapa kegiatan unggulannya

Tabel 3. 17 Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Alus Danlane

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulan
1	2
Alus Dalane	Pemerataan pembangunan infrastruktur di semua wilayah Kabupaten Purworejo
	Penggunaan material yang ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur

Sumber: Tim Penyusun, 2025

6) **Rame Pasare**

Rame Pasare merupakan program prioritas yang berfokus pada optimalisasi sektor ekonomi lokal melalui modernisasi dan penguatan aktivitas ekonomi secara luas yang mencakup revitalisasi pasar tradisional, pengembangan wisata daerah, pengembangan industri lokal, pengembangan

infrastruktur perdagangan, serta peningkatan akses terhadap teknologi dan digitalisasi untuk memperluas jangkauan pemasaran bagi pelaku usaha yang juga berfokus pada pemberdayaan pedagang, pelaku UMKM, dan pelaku pariwisata melalui pelatihan manajemen usaha, akses permodalan, serta penguatan ekosistem bisnis yang berdaya saing. Dengan pendekatan yang berorientasi pada keberlanjutan dan inklusivitas, program ini diharapkan mampu menciptakan iklim ekonomi yang lebih dinamis, meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai sektor. Berikut merupakan gambaran program Rame Pasare dan beberapa kegiatan unggulannya.

Tabel 3. 18 Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Rame Pasare

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulan
1	2
Rame Pasare	Menciptakan iklim investasi yang kondusif
	Memperbesar peluang kepada pelaku ekonomi lokal untuk berperan serta dalam berbagai kegiatan pembangunan
	Fasilitas akses permodalan, pemasaran, pelatihan, dll untuk usaha mikro dan kecil, terutama bagi industri rumahan yang dikelola perempuan
	Menyelenggarakan berbagai festival berbasis agroindustri, religi, dan budaya untuk meningkatkan daya tarik wisata.
	Pengembangan pariwisata kreatif
	Peningkatan citra dan positioning kepariwisataan Purworejo.
	Memperkuat kolaborasi pengembangan pariwisata kreatif
	Membuka peluang baru dalam sektor ekonomi kreatif, pariwisata budaya, dan kerja sama komunitas
	Penguatan kapabilitas inovasi dan riset daerah yang mendukung ekosistem yang berkualitas
	Hilirisasi hasil penelitian/ penerapan teknologi tepat guna.
	Inovasi teknologi tepat guna bagi pelaku ekonomi kreatif
	Perluasan jaringan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja (pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi)

Sumber: Tim Penyusun, 2025

7) **Ayem Petanine**

Ayem Petanine merupakan program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani atau pekerja di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan kehutanan melalui optimalisasi infrastruktur usaha tani serta penyediaan akses yang memadai terhadap pupuk, pasar, dan sumber daya pertanian lainnya dengan berfokus pada pengembangan dan perbaikan prasarana serta sarana pertanian, seperti sistem irigasi, jalan usaha tani, dan alat-alat pertanian modern guna meningkatkan produktivitas serta efisiensi usaha tani, serta mendorong kebijakan dan dukungan bagi petani dalam mengakses pupuk bersubsidi, permodalan, serta jaringan pemasaran yang lebih luas dan stabil, sehingga hasil panen dapat terserap dengan baik dan memberikan keuntungan maksimal bagi petani. Dengan strategi yang komprehensif, Ayem Petanine berperan dalam

mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan, sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Berikut merupakan gambaran program Ayem Petanine dan beberapa kegiatan unggulannya.

Tabel 3. 19 Kegiatan Unggulan Program Ayem Petanine

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulannya
1	2
Ayem Petanine	Menambah penggunaan alat teknologi pertanian (seperti pompa air, sprayer, traktor tangan, sel surya, dll)
	Revitalisasi sistem pertanian
	Mengoptimalisasi pemakaian pupuk organik
	Pengembangan infrastruktur pertanian dalam arti luas
	Memperkuat akses pada informasi dan teknologi pertanian
	Modernisasi pertanian

Sumber: Tim Penyusun, 2025

b. Dukungan Program Delegasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan sinergi pembangunan antara Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purworejo, ditetapkanlah sejumlah program pembangunan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Program Delegasi merupakan program-program prioritas yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang dirancang untuk menjangkau langsung kebutuhna masyarakat di tingkat lokal. Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan sebanyak 136 program yang terdiri atas 11 program prioritas, 22 program intervensi, 61 program aksi, dan 42 program taktis. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35 program didelegasikan pelakasanannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah termasuk Kabupaten Purworejo.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyusun berbagai kegiatan dukungan untuk memestikan keberhasilan program-program tersebut. Berikut merupakan gambaran kegiatan-kegiatan untuk mendukung 35 program delegasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3. 20 Dukungan 35 Program Delegasi

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)
1	2	3
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak
		Fasilitasi pemberdayaan perempuan
		Fasilitasi perlindungan anak
		Fasilitasi penurunan stunting
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan
		Fasilitasi pendidikan
		Penjangkauan Anak-anak terlantar di UPT Tat TWAM ASI
		Penjangkauan Anak-anak terlantar di UPT Tat TWAM ASI
		Fasilitasi perlindungan lansia
		Fasilitasi pemberdayaan disabilitas
		Fasilitasi tenologi tepat guna

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)
1	2	3
		Peningkatan kemampuan potensi PSKS Fasilitasi sarana dan prasarana olahraga kepada masyarakat Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan Fasilitasi dan pembinaan UMKM Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat Fasilitasi pelestarian lingkungan Fasilitasi desa wisata Fasilitasi dan pembinaan PKK Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna Fasilitasi BUMDes Pemberian akses internet gratis di kecamatan dan kelurahan
2	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Perbaiki rumah tidak layak huni Fasilitasi penanganan rumah bagi korban bencana Fasilitasi pengesahan siteplan perumahan bagi pengembang Pengelolaan sarana dan prasarana Rusunawa Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); Pelayanan Konsultasi Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR)
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK	Pendampingan desa anti korupsi Sosialisasi anti korupsi kepada ASN, perangkat desa, dan pelajar
4	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Fasilitasi integrasi layanan primer (ILP) Pemerataan layanan kesehatan dasar dan Pemenuhan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, dan pos kesehatan desa Peningkatan operasional kader Posyandu, termasuk dukungan berupa insentif guna memperkuat peran kader dalam pelaksanaan layanan kesehatan.
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	Fasilitasi dan Pemberian Hibah Bibit Ikan Nila Unggul Pencegahan Hama Penyakit Ikan melalui Uji Sampel Hama Penyakit Ikan, Fasilitasi pemantauan kesehatan ikan dan pemberian obat ikan Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan
6	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	Fasilitasi, identifikasi/ pemetaan, dan pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan pada semua jenjang
7	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Layanan rumah perlindungan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam rehabilitasi sosial

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)
1	2	3
8	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	Pendampingan dan monitoring desa wisata
9	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa
10	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
		Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
		Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
		Pelatihan Keluarga Tangguh Bencana (KATANA)
		Pelatihan Penguatan Taruna Siaga Bencana
		Bantuan Lumbung Sosial
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
		Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran
11	Cek Kesehatan Gratis	Pelayanan cek kesehatan gratis
		Pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS
12	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Pendampingan pelaksanaan integrasi layanan terpadu (ILP)
13	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Peningkatan Kinerja, Akuntabilitas, dan Reformasi Birokrasi
		Peningkatan kinerja DPRD melalui peningkatan kapasitas DPRD
		Peningkatan profesionalitas dan kualitas ASN dengan penerapan sistem merit
		Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan Terintegrasi
14	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan, dan anak	Fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin
		Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan
15	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	Revisi RTRW;
		Revisi RDTR Purworejo-Kutoarjo;
		Penyusunan RDTR Kemiri Pituruh (lanjutan);
		Penyusunan RDTR KPI (lanjutan);
		Penyusunan RDTR Bendungan Bener atau Revisi RDTR Border City
		Peningkatan daya tarik wisata melalui pembinaan desa-desa wisata di kawasan BOB dan pengembangan kawasan pesisir selatan
		Pelatihan pengolahan produk turunan kelapa, padi, dan perikanan
		Inovasi/ pembaruan pembinaan perindustrian
		Mendorong peluang investasi untuk hilirisasi kelapa, padi, dan perikanan

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)
1	2	3
		Mempersiapkan kawasan peruntukan industri di Grabag - Ngombol - Purwodadi
		Pengembangan industri garam rakyat
		Mendorong peluang investasi untuk hilirisasi produk turunan garam
16	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Penjangkauan Anak-Anak terlantar di UPT Tat TWAM ASI
		Bimbingan dan Bantuan kepada LKS/LKSA
		Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin, Petugas Lapangan Penanganan Sosial TKSK
		Bantuan Alat Bantu, Bantuan Sandang, Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
		Bantuan Sosial Bersyarat
		Bantuan KUBE
17	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Pengelolaan destinasi wisata yang ramah muslim
18	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Pendampingan HAKI
		Pendampingan P-IRT
		Penerbitan P-IRT
19	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan
		Pelatihan juru sembelih halal
20	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Fasilitasi peningkatan kawasan perdesaan (kerjasama antar desa atau kerja sama dengan pihak ketiga)
		Fasilitasi kegiatan BUMDesma
21	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
		Fasilitasi pemerintah desa dalam peningkatan desa mandiri energi
22	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Pemberdayaan wanita mandiri
23	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Pelatihan pemasaran digital dan pembuatan konten promosi desa wisata
		Penyusunan konten
		Pembuatan podcast
		Pelatihan konten kreator
		Pelatihan kejuruan TIK
24	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Pembinaan dan pelatihan UMKM

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)
1	2	3
25	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Penyediaan data statistik yang akurat dan relevan
26	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan Pengelolaan taman keanekaragaman hayati Heroes Park yang akan dikembangkan menjadi kebun raya. (FS Kebun Raya)
27	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Pendidikan bela negara bagi pelajar dan masyarakat Dialog wawasan kebangsaan dan karakter bangsa Dialog forum pembauran kebangsaan Koordinasi pendidikan dan pelatihan bela negara bagi guru dan siswa
28	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Koordinasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan dan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan Fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sampai tingkat kecamatan
29	Peningkatan operasional kader Posyandu	Pelatihan kompetensi dasar kader bagi kader Posyandu Media KIE Posyandu Gerakan Posyandu aktif Pemberdayaan Posyandu dalam pemenuhan SPM Bidang Trantibumlinmas
30	Peningkatan kualitas hidup lansia	Pelayanan pada usia lanjut Bantuan Penyediaan Permakanan, Bantuan Penyediaan Sandang, Bimbingan sosial kepada keluarga lansia, pemberian layanan kedaruratan, penyediaan perbekallan kesehatan
31	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
32	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Pembinaan dan pelatihan koperasi
33	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Pelaksanaan POPDA Kabupaten dan fasilitasi pengiriman atlet POPDA Pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten Pendampingan, monitoring, dan evaluasi KONI Fasilitasi Pekan Paralimpik Pelajar Daerah bagi disabilitas Pelaksanaan pemassalan olahraga rekreasi Fasilitasi partisipasi kejuaraan olahraga Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga
34	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Fasilitasi penyelenggaraan SD Inklusi dan unit layanan disabilitas
35	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan

Sumber: Tim Penyusun, 2025

c. Dukungan Program Strategis Nasional

Terdapat 6 (enam) program strategis nasional yang dilaksanakan selama lima tahun mendatang, antara lain penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan dan pengadaan dan pengelolaan gabah/ beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah, kesehatan untuk semua, perluasan akses pendidikan, revitalisasi ekonomi, serta program strategis nasional lain yang ditetapkan oleh Presiden. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan sinergi pembangunan antara Kabupaten Purworejo dan nasional, tabel berikut ini menunjukkan keselarasan dan dukungan program strategis nasional di Kabupaten Purworejo.

Tabel 3. 21 Dukungan Program Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo
1	2	3
1	Penanggulangan kemiskinan	
	a. Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo
1	2	3
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
	b. Sekolah rakyat	Koordinasi dan fasilitasi sekolah rakyat
	c. Pembangunan 3 juta rumah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		
2	Ketahanan pangan	
	a. Pengadaan dan pengelolaan gabah/ beras dalam negeri	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
	b. Penyaluran cadangan beras pemerintah	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
3	Kesehatan untuk semua	
	a. Jaminan kesehatan nasional	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	b. Makan bergizi gratis	Koordinasi dan fasilitasi makan bergizi gratis
4	Perluasan akses pendidikan	
	a. Pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
5	Pertumbuhan ekonomi	
	a. Pengendalian inflasi	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
	b. Percepatan pembentukan koperasi desa/ kelurahan merah putih	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN



No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo
1	2	3
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
	c. Kemudahan perizinan daerah	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
6	Program strategis nasional lain yang ditetapkan oleh Presiden	Koordinasi dan fasilitasi program strategis lain yang ditetapkan

Sumber: Tim Penyusun, 2025

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

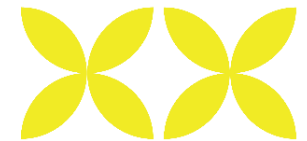
4.1 Program Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka menengah daerah, serta mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, yang berlandaskan pada janji politik Bupati dan Wakil Bupati Purworejo. Dalam merencanakan alokasi pendanaan pembangunan, penting untuk mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan memastikan bahwa alokasi tersebut sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip penganggaran harus didasarkan pada transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pendekatan yang digunakan berfokus pada *money follow program* dan *money follow function*, di mana anggaran difokuskan pada program atau kegiatan yang langsung terkait dengan prioritas pembangunan daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan sesuai dengan tugas dan fungsi utama perangkat daerah.

Perumusan program pembangunan yang mencakup kerangka pendanaan dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah serta memenuhi layanan perangkat daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah. Program pembangunan yang sudah mencantumkan kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra PD, termasuk merincinya ke dalam kegiatan atau sub-kegiatan.

Rencana program perangkat daerah dilaksanakan mulai tahun 2025 hingga 2030, dengan penegasan bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari kesinambungan perencanaan dan menjadi pijakan penyusunan RKPD 2030 oleh kepala daerah periode 2030-2034, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Masing-masing program disertai rencana kerja selama lima tahun yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, arah kebijakan, serta mendukung pelaksanaan 35 program delegasi provinsi. Program-program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2030 beserta kerangka pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

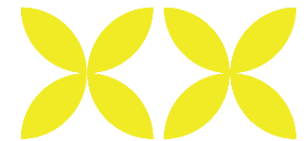


Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo

No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						124.903.8 87		130.000.0 00		124.903.8 87		126.877.3 69		128.882.0 31		
	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana sesuai standar	Persentase Satuan Pendidikan yang Sarana/ Prasarananya dalam Kondisi Baik	%	74,23	75,52	76,60		78,39		80,19		82,70		85,21		85,21	Dindikbud
	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan seluruh jenjang	Persentase satuan pendidikan yang memiliki kualitas pembelajaran dengan kategori baik	%	44,13	53,46	53,60		53,63		53,84		54,06		54,27		54,27	Dindikbud
	Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh jenjang	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan Terakhir S-1/ D-IV dan Bersertifikat Pendidik di Seluruh Jenjang	%	64,64	64,99	64,54		68,08		73,18		78,2		81,91		81,91	Dindikbud
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	%	24,13	49,35	52,51		56,72		62,15		72,55		85,73		85,73	Dindikbud
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						13.560		23.165		13.560		13.774		13.992		
	Meningkatnya kualitas kurikulum muatan lokal pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal yang Telah Ditetapkan	%	15,54	15,54	15,54		15,54		95,34		100		100		100	Dindikbud



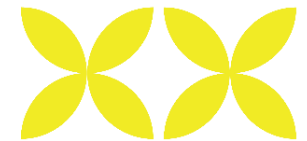
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	2030		
3	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						4.808		15.488		4.808		4.808		4.884		
	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan oleh Masyarakat yang Berizin	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Dindikbud
4	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA						205.676		45.000		45.000		45.000		45.000		
	Meningkatnya penggunaan bahasa daerah	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan dan Menerapkan Pembiasaan Penggunaan Bahasa Jawa	%	0,00	0,00	87,22		87,22		95,34		100,00		100,00		100,00	Dindikbud
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						147.373.8 57		149.308.3 32		146.156.0 32		131.779.2 91		154.876.8 57		
	Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	12,50	12,50	27,78		30,00		33,33		36,66		41,11		41,11	Dinkesda
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,31	98,28	98,40		98,50		98,60		98,70		98,80		98,80	Dinkesda
	Terkendalnya penyakit menular dan penyakit tidak menular	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	79,00	90,00	90,31		90,63		90,94		91,25		91,56		91,56	Dinkesda
		Neglected Tropical Diseases (NTDs)	%	70,4	85,0	92,0		96,2		100,0		100,0		100,0		100,0	Dinkesda
		Angka Kematian Dengue	%	0,38	0,36	0,34		0,30		0,20		0,10		0,10		0,10	Dinkesda
		Annual Parasite Incidence (API)	per 1.000 penduduk	0,01	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01	Dinkesda
		Persentase Diabetes Melitus Terkendali	%	0	33	35		37		39		41		45		45	Dinkesda
		Insiden HIV	Per 1.000 Penduduk	0,14	0,15	0,16		0,18		0,2		0,23		0,25		0,25	Dinkesda



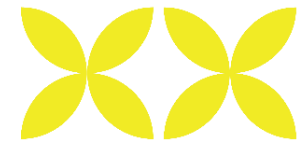
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	87,91	94,00	95,00		96,00		97,00		98,00		99,00		99,00	Dinkesda
		Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	58	60	65		67		70		73		75		75	Dinkesda
		Persentase Hipertensi terkontrol	%	0,66	4,67	5,17		5,67		6,17		6,67		7,17		7,17	Dinkesda
	Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	7	5	5		5		4		4		4		4	Dinkesda
		Jumlah Kematian Balita	Kasus	96	91	86		81		80		79		78		78	Dinkesda
		Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	%	0,00	11,11	37,04		55,56		74,07		85,19		100		100	Dinkesda
		Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	%	65	75	77		79		81		83		85		85	Dinkesda
		Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	0	44	55		65		75		80		80		80	Dinkesda
		Prevalensi Obesitas	%	21,8	21,7	21,6		21,5		21,4		21,3		21,2		21,2	Dinkesda
		Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	%	0,0	12,3	11,4		10,4		9,4		8,4		7,4		7,4	Dinkesda
		Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	%	0,00	1,00	1,50		1,70		2,00		2,50		3,00		3,00	Dinkesda
		Tersedianya data dan sistem informasi kesehatan															
	6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						950.970		965.996		950.970		965.996		981.258	
Tersedianya SDM kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar profesi		Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi	per 1000 penduduk	3,22	3,22	5,30		5,30		5,40		5,50		5,60		5,60	Dinkesda
7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						239.391		243.173		239.391		243.173		247.015		
	Tersedianya obat, alat kesehatan dan optikal serta	Persentase Peredaran Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, serta Makanan yang Aman dan Bermutu	%	94,00	94,50	95,00		97,00		97,50		98,00		98,50		98,50	Dinkesda



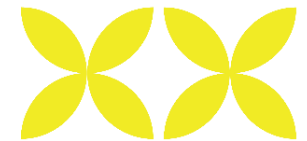
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
	makanan yang aman dan bermutu	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	0,0	80,0	82,5		85,0		90,0		95,0		100,0		100,0	Dinkesda
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						532.816		281.058		285.499		290.009		294.592		
	Terwujudnya desa siaga aktif mandiri	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	%	39,07	40,00	42,00		45,00		47,00		48,00		50,00		50,00	Dinkesda
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						5.100.327		10.000.000		5.100.327		5.180.912		5.262.771		
	Meningkatnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	67,38	68,16	68,36		69,17		69,35		69,53		69,72		69,72	DPUPR
		Persentase Ketersediaan Dokumen Daerah Irigasi	%	83.40	84.40	87.00		87.50		88.00		85.50		90.00		90.00	DPUPR
		Persentase Kondisi Kelembagaan Pengelola Irigasi	%	50.40	55.40	56.00		56.50		57.00		57.50		58.00		58.00	DPUPR
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						1.372.503		4.002.435		1.372.503		2.829.000		4.002.435		
	Meningkatnya ruma tangga dengan akses air minum aman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	31,58	31,59	31,60		31,61		31,62		31,63		40,00		40,00	DPUPR
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						7.256.376		13.000.000		7.102.726		7.371.027		10.000.000		
	Meningkatnya rumah tangga yang memperoleh layanan	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh	%	95,21	95,22	95,23		95,24		95,25		95,26		95,27		95,27	DPUPR



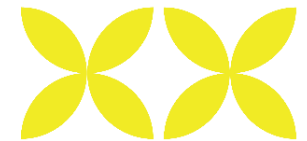
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		2030	
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)			
	pengolahan air limbah domestik	Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik															
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						997.074		2.950.000		997.074		2.950.000		2.996.610		
	Meningkatnya drainase jalan di perkotaan dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persentase Drainase Jalan di Perkotaan dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	30,52	30,60	31,00		31,40		31,81		32,21		32,61		32,61	DPUPR
13	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						216.467		4.000.000		216.467		3.000.000		3.047.400		
	Meningkatnya bangunan gedung dengan kondisi baik	Persentase Bangunan Gedung dengan Kondisi Baik	%	79,58	86,31	87,50		88,69		89,88		90,48		91,67		91,67	DPUPR
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						53.071.295		102.806.907		68.446.175		68.915.241		108.077.971		
	Meningkatnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	15,83	16,49	17,15		17,81		18,47		19,13		19,79		19,79	DPUPR
15	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						109.518		111.249		109.518		109.518		111.249		
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	%	100	100	100		100		100		100		100		100	DPUPR
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						742.582		754.315		742.582		749.100		760.936		
	Meningkatnya kinerja penyusunan dokumen RTR, meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR dan terselenggaranya peneraan sanksi administratif terhadap	Persentase Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR)	%	8,33	30,56	50,00		66,67		77,78		91,67		100,00		100,00	DPUPR
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	%	90,95	91,05	91,08		91,10		91,11		91,13		91,18		91,18	DPUPR
		Persentase Peneraan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tata Ruang	%	0	12,5	25		37,5		50		62,5		75		75	DPUPR



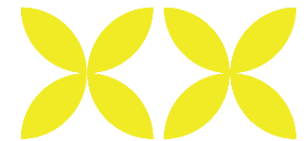
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
	pelanggaran tata ruang																
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
17	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						232.771		236.449		232.771		236.449		240.185		
	Meningkatnya kinerja pengembangan perumahan	Persentase Peningkatan Kinerja Pengembangan Perumahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinperkimta n
18	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						118.347		1.500.000		118.347		1.000.000		1.015.800		
	Meningkatnya luas kawasan kumuh 0-10 Ha yang ditangani	Persentase Luas Kawasan Kumuh 0-10 Ha yang Ditangani	%	86,21	92,11	93,69		95,27		96,85		98,42		100,00		100,00	Dinperkimta n
19	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						2.189.619		2.189.619		2.189.619		2.189.619		2.224.215		
	Meningkatnya rumah tidak layak huni yang ditangani	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang Ditangani	%	87,56	90,84	93,40		96,02		98,72		100,00		100,00		100,00	Dinperkimta n
20	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						1.127.140		1.424.360		1.127.140		1.144.949		1.163.039		
	Meningkatnya perumahan yang dilengkapi demgan prasarana, sarana dan utilitas umum	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Diserahkan	%	48,57	57,14	65,71		74,29		82,86		91,43		100,00		100,00	Dinperkimta n
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																



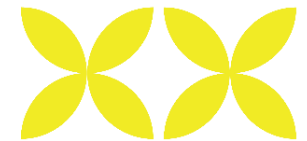
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	2030		
21	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1.709.931		2.500.000		1.709.931		1.736.948		1.764.391		
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persentase Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Satpol PP Damkar
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Satpol PP Damkar
22	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						636.522		4.000.000		636.522		3.000.000		3.047.400		
	Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran dan non kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang Ditangani sesuai Tingkat Waktu Tanggap	%	74	75	76		77		78		79		80		80	Satpol PP Damkar
		Persentase Pelayanan Non Kebakaran	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Satpol PP Damkar
23	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						1.769.628		3.937.280		1.769.628		3.000.000		3.047.400		
	Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase layanan penanganan pra bencana	%	100	100	100		100		100		100		100		100	BPBD
	Meningkatnya layanan penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase layanan penanganan saat terjadi bencana	%	100	100	100		100		100		100		100		100	BPBD
	Meningkatnya layanan penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase layanan penanganan pasca benca na	%	100	100	100		100		100		100		100		100	BPBD



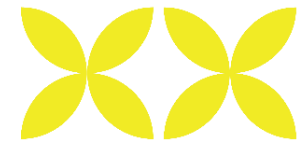
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						16.738		37.247		16.738		17.003		17.272		
	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina	%	13,81	14,11	16,50		18,00		19,50		21,00		21,50		21,50	DINSOSDAL DUKKB
25	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						784		934		784		1.031		1.047		
	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	DINSOSDAL DUKKB
26	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						266.770		302.269		266.770		270.985		275.266		
	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	%	4,27	4,35	5,00		5,50		6,00		6,50		7,00		7,00	DINSOSDAL DUKKB
27	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						6.611.856		6.611.856		6.611.856		6.611.856		6.716.323		
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	94,04	96,45	97,39		97,65		97,94		98,12		98,54		98,54	DINSOSDAL DUKKB
28	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						172.079		178.317		172.079		174.798		177.560		
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Kebutuhan Dasar pada Saat dan Pasca Bencana	%	100	100	100		100		100		100		100		100	DINSOSDAL DUKKB
29	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						70.047		77.287		70.047		71.154		72.278		



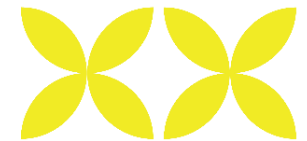
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	2030		
	Meningkatnya tata kelola taman makan pahlawan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai Standar	%	57,5	60,0	62,5		65,0		67,5		70,0		72,5		72,5	DINSOSDAL DUKKB
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
30	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						13.009		17.000		83.009		13.215		13.424		
	Meningkatnya pemanfaatan rencana tenaga kerja yang disusun	Persentase Rencana Tenaga Kerja yang Disusun	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinperintran snaker
31	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						2.195.056		2.195.056		2.001.682		2.229.738		2.264.968		
	Meningkatnya kompetensi pencari kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja yang Memiliki Kompetensi	%	84,63	88,47	88,50		88,60		88,70		88,90		89,00		89,00	Dinperintran snaker
		Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	%	4,69	6,25	7,81		9,38		10,94		12,50		14,06		14,06	Dinperintran snaker
32	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						79.754		181.707		79.754		81.015		82.295		
	Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja	%	67,89	67,92	67,94		67,96		67,99		68,01		68,08		68,08	Dinperintran snaker
33	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						196.086		208.890		196.086		199.184		202.331		
	Meningkatnya sarana hubungan industrial dan syarat kerja	Persentase Sarana Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	%	53,28	55,78	56,56		57,34		58,13		58,91		59,69		59,69	Dinperintran snaker



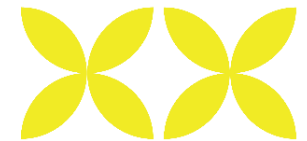
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
34	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						272.894		439.295		272.894		277.206		281.585		
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Kabupaten	%	13,88	14,00	14,00		14,20		14,30		14,40		14,50		14,50	DPPPAPMD
35	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						370.446		429.091		370.446		376.299		382.244		
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani	%	100	100	100		100		100		100		100		100	DPPPAPMD
36	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						14.232		20.429		14.232		14.457		14.685		
	Meningkatnya kualitas keluarga	Hasil Penilaian PUSPAGA	Angka	215	220	225		230		235		240		245		245	DPPPAPMD
37	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						134.182		157.100		134.182		136.302		138.456		
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	61,54	61,62	61,70		61,78		61,86		61,94		62,00		62,00	DPPPAPMD
38	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						192.077		198.979		192.077		195.112		198.195		
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	69,3	69,4	69,5		69,6		69,7		69,8		69,9		69,9	DPPPAPMD



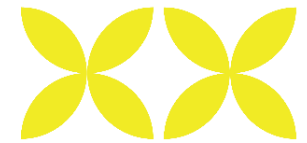
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
	lainnya terhadap anak																
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
39	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN						0		30.000		30.000		30.000		30.000		
	Meningkatnya rasio lumbung pangan yang aktif	Rasio Lumbung Pangan Aktif	%	29,41	29,41	35,29		41,18		47,06		52,94		58,82		58,82	DKPP
40	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						555.749		655.348		525.749		534.530		543.450		
	Meningkatnya angka kecukupan energi dan protein	Angka Kecukupan Energi	Kkal/ Kapita/ Hari	1866	1866	1880		1900		1950		1980		1990		1990	DKPP
		Angka Kecukupan Protein	Gram/ Kapita/ Hari	55,7	55,7	56,0		56,1		56,2		56,3		56,4		56,4	DKPP
41	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						91.022		146.208		91.022		92.460		93.921		
	Menurunnya penanganan desa rentan rawan pangan	Persentase penanganan desa rentan rawan pangan	%	2,29	4,58	12,21		19,85		27,28		35,11		42,75		42,75	DKPP
42	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						22.018		42.201		22.018		22.365		22.719		
	Meningkatnya pangan segar aman asal tumbuhan	Persentase Pangan Segar Aman	%	100	100	100		100		100		100		100		100	DKPP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																
43	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						45.039		118.794		45.039		45.751		46.474		



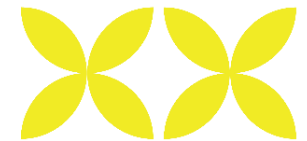
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
	Meningkatnya penanganan sengketa tanah garapan	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	%	0	10	20		40		60		80		100		100	Dinperkimta n
44	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						16.000		16.253		16.000		16.253		16.510		
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Persentase Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	%	0	0	20		40		60		80		100		100	Dinperkimta n
45	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH						100.487		170.382		100.487		102.075		103.687		
	Meningkatnya permohonan izin membuka tanah negara yang disetujui	Persentase Permohonan Izin Membuka Tanah Negara yang Disetujui	%	0	10	20		40		60		80		100		100	Dinperkimta n
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
46	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						87.960		200.000		162.960		189.350		190.762		
	Meningkatnya rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100		100		100		100		100		100	DLHP
47	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						603.448		861.815		548.448		516.982		567.667		
	Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran yang Dilaksanakan	%	87,50	91,67	92,00		92,33		92,67		93,00		93,33		93,33	DLHP
48	PROGRAM PENGELOLAAN						4.079.251		5.500.000		6.200.000		6.100.000		4.143.703		



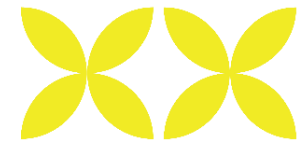
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
	KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)																
	Meningkatnya proporsi luasan ruang terbuka hijau perkotaan	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau terhadap Luas Perkotaan	%	7,23	7,23	7,23		7,23		7,24		7,24		7,24		7,24	DLHP
49	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						13.157		33.000		13.157		53.365		23.576		
	Meningkatnya pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun	Persentase Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang Dilaksanakan	%	65	70	71		73		76		78		80		80	DLHP
50	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						37.897		57.897		92.897		64.496		49.104		
	Meningkatnya ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan	Persentase Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan dalam Pemenuhan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan	%	65	70	73		76		78		80		83		83	DLHP
51	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						96.320		179.000		96.320		97.842		99.388		
	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Bidang	%	7,19	7,59	7,99		11,51		12,55		13,59		14,63		14,63	DLHP



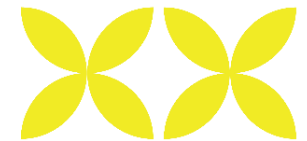
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
	bidang lingkungan hidup yang aktif	Lingkungan Hidup yang Aktif															
52	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						58.708		100.000		58.708		59.635		60.578		
	Meningkatnya penyelenggaraan penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%	66,67	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	DLHP
53	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						8.752		16.355		8.752		38.890		44.030		
	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Pencemaran Lingkungan yang Ditangani	%	100	100	100		100		100		100		100		100	DLHP
54	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						10.359.584		10.359.584		10.284.584		10.259.584		10.259.584		
	Meningkatnya layanan penanganan dan pengurangan sampah	Persentase Penanganan Sampah	%	26,67	26,82	26,97		27,13		27,27		27,43		27,58		27,58	DLHP
		Persentase Pengurangan Sampah	%	23,25	23,38	23,51		23,65		23,78		23,92		24,05		24,05	DLHP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
55	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						872.394		886.178		872.394		886.178		900.179		
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Digital	%	98,68	99,33	99,91		99,93		99,94		99,95		99,97		99,97	Disdukcapil
56	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						39.739		113.503		39.739		40.367		41.005		



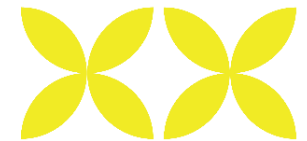
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Digital	%	90,04	90,50	91,75		93,00		94,25		95,50		96,75		96,75	Disdukcapil
57	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						2.571		146.837		2.571		2.611		2.653		
	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Desa dan Kelurahan Pengguna yang Memanfaatkan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik	%	0	0	23		41		61		80		100		100	Disdukcapil
58	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						5.297		12.946		5.297		5.380		5.466		
	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase Kesesuaian Profil dengan Regulasi yang Berlaku	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Disdukcapil
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
59	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						6.619.660		6.715.217		6.619.660		6.620.862		6.725.471		
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa yang Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Desa	%	100	100	100		100		100		100		100		100	DPPPAPMD
	Meningkatnya kerja sama desa	Persentase Bumdesma Mandiri dan Kerja Sama Desa yang Aktif	%	19,19	19,40	20,04		20,47		20,90		21,32		21,75		21,75	DPPPAPMD
60	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						2.157.078		2.228.160		2.157.078		2.191.160		2.225.780		
	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakat. dan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam	%	97,62	97,86	98,08		98,19		98,76		99,32		100		100	DPPPAPMD



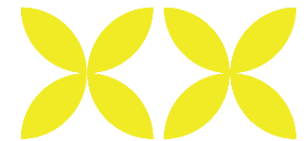
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	2030		
	Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Pemberdayaan Masyarakat															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
61	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						716.770		716.770		716.770		728.095		739.599		
	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19	per 1.000 wanita pada kelompok umur 15-19 tahun	14,4	13,5	12,3		11,3		10,4		9,5		8,7		8,7	DINSOSDAL DUKKB
62	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						9.339.911		9.459.291		9.339.911		9.459.291		9.608.747		
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate)	%	65,98	66,41	67,74		69,09		70,47		71,88		72,00		72,00	DINSOSDAL DUKKB
		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	%	9,38	9,25	9,16		9,07		8,98		8,89		8,85		8,85	DINSOSDAL DUKKB
63	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						4.281.737		4.305.521		4.281.737		4.305.521		4.373.548		
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina	%	87,57	88,82	89,26		89,71		90,16		90,61		91,06		91,06	DINSOSDAL DUKKB
		Persentase Remaja Calon Pengantin yang Mendapat Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Keluarga	%	61,70	63,00	65,00		67,00		69,00		71,00		73,00		73,00	DINSOSDAL DUKKB
	URUSAN PEMERINTAHAN																



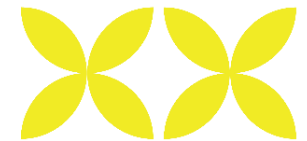
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
	BIDANG PERHUBUNGAN																
64	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						15.305.72 8		15.547.55 8		15.305.72 8		15.305.72 8		15.547.55 8		
	Meningkatnya Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	%	36,56	39,21	40,09		41,41		42,29		43,61		44,49		44,49	Dinhub
	Meningkatnya Penyelenggaraan Angkutan Umum, Terminal dan Titik Parkir yang Tersedia	Persentase Angkutan Umum, Terminal, dan Titik Parkir yang Tersedia	%	53,17	53,50	63,72		64,78		65,69		66,29		66,75		66,75	Dinhub
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terlaksana	Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terlaksana	%	71,84	74,19	93,48		95,28		96,63		97,98		98,88		98,88	Dinhub
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
65	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						1.149.501		1.155.453		1.149.501		1.167.663		1.186.112		
	Meningkatnya jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan, dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	%	61	62	63		64		65		66		67		67	Dinkominfo asandi
66	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						3.670.688		3.689.694		3.670.688		3.728.685		3.787.598		



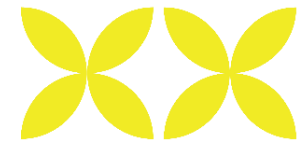
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	2030		
	Meningkatnya jumlah aplikasi yang dibangun/ dikembangkan	Persentase pembangunan/ pengembangan aplikasi sesuai dengan Peta Rencana SPBE	%	13,33	13,33	20		40		60		80		100		100	Dinkominfo asandi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
67	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						14.240		31.397		14.240		14.465		14.694		
	Meningkatnya koperasi dengan akuntabilitas baik	Persentase Koperasi yang Memiliki Akuntabilitas Baik	%	43,31	43,66	44,01		45,77		47,54		48,24		49,30		49,30	DKUKMP
68	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						40.843		81.562		40.843		41.488		42.143		
	Meningkatnya koperasi sehat	Persentase Koperasi Sehat	%	50,89	51,79	53,57		54,46		54,91		55,36		55,80		55,80	DKUKMP
69	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						214.877		210.000		213.318		216.688		220.000		
	Meningkatnya koperasi yang memiliki SDM yang berkompeten	Persentase SDM Koperasi yang Tersertifikasi	%	34,59	37,10	41,28		45,47		49,65		53,84		58,02		58,02	DKUKMP
70	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						62.975		95.000		62.975		63.970		64.981		
	Meningkatnya perkembangan usaha koperasi	Persentase Koperasi Aktif yang Berkembang Usahanya	%	2,46	2,82	3,52		5,28		7,04		8,80		10,56		10,56	DKUKMP
71	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						517.520		525.697		517.520		525.697		534.003		
	Meningkatnya UMKM yang berkualitas dilihat	Persentase UMKM yang Berkualitas	%	8,71	10,84	11,87		13,97		16,07		18,16		20,26		20,26	DKUKMP



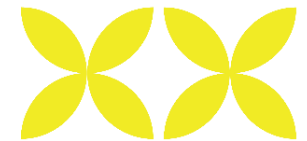
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
	pada aspek kelembagaan, legalitas, dan kemitraan																
72	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						671.959		682.576		671.959		682.576		693.361		
	Meningkatnya UMKM yang mengalami peningkatan usaha pada aspek jumlah tenaga kerja, penjualan produk, dan area pemasaran	Persentase UMKM yang mengalami Peningkatan Usaha	%	1,53	1,86	2,00		2,32		2,65		2,97		3,29		3,29	DKUKMP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
73	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						111.054		159.487		111.054		112.808		114.591		
	Meningkatnya kualitas informasi potensi penanaman modal yang siap dipublikasikan	Persentase Penyediaan Informasi Potensi Penanaman Modal yang Siap Dipublikasikan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	DPMPTSP
74	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						155.417		156.221		155.417		157.872		160.367		
	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Jumlah Kepeminatan (LOI)	LOI	9	9	9		9		9		9		9		45	DPMPTSP
75	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						157.388		311.764		157.388		159.875		162.401		
	Meningkatnya kualitas layanan penanaman modal sesuai norma, standar prosedur dan kriteria	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	%	100	100	100		100		100		100		100		100	DPMPTSP
76	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN						210.935		321.543		210.935		214.268		217.653		



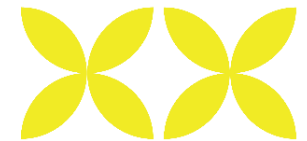
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	2030		
	PENANAMAN MODAL																
	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LKPM	Tingkat Kepatuhan Pelaporan LKPM	%	78,57	78,75	79,00		79,20		79,40		79,60		79,80		79,80	DPMPTSP
77	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						20.837		39.221		20.837		21.167		21.501		
	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Disediakan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	DPMPTSP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
78	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						378.441		380.401		378.441		384.421		390.495		
	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Pemuda Berprestasi	%	7,40	7,40	7,40		7,40		7,41		7,41		7,41		7,41	Dinporapar
79	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						10.069.02 1		8.869.021		8.869.021		8.869.021		11.869.02 1		
	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Organisasi Keolahragaan yang Aktif	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinporapar
80	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						361.841		365.519		361.841		367.558		373.366		
	Meningkatnya kapasitas kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinporapar
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
81	PROGRAM PENYELENGGARAAN						129.069		129.069		129.069		131.108		133.180		



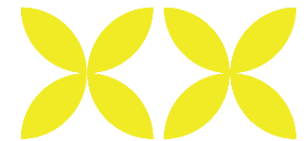
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	2030		
	STATISTIK SEKTORAL																
	Meningkatnya jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinkominfost asandi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																
82	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						338.806		338.806		338.806		344.160		349.597		
	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	84,86	84,97	86,06		87,15		88,24		89,32		89,87		89,87	Dinkominfost asandi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
83	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						3.933.102		1.168.559		1.168.559		1.168.559		1.168.559		
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	%	70	70	70		80		80		80		80		80	Dindikbud
84	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						58.797		68.535		58.797		59.725		60.669		
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	%	52,60	53,61	54,61		58,02		61,43		64,85		68,26		68,26	Dindikbud



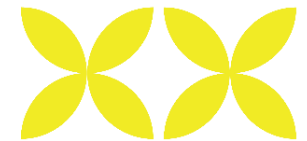
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
85	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						520.222		528.442		520.222		528.442		536.791		
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase Keterlibatan Masyarakat Pelaku Sejarah Lokal	%	3,53	7,21	7,23		7,25		7,28		7,30		7,32		7,32	Dindikbud
86	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						200.424		320.622		200.424		203.591		206.808		
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu	%	28,52	30,28	32,04		33,80		35,56		36,97		38,73		38,73	Dindikbud
87	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						1.000.369		1.016.174		1.000.369		1.016.174		1.032.230		
	Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum	%	-63	1	2		2		2		2		2		2	Dindikbud
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																
88	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						1.409.066		873.320		887.118		901.135		915.373		
	Terwujudnya perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi	%	7,42	8,84	10,27		11,70		13,12		14,55		15,98		15,98	Dinpusip
89	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						5.689		24.103		5.689		5.779		5.871		
	Terlaksananya pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang Dilestarikan	%	21,05	26,32	31,58		36,84		42,11		47,37		52,63		52,63	Dinpusip
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																
90	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						166.911		416.957		166.911		169.548		172.227		
	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip sesuai Kaidah	%	37,50	39,02	39,53		41,86		44,19		46,51		48,84		48,84	Dinpusip



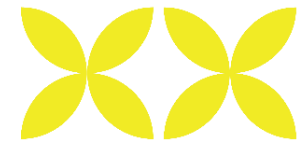
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
		Kearsipan dengan Kategori Cukup															
91	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						18.992		28.193		18.992		19.292		19.596		
	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah	%	57,66	59,36	60,98		62,52		63,99		65,39		66,35		66,35	Dinpusip
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
92	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						327.150		327.150		327.150		332.319		337.570		
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	163,08	167,97	173,01		178,20		183,54		189,05		194,54		194,54	DLHP
93	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						1.398.727		898.727		898.727		898.727		898.727		
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4120,78	4203,1 9	4287,2 5		4373,0 0		4460,4 6		4549,6 7		4640,6 6		4640,66	DLHP
94	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						81.022		94.910		81.022		82.302		83.603		
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan yang diperiksa atau diawasi	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa atau Diawasi	%	100	100	100		100		100		100		100		100	DLHP
95	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						154.395		154.395		154.395		156.834		159.312		
	Meningkatnya produksi pengolahan	Jumlah Produksi Pengolahan dan	Ton	242,97	244,47	245,97		247,47		248,97		250,47		251,97		251,97	DLHP



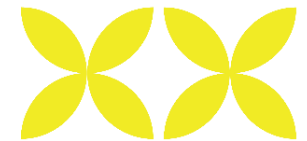
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030					
				2024		Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	2030	
	dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																
96	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						4.787.476		4.814.292		4.787.476		4.863.118		4.939.955		
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	orang	790,969	830,517	822.607		870.066		949.163		1.028.260		1.107.357		1.107.357	Dinporapar
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	148	265	277		289		300		312		324		324	
97	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						996.762		1.093.007		996.762		1.012.511		1.028.509		
	Meningkatnya kualitas layanan pemasaran pariwisata	Persentase Layanan Pemasaran Pariwisata	%	19	24	28		33		38		43		48		48	Dinporapar
98	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						15.125		16.585		15.125		15.364		15.607		
	Meningkatnya fasilitasi sub sektor ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	7,14	7,14	14,29		21,43		28,57		35,71		42,86		42,86	Dinporapar
99	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						136.630		127.359		129.371		136.630		138.789		
	Meningkatnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompeten	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	60	67	69		71		73		75		77		77	Dinporapar
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																



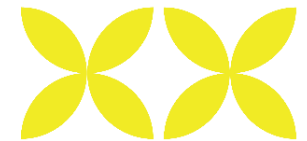
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030			
				2024		Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	2030	
100	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						11.853.911		7.041.202		7.041.202		7.041.202		7.041.202		
	Meningkatnya produksi komoditas pertanian strategis	Jumlah Produksi Padi	Ton/ Tahun	390.599,84	391.576,34	392.555,28		393.536,67		394.520,51		395.506,81		396.495,58		396.495,58	DKPP
		Jumlah Produksi Jagung	Ton/ Tahun	6.634,77	6.654,67	6.674,64		6.694,66		6.714,75		6.734,89		6.755,09		6.755,09	DKPP
		Jumlah Produksi Cabai	Ton/ Tahun	3.251,10	3.264,11	3.277,16		3.290,27		3.303,43		3.316,65		3.329,91		3.329,91	DKPP
		Jumlah Produksi Durian	Ton/ Tahun	5.879,92	5.894,62	5.909,36		5.924,13		5.938,94		5.953,79		5.968,67		5.968,67	DKPP
		Jumlah Produksi Biofarmaka	Ton/ Tahun	4.464,17	4.475,33	4.486,52		4.497,74		4.508,98		4.520,25		4.531,55		4.531,55	DKPP
		Jumlah Produksi Kelapa	Ton/ Tahun	36.751,58	36.898,58	37.046,18		37.194,36		37.343,14		37.492,51		37.642,48		37.642,48	DKPP
		Jumlah Produksi Kopi	Ton/ Tahun	164,90	165,56	166,22		166,88		167,55		168,22		168,89		168,89	DKPP
		Jumlah Produksi Tembakau	Ton/ Tahun	292,41	293,88	295,34		296,82		298,31		299,80		301,30		301,30	DKPP
	Meningkatnya populasi ternak	Jumlah Populasi Ternak	ST/th	117.321,55	119.081,37	120.867,59		122.680,61		124.520,82		126.388,63		128.284,46		128.284,46	DKPP
101	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					8.562.629		9.062.629		8.562.629		8.562.629		8.562.629			
	Meningkatnya kemanfaatan prasarana pertanian yang disediakan	Persentase Kemanfaatan Prasarana Pertanian	%	100	100	100		100		100		100		100		100	DKPP
102	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					396.843		396.843		396.843		403.113		409.482			
	Menurunnya kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Kasus	306	300	294		288		282		276		270		270	DKPP
103	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN					151.749		269.570		151.749		154.147		156.583			



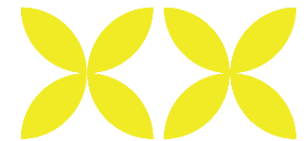
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	2030		
	BENCANA PERTANIAN																
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Fasilitasi Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100	100	100		100		100		100		100		100	DKPP
10 4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						2.165.263		1.395.000		1.417.041		1.439.430		1.462.173		
	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan kapasitas kelompok tani	Persentase Penerapan Teknologi Pertanian	%	15,01	18,03	21,01		24,00		27,02		30,01		33,00		33,00	DKPP
		Skor Kapasitas Kelompok Tani	Skor	239	250	260		270		280		290		300		300	DKPP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
10 5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						3.219.148		8.000.000		3.219.148		22.219.148		22.219.148		
	Meningkatnya pasar rakyat yang memenuhi indikator pasar ber-SNI	Persentase Pasar Rakyat menuju Ber-SNI	%	3,23	3,23	9,68		12,90		16,13		19,35		22,58		22,58	DKUKMP
10 6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						114.141		162.655		114.141		115.944		117.776		
	Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting serta terjaminnya distribusi pupuk bersubsidi sampai dengan Kios pupuk lengkap	Disparitas Harga	%	+2.0	+/- 10	+/- 10		+/- 10		+/- 10		+/- 10		+/- 10		+/- 10	DKUKMP
		Persentase Distribusi Pupuk Bersubsidi sampai dengan Kios Pupuk Lengkap	%	93,16	94,43	94,45		94,47		94,49		94,51		94,53		94,53	DKUKMP
10 7	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						382.903		426.893		382.903		388.953		395.098		



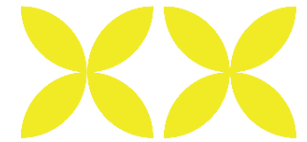
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
	Meningkatnya omzet pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang	Persentase Peningkatan Omzet Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pameran Dagang	%	0	2	2		2		2		2		2		2	DKUKMP
108	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						94.027		284.230		94.027		95.512		97.021		
	Meningkatnya alat UTP yang bertanda tera sah yang berlaku	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	100	100	100		100		100		100		100		100	DKUKMP
109	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						25.170		46.464		25.170		25.568		25.972		
	Meningkatnya omzet pelaku usaha yang dipromosikan penggunaan produk dalam negeri	Persentase Peningkatan Omzet Pelaku Usaha yang Dipromosikan	%	0	2	2		2		2		2		2		2	DKUKMP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
110	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						555.016		781.937		781.937		781.937		781.937		
	Meningkatnya produktivitas IKM tiap tahunnya	Persentase Peningkatan Produktivitas Industri Kecil Menengah	%	6,52	7,29	8,26		8,40		8,53		8,63		8,72		8,72	Dinperintran snaker
111	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						9.580		10.000		9.580		9.731		9.885		
	Meningkatnya layanan perizinan industri kewenangan kabupaten yang memenuhi ketentuan perizinan	Persentase Perizinan Industri Kewenangan Kabupaten yang Memenuhi Komitmen Perizinan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinperintran snaker
112	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						19.717		22.000		19.717		20.029		20.345		



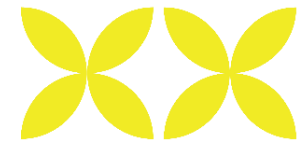
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
	Meningkatnya tingkat kepatuhan pelaporan informasi industri	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Informasi Industri	%	39,13	39,90	39,91		40,34		40,70		41,01		41,28		41,28	Dinperintran snaker
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																
113	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						63.120		101.423		63.120		64.117		65.130		
	Meningkatnya pelaksanaan penempatan transmigran	Persentase Penempatan Transmigrasi	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinperintran snaker
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
	SEKRETARIAT DAERAH																
114	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						15.561.308		12.010.835		12.010.835		12.010.835		12.010.835		
	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,38	96,45	96,51		96,75		97,01		97,55		97,89		97,89	Setda
	Meningkatnya kualitas kebijakan tata pemerintahan dan kerja sama daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Setda
	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Setda
115	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						431.655		438.475		431.655		438.475		445.403		
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan administrasi pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Capaian Kinerja sesuai Target	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Setda



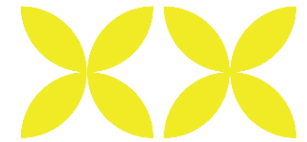
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2026		2027		2028		2029		2030		2030	
						Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)		
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Angka	70,62	71,00	71,50		72,00		72,50		73,00		73,50		73,50	Setda
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan sumber daya alam	Persentase Kegiatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Setda
		Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	4,93	5,33	5,35		5,38		5,40		5,42		5,44		5,44	Setda
		Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	6,08	5,87	5,89		5,92		5,94		5,96		5,98		5,98	Setda
		Return on Asset (ROA) BUMD	%	4,52	4,94	5,36		5,78		6,20		6,62		7,04		7,04	Setda
116	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						22.447.873		22.589.724		22.447.873		22.802.549		28.162.829		
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun n	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Set. DPRD
		Persentase Penetapan Raperda Tahun n	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Set. DPRD
	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Set. DPRD
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
	PERENCANAAN																
117	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						528.049		528.698		528.049		757.066		769.028		
	Meningkatnya kualitas perencanaan	Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Bapperida



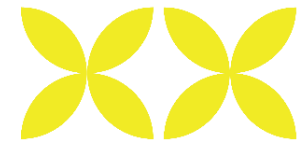
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2026		2027		2028		2029		2030		2030	
						Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)		
	pembangunan daerah																
118	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						539.625		884.961		539.625		913.146		927.574		
	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Bapperida
	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan	Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Bapperida
	KEUANGAN																
119	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						573.923.272		573.923.272		573.923.272		582.991.260		592.202.522		
	Meningkatnya tata kelola anggaran daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	%	100	100	100		100		100		100		100		100	BPKPAD
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan daerah	Tertib Pengelolaan Kas Daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100	BPKPAD
	Meningkatnya tata kelola akutansi daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100	BPKPAD
		Persentase Realisasi Bantuan Keuangan terhadap Anggaran Bantuan Keuangan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	BPKPAD



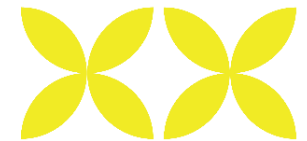
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
		Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100	BPKPAD
120	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						641.291		703.935		641.291		651.423		661.715		
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	93,71	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	BPKPAD
121	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						3.933.074		3.995.217		3.933.074		3.995.217		4.058.341		
	Meningkatnya tata kelola pendapatan daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	%	97,28	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	BPKPAD
	Meningkatnya tata kelola pajak daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah	%	95,71	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	BPKPAD
	KEPEGAWAIAN																
122	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						943.812		1.813.334		943.812		958.724		973.872		
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase ASN Berkinerja Baik	%	96,0	96,5	97,0		97,5		98,0		98,5		99,0		99,0	BKPSDM
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kepegawaian	%	100	100	100		100		100		100		100		100	BKPSDM
	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir dan kompetensi ASN	Persentase Pegawai yang Dipetakan Kompetensinya	%	100	100	100		100		100		100		100		100	BKPSDM
		Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%	94,0	94,5	95,0		95,0		95,0		95,0		95,0		95,0	BKPSDM
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
123	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						1.050.390		1.963.281		1.050.390		1.066.986		1.083.844		
	Meningkatnya layanan	Persentase ASN yang Mendapatkan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	BKPSDM



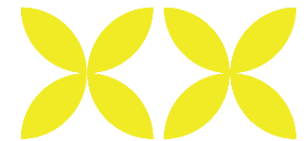
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
	pengembangan komperensi dasar, kader, manajerial, dan fungsional	Pengembangan Kompetensi Dasar, Manejerial, dan Fungsional															
		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	100	100	100		100		100		100		100		100	BKPSDM
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
12 4	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						797.956		850.000		797.956		810.564		823.371		
	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset, inovasi, dan HKI dalam mendukung penyusunan kebijakan dan pembangunan daerah	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan	%	39	40	45		50		60		70		75		75	Bapperida
		Tingkat Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual	%	3,06	3,11	3,16		3,21		3,26		3,31		3,36		3,36	Bapperida
		Jumlah inovasi yang dimiliki daerah	Inovasi	175	195	215		235		255		275		295		295	Bapperida
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
	INSPEKTORAT DAERAH																
12 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						558.091		585.996		558.091		566.909		575.866		
	Meningkatnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	%	82,17	82,45	82,74		83,30		83,87		84,43		85,00		85,00	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Persentase Laporan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang Diterbitkan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Laporan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Diterbitkan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya kualitas pengawasanBidang	Persentase Laporan Pengawasan Bidang Perekonomian dan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Inspektorat Daerah



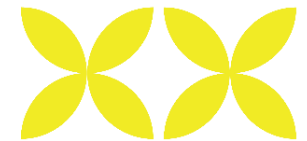
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
	Perekonomian dan Pembangunan	Pembangunan yang Diterbitkan															
	Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Persentase Laporan Pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi yang Diterbitkan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya efektivitas tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Aduan Masyarakat berkadar pengawasan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Inspektorat Daerah
12 6	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						204.692		214.926		204.692		207.926		211.211		
	Meningkatnya kualitas kebijakan teknik dan fasilitasi pengawasan	Persentase kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Pemerintahan dan Aparatu	Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Inspektorat Daerah
	UNSUR KEWILAYAHAN																



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
	KECAMATAN																
12 7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						238.216		513.572		238.217		241.979		245.804		
	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Semua Kecamatan
12 8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						17.446.45 3		18.441.02 6		17.425.57 8		17.574.65 0		17.852.33 3		
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Semua Kecamatan
12 9	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						199.135		452.683		199.136		202.281		205.479		
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Semua Kecamatan
13 0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						327.792		574.979		327.792		329.709		334.710		
	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Semua Kecamatan
13 1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						675.399		1.539.775		675.398		685.080		695.905		
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Semua Kecamatan
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																



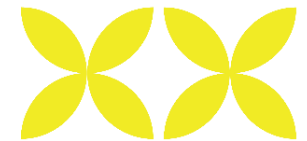
RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
13 2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						1.459.361		1.548.888		1.459.361		1.482.418		1.505.841		
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	0,23	0,23	0,47		0,70		0,93		1,17		1,40		1,40	Bakesbangpo 1
13 3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						1.979.289		1.999.243		25.979.289		37.999.243		2.030.831		
	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Politik	%	2,86	2,91	2,96		3,16		3,55		3,94		4,14		4,14	Bakesbangpo 1
13 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						2.308.939		2.500.000		2.308.939		2.345.420		2.382.478		
	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	0	20	25		30		35		40		45		45	Bakesbangpo 1
13 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						621.403		621.403		621.403		631.221		641.195		
	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Wilayah	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Bakesbangpo 1



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
13 6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						1.028.712		1.343.283		1.028.712		1.044.966		1.061.476		
	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Ditangani	Kejadian	100	100	100		100		100		100		100		100	Bakesbangpo 1
13 7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.403.040 .094		1.390.558 .911		1.347.194 .518		1.344.906 .705		1.344.906 .691		
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Semua Perangkat Daerah
	Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat	Persentase Puskesmas Mencapai Target Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan selama 12 bulan	Angka	50,00	55,00	60		65,00		70,00		72,00		75,00		75,00	Dinkesda (Sub Unit: Puskesmas)
		Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di RSUD Tjitrowardojo	%	83,78	85,00	86		87,00		88,00		89,00		90,00		90,00	Dinkesda (Sub Unit: RSUD Tjitrowardojo)
		Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di RSUD Tjokronegoro	%	90,83	91,00	91,50		92,00		92,50		93,00		93,50		93,50	Dinkesda (Sub Unit: RSUD Tjokronegoro)
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan di RSUD Tjitrowardojo	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinkesda (Sub Unit: RSUD Tjitrowardojo)
		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinkesda (Sub Unit:



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kinerja Kondisi Awal RPJMD	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		2030			
				Target		Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target	Pagu (ribu rupiah)	Target		Pagu (ribu rupiah)		
		Umum, Kepegawaian, dan Keuangan di RSUD Tjokronegoro															RSUD Tjokronegoro)
		Persentase Ketercapaian Layanan Penunjang Medis dan Nonmedis di RSUD Tjokronegoro	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinkesda (Sub Unit: RSUD Tjokronegoro)
	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	Angka	87,41	87,56	87,71		87,86		88,01		88,16		88,31		88,31	Setda
		Rata-Rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	64,34	68,02	70,45		72,89		75,33		77,76		80,20		80,20	Setda
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Setda
	Total						2.528.98 2.713		2.602.08 0.125		2.498.82 9.266		2.537.78 0.061		2.587.59 9.314		

Sumber: Tim Penyusun, 2025

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**1) Pendidikan****a) Program Pengelolaan Pendidikan**

Program Pengelolaan Pendidikan disusun sebagai upaya komprehensif dalam peningkatan layanan pendidikan melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB); penyediaan/ rehabilitasi sarana-prasarana, dan utilitas sekolah; pengadaan sarana-prasarana pendukung pembelajaran berbasis (Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); serta pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh satuan Pendidikan. Program ini mencakup peningkatan kualitas pembelajaran; peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan; operasional satuan Pendidikan; pengembangan pembelajaran digital; pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah inklusi; pelaksanaan penerimaan murid baru; fasilitasi asesmen nasional; fasilitasi dewan Pendidikan; fasilitasi Program Indonesia Pintar (PIP); pembinaan dan pemberian hibah kepada sekolah swasta dan pendidik PAUD; pemberian beasiswa ATS dan peserta didik berprestasi; pembinaan anak beriman dan berkepribadian; pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa; fasilitasi akreditasi sekolah; pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi; dan fasilitasi, identifikasi/ pemetaan, dan pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase satuan pendidikan yang sarana/prasarakannya dalam kondisi baik sebesar 85,21%; pencapaian persentase satuan pendidikan yang memiliki kualitas pembelajaran dengan kategori baik sebesar 54,27% di tahun 2030 akhir RPJMD. Program ini juga ditargetkan mencapai persentase guru yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik di seluruh jenjang sebesar 81,91% dan mencapai persentase satuan Pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan sebesar 85,73% di tahun 2030.

b) Program Pengembangan Kurikulum

Program Pengembangan Kurikulum bertujuan untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pembelajaran melalui penyediaan kurikulum muatan lokal sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan implementasi kurikulum muatan lokal dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. Salah satu fokus utama program ini adalah pengembangan Muatan Lokal di jenjang Pendidikan Dasar guna menanamkan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, potensi wilayah, serta keterampilan hidup yang relevan dengan lingkungan peserta didik. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase satuan pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal yang telah ditetapkan sebesar 100% pada tahun 2029 hingga 2030.

c) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program Pengendalian Perizinan Pendidikan merupakan upaya strategis untuk menjamin bahwa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memenuhi standar minimal kelayakan, legalitas, dan kualitas layanan pendidikan. Program ini mencakup penilaian, pengendalian, pengawasan, serta pembinaan terhadap lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat yang berizin sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD sebagaimana kondisi kinerja di awal RPJMD yang telah mencapai 100%.

d) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program Pengembangan Bahasa dan Sastra bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kekayaan bahasa daerah serta meningkatkan apresiasi terhadap sastra lokal di kalangan peserta didik. Salah satu bentuk kegiatan dalam program ini adalah fasilitasi lomba Festival Bahasa Ibu, yang diselenggarakan sebagai wadah ekspresi, pelestarian, dan pembinaan bahasa ibu di lingkungan pendidikan. Program ini juga menjadi bagian dari upaya strategis pelestarian bahasa daerah yang terancam punah dengan penerapan pembiasaan penggunaan Bahasa Jawa pada hari tertentu dan Fasilitasi lomba Festival Bahasa Ibu di lingkungan pendidikan. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan dan menerapkan pembiasaan penggunaan bahasa Jawa sebesar 100% pada tahun 2030.

2) Kesehatan

a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini mencakup upaya kesehatan perorangan dan masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan dengan pemenuhan alat kesehatan, obat, dan perbekalan Kesehatan; penyediaan fasilitas layanan Kesehatan; pembinaan fasilitas layanan Kesehatan negeri dan swasta. Program ini mencakup layanan kegawatdaruratan dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pihak terkait, baik di fasilitas lanjutan maupun primer sesuai standar, serta meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan meliputi pelayanan kesehatan berdasar siklus hidup; pencegahan dan penanganan penyakit menular, tidak menular, dan stunting; penanggulangan tuberkulosis; pelayanan kesehatan lingkungan dan Kesehatan kerja; peningkatan jaminan Kesehatan; layanan Kesehatan gratis; pengelolaan sistem informasi Kesehatan; pemeriksaan Kesehatan gratis; serta fasilitasi dan koordinasi program makan bergizi gratis.

Program ini ditargetkan pada tahun 2030 mampu mencapai persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 41,11% dan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

sebesar 98,80%. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*Treatment Succes Rate*) ditargetkan mencapai 91,56%, *Neglected Tropical Diseases* (NTDs) ditargetkan sebesar 100,0%, serta angka kematian akibat dengue turun hingga 0,10%. *Annual Parasite Incidence* (API) ditargetkan 0,01 per 1.000 penduduk, persentase diabetes melitus terkendali sebesar 45%, dan insiden HIV sebesar 0,25 per 1.000 penduduk. Selain itu, cakupan imunisasi bayi lengkap ditargetkan mencapai 99%, persentase desa/kelurahan dengan sanitasi total berbasis masyarakat sebesar 75%, serta hipertensi terkendali sebesar 7,17%. Upaya penurunan kasus kematian ibu ditargetkan mencapai 4 kasus per tahun, sedangkan angka kematian balita di targetkan sebesar 78 kasus per tahun. Seluruh puskesmas ditargetkan mencapai peningkatan persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik sebesar 100%, mencapai persentase lanjut usia yang mandiri mencapai 85%, dan cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis sebesar 80%. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, prevalensi obesitas ditargetkan sebesar 21,20% dan persentase perokok usia 10–21 tahun ditekan menjadi 7,40%. Program ini juga menargetkan mencapai persentase depresi yang mendapatkan layanan sebesar 3,00%, serta seluruh fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional sebesar 65% pada tahun 2030.

Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita yaitu Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas program prioritas Menjamin tersedianya yankes bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat serta mendukung *Quick win* Menyelenggarakan pemeriksaan Kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun RS lengkap berkualitas di kabupaten. Program delegasi provinsi yang didukung adalah Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa, Cek Kesehatan Gratis, dan Peningkatan kualitas hidup lansia. Perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk semua warga, Mempermudah dan mempercepat proses pengurusan jaminan sosial Kesehatan, Peningkatan kualitas gizi masyarakat, Membangun dan/atau memperbaiki sanitasi lingkungan merupakan program prioritas Bupati yang didukung oleh Program ini.

- b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Daerah merupakan salah satu fondasi penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan dan pemerataan tenaga Kesehatan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan. Program ini ditargetkan untuk

pencapaian rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi sebesar 5,6 di tahun 2030.

- c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman diarahkan untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, dan usaha mikro obat tradisional, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pangan industri rumah tangga (P-IRT), Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), *post market*, dan sentra jajanan. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase peredaran obat, alat kesehatan dan optikal, serta makanan yang aman dan bermutu sebesar 98,50% dan pencapaian persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sebesar 100% di tahun 2030.
- d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yaitu dengan pembentukan dan pembinaan desa siaga, serta pembinaan posyandu dalam pelaksanaan SPM bidang Kesehatan. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase desa siaga aktif mandiri sebesar 50% di tahun 2030.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Program Penyelenggaraan Jalan
Program ini mendukung program unggulan bupati yaitu Alus Dalane yang diwujudkan dalam pembangunan maupun preservasi jalan kabupaten serta penyediaan infrastruktur pendukung. Program ini dilaksanakan melalui pemeliharaan rutin dan berkala jalan, pemeliharaan rutin dan berkala jembatan, survei kondisi jalan/jembatan, penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) jalan, rehabilitasi/rekonstruksi jalan, peningkatan kapasitas Jalan, dan penggantian jembatan, Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 19,79% di tahun 2030 akhir RPJMD.
- b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program ini mencakup penyusunan DED drainase perkotaan Purworejo-Kutoarjo, penyusunan *masterplan* drainase perkotaan Purwodadi, rehabilitasi/ peningkatan drainase perkotaan Purworejo-Kutoarjo, dan pemeliharaan drainase perkotaan Purworejo-Kutoarjo. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase drainase jalan di perkotaan dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat sebesar 32,61% di tahun 2030 akhir RPJMD.
- c) Program Penataan Bangunan Gedung
Program penataan bangunan gedung diarahkan dalam rangka menata bangunan gedung yang ada di Kabupaten Purworejo baik yang milik pemerintah maupaun masyarakat agar memenuhi standar teknis pendirian sebuah bangunan sehingga menjadi jaminan bahwa bangunan telah dibangun sesuai dengan yang direncanakan dan siap digunakan dengan memenuhi persyaratan

keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Program ini dilaksanakan melalui pembangunan gedung pemerintah daerah, penyusunan DED/review DED pembangunan gedung pemerintah daerah, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Sertifikat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Tindak Pengendalian Bangunan Gedung (RTP) Bangunan Gedung, fasilitasi Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis dan Penilik bangunan gedung. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase bangunan gedung dengan kondisi baik sebesar 91,67% di tahun 2030 pada akhir RPJMD.

d) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program pengembangan jasa konstruksi diarahkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan menghasilkan pekerjaan jasa konstruksi yang berkualitas. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan industri jasa konstruksi. Program ini dilaksanakan melalui penyediaan data dan informasi jasa konstruksi lingkup kabupaten, pelatihan tenaga kerja konstruksi (operator, teknisi dan analis), serta pengawasan dan evaluasi tertib jasa konstruksi. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

e) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum merupakan salah satu program strategis nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan akses air minum yang aman, merata, dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan melalui penyusunan DED SPAM, peningkatan SPAM jaringan perpipaan, pembinaan kelompok pembina sistem pembangunan air minum, pembinaan SPAM tingkat desa, dan perluasan SPAM jaringan perpipaan. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase rumah tangga dengan akses air minum aman sebesar 31,38% di akhir periode RPJMD.

f) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah merupakan bagian penting dari upaya nasional dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan sanitasi yang layak dan aman. Program ini dilaksanakan melalui penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja, pembinaan kelompok penerima pemanfaat sanitasi, pembangunan jamban sehat, optimalisasi kapasitas Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT), dan penyusunan DED pembangunan IPLT. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 95,27% di tahun 2030. Pengelolaan air limbah domestik juga

memiliki dampak pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim.

g) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada ketahanan pangan daerah. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan/ rehabilitasi jaringan irigasi permukaan kewenangan kabupaten, pembinaan Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A)/ Gabungan Perkumpulan Petani Pengguna Air (GP3A) DI kewenangan kabupaten, pemeliharaan darurat jaringan irigasi, penyediaan bahan banjiriran, bahan/material Operasi dan Pemeliharaan (OP), , peralatan kerja OP, pemeliharaan rutin dan berkala jaringan irigasi, operasi jaringan irigasi, operasional Komisi Irigasi (KOMIR) dan Unit Pengelola Irigasi (UPI) di tingkat pengamat, penyusunan/ reviu DED JI, penyusunan data hidrologi (curah hujan & debit sungai), dan rehabilitasi bendung irigasi kewenangan kabupaten. Program ini mendukung program unggulan ayam petanine dengan rencana implementasi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 72,45%, persentase ketersediaan dokumen daerah irigasi sebesar 90,00%, serta persentase kondisi kelembagaan pengelola irigasi sebesar 58,00% pada tahun 2030.

h) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Tujuan utama program penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Purworejo adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berdaya saing bertumpu pada sektor pariwisata, industri dan pertanian yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan melalui pelaksanaan persetujuan substansi RTRW dan RDTR, penetapan kebijakan tata ruang, evaluasi kebijakan dan penilaian perwujudan tata ruang, sosialisasi kebijakan tata ruang, penyusunan peta dasar, penyusunan RTRW dan RDTR, koordinasi tata ruang, pelaksanaan dan penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR), dan pengenaan sanksi administratif pelanggaran tata ruang. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase kinerja penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) sebesar 100%; persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) sebesar 91,18%; serta persentase pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tata ruang sebesar 75% di akhir periode RPJMD.

4) Perumahan dan Kawasan Permukiman

a) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh merupakan program yang mewadahi kegiatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat melalui perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) guna mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase rumah tidak layak huni (RTLH) yang ditangani sebesar 17,59% di tahun 2030 akhir RPJMD. Program ini merupakan salah satu program Dinperkimtan yang mendukung 2 misi Asta Cita yaitu (1) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritime industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi ; dan (2) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh juga mendukung program delegasi provinsi ke-7 yaitu pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan pusat rekreasi dan promosi pembangunan, dan gelanggang olahraga internasional. Selain itu, program tersebut juga mendukung beberapa misi Bupati Purworejo antara lain (1) pemerataan pembangunan infrastruktur di semua Wilayah Kabupaten Purworejo; (2) melaksanakan program perumahan rakyat dengan merenovasi, membangun bagi masyarakat yang membutuhkan, dan (3) penggunaan material yang ramah lingkungan dalam pembangunan Infrastruktur.

- b) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) merupakan kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan yang terdiri dari verifikasi dan penyerahan PSU pemukiman dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo serta pembangunan PSU perumahan yang telah diserahkan kepada Pemda. Kegiatan penyerahan PSU bertujuan untuk menjamin pemeliharaan PSU yang berkelanjutan guna mewujudkan lingkungan hunian yang layak.

Kegiatan penyerahan PSU perumahan dilakukan untuk mencegah kerugian negara melalui penertiban PSU perumahan dengan melakukan pelimpahan aset tanah dan/atau bangunan fasilitas umum beserta pengelolaannya dari pengembang kepada pemerintah daerah. Jika setelah penyerahan, PSU mengalami kerusakan atau tidak layak, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat melakukan penganggaran untuk dilakukan perbaikan. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan yang diserahkan sebesar 100% di tahun 2030 pada akhir RPJMD.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) mendukung tercapainya 8 Misi Asta Cita, program Delegasi Provinsi, maupun program Pitulungan Bupati Purworejo. Dukungan terhadap

capaian 8 Misi Asta Cita meliputi Asta Cita ke-3 yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi serta Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Dukungan terhadap capaian program Delegasi Provinsi yaitu pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan pusat rekreasi dan promosi pembangunan, dan gelanggang olahraga internasional. Dukungan terhadap capaian program Pitulungan Bupati Purworejo antara lain Misi 2 Nomor 1 yaitu pemerataan pembangunan infrastruktur di semua wilayah Kabupaten Purworejo, Misi 2 Nomor 2 yaitu melaksanakan program perumahan rakyat dengan merenovasi, membangun bagi masyarakat yang membutuhkan, serta Misi 2 Nomor 3 yaitu penggunaan material yang ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur.

c) Program Pengembangan Perumahan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase peningkatan kinerja pengembangan perumahan sebesar 100% di tahun 2030. Program Pengembangan Perumahan terdiri dari beberapa kegiatan dalam melaksanakan urusan bidang perumahan yang meliputi identifikasi perumahan di lahan rawan bencana dan lokasi potensial untuk relokasi; pendataan rumah terdampak bencana dan verifikasi calon penerima korban bencana; pembangunan rumah terdampak bencana; operasional dan pemeliharaan Rusunawa, dukungan koordinasi pendapatan; serta koordinasi dan verifikasi dalam rangkapengesahan *siteplan* perumahan yang dimohon oleh pengembangan penyusunan *siteplan* pengembang. Program Pengembangan Perumahan mendukung tercapainya 8 Misi Asta Cita, program Delegasi Provinsi, maupun program Pitulungan Bupati Purworejo. Dukungan terhadap capaian 8 Misi Asta Cita meliputi Asta Cita ke-3 yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi serta Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Dukungan terhadap capaian program Delegasi Provinsi yaitu pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan pusat rekreasi dan promosi pembangunan, dan gelanggang olahraga internasional. Dukungan terhadap capaian program Pitulungan Bupati Purworejo antara lain Misi 2 Nomor 1 yaitu pemerataan pembangunan infrastruktur di semua wilayah Kabupaten Purworejo, Misi 2 Nomor 2 yaitu melaksanakan program

perumahan rakyat dengan merenovasi, membangun bagi masyarakat yang membutuhkan, serta Misi 2 Nomor 3 yaitu penggunaan material yang ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur.

d) Program Kawasan Permukiman

Program ini terkait dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, pengembangan lingkungan sehat permukiman, serta pengembangan prasarana dan sarana permukiman pada kawasan peruntukan budidaya permukiman. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase luas kawasan kumuh 0-10 Ha yang ditangani sebesar 100% di tahun 2030 pada akhir RPJMD.

Program kawasan permukiman merupakan program pembangunan yang mewadahi beberapa kegiatan yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman kumuh. Beberapa kegiatan tersebut antara lain monitoring dan evaluasi bantuan rehabilitasi rumah dari provinsi/ pusat, serta pemugaran/ penyediaan sarpras dalam rangka penanganan kawasan kumuh. Program kawasan permukiman sama dengan program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, yaitu mendukung 2 misi Asta Cita yaitu (1) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritime industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi ; dan (2) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Program kawasan permukiman juga mendukung program delegasi provinsi ke-7 yaitu pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan pusat rekreasi dan promosi pembangunan, dan gelanggang olahraga internasional. Selain itu, program tersebut juga mendukung beberapa misi Bupati Purworejo antara lain (1) pemerataan pembangunan infrastruktur di semua Wilayah Kabupaten Purworejo; (2) melaksanakan program perumahan rakyat dengan merenovasi, membangun bagi masyarakat yang membutuhkan, dan (3) penggunaan material yang ramah lingkungan dalam pembangunan Infrastruktur.

5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

a) Program Penanggulangan Bencana

Program Penanggulangan Bencana diarahkan pada rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, serta untuk mempersiapkan dan menangani situasi darurat akibat bencana. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten (per jenis bencana); penyusunan kajian risiko bencana kabupaten; penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; gladi kesiapsiagaan terhadap bencana; pelatihan keluarga tanggap bencana alam; penguatan kapasitas kawasan/ desa

untuk pencegahan dan kesiapsiagaan; pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten; penyusunan dokumen rencana kontijensi; pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana; penyusunan dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana kabupaten; penyusunan dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana kabupaten; pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten untuk masyarakat dan kelompok rentan; respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah Zoonosis Prioritas; respon cepat darurat bencana kabupaten; pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten; penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten; respon cepat bencana non alam epidemi/ wabah penyakit; serta aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana. Program ini ditargetkan untuk pencapaian terpenuhinya unsur penanggulangan bencana (penanganan pra bencana, penanganan tanggap darurat bencana, penanganan pasca bencana) sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD. Program ini mendukung langsung terhadap 3 jenis layanan SPM bidang Trantibumlinmas, yakni pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Program ini mendukung terhadap Asta Cita program nasional Indonesia, program ini secara langsung mendukung Asta Cita 8, yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, melalui kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan pencegahan yang dilakukan bersama masyarakat, mendukung pula Program Prioritas 5 mengenai pemberantasan kemiskinan karena dampak bencana memunculkan kemiskinan baru, sehingga program penanggulangan bencana ini membantu mencegah warga jatuh miskin. Dalam konteks dukungan terhadap program prioritas Bupati Purworejo, program ini mendukung M1.10, yaitu pemberian penyuluhan dini dan pelatihan untuk mengurangi risiko dampak bencana, misalnya melalui sosialisasi kebencanaan, pelatihan mitigasi di tingkat desa, serta simulasi/gladi evakuasi bencana, dan juga mendukung M2.5, yaitu penguatan mitigasi kebencanaan secara terstruktur dan nonstruktur, misalnya melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana dan pelatihan mitigasi bencana. Sementara untuk dukungan terhadap Pitulungan, program penanggulangan bencana tidak memiliki keterkaitan langsung atau dukungan spesifik, Program ini mendukung Delegasi Provinsi yang didukung yaitu Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat serta Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana. Program ini juga mendukung Misi ke 2 Bupati/Wakil Bupati Purworejo yaitu Penguatan mitigasi kebencanaan secara terstruktur dan non struktur serta Pengembangan mitigasi dengan *Early Warning System* (EWS)

bencana berbasis internet of thing (IoT). Program ini juga mendukung pencapaian SPM Sub Urusan Bencana yaitu Pelayanan informasi rawan bencana daerah, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang tertuang dalam 12 sub kegiatan.

b) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase penanganan pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) sebesar 100% serta persentase penegakan Perda dan Perkada sebesar 100% di tahun 2030 akhir RPJMD. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; penegakan Perda dan Perkada; serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung penegakan Perda dan Perkada. Program ini mendukung langsung dalam dua jenis layanan SPM bidang Trantibumlinmas, yakni pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi, serta pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu.

Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) dapat mendukung Pitulungan, Pitulungan, Asta Cita dan Delegasi Provinsi dan Delegasi Provinsi, khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan menjaga Trantibum, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan, ekonomi, dan sosial, serta membantu mencapai tujuan Pitulungan, Asta Cita dan Delegasi Provinsi lainnya seperti peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.

c) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini mencakup berbagai kegiatan untuk mencegah, mengendalikan, dan menyelamatkan nyawa serta properti dari kebakaran dan bahaya non-kebakaran termasuk pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase kejadian kebakaran yang ditangani sesuai tingkat waktu tanggap sebesar 80% dan persentase pelayanan non kebakaran sebesar 100% di tahun 2030 akhir RPJMD. Program ini mendukung langsung terhadap pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang merupakan salah satu dari enam jenis layanan SPM bidang Trantibumlinmas.

Adapun dukungan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran pada Pitulungan, Asta Cita dan Delegasi Provinsi mencakup berbagai kegiatan untuk mencegah, mengendalikan, dan menyelamatkan nyawa serta properti dari kebakaran dan bahaya non-kebakaran.

Ini termasuk pencegahan melalui inspeksi, pendidikan, dan sosialisasi, serta penanggulangan melalui pemadaman dan penyelamatan.

6) Sosial

a) Program Penanganan Bencana

Program Penanganan Bencana memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana secara cepat, tepat, dan terkoordinasi, serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, sehingga mampu meminimalkan dampak yang terjadi, baik secara fisik maupun psikososial. Program ini diarahkan untuk fasilitasi lumbung sosial penanganan bencana; pembinaan taruna siaga bencana; pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana melalui taruna siaga bencana; fasilitasi bantuan penyediaan makanan serta sandang bagi korban alam dan sosial; fasilitasi penanganan khusus bagi kelompok rentan korban bencana alam dan sosial; fasilitasi pelayanan dukungan psikologis korban bencana alam dan sosial; serta fasilitasi penyediaan dan pengelolaan tempat penampungan pengungsi korban bencana alam dan sosial. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Pasca Bencana sebesar 100% di tahun 2030 akhir RPJMD.

b) Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, peran, dan fungsi para pelaku kesejahteraan sosial di masyarakat agar lebih mampu berpartisipasi aktif dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial, menciptakan kemandirian, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Program ini diarahkan untuk koordinasi pelaksanaan penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang; fasilitasi dan koordinasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); pembinaan Lembaga kesejahteraan sosial kabupaten/ kota; pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam mendukung pengentasan masalah sosial; pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial perseorangan kewenangan kabupaten; pendataan, verifikasi, dan validasi sertifikasi sumber daya kesejahteraan sosial daerah. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina sebesar 21,5% di tahun 2030 akhir RPJMD. Melalui program ini, diharapkan persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan program pemberdayaan sosial dapat meningkat setiap tahunnya.

Program ini mendukung terhadap Asta Cita program nasional Indonesia, khususnya Asta Cita 4 yang memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, karena kegiatan pemberdayaan sosial ini secara langsung meningkatkan kemampuan para aktor sosial tanpa memandang gender, usia, dan latar belakang, serta menciptakan ruang partisipasi yang inklusif bagi semua kelompok, selain itu, program ini juga mendukung Program Prioritas 10 yang berkaitan dengan penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan dalam setiap proses pemberdayaan, meskipun dalam pelaksanaannya tidak secara langsung terkait dengan program delegasi Provinsi Jawa Tengah maupun program prioritas Bupati Purworejo, program pemberdayaan sosial ini tetap memiliki peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang tangguh, inklusif, dan berdaya, di mana keberadaan para pelaku kesejahteraan sosial yang telah diperkuat kapasitasnya akan mampu membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat, selain itu, meskipun tidak tercatat sebagai bagian dari dukungan terhadap pitulungan secara formal, semangat gotong royong, solidaritas, dan kepedulian sosial yang melekat dalam aktivitas pemberdayaan sosial ini sejalan dengan nilai-nilai pitulungan yang hidup di masyarakat Purworejo, sehingga secara tidak langsung turut mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat secara sosial, harmonis, dan berdaya saing, oleh karena itu, Program Pemberdayaan Sosial menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan sosial di Kabupaten Purworejo yang tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah sosial secara langsung tetapi juga membangun fondasi yang kuat melalui penguatan kapasitas, partisipasi, dan kolaborasi semua pihak dalam menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan

c) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan untuk fasilitasi pemulangan warga negara korban tindak kekerasan dan titik debarkasi di Daerah Kabupaten/ kota untuk dipulangkan ke Daerah/ kelurahan asal. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan sebesar 100% dari tahun 2026 hingga 2030.

d) Program Rehabilitasi Sosial

Program ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui serangkaian kegiatan terpadu yang berfokus pada penyediaan permakanan bagi PPKS kewenangan kabupaten/kota sesuai standar gizi minimal kewenangan kabupaten; penyediaan sandang bagi PPKS kewenangan kabupaten/kota; fasilitasi penyediaan alat bantu disabilitas; fasilitasi reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota; fasilitasi bimbingan fisik, mental, spiritual, dan

sosial bagi disabilitas; pelaksanaan bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan, pengemis, dan masyarakat; fasilitasi pelaksanaan program sekolah rakyat; fasilitasi pelaksanaan program Kesehatan dasar; pengelolaan dan penyediaan layanan data dan pengaduan bagi masyarakat kabupaten/kota; penyediaan dan pengelolaan layanan kedaruratan bagi masyarakat kabupaten/kota; pengelolaan dan fasilitasi pelayanan penelusuran keluarga; pengelolaan dan koordinasi layanan rujukan sosial; penyediaan dan distribusi perbekalan Kesehatan di luar panti; fasilitasi pendataan dan penyusunan dokumen kependudukan bagi kelompok rentan; serta fasilitasi, koordinasi dan penguatan kemitraan antar lembaga dalam rehabilitasi sosial kewenangan kabupaten/kota. Program ini ditargetkan untuk persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di luar panti sosial sebesar 7% di tahun 2030 akhir RPJMD.

Program ini sejalan dengan Asta Cita 4 yaitu memperkuat pembangunan SDM, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, selain mendukung Program Prioritas 5 pemberantasan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada keluarga miskin dan kelompok rentan, dan Program Prioritas 10 yaitu penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas, pada level provinsi, program ini mendukung delegasi Provinsi Jawa Tengah, antara lain poin 14 berupa pemberian bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan, dan anak, 16 perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin, serta 30 peningkatan kualitas hidup lansia, yang seluruhnya memiliki irisan kuat dengan pelayanan rehabilitasi sosial yang inklusif, sementara pada tingkat kabupaten, program ini mendukung Misi Bupati Purworejo, yaitu M2.5 penguatan mitigasi kebencanaan secara terstruktur dan non-struktur melalui layanan kedaruratan, penyediaan bantuan pasca bencana, dan kerja sama antar lembaga, serta M5.8 penguatan koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak yang diimplementasikan melalui layanan bimbingan sosial, bantuan hukum, dan rehabilitasi berbasis keluarga, tidak hanya itu, program rehabilitasi sosial ini juga mendukung semangat pitulungan Kabupaten Purworejo, khususnya melalui semboyan Sejahtera Wargane dengan memastikan warga rentan mendapat perhatian, Sehat Penduduke melalui bantuan kesehatan dan alat bantu, serta Pinter Bocahe dengan memastikan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, oleh sebab itu, program ini tidak hanya menjadi bentuk hadirnya negara di tengah masyarakat tetapi juga mewujudkan

komitmen Purworejo dalam membangun masyarakat yang inklusif, sejahtera, sehat, dan berdaya, dengan prinsip gotong royong dan keberpihakan pada yang lemah.

e) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, memperkuat ketahanan sosial, serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga, terutama anak-anak terlantar, fakir miskin, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu sehingga mereka memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang secara sosial dan ekonomi. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial sebesar 98,54% di akhir periode RPJMD. Dengan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan, yaitu pengelolaan UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi dalam penjangkauan anak-anak terlantar kewenangan kabupaten/kota; fasilitasi dan koordinasi pemutakhiran data sosial dan ekonomi; pelaksanaan pendataan, pengelolaan data sosial dan ekonomi; verifikasi dan sinkronisasi data penerima bantuan jaminan kesehatan dan bantuan sosial; pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE); koordinasi dan pembinaan Program Keluarga Harapan (PKH); fasilitasi penyaluran bantuan sosial bagi PPKS dan buruh tembakau; serta fasilitasi penyaluran bantuan sosial untuk LKSA, Panti, PAYMD, PAY, dan Yayasan sosial.

f) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan bertujuan menjaga, merawat, dan meningkatkan fungsi Taman Makam Pahlawan (TMP) sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan berupa rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana TMP sesuai standar kemensos; pengelolaan dan pemeliharaan rutin taman makam pahlawan nasional; pengelolaan layanan pemakaman di taman makam pahlawan nasional; serta pengelolaan dan fasilitasi pelayanan ziarah dan studi di TMP nasional. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase ketersediaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan (TMP) sesuai standar sebesar 72,5% di akhir periode RPJMD.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

a) Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program Perencanaan tenaga kerja diarahkan pada penyusunan rencana tenaga makro dan fasilitasi penyusunan rencana tenaga mikro kepada perusahaan. Penyusunan perencanaan tenaga kerja dapat dijadikan sebagai landasan bagi pemerintah Kabupaten Purworejo dalam merumuskan kebijakan guna penciptaan

lapangan kerja guna optimalisasi sektor ekonomi, penguatan aktivitas ekonomi secara luas yang terarah dan efektif. Program ini ditargetkan untuk meningkatnya pemanfaatan rencana tenaga kerja yang disusun dengan indikator kinerja persentase rencana tenaga kerja yang disusun sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

b) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program penempatan tenaga kerja diarahkan melalui pelayanan antar kerja; bursa kerja; fasilitasi Unit Layanan Disabilitas (ULD); bimbingan jabatan kepada pencari kerja; perluasan tenaga kerja; dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan). Sasaran pada program ini adalah meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dengan indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja sebesar 68,08% di akhir periode RPJMD.

c) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja diarahkan melalui pelatihan berdasarkan unit kompetensi; penyediaan sarana dan prasarana pelatihan (dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah); pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; dan konsultasi produktivitas kepada perusahaan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi, meningkatkan produktivitas dan daya saing pasar kerja serta mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi pencari kerja. Program ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam merumuskan kebijakan guna penciptaan lapangan kerja guna optimalisasi sektor ekonomi, penguatan aktivitas ekonomi secara luas yang terarah dan efektif. Sasaran pada program ini adalah meningkatnya kompetensi pencari kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan indikator kinerja Persentase pencari kerja yang memiliki kompetensi sebesar 89% dan Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja sebesar 14,06% di tahun 2030.

d) Program Hubungan Industrial

Program Hubungan Industrial dirancang sebagai landasan strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan. Secara sederhana, hubungan industrial menggambarkan interaksi dan dinamika antara pengusaha, pekerja dan pemerintah. Hubungan ini tidak hanya terbatas pada masalah upah dan kondisi kerja, tetapi juga mencakup aspek-aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi interaksi di tempat kerja. Program ini diarahkan melalui kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; pengesahan peraturan perusahaan; pendaftaran perjanjian kerja bersama; pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja; pendataan hubungan industrial dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha; serta

operasional lembaga kerja sama tripartit dan dewan pengupahan. Sasaran pada program ini adalah meningkatnya sarana hubungan industrial dan syarat kerja dengan indikator kinerja persentase sarana hubungan industrial dan syarat kerja sebesar 59,69% di tahun 2030.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Program Perlindungan Perempuan

Program perlindungan perempuan bertujuan untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya untuk mendukung Program Prioritas Sejahtera Wargane. Program perlindungan perempuan diarahkan melalui koordinasi perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan; pembinaan dan pembekalan pengasuhan keluarga rentan; serta penyediaan layanan kasus kekerasan terhadap perempuan. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani sebesar 100% selama periode 2026 hingga 2030.

b) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program peningkatan kualitas keluarga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga melalui berbagai aspek seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Program ini mencakup kegiatan koordinasi dan fasilitasi peningkatan kualitas keluarga yang mendorong kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pembentukan keluarga yang harmonis untuk mendukung Program Prioritas Sejahtera Wargane. Program ini ditargetkan untuk pencapaian hasil penilaian Pusat Perlindungan Keluarga (PUSPAGA) sebesar 245 pada akhir periode RPJMD.

c) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) adalah upaya konkrit untuk memastikan setiap anak dapat menikmati hak-haknya, termasuk hak hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan. Program ini mencakup kegiatan fasilitasi Forum Komunikasi Anak Kabupaten Purworejo (Forkare); koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA); pelaksanaan pencegahan pernikahan anak dan pekerja anak; koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak/Konvensi Hak Anak (KHA); serta pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan Kecamatan/Desa Layak Anak. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) sebesar 62 pada akhir periode RPJMD.

d) Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak (PPA) bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi anak dalam situasi dan kondisi tertentu, serta memastikan mereka mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan tumbuh kembang mereka. Program ini mencakup kegiatan koordinasi perlindungan

dan pencegahan kekerasan terhadap anak; advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak; dan kampanye perlindungan perempuan dan anak di sekolah. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) sebesar 69,90 pada akhir periode RPJMD.

- e) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan peran mereka dalam pembangunan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Program ini mencakup kegiatan koordinasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG); koordinasi dan pembinaan terkait perencanaan dan penganggaran responsif gender; koordinasi dan fasilitasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA); fasilitasi dan koordinasi Program Kecamatan Berdaya; pembinaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota; fasilitasi Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Dharma wanita persatuan, dan sekolah Perempuan Cerdas Masa Kini (Serat Kartini) Kabupaten Purworejo. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase anggaran responsif gender (ARG) tingkat kabupaten sebesar 14,5% pada akhir periode RPJMD.

3) Pangan

- a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
Program ini diarahkan pada pencapaian sasaran meningkatnya rasio lumbung pangan yang aktif dengan indikator kinerja Rasio Lumbung Pangan yang aktif sebesar 58,85% pada akhir periode RPJMD. Aktivitas pada program ini adalah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik guna mendorong kedaulatan dan kemandirian pangan kabupaten. Program ini berfokus untuk meningkatkan kelembagaan lumbung pangan yang ada untuk dapat berfungsi optimal dan beroperasi secara aktif dalam menyimpan dan mendistribusikan cadangan pangan masyarakat.
- b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan gerakan pangan murah; penyelenggaraan Pasar Tani; penyusunan dokumen pemantauan stok bahan pangan; penyusunan dokumen neraca bahan makanan; pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten; penyusunan dokumen Pola Pangan Harapan (PPH); pelatihan pangan lokal; sosialisasi pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang, dan aman; lomba olahan pangan lokal serta lomba cipta menu dalam rangka mendukung Program Pitulungan Ayam Petanine. Program ini ditargetkan untuk pencapaian angka kecukupan energi sebesar 1990 Kkal/kapita/hari serta angka kecukupan protein sebesar 56,4 Gram/kapita/hari pada tahun 2030.
- c) Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada koordinasi penanganan desa rentan rawan pangan, pelatihan di desa rentan rawan pangan, sosialisasi stop boros pangan, dan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan. Sasaran pada program ini adalah meningkatnya penanganan desa rentan rawan pangan dengan indikator kinerja Persentase Penanganan Desa Rentan Rawan Pangan menjadi sebesar 42,75% pada tahun 2030. Penurunan ini dicapai melalui sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, dengan memanfaatkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) pada tahun 2024 sebagai basis data untuk mengidentifikasi daerah yang perlu intervensi guna meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

d) **Program Pengawasan Keamanan Pangan**

Program ini diarahkan pada penyediaan sarana pengujian keamanan pangan; pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan; pembinaan dan monitoring ke pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan; penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pangan segar aman sebesar 100% selama periode 2026 hingga 2030. Penjaminan pangan segar aman bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk produk pangan asal tumbuhan yang tidak aman, memastikan ketersediaan pangan asal tumbuhan yang aman, bermutu, dan bergizi, serta memberikan jaminan bahwa produk pangan yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

4) Pertanian

a) **Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah**

Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah mencakup proses Perolehan Hak Atas Tanah Negara sehingga Pemda Kabupaten Purworejo memiliki kewenangan untuk mengatur, mengendalikan serta memanfaatkan tanah negara sesuai tata ruang dan tata wilayah. Selain itu, program ini juga mendukung pengelolaan tanah negara agar dapat memberikan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang berdampak dalam percepatan pengendalian pemanfaatan tanah negara dalam hal kepastian hukum, serta meningkatkan perekonomian masyarakat pemanfaat tanah negara. Program ini diarahkan pada pemetaan permohonan hak pakai atas tanah negara. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase permohonan izin membuka tanah negara yang disetujui sebesar 100% pada tahun 2030.

b) **Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

Program penyelesaian sengketa tanah garapan diarahkan pada sosialisasi dan proses penyusunan kesepakatan warga/ desa pada lokasi tanah negara yang terpilih. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penanganan sengketa tanah garapan dengan target pencapaian persentase penanganan sengketa tanah garapan sebesar 100% pada tahun 2030.

- c) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente
Program redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absente diarahkan pada kegiatan koordinasi GTRA dengan OPD terkait dan BPN dalam rangka penataan akases reforma agraria. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebesar 100% pada tahun 2030.

5) Lingkungan Hidup

- a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Sesuai UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Program Perencanaan Lingkungan Hidup mencakup dokumen KLHS, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Neraca SDA, dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) merupakan rangkaian upaya sistematis dan terstruktur yang dilakukan untuk merancang, mengelola, dan mengarahkan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan agar kualitas hidup manusia dan ekosistem tetap terjaga dalam jangka panjang. Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup dengan sasaran meningkatnya rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti sebesar 100% dari tahun 2026 hingga 2030.
- b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Program ini meliputi inventarisasi sumber pencemar, pemantauan dan pengujian kualitas air dan udara; penyusunan dokumen IKLHD, Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD, indeks respon LH; penyusunan dokumen inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK); pengelolaan laboratorium lingkungan hidup; pemantauan evaluasi dan pelaporan emisi GRK pada sektor limbah, penyusunan aksi, monitoring dan evaluasi mitigasi perubahan iklim; koordinasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup, dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Sasaran pada program ini adalah meningkatnya pengendalian pencemaran yang dilaksanakan dengan indikator kinerja Persentase Pengendalian Pencemaran yang Dilaksanakan sebesar 93,33% pada akhir periode RPJMD.
- c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Program pengelolaan Keanekaragaman hayati adalah program untuk mewujudkan keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup dalam upaya untuk pelestarian lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan taman tugu batas kota;

rehabilitasi tugu anak, tugu adipura, dan taman segitiga kali jali; pengelolaan ruang terbuka hijau; pengelolaan Heroes Park; penyusunan profil dan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati; pengembangan Heroes Park menjadi kebun raya; serta penyediaan sarana pengelolaan ruang terbuka hijau dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pembangunan ruang-ruang terbuka hijau ini merupakan salah satu aksi dalam penurunan emisi gas rumah kaca yang dapat meningkatkan cadangan karbon. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau terhadap Luas Perkotaan sebesar 7,237% dengan sasaran program berupa meningkatnya luas RTH terhadap luas perkotaan.

- d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemenuhan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3, serta verifikasi lapangan pemenuhan rincian teknis penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilaksanakan sebesar 80% di akhir periode RPJMD.

- e) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dilaksanakan dalam upaya untuk memastikan penanggungjawab usaha dalam memnuhi kewajibannya dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini akan mempengaruhi tingkat pencegahan pencemaran, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan izin PPLH; dan pengawasan perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan kabupaten. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pemenuhan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan sebesar 83% di akhir periode RPJMD.

- f) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini merupakan program nasional untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penguatan fungsi perlindungan dan konservasi sumberdaya alam serta pelibatan masyarakat dalam aksi penurunan emisi gas rumah kaca melalui kegiatan pendampingan dan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup; pelaksanaan program kampung iklim; penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup; rehabilitasi lahan kritis; dan fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup. Pada program ini juga memberikan

edukasi, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat tentang isu lingkungan hidup guna mendukung penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), seperti yang diwujudkan dalam Program Kampung Iklim (Proklam) yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim dan mitigasi GRK melalui aksi nyata di tingkat lokal. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Bidang Lingkungan Hidup yang Aktif sebesar 14,63%.

- g) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Program ini merupakan program nasional pemerintah sebagai bentuk apresiasi/ penghargaan kepada masyarakat/ lembaga/sekolah atas komitmen yang telah melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan target pencapaian Persentase Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat sebesar 100% dari tahun 2026 hingga 2030. Program ini diarahkan melalui kegiatan penilaian kinerja lembaga masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, dan filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- h) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Salah satu tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH adalah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat dimana penyampaian pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menjadi hak setiap orang. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017, setiap pengaduan harus ditangani untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan hutan. Program ini diarahkan melalui kegiatan penanganan pengaduan permasalahan lingkungan hidup. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Pencemaran Lingkungan yang Ditangani sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.
- i) Program Pengelolaan Persampahan
Program pengelolaan persampahan diarahkan pada penanganan sampah di TPA; penyediaan sarana pengelolaan sampah; perluasan TPA Jetis; penyusunan rencana kebijakan strategis daerah pengelolaan sampah; optimalisasi pembatasan timbulan sampah; serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan kepada kelompok masyarakat dan pembinaan kelompok pengelola sampah; serta penyediaan fasilitas pengelolaan sampah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pengelolaan persampahan juga mendukung aksi penurunan emisi gas rumah kaca. Penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan dapat dicapai melalui pengelolaan sampah dengan menerapkan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), melakukan pengomposan untuk sampah organik, serta mengoptimalkan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)

sampah dengan mengurangi praktik *open dumping*. Upaya-upaya ini mengurangi emisi metana (CH₄) dan CO₂ yang dihasilkan dari sampah, terutama dari proses dekomposisi anaerobik. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Penanganan Sampah sebesar 27,58% serta Persentase Pengurangan Sampah sebesar 24,05% di akhir periode RPJMD.

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Program Pendaftaran Penduduk

Program Pendaftaran Penduduk merupakan program yg mendukung tugas pokok disdukcapil yaitu pemenuhan kebutuhan penduduk atas layanan administrasi kependudukan meliputi penerbitan KTP, KK, rekam data penduduk, biodata, pindah/ kedatangan penduduk dan dokumen lainnya. Melalui program pendaftaran penduduk, dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil dan digunakan sebagai dasar bagi penduduk untuk mendapatkan berbagai layanan berikutnya dan hak sebagai warga negara. Program ini diarahkan melalui kegiatan pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk; penyediaan sarana pencetakan KTP-el dan KIA; pendataan penduduk non permanen dan rentan adminduk; pelayanan jemput bola dokumen pendaftaran penduduk; sosialisasi pendaftaran penduduk; dan koordinasi pelayanan pendaftaran penduduk dengan sektor lain. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Digital sebesar 99,97% di akhir periode RPJMD.

b) Program Pencatatan Sipil

Program Pencatatan Sipil memfasilitasi penduduk untuk memperoleh layanan pembuatan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian) yang berfungsi sebagai landasan legal bagi penduduk untuk mengakses beragam layanan publik dan mendapatkan hak-hak kewarganegaraannya. Program ini diarahkan melalui kegiatan pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting; pemeliharaan arsip vital dokumen; pelayanan jemput bola dokumen pencatatan sipil; dan koordinasi pencatatan peristiwa penting dengan sektor terkait. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Digital sebesar 96,75% di tahun 2030.

c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase desa dan kelurahan pengguna yang memanfaatkan kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik sebesar 100% di akhir periode RPJMD. Program ini diarahkan melalui kegiatan koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan; koordinasi pemanfaatan data kependudukan; fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi pengguna; monitoring jaringan dan peralatan SIAK; koordinai pengelolaan informasi Adminduk; dan penyusunan tata

cara pengelolaan informasi Adminduk. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan instansi/lembaga yang memanfaatkan informasi administrasi kependudukan terus meningkat setiap tahunnya.

d) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Kesesuaian Profil dengan Regulasi yang Berlaku sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD. Program ini diarahkan melalui kegiatan penyusunan profil kependudukan.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Tata kelola pemerintahan desa adalah proses pengelolaan dan pengawasan sumber daya serta kebijakan di tingkat desa oleh pemerintah desa, yang bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat desa. Tata kelola yang baik di desa melibatkan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tujuan pemerintahan desa yang *good governance*. Program ini diarahkan melalui kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa; Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa; Pembinaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar Desa; Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Kawasan Pedesaan; Fasilitasi dan Koordinasi BUMDes, BUMDesma, dan Lembaga Kerjasama Desa; Fasilitasi Penyusunan Prodeskel, Pembentukan PPID Desa, dan SOTK Desa; Fasilitasi Pengembangan Desa Mandiri; Penyusunan Regulasi terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa; Penyediaan Data BPD se-Kabupaten; Pembinaan BPD; fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa; serta Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Peserta ke Tingkat Provinsi. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan desa sebesar 100%; serta Persentase Bumdesma Mandiri dan kerjasama desa yang aktif sebesar 21,75% di akhir periode RPJMD.

b) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta melibatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Lembaga kemasyarakatan, seperti RT/RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPM, memiliki fungsi penting dalam penampungan aspirasi masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Program ini diarahkan melalui kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna); Fasilitasi Lembaga RT RW; Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan Posyandu 6 SPM; Pembinaan dan

pengembangan pasar desa; Pembinaan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa; Fasilitas penyelenggaraan TTG; Fasilitas kegiatan TMMD; Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; serta Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perencanaan kependudukan yang terarah. Program ini memiliki peran penting dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yang berlebihan, memastikan data kependudukan yang akurat, serta memperkuat pemahaman masyarakat akan pentingnya pengendalian penduduk demi mewujudkan keluarga yang berkualitas. Program ini diarahkan melalui kegiatan Koordinasi pengendalian program Bangga Kencana; Fasilitas pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK); Fasilitas, koordinasi, dan monitoring evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kependudukan; Koordinasi pembinaan dan pengawasan SIGA; Fasilitas Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga SIGA; Penyediaan layanan pengolahan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB; serta Fasilitas Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 sebesar 8,7 per 1.000 wanita pada kelompok umur 15-19 tahun di tahun 2030.

b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, guna mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Program ini memiliki peran penting dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, menurunkan angka stunting, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui serangkaian aktivitas yang terencana dan menyasar langsung masyarakat. Program ini diarahkan melalui kegiatan Penyediaan dan Distribusi sarana KIE Program Bangga Kencana; Penyuluhan program dan pembinaan tenaga lini lapangan; Penyediaan layanan sarana dan operasional di Balai Penyuluhan Bangga Kencana; Fasilitas dan Koordinasi Program Bangga Kencana; Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui media massa cetak, elektronik, dan media luar ruangan; Koordinasi Pelaksanaan Percepatan penurunan Stunting; Fasilitas pelaksanaan

IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan)/ PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana); Fasilitas penyuluhan dan pelayanan program Bangga Kencana oleh PKB/PLKB; Distribusi Alat Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan; Fasilitas Pelayanan KB MKJP; Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB; Pembinaan Fasilitas Kesehatan terkait Pelayanan Keluarga Berencanaan dan Kesehatan Reproduksi; Fasilitas Peningkatan dan Pelayanan KB Pria; Implementasi lintas sektor di Kampung KB. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate) sebesar 72% serta Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) sebesar 8,85% di akhir periode RPJMD.

- c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, terutama dalam aspek ketahanan keluarga, kesejahteraan, kesehatan, dan kesetaraan gender. Program ini dirancang untuk menciptakan keluarga yang mampu menjalankan delapan fungsi keluarga secara optimal, yaitu fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan, sehingga keluarga di Kabupaten Purworejo dapat tumbuh sebagai pilar utama pembangunan masyarakat. Program ini diarahkan melalui kegiatan Pembinaan Pusat Pelayanan keluarga Sejahtera di balai penyuluh KB; Pembinaan dan Pengembangan Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA); Pendampingan keluarga berisiko stunting; Pencatatan dan pelaporan hasil pemantauan pendampingan sasaran berisiko stunting; Pemilihan dan Fasilitas Duta Genre; Koordinasi Pelaksanaan peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan; Pelaksanaan program ketahanan keluarga dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting; serta Peningkatan Kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina sebesar 91,06% serta Persentase remaja calon pengantin yang mendapat edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga sebesar 73% di akhir periode RPJMD.

9) Perhubungan

- a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah serangkaian kegiatan dan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur, mengelola, dan meningkatkan sistem transportasi jalan agar aman, selamat, tertib, lancar, terintegrasi dengan moda lain, serta mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Program ini mencakup pengembangan prasarana, penyediaan perlengkapan jalan, rekayasa lalu lintas,

serta pengelolaan terminal dan perizinan usaha transportasi untuk menjamin mobilitas orang dan barang secara efisien. Program ini mendukung Program Prioritas Pitulungan yakni Alus Dalane.

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilaksanakan melalui aktivitas Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota; Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ; Evaluasi Rencana Induk Jaringan LLAJ; Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang meliputi APILL, PJU, Rambu, Marka; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan yang meliputi APILL, PJU, Rambu; Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C; Pemeliharaan Terminal Tipe C; Pengawasan dan Penyelenggaraan Perparkiran; Penyusunan Kajian Potensi Parkir; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor; Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Koordinasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas, Fasilitas Patwal, Pemeliharaan Perlintasan Sebidang; Monitoring dan Evaluasi Zona Selamat Sekolah (ZOSS); Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS); Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Pengadaan Perlintasan Sebidang; Rekayasa Lalu Lintas dan Penyediaan Posko Lebaran Tahun Baru; Fasilitas Rekomendasi Persetujuan Andalalin; Pelaksanaan Audit dan Pemantauan Terminal; Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C; Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum; Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota; Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten; Sosialisasi Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten; serta Koordinasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten.

Aktivitas pada program tersebut juga didorong untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Aktivitas yang berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK antara lain penyediaan lampu PJU hemat energi, penerapan *Area Traffic Control Systems* (ATCS) melalui rekayasa lalu lintas dan penataan parkir, serta kampanye penggunaan kendaraan umum dan non-motoris. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten sebesar 44,49%; Persentase Angkutan Umum, Terminal

dan Titik Parkir yang Tersedia sebesar 66,75%; Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terlaksana sebesar 98,88% di akhir periode RPJMD. Program ini mendukung program unggulan Alus Dalane.

10) Komunikasi dan Informatika

a) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital. Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang andal dan terintegrasi mencakup pembangunan dan pemeliharaan jaringan fiber optik yang menjangkau seluruh perangkat daerah, mengembangkan berbagai aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi, serta pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai pemerintah daerah di bidang teknologi informasi. Program ini dilaksanakan melalui aktivitas Pengadaan bandwidth dan pemeliharaan jaringan; Pengelolaan domain purworejokab.go.id dan subdomain di Lingkungan Pemkab Purworejo; Pengembangan/ Pembangunan dan pemeliharaan Aplikasi; Koordinasi Penyelenggaraan SPBE dalam rangka evaluasi SPBE (Pemerintah Digital); Koordinasi Penyelenggaraan Kota Cerdas; Koordinasi pelaksanaan penerapan Manajemen SPBE; serta Koordinasi Pelaksanaan Audit TIK. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase pembangunan/ pengembangan aplikasi sesuai dengan Peta Rencana SPBE sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

b) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola komunikasi publik guna mendukung transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintahan. Program ini dilaksanakan melalui aktivitas Pelayanan permohonan informasi publik; Penyebaran informasi melalui Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) dan pengelolaan dana hibah LPPL Radio Publik Irama FM; Edukasi dan publikasi informasi mengenai peraturan dan kebijakan pemerintah melalui tatap muka, media cetak, elektronik, media luar ruang; Penyusunan konten digital untuk informasi publik; Monitoring kanal aduan masyarakat; Fasilitasi KIM melalui penyelenggaraan talkshow, Koordinasi dan Bimtek bagi Pengurus KIM, dan mendampingi produksi konten KIM; Pemuatan dan penyebarluasan (Blow up) pemberitaan Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui media massa cetak, elektronik, daring dan media sosial; serta Bimtek petugas PPID Perangkat Daerah. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten sebesar 67% di akhir periode RPJMD.

11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini bertujuan untuk memastikan koperasi-koperasi di wilayah Kabupaten Purworejo menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip koperasi, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing koperasi. Program ini diarahkan melalui kegiatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Koperasi yang Memiliki Akuntabilitas Baik sebesar 49,30% di tahun 2030. Dengan program ini, diharapkan koperasi-koperasi di Kabupaten Purworejo semakin profesional, akuntabel, serta mampu berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan pembangunan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan.

b) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini bertujuan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi berdasarkan tujuh aspek utama, yaitu: permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi. Diharapkan dengan koperasi yang sehat dengan pengelolaan yang transparan dan efektif, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penilaian kesehatan koperasi. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Koperasi Sehat sebesar 55,80% di tahun 2030.

c) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Koperasi di Kabupaten Purworejo memegang peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama dalam skala usaha mikro dan kecil. Namun demikian, tantangan dalam pengelolaan dan profesionalitas masih menjadi isu yang perlu dibenahi secara sistematis. Melalui program ini, akan diberikan pelatihan bagi pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase SDM Koperasi yang Tersertifikasi sebesar 58,02% di tahun 2030.

d) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Salah satu tantangan yang dihadapi koperasi di Purworejo yaitu masalah manajerial, rendahnya kapasitas sumber daya manusia koperasi, serta terbatasnya akses terhadap pembiayaan dan pasar yang menjadi hambatan dalam pengembangan koperasi secara berkelanjutan. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi merupakan salah satu bentuk komitmen untuk memperkuat eksistensi koperasi di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks. Program ini diarahkan melalui kegiatan fasilitasi akses permodalan kepada koperasi; serta fasilitasi kemitraan antara koperasi dengan UMKM dan badan usaha lain. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Koperasi Aktif yang Berkembang Usahanya sebesar 10,56% di tahun 2030.

e) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan peran UMKM dalam perekonomian melalui pemberdayaan UMKM melalui kemitraan; fasilitasi kemudahan perizinan UMKM; fasilitasi HAKI; koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan; penyusunan basis data usaha mikro; serta pelatihan bagi UMKM. Dalam rangka mendukung program Rame Pasare, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase UMKM yang Baerualitas sebesar 20,26% di tahun 2030.

f) Program Pengembangan UMKM

Program pengembangan UMKM bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pengembangan kewirausahaan; inkubasi usaha mikro; dan fasilitasi peningkatan produksi pengolahan, pemasaran, SDM, desain, dan teknologi pada UMKM. Program ini menekankan pentingnya UMKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan nasional, serta manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendampingan untuk mengakselerasikan UMKM naik kelas dan memberikan Fasilitas pelatihan dan pendampingan UMKM menjadi wirausaha. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase UMKM yang mengalami Peningkatan Usaha sebesar 3,29% di tahun 2030.

12) Penanaman Modal

a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha; penyusunan rencana umum penanaman modal; dan penyusunan peta potensi investasi daerah. Program ini difokuskan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta peningkatan citra dan positioning kepariwisataan Kabupaten Purworejo. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase penyediaan informasi potensi penanaman modal yang siap dipublikasikan sebesar 100% di tahun 2026 hingga akhir periode RPJMD.

b) Program Promosi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi unggulan daerah, membuka peluang investasi baru, serta memperkuat citra positif daerah sebagai destinasi investasi yang prospektif dan ramah bisnis melalui pameran investasi; penyelenggaraan forum bisnis dan investasi; pertemuan *one-on-one meeting* dengan calon investor strategis; kampanye investasi melalui platform online; dan fasilitasi Satgas gugus investasi. Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal dengan indikator kinerja jumlah kepedminatan (LOI) dan target sebesar 9 LOI hingga akhir periode RPJMD.

c) Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi para investor dalam proses perizinan berusaha serta mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui

pelayanan perizinan dan non perizinan; konsultasi dan penanganan pengaduan masyarakat. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria sebesar 100% hingga tahun 2030.

d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan menindaklanjuti perkembangan realisasi investasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa investasi yang masuk telah mematuhi aspek legal, teknis, lingkungan, dan sosial sesuai dengan regulasi yang berlaku. Program ini diarahkan melalui kegiatan penyelesaian masalah pelaku usaha; bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha; dan pengawasan pelaku usaha. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Tingkat Kepatuhan Pelaporan LKPM sebesar 79,80% di tahun 2030.

e) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan akurasi data, serta menyediakan sistem informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan di bidang perizinan dan penanaman modal. Program ini diarahkan melalui kegiatan penyediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan. Melalui program ini, pemerintah mendorong integrasi data perizinan secara nasional melalui sistem OSS (*Online Single Submission*), serta memastikan sinkronisasi dengan data sektoral dan data daerah. Program ini memiliki target 100% persentase jenis data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang disediakan.

13) Kepemudaan dan Olahraga

a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing kepemudaan dengan target persentase pemuda berprestasi sebesar 7,411% di akhir periode RPJMD. Program ini terdiri atas dua kegiatan yaitu koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait pelayanan kepemudaan; penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Pelayanan Kepemudaan; pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirausaha pemula; pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawanan pemuda; pemilihan Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader; serta pembinaan organisasi kepemudaan.

b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembudayaan dan prestasi olahraga dengan target persentase organisasi keolahragaan yang aktif sebesar 100% dari tahun 2026 hingga 2030. Program ini diarahkan melalui kegiatan pembinaan dan fasilitasi organisasi olahraga; penyediaan dan pemeliharaan sarana olahraga; pemeliharaan dan pengembangan fasilitas olahraga; fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga kepada kelompok masyarakat; penyelenggaraan kompetisi dan fasilitasi kejuaraan

olahraga pada satuan pendidikan; penyelenggaraan Pekan Olahraga Prestasi Masyarakat di Tingkat Kabupaten; fasilitasi pengiriman anggota kontingen kabupaten dalam kegiatan pekan kejuaraan olahraga; pemberian penghargaan olahraga bagi yang berprestasi; serta penyelenggaraan olahraga rekreasi.

- c) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepramukaan dengan target persentase organisasi kepramukaan yang aktif sebesar 100% dari tahun 2026 hingga 2030. Program ini diarahkan melalui kegiatan pembinaan dan fasilitasi organisasi kepramukaan.

14) Statistik

- a) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola data sektoral guna mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data. Untuk mendukung transformasi digital, Kabupaten Purworejo telah mengembangkan portal Data Statistik Sektoral yang diintegrasikan dengan portal Satu Data Indonesia dan SIPD E-Walidata milik Kemendagri. Program ini dilaksanakan melalui aktivitas Penyelenggaraan rapat koordinasi, pengumpulan data, penyebarluasan data, koordinasi dan konsultasi dengan Pembina Data dan Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI); Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Persiapan dan Evaluasi, Bimtek Statistik Sektoral bagi seluruh produsen data Kabupaten; serta Penyelenggaraan Rapat koordinasi persiapan dan evaluasi, Bimtek geospasial bagi seluruh produsen data geospasial Kabupaten sehingga data yang disajikan mudah diakses dan dapat dibagipakaikan. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah sebesar 100% dari tahun 2026 hingga akhir periode RPJMD.

15) Persandian

- a) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Kabupaten Purworejo mengambil langkah proaktif dalam memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang persandian melalui Peningkatan Kapasitas SDM Keamanan Informasi dan Persandian; Peningkatan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan keamanan informasi; Penyediaan Layanan BSRe BSSN (Sertifikat Elektronik); serta Penyediaan Layanan kerja sama dengan BSSN, Kemenkomdigi dan instansi lainnya untuk meningkatkan sistem keamanan informasi dan persandian. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan informasi pemerintah dengan target tingkat keamanan informasi pemerintah sebesar 89,87% di tahun 2030.

16) Kebudayaan

- a) Program Pengembangan Kebudayaan

Program Pengembangan Kebudayaan bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan memajukan kesenian dan budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah serta sarana pembentukan karakter masyarakat. Program ini mencakup pembinaan lembaga kebudayaan dan kesenian; peningkatan kapasitas pelaku budaya; penyediaan alat kesenian kepada kelompok kesenian; dan penyelenggaraan pentas kesenian. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan sebesar 80% di tahun 2030.

b) Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan seni budaya lokal melalui peningkatan kapasitas pelaku seni. Salah satu kegiatan strategis dalam program ini adalah pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi SDM kesenian tradisi di Kabupaten Purworejo. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir sebesar 68,26% di tahun 2030. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dapat meningkat.

c) Program Pembinaan Sejarah

Program Pembinaan Sejarah bertujuan untuk memperkuat identitas dan jati diri daerah melalui melestarikan nilai-nilai sejarah dan tradisi lokal. Kegiatan dalam program ini menjadi sarana edukasi, refleksi, dan perwujudan penghargaan terhadap sejarah serta warisan budaya daerah. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase keterlibatan masyarakat pelaku sejarah lokal sebesar 7,32% hingga akhir periode RPJMD. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi sejarah.

d) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini bertujuan menjaga keberlanjutan keberadaan cagar budaya sebagai identitas lokal sekaligus sumber pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata melalui kajian dan penetapan objek yang diduga cagar budaya (ODCB); perawatan, pemeliharaan, dan perlindungan cagar budaya, serta pemanfaatan cagar budaya. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu sebesar 38,73% di akhir periode RPJMD.

e) Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini bertujuan untuk menjadikan museum sebagai pusat edukasi, pelestarian, serta ruang interaksi budaya yang aktif, dinamis, dan inklusif dalam rangka pelestarian warisan budaya dan peningkatan literasi sejarah masyarakat. Berbagai kegiatan dalam program ini dilaksanakan untuk memperkuat fungsi museum sebagai institusi publik yang mengelola, merawat, dan memamerkan benda-benda bersejarah dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Program ini diarahkan melalui kegiatan operasional

museum; pengembangan, perlindungan, dan pemanfaatan koleksi museum; pameran museum; peningkatan kapasitas sumber daya manusia permuseuman; serta penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum. Program ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola museum dengan target persentase peningkatan kunjungan museum sebesar 2% di setiap tahun hingga akhir periode RPJMD.

17) Perpustakaan

a) Program Pembinaan Perpustakaan

Program Pembinaan Perpustakaan diarahkan pada Pembinaan perpustakaan khusus, SD/SMP, dan umum; Layanan perpustakaan menetap dan keliling; Rakor, Bimtek, Seminar, Pelatihan Perpustakaan, dan Kepustakawanan; Penyediaan bahan pustaka (cetak dan elektronik); Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan; Penyediaan data perpustakaan; pemilihan duta baca/bunda baca/bunda literasi; Pemberian penghargaan bagi pegiat literasi dan pemustaka; serta Safari perpustakaan. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi sebesar 15,98% di tahun 2030.

b) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno meliputi Sosialisasi penyimpanan, perawatan, dan pelestarian Naskah Kuno; Penelusuran Naskah Kuno; dan Alih bahasa, alih aksara serta alih media naskah kuno. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang Dilestarikan sebesar 52,63% di akhir periode RPJMD.

18) Kearsipan

b. Program Pengelolaan Arsip

Program Pengelolaan Arsip ditujukan pada Pencipta Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sehingga terwujudnya penyelenggaraan kearsipan baku dari tahap penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, penyusutan sampai dengan layanan di akses arsip statis. Program ini diarahkan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan kearsipan; Pendampingan Kearsipan perangkat Daerah; Akuisisi Arsip Statis; Koordinasi Kearsipan; Penyusunan Peraturan Bupati Jadwal Retensi Arsip (JRA); Fasilitasi lomba Arsiparis Teladan; dan Penyediaan Sarana Prasarana Kearsipan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola arsip dinamis dan statis dengan target Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip sesuai Kaidah Kearsipan dengan Kategori Cukup sebesar 48,84 di akhir periode RPJMD.

c. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip diarahkan untuk Pemusnahan Arsip; Pendampingan, identifikasi, dan Penyelamatan Arsip akibat bencana; Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah akibat perubahan SOTK; Pendataan dan Penataan Arsip; Autentikasi Arsip; serta Pameran Kearsipan. Program ini bertujuan untuk

meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK dengan target Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah sebesar 66,35% di tahun 2030.

c. Unsur Pemerintah Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program pengelolaan perikanan tangkap bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap yang dilakukan melalui berbagai aktivitas yang mendukung, meliputi penyediaan data dan informasi sumber daya perikanan tangkap; penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan; fasilitasi penerbitan tanda daftar kapal perikanan; pengelolaan tempat pelelangan ikan peningkatan kapasitas nelayan; serta fasilitasi penyelenggaraan usaha penangkapan ikan. Program ini memiliki target untuk pencapaian produksi perikanan tangkap di Kabupaten Purworejo meningkat dengan besaran produksi perikanan tangkap sebesar 194,54 ton pada tahun 2030.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program pengelolaan perikanan budidaya bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya yang dilakukan melalui berbagai aktivitas yang mendukung, meliputi penyediaan data dan informasi sumber daya perikanan budidaya; pencegahan dan penanggulangan hama penyakit ikan; penyediaan sarana dan prasarana budidaya ikan; fasilitasi dan rekomendasi BBM untuk pelaku usaha perikanan; serta pembinaan usaha pembudidayaan ikan. Program ini ditargetkan untuk pencapaian produksi perikanan budidaya di Kabupaten Purworejo yang selalu meningkat dengan besaran produksi perikanan budidaya pada tahun 2030 mencapai 4.640,66 ton.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan program dalam rangka meningkatkan peranan kelompok masyarakat pengawas sumber daya kelautan dan perikanan untuk mendukung produksi perikanan tangkap dan budidaya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peranan kelompok masyarakat pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Purworejo dengan target pada tahun 2030 untuk mencapai persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan yang diperiksa atau diawasi sebesar 100%. Dalam upaya tersebut dilaksanakan dengan berbagai aktivitas meliputi pengawasan usaha penangkapan ikan; penebaran benih ikan ke perairan umum (restocking); pengawasan usaha pembudidayaan ikan; pengawasan ekstraksi garam; serta pengawasan usaha pengelolaan dan pemasaran ikan.

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatnya produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Program

ini bertujuan untuk meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan Kabupaten Purworejo dengan target pada tahun 2030 jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang berhasil dipasarkan mencapai 251,97 ton. Dalam upaya tersebut program ini dilaksanakan berbagai aktivitas seperti pengawasan usaha pengelolaan dan pemasaran ikan; penyediaan data dan informasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; pelaksanaan gemarikan dalam rangka penanggulangan stunting dan keluarga resiko stunting; serta penyediaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan (garam).

2. Pariwisata

a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan PAD Pariwisata yang bersumber dari destinasi wisata yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Purworejo. Pariwisata Kabupaten Purworejo didukung oleh kebijakan strategis yang berorientasi pada keberlanjutan dan digitalisasi seperti seperti pembinaan desa wisata; pemeliharaan Kawasan alun-alun Purworejo dan Kutoarjo; pemeliharaan dan pengembangan destinasi wisata; penyusunan dokumen perencanaan strategis Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah; pembinaan pelaku usaha pariwisata. Program-program unggulan yang telah disusun tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga pada transformasi kualitas pengalaman wisata bagi para wisatawan agar dapat tinggal lebih lama di Kabupaten Purworejo. Program ini ditargetkan pada tahun 2030 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara sebesar 1.107.357 orang dan Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara sebesar 325 orang.

b) Program Pemasaran Pariwisata

Program Pemasaran Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata. Sasaran pada program ini adalah meningkatnya layanan pemasaran pariwisata dengan target tercapainya persentase layanan pemasaran pariwisata Kabupaten Purworejo sebesar 48% pada tahun 2030. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program pemasaran mencakup penyusunan *Calendar of Event*; penyelenggaraan event pariwisata; dan penyelenggaraan promosi pariwisata.

c) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitasi sub sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Purworejo. Program ini terdiri atas pengembangan sistem pemasaran yang meliputi pengembangan sistem pemasaran melalui penguatan kekayaan intelektual serta monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Program ini memiliki target pada tahun 2030 yakni tercapainya

persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual sebesar 42,86%.

d) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah. Program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari fasilitasi dan kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata; pembinaan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; serta sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata. Program ini memiliki target pada akhir periode RPJMD tahun 2030 yakni tercapainya persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya mencapai 77%.

3. Pertanian

a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada sasaran meningkatnya produksi komoditas pertanian strategis yang ditargetkan untuk pencapaian peningkatan jumlah produksi padi sebesar 396,495.58 ton; jumlah produksi jagung sebesar 6,755.09 ton; jumlah produksi cabai sebesar 3,329.91 ton; jumlah produksi durian sebesar 5,968.67 ton; jumlah produksi biofarmaka 4,531.55 ton; jumlah produksi kelapa sebesar 37,642.48 ton; jumlah produksi kopi sebesar 168.89 ton; jumlah produksi tembakau sebesar 301.3 ton dan sasaran meningkatnya populasi ternak dengan target jumlah populasi ternak sebesar 128,284.46 satuan ternak di Kabupaten Purworejo pada akhir RPJMD. Program ini diarahkan pada pengadaan alat dan mesin pertanian; pengadaan bibit tanaman; pengembangan pekarangan lestari (P2L); pengembangan varietas unggul; fasilitasi indikasi geografis komoditas pertanian; penjaminan kelestarian sumber daya genetik kambing kaligesing; layanan inseminasi buatan; kontes kambing kaligesing; penyediaan bibit ternak kepada kelompok masyarakat; serta pelatihan UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian).

b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pemanfaatan prasarana pertanian di Kabupaten Purworejo mencapai 100% pada akhir masa periode RPJMD. Program ini diarahkan pada update peta LP2B; pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT); pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan balai penyuluhan; Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT); pembangunan Air Tanah Dangkal (ATD); pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan puskesmas dan rumah potong; serta pengawasan wilayah sumber bibit kambing Kaligesing.

c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini bertujuan menurunkan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan dan menular strategis di Kabupaten Purworejo dengan target Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis hingga menjadi sebesar 270 kasus pada tahun 2030. Program ini diarahkan pada layanan kesehatan dan aksinasi hewan; promosi dan preventif kesehatan hewan; pelatihan kader zoonosis; survailans/ pengamatan penyakit hewan; pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha); pengawasan Badan Pangan Asal Hewan (BPAH); pengawasan hewan kurban; operasional Rumah Potong Hewan (RPH); serta pembinaan pelaku usaha peternakan.

d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase fasilitasi pengendalian penanggulangan bencana pertanian di Kabupaten Purworejo mencapai 100% pada akhir masa periode RPJMD. Program ini diarahkan penyediaan pestisida/ insektisida; sekolah lapang agensia hayati; gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman; serta sekolah lapang pengendalian hama terpadu.

e) Program Penyuluhan Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan teknologi pertanian dan kapasitas kelompok tani di Kabupaten Purworejo dengan target berupa persentase penerapan teknologi pertanian mencapai 33% pada tahun 2030 dan peningkatan kapasitas kelompok tani mencapai 300 skor di tahun 2030. Program ini diarahkan pada aktivitas asilitasi balai penyuluhan pertanian; fasilitasi komisi penyuluhan; penyusunan program penyuluhan; pelatihan bagi penyuluh pertanian; pelatihan petani; penilaian kelompok tani; fasilitasi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA); pembinaan petani muda; pembinaan kelembagaan petani; penyelenggaraan sekolah lapang pertanian; serta pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Program penyuluhan pertanian berperan penting dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor pertanian di Kabupaten Purworejo melalui edukasi dan pendampingan petani untuk mengadopsi praktik berkelanjutan seperti penyuluhan Pertanian Cerdas Iklim. Pertanian Cerdas Iklim mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim, mitigasi emisi, dan peningkatan produktivitas pertanian melalui penerapan teknik pengairan berselang, penggunaan pupuk organik, penggunaan varietas padi rendah emisi, dan pemupukkan berimbang.

4. Perdagangan

a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pasar rakyat yang memenuhi indikator Pasar Ber-SNI di Kabupaten Purworejo. Program ini dilakukan melalui fasilitas pengelolaan pasar daerah; pembangunan pasar Kutoarjo dan pasar daerah lainnya sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah, fasilitasi pengelolaan pasar daerah, dan pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi. Program ini memiliki target berupa persentase pasar

rakyat menuju ber-SNI mencapai 22,58% pada akhir masa RPJMD. Sarana distribusi perdagangan yang baik dapat mendorong terwujudnya Pitulungan yaitu Rame Pasare, dimana dengan kondisi pasar daerah yang baik maka dapat meningkatkan kunjungan pada pasar-pasar daerah.

b) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan ketersediaan barang-barang tersebut di masyarakat. Program ini mendukung *Quick Win* Rame Pasare dan Ayam Petanine untuk mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan. Hal-hal yang akan dilaksanakan dalam intervensi program ini adalah koordinasi ketersediaan bahan pokok dan bahan penting pada tingkat agen pasar; pemantauan harga dan stok bahan pokok dan bahan penting; pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi ke tingkat agen; serta operasi pasar. Program ini melalui disparitas harga yang mencapai kurang lebih 10% pada tahun 2030 dan persentase distribusi pupuk bersubsidi sampai dengan kios pupuk lengkap mencapai 94,53% pada tahun 2030 di akhir RPJMD.

c) Program Pengembangan Ekspor

Program Pengembangan Ekspor merupakan langkah strategis Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas dan daya saing produk unggulan daerah dan pameran dagang lokal serta nasional dengan target persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang mencapai 2% pada tahun 2030. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu berkolaborasi dengan instansi vertikal, pelaku usaha, koperasi, serta lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyediakan berbagai bentuk fasilitasi ekspor, seperti mengikutsertakan pelaku usaha UMKM dalam pameran dagang nasional *Trade Expo International* (TEI) dan melaksanakan pameran dagang lokal, *business matching*, dan *digital marketing*.

d) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memastikan kualitas barang dan jasa yang beredar di pasar, serta melindungi hak-hak konsumen dari praktik-praktik yang merugikan melalui verifikasi akurasi terhadap timbangan dan sosialisasi terhadap aturan metrologi legal. Program ini dicapai melalui pelayanan dan pengawasan metrologi legal untuk tercapainya Persentase Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku mencapai 100% pada tahun 2030.

e) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap produk buatan dalam negeri, meningkatkan daya saing industri

nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap produk impor melalui promosi dan pemasaran produk dalam negeri. Program ini memiliki target pada tahun 2030 terdapat 2% untuk mencapai persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang dipromosikan. Program ini secara langsung juga mendukung Pitulungan Rame Pasare melalui kegiatan promosi dan pemasaran produk lokal Purworejo.

5. Perindustrian

a) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri difokuskan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, dengan menempatkan sektor industri sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Program ini ditargetkan pada tahun 2030 untuk mencapai persentase peningkatan produktivitas industri kecil menengah sebesar 8,72%. Program ini diarahkan melalui peningkatan kapasitas Industri Kecil Menengah (IKM); fasilitas UPT rumah kemasan; dan fasilitas promosi dan pemasaran produk kerajinan serta implementasi dari Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo.

b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program Pengendalian izin usaha industri Kab/Kota diarahkan untuk verifikasi pemenuhan persyaratan izin usaha industri dan pembinaan kepatuhan perizinan industri. Program ini ditargetkan pada tahun 2030 untuk mencapai persentase perizinan industri kewenangan kabupaten yang memenuhi komitmen perizinan sebesar 100%.

c) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan untuk fasilitasi pelaporan di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan penyediaan data industri yang ditargetkan pada tahun 2030 untuk mencapai tingkat kepatuhan pelaporan informasi industri sebesar 41,28%. Program pengelolaan Sistem informasi Industri Nasional merupakan Pengembangan Sistem Informasi yang Terintegrasi dan terhubung antara pusat dan daerah untuk memastikan konsistensi dan akurasi data.

6) Transmigrasi

a) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program pembangunan kawasan transmigrasi merupakan sebuah inisiatif strategis nasional yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitasi pelaksanaan transmigrasi. Program ini bukan sekadar memindahkan penduduk, melainkan sebuah upaya holistik yang mencakup pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pelestarian lingkungan. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase penempatan transmigrasi sebesar 100% pada tahun 2030. Meskipun manfaat langsung program transmigrasi lebih dirasakan oleh individu/keluarga yang berangkat, Namun Kabupaten Purworejo sebagai daerah asal juga

mendapatkan manfaat dalam hal pengurangan tekanan penduduk (meskipun terbatas) dan potensi dampak ekonomi jangka panjang melalui remitansi serta citra positif daerah. Program ini memberikan harapan dan peluang baru bagi masyarakat Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah lain di Indonesia.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

a) Program Perekonomian dan Pembangunan

Program Perekonomian dan Pembangunan ditargetkan untuk mencapai Persentase Perangkat Daerah dengan Capaian Kinerja sesuai target sebesar 100%; Indeks Tata Kelola Pengadaan sebesar 73,5; Persentase pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya alam 100%; Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB sebesar 5,44; Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB sebesar 5,98; dan Return on Asset (ROA) BUMD sebesar 7,04. Program ini meliputi Fasilitasi pelaku pengadaan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik; Fasilitasi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; Pembinaan dan Pendampingan untuk SDM pelaku Pengadaan; Koordinasi, Evaluasi, Monitoring Ekonomi Mikro Kecil; Fasilitasi dalam melaksanakan koordinasi sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD; Fasilitasi dalam melaksanakan koordinasi sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD dan BLUD; Koordinasi, Monitoring, Evaluasi TPID; Fasilitasi Perangkat Daerah dalam ketepatan penyusunan program Pembangunan; Pengendalian, koordinasi dan evaluasi program kegiatan pembangunan perangkat daerah; Koordinasi, pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan perangkat daerah; Fasilitasi penyusunan RKA, RKP, Mengevaluasi kegiatan dan pelaksanaan anggaran yang bersumber dari DBHCHT; serta Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi kegiatan pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, serta mendukung Program Nasional Asta Cita yaitu Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Sedangkan Program Delegasi Provinsi yang didukung yaitu Melahirkan Pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa. Program ini juga mendukung Program Pitulungan yaitu Rame Pasare, dengan fokus untuk Memperbesar peluang kepada pelaku ekonomi lokal untuk berperan serta dalam berbagai kegiatan pembangunan.

b) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ditargetkan untuk mencapai Indeks Reformasi Hukum sebesar 97,89, Persentase Pelaksanaan administrasi tata pemerintahan dan kerjasama sebesar 100%, dan Persentase Pelaksanaan Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat sebesar 100%. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi Pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi; Koordinasi dan fasilitasi Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan; Koordinasi dan fasilitasi Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Tenaga kerja, Transmigrasi, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB; Pemberian hibah kepada kemenag untuk pengajar keagamaan; Penyelenggaraan Haji Daerah; Pemberian bantuan hibah sarana peribadatan, prasarana peribadatan, dan pondok pesantren; Penyelenggaraan Pengajian rutin dan pengajian peringatan hari besar keagamaan; Penghargaan atas Suatu Prestasi Bidang Keagamaan; Fasilitasi Produk Hukum Daerah; Fasilitasi bantuan hukum litigasi dan non litigasi bagi masyarakat melalui LBH yang sudah terakreditasi; Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum; Koordinasi kegiatan pimpinan daerah; Koordinasi pemerintahan umum; Koordinasi dan fasilitasi penataan batas wilayah; Koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah; serta Koordinasi dan fasilitasi kerja sama daerah. Program ini mendukung 2 (dua) Program Nasional Asta Cita yaitu 1) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 2) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Sedangkan Program Delegasi Provinsi yang didukung yaitu Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan, Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak; Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa. Program ini juga mendukung 3 (tiga) Program Pitulungan yaitu 1) Religius Masyarakat, yang difokuskan untuk Pembinaan dan pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi; Pemberian insentif bulanan, pelatihan peningkatan kompetensi, pemberian penghargaan bagi guru agama non formal, dan masyarakat berprestasi di bidang keagamaan; Memperluas kesempatan menjalankan ibadah bagi masyarakat sesuai dengan agama yang diakui negara; dan Fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan. 2) Rame Pasare, yang difokuskan untuk Menyelenggarakan berbagai festival berbasis agroindustri, religi, dan budaya untuk meningkatkan daya tarik wisata. 3) Sejahtera Wargane, yang difokuskan untuk Pemberian bantuan hukum, pendidikan, pembinaan, dan pengembangan organisasi perempuan

dan perempuan difabel; Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.

2) Sekretariat DPRD

a) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memberikan dukungan optimal terhadap tugas dan fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan. Program ini bertujuan untuk memastikan DPRD dapat menjalankan peran dengan efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas pemerintahan daerah. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ditargetkan untuk mencapai Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun n sebesar 100%, Persentase Penetapan Raperda tahun n 100%, Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 100% dari tahun 2026 sampai akhir periode RPJMD. A Aktivitas yang dilaksanakan meliputi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD; Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; Peningkatan Kapasitas DPRD; Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, Pembahasan Kerja Sama Daerah; dan Fasilitasi Tugas DPRD. Aktivitas dalam program ini mendukung Program Prioritas Nasional Nomor (3) Reformasi Politik Hukum dan Demokrasi.

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD juga mendukung program delegasi provinsi nomor (13) yaitu melahirkan pemerintahan yang *good clear government* dan *collaborative governance* melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa melalui Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan aktivitas Pembinaan Aparatur Sipil Negara. Program delegasi provinsi selanjutnya yang didukung yaitu nomor (25) yaitu menyusun peraturan daerah dan rencana aksi daerah tentang ekonomi hijau melalui sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik.

Program ini juga mendukung program Prioritas Bupati sesuai misi 5 Nomor 3 yaitu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.

d. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

a) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan program fundamental dalam memastikan

bahwa seluruh proses pembangunan di Kabupaten Purworejo berjalan secara terukur, transparan, dan selaras dengan visi pembangunan nasional dan daerah. Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah ditargetkan untuk mencapai Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Daerah sebesar 100% dari tahun 2026 sampai akhir periode RPJMD. Program ini mencakup berbagai aktivitas strategis seperti penyusunan rencana pembangunan daerah; pengelolaan manajemen resiko daerah; analisis dan pemanfaatan data pembangunan daerah; serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Dukungan terhadap Asta Cita diwujudkan melalui kontribusi langsung program ini terhadap prioritas nasional, khususnya pada poin "Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi" (Prioritas No. 3). Dengan menyusun perencanaan berbasis data dan melaksanakan evaluasi sistematis, program ini memperkuat praktik good governance yang menjadi syarat utama dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien. Keberadaan dokumen seperti RKPD dan laporan evaluasi pembangunan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan akuntabel.

Dukungan terhadap Pitulungan, program ini mencerminkan semangat gotong royong dan inklusivitas dalam setiap tahap pelaksanaannya. Forum Musrenbang, yang menjadi bagian dari program ini, dirancang untuk menjangkau aspirasi masyarakat dari tingkat desa hingga kabupaten secara partisipatif. Hal ini memungkinkan suara masyarakat, khususnya kelompok rentan dan terpinggirkan, turut menentukan arah pembangunan daerah. Selain itu, penyediaan data yang terbuka dan pembinaan kapasitas perangkat daerah turut memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan secara adil dan merata, sejalan dengan prinsip keberpihakan dalam pitulungan.

Dengan demikian, program ini tidak hanya menjadi perangkat teknokratis untuk perencanaan pembangunan, tetapi juga instrumen yang menjamin keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan akuntabilitas birokrasi. Sinergi antara perencanaan partisipatif dan pengendalian berbasis data menjadikan program ini sebagai wujud nyata dukungan terhadap reformasi tata kelola pemerintahan yang responsif dan berpihak kepada masyarakat luas.

b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran strategis dalam menyatukan arah kebijakan pembangunan lintas sektor dan wilayah agar tercipta keselarasan antara pemerintah daerah, Provinsi, dan nasional. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ditargetkan untuk mencapai Persentase Kualitas dan Pemanfaatan

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebesar 100% dan Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebesar 100% dari tahun 2026 sampai akhir periode RPJMD. Program ini mencakup kegiatan Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan; Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia; koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian; koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam; koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur; serta koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang kewilayahan.

Dukungan terhadap Asta Cita diwujudkan dalam bentuk penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan responsif sebagaimana tercantum dalam agenda Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi (Prioritas No. 3). Melalui kegiatan koordinatif lintas sektor, program ini membantu menyederhanakan proses birokrasi, meningkatkan efisiensi perencanaan, serta memperkuat sinergi antar perangkat daerah untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, cepat, dan tepat sasaran.

Dukungan terhadap Delegasi Provinsi ditunjukkan dengan sinkronisasi kebijakan daerah dengan program prioritas Provinsi Jawa Tengah serta melalui keterlibatan aktif dalam forum koordinasi dan pelaporan kinerja, pemerintah kabupaten turut memastikan bahwa program daerah berjalan selaras dengan arah pembangunan Provinsi.

Program Pitulungan, program ini menjunjung tinggi semangat kolaborasi dan gotong royong dalam membangun daerah. Setiap pelaksanaan koordinasi tidak hanya berfokus pada aspek teknokratis, tetapi juga pada pemberdayaan aktor lokal dan penyusunan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat luas. Harmonisasi rencana pembangunan di berbagai bidang menjadi sarana memperkuat solidaritas antar wilayah dan antar sektor dalam mencapai tujuan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Dengan pengelolaan informasi pembangunan yang inklusif dan responsif, program ini mendorong pemerintahan yang terbuka dan melibatkan semua pihak, termasuk kelompok rentan, dalam proses pembangunan.

2) Keuangan

a) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program pengelolaan keuangan daerah berupaya untuk mengatur, mengelola, dan mengoptimalkan sumber daya keuangan suatu pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan

akuntabilitas. Program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. Program ini mencakup kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen anggaran daerah; koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah; koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; koordinasi pelaksanaan kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah; serta koordinasi pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah. Program pengelolaan keuangan daerah bertujuan menciptakan tata kelola yang baik, memastikan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengalokasian dana yang strategis dan berkelanjutan. Program ini ditargetkan untuk mencapai Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD sebesar 100%; Tertib Pengelolaan Kas Daerah sebesar 100%; Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 100%; Persentase Realisasi Bantuan Keuangan terhadap Anggaran Bantuan Keuangan sebesar 100%; Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah sebesar 100% dari tahun 2026 sampai akhir periode RPJMD.

b) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program pengelolaan barang milik daerah berupaya untuk mengatur, memanfaatkan, dan menjaga aset milik daerah agar tetap bernilai, berfungsi optimal, serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Program ini mencakup kegiatan pengelolaan barang milik daerah. Program ini ditargetkan untuk mencapai Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 100% dari tahun 2026 sampai dengan akhir periode RPJMD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai aspek utama dalam pengelolaan barang milik daerah yang meliputi Perencanaan dan Pengadaan, Pencatatan dan Inventarisasi, Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset, Pengawasan dan Pengendalian, dan Penghapusan dan Penjualan Barang Tidak Layak Pakai.

c) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program pengelolaan pendapatan daerah berupaya untuk mengoptimalkan sumber penerimaan pemerintah daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Program ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengumpulan pendapatan, memperkuat transparansi, serta memastikan keberlanjutan fiskal daerah. Program ini mencakup kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah; serta Pengelolaan pendapatan Daerah (penatausahaan pendapatan transfer, pengelolaan retribusi, penyusunan data potensi PAD). Program ini juga ditargetkan untuk mencapai Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 100% dan Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah sebesar

100% dari tahun 2026 sampai dengan akhir periode RPJMD. Berikut adalah aspek utama dalam program ini:

Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah berasal dari berbagai sumber, yang dikelompokkan menjadi:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Termasuk pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.
- Pendapatan Transfer: Meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
- Pendapatan lainnya: Seperti hibah, pinjaman daerah, dan bantuan keuangan dari pemerintah pusat atau provinsi.

Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan

Untuk meningkatkan efektivitas penerimaan, pemerintah daerah melakukan berbagai strategi, seperti:

- Digitalisasi Sistem Pemungutan: Penggunaan teknologi seperti e-tax dan e-retribusi untuk mempercepat pembayaran dan mengurangi kebocoran pendapatan.
- Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak: Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang kewajiban pajak serta sanksi bagi yang tidak patuh.
- Diversifikasi Sumber Pendapatan: Mengembangkan aset daerah, meningkatkan investasi lokal, dan mencari peluang pendapatan baru.

Transparansi dan Akuntabilitas

Pelaporan pendapatan daerah harus dilakukan secara terbuka dan akurat agar publik dapat mengawasi penggunaannya. Langkah-langkah yang mendukung transparansi meliputi:

- Publikasi Laporan Keuangan: Pemerintah daerah wajib menyajikan laporan pendapatan secara berkala dalam bentuk yang mudah diakses oleh masyarakat.
- Pengawasan oleh DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Pemeriksaan berkala memastikan bahwa pendapatan daerah dikelola sesuai regulasi dan tidak disalahgunakan.

Evaluasi dan Pengembangan

Untuk memastikan keberlanjutan pendapatan daerah, evaluasi dilakukan secara berkala dengan melihat efektivitas kebijakan yang diterapkan. Jika ada kekurangan, pemerintah dapat menyesuaikan strategi, baik dalam pemungutan pajak, pengelolaan aset, maupun peningkatan daya tarik investasi daerah.

Dengan program pengelolaan pendapatan yang terstruktur dan inovatif, daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan infrastruktur, serta memastikan stabilitas keuangan untuk masa depan

3) Kepegawaian

a) Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah ditargetkan untuk mencapai persentase ASN berkinerja baik sebesar 99%; persentase ketersediaan dokumen perencanaan kepegawaian sebesar 100%; persentase pegawai yang dipetakan kompetensinya sebesar 100%; dan persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya sebesar 95% di tahun 2030. Program Kepegawaian Daerah meliputi: Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan ASN; Koordinasi dan fasilitasi Pemberhentian ASN; Pengembangan sistem informasi kepegawaian; Pengelolaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah; Pengelolaan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara; Pelaksanaan *Assesment* bagi Aparatur Sipil Negara; Pengelolaan Pendidikan Lanjutan bagi Aparatur Sipil Negara; Pembinaan Jabatan Fungsional ASN; Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara; serta Pembinaan Disiplin ASN. Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. Program Nasional yang didukung oleh Program Kepegawaian Daerah adalah Reformasi politik, birokrasi, dan hukum. Sedangkan program delegasi provinsi yang didukung oleh program ini yaitu melahirkan Pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa. Program ini juga mendukung program prioritas bupati yaitu pengembangan inovasi dan kompetensi teknologi informasi bagi Aparatur Sipil Negara. Pada program ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi di setiap layanan kepegawaian misalnya Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Kenaikan Pangkat, Penilaian Kinerja, Pengembangan Karir, Mutasi dan Promosi, Disiplin, Penghargaan, Pemberhentian.

4) Pendidikan dan Pelatihan

a) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ditargetkan untuk mencapai persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional sebesar 100% dan juga persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis sebesar 100% dari tahun 2026 sampai dengan akhir periode RPJMD. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi: Pengembangan kompetensi teknis bagi Aparatur Sipil Negara; Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Diklat Prajabatan; serta Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri. Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,

judi dan penyelundupan. Program Nasional yang didukung oleh Program Kepegawaian Daerah adalah Reformasi politik, birokrasi, dan hukum. Sedangkan program delegasi provinsi yang didukung oleh program ini yaitu melahirkan Pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas Aparatur Sipil Negara. Program ini juga mendukung program prioritas bupati yaitu pengembangan inovasi dan kompetensi teknologi informasi bagi Aparatur Sipil Negara. Pada program ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi.

5) Penelitian dan Pengembangan

a) Program Riset dan Inovasi Daerah

Program Riset dan Inovasi Daerah merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam memperkuat ekosistem inovasi lokal yang inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Program ini ditargetkan untuk mencapai Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan sebesar 75%; Tingkat Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebesar 3,36%; dan Jumlah inovasi yang dimiliki daerah sebesar 295 inovasi. Program ini mencakup kegiatan Seleksi Riset Unggulan Daerah; Analisis Indeks Daya Saing Daerah; Publikasi hasil penelitian melalui jurnal integral; Penyusunan *Policy Brief*; Koordinasi dengan Forum Komunikasi Riset dan Inovasi; Koordinasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; Fasilitasi dan Pembinaan Inovasi; Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah; ikut serta dalam seleksi *Innovative Government Award* (IGA); Lomba Krenova Kabupaten; Pengembangan Rancang Bangun Inovasi (Sistem Informasi Untuk Riset, Pengembangan Riset dan Inovasi daerah); Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi; Dukungan Layanan Sistem Inovasi Daerah; serta pengelolaan Kebun Raya daerah.

f) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat Daerah

a) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Program ini dirancang untuk memastikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program, serta pengelolaan anggaran dan sumber daya dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan pengawasan yang terencana dan sistematis, program ini bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin potensi penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Pengawasan dilaksanakan baik secara preventif

maupun represif, dengan pendekatan pengawasan intern, audit kinerja, audit keuangan, review, evaluasi, dan pemantauan.

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan Pengawasan Internal dan penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu yang meliputi Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Review Laporan Kinerja, Review Laporan Keuangan, Pengawasan Desa, Kerja Sama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu. Program ini ditargetkan untuk mencapai persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 85%; mencapai Persentase Laporan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang Diterbitkan 100%, Persentase Laporan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Diterbitkan 100%, Persentase Laporan Pengawasan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Diterbitkan 100%, Persentase Laporan Pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi yang Diterbitkan 100%, serta Persentase Tindak Lanjut Aduan Masyarakat berkadar pengawasan 100% pada tahun 2030 di akhir RPJMD. Hasil dari program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik, efektivitas pelaksanaan program kerja, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara pemerintahan.

b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi merupakan salah satu strategi utama dalam memperkuat sistem pengawasan intern pemerintah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk memastikan tersusunnya kebijakan pengawasan yang adaptif, implementatif, dan mampu menjawab dinamika serta kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kegiatan perumusan kebijakan pengawasan, dilakukan penyusunan regulasi, pedoman, standar, dan prosedur pengawasan yang terintegrasi, berbasis risiko, dan selaras dengan arah kebijakan nasional, sedangkan pendampingan dan asistensi pengawasan menjadi instrumen penting dalam mendukung penerapan kebijakan pengawasan di seluruh unit kerja melalui peningkatan pemahaman, kapasitas, dan keterampilan aparatur dalam penerapan sistem pengendalian intern, penegakan integritas serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan serta pendampingan dan asistensi untuk perangkat daerah yang meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan, pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, pendampingan, asistensi, verifikasi, dan

penilaian reformasi birokrasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas. Program ini ditargetkan untuk tercapainya Persentase kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan sebesar 100%, Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur sebesar 100%, Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar 100%, Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebesar 100%, serta Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi sebesar 100% pada tahun 2030 di akhir RPJMD. Pelaksanaan program ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

g. Unsur Kewilayahan

1) Kecamatan

- a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik diarahkan untuk pelayanan PATEN; layanan aduan masyarakat; monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan; fasilitasi intensifikasi PBB; fasilitasi di bidang Kesehatan, bidang Pendidikan, dan bidang sosial; serta fasilitasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas). Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Purworejo dengan target dari program ini persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik mencapai sebesar 100% pada tahun 2030.
- b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bertujuan meningkatkan kapasitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan serta memperkuat kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan melalui kegiatan yang partisipatif dan berkelanjutan. Sasaran dari program ini adalah Masyarakat desa kelurahan yang memiliki potensi ekonomi dan sosial, Lembaga kemasyarakatan, Kelompok usaha mikro dan komunitas lokal. Program ini diarahkan untuk fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan; pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; pemberdayaan masyarakat kelurahan; serta pemberdayaan masyarakat desa. Program ini bertujuan terselenggarakannya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di Kabupaten Purworejo dengan target persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di Kabupaten Purworejo mencapai 100% pada akhir masa periode RPJMD.
- c) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini memiliki tujuan untuk mewujudkan situasi wilayah kecamatan yang aman, tertib, dan kondusif melalui fasilitasi Pilkada dan Pemilu; Monitoring kebencanaan; Sosialisasi Penegakan Perda; serta fasilitasi keagamaan dengan target pada tahun 2030 persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Purworejo mencapai 100%.

d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini bertujuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan umum yang mencakup pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, serta pembinaan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah kecamatan melalui Fasilitasi Forkopimcam; Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka; serta Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan target persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum mencapai 100% pada tahun 2030.

e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini memiliki tujuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan umum yang mencakup pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, serta pembinaan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah kecamatan melalui Fasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkades; Fasilitasi Penyusunan RPJMDes dan RKPDes; Pembinaan Perangkat Desa/ Kelurahan; Pembinaan Administrasi Desa; Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa; Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Asset Desa/Kelurahan; Fasilitasi Pengelolaan Batas Desa/ Kelurahan; Fasilitasi Pilkades; Pembinaan BPD; Fasilitasi Seleksi dan Mutasi Perangkat Desa; serta Fasilitasi Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dengan target persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa pada akhir masa periode RPJMD mencapai 100%.

e) Unsur Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan diarahkan untuk Pendidikan bela negara bagi pelajar melalui pelatihan Paskibra tingkat kecamatan; dialog forum pembaruan kebangsaan; dialog wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan; rakor forum pembaruan kebangsaan; serta pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka. Program ini akan difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta pembentukan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan Dialog Forum Pembauran Kebangsaan akan dilaksanakan secara berkala sebagai media komunikasi lintas kelompok masyarakat, dengan tujuan membangun harmoni sosial dan memperkuat semangat persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi

kelembagaan, Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan diselenggarakan guna memperkuat sinergi antar instansi dan lembaga teknis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembauran.

Program ini juga mencakup peningkatan kesadaran bela negara melalui Diklat Bela Negara yang menyasar generasi muda, ASN, dan komunitas strategis lainnya. Peringatan Hari Bela Negara dilaksanakan setiap tahun sebagai simbol penguatan semangat nasionalisme dan penghormatan terhadap nilai perjuangan bangsa. Program ini ditargetkan tercapainya cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan sebesar 1,40% di tahun 2030. Guna memperluas cakupan pemahaman ideologis, akan diselenggarakan Dialog Ideologi dan Kebangsaan, serta Koordinasi dan Konsultasi Ideologi Wawasan Kebangsaan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan, guna memastikan relevansi pendekatan ideologi dengan dinamika masyarakat dan perkembangan global.

Penguatan peran generasi muda diwujudkan melalui pembentukan Paskibraka yang tidak hanya berperan dalam kegiatan seremonial upacara kenegaraan, tetapi juga dibina untuk menjadi pelopor nilai kebangsaan karena paskibraka adalah Program kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila. Setelah melaksanakan tugas utama yaitu pengibaran bendera pusaka pada tanggal 17 agustus dan 1 Juni, mereka disebut Purna Paskibraka yang masih memiliki beberapa tugas dan akan mendapatkan pembinaan lanjutan sebagai Duta Pancasila, seminar pengarusutamaan nilai Pancasila, dan pembinaan kelembagaan yang berkelanjutan melalui dukungan organisasi yang dibentuk dan dibina oleh pemerintah yaitu Duta Pancasila Purna Paskibraka.

Dalam rangka mendukung implementasi kegiatan strategis ini secara optimal, akan dialokasikan sumber daya pendukung, termasuk penyediaan jasa non-ASN yang kompeten dan profesional dalam mendampingi pelaksanaan program.

Dengan arah kebijakan yang terstruktur, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan diharapkan mampu membangun masyarakat yang inklusif, berdaya saing, serta berkomitmen terhadap keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka panjang.

b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik merupakan bagian penting dari pembangunan demokrasi yang sehat, beretika, dan berkelanjutan. Program ini ditujukan untuk memperkuat fungsi partai politik sebagai pilar utama demokrasi serta meningkatkan kesadaran politik masyarakat,

khususnya generasi muda, melalui pendidikan politik bagi masyarakat; penyaluran hibah bantuan keuangan parpol; serta koordinasi di bidang pendidikan, politik, dan pemantauan situasi politik daerah. Salah satu komponen utama program ini adalah pemberian hibah kepada partai politik, yang merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan partai politik. Hibah ini diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diarahkan untuk mendukung pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat secara umum.

Untuk memastikan pelaksanaan hibah berjalan secara akuntabel dan transparan, diselenggarakan kegiatan dukungan administrasi hibah, yang mencakup penyediaan alat tulis kantor, penyelenggaraan rapat koordinasi, proses verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan, serta kegiatan koordinasi dan konsultasi lintas instansi. Dukungan ini bersifat strategis guna memastikan mekanisme bantuan keuangan kepada partai politik dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas internal partai politik, dilaksanakan Bimbingan Teknis bagi pengelola keuangan partai politik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pengurus partai politik dalam pengelolaan keuangan secara tertib, efisien, dan sesuai regulasi yang berlaku, sehingga laporan penggunaan hibah dapat disusun secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, program ini juga menyasar generasi muda melalui kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula, baik melalui sekolah, perguruan tinggi, maupun forum dan lembaga. Kegiatan ini dirancang untuk membangun kesadaran kritis, partisipasi aktif, serta pemahaman terhadap sistem politik, hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berdemokrasi.

Program ini ditargetkan mencapai persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik sebesar 4,14% di tahun 2030 pada akhir RPJMD. Dalam pelaksanaannya, program ini didukung oleh tenaga jasa non-ASN yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan politik, fasilitasi kelembagaan, serta administrasi keuangan hibah, guna memastikan kegiatan berjalan efektif dan efisien.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diperkuat melalui mekanisme koordinasi dan konsultasi antara pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, partai politik, Lembaga dan forum, serta mitra strategis lainnya, untuk menjamin keterpaduan dan keberlanjutan pelaksanaan program.

Dengan pelaksanaan program ini secara konsisten, diharapkan tercipta iklim politik yang sehat, partisipatif, serta beretika, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya demokrasi yang matang dan berkeadaban di tingkat daerah.

c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan bagian penting dari strategi pembangunan sosial-politik yang inklusif, demokratis, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. Program ini bertujuan untuk memperkuat peran Ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memastikan pelaksanaan aktivitas Ormas berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan mendukung stabilitas sosial. Program ini juga diarahkan untuk dialog pemberdayaan ormas; pelaksanaan koordinasi pemberdayaan dan pengawasan ormas; serta penyaluran hibah kepada Ormas/ lembaga. Program ini ditargetkan mencapai persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif sebesar 45% di tahun 2030.

Dalam rangka penguatan peran dan fungsi Ormas secara konstruktif, pemerintah menyelenggarakan berbagai bentuk pelatihan, seperti Diklat Penguatan SDM Ormas dan Diklat Pemberdayaan Ormas. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas manajerial, kepemimpinan, serta pemahaman organisasi terhadap regulasi yang mengatur keberadaan dan kegiatan Ormas. Dengan SDM yang kompeten, diharapkan Ormas mampu berkontribusi secara lebih aktif dalam pembangunan daerah dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas sosial kemasyarakatan, pemerintah juga memberikan hibah kepada lembaga/ormas yang memenuhi kriteria administratif dan substantif. Hibah ini ditujukan untuk mendukung program kerja Ormas yang bersifat edukatif, sosial, keagamaan, maupun pemberdayaan masyarakat. Agar penggunaan bantuan keuangan tersebut tepat sasaran dan sesuai peruntukan, dilakukan kegiatan pengendalian penggunaan hibah, baik melalui verifikasi monitoring, evaluasi, maupun laporan pertanggungjawaban.

Dialog dan edukasi publik seperti Sarasehan Penguatan Kebangsaan, Seminar Wawasan Kebangsaan, dan Dialog Pemberdayaan Ormas dilaksanakan untuk membangun pemahaman bersama tentang pentingnya nilai-nilai persatuan, toleransi, dan cinta tanah air. Kegiatan ini juga menjadi ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan Ormas dalam merumuskan solusi terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan.

Untuk mendukung ekosistem Ormas yang sehat dan tertib, dilakukan berbagai kegiatan pengelolaan administrasi, seperti koordinasi, pendaftaran Ormas, serta mediasi sengketa Ormas, guna menciptakan iklim kelembagaan yang tertib, adil, dan sesuai prinsip hukum. Pemerintah juga memperkuat fungsi pengawasan terhadap aktivitas Ormas Asing, agar tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, dan kedaulatan nasional.

Melalui pendekatan pemberdayaan yang seimbang dengan pengawasan yang ketat, program ini diharapkan mampu menciptakan organisasi kemasyarakatan yang aktif, mandiri, dan berintegritas dalam mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas sosial dan ideologi bangsa.

d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya merupakan upaya strategis pemerintah dalam memperkuat daya tahan masyarakat terhadap berbagai tantangan dan perubahan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan. Program ini diarahkan untuk fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat; koordinasi kerukunan umat beragama dan penghayat; dialog ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; sosialisasi bahaya narkoba; serta koordinasi pencegahan peredaran narkoba. Program ini ditargetkan untuk tercapainya persentase peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah Kabupaten Purworejo sebesar 100% di tahun 2030.

Salah satu fokus utama dari program ini adalah memperkuat aspek kerukunan dan harmoni sosial melalui Dialog Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan. Kegiatan ini menjadi ruang komunikasi yang terbuka bagi berbagai unsur agama dan kepercayaan untuk membangun saling pengertian, toleransi, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui dialog yang inklusif, diharapkan potensi konflik dapat diredam dan stabilitas sosial terus terjaga.

Program ini juga mencakup Dialog Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Esosbud) sebagai wadah berbagi gagasan dan solusi atas tantangan ketahanan masyarakat, termasuk penguatan ekonomi lokal, pelestarian budaya daerah, dan perlindungan kelompok rentan. Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, serta organisasi sosial budaya, guna membangun strategi kolektif dalam memperkuat ketahanan daerah.

Isu penyalahgunaan narkoba juga menjadi perhatian dalam program ini melalui kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, akan bahaya narkoba dan dampaknya terhadap ketahanan sosial serta masa depan bangsa. Sosialisasi ini dilakukan secara masif dan berkelanjutan melalui pendekatan edukatif, kolaboratif, dan berbasis komunitas.

Dari sisi koordinatif, dilaksanakan Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan, serta Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai forum sinergi lintas sektor untuk menyusun langkah-langkah konkrit

dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat ekonomi masyarakat, serta melestarikan budaya lokal. Rakor ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki peran dan arah gerak yang sejalan.

Sosialisasi penanggulangan narkoba juga dilakukan secara terstruktur dan koordinatif dalam berbagai forum, agar kampanye pencegahan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif.

Melalui pelaksanaan program ini secara berkelanjutan dan kolaboratif, diharapkan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah dapat semakin kuat, inklusif, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan zaman serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

e) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam menciptakan stabilitas keamanan, ketertiban umum, dan ketahanan sosial di tengah dinamika masyarakat yang kompleks dan beragam. Program ini dirancang untuk mengantisipasi potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, melalui strategi deteksi dini, pencegahan, dan penanganan terpadu. Program ini ditargetkan untuk tercapainya persentase konflik sosial yang ditangani sebesar 100% di tahun 2030 pada akhir RPJMD.

Salah satu komponen utama dari program ini adalah koordinasi Kerjasama intelijen daerah; koordinasi Forkopimda Kabupaten; dialog kewaspadaan dini masyarakat; rakor Foru Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); serta koordinasi penanganan konflik sosial.

Selanjutnya, kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial diselenggarakan untuk mensinergikan peran instansi pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat dalam merespons potensi konflik dengan pendekatan kolaboratif. Rakor Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Rakor Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dilaksanakan guna memperkuat jejaring komunikasi antar elemen strategis di daerah, serta mengoptimalkan peran perangkat daerah dalam sistem deteksi dan respon cepat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas intelijen kewilayahan, Rakor Intelijen Daerah difungsikan sebagai wadah konsolidasi data dan analisis strategis terhadap potensi ancaman keamanan yang bersifat tersembunyi. Selain itu, Rakor Pengawasan Orang Asing menjadi penting untuk memastikan bahwa keberadaan WNA di daerah tidak membawa potensi gangguan terhadap stabilitas sosial dan keamanan.

Aspek koordinatif juga diperkuat melalui Kegiatan Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial, yang menjadi

ajang konsolidasi lintas sektor dan penguatan kapasitas respons cepat terhadap dinamika sosial di lapangan.

Kunci keberhasilan program ini juga terletak pada sinergitas Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) yang menjadi garda terdepan dalam merumuskan kebijakan dan merespons perkembangan situasi keamanan daerah. Untuk itu, peran Sekretariat Forkopimda sebagai pusat layanan administratif dan koordinatif didukung penuh agar kinerja Forkopimda dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, melalui pelaksanaan program ini, diharapkan tercipta tata kelola kewaspadaan nasional yang tangguh, serta sistem penanganan konflik sosial yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum.

f) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota ditargetkan untuk mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten sebesar 88,31%; Rata-Rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 80,20; Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebesar 100%; Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah sebesar 100%; Rata-rata nilai Sakip Perangkat Daerah sebesar 80,20%; Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas sebesar 75,00%; Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di RSUD Tjitrowardojo sebesar 90% dan di RSUD Tjokronegoro sebesar 93,50%; Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan di RSUD Tjitrowardojo dan RSUD Tjokronegoro sebesar 100%; dan Persentase Ketercapaian Layanan Penunjang Medis dan Nonmedis di RSUD Tjokronegoro sebesar 100% di tahun 2030.

Program ini mencakup kegiatan perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; administrasi keuangan perangkat daerah; administrasi kepegawaian perangkat daerah; administrasi umum perangkat daerah; pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah; penyediaan jasa panunjang urusan pemerintah daerah; serta pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Program ini juga diarahkan pada Pembinaan Pelayanan Publik dan Tatalaksana; Penyusunan Roadmap RB; Penyusunan Rencana Aksi RB General dan Tematik; Penyusunan Kebijakan TPP; Penyusunan Analisis Jabatan, Peta Jabatan, dan Kematangan Organisasi; Koordinasi dan fasilitasi keprotokolan pimpinan; Fasilitasi komunikasi pimpinan; dan Pendokumentasian tugas pimpinan. Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Sedangkan Program Delegasi Provinsi yang didukung yaitu Melahirkan Pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa. Program ini juga

mendukung Program Pitulungan yaitu Sejahtera Wargane, yang difokuskan untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi, serta membangun sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi.

Program ini juga diarahkan pada Pembinaan Pelayanan Publik dan Tatalaksana; Penyusunan Roadmap RB; Penyusunan Rencana Aksi RB General dan Tematik; Penyusunan Kebijakan TPP; Penyusunan Analisis Jabatan, Peta Jabatan, dan Kematangan Organisasi; Koordinasi dan fasilitasi keprotokolan pimpinan; Fasilitasi komunikasi pimpinan; dan Pendokumentasian tugas pimpinan. Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Sedangkan Program Delegasi Provinsi yang didukung yaitu Melahirkan Pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa. Program ini juga mendukung Program Pitulungan yaitu Sejahtera Wargane, yang difokuskan untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi, serta membangun sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan hasil, keluaran, atau dampak yang dicapai dari suatu kegiatan, program, atau sasaran yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pembangunan. Sementara itu, indikator kinerja berperan sebagai alat ukur untuk menilai pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan, yang dapat berupa keluaran (*output*), hasil (*outcome*), maupun dampak (*impact*).

Indikator Kinerja Daerah (IKD) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator tersebut terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, yang menjadi tolok ukur utama pencapaian visi dan misi, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang digunakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan.



Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Purworejo

No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun				
			2024		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten	Juta Rupiah	31,19	31,56	37,64	43,71	49,79	55,86	61,94
2	Tingkat Kemiskinan	%	10,87	10,22 – 9,04	9,67 – 8,67	9,22 – 8,22	8,76 – 7,76	8,30 – 7,30	7,84 – 6,84
3	Rasio Gini	Angka	0,354	0,335	0,334	0,333	0,332	0,331	0,330
4	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,85	3,86	3,87	3,88	3,89	3,90	3,91
5	Indeks Religiusitas Daerah	Angka	71,25	76,26	81,60	83,04	83,89	84,15	84,42
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,16	75,39	76,00	76,10	76,21	76,31	76,41
7	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	46,97	50,18	52,07	53,95	55,84	57,72	59,61
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	66,33	76,04	76,08	76,13	76,17	76,21	76,25
9	Indeks Risiko Bencana	Angka	114,09	110,16 - 109,00	108,53 - 106,88	106,89 - 104,76	105,26 - 102,64	103,63 - 100,52	101,99 - 98,41
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,79	5,16 - 6,16	5,00 - 5,80	6,10 - 7,10	6,70 - 7,70	7,30 - 8,19	7,80 - 8,50
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	3,89	3,11	3,10 - 2,83	2,93 - 2,63	2,84 - 2,54	2,75 - 2,45	2,66 - 2,36
12	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	86,22	86,25	86,28	86,32	86,35	86,38	86,41
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	82,59	83	83,41	83,82	84,23	84,64	85,05
14	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	65,58	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2
15	Indeks Ketahanan Nasional	Angka	0,0	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1

Sumber: Tim Penyusun, 2025



Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1	Penurunan Emisi GRK	TonCO ₂ eq	202.942.250	1.710.784.090	1.913.911.700	2.117.039.300	2.320.166.910	2.523.294.510	2.726.422.120	IUP
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	66,33	76,04	76,08	76,13	76,17	76,21	76,25	Sasaran Daerah/ IUP
3	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	114,09	110,16 - 109,00	108,53 - 106,88	106,89 - 104,76	105,26 - 102,64	103,63 - 100,52	101,99 - 98,41	Sasaran Daerah/ IUP
4	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	86,22	86,25	86,28	86,32	86,35	86,38	86,41	Sasaran Daerah/ IUP
5	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	11,51	11,30	11,00	10,80	10,50	10,23	10,00	IUP
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah	%	26,43	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	42,50	IUP
B ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten	Juta Rupiah	31,19	31,56	37,64	43,71	49,79	55,86	61,94	Tujuan Daerah/ IUP
2	Tingkat Kemiskinan	%	10,87	10,22 - 9,04	9,67 - 8,67	9,22 - 8,22	8,76 - 7,76	8,30 - 7,30	7,84 - 6,84	Tujuan Daerah/ IUP
3	Rasio Gini	Angka	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	Tujuan Daerah
4	Indeks Religiusitas Daerah	Angka	71,25	76,26	81,60	83,04	83,89	84,15	84,42	Tujuan Daerah
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,16	75,39	76,00	76,10	76,21	76,31	76,41	Sasaran Daerah
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,79	5.16 - 6.16	5.00 - 5.80	6.10 - 7.10	6.70 - 7.70	7.30 - 8.19	7.80 - 8.50	Sasaran Daerah



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,89	3,11	3,10 - 2,83	2,93 - 2,63	2,84 - 2,54	2,75 - 2,45	2,66 - 2,36	Sasaran Daerah/ IUP
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,64	75,89	76,14	76,34	76,64	77,09	77,34	IUP
9	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	7,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	IUP
10	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	14,90	14,40	13,90	13,40	12,90	12,40	11,90	IUP
11	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	51,00	90,00	90,63	91,25	91,88	92,50	93,13	IUP
12	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	79,00	84,00	90,31	90,63	90,94	91,25	91,56	IUP
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,31	98,28	98,40	98,50	98,60	98,70	98,80	IUP
	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang):									
14	Literasi Membaca SD/ Sederajat	%	71,99	74,49	76,99	79,49	81,99	84,49	84,49	IUP
15	Literasi Membaca SMP/ Sederajat	%	82,61	83,71	84,81	85,91	87,01	88,11	88,11	IUP
16	Numerasi SD/ Sederajat	%	57,57	60,47	63,37	66,27	69,17	72,07	74,97	IUP
17	Numerasi SMP/ Sederajat	%	69,91	71,41	72,91	74,41	75,91	77,41	78,91	IUP
18	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	8,98	9,62	9,78	9,95	10,11	10,27	10,43	IUP
19	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,55	14,02	14,15	14,27	14,40	14,52	14,65	IUP
20	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang	%	9,17	9,18	9,19	9,20	9,21	9,22	9,23	IUP



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Berkualifikasi Pendidikan Tinggi									
21	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	%	85,50	87,06	87,62	88,18	88,73	89,29	89,85	IUP
22	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	%	24,13	49,35	52,51	56,72	62,15	72,55	85,73	IUP
23	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	%	29,27	31,25	32,99	34,95	36,68	38,28	40,00	IUP
24	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	28,56	58,49	58,82	59,14	59,47	59,79	60,12	IUP
25	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	%	52,60	53,61	54,61	58,02	61,43	64,85	68,26	IUP
26	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	0,05	0,15	0,26	0,37	0,47	0,58	0,69	IUP
27	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	62,87	65,07	66,07	67,06	68,06	69,05	70,05	IUP
28	Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	19,71	21,36	21,66	21,96	22,26	22,56	22,86	IUP
29	Indeks Zakat Nasional	Poin Indeks	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67	Mandatory
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,85	3,86	3,87	3,88	3,89	3,90	3,91	Tujuan Daerah
2	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	46,97	50,18	52,07	53,95	55,84	57,72	59,61	Sasaran Daerah



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	20,06	20,30	20,49	20,67	20,86	21,04	21,23	IUP
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,30	2,58	2,86	3,15	3,43	3,71	3,99	IUP
5	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	148,00	265,00	277,00	289,00	300,00	312,00	324,00	IUP
6	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1,47	2,47	3,15	3,21	3,41	3,51	3,62	IUP
7	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,02	2,03	2,04	2,05	2,06	2,07	2,08	IUP
8	Disparitas Harga	%	+2.0	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 10	IUP
9	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	26,14	26,68	26,84	27,00	27,16	27,32	27,48	IUP
10	Kapabilitas Inovasi	Angka	3,09	3,10	3,11	3,12	3,13	3,14	3,15	IUP
11	Persentase Desa Mandiri	%	25,80	25,91	26,01	26,23	26,44	26,44	26,65	IUP
12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	45,95	40,53	41,30	42,07	42,83	43,60	44,37	IUP
13	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	73,66	83,28	83,63	83,98	84,33	84,68	85,03	IUP
14	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	68,16	68,43	68,51	68,58	68,66	68,74	78,29	IUP
15	Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten	%	63,28	66,53	66,54	66,55	66,56	71,15	71,16	IUP
16	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	%	36,56	39,21	40,09	41,41	42,29	43,61	44,49	IUP
17	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	4,58	4,61	4,96	5,31	5,66	6,01	14,46	IUP
18	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	29,21	34,85	39,01	43,16	47,32	51,47	51,47	IUP
19	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	68,06	70,99	71,39	71,85	72,32	72,79	73,27	IUP



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	5,00	5,03	5,05	5,06	5,08	5,09	5,10	Mandatory
D	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	82,59	83,00	83,41	83,82	84,23	84,64	85,05	Sasaran Daerah/ IUP
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	65,58	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	Sasaran Daerah
3	Indeks Ketahanan Nasional	Angka	0,0	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	Sasaran Daerah
4	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IUP
5	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,50	64,23	65,16	66,09	67,02	67,95	68,88	IUP
6	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,26	0,263 - 0,253	0,262 - 0,243	0,260 - 0,232	0,258 - 0,221	0,257 - 0,210	0,255 - 0,200	IUP
7	Return on Asset (ROA) BUMD	%	4,52	4,94	5,36	5,78	6,20	6,62	7,04	IUP
8	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,42	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	IUP
9	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	4,93	5,33	5,35	5,38	5,40	5,42	5,44	IUP
10	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	6,08	5,87	5,89	5,92	5,94	5,96	5,98	IUP
11	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	4,93	5,33	5,35	5,38	5,40	5,42	5,44	IUP
12	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,38	96,45	96,74	96,81	96,87	96,94	97,00	IUP
13	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,49	3,55	3,61	3,68	3,74	3,80	3,86	IUP
14	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,33	4,34	4,35	4,37	4,38	4,39	4,40	IUP
15	Indeks Integritas Nasional	Angka	76,61	77,42	78,24	79,05	79,87	80,68	81,49	IUP



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)/ INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR										
A	PENDIDIKAN									
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,55	14,02	14,15	14,27	14,40	14,52	14,65	Tujuan PD
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,65	9,29	9,45	9,62	9,78	9,94	10,10	Tujuan PD
3	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	8,98	9,62	9,78	9,95	10,11	10,27	10,43	Tujuan PD
4	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9,17	9,18	9,19	9,20	9,21	9,22	9,23	Tujuan PD
6	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	%	85,50	87,06	87,62	88,18	88,73	89,29	89,85	Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020
7	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	%	92,08	92,63	92,63	96,37	96,98	97,60	98,23	Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020
8	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	%	97,70	99,09	99,15	99,25	99,35	99,45	99,55	Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020
9	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun (Kesetaraan)	%	16,65	20,76	24,86	28,96	33,05	37,15	41,25	Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020
10	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B	%	80,33	80,33	80,40	80,55	80,69	80,76	80,83	Sasaran PD
	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada									



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang):									
11	a. Literasi Membaca SD/ Sederajat	%	71.99	74.49	76.99	79.49	81.99	84.49	84.49	Sasaran PD
12	b. Literasi Membaca SMP/ Sederajat	%	82.61	83.71	84.81	85.91	87.01	88.11	88.11	Sasaran PD
13	c. Numerasi SD/ Sederajat	%	60.47	63.37	66.27	69.17	72.07	74.97	74.97	Sasaran PD
14	d. Numerasi SMP/ Sederajat	%	71.41	72.91	74.41	75.91	77.41	78.91	78.91	Sasaran PD
B	KESEHATAN									
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,64	75,89	76,14	76,34	76,64	77,09	77,34	Tujuan PD
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan	%	87,36	90,00	90,67	91,33	92,00	92,67	93,33	Tujuan PD
5	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	14,90	14,40	13,90	13,40	12,90	12,40	11,90	Sasaran PD
6	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	0,00	70,37	75,00	78,00	80,00	90,00	100,00	Sasaran PD
7	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	%	40,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	Sasaran PD
8	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	73,65	80,00	80,00	80,00	80,00	83,00	83,00	Sasaran PD
9	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna	%	79,00	78,00	78,00	78,00	80,00	80,00	80,00	Sasaran PD
10	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di Puskesmas	%	91.06	92.00	92.50	93.00	93.50	94.00	94.50	Sasaran Sub Unit PD
11	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di RSUD Tjitrowardojo	%	85	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00	91.00	Sasaran Sub Unit PD
12	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan	%	86.01	92.00	92.50	93.00	93.50	94.00	94.50	Sasaran Sub Unit PD



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kesehatan di RSUD Tjokronegoro									
13	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	Permendagri 18 Th 2020
14	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
15	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	98,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
16	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
17	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
18	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
19	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	88,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
20	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	55,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
21	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	82,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
22	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
23	Persentase penderita DM yang mendapatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	elayanan kesehatan sesuai standar									
24	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
25	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
26	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
C	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	%	58,79	59,99	60,37	60,75	61,13	61,41	63,22	Tujuan & Sasaran PD
2	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	68,06	70,99	71,38	71,85	72,32	72,79	73,27	Tujuan & Sasaran PD
3	Persentase Kinerja Penataan Ruang	%	0,00	44,70	52,77	59,07	65,82	81,76	70,42	Tujuan & Sasaran PD
4	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	67,73	67,78	67,85	67,90	67,95	68,00	68,06	Permendagri 18 Th 2020
5	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	99,34	99,34	99,36	99,37	99,38	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	95,79	95,22	95,23	95,24	95,25	95,26	95,27	Permendagri 18 Th 2020
7	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
8	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	63,28	66,53	66,54	66,55	66,56	71,15	71,16	Permendagri 18 Th 2020
9	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	103,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
10	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
D	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang Ditangani	%	86,21	91,76	93,41	95,05	96,70	98,35	100,00	Tujuan & Sasaran PD
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	68,16	68,43	68,51	68,58	68,66	68,74	78,29	Tujuan & Sasaran PD
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
4	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
5	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	86,81	92,11	93,69	95,27	96,85	98,42	100,00	Permendagri 18 Th 2020
6	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	5,92	5,85	5,77	5,69	5,61	5,54	5,46	Permendagri 18 Th 2020



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	43,24	57,14	65,71	74,29	82,86	91,43	100,00	Permendagri 18 Th 2020
E	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tujuan PD
2	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tujuan PD
3	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sasaran PD
4	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.840	0.841	0.842	0.843	0.844	0.845	0.846	Sasaran PD
5	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sasaran PD
6	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sasaran PD
7	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
8	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kesiapsiagaan terhadap bencana									
11	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
12	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	Permendagri 18 Th 2020
13	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	menit	6,12	14,00	13,00	12,00	11,00	10,00	9,00	Permendagri 18 Th 2020
F	SOSIAL									
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	%	26.90	27.00	27.50	28.00	28.50	29.00	29.50	Tujuan & Sasaran PD
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan)	Angka	0,00	73,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	Tujuan & Sasaran PD
3	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR										
A	TENAGA KERJA									
1	Tingkat Kesempatan Kerja	%	96,11	96,89	96,90 - 97,17	97,07 - 97,37	97,16 - 97,46	97,25 - 97,55	97,34 - 97,64	Tujuan & Sasaran PD



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja	55,10	56,80	58,60	60,40	62,20	64,20	66,10	Tujuan & Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	45,95	40,53	41,30	42,07	42,83	43,60	44,37	Tujuan & Sasaran PD
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
5	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	Permendagri 18 Th 2020
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	1,88	2,03	2,18	2,34	2,50	2,65	2,81	Permendagri 18 Th 2020
7	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	67,89	67,92	67,94	67,96	67,99	68,01	68,04	Permendagri 18 Th 2020
B	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,26	0,263 - 0,253	0,262 - 0,243	0,260 - 0,232	0,258 - 0,221	0,257 - 0,210	0,255 - 0,200	Tujuan PD
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,11	95,37	95,38	95,39	95,41	95,42	95,43	Tujuan PD
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	63,39*	64,56	65,15	65,74	66,32	66,91	67,50	Tujuan & Sasaran PD
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	73,18	73,38	73,58	73,98	74,38	74,78	75,22	Sasaran PD
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	62,87	65,07	66,07	67,06	68,06	69,05	70,05	Sasaran PD



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	13,88	13,89	13,90	13,91	13,92	13,93	13,94	Permendagri 18 Th 2020
7	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
8	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	per 100.000 jiwa	13,01	12,41	11,81	11,21	10,61	10,01	9,41	Permendagri 18 Th 2020
C	PANGAN									
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	11,51	11,30	11,00	10,80	10,50	10,23	10,00	Tujuan PD
2	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	90,42	90,73	91,70	92,00	92,50	93,00	93,50	Sasaran PD
3	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	5,55	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	Permendagri 18 Th 2020
D	PERTANAHAN									
1	Persentase Peningkatan Kepastian Hukum atas Tanah bagi Masyarakat dan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	%	21,23	30,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	Tujuan & Sasaran PD
2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
3	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	11,86	14,82	17,79	20,75	23,72	26,68	29,65	Permendagri 18 Th 2020
4	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
E	LINGKUNGAN HIDUP									



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	26,43	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	42,50	Tujuan PD
2	Indeks Kualitas Air	Angka	65,74	75,31	75,41	75,51	75,61	75,71	75,81	Tujuan & Sasaran PD
3	Indeks Kualitas Udara	Angka	85,97	86,41	86,42	86,43	86,44	86,45	86,46	Tujuan & Sasaran PD
4	Indeks Kualitas Lahan	Angka	68,68	58,11	58,12	58,13	58,14	58,15	58,16	Tujuan & Sasaran PD
5	Persentase sampah terkelola	%	49,92	50,20	50,49	50,77	51,06	51,35	51,64	Sasaran PD
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	66,33	76,04	76,08	76,13	76,17	76,21	76,25	Permendagri 18 Th 2020
7	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	26,67	26,82	26,97	27,13	27,27	27,43	27,58	Permendagri 18 Th 2020
8	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	35,00	30,00	26,67	24,00	21,82	20,00	16,92	Permendagri 18 Th 2020
F	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	8,49	9,00	12,00	20,00	30,00	40,00	50,00	Tujuan & Sasaran PD
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)5	Angka	90,00	90,10	90,50	90,90	91,30	91,70	92,10	Tujuan & Sasaran PD
3	Perekaman KTP elektronik	%	99,70	100,00	99,74	99,78	99,82	99,86	99,90	Permendagri 18 Th 2020
4	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	96,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
5	Kepemilikan akta kelahiran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
6	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data	%	82,93	92,50	92,68	95,12	97,56	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama									
G	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase Desa Mandiri	%	25,80	25,91	26,01	26,23	26,44	26,44	26,65	Tujuan & Sasaran PD
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
3	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0,00	0,43	0,39	0,85	0,80	0,00	0,79	Permendagri 18 Th 2020
H	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,50	64,23	65,16	66,09	67,02	67,95	68,88	Tujuan PD
2	Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Angka	14,80	13,80	12,90	12,00	11,20	10,50	9,80	Sasaran PD
3	<i>Demand Satisfied</i>	Angka	83,90	84,20	84,50	84,80	85,20	85,50	85,80	Sasaran PD
4	<i>Total Fertility Rate</i>	Angka	2,11	2,10	2,09	2,09	2,08	2,07	2,06	Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020
5	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	65,98	66,41	67,74	69,09	70,47	71,88	72,00	Permendagri 18 Th 2020
6	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	9,38	9,25	9,16	9,07	8,98	8,8	8,85	Permendagri 18 Th 2020
I	PERHUBUNGAN									
1	Rasio Konektivitas	%	74,00	76,00	83,00	85,00	86,00	88,00	89,00	Tujuan & Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020
2	Penurunan angka kecelakaan	Angka	562,00	562,00	546,00	530,00	514,00	498,00	480,00	Tujuan & Sasaran PD



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Angka	0,32	0,25	0,27	0,30	0,30	0,32	0,32	Permendagri 18 Th 2020
I	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Indeks Pemerintah Digital	Angka	0,00	0,00	1,70	1,70	2,00	2,00	2,20	Tujuan PD
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	84,66	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50	Sasaran PD
3	Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	3,25	3,25	3,38	3,38	3,50	3,50	3,63	Sasaran PD
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
5	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
6	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00	67,00	Permendagri 18 Th 2020
J	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,02	2,03	2,04	2,05	2,06	2,07	2,08	Tujuan PD
2	Jumlah volume usaha koperasi	Juta Rupiah	492.233	503.460	505.940	508.421	510.901	513.381	515.861	Sasaran PD
3	Persentase UMKM yang Bermitra dengan Koperasi	%	9,17	10,03	10,75	12,10	13,44	14,79	16,13	Sasaran PD
4	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	25,52	42,60	44,01	45,07	46,12	47,18	48,23	Permendagri 18 Th 2020
5	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	1,51	1,79	1,67	1,72	1,77	1,83	1,88	Permendagri 18 Th 2020



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K	PENANAMAN MODAL									
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	26,14	26,68	26,84	27,00	27,16	27,32	27,48	Tujuan PD
2	Realisasi Penanaman Modal	Miliar Rupiah	125,94	128,46	131,03	133,65	136,32	139,05	141,83	Sasaran PD
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)	Angka	96,40	96,41	96,42	96,43	96,44	96,45	96,46	Sasaran PD
4	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	-9,53	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Permendagri 18 Th 2020
L	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Angka	9,02	9,11	9,22	9,33	9,40	9,50	9,55	Tujuan & Sasaran PD
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,35	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	Permendagri 18 Th 2020
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,53	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	Permendagri 18 Th 2020
4	Peningkatan prestasi olahraga	%	32,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Permendagri 18 Th 2020
M	STATISTIKA									
1	Indeks Pemerintah Digital	Angka	0,00	0,00	1,70	1,70	2,00	2,00	2,20	Tujuan PD
2	Indeks Satu Data Indonesia	Angka	59,80	59,80	61,60	61,60	63,40	63,40	65,20	Sasaran PD
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
4	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
N	PERSANDIAN									



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pemerintah Digital	Angka	0,00	0,00	1,70	1,70	2,00	2,00	2,20	Tujuan PD
2	Indeks KAMI	Angka	779,00	780,00	790,00	800,00	810,00	820,00	825,00	Sasaran PD
O	KEBUDAYAAN									
1	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	%	29,27	31,25	32,99	34,95	36,68	38,28	40,00	Tujuan & Sasaran PD
2	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
P	PERPUSTAKAAN									
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	78,32	78,50	78,80	79,24	79,54	79,75	80,00	Tujuan & Sasaran PD / Permendagri 18 Th 2020
2	Tingkat Gemar Membaca	Nilai	70,24	70,40	71,21	71,53	71,75	72,30	72,50	Tujuan & Sasaran PD / Permendagri 18 Th 2020
Q	KEARSIPAN									
1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Angka	75,78	75,90	76,00	76,15	76,50	76,75	76,90	Tujuan PD
2	Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	21,74	21,74	24,19	26,50	28,67	30,71	32,65	Sasaran PD
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	54,83	55,27	56,77	57,45	58,79	59,25	60,51	Permendagri 18 Th 2020
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	75,35	76,01	76,85	77,13	77,93	78,25	78,97	Permendagri 18 Th 2020



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat									
	URUSAN PILIHAN									
A	KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Nilai produksi perikanan tangkap	Juta Rupiah	8.059,89	8.059,89	8.301,68	8.550,73	8.807,26	9.071,47	9.343,62	Tujuan & Sasaran PD
2	Nilai produksi perikanan budidaya	Juta Rupiah	183.427,10	187.095,64	190.837,55	194.654,30	198.547,39	202.518,34	206.568,71	Tujuan & Sasaran PD
3	Nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	Juta Rupiah	2.416,05	2.450,04	2.500,00	2.549,89	2.599,95	2.649,93	2.700,07	Tujuan & Sasaran PD
4	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Angka	4.283,85	4.371,16	4.460,26	4.551,20	4.644,00	4.738,72	4.835,20	Permendagri 18 Th 2020
B	PARIWISATA									
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,30	2,58	2,86	3,15	3,43	3,71	3,99	Tujuan & Sasaran PD
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	46,54	46,55	46,56	46,57	46,58	46,59	46,54	Permendagri 18 Th 2020
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	24,17	24,18	24,19	24,20	24,21	24,22	24,17	Permendagri 18 Th 2020
4	Tingkat hunian akomodasi	%	21,48	21,49	21,50	21,51	21,52	21,53	21,54	Permendagri 18 Th 2020
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,30	2,31	2,32	2,33	2,34	2,35	2,36	Permendagri 18 Th 2020



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,33	2,34	2,35	2,36	2,37	2,38	2,39	Permendagri 18 Th 2020
C	PERTANIAN									
1	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	- 1,07	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	Tujuan & Sasaran PD
2	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	- 11,95	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	Tujuan & Sasaran PD
3	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	- 8,87	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	Tujuan & Sasaran PD
4	Persentase Peningkatan Produksi Daging	%	2,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Tujuan & Sasaran PD
5	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ ha	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	Permendagri 18 Th 2020
6	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-16,14	-19,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	Permendagri 18 Th 2020
D	PERDAGANGAN									
1	Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	3,52	4,02	4,53	5,03	5,54	6,04	6,54	Tujuan PD
2	PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	Miliar Rupiah	2.985,96	3.106,12	3.246,76	3.410,14	3.598,92	3.816,30	4.066,04	Sasaran PD
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	93,57	94,46	95,35	96,24	97,13	98,02	98,91	Permendagri 18 Th 2020
5	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	bertanda tera sah yang berlaku									
E	PERINDUSTRIAN									
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	20,06	20,30	20,49	20,67	20,86	21,04	21,23	Tujuan PD
2	PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	Miliar Rupiah	4.975,90	5.136,04	6.232,83	7.358,25	8.522,01	9.712,15	10.940,13	Sasaran PD
3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	-33,87	0,50	2,50	5,00	8,00	10,00	12,00	Permendagri 18 Th 2020
4	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	42,11	42,61	43,11	43,61	44,11	44,61	45,11	Permendagri 18 Th 2020
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	Permendagri 18 Th 2020
F	TRANSMIGRASI									
1	Tingkat Kesempatan Kerja	%	96,11	96,89	96,90 - 97,17	97,07 - 97,37	97,16 - 97,46	97,25 - 97,55	97,34 - 97,64	Tujuan & Sasaran PD
2	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja	55,10	56,80	58,60	60,40	62,20	64,20	66,10	Tujuan & Sasaran PD
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	45,95	40,53	41,30	42,07	42,83	43,60	44,37	Tujuan & Sasaran PD
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
A	SEKRETARIAT DAERAH									
1	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	56.94	58.58	60.23	61.87	63.51	65.16	66.80	Tujuan & Sasaran PD
2	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,33	4,34	4,35	4,37	4,38	4,39	4,40	Tujuan & Sasaran PD



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	Angka	28,34	29,63	30,93	32,22	33,51	34,81	36,10	Tujuan & Sasaran PD
4	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	Permendagri 18 Th 2020
5	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	86,10	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	Permendagri 18 Th 2020
6	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
7	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	-19,63	-10,00	5,00	8,00	10,00	15,00	20,00	Permendagri 18 Th 2020
B	SEKRETARIAT DPRD									
1	Indeks Kepuasan Layanan terhadap DPRD	Angka	0,00	80,93	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	Tujuan & Sasaran PD
C	PERENCANAAN									
1	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Angka	21,05	21,56	22,07	22,58	23,08	23,59	24,10	Tujuan & Sasaran PD
D	KEUANGAN									
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	83,84	84,20	84,56	84,92	85,28	85,65	86,01	Tujuan PD
2	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	18,63	21,70	21,83	22,79	23,93	25,06	26,24	Sasaran PD



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,42	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	Sasaran PD
5	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	8,56	8,09	9,61	8,69	8,66	8,63	8,59	Permendagri 18 Th 2020
6	Rasio PAD	%	18,63	21,86	22,27	22,42	23,39	24,36	25,33	Permendagri 18 Th 2020
7	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	63,05	65,26	68,02	72,91	76,58	80,25	83,92	Permendagri 18 Th 2020
8	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	94,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
9	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	97,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
10	Manajemen Aset	Angka	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Permendagri 18 Th 2020
11	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	3,73	3,67	3,49	0,17	0,00	0,00	0,00	Permendagri 18 Th 2020
12	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	95,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
13	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri 18 Th 2020
E	KEPEGAWAIAN									
1	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	82,25	82,25	82,26	82,27	82,28	82,29	82,30	Tujuan & Sasaran PD
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	61,09	61,10	61,11	61,12	61,13	61,14	61,15	Permendagri 18 Th 2020
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	16,85	16,86	16,87	16,88	16,89	16,90	16,91	Permendagri 18 Th 2020



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	33,44	33,45	33,46	33,47	33,48	33,49	33,50	Permendagri 18 Th 2020
F	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	82,25	82,25	82,26	82,27	82,28	82,29	82,30	Tujuan & Sasaran PD
G	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Kapabilitas Inovasi	Angka	3.06	3.11	3.16	3.21	3.26	3.31	3.36	Tujuan PD
2	Indeks Inovasi Daerah	Angka	61,72	63,10	65,50	65,75	66,00	66,50	66,75	Sasaran PD
3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang Ditindaklanjuti	%	39.00	40.00	45.00	50.00	60.00	70.00	75.00	Sasaran PD
H	INSPEKTORAT DAERAH									
1	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Angka	3,32	3,33	3,33	3,34	3,35	3,36	3,37	Tujuan PD/ Permendagri 18 Th 2020
2	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,11	3,16	3,22	3,27	3,33	3,38	3,44	Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020
3	Nilai Manajemen Risiko Indeks	Angka	3,10	3,17	3,23	3,30	3,37	3,43	3,50	Sasaran PD
4	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Angka	3,10	3,13	3,16	3,20	3,23	3,27	3,30	Sasaran PD
5	Indeks Integritas Nasional	Angka	76,61	77,42	78,24	79,05	79,87	80,68	81,49	Sasaran PD
I	KECAMATAN									
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)									
1	Kecamatan Grabag	Angka	84,32	87,57	88,10	88,20	88,30	88,40	88,50	Tujuan & Sasaran PD
2	Kecamatan Ngombol	Angka	86,24	86,25	86,50	86,54	86,58	86,62	86,66	Tujuan & Sasaran PD



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator	Satuan	Baseline	2025	Target Tahun					Ket.
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Kecamatan Purwodadi	Angka	91,94	92,00	92,15	92,30	92,45	92,60	92,75	Tujuan & Sasaran PD
4	Kecamatan Bagelen	Angka	90,81	90,84	90,86	90,90	90,92	90,94	90,96	Tujuan & Sasaran PD
5	Kecamatan Kaligesing	Angka	87,58	89,00	89,20	89,40	89,60	89,80	90,00	Tujuan & Sasaran PD
6	Kecamatan Purworejo	Angka	84,75	86,00	86,25	87,00	87,75	88,50	89,25	Tujuan & Sasaran PD
7	Kecamatan Banyuurip	Angka	87,75	87,85	87,90	87,95	88,00	88,05	88,10	Tujuan & Sasaran PD
8	Kecamatan Bayan	Angka	91,04	92,02	92,05	92,10	92,15	92,20	92,25	Tujuan & Sasaran PD
9	Kecamatan Kutoarjo	Angka	85,54	87,60	87,70	87,80	87,90	88,00	88,10	Tujuan & Sasaran PD
10	Kecamatan Butuh	Angka	86,00	87,75	88,75	88,76	88,77	88,78	88,79	Tujuan & Sasaran PD
11	Kecamatan Pituruh	Angka	86,86	86,90	86,95	87,00	87,20	87,30	87,40	Tujuan & Sasaran PD
12	Kecamatan Kemiri	Angka	84,77	85,00	85,25	85,50	85,75	86,00	86,25	Tujuan & Sasaran PD
13	Kecamatan Bruno	Angka	85,97	86,25	86,75	87,00	87,25	87,50	87,75	Tujuan & Sasaran PD
14	Kecamatan Gebang	Angka	83,63	83,65	83,70	83,90	84,00	84,20	84,40	Tujuan & Sasaran PD
15	Kecamatan Loano	Angka	85,08	85,10	85,15	85,20	85,25	85,30	85,35	Tujuan & Sasaran PD
16	Kecamatan Bener	Angka	88,38	88,40	88,45	88,50	88,55	88,60	88,65	Tujuan & Sasaran PD
J	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Indeks Ketahanan Ipoleksosbud	Angka	0,0	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	Tujuan & Sasaran PD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0,00	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	Tujuan & Sasaran PD



Sumber: Tim Penyusun, 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Terdapat 29 (dua puluh sembilan) jenis pelayanan dasar untuk kabupaten yang terbagi dalam enam bidang urusan, ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4. 4 Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Purworejo

No	Indikator	Kondisi Awal	2025	Target					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
		2024		2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pendidikan	Dindikbud
2	Pendidikan Dasar a. Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	b. Rata-rata kemampuan literasi berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD)	69,49	71,99	74,49	76,99	79,49	81,99	84,49		
	c. Rata-rata kemampuan numerasi berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD)	57,57	60,47	63,37	66,27	69,17	72,07	74,97		
	d. Rata-rata kemampuan literasi berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP)	81,51	82,61	83,71	84,81	85,91	87,01	88,11		
	e. Rata-rata kemampuan numerasi berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP)	69,91	71,41	72,91	74,41	75,91	77,41	78,91		
3	Pendidikan Kesetaraan Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kesehatan	Dinkesda
4-15	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		



No	Indikator	Kondisi Awal	2025	Target					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
		2024		2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pelayanan kesehatan									
	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan Tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
16	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pekerjaan Umum	DPUPR
17	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
18	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perumahan Rakyat	Dinpekim-tan
19	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
20	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Trantibum-	Satpol PP



No	Indikator	Kondisi Awal	2025	Target					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
		2024		2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota								linmas	Damkar
21	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
22	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Trantibum-linmas	BPBD
23	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
24	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
25-28	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sosial	DINSOS-DALDUK-KB
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
29	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Sumber: Tim Penyusun, 2025

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Purworejo, terdapat 56 (lima puluh enam) target indikator utama pembangunan yang harus dicapai hingga tahun 2045. Tabel berikut ini ialah target indikator utama pembangunan Kabupaten Purworejo untuk lima tahun ke depan.



Tabel 4. 5 Target Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Purworejo

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Kondisi Awal	2025	Target					Keterangan di Cascading		Bidang Urusan
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	Tingkatan	Pemda/ Perangkat Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tingkat Kemiskinan	%	10,87	10,22 - 9,04	9,67 - 8,67	9,22 - 8,22	8,76 - 7,76	8,30 - 7,30	7,84 - 6,84	Tujuan Daerah	Pemda	-
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	11,51	11,30	11,00	10,80	10,50	10,23	10,00	Tujuan PD	DKPP	Pangan
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	86,22	86,25	86,28	86,32	86,35	86,38	86,41	Sasaran Daerah	Pemda	Pangan
4	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,64	75,89	76,14	76,34	76,64	77,09	77,34	Tujuan PD	Dinkesda	Kesehatan
5	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	7,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	Program PD	Dinkesda	Kesehatan
6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	14,90	14,40	13,90	13,40	12,90	12,40	11,90	Sasaran PD	Dinkesda	Kesehatan
7	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	51,00	90,00	90,63	91,25	91,88	92,50	93,13	Kegiatan PD	Dinkesda	Kesehatan
8	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	79,00	90,00	90,31	90,63	90,94	91,25	91,56	Program PD	Dinkesda	Kesehatan
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,31	98,28	98,40	98,50	98,60	98,70	98,80	Program PD	Dinkesda	Kesehatan
10	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang):											



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Kondisi Awal	2025	Target					Keterangan di Cascading		Bidang Urusan
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	Tingkatan	Pemda/ Perangkat Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Literasi Membaca SD/ Sederajat	%	71,99	74,49	76,99	79,49	81,99	84,49	84,49	Sasaran PD	Dindikbud	Pendidikan
	Literasi Membaca SMP/ Sederajat	%	82,61	83,71	84,81	85,91	87,01	88,11	88,11	Sasaran PD	Dindikbud	Pendidikan
	Numerasi SD/ Sederajat	%	57,57	60,47	63,37	66,27	69,17	72,07	74,97	Sasaran PD	Dindikbud	Pendidikan
	Numerasi SMP/ Sederajat	%	69,91	71,41	72,91	74,41	75,91	77,41	78,91	Sasaran PD	Dindikbud	Pendidikan
11	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	8,98	9,62	9,78	9,95	10,11	10,27	10,43	Tujuan PD	Dindikbud	Pendidikan
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,55	14,02	14,15	14,27	14,4	14,52	14,65	Tujuan PD	Dindikbud	Pendidikan
13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9,17	9,18	9,19	9,2	9,21	9,22	9,23	Tujuan PD	Dindikbud	Pendidikan
14	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	%	85,50	87,06	87,62	88,18	88,73	89,29	89,85	Sasaran PD	Dindikbud	Pendidikan
15	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	%	24,13	49,35	52,51	56,72	62,15	72,55	85,73	Program PD	Dindikbud	Pendidikan
16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak	%	29,27	31,25	32,99	34,95	36,68	38,28	40,00	Tujuan & Sasaran PD	Dindikbud	Kebudayaan



No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Kondisi Awal	2025	Target					Keterangan di Cascading		Bidang Urusan
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	Tingkatan	Pemda/Perangkat Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Benda (WBTB) yang Dilestarikan											
17	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	28,556	58,489	58,815	59,140	59,466	59,791	60,117	Kegiatan PD	Dindikbud	Kebudayaan
18	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	%	52,6	53,61	54,61	58,02	61,43	64,85	68,26	Program PD	Dindikbud	Kebudayaan
19	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	0,046	0,153	0,260	0,366	0,473	0,580	0,687	Kegiatan PD	Dinpusip	Perpustakaan
20	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	0	0	0	0	0	-	Bakesbang-pol	Kesbangpol
21	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,50	64,23	65,16	66,09	67,02	67,95	68,88	Tujuan PD	DINSOSDA LDUKKB	PPKB
22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,26	0,263 - 0,253	0,262 - 0,243	0,260 - 0,232	0,258 - 0,221	0,257 - 0,210	0,255 - 0,200	Tujuan PD	DPPAPMD	PPPA
23	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	20,06	20,3	20,49	20,67	20,86	21,04	21,23	Tujuan PD	Dinperintrasnaker	Perindustrian
24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,30	2,58	2,86	3,15	3,43	3,71	3,99	Tujuan PD	Dinporapar	Pariwisata
25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	148	265	277	289	300	312	324	Program PD	Dinporapar	Pariwisata
26	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1,47	2,47	3,15	3,21	3,41	3,51	3,62	-	-	KUKM
27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,02	2,03	2,04	2,05	2,06	2,07	2,08	Tujuan PD	DKUKMP	KUKM



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Kondisi Awal	2025	Target					Keterangan di Cascading		Bidang Urusan
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	Tingkatan	Pemda/ Perangkat Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Return on Asset (ROA) BUMD	%	4,52	4,94	5,36	5,78	6,20	6,62	7,04	Program PD	Setda	Setda
29	Disparitas Harga	%	+2,0	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 10	Program PD	DKUKMP	Perdagangan
30	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	26,14	26,68	26,84	27,00	27,16	27,32	27,48	Tujuan PD	DPMPTSP	Penanaman Modal
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,42	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	Sasaran PD	BPKPAD	Keuangan
32	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	4,93	5,33	5,35	5,38	5,40	5,42	5,44	Program PD	Setda	Setda
33	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	6,08	5,87	5,89	5,92	5,94	5,96	5,98	Program PD	Setda	Setda
34	Kapabilitas Inovasi	Angka	3,09	3,10	3,11	3,12	3,13	3,14	3,15	Tujuan PD	Bapperida	Litbang
35	Persentase Desa Mandiri	%	25,80	25,91	26,01	26,23	26,44	26,44	26,65	Tujuan & Sasaran PD	DPPPAPMD	Permasdes
36	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,89	3,11	3,10 - 2,83	2,93 - 2,63	2,84 - 2,54	2,75 - 2,45	2,66 - 2,36	Sasaran Daerah	Pemda	Setda
37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	62,87	65,07	66,07	67,06	68,06	69,05	70,05	Sasaran PD	DPPPAPMD	PPPA
38	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	45,95	40,53	41,30	42,07	42,83	43,60	44,37	Tujuan & Sasaran PD	Dinperintra nsnaker	Tenaga Kerja
39	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	73,66	83,28	83,63	83,98	84,33	84,68	85,03	-	-	Kominfo
40	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	68,16	68,43	68,51	68,58	68,66	68,74	78,29	Sasaran PD	Dinperkim-tan	Perkim



RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029



No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Kondisi Awal	2025	Target					Keterangan di Cascading		Bidang Urusan
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	Tingkatan	Pemda/ Perangkat Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten	%	63,28	66,53	66,54	66,55	66,56	71,15	71,16	-	-	PUPR
42	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	%	36,56	39,21	40,09	41,41	42,29	43,61	44,49	Program PD	Dinhub	Perhubungan
43	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	4,58	4,61	4,96	5,31	5,66	6,01	14,46	-	-	PUPR
44	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	29,21	34,85	39,01	43,16	47,32	51,47	51,47	-	-	PUPR
45	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	68,06	70,99	71,39	71,85	72,32	72,79	73,27	Tujuan & Sasaran PD	DPUPR	PUPR
46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	66,33	76,04	76,08	76,13	76,17	76,21	76,25	Sasaran Daerah	Pemda	LH
47	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah	%	26,43	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	42,50	Tujuan PD	DLHP	LH
48	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	114,09	110,16 - 109,00	108,53 - 106,88	106,89 - 104,76	105,26 - 102,64	103,63 - 100,52	101,99 - 98,41	Sasaran Daerah	Pemda	Trantibum- linmas
49	Penurunan Emisi GRK	Ton- CO2eq	202. 942.250	1.710. 784.09 0	1.913. 911.700	2.117. 039.30 0	2.320. 166.91 0	2.523. 294.51 0	2.726. 422.12 0	-	-	-
50	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	82,59	83	83,41	83,82	84,23	84,64	85,05	Sasaran Daerah	Pemda	-



No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Kondisi Awal	2025	Target					Keterangan di Cascading		Bidang Urusan
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	Tingkatan	Pemda/Perangkat Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,38	96,45	96,74	96,81	96,87	96,94	97,00	Program PD	Setda	Setda
52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,49	3,55	3,61	3,68	3,74	3,80	3,86	-	-	Kominfo
53	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,33	4,34	4,35	4,37	4,38	4,39	4,40	Tujuan PD	Setda	Setda
54	Indeks Integritas Nasional	Angka	76,61	77,42	78,24	79,05	79,87	80,68	81,49	Sasaran PD	Inspektorat Daerah	Pengawas-an
55	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten	Juta Rupiah	31,19	31,56	37,64	43,71	49,79	55,86	61,94	Tujuan Daerah	Pemda	-
56	Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	19,71	21,36	21,66	21,96	22,26	22,56	22,86	-	-	-

Sumber: Tim Penyusun, 2025

Keseluruhan (56) indikator utama pembangunan tersebut telah selaras dengan indikator utama pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional, merujuk dari RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045. Tabel di bawah ini menunjukkan keselarasan tersebut.

Tabel 4. 6 Daftar Keselarasan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

No	Kabupaten Purworejo		Nasional		Provinsi Jawa Tengah	
	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan
1	Tingkat Kemiskinan	%	8. Tingkat kemiskinan	%	8. Tingkat kemiskinan	%
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	43.ii. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	%	b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	%
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka			Indeks Ketahanan Pangan	Angka
4	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	1. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	1. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun
5	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	2. Kesehatan Ibu dan Anak: a. Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	2. Kesehatan Ibu dan Anak: a. Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup
6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	2.b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	2.b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%
7	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%
8	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	3.b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	3.b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	4. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%	4. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%
10	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang):		5. Hasil Pembelajaran:		5. Hasil Pembelajaran:	
	Literasi Membaca SD/ Sederajat	%	5.a) Rata-rata Nilai PISA a-i Membaca a-ii Matematika a-iii Sains 5.b) Rata-rata nilai asesmen nasional - Literasi membaca - Numerasi		5.a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi 5.b) Persentase satuan Pendidikan	%
	Literasi Membaca SMP/ Sederajat	%				
	Numerasi SD/ Sederajat	%				
	Numerasi SMP/ Sederajat	%				



No	Kabupaten Purworejo		Nasional		Provinsi Jawa Tengah	
	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan
					yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi	
11	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	5.c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	5.c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	5.d) Harapan Lama Sekolah	Tahun	5.d) Harapan Lama Sekolah	Tahun
13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%
			7. Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	7. Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%
14	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	%	-		-	
15	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	%	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka
16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	%				
17	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang				
18	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	%				
19	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%				
20	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	%	29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	%
			30. Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	30. Indeks Demokrasi Indonesia	Angka
			38. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka



No	Kabupaten Purworejo		Nasional		Provinsi Jawa Tengah	
	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan
21	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka
22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka
23	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	11. Produktivitas Industri dan Pertanian a) Rasio PDRB Industri Pengolahan b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan	%
24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	12. Pengembangan Pariwisata a) Rasio PDB Pariwisata b) Devisa Pariwisata	% miliar USD	12. Pengembangan Pariwisata a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	% Ribu Orang
25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang				
26	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	13. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	%	13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekraf Nasional	%
			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah	%	14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) i) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi ii) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi	%
			14.b) Rasio kewirausahaan	%	14.b) Rasio kewirausahaan daerah	%
27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	14.c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB	%	14.c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%
28	Return on Asset (ROA) BUMD	%	14.d) Return on Asset (ROA) BUM	%	14.d) Return on Asset (ROA) BUMN	%
29	Disparitas Harga	%	20. Biaya Logistik	% PDB	20. Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	%
			32. Tingkat Inflasi	%	32. Tingkat Inflasi	%
30	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDB	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB
			22. Ekspor Barang dan Jasa	% PDB	22. Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	31. Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB	%	31. Rasio Pajak terhadap PDB	%
32	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	33. Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan	%	33. Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan	%



No	Kabupaten Purworejo		Nasional		Provinsi Jawa Tengah	
	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan
			a) Aset Perbankan/PDB b) Aset Dana Pensiun/PDB c) Aset Asuransi/PDB d) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB		a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB b) Aset Dana Pensiun/PDRB c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi	
33	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	33.e) Total Kredit/PDB	%	33.d) Total Kredit/PDRB	%
			34. Inklusi Keuangan	%	34. Inklusi Keuangan	%
34	Kapabilitas Inovasi	Angka	17. Tingkat penguasaan IPTEK a) Pengeluaran Iptek dan Inovasi b) Peringkat Indeks Inovasi Global	% PDB Peringkat	17. Tingkat penguasaan IPTEK: - Kababilitas Inovasi	Angka
35	Persentase Desa Mandiri	%	23.e) Persentase Desa Mandiri	%	23.f) Persentase Desa Mandiri	%
36	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik a) Tingkat pengangguran terbuka b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	15.Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik a) Tingkat pengangguran terbuka b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%
37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	16. Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan	%	16. Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan	%
38	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%
			10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%
39	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	19. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	Peringkat	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka
40	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	23.c) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	23.d) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan d) Persentase jalan provinsi kondisi permukaan mantap e) Indeks pelayanan transportasi f) Persentase keterwujudan penataan ruang	%
41	Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten	%				
42	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	%				
43	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	42.b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	42.b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%
44	Akses Rumah Tangga Perkotaan	%	43.iii. Ketahanan Air		43.c) Ketahanan Air	



No	Kabupaten Purworejo		Nasional		Provinsi Jawa Tengah	
	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan
	terhadap Air Siap Minum Perpipaan		- Kapasitas Tampung Air - Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	m3/ kapita %	- Kapasitas air bak - Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan - Persentase kondisi baik infrastruktur tampung air kewenangan Provinsi	m3/ detik % %
f	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	43. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian menuju kedaulatan pangan 43.i. Ketahanan Energi - Indeks Ketahanan Energi	Angka	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan a) Ketahanan Energi - Konsumsi Listrik per kapita (kWh) - Intensitas energi primer (SBM/ RP milyar) - Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi - Persentase sungai kondisi baik kewenangan provinsi	kWh SBM/ Rp milyar Angka %
46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Angka	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka
			42. Kualitas Lingkungan Hidup a.i. Indeks Kualitas Udara (IKU) a.ii. Indeks Kualitas Air (IKA) a.iii. Indeks Kualitas Lahan (IKL) a.iv. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Angka	42. Kualitas Lingkungan Hidup a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka
47	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	42.c) Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	42.c) Pengelolaan Sampah - Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah - Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah	% % RT
48	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB	%	44. Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka
49	Penurunan Emisi GRK	Ton-CO2eq	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau a) Indeks Ekonomi Hijau c) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Angka %	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau b) Indeks Ekonomi Hijau d) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Angka %



No	Kabupaten Purworejo		Nasional		Provinsi Jawa Tengah	
	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan
			45. Persentase Penurunan Emisi GRK a) Kumulatif c) Tahunan	%	45. Persentase Penurunan Emisi GRK b) Kumulatif d) Tahunan	%
50	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	35. Asia Power Index (Diplomatic Influence)	Angka	35. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Kategori
			36. Asia Power Index (Military Capability)	Angka	36. Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah	Kategori
51	Indeks Reformasi Hukum	Angka	24. Indeks Materi Hukum	Angka	24. Indeks Reformasi Hukum	Angka
			28. Indeks Pembangunan Hukum	Angka	28. Indeks Pembangunan Hukum: - Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Angka
52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka
53	Indeks Pelayanan Publik	Angka	26. Indeks Pelayanan Publik	Angka	26. Indeks Pelayanan Publik	Angka
54	Indeks Integritas Nasional	Angka	27. Anti Korupsi ii. Indeks Integritas Nasional iii. Indeks Persepsi Korupsi	Angka	27. Indeks Integritas Nasional	Angka
55	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten	Juta Rupiah	23. Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	%	23. Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan b) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	%
56	Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%				

Sumber: Tim Penyusun, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, dan RPJPN Tahun 2025-2045

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang ditargetkan pada tahun 2025-2030 perlu dicapai dengan pelibatan lintas sektor. Dilakukan Manajemen Risiko (MR) serta penguatan peran Sekretariat Daerah sebagai koordinator pencapaian seluruh target-target pembangunan daerah. Sangat penting adanya sinergi program/ kegiatan/ sub kegiatan/ agenda antar unit kerja di perangkat daerah dalam rangka pengendalian pelaksanaan terhadap strategi pencapaian target pembangunan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan program Bupati dan Wakil Bupati Purworejo terpilih, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen RPJMD ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang menekankan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi daerah berbasis potensi lokal, peningkatan daya saing wilayah, penguatan infrastruktur dasar dan digital, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Purworejo juga menetapkan 7 (tujuh) program unggulan daerah yang dikenal sebagai “*Program Pitulungan*”, yaitu:

- a. Pinter Bocane,
- b. Sehat Penduduke
- c. Sejahtera Wargane,
- d. Alus Dalane,
- e. Rame Pasare,
- f. Ayem Petanine, dan
- g. Religius Masyarakat.

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, dirumuskanlah Indikator Kinerja Utama Daerah serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan serta Pengendalian dan Evaluasi

Kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Oleh karena itu seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

- dan menjadikan Renstra PD yang disusun sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun.
- Penjabaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dilakukan melalui penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo setiap tahun.
 - Evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purworejo dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Kinerja pembangunan daerah akan diukur berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini.
 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 - Bupati Purworejo wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.
 - DPRD Kabupaten Purworejo melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.
 - Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
 - Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

5.3. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah setelah RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 ini berakhir, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2030, dan selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2030. Apabila RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2030-2034 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan lima tahun kedua yaitu Tahun 2030-2034, serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005





RPJMD

Kabupaten Purworejo

Tahun 2025-2029

